# QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
# NOMOR 4 TAHUN 2025
# TENTANG
# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
# KABUPATEN PIDIE JAYA
# TAHUN 2025 - 2029



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**
**TAHUN 2025**

BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung tercapaianya Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kabupaten Pidie Jaya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonisia Nomor 459 tahun 2018);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
24. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);

25. Qanun ...

25. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 151);
26. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
27. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
28. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
29. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025-2029.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.

6. Perangkat ...

6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPK Pidie Jaya adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, yang selanjutnya disebut RPJMA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Pemerintah Aceh dengan berpedoman pada RPJPA serta memperhatikan RPJMN.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat dengan RPJMK adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPK, RPJMA, dan RPJM Nasional.
13. Rencana Strategis Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PK adalah dokumen perencanaan Perangkat Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Pidie Jaya, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi RPJMK Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
16. Misi RPJMK Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMK Tahun 2025-2029.
17. Tujuan RPJMK Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPK Tahun 2025-2045, RPJMA Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
18. Sasaran RPJMK Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMK.
19. Strategi RPJMK Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran RPJMK.
20. Arah Kebijakan RPJMK Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMK.
21. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMK yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.

22. Permasalahan ...

22. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
24. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMK sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
27. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

## BAB II
## MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMK adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah yang terdiri dari pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan cita-cita masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan Kepala Daerah terpilih, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak dengan mengacu kepada RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029.

### Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMK antara lain sebagai berikut:

a. merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan, sehingga dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Periode 2025-2029;
b. merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan pembangunan daerah Tahun 2025-2029;
c. merumuskan dan menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2029; dan
d. merumuskan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja tahunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 4 ...

Pasal 4

(1) RPJMK Pidie Jaya disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PMBANGUNAN DAERAH
BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB V : PENUTUP
(2) RPJMK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran qanun ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMK.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMK

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMK dapat dilakukan apabila:
a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMK tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
b. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar;
c. sisa masa berlaku RPJMK tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Perubahan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPK dan Perubahan Renstra Perangkat Kabupaten.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Qanun kabupaten.

Pasal 8

(1) Dalam hal pelaksanaan RPJMK Tahun 2025-2029 target sasaran kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka dapat dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja baru.
(2) Dalam hal pelaksanaan RPJMK Tahun 2025-2029 target sasaran kinerja yang ditetapkan sulit tercapai, maka dapat dirumuskan kembali penyesuaian besaran target sasaran kinerja baru.
(3) Target sasaran kinerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 4 Desember 2025 M
13 Jumadil Akhir 1447 H

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 4 Desember 2025 M
13 Jumadil Akhir 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

MUNAWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH : (4/151/2025);

PENJELASAN

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025-2029

I. UMUM

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam Tahun 2025-2029. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMK harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta RPJM Aceh Tahun 2025-2029. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMK disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan.

b. RPJMK Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi: "Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya yang bersyariat, berkeadilan, maju dan berkelanjutan" Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah, dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka disusunlah RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029. Adapun maksud dari penyusunan dokumen Qanun tentang RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan pedoman

Penyusunan ...

penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan perumusan prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja, sasaran, lokasi, total kebutuhan, target kinerja, dan indikasi pendanaan selama Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan dihimpun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 4

LAMPIRAN

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

KABUPATEN PIDIE JAYA

TAHUN 2025-2029

# DAFTAR ISI


**DAFTAR ISI** ---------- **i**
**DAFTAR TABEL** ---------- **iv**
**DAFTAR GAMBAR** ---------- **x**
**DAFTAR SINGKATAN** ---------- **xiii**
**BAB I PENDAHULUAN** ---------- **1**
1.1 Latar Belakang ---------- 1
1.2 Dasar Hukum ---------- 5
1.3 Hubungan Antar Dokumen ---------- 9
1.4 Maksud dan Tujuan ---------- 11
1.5 Sistematika Penulisan ---------- 12

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH** ---------- **15**
2.1. Aspek Geografi dan Demografi ---------- 15
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah ---------- 15
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ---------- 15
2.1.1.2. Kondisi Topografi ---------- 17
2.1.1.3. Kondisi Geologi ---------- 18
2.1.1.4. Hidrologi ---------- 19
2.1.1.5. Klimatologi ---------- 28
2.1.1.6. Pemanfaatan Ruang ---------- 30
2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana ---------- 32
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam ---------- 39
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ---------- 40
2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 42
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas ---------- 44
2.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim -- 47
2.1.7. Demografi ---------- 49
2.1.7.1 Jumlah Penduduk ---------- 49
2.1.7.2 Laju Pertumbuhan Penduduk ---------- 49
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ---------- 53
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi ---------- 54
2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi ---------- 54
2.2.1.2. Tingkat Kemiskinan ---------- 58
2.2.1.3. PDRB Perkapita ---------- 63
2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka ---------- 65
2.2.1.5. Indeks Gini ---------- 67
2.2.1.6. Indek Pembangunan Manusia (IPM) -------- 68
2.2.2. Kesehatan Untuk Semua ---------- 70
2.2.2.1 Usia Harapan Hidup ---------- 71
2.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat ---------- 72
2.2.2.3 Prevalensi Stunting ---------- 76
2.2.3. Pendidikan Berkualitas dan Merata ---------- 77
2.2.3.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah ---------- 77
2.2.3.2 Angka Harapan Lama Sekolah ---------- 79
2.2.3.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 80
2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif ---------- 81
2.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ---------- 82
2.2.4.2 Kesejahteraan Sosial ---------- 82
2.2.5. Beragama, Maslahat dan Berkebudayaan Maju ------ 84
2.2.5.1 Indeks Pembangunan Syariah ---------- 85

2.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan---------- 92
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif---------- 93
2.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).---------- 93
2.2.6.2 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga --- 95
2.3.Aspek Daya Saing Daerah---------- 98
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia---------- 98
2.3.1.1 Tingkat Ketergantungan---------- 99
2.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi---------- 100
2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan ---------- 100
2.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum ---------- 102
2.3.2.3 Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - 103
2.3.2.4 Rasio Kewirausahaan---------- 104
2.3.2.5 Indeks Inovasi Daerah---------- 105
2.3.3 Penerapan ekonomi Hijau dan Biru ---------- 105
2.3.3.1 Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB---------- 106
2.3.4 Transformasi Digital ---------- 107
2.3.7.1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) ---------- 108
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global---------- 109
2.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Broto (PMTB)--- 110
2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi---------- 111
2.3.6.1 Infrastruktur Wilayah ---------- 112
2.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak---------- 117
2.3.6.3 Persentase Desa Mandiri---------- 118
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro---------- 121
2.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB--------- 121
2.3.7.2 Tingkat Inflasi---------- 122
2.4.Aspek Pelayanan Umum---------- 123
2.4.1. Regulasi dan Tatakelola yang Berintegritas dan Adaptif---------- 124
2.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum ---------- 124
2.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ---------- 125
2.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik ---------- 126
2.4.1.4. Indeks Integritas Nasional ---------- 127
2.4.1.5. Indeks Reformasi Birokrasi ---------- 129
2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial ---------- 130
2.4.2.1. Penegakan Qanun---------- 130
2.4.2.2. Persentase Capaian Aksi HAM ---------- 131
2.4.2.3. Angka Kriminalitas---------- 132
2.4.2.4. Jumlah Demonstrasi---------- 133
2.4.2.5. Keamanan dan ketertiban ---------- 133
2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan ---------- 134
2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah---------- 134
2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah--------- 135

2.4.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar ---------- 135
2.4.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar ---------- 173
2.4.4.3. Layanan Urusan Pilihan ---------- 210
2.4.4.4. Penunjang Urusan ---------- 237
2.4.4.5. Layanan Urusan Keistimewaan ---------- 250
2.4.5. Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2020-2024 ---------- 269
2.5. Gambaran Keuangan Daerah ---------- 286
2.5.1. Realisasi APBK Pidie Jaya Tahun 2020-2024 --------- 287
2.5.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu --------- 313
2.5.3. Proyeksi Keuangan Daerah ---------- 320
2.6. Permasalahan Dan Isu Strategis ---------- 331
2.6.1. Permasalahan Pembangunan ---------- 331
2.6.2. Isu Strategis Daerah ---------- 339

**BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ---------- 345**
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ---------- 345
3.1.1 Visi dan Misi ---------- 345
3.1.1.1 Keterkaitan Visi dan Misi ---------- 348
3.1.1.2 Penyelarasan dengan Visi dan Misi RPJPK Pidie Jaya, RPJMA dan RPJMN ---------- 348
3.1.2 Tujuan dan Sasaran ---------- 350
3.2 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah ---------- 355
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMK Tahun 2025-2029 ---------- 355
3.2.2 Program Prioritas Daerah untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMK Tahun 2025-2029 ---------- 372
3.2.3 Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Strategis Nasional ---------- 392
3.2.3.1. Pembangunan Kewilayahan yang mendukung Kawasan Swasembada Pangan di Pesisir Utara Aceh ---------- 392
3.2.3.2. Sinkronisasi Pembangunan Kewilayahan Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya ---------- 401

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ---------- 413**
4.1 Program Perangkat Daerah ---------- 413
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ---------- 458

**BAB V PENUTUP ---------- 489**
5.1 Pedoman Transisi ---------- 489
5.2 Kaidah Pelaksanaan ---------- 490
5.3 Analisis Manajemen Resiko ---------- 490

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.1. | Wilayah Administratif Kabupaten Pidie Jaya---------- | 16 |
| Tabel 2.2. | Kondisi Kelerengan Kabupaten Pidie Jaya---------- | 17 |
| Tabel 2.3. | Data Panjang Sungai dalam Kabupaten Pidie Jaya ---------- | 20 |
| Tabel 2.4. | Potensi Cekungan Air Tanah di Kabupaten Pidie Jaya ------ | 28 |
| Tabel 2.5. | Data Curah Hujan dan Hari Hujan Stasion SMPK BPN Meureudu Selama Kurun Waktu 10 Tahun ---------- | 29 |
| Tabel 2.6. | Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pidie Jaya ---------- | 31 |
| Tabel 2.7. | Jumlah Korban Jiwa dan Pengungsi Pasca Tsunami di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005 ---------- | 34 |
| Tabel 2.8. | Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Daya Dukung Air Kabupaten Pidie Jaya ------ | 41 |
| Tabel 2.9. | Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Kecamatan ---------- | 42 |
| Tabel 2.10. | Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya per Kecamatan Tahun 2020-2024 ---------- | 49 |
| Tabel 2.11. | Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 ---------- | 50 |
| Tabel 2.12. | Kepadatan Penduduk, Rumah Tangga, dan Jumlah Jiwa/RT di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 ---------- | 50 |
| Tabel 2.13. | Mayoritas Profesi/Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 ---------- | 51 |
| Tabel 2.14. | PDRB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Berlaku 2020 - 2024 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) ---------- | 55 |
| Tabel 2.15. | Jumlah Rumah Tangga (RT) Menurut Status Kesejahteraan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Berdasarkan Desil (D1,D2,D3)---------- | 61 |
| Tabel 2.16. | Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- | 65 |
| Tabel 2.17. | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023-2024 ---------- | 80 |
| Tabel 2.18. | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Jaya Tahun 202-2024---------- | 82 |
| Tabel 2.19. | Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020–2024 ---------- | 83 |
| Tabel 2.20. | Dasar Regulasi Dimensi Indeks Pembangunan Syariah----- | 85 |
| Tabel 2.21. | Capaian Indeks Pembangunan Syariah beserta dimensinya di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 dan 2024---------- | 87 |
| Tabel 2.22. | Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- | 104 |
| Tabel 2.23. | Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- | 113 |
| Tabel 2.24. | Pelanggan PDAM Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- | 114 |
| Tabel 2.25. | Pengguna Listrik di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020–2024 ---------- | 115 |
| Tabel 2.26. | Perbandingan Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Sesuai Qanun RTRW Tahun 2014 s.d 2034 Kabupaten Pidie Jaya---------- | 116 |
| Tabel 2.27. | Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- | 118 |

Tabel 2.28. Rasio Pajak Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 121
Tabel 2.29. Perbandingan Nilai Inflasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024 dengan Nasional, Provinsi Aceh, Kota Lhokseumawe ---------- 123
Tabel 2.30. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh Tahun 2022-2024 ---------- 125
Tabel 2.31. Cakupan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 131
Tabel 2.32. Jumlah kasus kriminalitas dan penyelesaian kasus di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 ---------- 132
Tabel 2.33. Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 133
Tabel 2.34. Jumlah Tindak Pidana Menonjol di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019–2024 ---------- 133
Tabel 2.35. Angka Partisipasi Murni (APM) Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020–2024 ---------- 136
Tabel 2.36. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 137
Tabel 2.37. Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 ---------- 138
Tabel 2.38. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 140
Tabel 2.39. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020–2024 ---------- 141
Tabel 2.40. Jumlah Guru Bersertifikasi dan Guru Sarjana di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 143
Tabel 2.41. Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020–2024 ---------- 145
Tabel 2.42. Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020–2024 ---------- 146
Tabel 2.43. Indikator Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 148
Tabel 2.44. Indikator Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 151
Tabel 2.45. Rasio Puskesmas, Polindes dan Pustu di Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 152
Tabel 2.46. Status Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 ---------- 153
Tabel 2.47. Rasio Dokter di kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 -- 154
Tabel 2.48. Standar Ketenagaan Puskesmas Nasional ---------- 155
Tabel 2.49. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 - 2024 ---------- 157
Tabel 2.50. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi di Kabupaten Tahun 2020-2024 ---------- 158
Tabel 2.51. Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 ---------- 161
Tabel 2.52. Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 ---------- 161
Tabel 2.53. Proyeksi Kebutuhan Air Hingga Tahun 2031 ---------- 164
Tabel 2.54. Hasil Penilaian Kinerja Perumda Tirta Mon Krueng Meureudu Tahun 2022-2023 ---------- 166
Tabel 2.55. Kondisi Kawan Kumuh di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 ---------- 169

Tabel 2.56. Rasio Jumlah Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020–2024 ---------- 170
Tabel 2.57. Cakupan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 171
Tabel 2.58. Kejadian dan Penanganan Bencana di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 172
Tabel 2.59. Jumlah Sarana Sosial yang Tersedia di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020 – 2024 ---------- 173
Tabel 2.60. Indikator Ketenagakerjaan Pidie Jaya 2020 - 2024 ---------- 173
Tabel 2.61. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024---------- 175
Tabel 2.62. Data Desa Rawan Pangan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 ---------- 176
Tabel 2.63. Jumlah KWT Aktif di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 ---------- 177
Tabel 2.64. Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 ---------- 178
Tabel 2.65. Cakupan Pelayana Bidang Pertanahan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2024---------- 180
Tabel 2.66. Volume dan Sarana Persampahan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020- 2024 ---------- 182
Tabel 2.67. Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 183
Tabel 2.68. Jumlah KTP dan Akta yang di Terbitkan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 185
Tabel 2.69. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 185
Tabel 2.70. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 186
Tabel 2.71. Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 188
Tabel 2.72. Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020-2024 ---------- 189
Tabel 2.73. Sarana dan Prasarana Perhubungan yang telah tersedia di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 ---------- 191
Tabel 2.74. Jumlah Koperasi, UKM dan UMKM di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020–2024 ---------- 193
Tabel 2.75. Perkembangan Nilai Investasi Tahun 2020-2024 di Kabupaten Pidie Jaya (PMDN) ---------- 195
Tabel 2.76. Jenis-jenis Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2021 ------ 197
Tabel 2.77. Jenis-jenis Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022-2024 ------ 198
Tabel 2.78. Daftar Kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 - 2024 ---------- 201
Tabel 2.79. Jumlah Sarana dan Olahraga di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 ---------- 203
Tabel 2.80. Peringkat Keikutsertaan POPDA Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2008 s.d 2024 ---------- 203
Tabel 2.81. Capaian Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 s.d 2024 ---------- 204
Tabel 2.82. Indikator Urusan Persandian Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 s.d 2024---------- 205
Tabel 2.83. Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Pidie Jaya. ---- 206

Tabel 2.84. Jenis Cagar Budaya di Kabupaten Pidie Jaya ---------- 206
Tabel 2.85. Jenis Objek diduga Cagar Budaya (ODCB) di Kabupaten Pidie Jaya ---------- 207
Tabel 2.86. Jumlah Pengunjung dan Kartu/Anggota Perpustakaan 2019-2024---------- 208
Tabel 2.87. Luas Area Tambak dan Petani Tambak di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 ---------- 212
Tabel 2.88. Rekapitulasi Data Produksi Budidaya Perikanan Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 -- 212
Tabel 2.89. Jumlah Nelayan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 213
Tabel 2.90. Jumlah Alat Tangkap Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 ---------- 214
Tabel 2.91. Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 215
Tabel 2.92. Rekapan Panglima Laot Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 ---------- 216
Tabel 2.93. Luas Lahan dan Jumlah Petani Garam di Kabupaten Pidie Jaya ---------- 217
Tabel 2.94. Jumlah Produksi Garam di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d. 2024 ---------- 218
Tabel 2.95. Jenis dan Lokasi Objek Wisata di Kabupaten Pidie Jaya --- 220
Tabel 2.96. Potensi Objek Wisata Kabupaten Pidie Jaya dan Jarak Tempuh dari Kecamatan Kelokasi Wisata---------- 221
Tabel 2.97. Luas Baku Lahan Sawah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024---------- 222
Tabel 2.98. Luas Tanam dan Luas Panen Komoditi Pangan di Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 222
Tabel 2.99. Produksi Padi dan Bahan Pangan Utama Lainnya di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 223
Tabel 2.100. Cakupan Pembinaan Kelompok Tani Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 225
Tabel 2.101. Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 225
Tabel 2.102. Jumlah Populasi Ternak Ruminansia Besar Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 227
Tabel 2.103. Produksi Hasil Perternakan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 228
Tabel 2.104. Sarana Prasarana Pendukung Usaha Peternakan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 229
Tabel 2.105. Jumlah Kelompok Terak di Kabupaten Pidie Jaya---------- 230
Tabel 2.106. Penanganan Penyakit Hewan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 230
Tabel 2.107. PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 232
Tabel 2.108. Data Sektor Perdagangan Per Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025---------- 233
Tabel 2.109. Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024---------- 235
Tabel 2.110. Capaian Indikator Transmigrasi di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 236
Tabel 2.111. Indikator Keuangan Daerah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024---------- 239
Tabel 2.112. Kondisi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 242

Tabel 2.113. Kinerja Pengawasan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 244
Tabel 2.114. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 245
Tabel 2.115. Jumlah Qanun yang Disahkan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 247
Tabel 2.116. Kinerja Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 248
Tabel 2.117. Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 253
Tabel 2.118. Jumlah Mesjid Dan Meunasah Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024 ---------- 255
Tabel 2.119. Jumlah Majelis Taklim dan TPA yang Mendapat Biaya Operasional Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 256
Tabel 2.120. Jumlah Guru Santri TPA Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 256
Tabel 2.121. Capaian Kinerja Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 ---------- 257
Tabel 2.122. Jumlah Penerimaan dan Realisasi Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 dan Tahun 2024 ---------- 258
Tabel 2.123. Capaian Kinerja Indikator Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 261
Tabel 2.124. Jumlah Dayah, Guru dan Santri di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 265
Tabel 2.125. Jumlah Dayah Terakreditasi Berdasarkan Tipe di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 266
Tabel 2.126. Rincian Dayah Terakreditasi Berdasarkan Tipe, Jumlah Guru dan Santri di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 266
Tabel 2.127. Hasil analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 271
Tabel 2.128. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 289
Tabel 2.129. Neraca Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 --- 308
Tabel 2.130. Perkembangan Rasio Likuiditas dan Solvabiltas Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 313
Tabel 2.131. Total Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 318
Tabel 2.132. Defisit Riil Dan Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 319
Tabel 2.133. Proyeksi Kerangka Pendapatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026-2030 ---------- 322
Tabel 2.134. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029 ---------- 330
Tabel 2.135. Rumusan Kesimpulan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029 ---------- 343
Tabel 3.1. Kaitan Visi dan Misi RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2030 - 348
Tabel 3.2. Penyelarasan Visi dan Misi RPJMK, RPJMA dan RPJMN Tahun 2025-2029 ---------- 349
Tabel 3.3. Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2030 ---------- 351

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 3.4. | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029 ---------- | 358 |
| Tabel 3.5. | Pentahapan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026-2030---------- | 369 |
| Tabel 3.6. | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran dengan Program Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029---------- | 373 |
| Tabel 3.7. | Penyelarasan Pembangunan Kewilayahan Nasional dan Kabupaten Pidie Jaya ---------- | 394 |
| Tabel 3.8. | Dukungan Program Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Utama Nasional Tahun 2025-2029---------- | 396 |
| Tabel 3.9. | Dukungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terhadap Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029---------- | 398 |
| Tabel 3.10. | Sinkronisasi Strategi Pembangunan Kewilayahan Nasional, Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya ---------- | 403 |
| Tabel 3.11. | Integrasi Sasaran, Indikator, Dan Target Pembangunan Kewilayahan Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya ---------- | 408 |
| Tabel 3.12. | Indikator Keberhasilan Pengembangan Kawasan Jagung di Kabupaten Pidie Jaya ---------- | 411 |
| Tabel 4.1 | Program Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026-2030---------- | 414 |
| Tabel 4.2. | Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2030---------- | 459 |
| Tabel 4.3. | Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2030---------- | 461 |

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan---------- 9
Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Pidie Jaya ---------- 16
Gambar 2.2. Peta delapan ruas sungai di Kabupaten Pidie Jaya --------- 20
Gambar 2.3. Peta Sungai Krueng Lueng Putu di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya ---------- 21
Gambar 2.4. Peta Sungai Krueng Cubo di Kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya. ---------- 21
Gambar 2.5. Peta Sungai Krueng Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya -- 22
Gambar 2.6. Peta Sungai Krueng Beuracan di Kecamatan Trienggadeng dan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya ---------- 23
Gambar 2.7. Sungai Krueng Meureudu di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya ---------- 24
Gambar 2.8. Peta Sungai Krueng Ulim di Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya. ---------- 24
Gambar 2.9. Peta Sungai Krueng Jeulanga di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya---------- 25
Gambar 2.10. Peta Sungai Krueng Kiran di Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya---------- 26
Gambar 2.11. Peta Distribusi pusat gempa bumi tanggal 7-13 Desember 2016 di Kabupaten Pidie Jaya ---------- 33
Gambar 2.12. Wilayah Rawan Bencana Tsunami Aceh ---------- 34
Gambar 2.15. Peta Daerah Resiko Tanah Longsor di Kabupaten Pidie Jaya ---------- 37
Gambar 2.16. Indeks Ketahanan Pangan Prov. Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 43
Gambar 2.17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Prov. Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 44
Gambar 2.18. Indeks Kualitas Air Prov. Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 45
Gambar 2.19. Indeks Kualitas Udara Prov. Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 46
Gambar 2.20. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Prov. Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 46
Gambar 2.21. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Prov. Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020-2024---------- 47
Gambar 2.22. Indek Risiko Bencana Kab. Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 ---------- 48
Gambar 2.23. Indek Ketahanan Daerah Kab. Pidie Jaya Tahun 2021-2024 ---------- 48
Gambar 2.24. Prosentase Lapangan Usaha Bagi Penduduk yang Bekerja Tahun 2024 ---------- 53
Gambar 2.25. Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 ---------- 56
Gambar 2.26. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 - 57
Gambar 2.27. Perbandingan Angka Kemiskinan Pidie Jaya Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020 s.d 2024 (Persentase)---------- 58
Gambar 2.28. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem 2021 s.d 2024---------- 60
Gambar 2.29. Rehabilitasi RTLH dan Pembangunan Rumah Dhuafa Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024 (Unit) --------- 62

Gambar 2.30. PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Pidie Jaya 2020-2024 (Juta Rupiah) ---------- 63
Gambar 2.31. Perbandingan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional (ADHB) Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah), ---------- 64
Gambar 2.32. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024---------- 66
Gambar 2.33. Indeks Gini Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ---------- 67
Gambar 2.34. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024---------- 69
Gambar 2.35. Perbandingan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 ---------- 71
Gambar 2.36. Indeks Keluarga Sehat Kab. Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024---------- 75
Gambar 2.37. Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 ---------- 76
Gambar 2.38. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020 s.d 2024 ---------- 78
Gambar 2.39. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 ---------- 79
Gambar 2.40. Nilai Dimensi Aqidah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh---- 88
Gambar 2.41. Nilai Dimensi Melek Al-Quran Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh---------- 89
Gambar 2.42. Nilai Dimensi Manajemen Mesjid/Meunasah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh ---------- 90
Gambar 2.43. Nilai Dimensi Hukum Jinayat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh---------- 91
Gambar 2.44. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Aceh ---------- 93
Gambar 2.45. Perbandingan IPA, IPHA dan IPKA Kab. Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2023 ---------- 94
Gambar 2.46. Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2024---------- 95
Gambar 2.47. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 97
Gambar 2.48. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024---------- 98
Gambar 2.49. Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024 ---------- 100
Gambar 2.50. Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024. - 101
Gambar 2.51. Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 s.d 2023.---------- 102
Gambar 2.52. Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024. ---------- 103
Gambar 2.53. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020-2024---------- 105

Gambar 2.54. Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024. ---------- 106
Gambar 2.55. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 s.d 2024 ---------- 108
Gambar 2.56. Pembentukan Modal Tetap Broto (PMTB) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 110
Gambar 2.57. Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 117
Gambar 2.58. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023-2024 ---------- 124
Gambar 2.59. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2024 ---------- 127
Gambar 2.60. Indeks Integritas Nasional Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2024 ---------- 128
Gambar 2.61. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 129
Gambar 2.62. Persentase Capaian Aksi HAM Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2024 ---------- 132
Gambar 2.63. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024. ---------- 134
Gambar 2.64. Perkembangan Angka Gizi Buruk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 156
Gambar 2.65. Perbandingan Jalan Beraspal dalam Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 (Km) ---------- 160
Gambar 2.66. Surplus/Cadangan Beras di Kabupaten Pidie Jaya (Ton) 2019-2024 ---------- 179
Gambar 2.67. Capaian Kinerja Indikator Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ---------- 263

# DAFTAR SINGKATAN

| SINGKATAN DAN AKRONIM | | |
|---|---|---|
| ADHB | : | Atas Dasar Harga Berlaku |
| ADHK | : | Atas Dasar Harga Konstan |
| AKB | : | Angka Kematian Bayi |
| AKI | : | Angka Kematian Ibu |
| AKN | : | Akademi Komunitas Negeri |
| ALSINTAN | : | Alat dan Mesin Pertanian |
| AMDAL | : | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan |
| APBA | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh |
| APBD | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APBK | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten |
| APBN | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| APK | : | Angka Partisipasi Kasar |
| APBK | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten |
| APH | : | Aparat Penegak Hukum |
| APIP | : | Aparat Pengawasan Intern Pemerintah |
| APM | : | Angka Partisipasi Murni |
| APS | : | Angka Partisipasi Sekolah |
| ASI | : | Air Susu Ibu |
| ASN | : | Aparatur Sipil Negara |
| BPN | : | Badan Pertanahan Nasional |
| B3 | : | Bahan Berbahaya Beracun |
| Balita | : | Bayi Lima Tahun |
| Banpol PP/WH | : | Bantuan Polisi Pamong Praja / Wilayatul Hisbah |
| BAPPEDA | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Bappenas | : | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| BAZNAS | : | Badan Amil Zakat Nasional |
| BBM | : | Bahan Bakar Minyak |
| BKKBN | : | Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional |
| BKPSDM | : | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| BLUD | : | Badan Layanan Umum Daerah |
| BMG | : | Baitul Mal Gampong |
| BNPB | : | Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
| BOP PAUD | : | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini |
| BOS | : | Bantuan Operasional Sekolah |
| BPBA | : | Badan Penanggulangan Bencana Aceh |
| BPBD | : | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| BPJS | : | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial |
| BPJPH | : | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal |
| BPK | : | Badan Pemeriksa Keuangan |
| BPKK | : | Badan Pengelola Keuangan Kabupaten |
| BPKP | : | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| BPS | : | Badan Pusat Statistik |
| BPU | : | Bukan Penerima Upah |
| BRIN | : | Badan Riset dan Inovasi Nasional |
| BUMD | : | Badan Usaha Milik Daerah |

| SINGKATAN DAN AKRONIM | | |
|---|---|---|
| BUMDes | : | Badan Usaha Milik Desa |
| BUMN | : | Badan Usaha Milik Negara |
| CAT | : | Cekungan Air Tanah |
| COVID-19 | : | *Corona Virus Disease 2019* |
| CPP | : | Cadangan Pangan Pemerintah |
| CSR | : | *Corporate Social Responsibility* |
| D3TLH | : | Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup |
| DAS | : | Daerah Aliran Sungai |
| DAU | : | Dana Alokasi Umum |
| DAK | : | Dana Alokasi Khusus |
| DBH | : | Dana Bagi Hasil |
| DDA | : | Daya Dukung dan Daya Tampung Air |
| DID | : | Dana Insentif Daerah |
| Dinkes | : | Dinas Kesehatan |
| DINSOS P3A | : | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| DISBUNNAK | : | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| DISDIKBUD | : | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| DISDUKCAPIL | : | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| DISHUB | : | Dinas Perhubungan |
| DISKOMINFO | : | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| DISPERINDAGKOP | : | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koprasi |
| DISPORAPAR | : | Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata |
| DISTANPANGAN | : | Dinas Pertanian dan Pangan |
| DKP | : | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| DLH | : | Dinas Lingkungan Hidup |
| DLHK | : | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan |
| DO | : | Oksigen Terlarut |
| DOKA | : | Dana Otonomi Khusus Aceh |
| DPA | : | Dokumen Pelaksanaan Anggaran |
| DPMG | : | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| DPMPTSP NAKERTRANS | : | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,. Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| DPRD | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| DPRK | : | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten |
| DTSEN | : | Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional |
| ESS | : | *Energy Storage System* |
| EWS | : | *Early Warning System* |
| Gapoktan | : | Gabungan Kelompok Tani |
| GRK | : | Gas Rumah Kaca |
| HAM | : | Hak Asasi Manusia |
| HLS | : | Harapan Lama Sekolah |
| HPK | : | Hari Pertama Kehidupan |
| IB | : | Inseminasi Buatan |
| iBANGGA | : | Indeks Pembangunan Keluarga |
| ICU | : | Intensive Care Unit |
| IDG | : | Indeks Pemberdayaan Gender |
| IDM | : | Indeks Desa Mandiri |
| IDSD | : | Indeks Daya Saing Daerah |
| IGA | : | *Innovation Government Award* |

| SINGKATAN DAN AKRONIM | | |
|---|---|---|
| IHK | : | Indeks Harga Konsume |
| IIN | : | Indeks Integritas Nasional |
| IKA | : | Indeks Kualitas Air |
| IKAL | : | Indeks Kualitas Air Laut |
| IKD | : | Indeks Ketahanan Daerah |
| IKD | : | Indeks Kinerja Daerah |
| IKG | : | Indeks Ketimpangan Gender |
| IKK | : | Ibukota Kota |
| IKL | : | Indeks Kualitas Lahan |
| IKLH | : | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| IKM | : | Industri Kecil Menengah |
| IKS | : | Indeks Keluarga Sehat |
| IKTL | : | Indeks Kualitas Tutupan Lahan |
| IKU | : | Indeks Kualitas Udara |
| IKU | : | Indikator Kinerja Utama |
| IMB | : | Izin Mendirikan Bangunan |
| IMDI | : | Indeks Masyarakat Digital Indonesia |
| IPA | : | Indeks Perlindungan Anak |
| IPA | : | Instalasi Pengolahan Air |
| IPAL | : | Instalasi Pembuangan Air Limbah |
| IPG | : | Indeks Pembangunan Gender |
| IPH | : | Indeks Perkembangan Harga |
| IPHA | : | Indeks Pemenuhan Hak Anak |
| IPK | : | Indeks Pembangunan Kebudayaan |
| IPKA | : | Indeks Perlindungan Khusus Anak |
| IPLM | : | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat |
| IPM | : | Indeks Pembangunan Manusia |
| IPP | : | Indeks Pelayanan Publik |
| IPS | : | Indeks Pembangunan Syariah |
| IPTEK | : | Ilmu pengetahuan dan Teknologi |
| IPTEKIN | : | Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi |
| IRB | : | Indeks Risiko Bencana |
| IRB | : | Indeks Reformasi Birokrasi |
| IRH | : | Indeks Reformasi Hukum |
| ISPU | : | Indeks Standar Pencemar Udara |
| IUI | : | Izin Usaha Industri |
| IUMK | : | Izin Usaha Mikro Kecil |
| IUP | : | Indikator Utama Pembangunan |
| JAKON | : | Jasa Konstruksi |
| JITUPASNA | : | Pengkajian Kebutuhan Pascabencana |
| JKK | : | Jaminan Kecelakaan Kerja |
| JKM | : | Jaminan Kematian |
| JKN | : | Jaminan Kesehatan Nasional |
| JSP | : | Jamban Sehat Permanen |
| JSSP | : | Jamban Sehat Semi Permanen |
| KARS | : | Komisi Akreditasi Rumah Sakit |
| KAT | : | Komunitas Adat Terpencil |
| KB | : | Keluarga Berencana |
| KDH | : | Kepala Daerah |
| Kemnaker | : | Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia |

| SINGKATAN DAN AKRONIM | | |
|---|---|---|
| Kemendagri | : | Kementerian Dalam Negeri |
| Kemendes PDTT | : | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |
| Kemendikbudristek | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| Kemenkeu | : | Kementerian Keuangan |
| Kemenkes | : | Kementerian Kesehatan |
| Kemenko PMK | : | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
| Kemen PPPA | : | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Kemenpan RB | : | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| Kemensos | | Kementerian Sosial |
| KESBANGPOL | : | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| KJSU | : | Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi |
| KK | : | Kepala Keluarga |
| KLHK | : | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| KLHS | : | Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| KONI | : | Komite Olahraga Nasional Indonesia |
| KOWANI | : | Kelompok Kerja Sama Wanita |
| KPK | : | Komisi Pemberantasan Korupsi |
| KP3A | : | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| KRB | : | Kawasan Rawan Bencana |
| KRP | : | kebijakan, rencana, dan/atau program |
| KSSP | : | Kawasan Sentra Produksi Pangan |
| KSPPS | : | Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah |
| KTP | : | Kartu Tanda Penduduk |
| KUR | : | Kredit Usaha Rakyat |
| KWT | : | Kelompok Wanita Tani |
| LKS | : | Lembaga Keuangan Syariah |
| LKjIP | : | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
| LPM | : | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat |
| LPPD | : | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| LSM | : | Lembaga Swadaya Masyarakat |
| MAA | : | Majelis Adat Aceh |
| MBR | : | Masyarakat Berpenghasilan Rendah |
| MCK | : | Mandi Cuci Kakus |
| MCP | : | *Monitoring Centre for Prevention* |
| MDGs | : | Millenium Development Goals |
| MHA | : | Masyarakat Hukum Adat |
| MI | : | Madrasah Ibtidaiyah |
| MoU | : | *Memorandum of Understanding* |
| MPU | : | Majelis Permusyawaratan Ulama |
| MTs | : | Madrasah Tsanawiyah |
| MPD | : | Majelis Pendidikan Daerah |
| MUI | : | Majelis Ulama Indonesia |
| MUKISI | : | Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia |
| MUQ | : | Madrasah Ulumul Qur'an |

| SINGKATAN DAN AKRONIM | | |
|---|---|---|
| Musrenbang | : | Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah |
| NIB | : | Nomor Induk Berusaha |
| ODCB | : | Objek diduga Cagar Budaya |
| ODGJ | : | Orang Dengan Gangguan Jiwa |
| OPD | : | Organisasi Perangkat Daerah |
| OPT | : | Organisme Pengganggu Tanaman |
| OSS-RBA | : | *Online Singel Submission Risk Based Approach* |
| OTSUS | : | Otonomi Khusus |
| P2EK | : | Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan |
| P2L | : | Pekarangan Pangan Lestari |
| P3KE | : | Percepatan Pensasaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem |
| PAD | : | Pendapatan Asli Daerah |
| PAM LALIN | : | Personil Pengamanan Lalu Lintas |
| PBB | : | Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| PBP | : | Penerima Bantuan Pangan |
| Perda | : | Peraturan Daerah |
| PD | : | Pemerintah Daerah |
| PDAM | : | Perusahaan Daerah Air Minum |
| PDRB | : | Product Domestic Regional Bruto |
| Perpusnas | : | Perpustakaan Nasional |
| PK | : | Peninjauaan Kembali |
| PKH | : | Program Keluarga Harapan |
| PKK | : | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga |
| PKRT | : | Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tertentu |
| PKU | : | Pendidikan Kader Ulama |
| PLN | : | Perusahaan Listrik Negara |
| PLTA | : | Pembangkit Listrik Tenaga Air |
| PLTB | : | Pembangkit Listrik Tenaga Bayu |
| PLTMH | : | Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro |
| PMDN | : | Penanaman Modal Dalam Negeri |
| PMK | : | Penyakit Mulut dan Kuku |
| PMKS | : | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial |
| PMTB | : | Peran Pembentukan Modal Tetap Bruto |
| PNS | : | Pegawai Negeri Sipil |
| Poktan | : | Kelompok Tani |
| Pol WH | : | Polisi Wilayatul Hisbah |
| POLRI | : | Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| PONED | : | Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar |
| POPDA | : | Pekan Olah Raga Pelajar Daerah |
| Posyandu | : | Pos Pelayanan Terpadu |
| PP | : | Peraturan Pemerintah |
| PPAS | : | Prioritas Palfon Anggara Sementara |
| PPH | : | Pola Pangan Harapan |
| PPK-BLUD | : | Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah |
| PPKM | : | Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat |
| PPKS | : | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial |
| PPLH | : | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |

| SINGKATAN DAN AKRONIM | | |
|---|---|---|
| PPNPN | : | Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri |
| PPNS | : | Penyidik Pegawai Negeri Sipil |
| PPRG | : | Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender |
| PRT | : | Perusahaan Rumah Tangga |
| PSA | : | Perlindungan Sosial Adaptif |
| PSK | : | Pekerja Seks Komersial |
| PSU | : | Prasarana dan Sarana Utilita |
| PTSP | : | Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| PU | : | Pekerjaan Umum |
| PU | : | Penerima Upah |
| PUEBI | : | Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia |
| PUGAR | : | Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat |
| PUPR | : | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| PUS | : | Pasangan Usia Subur |
| PUSKEMAS | : | Pusat Kesehatan Masyarakat |
| PUSKESWAN | : | Pusat Kesehatan Hewan |
| PUSDATIK | : | Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan |
| Pustu | : | Puskesmas Pembantu |
| PUU LH | : | Perundangan-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup |
| R3P | : | Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana |
| RAD | : | Rencana Aksi Daerah |
| RANHAM | : | Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia |
| Ranwal | : | Rancangan Awal |
| RAPBK | : | Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten |
| Raskin | : | Beras untuk Rumah Tangga Miskin |
| Renja | : | Rencana Kerja |
| Renstra | : | Rencana Strategis |
| Renkon | : | Rencana Kontingensi |
| Renops | : | Rencana Operasi |
| RIPJPID | : | Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Daerah |
| RKPD | : | Rencana Kerja Pemerintah Daerah |
| RKPK | : | Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten |
| RLH | : | Rumah Layak Huni |
| RLS | : | Rata-rata Lama Sekolah |
| RP2KPKPK | : | Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh |
| RPH | : | Rumah Potong Hewan |
| RPJM | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah |
| RPJMA | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh |
| RPJMD | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| RPJMK | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten |
| RPJMN | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| RPJP | : | Rencana Pembangunan Jangka Panjang |
| RPJPA | : | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh |
| RPJPD | : | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah |
| RPJPK | : | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten |
| RPJPN | : | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional |
| RSUD | : | Rumah Sakit Umum Daerah |
| RT | : | Rumah Tangga |

| SINGKATAN DAN AKRONIM | | |
|---|---|---|
| RTH | : | Ruang Terbuka Hijau |
| RTLH | : | Rumah Tidak Layak Huni |
| RTRW | : | Rencana Tata Ruang Wilayah |
| RW | : | Rukun Warga |
| SAKERNAS | : | Survei Angkatan Kerja Nasional |
| SAKIP | : | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
| Satpol PP | : | Satuan Polisi Pamong Praja |
| SD | : | Sekolah Dasar |
| SDA | : | Sumber Daya Alam |
| SDA | : | Sumber Daya Air |
| SDGs | : | Sustainable Development Goals |
| SDM | : | Sumber Daya Manusia |
| SETDAKAB | : | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| SIDa | : | Sistem Inovasi Daerah |
| SiLPA | : | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran |
| SIUJK | : | Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi |
| SIUP | : | Surat Izin Usaha Perdagangan |
| SKPD | : | Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| SKPK | : | Satuan Kerja Perangkat Kabupaten |
| SLF | : | Sertifkat Laik Fungsi |
| SKPG | : | Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi |
| SKPT | : | Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu |
| SKPWNI | : | Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia |
| SMA | : | Sekolah Menengah Atas |
| SMP | : | Sekolah Menengah Pertama |
| SMPK | : | Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus |
| SOTK | : | Struktur Organisasi dan Tata Kerja |
| SP4N LAPOR | : | Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat |
| SPAM | : | Sistem Penyediaan Air Minum |
| SPBE | : | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| SPBN | : | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan |
| SPBU | : | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum |
| SPI | : | Survei Penilaian Integritas |
| SPIP | : | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah |
| SPK | : | Satuan Pendidikan Kerjasama |
| SPM | : | Standar Pelayanan Minimal |
| SPMB | : | Sistem Penerimaan Murid Baru |
| SPPG | : | Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi |
| SPPL | : | Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan |
| SR | : | Sambungan Rumah |
| SSGI | : | Survei Status Gizi Indonesia |
| STPW | : | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba |
| SUSENAS | : | Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| TBC | : | Tuberkulosis |
| TDG | : | Tanda Daftar Gudang |
| TIK | : | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| TNP2K | : | Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan |
| TNI | : | Tentara Nasional Indonesia |
| TPA | : | Tempat Pembuangan Akhir |

| SINGKATAN DAN AKRONIM | | |
|---|---|---|
| TPA | : | Taman Pendidikan Al-Qur'an |
| TPAK | : | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja |
| TPB | : | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| TPBIS | : | Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial |
| TPI | : | Tempat Pelelangan Ikan |
| TPID | : | Tim Pengendalian Inflasi Daerah |
| TPS | : | Tempat Pembuangan Sementara |
| TPT | : | Tingkat Pengangguran Terbuka |
| TPU | : | Tempat Pemotongan Unggas |
| TTG | : | Teknologi Tepat Guna |
| UCI | : | *Universal Child Immunization* |
| UHH | : | Usia Harapan Hidup |
| UKM | : | Usaha Kecil dan Menengah |
| UKL-UPL | : | Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup |
| UMK | : | Usaha Mikro Kecil |
| UMKM | : | Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| UMOT | : | Izin Usaha Mikro Obat Tradisional |
| UN | : | United Nations |
| UNDP | : | United Nations Development Programme |
| UPZ | : | Unit Pengumpul Zakat |
| USPPS | : | Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah |
| UU | : | Undang-Undang |
| UUD | : | Undang-Undang Dasar |
| UU-PA | : | Undang-Undang Pemerintahan Aceh |
| WC | : | *Water Closet* |
| WDP | : | Wajar Dengan Pengecualian |
| WHO | : | *World Health Organization* |
| WS | : | Wilayah Sungai |
| WTP | : | Wajar Tanpa Pengecualian |
| Wtp | : | *Water Treatment Plant* |
| ZISWAF | : | Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK). RPJMK Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Pidie Jaya untuk periode lima tahun kedepan sesuai dengan periode Kepemimpinan Kepala Daerah tahun 2025-2029. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMK merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Nasional. Hal ini berarti bahwa penyusunan RPJMD harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. Secara substansial, dokumen RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selain itu, dokumen RPJMK Pidie Jaya juga memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, tujuan dan sasaran, arah kebijakan serta strategi pembangunan Daerah.

Penyusunan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMK Tahun 2025-2029, adalah (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan

peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Dalam proses penyusunannya, RPJMK Pidie Jaya tidak berdiri sendiri, tetapi menjalin keterpaduan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya di tingkat nasional dan provinsi. RPJMK ini mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta memperhatikan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2029. Selain itu, RPJMK ini merupakan penjabaran dari RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025–2045, yang disusun secara simultan dengan RPJPA dan Nasional.

Sebagai bentuk respons terhadap ancaman kerusakan lingkungan, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mewajibkan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan dijadikan landasan utama dan terintegrasi dalam proses perumusan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP), termasuk di dalam dokumen perencanaan pembangunan wilayah. Penerapan KLHS RPJMK diharapkan dapat mengantisipasi dampak negatif terhadap lingkungan sejak tahap awal perencanaan pembangunan.

Dalam kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah juga diarahkan untuk menghasilkan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Kabupaten/Kota. KLHS menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa strategi pembangunan yang tercantum dalam RPJMK telah selaras dan terintegrasi dengan prinsip-prinsip TPB.

Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD juga menekankan pendekatan strategis, dengan fokus pada integrasi strategi pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMK, bukan sekadar menilai dampak KRP secara teknis. Oleh karena itu, proses penyusunan KLHS RPJMK wajib dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan RPJMK. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang dimaksud merujuk pada pembangunan yang menjamin kelestarian lingkungan, keselamatan, kesejahteraan, dan mutu

hidup generasi masa kini maupun mendatang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (10) Permendagri 86 Tahun 2017.

Sinergi antar dokumen perencanaan ini dimaksudkan untuk memastikan keselarasan tujuan pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional serta memperkuat peran daerah dalam pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Pidie Jaya periode 2024-2029 telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pasangan calon nomor urut 1 (Sibral Malasyi - Hasan Basri) telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya terpilih oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 9 Januari 2025 sesuai dengan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya No. 10 Tahun 2025. Prosesi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya terpilih periode 2025-2029, H. Sibral Malasyi, ME dan Hasan Basri, MM telah dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Februari 2025. Acara pelantikan dilaksanakan di Gedung DPRK Pidie Jaya dan dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD, khusus di daerah Aceh biasa disebut dengan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dar kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 merupakan tahapan ke-1 dari RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045. Artinya dokumen RPJMK pada periode ini merupakan tahapan awal dari RPJPK Pidie Jaya, sehingga pada periode ini Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus memastikan seluruh tujuan RPJPK dapat dioptimalkan untuk dituangkan kedalam RPJMK.

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 selanjutnya diacu oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pidie Jaya sesuai tugas Pokok dan Fungsinya yang dituangkan dalam dokumen RENSTRA Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah. Dokumen RPJMK diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Dokumen RPJMK selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK). RKPK merupakan perencanan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya RPJMK Pidie Jaya dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun diwilayah Kabupaten Pidie Jaya yang perlu diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Pidie Jaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang harapkan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi landasan teknis dalam penyusunan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029.

Bappeda Kabupaten Pidie Jaya beserta seluruh Tim Penyusunan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 telah melaksanakan tahapan sebagai berikut:

1. Rapat Pembentukan SK Tim penyusun RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 pada Tanggal 27 Desember 2024;
2. Melaksanakan orientasi dan Pengarahan Bupati Pidie Jaya kepada Tim Penyusunan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 dengan melibatkan akademisi sebagai Narasumber pada Tanggal 22 Januari 2025;
3. Menyusun Agenda Kerja Tim Penyusunan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 pada Tanggal 22 Januari 2025.

4. Mempersiapkan Data dan Informasi Penyusunan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada Tanggal 17 Februari 2025.
5. Pembahasan Visi dan Misi Secara Teknokratis dilaksanakan pada Tanggal 17 Februari 2025.
6. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada Tanggal 24 Februari 2025.
7. Konsultasi Publik RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada Tanggal 7 Maret 2025.
8. Penyampaian Ranwal RPJMK ke DPRK Pidie Jaya dilaksanakan pada Tanggal 11 April 2025.
9. Pembahasan dan Kesepakatan Ranwal RPJMK dengan DPRK Pidie Jaya dilaksanakan pada Tanggal 23 Mei 2025.
10. Permohonan Konsultasi Ranwal RPJMK ke Gubernur Aceh dilaksanakan pada Tanggal 23 Mei 2025.
11. Penyusunan Rancangan RPJMK dilaksanakan pada Tanggal 30 Juni 2025.
12. Musrenbang RPJMK dilaksanakan pada Tanggal 10 Juli 2025.
13. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMK dilaksanakan pada Tanggal 15 Juli 2025.
14. Reviu APIP RPJMK dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2025.
15. Pembahasan dengan DPRK dilaksanakan pada Tanggal 11 s.d 25 Agustus 2025.
16. Persetujuan bersama RPJMK antara KDH dengan DPRK dilaksanakan pada Tanggal 29 Agustus 2025.
17. Evaluasi Rancangan Qanun RPJMK dilaksanakan pada Tanggal 8 September 2025.

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029, didasarkan pada beberapa peraturan perudangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonisia Nomor 459 tahun 2018);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
24. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
25. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 151);
26. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
27. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
28. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
29. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1).

## 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Keterkaitan RPJMK dengan dokumen perencanaan lainnya menciptakan sebuah mata rantai yang solid, memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan selaras, terukur, dan saling mendukung. Tanpa adanya hubungan yang harmonis ini, proses perencanaan dan penganggaran dapat kehilangan arah, tumpang tindih, dan tidak efisien. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai hierarki dan hubungan antar dokumen, mulai dari tingkat nasional hingga operasional perangkat daerah, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terencana, efektif, dan berkelanjutan. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut.

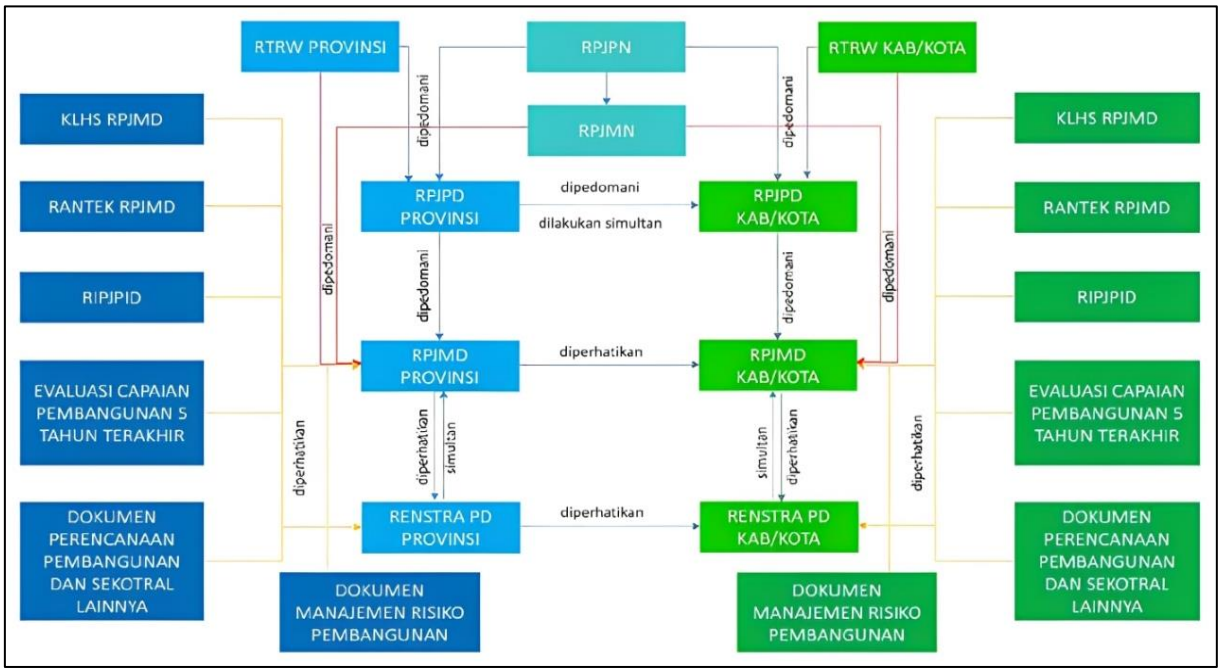


**Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**

A. Hubungan antara RPJMK Tahun 2025-2029 dengan RPJPK 2025-2045

1. Visi dan misi yang dirumuskan dalam RPJMK harus mendukung dan sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD,
2. Perioderisasi RPJMK mengacu pada periode pertama RPJPK yaitu 2025-2029.
3. Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMK

B. Hubungan antara RPJMK Tahun 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029
   1. Perioderisasi RPJMK harus sesuai dengan periode RPJMN yaitu 2025-2029
   2. Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMK Tahun 2025-2029 sejalan dengan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029,
   3. Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMK Tahun 2025-2029,
   4. Program perangkat daerah mendukung kegiatan prioritas utama RPJMN.

C. Hubungan antara RPJMK Tahun 2025-2029 dengan RTRW
   1. Semua program pembangunan yang direncanakan dalam RPJMK harus sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW untuk mencegah konflik pemanfaatan lahan
   2. RPJMK menerjemahkan strategi pembangunan lima tahunan ke dalam program konkret yang dijalankan di dalam batasan ruang yang diatur oleh RTRW
   3. Potensi wilayah yang diidentifikasi dalam RTRW dapat dioptimalkan melalui program-program yang tertuang dalam RPJMK

D. Hubungan antara RPJMK Tahun 2025-2029 dengan RIPJPID
   1. RPJMK adalah dokumen perencanaan strategis yang menjadi landasan bagi RIPJPID
   2. RPJMK memuat tujuan umum pembangunan, maka RIPJPID akan menentukan bagaimana riset dan inovasi dapat membantu mencapai tujuan tersebut
   3. RIPJPID dibuat berdasarkan program prioritas yang tercantum dalam RPJMK
   4. RIPJPID mendukung program-program yang ada dalam RPJMK untuk meningkatkan daya saing daerah dan memecahkan masalah-masalah prioritas melalui ekosistem riset dan inovasi dengan berkolaborasi dengan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

E. Hubungan antara RPJMK Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Sektoral
   1. Dokumen RPJMK menjadi pedoman utama bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), sehingga program dan kegiatan di level sektoral tetap sejalan dengan arah pembangunan daerah

yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.

2. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPK berkontribusi langsung pada pencapaian sasaran RPJMK
3. RPJMK memastikan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan dalam Renstra tidak tumpang tindih, tetapi saling mendukung satu sama lain dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Dengan memperhatikan keterkaitan antar dokumen sebagaimana dijelaskan di atas, penyusunan RPJMK Pidie Jaya diharapkan mampu menjamin keterpaduan, sinergi, dan keberlanjutan perencanaan pembangunan dari tingkat nasional hingga kabupaten. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pembangunan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap tantangan zaman.

## 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan gambaran arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Pidie Jaya pada periode tahun 2025-2029;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
3. Menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis SKPK;
4. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Pidie Jaya;
5. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;
6. Sebagi tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala SKPK dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih;
7. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan.

Tujuan penyusunan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan kabupaten yang telah

ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan;

2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kabupaten;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya dengan daerah sekitarnya, Provinsi Aceh dan pemerintah pusat;
4. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
5. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMK dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Subbab Gambaran umum Kondisi Daerah meliputi aspek geografi dan demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.
2. Subbab Gambaran Keuangan Daerah memuat penjelasan tentang realisasi APBK Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
3. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis memuat Permasalahan Pembangunan daerah dan Isu Strategis daerah.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Subbab visi, misi, tujuan dan sasaran memuat visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMK Pidie Jaya tahun 2025-2029.

2. Subbab Strategi, arah kebijakan dan program prioritas Pembangunan Daerah memuat Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMK Pidie Jaya tahun 2025-2029 serta program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMK Pidie Jaya tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELEGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Subbab Program Perangkat Daerah memuat:
   a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
   b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat:
   a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMK Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
   b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP.

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

### 2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Aspek geografi meliputi gambaran mengenai lokasi, potensi pengembangan, dan kerentanan terhadap bencana pada wilayah perencanaan, untuk mengetahui karakteristik fisik wilayah yang sedang direncanakan.

#### 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah provinsi Aceh, dengan ibukota Kabupaten adalah Kota Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Secara astronomis Kabupaten Pidie Jaya terletak pada $96^0$3’16,62” sampai dengan $96^0$20’40,5” Bujur Timur dan $5^0$18’6,607” sampai dengan $4^0$56’42,1” Lintang Utara. Sesuai dengan peta administratif maka Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah strategis Aceh yang mudah diakses karena letaknya berada pada jalur strategis lintas Nasional Banda Aceh-Medan yang merupakan urat nadi perekonomian kedua wilayah.

Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari 8 kecamatan, 34 Mukim, dan 222 Gampong. Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Kabupaten Pidie (Kecamatan Kembang Tanjong);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie (Kecamatan Tangse, Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Mane);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie (Kecamatan Geuleumpang Tiga, Kecamatan Geuleumpang Baro, dan Kecamatan Keumbang Tanjong).

Posisi Kecamatan-kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya pada umumnya sangat strategis karena berada pada lintas jalan negara yang menghubungkan Banda Aceh-Medan. Hal ini memudahkan akses terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap kecamatan tersebut. Kota Meureudu ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten yang posisinya berada di tengah-tengah kecamatan lainnya. Batas wilayah administrasi Kabupaten Pidie Jaya dapat di lihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1.

**Tabel 2.1.**
**Wilayah Administratif Kabupaten Pidie Jaya**

| No | Kecamatan | Luas Wilayah | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| | | (km²) | Gampong (desa) | Kemukiman |
| 1 | Bandar Baru | 220,47 | 43 | 8 |
| 2 | Panteraja | 15,00 | 10 | 2 |
| 3 | Trienggadeng | 79,37 | 27 | 5 |
| 4 | Meureudu | 124,79 | 30 | 4 |
| 5 | Meurah Dua | 287,07 | 19 | 3 |
| 6 | Ulim | 41,75 | 30 | 5 |
| 7 | Jangka Buya | 9,35 | 18 | 2 |
| 8 | Bandar Dua | 174,32 | 45 | 5 |
| **Jumlah** | | **952,11** | **222** | **34** |

*Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014*

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa kecamatan Meurah Dua adalah kecamatan terluas dengan luas sebesar 30,15 persen dari total wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Sebaran luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang membentang dari kecamatan Bandar Baru (Lueng Putu) sampai dengan Bandar Dua (Ule Glee) dapat ditempuh dengan perjalanan darat dalam waktu ± 45 menit. Kecamatan Meurah Dua merupakan kecamatan terluas diikuti Bandar Baru dan Bandar Dua yang merupakan pusat perdagangan di perbatasan kabupaten Pidie dan Bireuen.

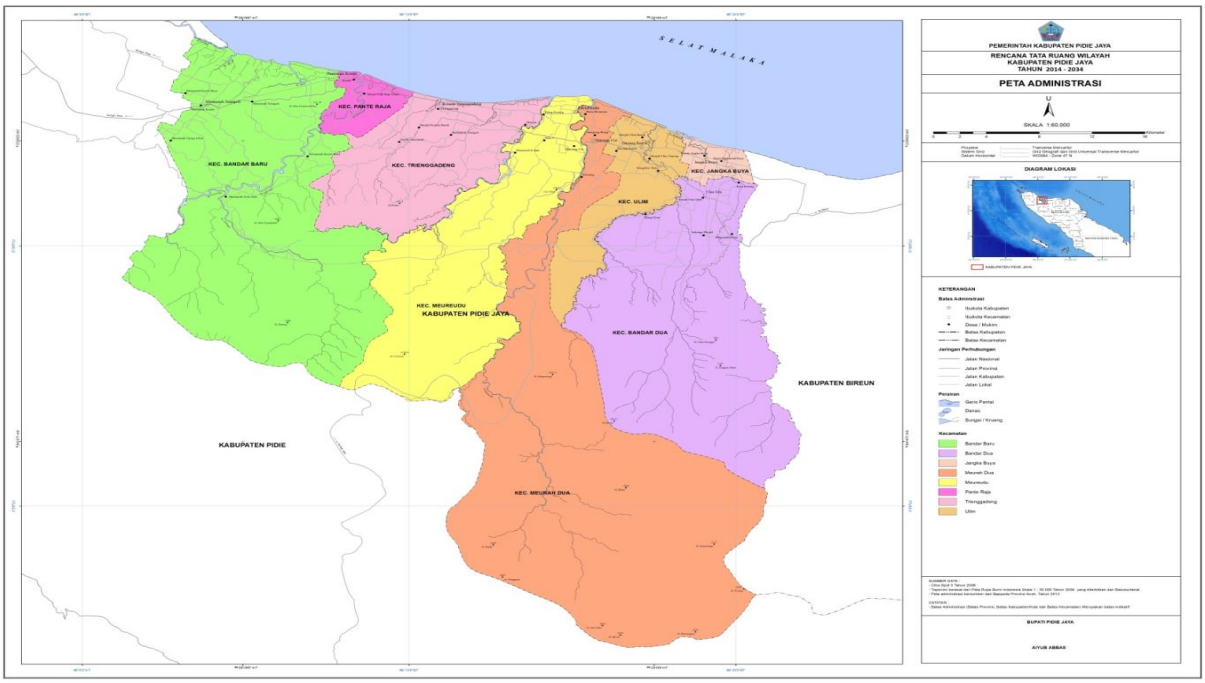


*Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034*

**Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Pidie Jaya**

Kawasan yang mencakup seluruh Kabupaten Pidie Jaya diantaranya kawasan pesisir dan kawasan pegunungan. Kawasan pesisir terhampar dari kecamatan Bandar Baru hingga Jangka Buya. Hanya satu daerah yang tidak memiliki pesisir yaitu kecamatan Bandar Dua. Sedangkan untuk kawasan

pergunungan terdapat hampir disemua daerah kecuali kecamatan Jangka Buya. Untuk kawasan pedalaman umumnya berada di daerah pegunungan seperti desa/gampong yang berada di perbatasan hutan lindung yang terdapat di kecamatan Meurah Dua, Meureudu, Trienggadeng, Bandar Dua dan Bandar Baru.

### 2.1.1.2. Kondisi Topografi

**A. Kemiringan Lahan**

Kemiringan lereng merupakan faktor utama yang menentukan kelayakan suatu daerah untuk menjadi lahan budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti persawahan, ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan di bawah 15 persen, sedangkan lahan dengan kemiringan di atas 40 persen akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan. Gambaran kondisi kelerengan Kabupaten Pidie Jaya bisa dilihat melalui Tabel 2.2.

**Tabel 2.2.**
**Kondisi Kelerengan Kabupaten Pidie Jaya**

| No | Kecamatan | Lereng Kelas (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (0 – 3) | (4 – 8) | (9 – 15) | (16–25) | (26- 40) | >40 |
| 1 | Bandar Baru | 22.36 | 29.24 | 16.63 | 12.23 | 9.28 | 10.26 |
| 2 | Panteraja | 44.01 | 46.41 | 9.58 | - | - | - |
| 3 | Trienggadeng | 44.01 | 46.41 | 9.58 | - | - | - |
| 4 | Meureudu | 4.82 | 10.39 | 11.12 | 2.20 | 40.74 | 30.74 |
| 5 | Meurah Dua | 4.82 | 10.39 | 11.12 | 2.20 | 40.74 | 30.74 |
| 6 | Ulim | 59.02 | 19.44 | 12.55 | 3.39 | 2.58 | 3.01 |
| 7 | Jangka Buya | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Bandar Dua | 8.34 | 7.88 | 4.05 | 5.71 | 11.56 | 54.46 |

*Sumber : Atlas Pengembangan Kakao Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010*

Kemiringan lahan dikelompokkan kedalam 5 (lima) lereng yaitu:

1. Kemiringan lereng 0 – 8 persen (datar). Lahan dengan kemiringan seperti ini dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan yang kecil.
2. Kemiringan lereng 8 – 15 persen (landai). Lahan dengan kemiringan lereng seperti ini dapat digunakan untuk kegiatan pemukiman dan pertanian, tetapi bila terjadi kesalahan dalam pengelolaan masih mungkin terjadi erosi.
3. Kemiringan lereng 15 – 25 persen (agak curam) kemungkinan terjadi erosi lebih besar.

4. Kemiringan lereng 25 – 45 persen (curam), jika tumbuhan menutupi permukiman lahan ditebang, maka lereng akan mudah tererosi.
5. Kemiringan lereng 45 persen (sangat curam), kelerengan yang sangat peka terhadap erosi, kegiatan harus bersifat nonbudidaya. Apabila terjadi penebangan hutan, akan membawa pengaruh yang besar terhadap lingkungan yang lebih luas.

**B. Ketinggian Lahan**

Kondisi topografi kabupaten Pidie Jaya relatif tidak datar dengan ketinggian bervariasi antara 0 – 8 mdpl (meter di atas permukaan laut) hingga >1500 mdpl. Luas dataran dengan ketinggian 0 – 8 mdpl 28,53 persen dari luas keseluruhan kabupaten, sedangkan sisanya berada di daerah selatan mempunyai kontur ketinggian permukaan tanah yang sangat variatif atau perbukitan dengan tingkat kemiringan lereng antara 25 – 40 persen. Kemiringan lereng dan garis kontur merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan.

### 2.1.1.3. Kondisi Geologi

Jenis Geologi yang menyusun wilayah Pidie Jaya terdiri dari batuan sedimen kuarter dan tersier yang berada di bagian utara Pidie Jaya serta batuan sedimen pra tersier yang umumnya berada di bagian selatan Pidie Jaya. Susunan formasi batuan dan endapan yang menyusun wilayah Pidie Jaya terdiri dari aluvium, campuran estuarin dan marin yang masih muda, aluvium sungai muda, gambut yang berada di bagian tengah Pidie Jaya (di sepanjang jalan arteri), aluvium, endapan laut yang muda (pasir-pasir pantai, kerikil) yang berada di bagian utara Pidie Jaya serta formasi batuan basalt, andesit, tefra berbutir halus dan tefra berbutir kasar yang berada di bagian selatan Pidie Jaya. Selanjutnya jenis tanah yang terdapat di Pidie Jaya sangat beragam. Sebagian besar merupakan jenis tanah kambisol yang bercampur dengan jenis tanah lainnya, seperti gleisol, regosol, andosol, aluvial dan podsolik.

**Tanah *Gleisol*** terdiri atas Gleisol Eutrin, Gleisol Fleirik, dan Gleisol Halik merupakan tanah yang mempunyai prosentase liat yang tinggi dengan pengaruh reduksi unsur besi (fe). Umumnya dijumpai pada dataran datar. Umumnya dijumpai pada tanah datar. Jenis tanah ini dapat ditemukan di Kecamatan Meureudu dan Trienggadeng.

**Tanah *Alluvial*** merupakan jenis tanah timbunan sehingga belum mempunyai perkembangan horizon lebih lanjut. Lapisan atasnya masih selalu mendapat bahan

tambahan yang kadang-kadang mengandung zat organik. Di Kabupaten Pidie Jaya, jenis tanah ini dapat ditemukan di Kecamatan Trienggadeng, Panteraja dan Bandar Baru.

**Tanah *Regosol*** merupakan tanah yang terdiri dari lapisan gambut (bahan organik) di atas tanah mineral yang mengalami gleisasi. Ditemukan di daerah rawa-rawa yang terus menerus tergenang atau daerah yang lebih tinggi yang drainase nya sangat buruk dengan curah hujan yang tinggi. Jenis tanah ini dapat ditemukan di Kecamatan Meureudu.

**Tanah *Podsolik*** berwarna merah sampai kuning dengan perkembangan yang sedang dan kesuburan yang rendah. Jenis tanah ini umumnya ditemukan pada wilayah yang mempunyai ketinggian 50-1.000 meter dari permukaan laut. Jenis tanah ini ditemukan di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.

**Tanah *Latosol*** adalah tanah yang mempunyai distribusi kadar liat yang tinggi dengan tingkat kelapukan yang telah lanjut. Stabilitas agregat adalah tinggi dengan tanah warna merah , coklat kemerahan, coklat kekuningan atau kuning. Tanah ini banyak ditemukan pada tanah yang mempunyai ketinggian 0 – 900 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Meureudu dan Trienggadeng.

**Tanah Komplek *Podsolik* Merah Kuning dan *Litosol*** merupakan gabungan dari sifat-sifat tanah di atas. Jenis tanah ini dijumpai di wilayah tengah sampai pegunungan, seperti di Kecamatan Bandar Baru, Meuredu dan Bandar Dua.

**Tanah Komplek *Rendzina* dan *Litosol*** merupakan jenis tanah gabungan antara jenis tanah rendzina dan litosol. Tanah Rendzina merupakan tanah yang mempunyai horizon permukaan mollik dan dibawahnya langsung berupa batu kapur. Sedangkan jenis tanah litosol adalah tanah dangkal yang berada di atas batu keras sampai dengan kedalaman 20 cm dari permukaan tanah serta belum ada perkembangan profil lebih lanjut akibat pengaruh erosi yang kuat. Jenis tanah komplek rendzina dan litosol ini ditemukan di kecamatan Bandar Baru walaupun dalam luasan yang relatif kecil.

#### 2.1.1.4. Hidrologi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 04/PRTM/M/2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah Sungai, Kabupaten Pidie Jaya mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan wewenang pemerintah Pusat yang langsung di Bawah Pengelolaan Balai Wilayah Sungai Sumatera-I. Berikut adalah Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3.**
**Data Panjang Sungai dalam Kabupaten Pidie Jaya**

| No | Kode BWS I | Nama Sungai | Luas DAS (Ha) | Panjang (Km) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 015 | Kr. Putu | 12.780 | 37,02 |
| 2 | 016 | Kr. Panteraja | 22.780 | 43,02 |
| 3 | 017 | Kr. Pangwa | 1.479 | 8,10 |
| 4 | 018 | Kr. Beuracan | 9.640 | 28,32 |
| 5 | 019 | Kr. Meureudu | 38.660 | 55,99 |
| 6 | 020 | Kr. Jeulanga | 12.090 | 34,54 |
| **Jumlah Total** | | | **97.239** | **206,99** |

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya/ Tim GIS Pengairan Tahun 2025*

## C. Aliran Sungai

Kabupaten Pidie Jaya memiliki delapan ruas sungai besar yang bermuara di sepanjang garis pantai Pidie Jaya. Kedelapan sungai itu adalah Sungai Lueng Putu, Sungai Cubo, Sungai Trienggadeng, Sungai Beuracan-Pangwa, Sungai Meureudu, sungai Ulim, sungai Jeulanga, dan Sungai Kiran (untuk selanjutnya dalam kearifan lokal Pidie Jaya yang umumnya bersuku Aceh nama sungai dibahasakan sebagai "Krueng").

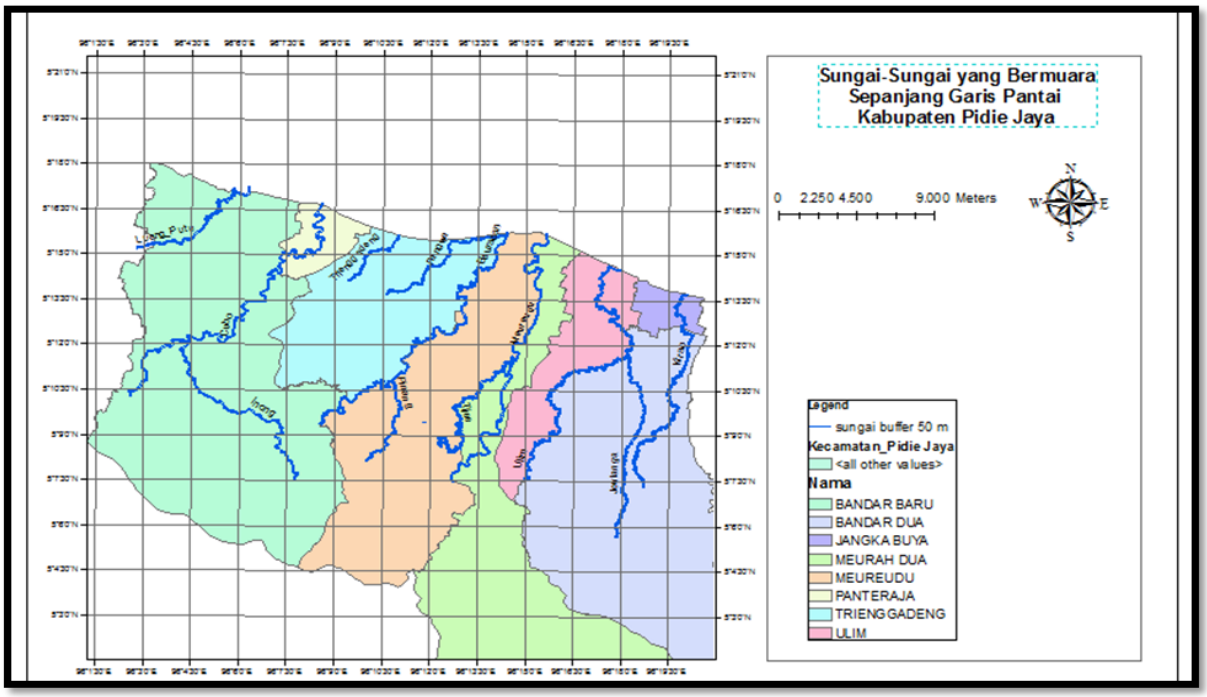


*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

**Gambar 2.2. Peta delapan ruas sungai di Kabupaten Pidie Jaya**

Krueng Lueng Putu, adalah sungai yang memiliki hulu di daerah kabupaten tetangga Pidie, yang lintasan ruas sungainya sejajar/ di tepi jalan negara yang membelah ibukota Kecamatan Bandar Baru, Lueng Putu, ruasan sungai dilanjutkan pada desa Blang Glong dan berakhir di muara yang umumnya daerah tambak ikan di desa Udeng dan Baroh Lancok.

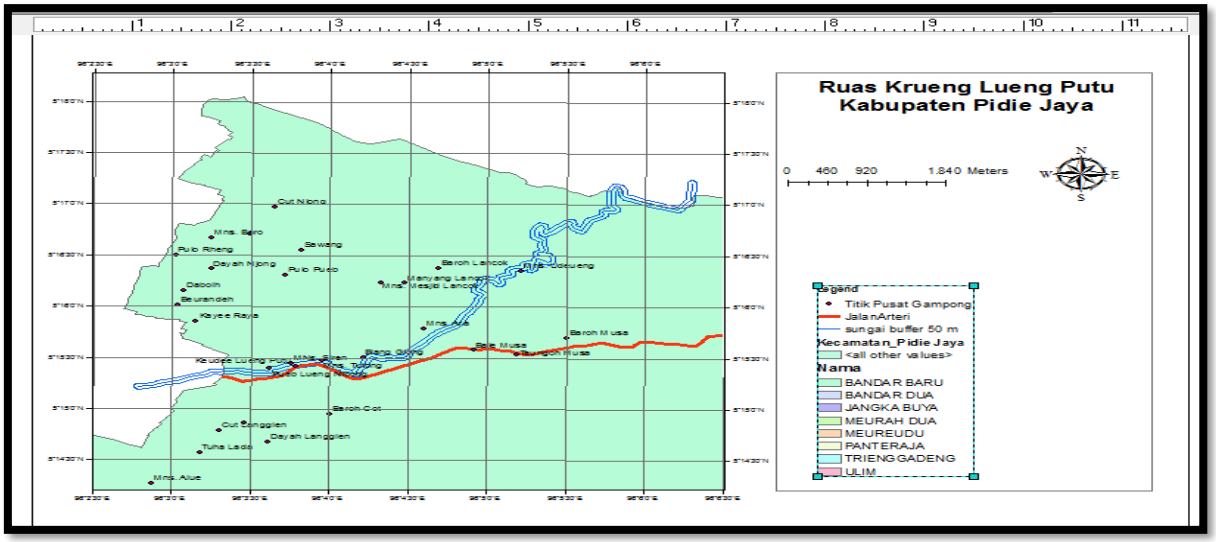


*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

**Gambar 2.3. Peta Sungai Krueng Lueng Putu di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya**

Berdasarkan Rekam Jejak Bencana pada September-Desember 2008, November 2009, November 2010, dan Desember 2011 yang berlanjut pada Januari 2023, luapan air sungai ini telah menyebabkan genangan setinggi 0 sd 40 cm di desa Blang Glong, Ara, Udeung, dan memberikan dampak erosi pengikisan yang cukup parah sepanjang jalan negara yang menghancurkan pengaman tebing sungai di beberapa titik Kota Lueng Putu pada tahun 2010 dan 2011. Penanganan secara alamiah dengan penanaman kembali rumpun bambu dan pembangunan tebing pengaman dinding sungai telah dilakukan pada tahun 2009, dan dilanjutkan kembali dengan rekonstruksi ulang dinding pengaman tebing sungai pada tahun 2012.

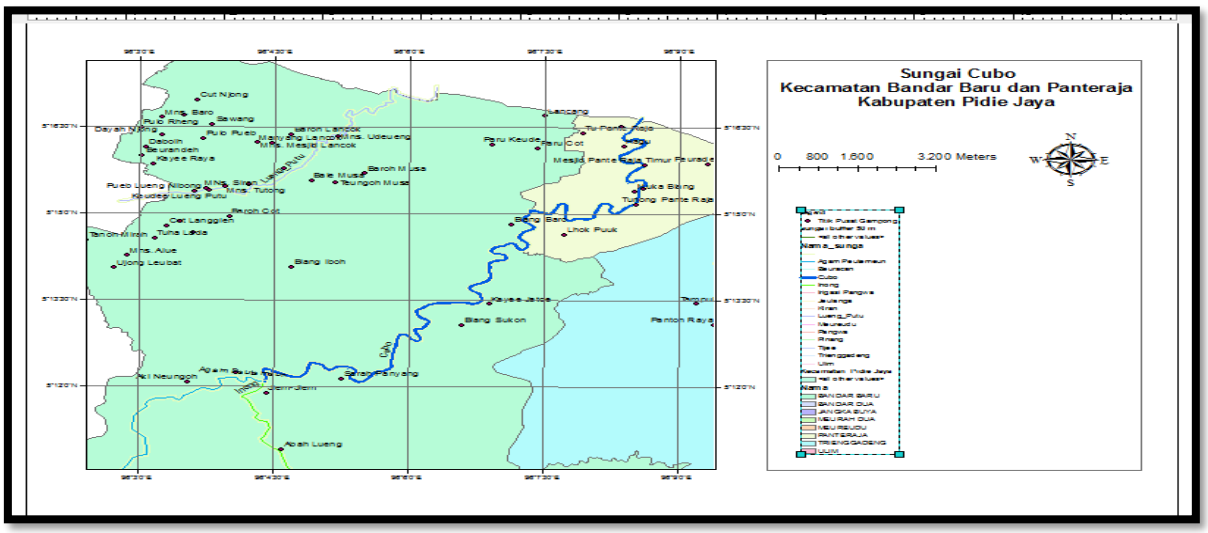


*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

**Gambar 2.4. Peta Sungai Krueng Cubo di Kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya.**

Krueng Cubo, adalah sungai yang memiliki hulu di daerah pegunungan selatan Kabupaten Pidie dan Pidie jaya. Sungai ini pada ruasan terakhirnya merupakan gabungan dua sungai besar, yaitu Krueng Inong dan Krueng Agam, yang ruasan sungai melintasi pemukiman penduduk di dua kecamatan, yaitu mengairi ruas sungai di pemukiman Kecamatan Bandar Baru, dan Kecamatan Panteraja. Muara sungai ini berada di garis pantai Kecamatan Panteraja.

Pada Bagian hulu sungai, erosi yang diakibatkan aliran sungai Cubo mengakibatkan ancaman pada fasilitas Irigasi, pengikisan tebing di komplek perumahan/fasilitas militer yang dimiliki kompi C Senapan Bhirawa Yudha, yang terjadi pada musim penghujan tahun 2009, 2010, dan 2011. Pada bagian ruas di sekitar desa Blang Sukon dan Kayee Jatoe, juga terjadi erosi sungai yang luar biasa karena dipicu galian C yang eksplorasinya telah dihentikan pada tahun 2011. Desa Sarah Panyang, Blang Sukon, Kayee Jatoe adalah desa-desa yang mengalami pengikisan tebing sungai terparah yang mengancam keberadaan perkebunan penduduk. Aliran sungai ini juga membawa dampak erosi pada pondasi jembatan rangka Baja yang terdapat di dua titik, yaitu titik Blang Krueng dan Kaye Jatoe.

Pada daerah Kecamatan Panteraja, sungai Cubo melalui beberapa desa mulai dari desa Lhok Puuk sampai ke muara sungai di Keude Panteraja. Sementara erosi tebing sungai Cubo di desa Lhok Puuk telah mengancam fasilitas olahraga masyarakat berupa Lapangan Sepakbola Lhok Puuk. Khusus untuk desa Lhok Puuk, erosi diperparah dengan adanya pengambilan rumpun bambu yang berfungsi menyangga keutuhan tebing sungai.

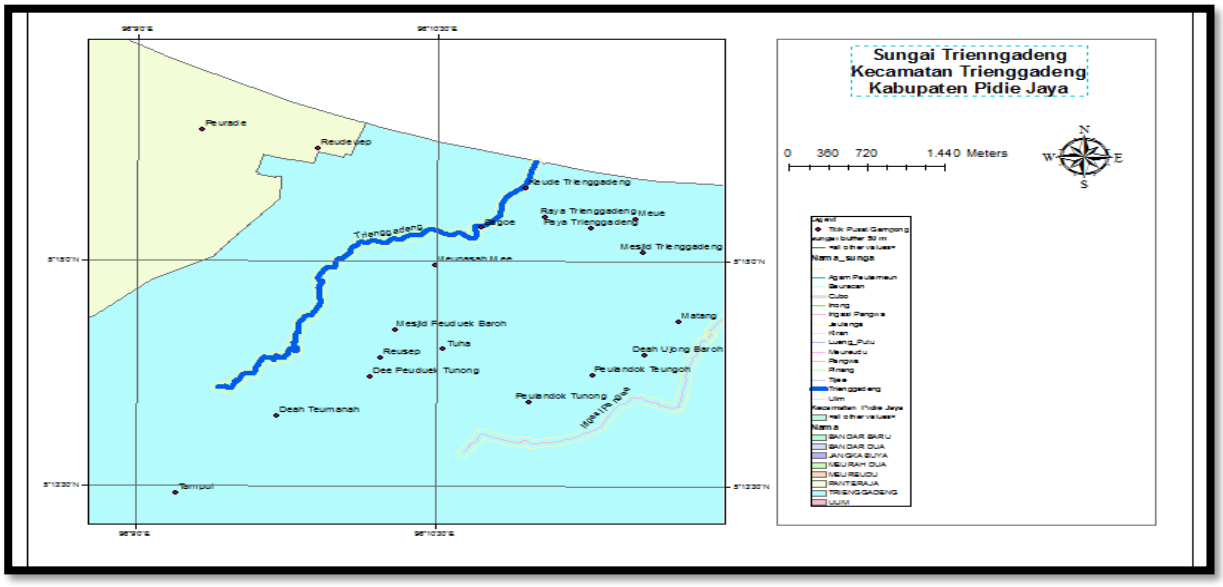


*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

**Gambar 2.5. Peta Sungai Krueng Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya**

Sungai Ketiga yang bermuara di garis pantai Pidie Jaya adalah Krueng Trienggadeng (Gambar 2.5). Sungai ini terbentuk seperti alur kecil yang sumber mata airnya adalah embung (daerah tangkapan air) di daerah Tampui dan Panton Raya. Panjang ruas sungai ini relatif pendek (sekitara 4500 meter), namun erosi yang ditimbulkan telah mengakibatkan kerusakan badan jalan kabupaten dan tebing pengaman jalan kabupaten di beberapa desa dalam kecamatan Trienggadeng, seperti Desa Meunasah Sagoe, Mee Peuduk dan Keude Trienggadeng.

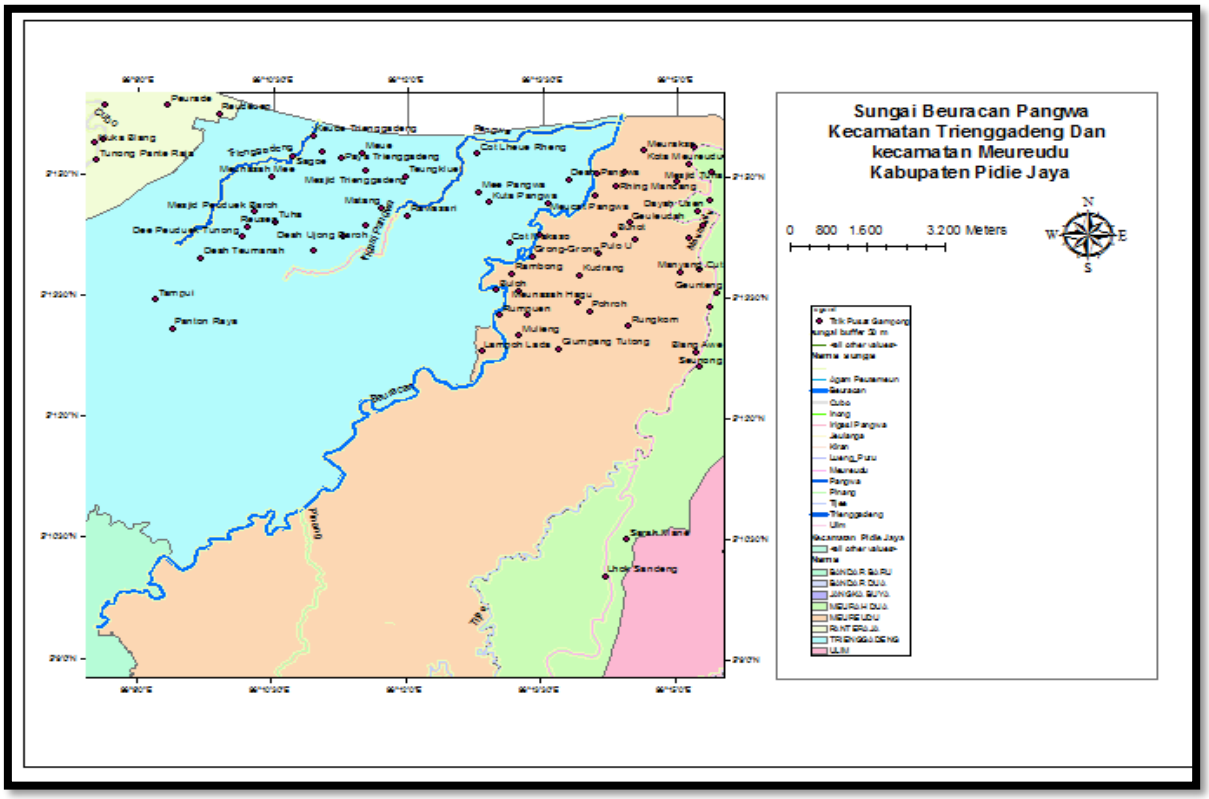


*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

**Gambar 2.6. Peta Sungai Krueng Beuracan di Kecamatan Trienggadeng dan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya**

Sungai Keempat adalah sungai Beuracan Pangwa (Gambar 2.6), sungai ini berasal dari pegunungan selatan Pidie Jaya dan menjadi tapal batas antara Kecamatan Trienggadeng dan Kecamatan Meureudu. Gerusan erosi yang diakibatkan aliran sungai Beuracan Pangwa in mengancam beberapa fasilitas mulai dari Bangunan Irigasi Alue Demam, Jembatan Gantung di Desa Lampoh Lada dan Buloh, Jembatan Beton di Jalan Negara di perbatasan Beuracan Pangwa. Aliran sungai juga mengancam kebun, pemukiman dan sawah penduduk di dua Kecamatan. Di Kecamatan Trienggadeng Desa Buloh, Meucat Panwa, Deah Pangwa, dan di Kecamatan Meureudu seperti Desa Rumpun, Grong-grong Krueng, Rambong, Kuta Trieng, Teupin Peuraho,sampai dengan

Rhing Krueng. Muara sungai ini bersisian dengan tiga desa, yaitu desa Rhing Krueng, Meuraksa, dan Rhing Blang di Kecamatan Meureudu.

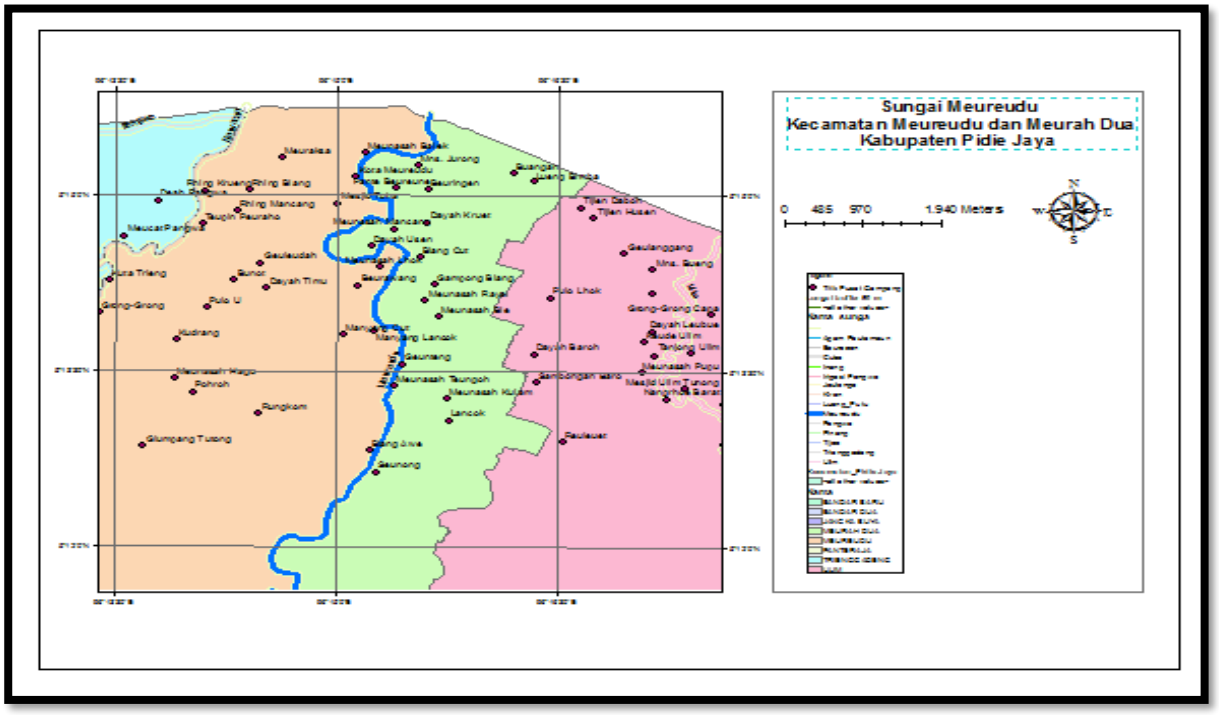


*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

**Gambar 2.7. Sungai Krueng Meureudu di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya**

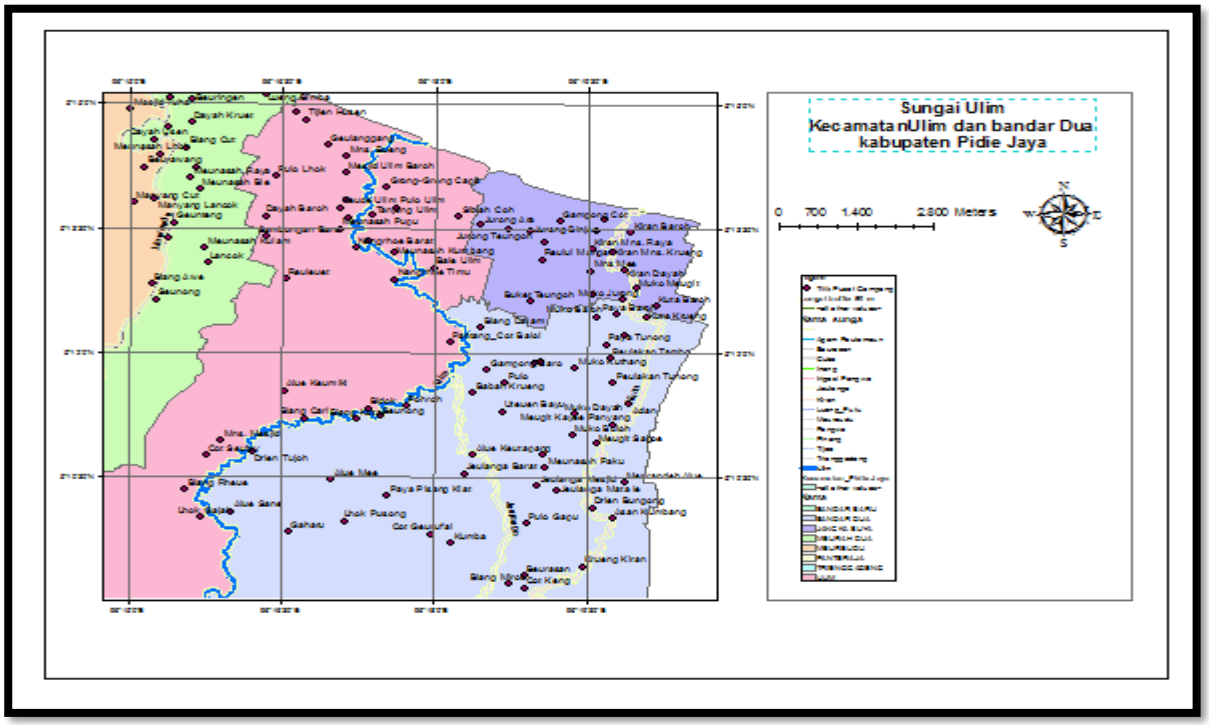


*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

**Gambar 2.8. Peta Sungai Krueng Ulim di Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya.**

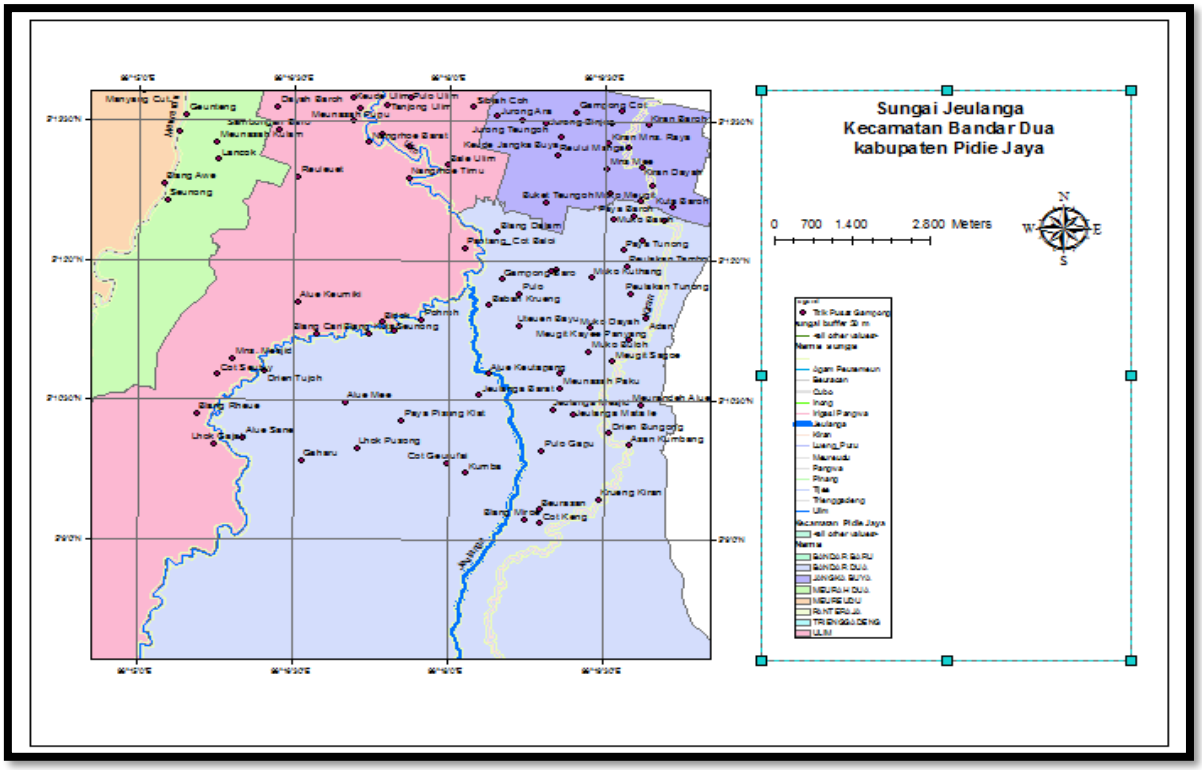


*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

**Gambar 2.9. Peta Sungai Krueng Jeulanga di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya**

Gambar 2.7 menjelaskan bahwa sungai kelima yang melintasi Pidie Jaya adalah Sungai Meureudu. Krueng Meureudu adalah sungai yang termasuk dalam empat sungai beraliran deras dibagian timur Kabupaten Pidie Jaya. Empat sungai di bagian Barat, seperti Putu, Cubo, Trienggadeng, dan Beuracan, memiliki ferhang (kemiringan aliran) yang lebih rendah dibanding dengan keempat sungai di Bagian Timur Pidie Jaya. Pada 19 Desember 2009, pukul 21.00 WIB, keempat sungai di bagian Timur Pidie Jaya ini pernah mengakibatkan bencana banjir besar yang mengenang 40 (empat puluh) desa, yang meliputi desa dari lima kecamatan, yaitu Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Bandar Dua, dan Jangka Buya

Selannjutnya Gambar 2.9 menjelaskan bahwa krueng Jeulanga adalah Sungai yang memiliki hulu di daerah selatan pegunungan Pidie Jaya yang memiliki alur akhir bergabung dengan ruas sungai Ulim, pertemuan ruas sungai Jeulanga dan Ulim ini berimpitan di desa Babah Krueng,

Krueng Kiran adalah sungai yang memiliki ruas hulu di pegunungan selatan kecamatan Bandar Dua dan bermuara ke garis pantai Kecamatan Jangka Buya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.10

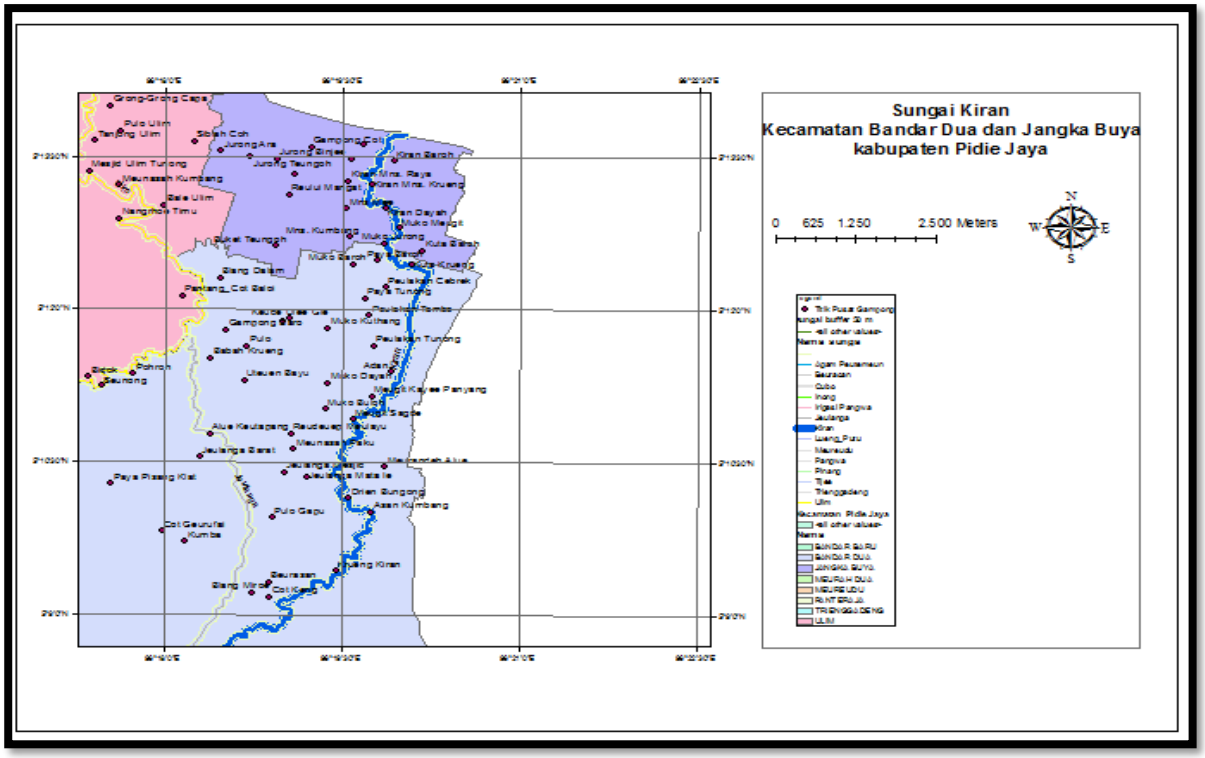


*Sumber : BPBD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

**Gambar 2.10. Peta Sungai Krueng Kiran di Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya**

## 1. Air Permukaan

Kabupaten Pidie Jaya mempunyai area konservasi air yang cukup luas, yaitu di area hutan lindung atau hutan produksi yang berada pada sisi barat, yaitu deretan pegunungan Bukit Barisan. Areal pertanian tanaman pangan atau persawahan ada di lembah atau bagian timur yang bertopografi datar. Area perkebunan ada di perbukitan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, oleh karena itu fungsi hutan sebagai penyangga sumber daya alam dan sumber daya air bagi wilayah permukiman dan pertanian mempunyai arti yang sangat penting. Secara Geografis, potensi Sumber Daya Air di Kabupaten Pidie Jaya, sangat dimungkinkan untuk membangun satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan Tower air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat perkotaan/pedesaan, perumahan, perkantoran, dan zona Industri dalam kurun waktu 5 s.d 20 tahun ke depan.

Pemanfaatan lahan dataran lereng pegunungan dan dataran tinggi untuk tanaman perkebunan yang mempunyai arti penting karena selain penghasil bahan industri atau bahan ekspor juga berperan dalam hidrologi wilayah. Sungai besar maupun kecil yang mengarah ke timur, mata airnya ada di areal hutang lindung.

Adapun sungai-sungai yang berada di wilayah Kabupaten Pidie Jaya adalah sungai Krueng Kalla di Kecamatan Bandar Baru perbatasan dengan Kabupaten Pidie,

sungai Krueng Cubo berada di Kecamatan Panteraja dan Kecamatan Trienggadeng, Krueng Beuracan yang membelah Kecamatan Trienggadeng dan Meureudu, Krueng Meureudu yang membelah Kecamatan Meureudu dengan Kecamatan Meurah Dua, Krueng Ulim yang melintas Kecamatan Ulim dan Krueng Jeulanga yang melintas Kecamatan Bandar Dua dan Jangka Buya. Wilayah sungai yang ada di Kabupaten Pidie Jaya adalah Wilayah Sungai (WS Aceh – Meureudu) yang mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS); a). DAS Krueng Lueng Putu; b). DAS Krueng Pante Raja; c). DAS Krueng Beuracan; d). DAS Krueng Meureudu; e). DAS Krueng Ulim; f). DAS Krueng Jeulanga; dan h). DAS Krueng Kiran.

Air permukaan yang terdapat di wilayah kota Meureudu adalah sungai Krueng Beuracan dan sungai Krueng Meureudu. Sungai Krueng Meureudu ini mempunyai panjang 45 Km, dengan luas DAS 3.770 Km2. Dewasa ini penggunaan badan air tersebut hanya terbatas untuk menampung dan mengalirkan aliran drainase. Sejalan dengan rencana penerapan sempadan sungai dan perlakuan yang baik terhadap sungai diharapkan kualitas air sungai dapat diperbaiki.

**2. Air Bawah Tanah**

Berdasarkan Peta hidrogeologi Indonesia dapat diidentifikasikan jenis litologi batuan (lithological rock types) serta potensi dan prospek air tanah (groundwater potential and prospects). Pada Peta Hidrogeologi Indonesia ditunjukkan adanya indikasi sesar/patahan yang relatif memanjang mengikuti pola pegunungan yang ada di wilayah Aceh (relatif berarah barat laut – tenggara). Terkait dengan aspek hidrogeologi di atas, selanjutnya dikemukakan juga mengenai cekungan air tanah (CAT) yang ada di wilayah Pidie Jaya. Dengan mengacu kepada Atlas Cekungan Air Tanah Indonesia yang diterbitkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2009, pada halaman lembar Aceh, dapat diidentifikasikan ada 1 (satu) Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Pidie Jaya. Berdasarkan qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Cekungan Air Tanah (CAT) seluas 22.380,29 Ha meliputi: a). CAT Sigli seluas 6.354,10 Ha, meliputi Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja; b). CAT Kemiki seluas 3.471,55 Ha, meliputi Kecamatan Merah Dua. C). CAT Jeunib seluas 12.554,63 Ha, meliputi Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Jangka Buya, dan Kecamatan Bandar Dua. Untuk lebih jelasnya seperti dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4.**
**Potensi Cekungan Air Tanah di Kabupaten Pidie Jaya**

| No | Kecamatan | Cekungan | Luas (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Baru | Sigli | 4.566,18 |
| 2 | Bandar Dua | Jeunib | 3.992,11 |
| 3 | Jangka Buya | Jeunib | 926,15 |
| 4 | Meurah Dua | Kemiki | 3.471,55 |
| 5 | Meurah Dua | Jeunib | 1.704,11 |
| 6 | Meureudu | Jeunib | 2.260,97 |
| 7 | Pante Raja | Sigli | 1.236,61 |
| 8 | Trienggadeng | Jeunib | 426,36 |
| 9 | Trienggadeng | Sigli | 551,32 |
| 10 | Ulim | Jeunib | 3.244,94 |
| **Jumlah** | | | **22.380,30** |

*Sumber: Hasil Perhitungan GIS Tahun 2023*

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk dalam melangsungkan kegiatan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/penduduk di Kabupaten Pidie Jaya harus dengan kapasitas yang optimum. Ketersediaan Air bersih sangat tergantung pada sumber air yang dapat di olah dan dimanfaatkan. Sistem distribusi dalam pengadaan air bersih di Kabupaten Pidie Jaya dengan 2 cara, yaitu: melalui jaringan sistem perpipaan PDAM, dan sistem non perpipaan (swadaya masyarakat).

Kondisi sekarang ini, pusat pelayanan PDAM di Kabupaten Pidie Jaya terdapat di beberapa tempat, yaitu Meureudu, Panteraja dan Ulim. Sedangkan untuk daerah-daerah yang belum terlayani oleh PDAM, kebutuhan air bersih pada umumnya diambil dari sumur galian, mata air dan sungai. Sasaran akhir RPJP Kabupaten Pidie Jaya tahun 2035 dalam hal ini daerah perkotaan di Pidie Jaya dapat terlayani jaringan sistem perpipaan PDAM dengan baik.

### 2.1.1.5. Klimatologi

**A. Tipe**

Berdasarkan jumlah bulan kering dan bulan basah maka tipe curah hujan di Kabupaten Pidie Jaya adalah tipe A sesuai rumus Schmidt dan Ferguson. Temperatur berkisar dari suhu minimum 19°C – 22°C sampai dengan suhu maksimum 30°C – 35°C.

**B. Curah hujan**

Menurut Atlas Curah Hujan Bakosurtanal, Kabupaten Pidie Jaya dibagi menjadi 4 kawasan curah hujan, yaitu :

a. Wilayah pantai utara mempunyai curah hujan 1.500 mm/tahun;
b. Wilayah daratan rendah dengan ketinggian 50 – 100 mdplbercurah hujan 1.500 – 2.000 mm/tahun;
c. Wilayah dataran rendah dengan ketinggian 100 – 200 mdplbercurah hujan 2.000 – 2.500 mm/tahun;
d. Wilayah dataran tinggi dengan ketinggian >400 mdplbercurah hujan 2.500 – 3.000 mm/tahun.

Curah Hujan (MM) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanyak satu liter. Hari Hujan adalah hari dengan curah hujan paling sedikit 1 mm/hari (satu milimeter per hari). Untuk lebih jelasnya mengenai curah hujan dan hari hujan selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5.**
**Data Curah Hujan dan Hari Hujan Stasion SMPK BPN Meureudu**
**Selama Kurun Waktu 10 Tahun**

| Bulan | Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | MM | HH | MM | HH | MM | HH | MM | HH | MM | HH | MM | HH | MM | HH | MM | HH | MM | HH | MM | HH |
| **Januari** | 280 | 13 | 329 | 13 | 153 | 11 | 70 | 7 | 86 | 8 | 66 | 5 | 151 | 12 | 326 | 13 | 458 | 12 | 458 | 12 |
| **Februari** | 25 | 3 | 266 | 10 | 63 | 5 | 40 | 5 | 64 | 7 | 319 | 5 | 150 | 8 | 212 | 15 | 313 | 11 | 313 | 11 |
| **Maret** | 72 | 6 | 88 | 4 | 99 | 7 | 23 | 5 | 49 | 7 | 166 | 9 | 136 | 11 | 253 | 11 | 140 | 12 | 140 | 12 |
| **April** | 74 | 5 | 49 | 8 | 38 | 6 | 53 | 6 | 72 | 9 | 312 | 16 | 143 | 10 | 103 | 11 | 43 | 4 | 43 | 4 |
| **Mei** | 110 | 5 | 74 | 6 | 89 | 7 | 58 | 6 | 84 | 10 | 312 | 15 | 148 | 11 | 50 | 6 | 27 | 4 | 27 | 4 |
| **Juni** | 104 | 2 | 136 | 10 | 63 | 5 | 14 | 2 | 26 | 5 | 85 | 7 | 198 | 12 | 183 | 11 | 67 | 2 | 67 | 2 |
| **Juli** | 78 | 12 | 75 | 8 | 65 | 8 | 29 | 4 | 15 | 4 | 192 | 14 | 189 | 14 | 40 | 7 | 23 | 2 | 23 | 2 |
| **Agustus** | 32 | 4 | 40 | 6 | 35 | 4 | 14 | 2 | 47 | 5 | 116 | 7 | 105 | 13 | 173 | 10 | 45 | 4 | 45 | 4 |
| **September** | 174 | 10 | 54 | 4 | 127 | 10 | 73 | 6 | 68 | 6 | 58 | 8 | 169 | 13 | 8 | 4 | 261 | 9 | 261 | 9 |
| **Oktober** | 137 | 9 | 54 | 8 | 133 | 12 | 237 | 12 | 236 | 13 | 21 | 5 | 202 | 17 | 325 | 15 | 262 | 14 | 262 | 14 |
| **November** | 104 | 14 | 182 | 14 | 171 | 15 | 239 | 12 | 234 | 13 | 242 | 16 | 375 | 23 | 359 | 16 | 150 | 17 | 150 | 17 |
| **Desember** | 251 | 10 | 256 | 18 | 233 | 19 | 294 | 14 | 246 | 15 | 210 | 16 | 226 | 18 | 325 | 18 | 235 | 13 | 235 | 13 |
| **Jumlah** | 1.441 | 93 | 1.603 | 109 | 1.266 | 108 | 1.143 | 80 | 1.227 | 102 | 2.099 | 123 | 2.192 | 162 | 2.357 | 137 | 2.024 | 104 | 1.731 | 103 |

*Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Pidie Jaya Tahun 2025*

Curah hujan bulanan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah (0 – 100 mm), menengah ( 100 – 300 mm), tinggi (300 – 500 mm), dan sangat tinggi (>500 mm). Tingkat curah hujan rata-rata selama 10 tahun terakhir di Kabupaten Pidie Jaya tertinggi terjadi pada akhir tahun pada bulan November dan Desember yang

mencapai kisaran 200-360 mm. Rata-rata curah hujan terendah pada umumnya terjadi pada bulan Juni mencapai dikisaran 7-100 mm. Tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November tahun 2024 mencapai 274 mm. Curah hujan terendah pada umumnya terjadi pada bulan Juli tahun 2024 mencapai 40 mm. Rata – rata curah hujan di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2024 sebesar 1.731.

### 2.1.1.6. Pemanfaatan Ruang

#### A. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Pidie Jaya memiliki keunggulan di sektor pertanian dan kelautan yang merupakan penyumbang PDRB terbesar. Padi sawah, kakao dan perikanan merupakan komoditi unggulan daerah yang terus dikembangkan. Seiring dengan perkembangan pembangunan daerah maka Kabupaten Pidie Jaya diharapkan mampu mengembangkan industri-industri pengolahan hasil-hasil pertanian dan perikanan. Disamping itu juga Kabupaten Pidie Jaya terus mengembangkan kawasan peternakan guna mendukung perekonomian masyarakat khususnya kawasan perdesaan.

Ditinjau dari aspek fisiografi kawasan, wilayah Kabupaten Pidie Jaya terbagi atas 3 (tiga) karakteristik kawasan yang berbeda, yaitu kawasan pantai, kawasan daratan, dan kawasan pegunungan. Kawasan pantai dapat diarahkan untuk kegiatan pengembangan budidaya air payau dan perikanan tangkap. Kawasan daratan dapat diarahkan untuk kegiatan pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perikanan air tawar, dan peternakan. Kawasan pegunungan dapat diarahkan untuk kegiatan pengembangan tanaman perkebunan, kehutanan, pengembangan hortikultura dan peternakan.

#### B. Pola Pemanfaatan Ruang

Adapun peruntukan untuk wilayah laut yang luasnya sebesar 210,84 $km^2$ melalui pengembangan budidaya perikanan tangkap, tripang, dan potensi laut lainnya. Berdasarkan ketentuan penggunaan wilayah laut untuk kabupaten/kota berjarak 4 mil dari tepi pantai. Pengembangan sektor kelautan sangat memberikan harapan dan menjanjikan jika dikelola secara baik. Pola pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6.**
**Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pidie Jaya**

| No | Peruntukan | Luas (Ha) | Prosentase |
|---|---|---|---|
| | ***Kawasan Lindung*** | **50.946,86** | **53,51%** |
| 1 | Hutan Lindung | 48.004,21 | 50,42% |
| 2 | Sempadan Sungai | 2.067,15 | 2,17% |
| 3 | Sempadan Pantai | 228,57 | 0,24% |
| 4 | Sungai | 646,93 | 0,68% |
| | ***Kawasan Budidaya*** | **44.264,10** | **46,49%** |
| 5 | Hutan Pendidikan | 150,21 | 0,16% |
| 6 | Hutan Produksi Terbatas | 4.865,11 | 5,11% |
| 7 | Hutan Rakyat | 1.225,39 | 1,29% |
| 8 | Pengembangan Lahan Basah | 75,30 | 0,08% |
| 9 | Kawasan Hankam | 19,94 | 0,02% |
| 10 | Kawasan Pendidikan | 110,16 | 0,12% |
| 11 | Kasawan Holtikultura | 2.331,68 | 2,45% |
| 12 | Kawasan Industri Perikanan | 19,63 | 0,02% |
| 13 | Kawasan Industri | 91,27 | 0,10% |
| 14 | Kawasan Peruntukan Pelabuhan | 21,05 | 0,02% |
| 15 | Lahan Program PLKSDA-BM | 201,86 | 0,21% |
| 16 | Lokasi Transmigrasi | 561,28 | 0,59% |
| 17 | Pemukiman Pedesaan | 3.769,41 | 3,96% |
| 18 | Pemukiman Perkotaan | 2.754,51 | 2,89% |
| 19 | Perikanan | 24,34 | 0,03% |
| 20 | Perkebunan Rakyat | 17.004,26 | 17,86% |
| 21 | Pertanian Lahan Basah | 7.739,21 | 8,13% |
| 22 | Pertanian Lahan Kering | 365,56 | 0,38% |
| 23 | Peternakan | 1.271,55 | 1,34% |
| 24 | Tambak | 1.662,38 | 1,75% |
| | **Total** | **95.210,96** | **100,00** |

*Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034.*

Persentase pembagian pola pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya, yaitu pola pemanfaatan ruang Kabupaten Pidie Jaya yang pertama didominasi oleh kawasan lindung seluas 53,51 persen atau 50.946,86 hektar dan kawasan budidaya seluas 46,49 persen atau 44.264,10 hektar sesuai dengan tata ruang nasional. Kawasan lindung di Kabupaten Pidie Jaya dimanfaatkan sebagai wilayah serapan yang tidak dapat diganggu keberadaannya yang berada di lima Kecamatan sebagai barikut:

a. Kecamatan Bandar Baru dengan luas 8.333,03 Ha, meliputi Gampong Abah lueng, Gampong Meunasah Jiem Jiem dan Gampong Sarah Panyang.
b. Kecamatan Trienggadeng, dengan luas 1,32 Ha, terletak di Gampong Panton Raya.

c. Kecamatan Meureudu dengan luas 4.859,48 Ha, meliputi Gampong Lampoh Lada, dan Gampong Glumpang tutong.
d. Kecamatan Meurah Dua, dengan luas 24.720,08 Ha, meliputi Gampong Lhok Sandeng.
e. Kecamatan Bandar Dua, dengan luas 10.090,38 Ha, meliputi Gampong Kumba Ateueh, Cot Keng, Blang Miro, Krueng Kiran, Kumba, Cot Geurufai, Lhok Pusong, Gaharu, dan Alue Sane.

### 2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

#### A. Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan bencana yang menjadi ancaman serius di Kabupaten Pidie Jaya. Ancaman tersebut berasal dari dua sesar darat yang menjadi pemicu gempa, yaitu sesar Samalanga-Sipopok yang berada melintang tepat di daerah Pidie Jaya, sesar Aceh, dan aktivitas vulkanik gunung api Peuet Sagoe. Selain itu ancaman juga dapat berasal dari zona subduksi yang berada di sebelah barat pulau sumatera yang menjadi pemicu tsunami 2004.

Dalam 20 tahun terakhir, tercatat beberapa peristiwa gempa bumi yang muncul dari sumber-sumber ancaman tersebut yang berdampak ke Kabupaten Pidie Jaya. Pertama yaitu gempa bumi dan tsunami tahun 2004 (9.2 Mw) yang melanda seluruh wilayah Aceh, bersumber dari patahan zona subduksi, gempa Geumpang-Mane tahun 2014 (6.1 Mw) dan gempa bumi Pidie Jaya tahun 2016 (6.5 Mw), bersumber dari sesar Samalanga-Sipopok. Tiga gempa tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan kecuali gempa tahun 2016.

Gempa tahun 2016 yang melanda Pidie Jaya merupakan bencana besar berskala provinsi. Memakan korban sebanyak 97 orang, menyebabkan 86,256 orang menjadi pengungsi, merusak 431 rumah warga, dan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 302.448.908,00. Berdasarkan riwayat dari kejadian tersebut Kabupaten Pidie Jaya dalam kajian risiko bencana provinsi Aceh tahun 2016-2021 dimasukkan ke dalam kategori wilayah dengan tingkat bahaya gempa bumi tinggi.

Berdasarkan KRB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024-2028, total potensi luas bahaya gempabumi di Kabupaten Pidie Jaya adalah 93.900,40 ha dengan kelas bahaya tinggi. Terdapat 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya juga memiliki kelas bahaya tinggi gempabumi, yaitu Kecamatan Bandar Baru, Bandar Dua, Meureudu, Trienggadeng, dan Ulim.

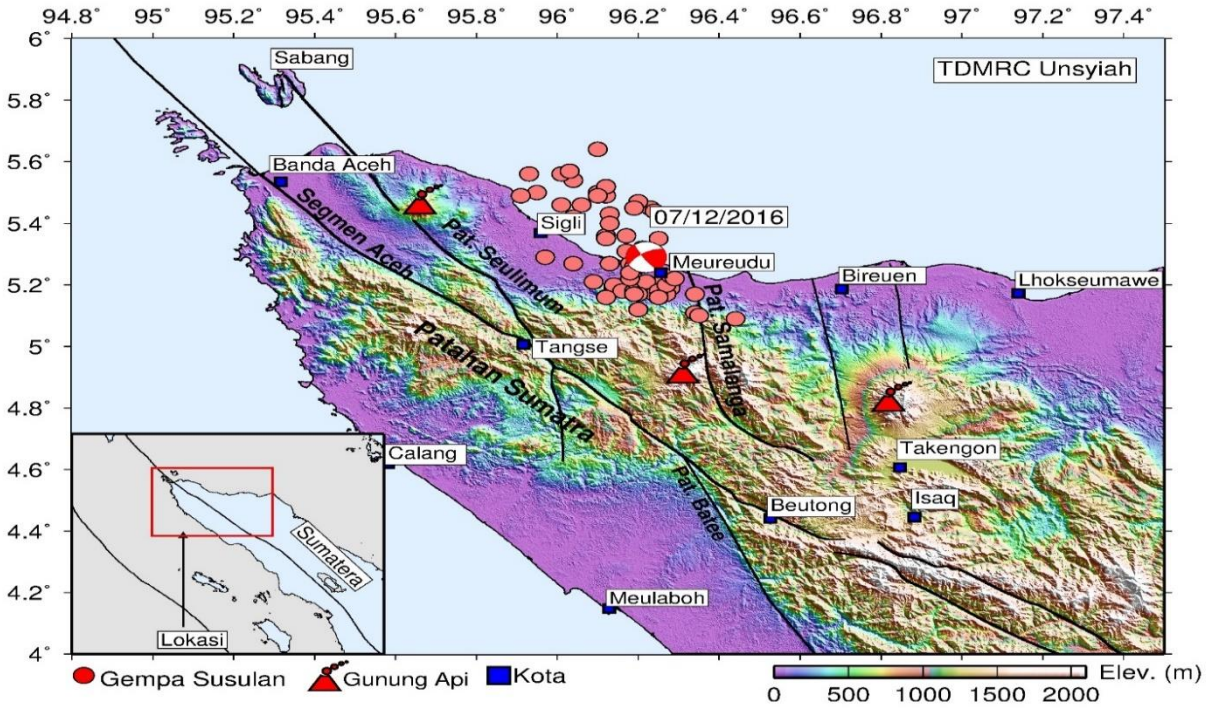


*Sumber : katalog BMKG Tahun 2016*

**Gambar 2.11. Peta Distribusi pusat gempa bumi tanggal 7-13 Desember 2016 di Kabupaten Pidie Jaya**

Rekapitulasi kerusakan sektor perumahan berdasarkan kategori tingkat kerusakan ringan (10.929 unit), kerusakan sedang (4.542 unit) dan kerusakan berat (2.202 unit) yang tersebar di delapan kecamatan. Di samping itu, kerusakan rumah akibat gempa susulan dengan kategori rusak berat sejumlah 715 unit.

## B. Tsunami/ Gelombang Pasang

Daerah/wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang berada di pesisir pantai merupakan daerah/ wilayah potensi rawan bencana tsunami/ gelombang pasang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kecamatan Bandar Baru meliputi Gampong : Cut Njong, Mns.Baro, Sawang, dan Lancang, Paru
2. Kecamatan Penteraja meliputi Gampong : Keude Pante Raja, Reudeup, Peurade dan TU.
3. Kecamatan Trienggadeng meliputi Gampong : Mns. Keude, Meue, Cot Lheue Rheng dan Deah Pangwa
4. Kecamatan Meureudu meliputi Gampong : Meuraksa dan Mns. Balek
5. Kecamatan Meurah Dua meliputi Gampong : Mns Jurong, Lueng Bimba dan Buangan
6. Kecamatan Ulim meliputi Gampong : Tijien Husen, Gelanggang
7. Kecamatan Jangka Buya meliputi Gampong Cot

Peta wilayah rawan bencana tsunami Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.12 dan Jumlah korban dan pengungsi wilayah Kabupaten Pidie Jaya pasca tsunami sebagaimana Tabel 2.7.

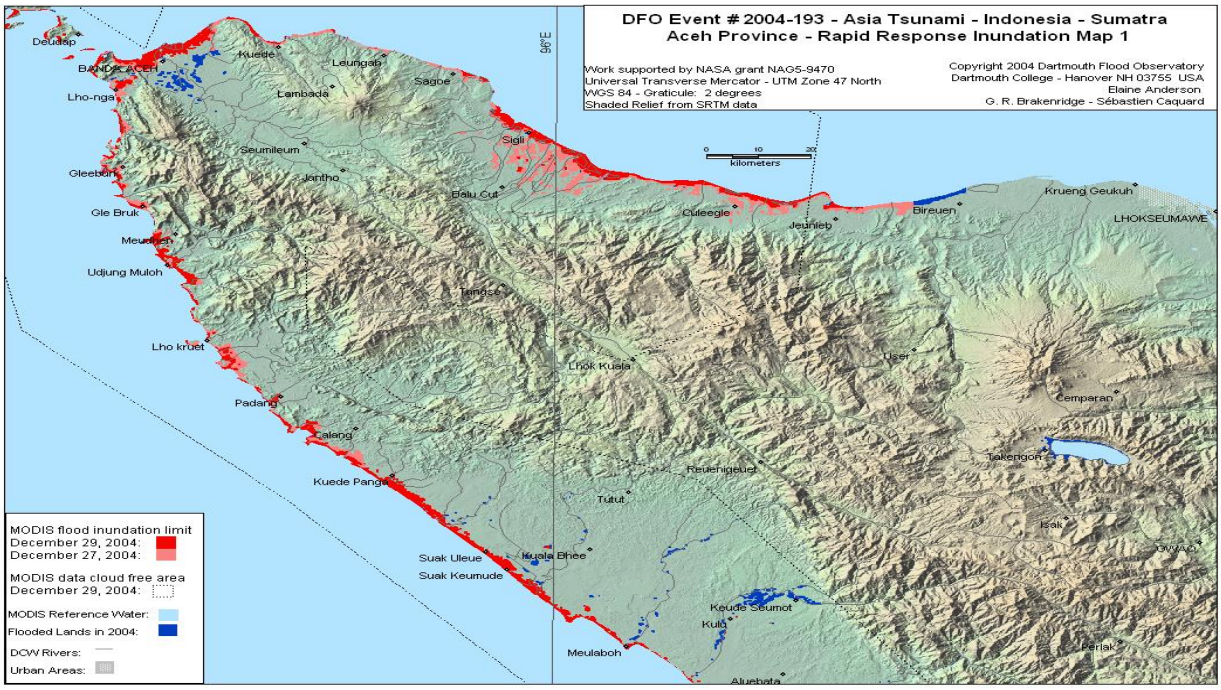


*Sumber : Pictures Of Asian Tsunami Disaster Tahun 2004*

**Gambar 2.12. Wilayah Rawan Bencana Tsunami Aceh**

**Tabel 2.7.**
**Jumlah Korban Jiwa dan Pengungsi Pasca Tsunami**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005**

| No | Kecamatan | Korban (jiwa) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Meninggal | Hilang | Luka-Luka | Pengungsi (jiwa) |
| 1 | Meureudu | 11 | - | - | 110 |
| 2 | Meurah Dua | 1 | - | - | 175 |
| 3 | Bandar Dua | - | - | - | - |
| 4 | Jangka Buya | 25 | 27 | 2 | 1.534 |
| 5 | Ulim | 8 | - | - | 577 |
| 6 | Trienggadeng | 310 | 35 | - | 1.668 |
| 7 | Pante Raja | 191 | 9 | - | 3.022 |
| 8 | Bandar Baru | 15 | - | - | 1.080 |
| **Jumlah** | | **561** | **62** | **2** | **8.166** |

*Sumber: Dinas Sosial Kab. Pidie Tahun 2019*

Bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004 menyebabkan banyaknya penduduk yang kehilangan tempat tinggal dan trauma untuk kembali ke tempat tinggal asalnya. Hal ini menyebabkan terjadi pengungsian yang jumlahnya mencapai 59.058 orang tersebar di sekitar 55 titik, baik yang merupakan penduduk Kabupaten Pidie Jaya maupun penduduk yang mengungsi ke Kabupaten Pidie.

## C. Banjir

Wilayah potensi banjir merupakan wilayah dengan topografi datar dan berada di sekitar sungai. Penentuan area rawan banjir diperoleh dari pendekatan geomorfologi. Masing-masing daerah aliran sungai diidentifikasi untuk dapat ditentukan area tergenang/rawan banjir dan area tidak tergenang/tidak rawan banjir. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024-2028, potensi bahaya banjir di Kabupaten Pidie Jaya mencapai total luas 11.452,97 hektare. Seluruh kecamatan di wilayah ini, kecuali Kecamatan Meureudu, termasuk dalam kategori potensi bahaya banjir tinggi. Terdapat tiga kecamatan dengan total luas terbesar yang termasuk dalam kelas tinggi, yaitu Kecamatan Trienggadeng, Ulim, dan Bandar Dua. Kecamatan Trienggadeng mencatat luas bahaya banjir tertinggi di antara semua kecamatan, yakni sebesar 1.966,66 hektare.

Kecamatan Meureudu termasuk dalam kelas potensi bahaya banjir sedang, dengan luas total 1.739,06 hektare. Selain itu, Kecamatan Ulim, Bandar Dua, dan Bandar Baru masing-masing menunjukkan luas bahaya yang signifikan, masing-masing sebesar 1.849,87 hektare, 1.648,43 hektare, dan 1.359,41 hektare.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah datar di sekitar sungai dengan topografi rendah memiliki risiko banjir yang signifikan, memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan mitigasi bencana untuk mengurangi dampak banjir, terutama di kawasan dengan kategori potensi bahaya tinggi.

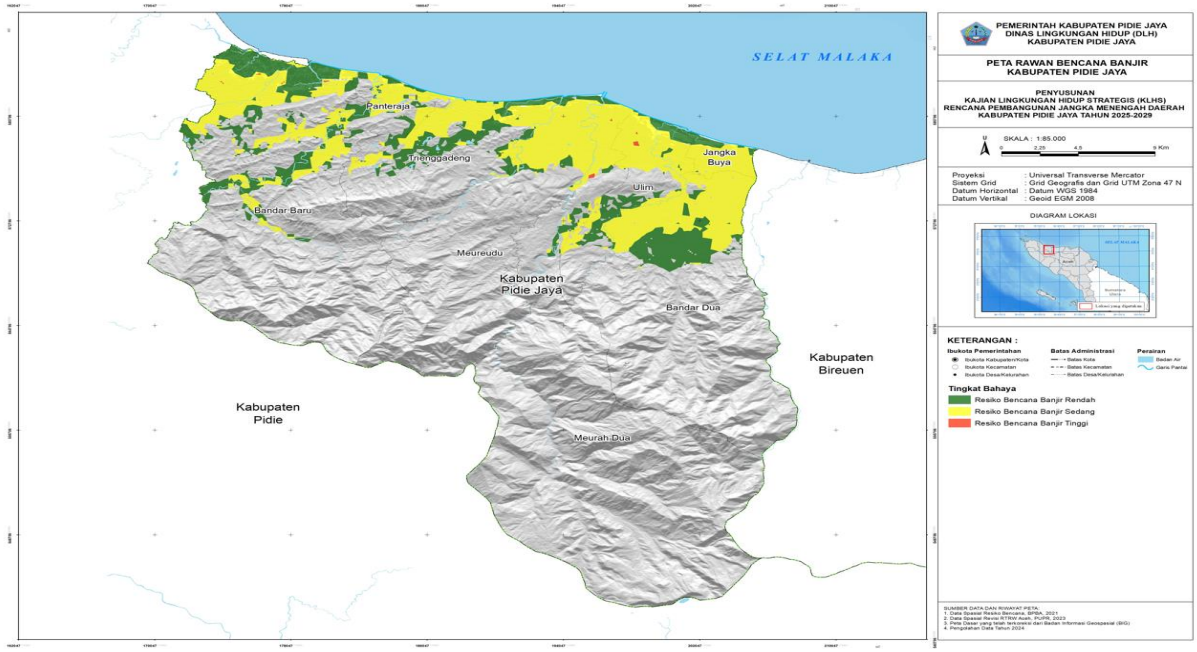


*Sumber: : inaRISK Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP), 2024*

**Gambar 2.13. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Pidie Jaya**

## D. Letusan Gunung Berapi

Walaupun Pidie Jaya tidak memiliki gunung berapi yang aktif, namun dengan adanya Gunung Peut Sagoe yang berada 1 km dari perbatasan Kecamatan Meurah Dua (Pidie Jaya) dengan Kecamatan Geumpang (Pidie), telah memberikan ancaman potensi banjir lahar dan debu panas. Tercatat pada tahun 1974 Gunung Berapi Peut Sagoe yang berada pada Kabupaten tetangga Pidie Jaya (Kabupaten Pidie) pernah meletus dan mengirimkan lahar sampai memasuki kawasan Pidie Jaya sejauh 35 Km, mengakibatkan banyaknya endapan lahar yang menggenangi lembah Blang Raweu, sehingga menimbulkan endapan komposit mineral andesit yang cukup banyak. Sementara debu dan awan panas yang ditimbulkan menyebabkan gangguan kenyamanan pada penduduk yang berada di beberapa desa seperti Sarah Mane, Lhok Sandeng di Kecamatan Meurah Dua, dan Lhok Gajah di Kecamatan Ulim.




*Sumber: BPBD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

**Gambar 2.14. Peta Daerah Resiko Letusan Gunung Api Peut Sago di Kabupaten Pidie Jaya**

## E. Tanah Longsor

Tanah Longsor adalah fenomena geologis, yaitu pergerakan tanah, misalnya jatuhnya bebatuan, aliran reruntuhan, yang bisa terjadi di lepas pantai, pinggir pantai dan di daratan. Klasifikasi gerakan tanah di Kabupaten Pidie Jaya antara lain: Menengah: Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Jangka buya, Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Trienggadeng, dan Kecamatan Ulim. Rendah : Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Jangka buya, Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Pante Raja, Kecamatan Trienggadeng, dan Kecamatan Ulim. Tinggi : Kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Meurah Dua.

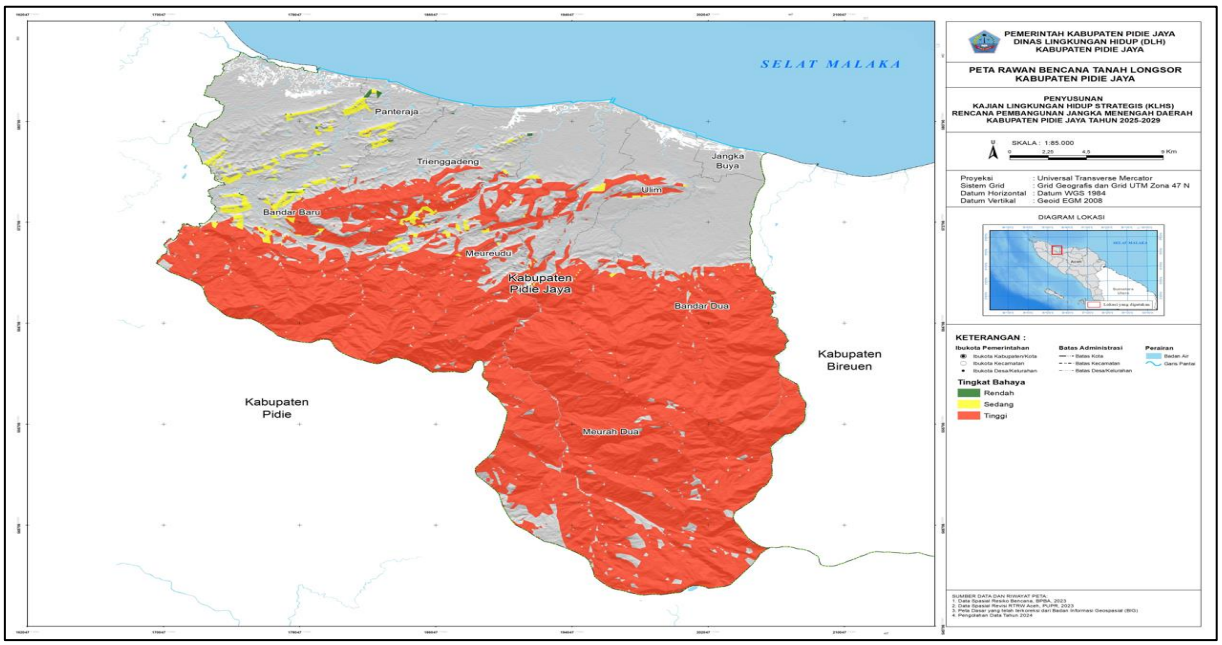


*Sumber: inaRISK Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP), 2023*

**Gambar 2.15. Peta Daerah Resiko Tanah Longsor di Kabupaten Pidie Jaya**

## F. Angin Kencang/Puting Beliung

Kondisi kebencanaan angin puting beliung dipicu oleh kondisi pertemuan kondisi udara kering di pesisir lautan utara Pidie Jaya dengan kondisi kelembaban udara di daerah pegunungan bagian selatan. Klasifikasi angin puting beliung yang ada di Kecamatan Pidie Jaya meliputi: a). Bahaya Menengah: Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Bandar Dua, dan Kecamatan Bandar Baru; b). Bahaya Rendah: Kecamatan Meureudu, Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan Bandar Baru; c). Bahaya Tinggi: Kecamatan Ulim, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Jangka Buya, Kecamatan Bandar Dua, dan Kecamatan Bandar Baru.

## G. Kebakaran

Pidie Jaya memiliki pemukiman penduduk yang terbuat dari bahan bangunan yang mudah terbakar. Kota-kota di kecamatan yang menjadi pasar lokal bagi penduduk sekitar juga memiliki bangunan pertokoan yang berbahan kayu (semi permanen) yang rentan terhadap bencana kebakaran. Bencana kebakaran besar yang pernah terjadi di Pidie Jaya pada tanggal 8 Agustus 2012 yang menghanguskan 21 rumah penduduk di Kecamatan Panteraja.

## H. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang Pasang dan Abrasi, atau erosi pantai adalah proses terkikisnya wilayah pantai dan daratan secara berangsur-angsur yang disebabkan oleh gelombang laut. Bahaya abrasi terjadi pada daerah pantai yang minim vegetasi mangrove seperti tanaman bakau, nipah, cemara laut, yang merupakan benteng alami peredam energi dari hempasan ombak laut dan angin. Gelombang pasang berasal dari badai siklon. Pidie Jaya memiliki garis pantai sepanjang 38,9 km yang terbentang mulai kecamatan Bandar Baru – Jangka Buya, yang rawan terhadap bahaya tsunami dan gelombang pasang. Berdasarkan KRB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024-2028, total potensi luas bahaya gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Pidie Jaya adalah 570,10 ha dengan kelas bahaya tinggi. Kecamatan dengan kelas bahaya tinggi untuk gelombang ekstrem dan abrasi adalah Kecamatan Jangka Buaya, Meurah Dua, Meureudu, Trienggadeng, dan Ulim.

Tanpa penangan yang memadai, dalam waktu jangka panjang, dampak dari abrasi dapat menyebabkan pemukiman penduduk, beserta aset-aset bernilai yang berada di pesisir pantai direklamasi oleh laut. Di Pidie Jaya, ancaman abrasi terjadi pada daerah sempadan pantai yang digunakan untuk kegiatan ekonomi dan budidaya misalnya tambak ikan, industri garam, dan industri kayu arang. Saat ini dampak abrasi telah dirasakan oleh masyarakat di kecamatan Meureudu, Trienggadeng, Panteraja dan wilayah lainnya sepanjang selat Malaka.

Berdasarkan KRB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024-2028, Rencana mitigasi dan adaptasi bencana dapat dilakukan melalui :

- Penyusunan dan penegakan regulasi (Perda, Perbup) terkait penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana.
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tahan bencana (misalnya: tanggul penahan banjir, check dam, bangunan sekolah/rumah sakit yang memenuhi standar).
- Sosialisasi dan edukasi publik tentang bahaya dan cara-cara menghadapi bencana.
- Pengembangan sistem peringatan dini (Early Warning System) untuk berbagai jenis bencana.

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (aparatur dan masyarakat) melalui pelatihan dan simulasi.
- Penyediaan dan penambahan stok logistik dan peralatan kebencanaan.
- Penyusunan Rencana Kontingensi (Renkon) dan Rencana Operasi (Renops).
- Penguatan sistem komando penanganan darurat yang terpadu antar lembaga.
- Peningkatan kapasitas layanan kesehatan dan pelayanan dasar saat tanggap darurat.
- Penyusunan masterplan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana yang terintegrasi. Seperti Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P);
- Mekanisme pendataan kerusakan dan kerugian yang cepat dan akurat melalui Aplikasi SIAP di bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pidie Jaya;
- Program pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak dengan menyiapkan Anggaran dari ABBK dan Bantuan dari BPBA dan BNPB.

### 2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Pidie Jaya memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang beragam dan strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan wilayah daratan seluas 952 km² dan laut seluas 210,85 km², dengan kondisi geografis yang meliputi pegunungan, dataran rendah, dan pesisir sepanjang ±38,9 km, menjadikan Pidie Jaya memiliki potensi besar pada berbagai sektor, di antaranya pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata.

**1. Sektor Pertanian**

Pidie Jaya merupakan daerah sentra produksi pangan di Aceh, dengan komoditas utama padi sawah, jagung, kedelai, ubi kayu, serta berbagai komoditas hortikultura seperti cabai merah, bawang merah, mentimun, dan semangka. Luas lahan sawah mencapai 8.505 hektar dengan mayoritas irigasi teknis, mendukung ketahanan pangan lokal dan potensi surplus untuk pasar regional. Produktivitas padi dan jagung menunjukkan tren positif dengan rata-rata hasil di atas 6,77 ton per hektar.

**2. Sektor Perkebunan**

Sektor perkebunan menjadi penyumbang pendapatan signifikan dengan komoditas unggulan seperti kakao, kelapa, pinang, kelapa sawit, karet, pala,

cengkeh, dan kemiri. Kakao menempati prioritas utama karena memiliki luas areal tanam terbesar dan memberikan kontribusi ekonomi tinggi bagi petani. Komoditas kelapa sawit juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi dengan penerapan praktik berkelanjutan.

**3. Sektor Perikanan dan Kelautan**

Posisi Kabupaten Pidie Jaya yang berbatasan dengan Selat Malaka memberikan potensi besar di sektor perikanan tangkap dan budidaya. Budidaya perikanan payau (tambak) dan air tawar (kolam) banyak berkembang di kecamatan pesisir seperti Bandar Baru, Panteraja, dan Trienggadeng. Komoditas unggulan mencakup udang windu, udang vanamei, bandeng, dan ikan nila.

**4. Sektor Pariwisata**

Potensi keindahan alam Pidie Jaya juga menjadi aset penting, dengan destinasi wisata alam seperti Pantai Wisata Kuthang, Pantai Pasi Aron, Pantai Meurah Setia, Pantai Kuala Kiran, serta objek wisata arung jeram di Krueng Lhok Sandeng. Sumber daya alam pesisir yang belum dikelola secara optimal ini membuka peluang investasi pariwisata berbasis lingkungan.

**5. Sumber Daya Geologis dan Tanah**

Kabupaten Pidie Jaya memiliki formasi geologi berupa batuan sedimen Kuarter dan Tersier, serta tanah subur seperti kambisol, aluvial, dan regosol yang sangat mendukung pengembangan pertanian dan perkebunan.

Dengan pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, potensi sumber daya alam Pidie Jaya dapat menjadi motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup menggunakan kapasitas daya dukung sumber daya air merujuk pada kemampuan lingkungan atau suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan air bagi populasi di dalamnya, termasuk penduduk dan kegiatan pertanian, dengan mempertimbangkan ketersediaan air yang ada. Daya dukung sumber daya air di wilayah tertentu dapat diukur dengan membandingkan kebutuhan air dengan ketersediaan air yang tersedia, atau sebagai

kemampuan maksimum wilayah tersebut dalam menyediakan air bagi penduduk dan kegiatan tertentu. Jika daya dukung suatu wilayah telah melebihi batasnya, maka penduduk dan kegiatan pembangunan tidak akan dapat memperoleh pasokan air yang mencukupi, yang dapat mengakibatkan krisis air atau defisit air. Sebaran Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.8.**
**Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**
**Berdasarkan Daya Dukung Air Kabupaten Pidie Jaya**

| Kecamatan | Daya Dukung dan Daya Tampung Air (Ha) | | | % Luas Daya Dukung dan Daya Tampung Air (Ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Belum Terlampaui | Terlampaui | Total | % Belum Terlampaui | % Terlampaui | % Total |
| Bandar Baru | 14.816,04 | 7.775,16 | 22.591,19 | 15,75% | 8,27% | 24,02% |
| Bandar Dua | 13.397,09 | 3.709,11 | 17.106,21 | 14,25% | 3,94% | 18,19% |
| Jangka Buya | 230,06 | 789,40 | 1.019,46 | 0,24% | 0,84% | 1,08% |
| Meurah Dua | 23.260,70 | 1.004,81 | 24.265,52 | 24,73% | 1,07% | 25,80% |
| Meureudu | 10.345,07 | 5.286,61 | 15.631,67 | 11,00% | 5,62% | 16,62% |
| Panteraja | 636,93 | 1.163,73 | 1.800,66 | 0,68% | 1,24% | 1,91% |
| Trienggadeng | 2.334,55 | 2.984,45 | 5.319,00 | 2,48% | 3,17% | 5,66% |
| Ulim | 1.067,76 | 5.246,08 | 6.313,84 | 1,14% | 5,58% | 6,71% |
| **Total** | **66.088,20** | **27.959,34** | **94.047,54** | **70,27%** | **29,73%** | **100%** |

*Sumber: SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 Tentang Penetapan D3T Air Nasional*

Berdasarkan data pada tabel tersebut Daya Dukung dan Daya Tampung Air (DDA) di Kabupaten Pidie Jaya belum terlampaui mencapai 70,27% atau 66.088,20 Ha. Sedangkan DDA yang sudah terlampaui yaitu 29,73% atau 27.959,34 Ha. Persentase DDA belum terlampaui tertinggi terdapat di Kecamatan Meurah Dua dengan luas 23.260,70 Ha (24,73%) dan DDA dengan persentase belum 41erlampaui terkecil yaitu di Kecamatan Jangka Buya dengan luas 230,06 (0,24%) yang sebagian wilayahnya memiliki ciri kekotaan. DDA Kabupaten Pidie Jaya mengindikasikan bahwa kota ini masih memiliki kapasitas yang sangat besar untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan populasi tanpa memberikan tekanan yang signifikan terhadap sumber daya air mereka. Hal ini dapat menjadi keuntungan dalam merencanakan pengembangan berkelanjutan dan menghindari overeksploitasi sumber daya alam.

**Tabel 2.9.**
**Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Kecamatan**

| Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Ketersediian Air (m3/Tahun) | Kebutuhan Air Domisisili (m3/Tahun) | Kebutuhan Air Lahan (m3/Tahun) | Cadangan Air (m3/Tahun) | Ambang Batas Populasi (Jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Baru | 22.152,17 | 38.303 | 156.850.440 | 4.655.664 | 91.709.728 | 60.485.048 | 196,043 |
| Bandar Dua | 17.246,18 | 29.303 | 118.318.779 | 2.361.658 | 50.523.702 | 65.433.419 | 147,879 |
| Jangka Buya | 949,66 | 11.073 | 9.574.610 | 845,165 | 16.233.405 | - 7.503.960 | 11,968 |
| Meurah Dua | 27.892,28 | 13.187 | 173.114.752 | 472,09 | 9.506.367 | 163.136.295 | 216,363 |
| Meureudu | 12.431,11 | 23.490 | 98.945.934 | 1.616.285 | 57.827.055 | 39.502.594 | 123,658 |
| Panteraja | 1.910,13 | 9.380 | 11.839.228 | 886,81 | 15.060.090 | - 4.107.671 | 14,799 |
| Trienggadeng | 7.398,07 | 24.698 | 33.108.341 | 1.656.374 | 33.259.967 | - 1.808.001 | 41,382 |
| Ulim | 4.067,95 | 17.083 | 37.138.758 | 2.128.205 | 57.893.616 | - 22.883.063 | 46,419 |
| **Total** | **94.047,54** | **166.517** | **638.890.842,62** | **14.622.249,60** | **332.013.932,12** | **292.254.660,91** | **798.511** |

*Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pidie Jaya, 2025*

Dengan jumlah penduduk eksisting yang berjumlah 166.517 jiwa, maka ambang batas D3TLH Kabupaten Pidie Jaya secara indikatif memiliki status belum terlampaui, yang berarti wilayah ini masih aman jauh dari ambang batas sehingga dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis penduduknya masih terjangkau. Persebaran penduduk optimum dijabarkan melalui peta sistem grid sehingga pada masing-masing grid memiliki jumlah yang berbeda. Distribusi dengan rentang jumlah penduduk tertinggi pada grid-nya untuk Kabupaten Pidie Jaya mendominasi di Kecamatan Bandar Baru (38.303) dan Bandar Dua (29.303). Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Sementara untuk distribusi penduduk dengan rentang jumlah penduduk yang rendah pada gridnya berada pada kecamatan Jangka Buya (949,66) Kabupaten Pidie Jaya.

### 2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Kabupaten Pidie Jaya memiliki lahan potensi sangat tinggi dalam menyediakan pangan hanya seluas 8.332,68 Ha atau 8,86 % dari luas wilayahnya. Sedangkan lahan dengan potensi tinggi seluas 7.104,57 Ha atau 7,55 %. Potensi lahan rendah mendominasi yaitu mencapai 47,27 % atau 44.455,85 Ha. Lahan dengan potensi sangat rendah untuk penyediaan pangan mencapai 22.270,98 Ha atau 23,68%. Kecamatan Bandar Dua memiliki persentase tertinggi lahan potensi sangat tinggi untuk pangan dibandingkan kecamatan lain. Luasannya mencapai 2.291,15 Ha atau 13,28% dari luas wilayahnya. Persentase lahan potensi pangan sangat rendah tertinggi adalah Kecamatan Bandar Baru yaitu mencapai 27,14% wilayahnya atau 6.012,34 Ha tidak berpotensi untuk penyediaan pangan.

Berikut ini grafik persentase jasa ekosistem penyediaan pangan dan Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya.

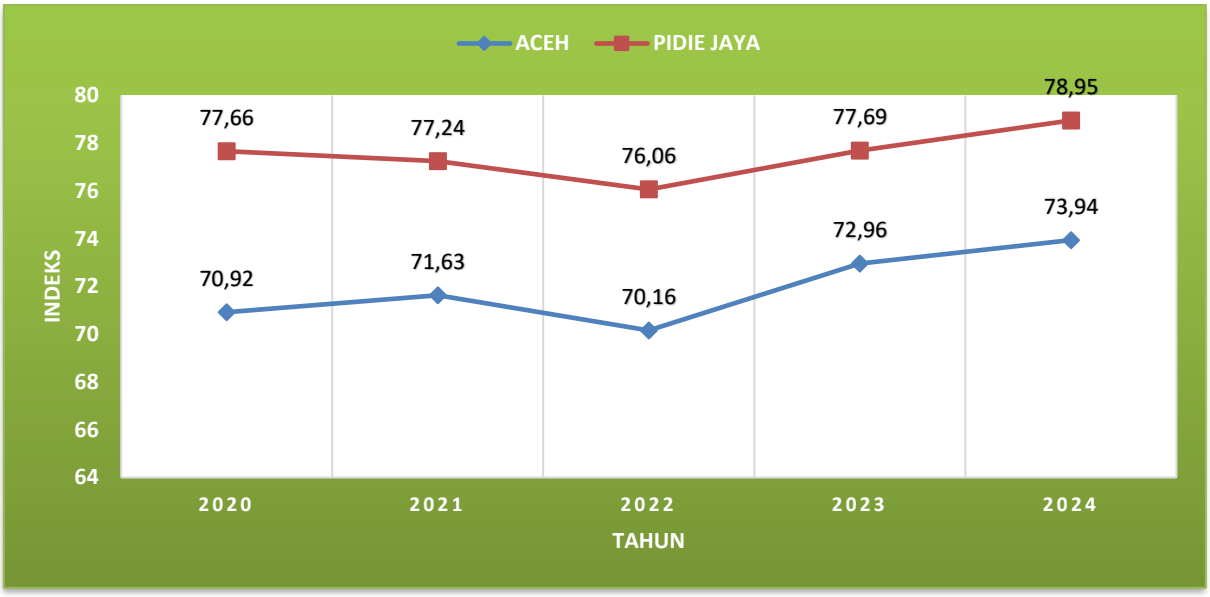


*Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025*

**Gambar 2.16. Indeks Ketahanan Pangan Prov. Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

Gambar diatas menunjukkan perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pidie Jaya selama periode tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, indeks ini mengalami fluktuasi, dengan tren peningkatan yang signifikan pada tahun terakhir pengamatan. Pada tahun 2020, indeks berada pada angka 77,66, kemudian sedikit menurun menjadi 77,24 di tahun 2021. Penurunan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2022, di mana indeks anjlok ke level terendah yaitu 76,06. Namun, kondisi ini segera membaik di tahun 2023 dengan indeks meningkat kembali ke 77,69, dan pada tahun 2024 melonjak lebih tinggi mencapai 78,95, yang menjadi angka tertinggi selama lima tahun terakhir.

Analisis dari data ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan, terutama pada tahun 2022, upaya perbaikan ketahanan pangan di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan hasil yang positif pada dua tahun terakhir. Peningkatan indeks secara tajam pada tahun 2024 mengindikasikan adanya kebijakan atau program yang berhasil meningkatkan aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan secara lebih baik. Hal ini bisa menjadi sinyal keberhasilan intervensi pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan kerawanan pangan dan memperkuat sistem pangan lokal. Evaluasi mendalam terhadap faktor penyebab penurunan di tahun 2022 dan strategi keberhasilan di tahun 2023–2024 akan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan tren positif ini ke depan.

### 2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

**A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Salah satu informasi yang sangat penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah indeks kualitas lingkungan (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat ukur sederhana yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dari upaya untuk pemulihan kualitas lingkungan dan mengurangi laju kerusakan lingkungan. Sebagai indeks komposit, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggabungkan data dari berbagai indikator keberlanjutan seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), menjadi satu nilai yang mudah dipahami dan dapat dikategorikan sebagai kondisi "Sangat Baik", "Baik", "Sedang", "Kurang", atau "Sangat Kurang" (sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 Tahun 2021). Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

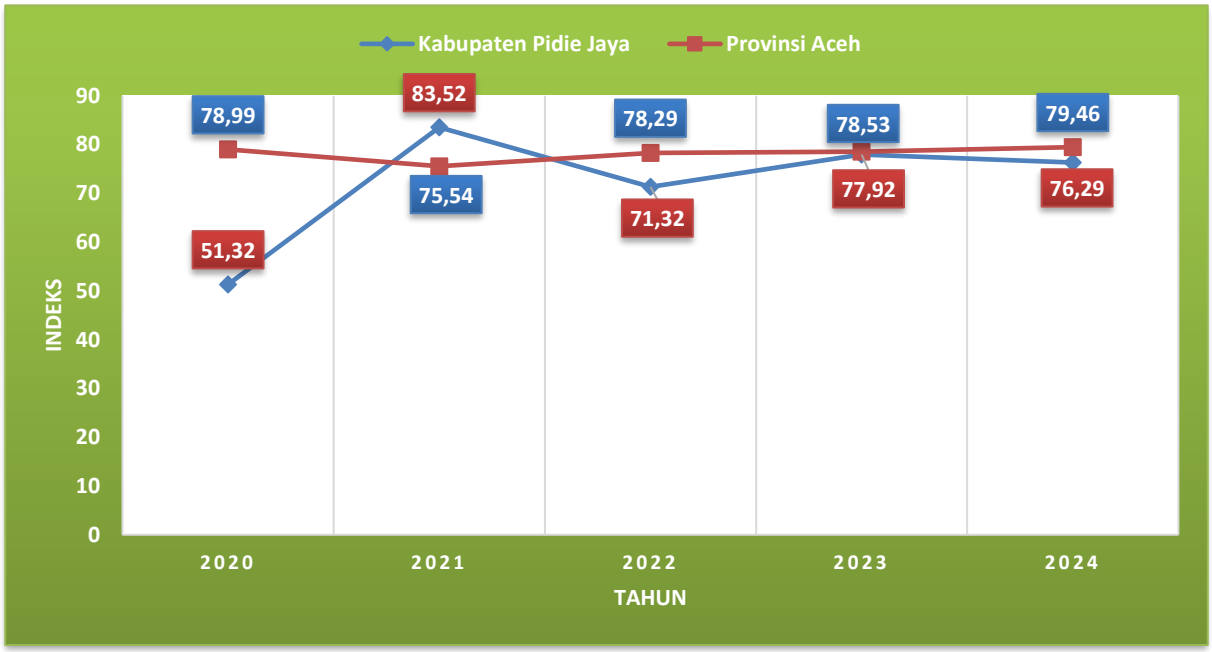


*Sumber: KLHK, 2025*

**Gambar 2.17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Prov. Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKLH) dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2020 Indeks IKLH Kabupaten Pidie yaitu 51,32 dan pada tahun 2024 sudah meningkat menjadi 76,92.

**B. Indeks Kualitas Air**

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air di suatu wilayah, dihitung berdasarkan parameter fisik, kimia, dan biologi seperti

pH, oksigen terlarut (DO), serta zat pencemar. IKA berfungsi sebagai indikator untuk menilai tingkat pencemaran air, yang hasilnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, mulai dari memenuhi baku mutu hingga tercemar berat. Data ini menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dan perbaikan kualitas lingkungan perairan. Data Indeks Kualitas Air Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

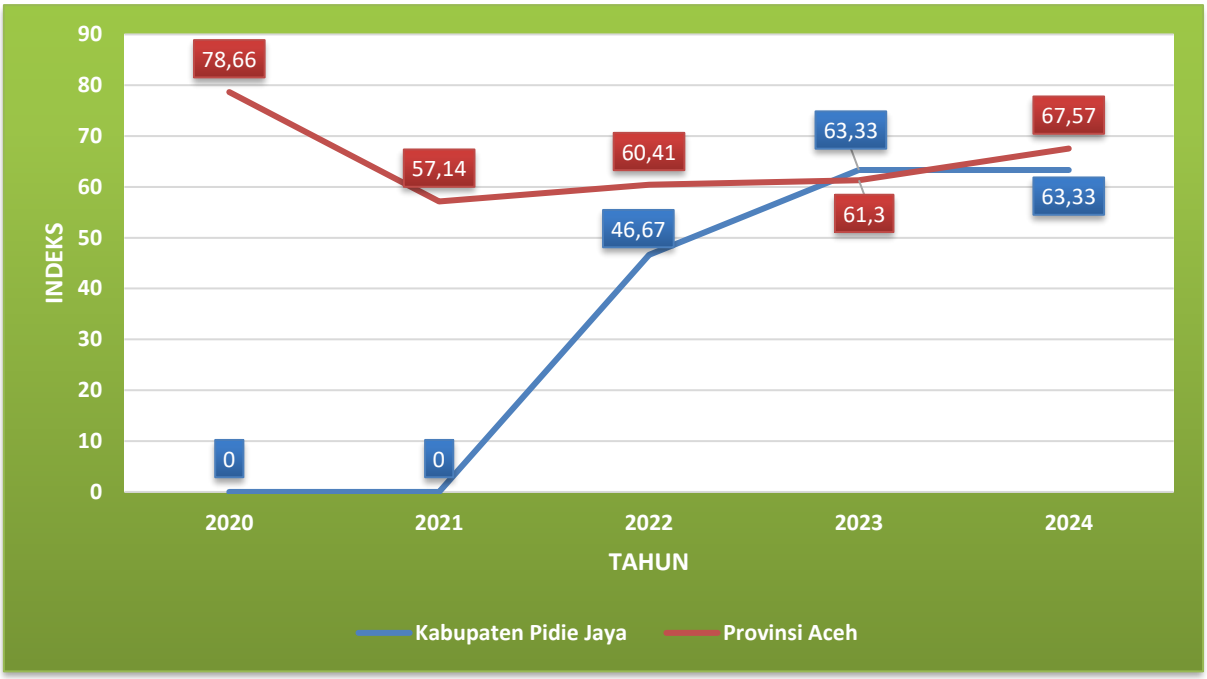


*Sumber: KLHK, 2025*

**Gambar 2.18. Indeks Kualitas Air Prov. Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

### C. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah nilai komposit yang menggambarkan tingkat kebersihan udara di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKU, yang di Indonesia dikenal sebagai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), dihitung berdasarkan konsentrasi berbagai polutan seperti partikel halus (PM2.5 dan PM10), ozon (O3), dan karbon monoksida (CO). Semakin tinggi nilai IKU, semakin berbahaya kondisi udara bagi kesehatan, dan klasifikasinya ditentukan oleh kategori tertentu, mulai dari kondisi Baik hingga Berbahaya. Data ini penting untuk menginformasikan publik dan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengendalian polusi udara. Data Indeks Kualitas Udara secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

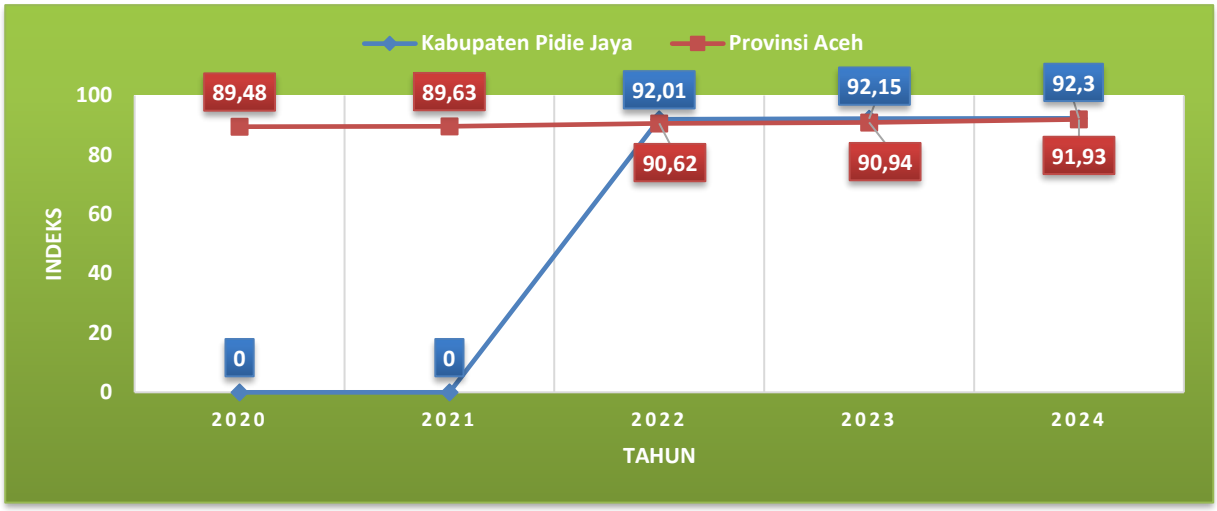


*Sumber: KLHK, 2025*

**Gambar 2.19. Indeks Kualitas Udara Prov. Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

### D. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan di suatu wilayah, dihitung berdasarkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi non-hutan. IKTL mencerminkan kemampuan lahan dalam mendukung keseimbangan ekosistem, seperti menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi erosi. Nilai ini merupakan salah satu komponen penting dalam Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan menjadi bagian dari penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia. Data Indeks Kualitas tutupan lahan secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

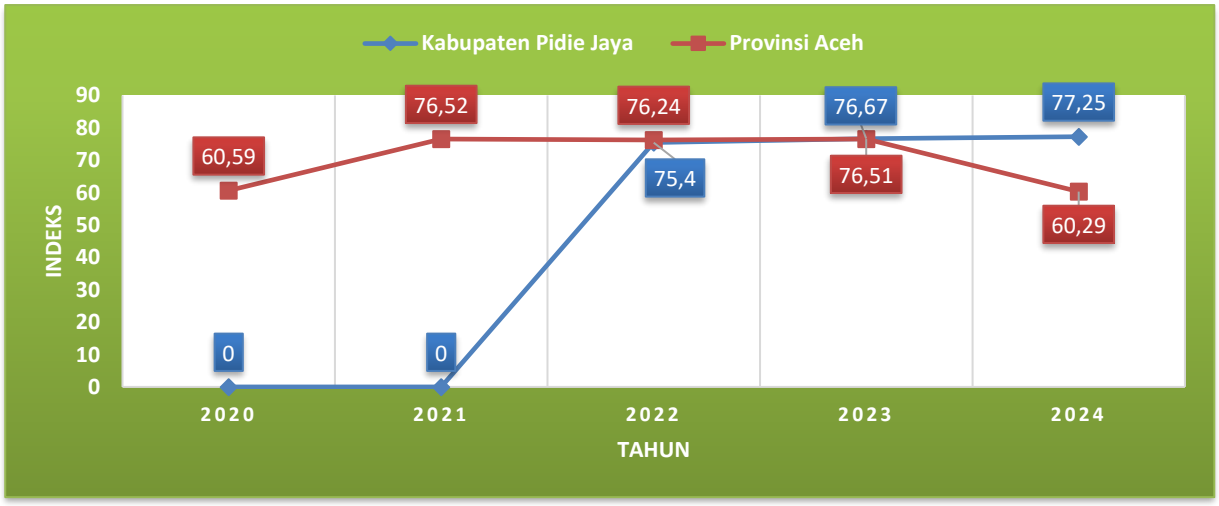


*Sumber: KLHK, 2025*

**Gambar 2.20. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Prov. Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

**E. Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman**

Kondisi pelayanan akses sanitasi layak juga terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian akses sanitasi layak di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Sektor sanitasi peningkatan capaian terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik. Secara rinci Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak.

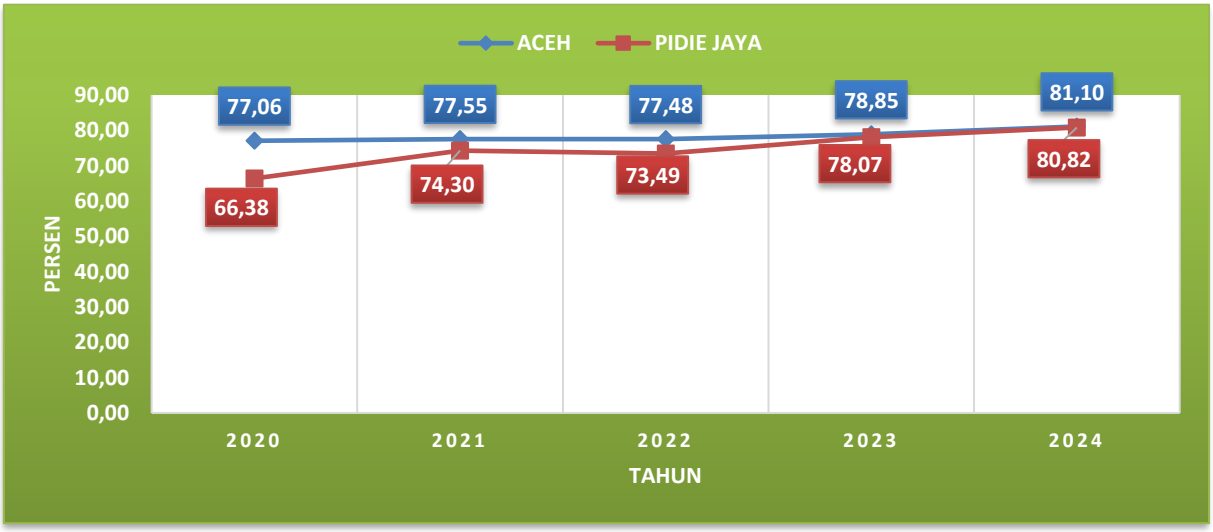


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025*

**Gambar 2.21. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Prov. Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020-2024**

### 2.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Pidie Jaya menjadi agenda prioritas, terutama setelah gempa bumi tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah merumuskan kebijakan, seperti Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Bencana, yang menjadi landasan bagi upaya mitigasi dan adaptasi. Kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kementerian, dan lembaga terkait juga diperkuat, termasuk dalam revisi tata ruang wilayah untuk mengakomodasi kawasan rawan bencana dan inisiatif konservasi untuk mengurangi dampak lingkungan. Di samping itu, partisipasi masyarakat, didukung kearifan lokal seperti gotong royong, memainkan peran krusial dalam proses pemulihan pasca-gempa. Meskipun telah ada kemajuan, tantangan seperti keterbatasan sumber daya operasional BPBD, risiko lingkungan, dan kebutuhan akan edukasi mitigasi yang lebih merata masih perlu terus diatasi

## A. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat atau kategori risiko bencana di Indonesia, yaitu: kategori rendah (<36), sedang (36-144) dan tinggi (>144). Data tahun 2024, menunjukkan IRB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 memiliki tingkat risiko bencana sedang mencapai 137,60. Perbandingan IRB Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan Nasional sebagai berikut.

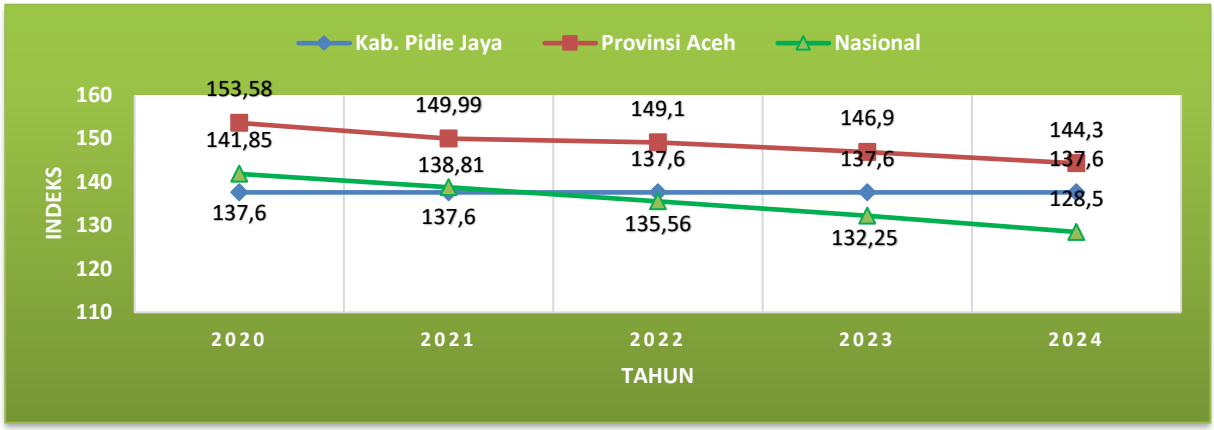


*Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025*

**Gambar 2.22. Indek Risiko Bencana Kab. Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**

## B. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Semakin tinggi nilai IKD, semakin baik kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan merespons tantangan-tantangan yang mungkin timbul. Data indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada gambar berikut.

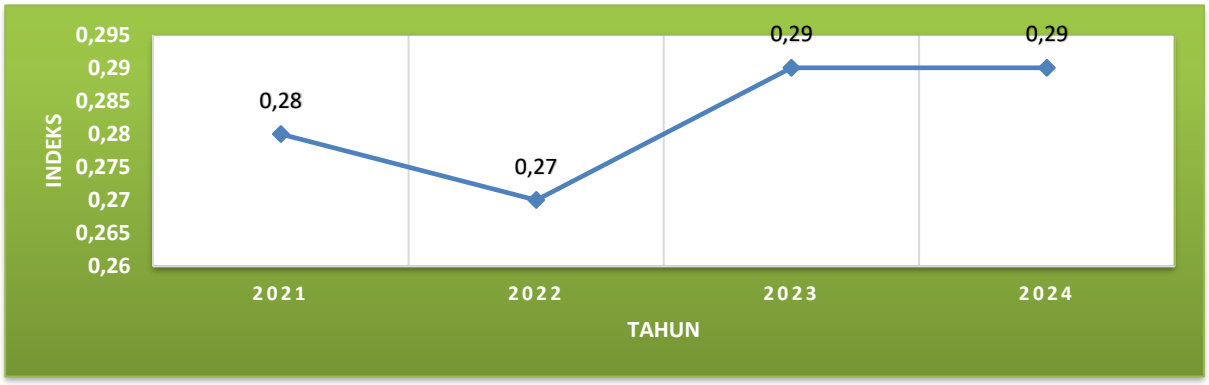


*Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025*

**Gambar 2.23. Indek Ketahanan Daerah Kab. Pidie Jaya Tahun 2021-2024**

### 2.1.7. Demografi

Potensi demografi adalah kondisi penduduk yang meliputi jumlah, kualitas, administrasi dan karakteristik pembangunan penduduk dalam suatu daerah. Pembangunan bidang kependudukan merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Karakteristik pembangunan dilakukan dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk melalui keluarga sejahtera dan mandiri.

#### 2.1.7.1 Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024 sebesar 166.517 jiwa. Bila rata-rata 4 jiwa per rumah tangga, maka total rumah tangga sebanyak 50.687 KK. Adapun rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun terhitung 2 tahun terakhir yakni dari tahun 2023 ke 2024 mencapai 1,79% dengan tingkat kepadatan 143,20 jiwa/km$^2$. Lebih jelas tentang jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.10.

**Tabel 2.10.**
**Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya per Kecamatan Tahun 2020-2024**

| No | Kecamatan | Jumlah (jiwa/tahun) | | | | | Kepadatan (jiwa/km$^2$) Th 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Bandar Baru | 37.726 | 37.052 | 36.943 | 37.596 | 38.303 | 136,19 |
| 2 | Panteraja | 9.219 | 9.076 | 9.059 | 9.274 | 9.380 | 234,27 |
| 3 | Trienggadeng | 24.278 | 23.854 | 23.913 | 24.380 | 24.698 | 192,95 |
| 4 | Meureudu | 22.812 | 22.493 | 22.745 | 23.101 | 23.490 | 149,87 |
| 5 | Meurah Dua | 12.853 | 12.744 | 12.924 | 13.035 | 13.187 | 45,13 |
| 6 | Ulim | 16.595 | 16.376 | 16.452 | 16.735 | 17.083 | 281,29 |
| 7 | Jangka Buya | 10.545 | 10.488 | 10.630 | 10.801 | 11.073 | 373,71 |
| 8 | Bandar Dua | 28.146 | 27.858 | 28.162 | 28.669 | 29.303 | 168,16 |
| **Jumlah** | | **162.174** | **159.941** | **160.828** | **163.591** | **166.517** | **143,20** |

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

#### 2.1.7.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 1,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk pada tahun 2023 adalah 163.591 jiwa, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 166.517 jiwa. Peningkatan ini bervariasi di setiap kecamatan, dengan laju pertumbuhan tertinggi tercatat di Kecamatan Jangka Buya sebesar 2,52%, diikuti oleh Kecamatan Bandar Dua dengan

2,21%, dan Kecamatan Ulim 2,08 serta Bandar Baru sebesar 1,88%. Kecamatan dengan laju pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Panteraja yang mengalami sedikit penurunan sebesar 1,14% sebagaimana terlihat pada Tabel 2.11 di bawah ini

**Tabel 2.11.**
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | | Laju Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | |
| 1 | Bandar Baru | 37.596 | 38.303 | 1,88 |
| 2 | Pante Raja | 9.274 | 9.380 | 1,14 |
| 3 | Trienggadeng | 24.380 | 24.698 | 1,30 |
| 4 | Meureudu | 23.101 | 23.490 | 1,68 |
| 5 | Meurah Dua | 13.035 | 13.187 | 1,17 |
| 6 | Ulim | 16.735 | 17.083 | 2,08 |
| 7 | Jangka Buya | 10.801 | 11.073 | 2,52 |
| 8 | Bandar Dua | 28.669 | 29.303 | 2,21 |
| **Laju Pertumbuhan** | | **163.591** | **166.517** | **1,79** |

*Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pidie Jaya, 2025*

Kabupaten Pidie Jaya memiliki kepadatan penduduk yang masih relatif jarang khususnya pada kecamatan tertentu. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Jangka Buya, ini disebabkan karena luas wilayah yang tidak terlalu besar, sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Meurah Dua karena luas wilayahnya merupakan terbesar dari 7 kecamatan lainnya. Untuk kecamatan Meureudu yang merupakan ibu kota Kabupaten Pidie Jaya mempunyai kepadatan penduduk 149,87 jiwa/km2. Sedangkan untuk jumlah anggota keluarga per rumah tangga (RT) mencapai rata - rata 4 orang. Sedangkan untuk jumlah anggota keluarga per rumah tanggga (RT) mencapai rata - rata 4 orang. Lebih jelas tentang jumlah rumah tangga dan jumlah rata-rata jiwa/RT dapat dilihat pada Tabel 2.12.

**Tabel 2.12.**
**Kepadatan Penduduk, Rumah Tangga, dan Jumlah Jiwa/RT di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Luas Wilayah ($Km^2$) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/$Km^2$) | Jumlah Rumah Tangga (RT) | Jumlah Jiwa/RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Baru | 281,24 | 38.303 | 136,19 | 11.885 | 3,2 |
| 2 | Pante Raja | 40,04 | 9.380 | 234,27 | 2.943 | 3,1 |
| 3 | Trienggadeng | 128,00 | 24.698 | 192,95 | 7.844 | 3,1 |
| 4 | Meureudu | 156,74 | 23.490 | 149,87 | 7.261 | 3,2 |
| 5 | Meurah Dua | 292,20 | 13.187 | 45,13 | 3.999 | 3,2 |
| 6 | Ulim | 60,73 | 17.083 | 281,29 | 5.076 | 3,3 |
| 7 | Jangka Buya | 29,63 | 11.073 | 373,71 | 3.296 | 3,3 |
| 8 | Bandar Dua | 174,26 | 29.303 | 168,16 | 8.859 | 3,3 |
| **Jumlah** | | **1.162,84** | **166.517** | **143,20** | **51.163** | **3,3** |

*Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Penduduk Kabupaten Pidie Jaya didominasi oleh suku Aceh yaitu mencapai 97% dan selebihnya adalah suku lain seperti Jawa, Batak, Sunda dan lain-lain. Mayoritas penduduk Kabupaten Pidie Jaya memeluk agama Islam (Muslim).

Seiring dengan tingginya minat penduduk Kabupaten Pidie Jaya untuk menempuh jalur pendidikan formal pada setiap tingkat pendidikan, pada kenyataannya hal tersebut tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja pada sektor tersebut. Data BPS Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 untuk laki-laki mencapai 8,37% atau 3.059 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja 36.540 jiwa. Untuk perempuan 22,14% atau 2.768 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja 12.498 jiwa. Sedangkan secara keseluruhan mencapai 11,88% atau 5.827 jiwa dari keseluruhan angkatan kerja yang berjumlah 49.038 jiwa. Angka tersebut diatas rata-rata TPT Aceh yakni 5,75%. Bertambahnya jumlah angkatan kerja masih belum disertai oleh peningkatan ketersediaan dan keberagaman lapangan pekerjaan, sehingga angka pengangguran terhitung masih relatif tinggi.

Data Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 menjelaskan bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk Kabupaten Pidie Jaya lebih memilih sektor pertanian dan jasa-jasa sebagai mata pencaharian utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis daerah yang mendukung. Kemudian diikuti dengan wiraswasta, perdagangan dan nelayan serta sektor lainya. Sulitnya membuka lapangan usaha dan terkendala pada kemampuan permodalan serta pemasaran adalah faktor utama penyebab pengangguran daerah.

**Tabel 2.13.**
**Mayoritas Profesi/Mata Pencaharian Penduduk**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024**

| No. | Profesi/Mata Pencaharian | Jumlah | Prosentase |
|---|---|---|---|
| 1. | Petani/Pekebun | 23.595 | 14,16 |
| 2. | Nelayan | 2.788 | 1,67 |
| 3. | Pedagang | 2.011 | 1,20 |
| 4. | Wiraswasta | 10.925 | 6,56 |
| 5. | PNS | 3.267 | 1,96 |
| 6. | TNI/POLRI | 501 | 0,30 |
| 7. | Karyawan/Honorer | 1.548 | 0,92 |
| 8. | Lain-lain | 6.791 | 4,07 |
| 9. | Ibu RT, Pelajar, Mahasiswa, Balita (*Belum/Tidak Bekerja*) | 115.118 | 69,13 |
| **Jumlah Penduduk** | | 166.517 | 100 |

*Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Sementara itu, Data BPS Tahun 2025 menjelaskan bahwa penduduk Pidie Jaya yang bekerja menurut lapangan usaha dibagi menjadi 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pidie Jaya. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 46,58 persen (angka ini turun dari sebelumnya 46,99 persen jika dibandingkan dengan 4 tahun terakhir di tahun 2020). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 11,71 persen (naik dari 10,52 persen di tahun 2020), disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,10 persen (turun dari 11,41 persen di tahun 2020).

Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan dari tahun sebelumnya. Sebaliknya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami penurunan. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 9 persen.

Data BPS tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat penduduk yang pekerjaannya tidak tetap atau sering berpindah profesi khususnya pada lapangan usaha pertanian seperti petani, nelayan, dan buruh. Hal tersebut disebabkan banyak petani, pekebun dan nelayan mengeluh lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain. Keadaan ini tidak tertutup kemungkinan angka pengangguran daerah akan semakin tinggi apabila mereka tidak menjalankan mata pencaharian tersebut secara yakin dan sungguh-sungguh. Dampak lainnya yang dirasakan akibat perpindahan profesi atau mata pencaharian sektor pertanian/perkebunan adalah menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB akan terus menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 9 persen. Berikut adalah kelompok lapangan usaha untuk penduduk yang bekerja dapat dilihat dalam Gambar 2.24.

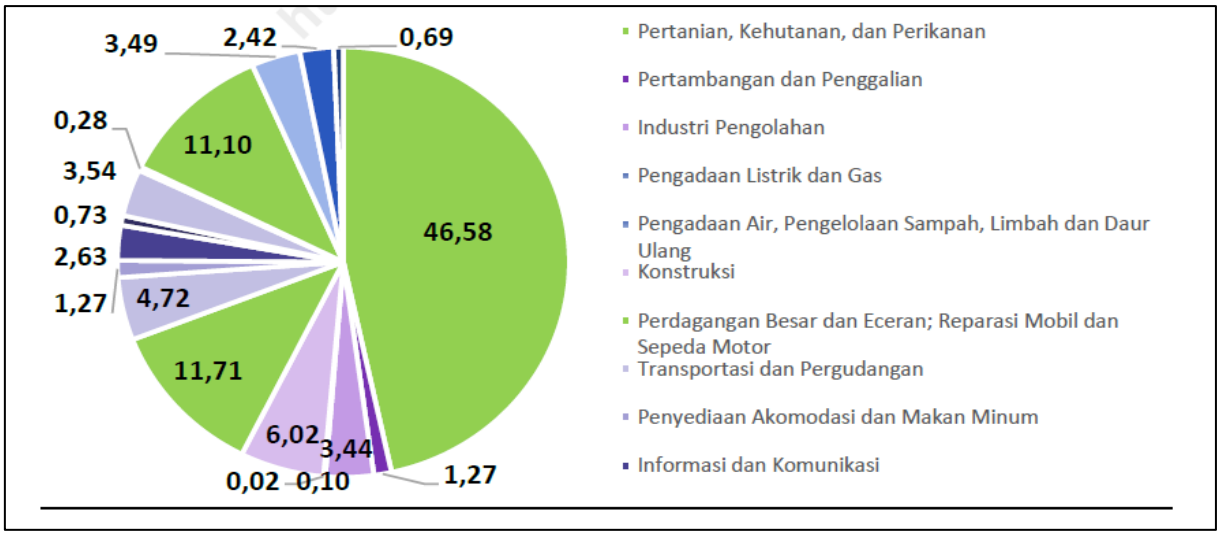


*Sumber: BPS Kab. Pidie Jaya Tahun 2025 (Inkesra)*

**Gambar 2.24. Prosentase Lapangan Usaha Bagi Penduduk yang Bekerja Tahun 2024**

Data BPS tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat penduduk yang pekerjaannya tidak tetap atau sering berpindah profesi khususnya pada lapangan usaha pertanian seperti petani, nelayan, dan buruh. Hal tersebut disebabkan banyak petani, pekebun dan nelayan mengeluh lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain. Keadaan ini tidak tertutup kemungkinan angka pengangguran daerah akan semakin tinggi apabila mereka tidak menjalankan mata pencaharian tersebut secara yakin dan sungguh-sungguh. Dampak lainnya yang dirasakan akibat perpindahan profesi atau mata pencaharian sektor pertanian/perkebunan adalah menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB akan terus menurun.

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diukur secara komprehensif, tidak hanya melalui indikator ekonomi, tetapi juga melalui akses terhadap layanan dasar, jaminan sosial, dan kualitas hidup yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan di bidang kesejahteraan masyarakat akan menjadi prioritas utama untuk mengatasi tantangan seperti kemiskinan, ketimpangan, dan pemenuhan hak-hak dasar, dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komunitas, termasuk kelompok perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. Strategi yang akan dijalankan akan berfokus pada penguatan ketahanan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta perluasan perlindungan sosial, guna memastikan setiap individu dan keluarga dapat hidup secara mandiri, bermartabat, dan berkontribusi secara produktif terhadap kemajuan daerah

### 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Berbagai indikator penting guna melihat tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diantaranya seperti Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Inflasi, PDRB per Kapita, Indeks Gini, dan tingkat kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai hasil maksimal perlu percepatan pertumbuhan sektor-sektor pendukung perekonomian seperti sektor pertanian, pertambangan dan energi, industri pengolahan, konstruksi/bangunan perdagangan, transportasi dan jasa-jasa.

#### 2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi yang paling sering digunakan dalam menilai kinerja perekonomian daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan PDRB, dimana telah terjadi berubah metode perhitungannya dimulai dari tahun 2015 yang mana sebelumnya, PDRB dihitung berdasarkan 9 (Sembilan) sektor lapangan usaha, kini telah dihitung berdasarkan 17 (Tujuh Belas) sektor lapangan usaha. Perhitungan tersebut menunjukkan struktur pembangunan ekonomi daerah atau Kabupaten Pidie Jaya sejak 5 tahun terakhir, dimana sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan telah memberikan kontribusi besar terhadap PDRB.

Laju Pertumbuhan Ekonomi secara umum adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar peningkatan nilai total produksi barang dan jasa (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, biasanya dari tahun ke tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur dinamika aktivitas ekonomi, mencerminkan kinerja ekonomi suatu daerah, serta menjadi dasar dalam mengevaluasi kebijakan pembangunan. Jika laju pertumbuhan ekonomi positif, berarti terjadi ekspansi atau pertumbuhan ekonomi, sedangkan jika negatif menunjukkan kontraksi atau penurunan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan menjadi tujuan utama pemerintah karena berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.

Kontribusi Nilai PDRB ADHB Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat dalam Tabel 2.14 dan Persentase kontribusi PDRB ADHB Tahun 2024 dapat dilihat pada pada Gambar 2.25 sebagai berikut:

**Tabel 2.14.**
**PDRB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Berlaku 2020 - 2024**
**Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)**

| No | Sektor | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1.644,77 | 46,99 | 1.694,80 | 46,05 | 1.849,13 | 46,46 | 2.023,66 | 46,53 | 2.200,63 | 46,58 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 46,96 | 1,34 | 49,61 | 1,35 | 55,79 | 1,40 | 58,75 | 1,35 | 59,95 | 1,27 |
| 3 | Industri Pengolahan | 107,64 | 3,08 | 119,49 | 3,25 | 138,05 | 3,47 | 151,71 | 3,49 | 162,37 | 3,44 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 4,00 | 0,11 | 4,08 | 0,11 | 4,38 | 0,11 | 4,74 | 0,11 | 4,85 | 0,10 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah Daur Ulang | 0,63 | 0,02 | 0,71 | 0,02 | 0,92 | 0,02 | 0,96 | 0,02 | 1,07 | 0,02 |
| 6 | Konstruksi | 273,85 | 7,82 | 271,59 | 7,38 | 274,96 | 6,91 | 279,03 | 6,42 | 284,47 | 6,02 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Enceran; Reparasi Kendaraan | 368,21 | 10,52 | 392,44 | 10,66 | 436,76 | 10,97 | 508,47 | 11,69 | 553,19 | 11,71 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 105,93 | 3,03 | 136,02 | 3,70 | 157,7 | 3,96 | 194,96 | 4,48 | 222,82 | 4,72 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 35,59 | 1,02 | 34,54 | 0,94 | 48,20 | 1,21 | 55,52 | 1,28 | 60,16 | 1,27 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 92,52 | 2,64 | 100,94 | 2,74 | 112,99 | 2,84 | 119,53 | 2,75 | 124,16 | 2,63 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 31,13 | 0,89 | 29,11 | 0,79 | 29,76 | 0,75 | 27,38 | 0,63 | 34,41 | 0,73 |
| 12 | Real Estat | 140,27 | 4,01 | 142,65 | 3,88 | 152,35 | 3,83 | 165,51 | 3,81 | 167,3 | 3,54 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 9,84 | 0,28 | 10,08 | 0,27 | 12,31 | 0,31 | 12,87 | 0,30 | 13,27 | 0,28 |
| 14 | Adm Pemerintah,Pertahanan, Jaminan Sosial wajib | 399,52 | 11,41 | 441,01 | 11,98 | 434,77 | 10,92 | 460,8 | 10,60 | 524,56 | 11,10 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 136,16 | 3,89 | 140,5 | 3,82 | 144,60 | 3,63 | 150,02 | 3,45 | 164,92 | 3,49 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 81,51 | 2,33 | 89,8 | 2,44 | 101,43 | 2,55 | 104,10 | 2,39 | 114,14 | 2,42 |
| 17 | Jasa Lainnya | 21,85 | 0,62 | 22,77 | 0,62 | 26,06 | 0,65 | 31.08 | 0,71 | 32,56 | 0,69 |
| **PDRB** | | **3.500,37** | **100** | **3.680,15** | **100** | **3.980,18** | **100** | **4.349,09** | **100** | **4.724,84** | **100** |

*Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025.*

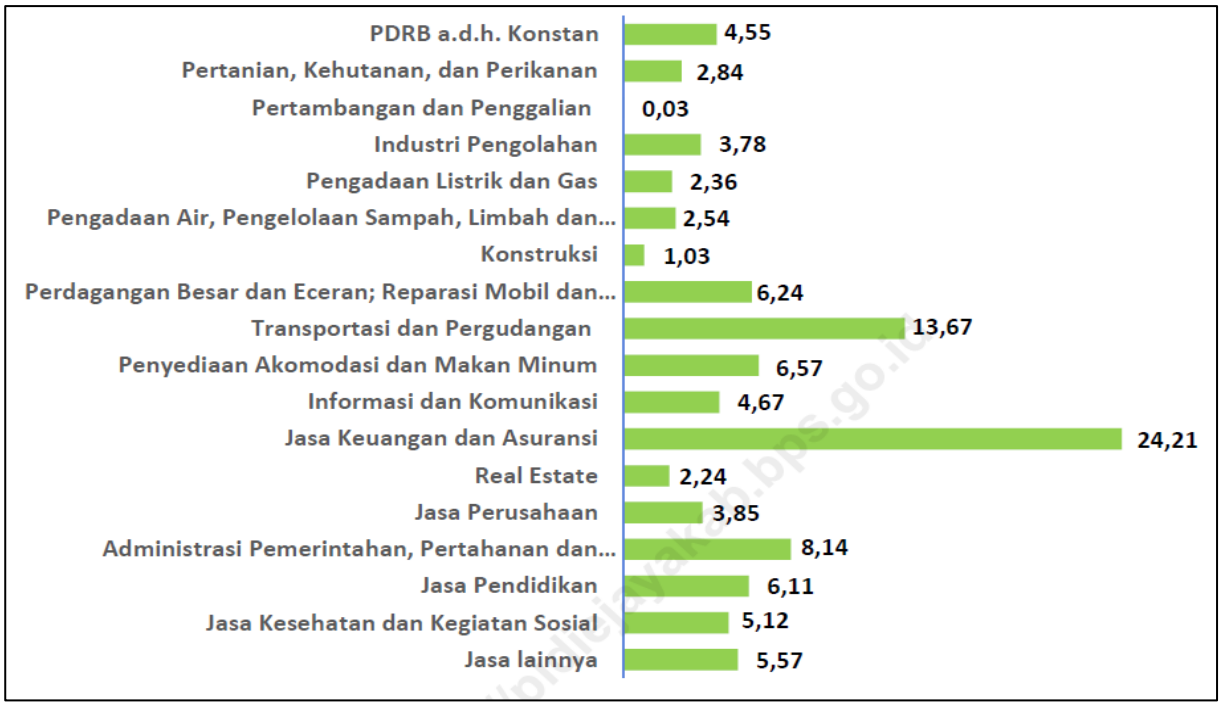


*Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya 2025*

**Gambar 2.25. Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024**

Sejak tahun 2020-2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan tren yang positif dan berfluktuasi. Namun demikian pertumbuhan cenderung meningkat pada tahun terakhir. Perekonomian Pidie Jaya di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,55 persen.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Pidie Jaya tahun 2021 sebesar 2,64 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,58 Triliun Rupiah. Pertumbuhan ekonomi positif 2,03 persen di tahun 2021 karena adanya Pelonggaran PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dari tahun 2020, mulai dari kegiatan di pusat perbelanjaan, restoran hingga aktivitas belajar mengajar, berdampak pada menggeliatnya kembali perekonomian. Selanjutnya, perekonomian Pidie Jaya dinilai semakin membaik dengan meningkatnya nilai PDRB ADHK Pidie Jaya tahun 2023 menjadi 2,84 triliun rupiah, dengan laju pertumbuhan 4,24 persen dan pada tahun 2024 menjadi 2,97 triliun rupiah, dengan laju pertumbuhan 4,55 persen.

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari 4,24% pada tahun sebelumnya menjadi sebesar 4,55% atau naik sebanyak 0,31%. Kondisi tersebut juga terjadi untuk laju pertumbuhan ekonomi Aceh dan juga Nasional seperti yang terlihat pada Gambar 2.26 berikut ini:

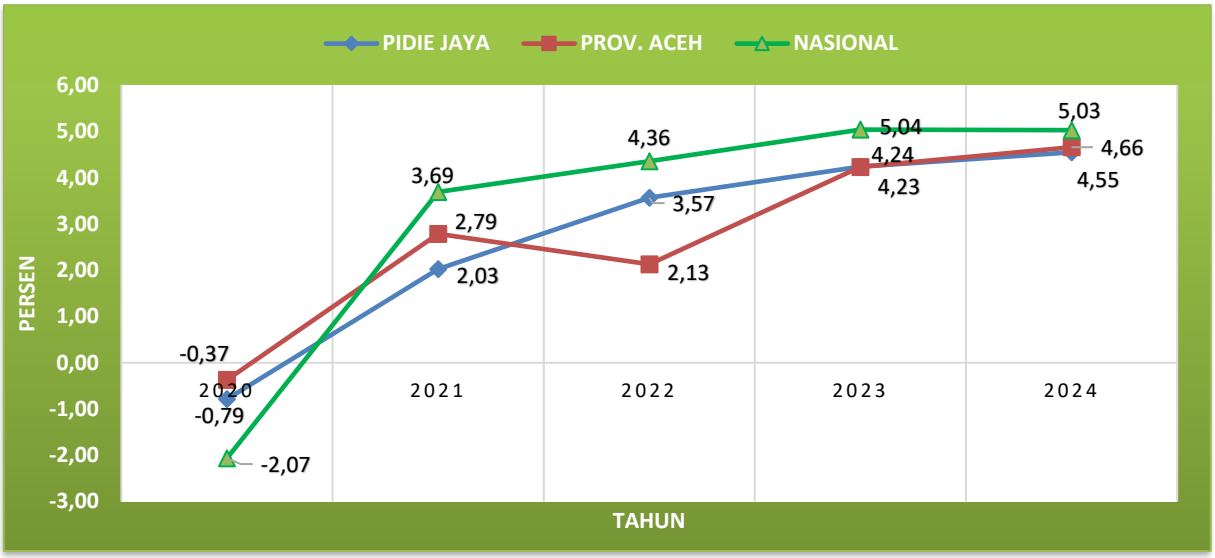


*Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

**Gambar 2.26. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**

Gambar 2.26 di atas menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, seluruh wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif akibat dampak pandemi COVID-19, dengan Pidie Jaya mencatat kontraksi sebesar -0,79%, Provinsi Aceh sebesar -0,37%, dan nasional mengalami penurunan yang paling tajam sebesar -2,07%. Namun, sejak 2021, terjadi pemulihan ekonomi yang cukup signifikan di semua wilayah.

Pidie Jaya menunjukkan tren pemulihan yang stabil dari tahun 2021 hingga 2024. Pertumbuhan ekonomi daerah ini meningkat dari 2,03% pada 2021 menjadi 4,55% pada 2024. Meskipun sempat berada di bawah pertumbuhan nasional pada 2021 dan 2022, Pidie Jaya berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 dan mempertahankan posisi yang kompetitif di tahun 2024. Hal ini menandakan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pemulihan ekonomi pascapandemi, melalui penguatan sektor-sektor produktif lokal.

Dibandingkan dengan Provinsi Aceh, laju pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya cenderung lebih tinggi, terutama pada tahun 2022 (Pidie Jaya 3,57% vs Aceh 2,13%) dan tahun 2024 (Pidie Jaya 4,55% vs Aceh 4,66%). Ini menunjukkan bahwa Pidie Jaya memiliki daya tahan ekonomi yang cukup kuat dan mampu memanfaatkan momentum pemulihan secara lebih optimal dibandingkan dengan rata-rata provinsi.

Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan bahwa Pidie Jaya telah berhasil memperkuat fondasi ekonominya pascapandemi, meskipun tetap perlu terus meningkatkan kualitas pertumbuhan agar lebih inklusif dan berkelanjutan

### 2.2.1.2. Tingkat Kemiskinan

Tingginya angka kemiskinan serta fasilitas infrastruktur dasar masyarakat yang belum terpenuhi merupakan penyebab utama kemiskinan struktural di Kabupaten Pidie Jaya. Ada beberapa indikator utama yang menjadi dasar penilaian tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya oleh BPS diantaranya adalah pendapatan dan tingkat pengeluaran konsumsi kebutuhan pokok masyarakat yang masih rendah ($< Rp\ 10.000\ per\ hari$), banyaknya rumah yang tidak layak huni, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang masih minim.

Berdasarkan data BPS Tahun 2024, Angka kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 berada pada 18,40% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 30.740 jiwa. Hal ini sudah lebih baik dari tahun 2022 yakni 18,45%. Meskipun mengalami penurunan, Angka kemiskinan Pidie Jaya masih lebih tinggi di atas rata-rata Provinsi Aceh yaitu sebesar 14,45% dan Nasional sebesar 9,40%.

Penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya secara umum relevan juga dengan pencapaian penurunan angka kemiskinan pada tingkat Provinsi Aceh dan Nasional. Grafik tingkat kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya terhadap Propinsi Aceh dan Nasional seperti terlihat pada Gambar 2.27 sebagai berikut:

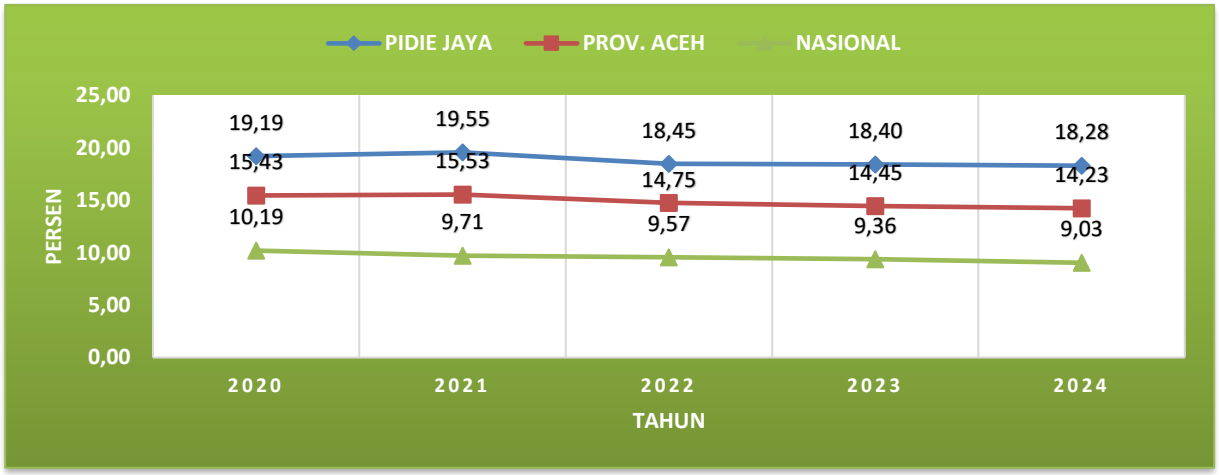


*Sumber : BPS Aceh Tahun 2025*

**Gambar 2.27. Perbandingan Angka Kemiskinan Pidie Jaya Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020 s.d 2024 (Persentase)**

Gambar 2.27 di atas menjelaskan perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan tingkat nasional selama periode 2020 hingga 2024. Terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan nasional. Meskipun terdapat penurunan secara bertahap dari tahun 2021 ke 2024, namun penurunan

tersebut tergolong lambat dan menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Pidie Jaya masih menjadi tantangan serius.

Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Pidie Jaya mencapai 19,19%, dan meningkat menjadi 19,55% pada tahun 2021. Peningkatan ini kemungkinan besar merupakan dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Namun, setelah tahun 2021, terlihat adanya tren penurunan yang berkelanjutan, hingga mencapai 18,28% pada tahun 2024. Meski demikian, jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh yang turun dari 15,43% menjadi 14,23%, dan tingkat kemiskinan nasional yang berhasil ditekan dari 10,19% menjadi hanya 9,03%, maka laju penurunan kemiskinan di Pidie Jaya tergolong lambat.

Selisih antara tingkat kemiskinan Pidie Jaya dengan rata-rata nasional cukup mencolok, mencapai lebih dari 9 persen pada 2024. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Pidie Jaya masih menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar dibandingkan masyarakat di wilayah lain di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan lapangan kerja, rendahnya produktivitas sektor pertanian (yang menjadi sektor utama), rendahnya tingkat pendidikan, serta akses terbatas terhadap layanan dasar.

Dengan demikian, pengentasan kemiskinan di Pidie Jaya memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan spesifik. Strategi yang bisa diterapkan antara lain: peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, perluasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas, serta pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi pedesaan. Jika tidak ada intervensi yang signifikan, kesenjangan antara Pidie Jaya dengan rata-rata provinsi dan nasional akan terus melebar dan menghambat laju pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebagai bagian dari target nasional menuju penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Berdasarkan hasil capaian, persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan tren penurunan dalam empat tahun terakhir. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai program intervensi yang diarahkan secara tepat sasaran, seperti peningkatan akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta penyelarasan program bantuan sosial dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Pemerintah daerah juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga vertikal dan organisasi masyarakat sipil,

guna memperkuat efektivitas program penanggulangan kemiskinan ekstrem.




*Sumber: Kemenko PMK Tahun 2024*

**Gambar 2.28. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem 2021 s.d 2024**

Pada Gambar 2.28. menunjukkan penurunan yang signifikan yang terjadi pada kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pidie Jaya. Pada tahun 2023, Pidie Jaya mendapat peringkat ke 5 sebagai kabupaten/kota dengan penurunan angka kemiskinan ekstrem tertinggi yaitu sebesar 2,16%. Menurunnya angka kemiskinan ekstrem di Pidie Jaya secara signifikan menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Berdasarkan data Percepatan Pensasaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2024. Rumah tangga dilihat berdasarkan status kesejahteraannya dapat dikelompokan ke dalam 3 desil dengan desil 1 termasuk kedalam tingkat kesejahteraan paling rendah. TNP2K menetapkan bahwa rumah tangga miskin dan sangat miskin adalah rumah tangga yang status kesejahteraannya berada pada desil 1 dan desil 2. Berdasarkan data P3KE tahun 2024 jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Pidie Jaya mengalami penurunan pada desil 2 dan 3, akan tetapi mengalami kenaikan pada desil 1 sebanyak 28 rumah tangga, dimana rumah tangga yang berada di desil 1 adalah 7.295 rumah tangga, desil 2 sejumlah 9.060 rumah tangga dan desil 3 sejumlah 4.925 rumah tangga. Angka kemiskinan ekstrem yang tertinggi berada di kecamatan Bandar Dua, Bandar Baru dan Meureudu. Berikut adalah tingkat status rumah tangga

berdasarkan status kesejahteraan di kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat dalam Tabel 2.15 sebagai berikut:

**Tabel 2.15.**
**Jumlah Rumah Tangga (RT) Menurut Status Kesejahteraan**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Berdasarkan Desil (D1,D2,D3)**

| NO | KECAMATAN | D1 | D2 | D3 | Jumlah RT (D1+D2+D3) | Jumlah RT/ KK Keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDAR BARU | 1.504 | 1.856 | 1.095 | 4.455 | 11.885 |
| 2 | PANTE RAJA | 367 | 406 | 249 | 1.022 | 2.943 |
| 3 | TRIENGGADENG | 728 | 800 | 475 | 2.003 | 7.844 |
| 4 | MEUREUDU | 954 | 1.407 | 872 | 3.233 | 7.261 |
| 5 | MEURAH DUA | 642 | 798 | 366 | 1.806 | 3.999 |
| 6 | ULIM | 1.024 | 1.174 | 549 | 2.747 | 5.076 |
| 7 | JANGKA BUYA | 384 | 552 | 303 | 1.239 | 3.296 |
| 8 | BANDAR DUA | 1.692 | 2.067 | 1.016 | 4.775 | 8.859 |
| | **TOTAL** | **7.295** | **9.060** | **4.925** | **21.280** | **51.163** |

*Sumber : Bappeda Tahun 2025 (P3KE 2025)*
*Ket. : D1 – Rumah Tangga dengan Kesejahteraan 10% (Sangat Miskin)*
*D2 – Rumah Tangga dengan Kesejahteraan 11 – 20%*
*D3 – Rumah Tangga dengan Kesejahteraan 21 – 30%*

Berdasarkan data pada Tabel 2.15 maka program pemerintah pusat dan daerah akan lebih focus mensasar kepada rumah tangga prasejahtera yang dikeluarkan oleh P3KE, yang dimana data P3KE ini kini menjadi basis data terpadu untuk berbagai program sosial lintas sektor yang dijalankan baik pusat dan daerah seperti Program Raskin, PKH, Subsidi Listrik, Kartu Indonesia Pintar, dan seterusnya. Selain itu, pemanfaatan data P3KE ini sebagai salah satu upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa bantuan yang diterima oleh masyarakat diterima oleh keluarga atau individu yang memang berhak untuk menerimanya.

Kabupaten Pidie Jaya masih tertinggal dalam beberapa hal seperti pembangunan Infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan serta tingkat kesejahteraan rakyat dan pelayanan dasar. Ditingkat pemerintahan desa, infrastruktur penunjang perekonomian masih sangat minim. Masyarakat pedesaan umumnya sangat tergantung pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama. Kurangnya penunjang, maka membuat produktifitas masyarakat Pidie Jaya yang sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan tersebut menjadi rendah serta berdampak pada tingkat kesejateraan mereka. Meskipun sektor pertanian telah memberikan kontribusi besar terhadap PDRB yaitu 46,53%, namun tingkat kemiskinan masyarakat terbesar berada pada sektor ini.

Pada sisi lain, tingginya kebutuhan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah merupakan prioritas utama pembangunan daerah dalam rangka menekan angka kemiskinan. Hasil pendataan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, kebutuhan rumah layak huni di Pidie Jaya mencapai sekitar 3.568 unit, angka ini diakibatkan masih terdapat banyak rumah masyarakat yang belum direhabilitasi pasca gempa yang melanda Pidie Jaya pada tahun 2016 silam.

Tahun 2016, Pemerintah hanya mampu membangun dan merehab rumah layak huni kurang dari 2% per tahun atau rata-rata 180 unit per tahun. Hal tersebut jauh dari harapan masyarakat. Namun pada tahun 2017, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah tentang Dana Otsus Kabupaten Pidie Jaya maka pada rencana awal dana Otsus tersebut lebih banyak dititikberatkan pada pembangunan rumah layak huni di tingkat pedesaan. Setiap desa mendapat 2-3 unit pembangunan baru sesuai dengan standar yang ditetapkan. Target 574 unit rumah tidak layak huni dapat terbangun pada tahun 2017 tersebut. Ini bertujuan agar target penyelesaian persoalan perumahan lebih cepat dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Namun kondisinya berbeda pada tahun 2018 dimana Dana DOKA kembali dikelola oleh Pemerintah Aceh. Sehingga program pembangunan perumahan untuk masyarakat kurang mampu menjadi tertunda. Sehingga hanya terbangun 13 unit saja dan rehab sebanyak 27 unit. Tahun 2020, program pembangunan perumahan baru untuk masyarakat kurang mampu terbangun 20 unit dan rehab sebanyak 27 unit. Untuk tahun 2024, program pembangunan perumahan baru untuk dhuafa terbangun 45 unit dan rehab sebanyak 16 unit.

Gambar 2.29 Rehabilitiasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta Pembangunan Baru untuk masyarakat miskin Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

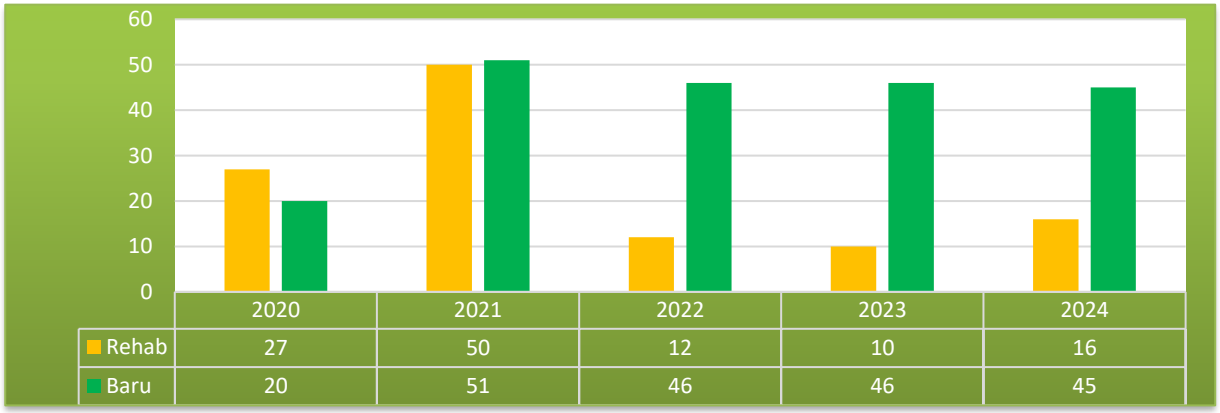


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rehab | 27 | 50 | 12 | 10 | 16 |
| Baru | 20 | 51 | 46 | 46 | 45 |

*Sumber: Dinas Sosial, PU, Baitul Mal Kab. Pidie Jaya Tahun 2025*

**Gambar 2.29. Rehabilitasi RTLH dan Pembangunan Rumah Dhuafa Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024 (Unit)**

### 2.2.1.3. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atau juga disebut pendapatan perkapita adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur rata-rata nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu, dibagi dengan jumlah penduduknya. PDRB per kapita mencerminkan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Terdapat dua jenis PDRB per kapita, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) yang menunjukkan nilai nominal berdasarkan harga tahun berjalan, dan atas dasar harga konstan (ADHK) yang mencerminkan nilai riil dengan memperhitungkan inflasi menggunakan harga tahun dasar. PDRB per kapita sering digunakan untuk membandingkan kinerja ekonomi antar daerah atau antar waktu, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah. Namun, indikator ini tidak menggambarkan distribusi pendapatan secara langsung, sehingga perlu dianalisis bersama dengan indikator sosial-ekonomi lainnya seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan indeks pembangunan manusia untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya Pendapatan Perapita Kab. Pidie Jaya tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.30 berikut.

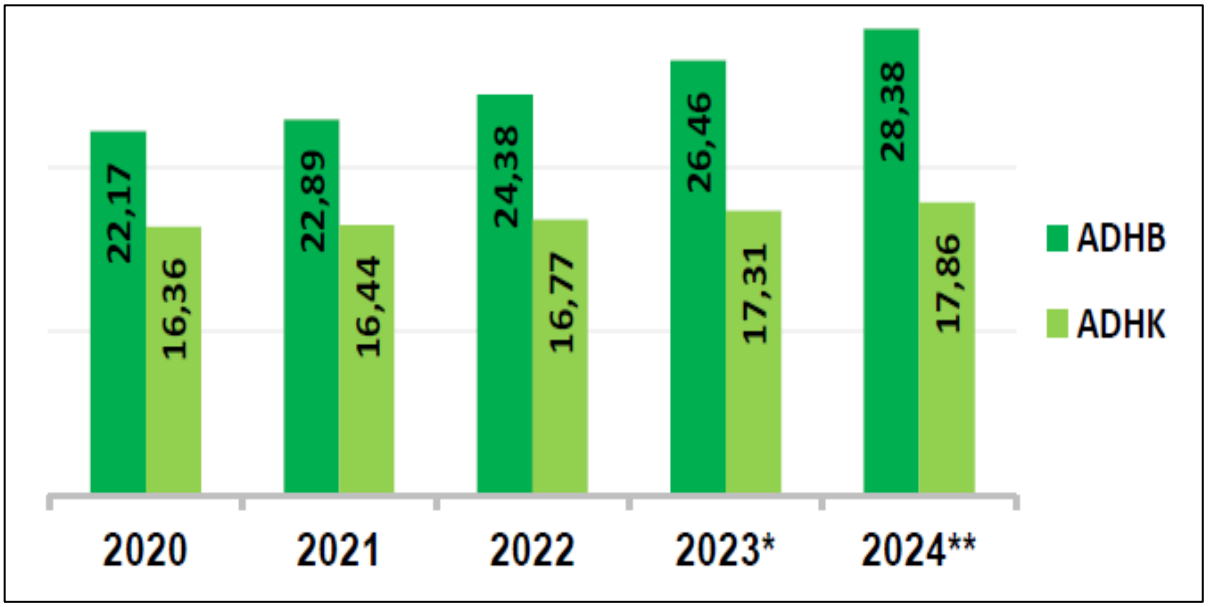


*Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025.*

**Gambar 2.30. PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Pidie Jaya 2020-2024 (Juta Rupiah)**

Gambar di atas menunjukkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Pidie Jaya atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga konstan (ADHK) selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, terjadi

peningkatan nilai PDRB per kapita dari tahun ke tahun, baik pada ADHB maupun ADHK. Pada tahun 2020, PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 22,17 juta rupiah dan meningkat secara konsisten hingga mencapai 28,38 juta rupiah pada tahun 2024 (angka sangat sementara). Sementara itu, PDRB per kapita berdasarkan ADHK juga menunjukkan tren yang meningkat dari 16,36 juta rupiah pada 2020 menjadi 17,86 juta rupiah pada 2024.

Perbandingan Pendapatan Perapita Kab. Pidie Jaya, Prov. Aceh dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.31 berikut.

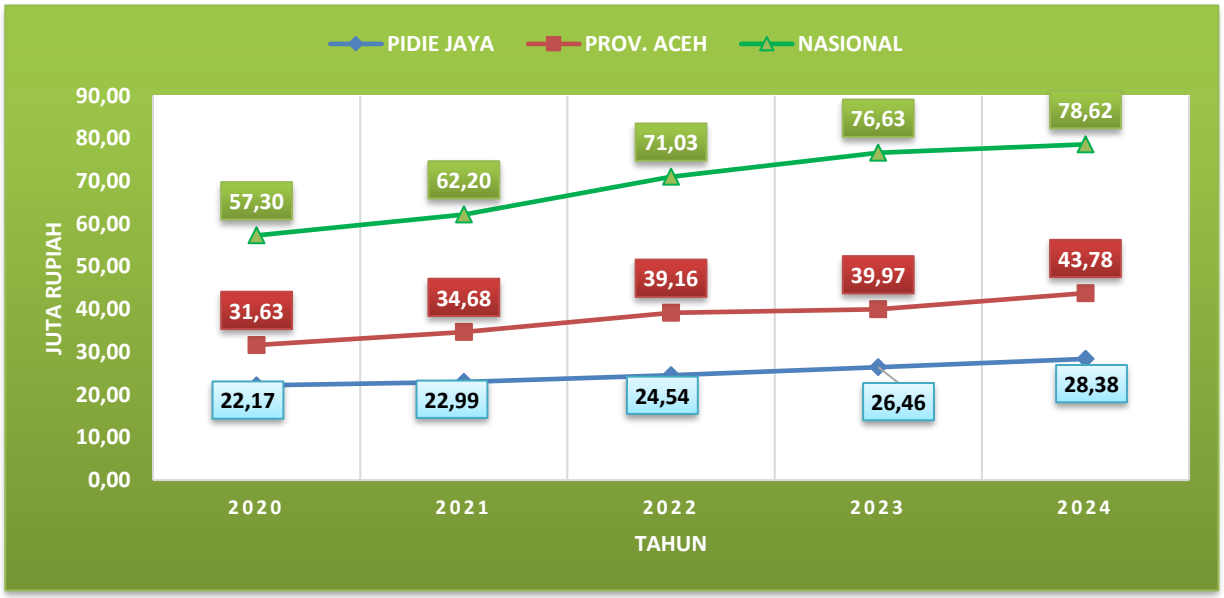


*Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

**Gambar 2.31. Perbandingan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional (ADHB) Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah),**

Gambar di atas memperlihatkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Pidie Jaya dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan nasional pada periode 2020 hingga 2024. Secara umum, PDRB per kapita Pidie Jaya mengalami tren kenaikan setiap tahun, dari Rp 22,17 juta pada tahun 2020 menjadi Rp28,38 juta pada tahun 2024. Meskipun meningkat, nilai ini masih jauh berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh yang mencapai Rp 43,78 juta pada tahun 2024 dan jauh tertinggal dari rata-rata nasional yang mencapai Rp 78,62 juta pada tahun yang sama.

Kesenjangan antara Pidie Jaya dengan provinsi dan nasional menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi per individu di Pidie Jaya masih rendah, yang mencerminkan tantangan dalam mendorong produktivitas, investasi, dan nilai tambah ekonomi lokal. Di sisi lain, laju pertumbuhan PDRB per kapita Pidie Jaya yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya geliat ekonomi

positif yang bisa menjadi modal dasar untuk pembangunan yang lebih merata. Oleh karena itu, perlu strategi penguatan sektor-sektor unggulan daerah, seperti pertanian, kelautan, UMKM, dan jasa, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

### 2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mencegah ketimpangan sosial jumlah penduduk harus diimbangi dengan kemajuan dibidang ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan Kabupaten Pidie Jaya diperoleh dari hasil SAKERNAS tahunan yang dilaksanakan setiap bulan Agustus. Angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpartisipasi aktif dalam pasar kerja, baik yang mempunyai pekerjaan maupun penduduk yang mencari pekerjaan (pengangguran). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut:

**Tabel 2.16.**
**Indikator Ketenagakerjaan**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| Rincian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angkatan Kerja | 73.331 | 69.359 | 70.905 | 73.248 | 74.392 |
| Bekerja | 68.507 | 66.881 | 67.784 | 70.066 | 71.550 |
| Pengangguran | 4.824 | 2.478 | 3.121 | 3.182 | 2.842 |
| Bukan Angkatan Kerja | 44.692 | 50.706 | 51.578 | 49.252 | 49.786 |
| TPAK (%) | 62,13 | 57,77 | 57,89 | 59,79 | 59,91 |
| TPT (%) | 6,58 | 3,57 | 4,40 | 4,34 | 3,82 |

*Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 2.16, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan baik dari sisi jumlah angkatan kerja maupun tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Jumlah angkatan kerja mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 69.359 orang dari 73.331 orang di tahun 2020, namun kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 74.392 orang di tahun 2024. Jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami fluktuasi, tetapi cenderung meningkat dari 66.881 orang di tahun 2021 menjadi 71.550 orang di tahun 2024. Sementara itu, jumlah pengangguran menurun drastis dari 4.824 orang pada tahun 2020 menjadi 2.842 orang pada tahun 2024, dengan sedikit kenaikan pada tahun 2022 dan 2023.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan penurunan yang cukup tajam dari 62,13% pada tahun 2020 menjadi 57,77% di tahun 2021. Meskipun ada pemulihan di tahun-tahun berikutnya, TPAK masih belum kembali ke tingkat tahun 2020, dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 59,91%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah angkatan kerja meningkat, proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren penurunan yang cukup baik, dari 6,58% di tahun 2020 menjadi 3,82% di tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja, meskipun perlu diwaspadai bahwa penurunan pengangguran juga bisa dipengaruhi oleh menurunnya partisipasi angkatan kerja, bukan semata-mata karena penciptaan lapangan kerja yang baru. Untuk mendukung ketahanan ketenagakerjaan jangka panjang, Pemerintah Daerah perlu mendorong peningkatan kualitas angkatan kerja dan memperluas akses terhadap pekerjaan yang produktif dan layak.

.Dalam kurun lima tahun ini, Kabupaten Pidie Jaya mengalami variasi dalam hal angkatan kerja, tingkat partisipasi, dan tingkat pengangguran. Perubahan ini bisa mencerminkan faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi kondisi perekonomian dan lapangan kerja di wilayah ini. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.32 berikut.

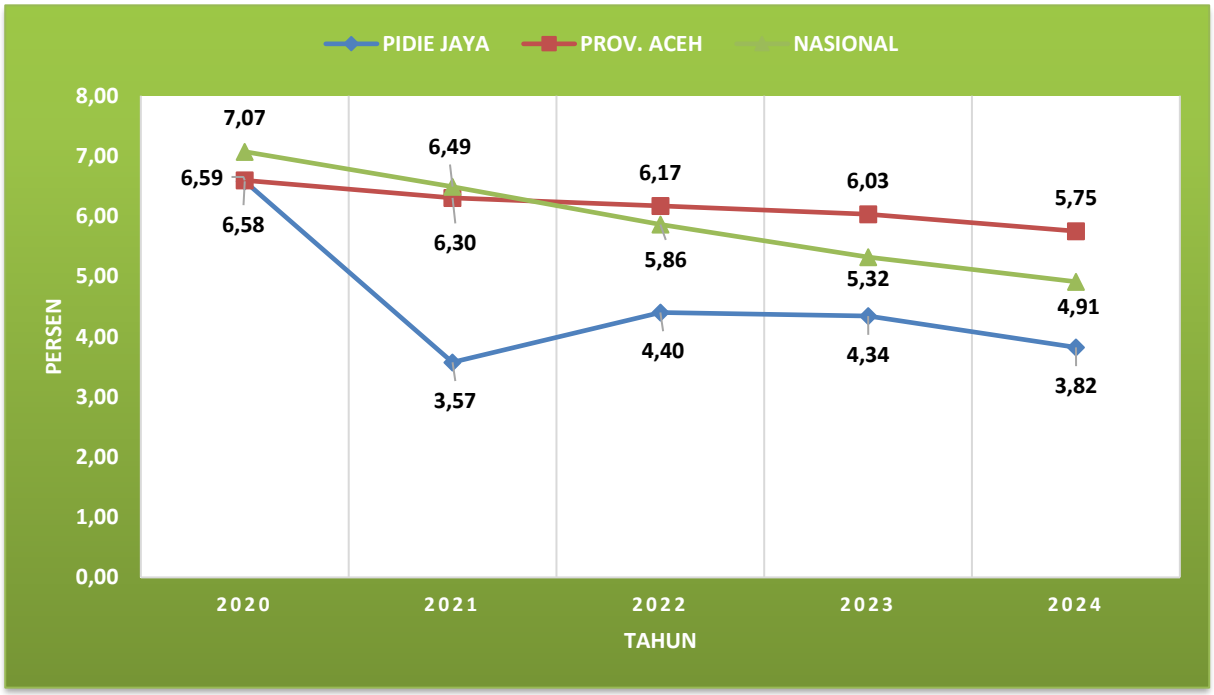


*Sumber: BPS Aceh Tahun 2025*

**Gambar 2.32. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**

### 2.2.1.5. Indeks Gini

Rasio Gini (Ketimpangan Pendapatan) merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat di suatu daerah. Pemerintah Daerah dapat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi dengan menggunakan Rasio Gini yang capaiannya dipublikasikan oleh BPS setiap tahunnya. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 dan 1, Rasio Gini yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang mendekati nilai 1 mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan masyarakat yang sangat tinggi, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan sempurna. Data 5 (lima) tahun terakhir indeks gini Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada gambar 2.33 berikut:




*Sumber : BPS Aceh Tahun 2025*

**Gambar 2.33. Indeks Gini Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024**

Gambar 2.32 menjelaskan bahwa Indeks Gini secara nasional menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi namun cenderung stabil selama lima tahun terakhir. Nilainya berkisar antara 0,379 hingga 0,388. Puncak tertinggi terjadi pada tahun 2023, yang mengindikasikan peningkatan ketimpangan secara nasional, sebelum sedikit menurun pada tahun 2024. Stabilitas angka ini mencerminkan bahwa meskipun ada upaya redistribusi pendapatan, tantangan dalam pemerataan ekonomi di tingkat nasional masih besar, dan hasilnya belum terlalu signifikan dalam menurunkan ketimpangan secara struktural.

Provinsi Aceh mengalami fluktuasi yang cukup mencolok dalam indeks Gini. Setelah relatif stabil pada kisaran 0,323–0,324 di tahun 2020–2021, Aceh mencatat

penurunan tajam menjadi 0,291 pada tahun 2022. Penurunan ini bisa mencerminkan adanya program atau dinamika ekonomi yang lebih merata pada tahun tersebut, seperti distribusi bantuan sosial yang merata pasca pandemi atau membaiknya akses ekonomi kelompok masyarakat bawah. Namun, kenaikan kembali pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa efek dari intervensi tersebut tidak sepenuhnya berkelanjutan, dan potensi ketimpangan tetap menjadi persoalan penting di tingkat provinsi.

Sementara itu, Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan tren yang relatif positif dalam konteks pemerataan pendapatan. Indeks Gini di Pidie Jaya konsisten menjadi yang terendah dibandingkan provinsi dan nasional, dengan nilai berkisar antara 0,227 pada 2020 hingga turun ke 0,214 pada 2024. Ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Pidie Jaya tergolong merata. Penurunan bertahap sejak 2021 mencerminkan adanya peningkatan kesetaraan ekonomi antar kelompok pendapatan, yang bisa menjadi hasil dari struktur ekonomi lokal yang homogen, atau program-program pembangunan yang menyasar kelompok masyarakat bawah secara efektif.

Namun demikian, rendahnya Indeks Gini di Pidie Jaya tidak serta-merta menggambarkan kondisi ekonomi yang ideal. Ketimpangan rendah bisa saja disebabkan oleh kondisi di mana mayoritas masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang hampir seragam, tetapi pada level yang masih rendah. Artinya, meskipun pemerataan pendapatan tercapai, hal tersebut belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Oleh karena itu, tantangan ke depan bagi Pidie Jaya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat secara umum, tanpa menciptakan jurang ketimpangan baru.

Secara keseluruhan, analisis Indeks Gini ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan. Kabupaten Pidie Jaya dapat menjadi contoh dalam hal kesetaraan distribusi, namun perlu mendorong kualitas hidup dan pendapatan masyarakat agar tidak hanya merata, tetapi juga meningkat secara signifikan.

#### 2.2.1.6. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM mencerminkan kualitas hidup masyarakat melalui gabungan dari

indikator angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan IPM ke dalam empat kategori, yaitu rendah (kurang dari 60), sedang (60–69,99), tinggi (70–79,99), dan sangat tinggi (80 ke atas). IPM berfungsi sebagai alat penting untuk mengevaluasi kinerja pembangunan daerah, membandingkan kesejahteraan antar wilayah, serta merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, IPM menjadi salah satu indikator kunci dalam merancang program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk lebih jelasnya perbandingan IPM Kab. Pidie Jaya, Prov. Aceh dan Nasional dapat dilihat pada gambar 2.34 berikut.

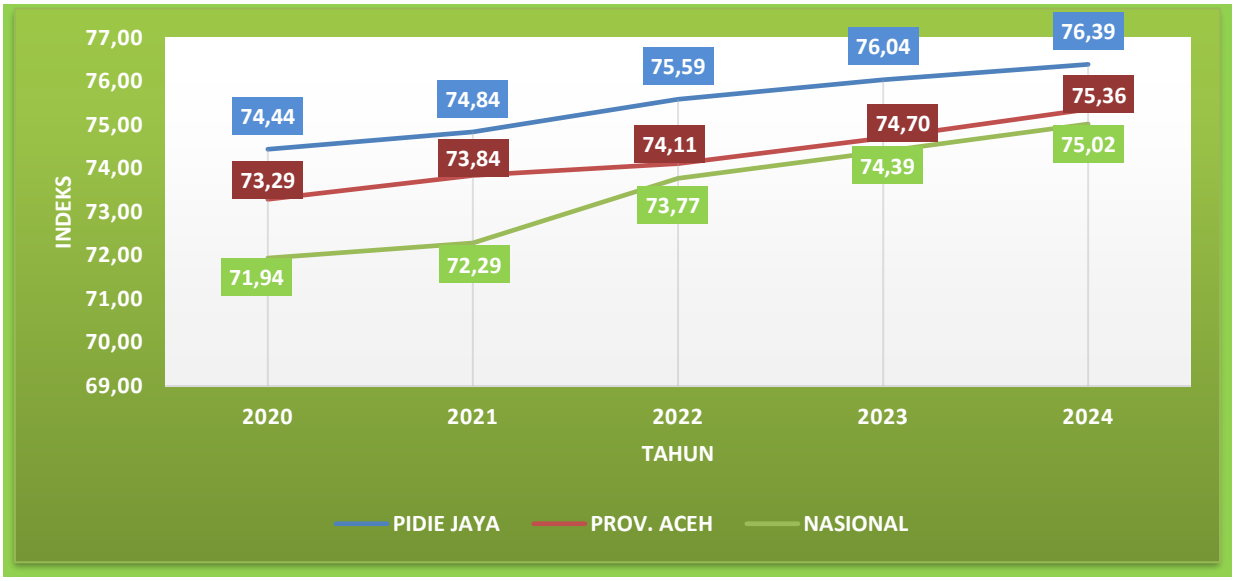


*Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025.*

**Gambar 2.34. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**

Gambar 2.33 yang ditampilkan menggambarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie Jaya dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan rata-rata nasional selama periode tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, ketiga entitas mengalami tren peningkatan IPM dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat dilihat dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Pidie Jaya menunjukkan peningkatan IPM yang konsisten dari 74,44 pada tahun 2020 menjadi 76,39 pada tahun 2024. Ini mencerminkan peningkatan sebesar 1,95 poin dalam lima tahun. Nilai IPM Pidie Jaya selalu berada di atas rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional selama periode tersebut. Hal ini menandakan bahwa pembangunan manusia di Pidie Jaya relatif lebih baik dan stabil dibandingkan dengan tingkat provinsi maupun nasional.

Provinsi Aceh juga mencatatkan peningkatan IPM dari 73,29 pada tahun 2020 menjadi 75,36 pada tahun 2024, dengan pertumbuhan 2,07 poin. Meskipun tren pertumbuhannya cukup positif, nilai IPM Provinsi Aceh tetap berada di bawah Pidie Jaya namun cenderung mendekati nilai rata-rata kabupaten tersebut dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di tingkat provinsi turut mengalami perbaikan, meskipun masih ada kesenjangan antar kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut.

IPM Nasional juga mengalami kenaikan dari 71,94 pada tahun 2020 menjadi 75,02 pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 3,08 poin ini menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan Pidie Jaya dan Provinsi Aceh. Kenaikan yang signifikan ini bisa menunjukkan adanya berbagai upaya pemerintah pusat yang berhasil dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara nasional. Namun demikian, meskipun pertumbuhannya paling tinggi, IPM nasional tetap berada di bawah Pidie Jaya dan Aceh pada seluruh tahun dalam periode ini.

Secara keseluruhan, gambar ini memperlihatkan bahwa Pidie Jaya berhasil mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan IPM lebih tinggi dari rata-rata provinsi dan nasional. Capaian ini menunjukkan keberhasilan berbagai program pembangunan manusia di Pidie Jaya, meskipun perlu terus ditingkatkan terutama untuk mengejar status "sangat tinggi" dalam klasifikasi IPM (>80). Strategi pembangunan ke depan perlu terus difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan dasar, dan peningkatan pendapatan masyarakat untuk memperkuat fondasi pembangunan manusia secara berkelanjutan

### 2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Konsep "Kesehatan Untuk Semua" menjadi landasan filosofis dan operasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) periode 2025–2029, yang menekankan bahwa setiap individu berhak atas akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas, tanpa terkecuali. Ini sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai syariat Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan umat. RPJMK ini bertujuan untuk mentransformasi sistem kesehatan dari yang bersifat reaktif menjadi lebih proaktif, dengan mengedepankan pendekatan promotif dan preventif berbasis siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, hingga lansia. Melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, optimalisasi fasilitas hingga ke tingkat desa, serta peningkatan literasi kesehatan masyarakat, diharapkan kualitas hidup masyarakat Pidie Jaya akan meningkat secara signifikan,

yang pada akhirnya akan menjadi modal dasar dalam mencapai kemajuan daerah yang berkelanjutan

### 2.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. Secara umum, UHH masyarakat Pidie Jaya mengalami peningkatan selama periode 2020-2024. Gambaran perbandingan UHH Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan Nasional dari tahun 2019 sampai tahun 2024 sebagaimana Gambarl 2.35 berikut.

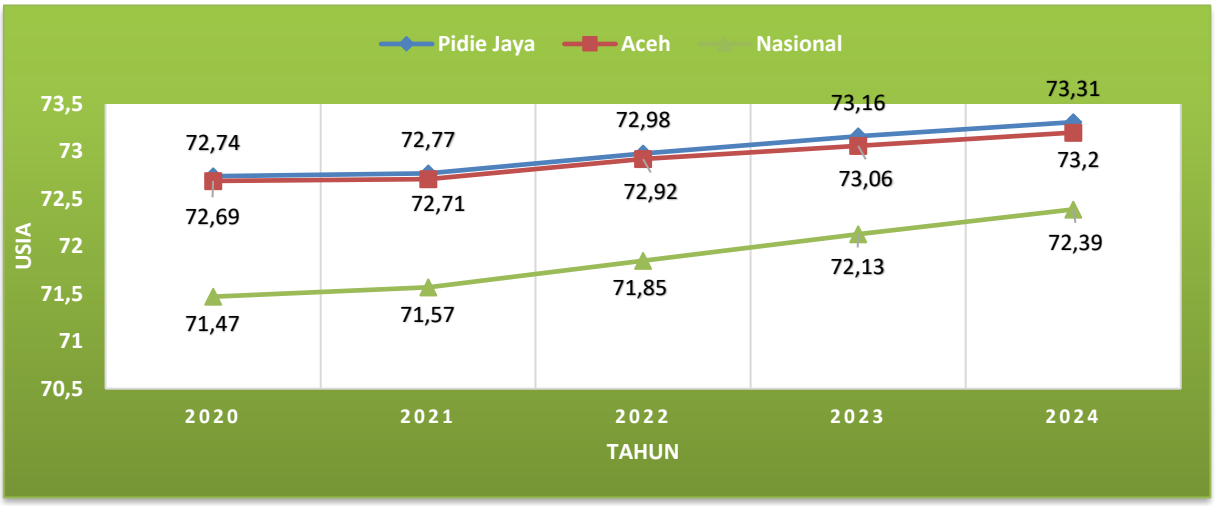


*Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025*

**Gambar 2.35. Perbandingan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**

Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pidie Jaya mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, usia harapan hidup di Pidie Jaya adalah 72,74 tahun. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 73,31 tahun pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 0,57 tahun dalam lima tahun ini mencerminkan adanya perbaikan yang konsisten dalam kualitas hidup dan layanan kesehatan di Pidie Jaya.

Dibandingkan dengan rata-rata provinsi Aceh dan nasional, Pidie Jaya menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan, terutama pada tahun 2024 di mana usia harapan hidupnya hampir setara dengan rata-rata nasional yang berada pada angka 72,39 tahun. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan berbagai inisiatif dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti peningkatan akses dan kualitas

layanan kesehatan, program-program kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesadaran akan gaya hidup sehat.

Keberhasilan ini juga mencerminkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai lembaga kesehatan. Dengan terus berupaya memperbaiki dan mengembangkan program-program kesehatan, diharapkan tren positif ini dapat dipertahankan dan usia harapan hidup masyarakat Pidie Jaya terus meningkat di masa mendatang

#### 2.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesehatan masyarakat dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas. IKS terdiri dari 12 (dua belas) indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan, yang meliputi 5 (lima) indikator program gizi kesehatan ibu anak, 3 (tiga) indikator pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan 3 (tiga) indikator perilaku dan kesehatan lingkungan. Kementerian Kesehatan menjabarkan aspek IKS tersebut menjadi 12 indikator keluarga sehat. Berikut ini adalah penjelasannya:

**1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)**

Tidak semata membatasi jumlah anak dalam keluarga, program KB juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapat ASI yang cukup dan pola asuh yang optimal sehingga bisa menjadi anak yang sehat dan cerdas.
Selain itu, program KB juga dapat menurunkan risiko kematian ibu dan bayi serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, sehingga dapat menjaga kesejahteraan keluarga.

**2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan**

Fasilitas kesehatan yang memadai akan mendukung proses persalinan yang aman dan minim risiko komplikasi kehamilan. Setelah melahirkan, ibu juga akan memiliki tempat untuk memeriksa kesehatannya dan bayinya secara berkala. Dengan begitu, keselamatan serta kesehatan ibu dan anak jadi lebih terjamin.

**3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap**

Imunisasi anak sangat penting dilakukan guna mencegah terjadinya penyakit infeksi yang bisa berakibat fatal baginya, seperti polio, campak, dan difteri. Untuk mendapatkan imunisasi wajib, Anda bisa membawa anak ke posyandu, puskesmas, atau rumah sakit.

**4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif**

Keunggulan air susu ibu (ASI) sebagai sumber nutrisi bayi memang sudah tidak diragukan lagi. ASI dapat melindungi bayi dari beragam penyakit serta mendukung perkembangan tubuh dan otaknya secara optimal, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Itulah sebabnya pemberian ASI eksklusif sangat berperan besar untuk membentuk keluarga sehat.

**5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan**

Berat badan bayi perlu ditimbang setiap bulannya, sejak lahir sampai usia 5 tahun. Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak selalu baik, serta mendeteksi secara dini bilamana terdapat gangguan pada pertumbuhannya.

**6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar**

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang dapat menurunkan kualitas hidup seseorang dan keluarganya. Tuberkulosis yang tidak ditangani dengan benar berisiko menyebabkan kerusakan paru-paru yang parah dan penularan ke orang-orang terdekat.

Maka dari itu, bila terdapat anggota keluarga yang mengalami gejala tuberkulosis, seperti batuk lebih dari 3 minggu, batuk darah, sesak napas, keringat dingin, dan penurunan berat badan drastis, segera bawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan.

**7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur**

Hipertensi adalah penyakit kronis yang sering terabaikan karena sering kali tidak memiliki gejala. Meski begitu, dampak yang terjadi akibat hipertensi bisa fatal, mulai dari serangan jantung hingga stroke. Hal ini tentu akan memengaruhi keadaan suatu keluarga, apalagi jika terjadi pada kepala keluarganya.

Oleh karena itu, bila terdapat anggota keluarga yang menderita hipertensi, ingatkan ia agar selalu menerapkan gaya hidup sehat, meminum obat secara teratur sesuai rekomendasi dokter, serta melakukan kontrol teratur.

**8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan**

Gangguan jiwa tidak hanya dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya secara signifikan, tapi juga keluarganya. Namun, sebenarnya penyakit ini dapat sembuh selama ditangani dengan baik dan sedini mungkin.

Oleh karena itu, bila ada anggota keluarga yang memiliki tanda-tanda gangguan jiwa, seperti perubahan emosi atau perilaku, temani dan bujuk dia untuk segera berobat ke psikiater guna mendapatkan penanganan yang tepat.

**9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok**

Sudah kita ketahui bersama bahwa asap rokok mengandung banyak zat beracun bagi tubuh. Meskipun hanya satu orang yang merokok di rumah, asapnya bisa dihirup anggota keluarga lain dan membuat mereka menjadi perokok pasif.

Perlu Anda pahami bahwa menjadi perokok pasif sama berbahayanya dengan menjadi perokok aktif. Jadi, jika di keluarga Anda ada yang merokok, jangan putus asa untuk membujuk dan membantunya agar bisa berhenti. Jika tidak bisa, ingatkan dia untuk merokok di luar rumah.

**10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Dengan menjadi anggota program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, seluruh anggota keluarga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan, tanpa harus memikirkan biaya. Ini juga bisa menjaga keadaan finansial keluarga

**11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih**

Sarana air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan keluarga dari berbagai penyakit infeksi. Untuk mewujudkan hal ini, pastikan sumber air yang Anda pakai di rumah tidak tergenang atau tercemar dengan berbagai kotoran maupun polutan.

**12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat**

Memiliki akses sanitasi layak dan jamban sehat juga termasuk indikator penting dalam mewujudkan keluarga sehat. Untuk itu, setiap anggota keluarga diharuskan selalu buang air besar dan buang air kecil di jamban atau toilet. Selain membuat lingkungan bersih dan tidak berbau, langkah ini juga dapat membantu mencegah penyakit infeksi.

Untuk mewujudkan keluarga sehat memang tidak mudah. Namun, pikirkanlah efek jangka panjangnya. Dengan memenuhi indikator-indikator di atas, kualitas hidup Anda dan keluarga akan terjaga, bahkan hingga generasi selanjutnya.

Perlu Anda ketahui bahwa program keluarga sehat juga merupakan bagian dari program puskesmas. Jadi Anda bisa meminta bantuan dokter puskesmas wilayah Anda jika mengalami kesulitan dalam memenuhi indikator-indikator di atas.

Nilai IKS Kabupaten Pidie Jaya selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 lebih baik dibandingkan nasional, dan sedikit lebih rendah dari Provinsi Aceh. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar 2.36 berikut.

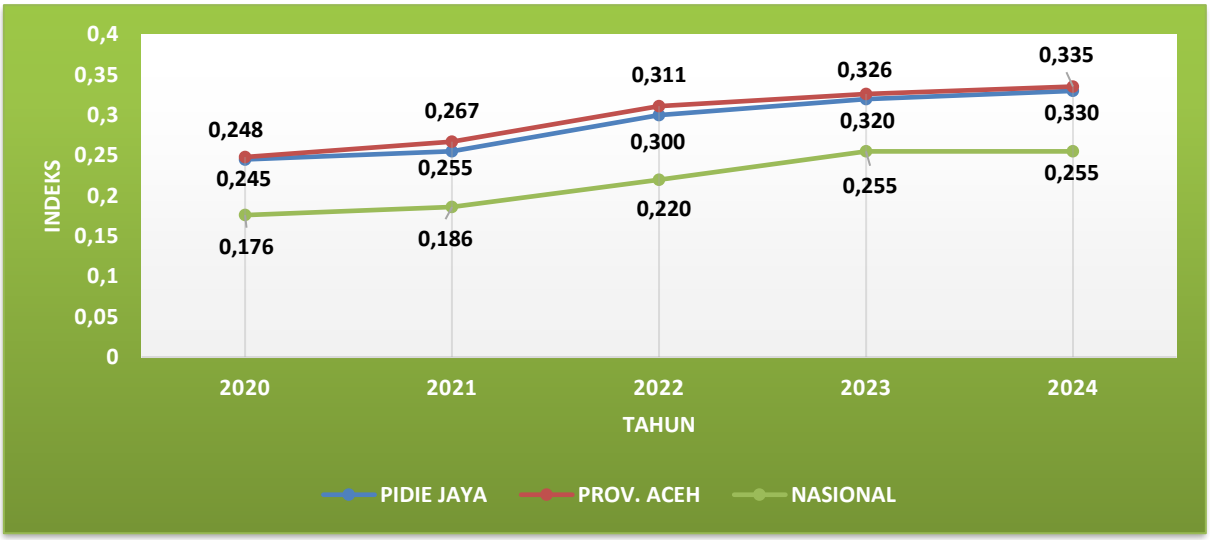


*Sumber: Kemenkes, 2025*

**Gambar 2.36. Indeks Keluarga Sehat Kab. Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**

Grafik di atas menggambarkan perkembangan Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan secara nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, dari 0,245 pada tahun 2020 menjadi 0,330 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek kesehatan keluarga seperti akses layanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta status gizi dan kesehatan anggota keluarga.

Jika dibandingkan, IKS Pidie Jaya berada sedikit di bawah Provinsi Aceh namun secara konsisten lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pada tahun 2024, nilai IKS Pidie Jaya mencapai 0,330, hanya terpaut tipis dari Provinsi Aceh yang berada di angka 0,335, namun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang stagnan di angka 0,255 sejak tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas kesehatan keluarga di Pidie Jaya telah berjalan cukup efektif, bahkan melampaui rata-rata nasional.

Namun demikian, mengingat bahwa nilai indeks masih berada di bawah angka 0,5 (skala maksimum 1), kondisi keluarga sehat secara umum masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat intervensi melalui peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar, edukasi gizi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta kolaborasi lintas sektor untuk membangun lingkungan yang mendukung hidup sehat di tingkat keluarga

### 2.2.2.3 Prevalensi Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Penurunan Stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive, dimana penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitive ini secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting. Dalam pelaksanaannya, upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Hal ini didasari oleh angka prevalensi stunting Kabupaten Pidie Jaya masih sangat tinggi. Berikut data Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020-2024 sesuai gambar berikut.

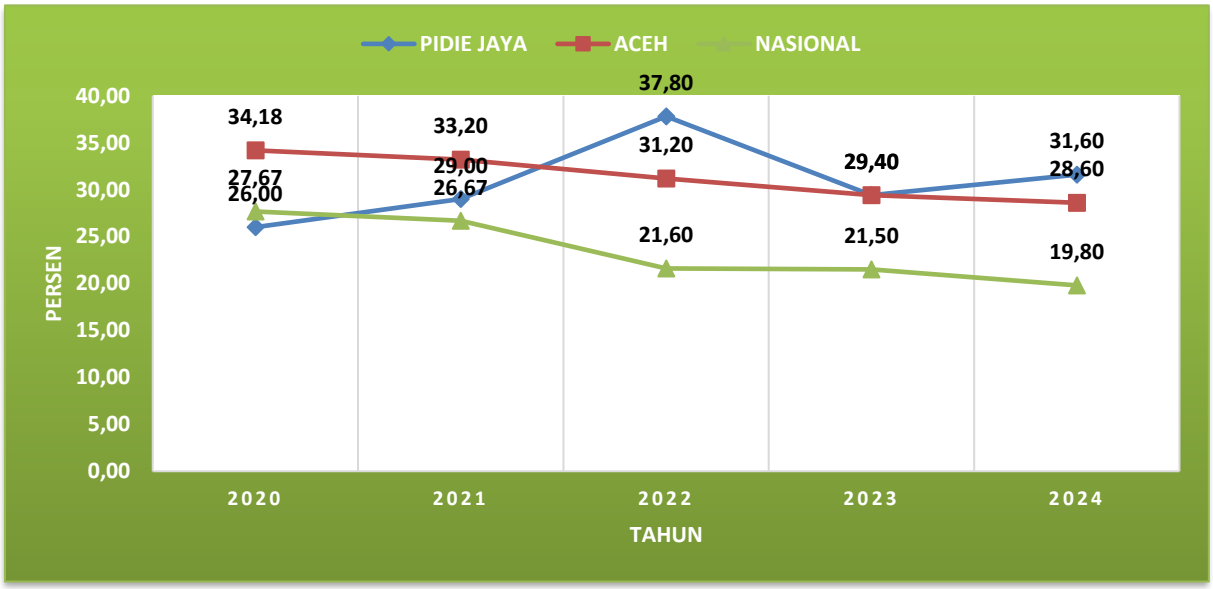


*Sumber : Riset Kesehatan Dasar, SGGI Tahun 2025*

**Gambar 2.37. Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**

Berdasarkan gambar 2.37, Prevalensi stunting di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 pada angka 26,00%, namun pada tahun 2021, prevalensi meningkat menjadi 29,00%. Tahun 2022 mencatat peningkatan yang signifikan hingga 37,8%, mengindikasikan adanya masalah serius dalam hal pemenuhan gizi dan kesehatan

anak-anak. Pada tahun 2023, prevalensi stunting menurun menjadi 29,4%, tetapi angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Meskipun ada penurunan pada tahun 2023, prevalensi stunting yang tetap tinggi menunjukkan perlunya intervensi gizi yang lebih kuat dan program kesehatan masyarakat yang lebih efektif untuk menangani masalah stunting di Kabupaten Pidie Jaya

### 2.2.3. Pendidikan Berkualitas dan Merata

Pendidikan adalah pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing, yang menjadi kunci bagi terwujudnya Pendidikan Berkualitas dan Merata. hal ini dapat ditegaskan melalui upaya peningkatan akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Prioritas akan diberikan untuk memastikan setiap anak di Pidie Jaya, dari wilayah pedesaan hingga perkotaan, mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang relevan dan bermutu, yang tidak hanya mengasah kecerdasan intelektual tetapi juga memperkuat karakter keagamaan, etika, dan nilai-nilai budaya lokal. Melalui reformasi kurikulum yang berbasis syariat, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, diharapkan akan tercipta ekosistem pendidikan yang inklusif dan transformatif. Dengan demikian, investasi di sektor pendidikan ini akan menghasilkan generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak mulia, siap menghadapi tantangan zaman, dan mampu membawa kemajuan bagi Kabupaten Pidie Jaya.

#### 2.2.3.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang mengukur jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk suatu wilayah. RLS mencerminkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk, biasanya dihitung untuk kelompok usia tertentu, seperti 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan untuk menilai akses dan partisipasi dalam sistem pendidikan serta untuk mengukur kemajuan pendidikan di suatu daerah.

Gambar 2.38 berikut merupakan perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

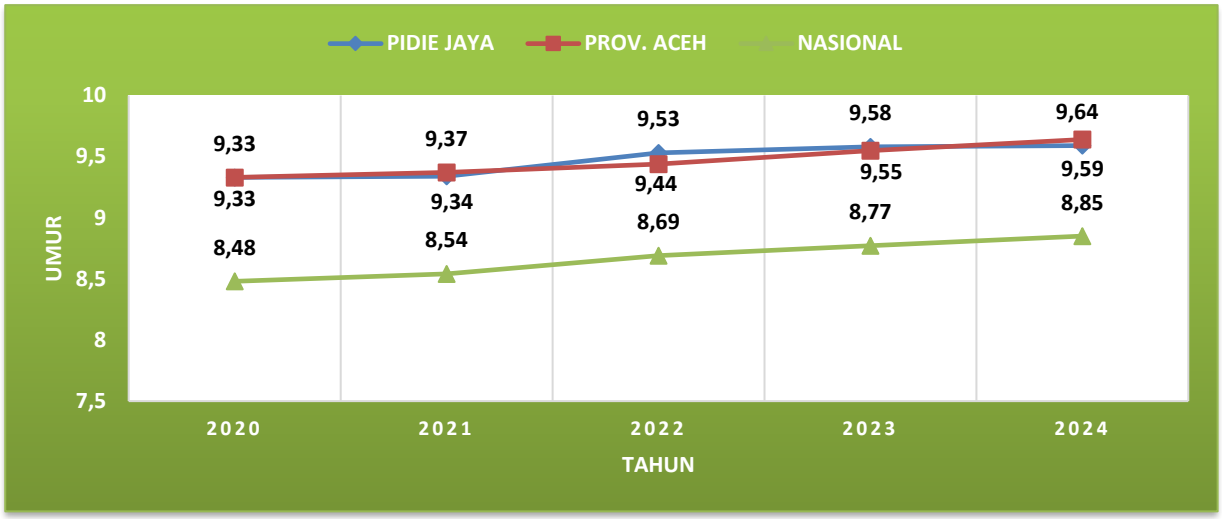


*Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2025*

**Gambar 2.38. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020 s.d 2024**

Gambar diatas menjelaskan bahwa data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dari tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan. Pada tahun 2020, RLS di Pidie Jaya tercatat sebesar 9,33 tahun, yang kemudian meningkat secara bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 9,59 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Pidie Jaya.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh secara keseluruhan, RLS di Pidie Jaya umumnya sedikit lebih rendah, meskipun selisihnya semakin mengecil dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, RLS di Provinsi Aceh adalah 9,33 tahun, sama dengan capaian tahun RLS Kabupaten Pidie Jaya kemudian Namun, pada tahun 2024, selisih ini menurun menjadi hanya 0,05 tahun, dengan Provinsi Aceh mencatat RLS sebesar 9,64 tahun dan Pidie Jaya 9,59 tahun. Dari tabel juga terlihat kabupaten Pidie Jaya pernah melebihi RLS Provinsi, dimana pada tahun 2022 RLS Provinsi 9,44 sedangkan Kabupaten Pidie Jaya 9, 53 serta Tahun 2023 RLS Provinsi 9,55 sedangkan Kabupaten Pidie Jaya 9,58.

Di tingkat nasional, Pidie Jaya memiliki RLS yang umumnya lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, hal ini menandakan Pidie Jaya terus mencatat peningkatan yang lebih cepat, melewati RLS nasional yang cenderung meningkat secara perlahan dari 8,48 tahun di 2020 menjadi 8,85 tahun di 2024.

Secara keseluruhan, peningkatan RLS di Pidie Jaya menunjukkan kemajuan yang berarti dalam sektor pendidikan, dengan keberhasilan dalam meningkatkan jumlah tahun sekolah yang diikuti oleh penduduk. Peningkatan ini juga mencerminkan keberhasilan kebijakan pendidikan lokal dalam mendukung akses

yang lebih luas dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Keberhasilan ini patut diapresiasi dan dijadikan contoh untuk daerah-daerah lain yang memiliki tantangan serupa.

### 2.2.3.2 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak di suatu wilayah pada masa depan. Data HLS dari tahun 2020 hingga 2024 untuk Nasional, Provinsi Aceh, dan Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Gambar 2.39 berikut.

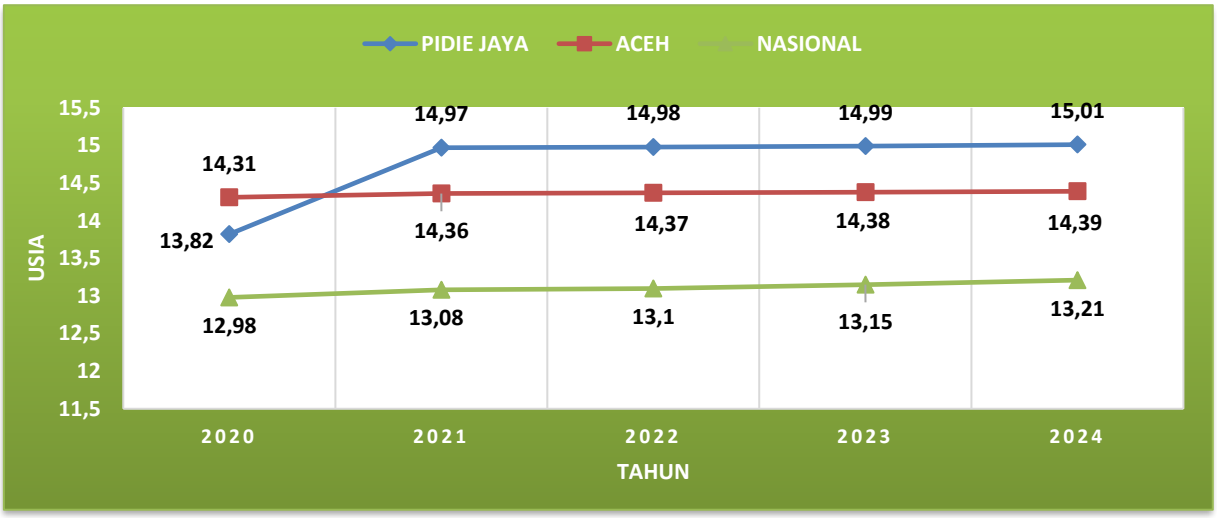


*Sumber : BPS Aceh, Tahun 2025*

**Gambar 2.39. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**

Berdasarkan data Harapan Lama Sekolah (HLS) dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan rata-rata nasional mengalami berbagai tingkat peningkatan dalam jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan. Pada tahun 2020, HLS di Pidie Jaya mencapai 13.82 tahun dan terus meningkat hingga 15,01 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam harapan pendidikan di wilayah tersebut.

Di Provinsi Aceh, HLS juga menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari 14,31 tahun pada 2020 menjadi 14,39 tahun pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh provinsi.

Pada tingkat nasional, HLS meningkat dari 12,98 tahun pada 2020 menjadi 13,21 tahun pada 2024. Meskipun peningkatannya tidak sebesar di Pidie Jaya, hal ini tetap menunjukkan adanya kemajuan dalam harapan pendidikan di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, peningkatan HLS di Pidie Jaya yang lebih tinggi dari rata-rata nasional dan bahkan provinsi menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam upaya meningkatkan pendidikan di daerah tersebut. Perbandingan dengan Provinsi Aceh dan nasional mengindikasikan bahwa Pidie Jaya telah melakukan langkah-langkah yang efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sehingga memberikan harapan yang lebih baik bagi masa depan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut. Upaya berkelanjutan dalam bidang ini perlu terus didorong agar tercapai kesetaraan dan peningkatan pendidikan di seluruh wilayah

### 2.2.3.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Pidie Jaya yang cerdas, inovatif, dan berdaya saing, pembangunan literasi menjadi prioritas utama pada periode 2025–2029. Hal ini sejalan dengan target pembangunan nasional dan provinsi, di mana peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator kunci keberhasilan. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berkomitmen penuh untuk menggenjot IPLM melalui penguatan fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat. Strategi yang akan ditempuh mencakup pemerataan akses layanan perpustakaan, peningkatan kualitas koleksi dan tenaga perpustakaan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan literasi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat akan menjadi kunci untuk mencapai budaya literasi yang kuat, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akselerasi pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya.

Data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut.

**Tabel 2.17.**
**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023-2024**

| No. | Uraian | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| | **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat** | **64,0800** | **58,5000** |
| 1 | Pemerataan Layanan Perpustakaan | 0,3441 | 0,3383 |
| 2 | Ketercukupan Koleksi Perpustakaan | 0,7215 | 0,4759 |
| 3 | Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan | 1,0000 | 1,0000 |
| 4 | Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari | 0,1407 | 0,0985 |
| 5 | Perpustakaan yang dibina sesuai SNP | 0,2791 | 1,0000 |
| 6 | Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan | 1,0000 | 0,1825 |
| 7 | Jumlah Anggota Perpustakaan | 1,0000 | 1,0000 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

Tabel 2.17 menampilkan gambaran komprehensif mengenai tingkat literasi di Kabupaten Pidie Jaya, di mana Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) secara keseluruhan menunjukkan penurunan dari 64,0800 di tahun 2023 menjadi 58,5000 di tahun 2024, mengindikasikan adanya kemunduran dalam upaya pembangunan literasi. Penurunan IPLM ini sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan signifikan pada beberapa indikator, seperti ketercukupan koleksi perpustakaan yang anjlok dari 0,7215 menjadi 0,4759, tingkat kunjungan masyarakat per hari yang merosot dari 0,1407 menjadi 0,0985, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan yang terjun bebas dari 1,0000 menjadi 0,1825. Meskipun demikian, terdapat aspek positif seperti rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dan jumlah anggota perpustakaan yang berhasil dipertahankan pada nilai sempurna 1,0000 di kedua tahun, serta capaian luar biasa dalam pembinaan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang meningkat tajam dari 0,2791 di tahun 2023 menjadi 1,0000 di tahun 2024, menunjukkan seluruh perpustakaan telah memenuhi standar. Dengan demikian, meskipun terdapat kemajuan pada beberapa sektor, penurunan tajam pada aspek koleksi, kunjungan, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama di balik menurunnya IPLM Kabupaten Pidie Jaya.

### 2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) adalah suatu pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk membangun ketahanan rumah tangga, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan, agar mereka mampu mempersiapkan diri, mengatasi, dan beradaptasi terhadap berbagai guncangan seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau dampak perubahan iklim, sehingga mencegah mereka jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan. Konsep ini mengintegrasikan elemen perlindungan sosial reguler, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim, serta memungkinkan perluasan baik secara horizontal (menambah cakupan penerima manfaat) maupun vertikal (menambah jenis dan jumlah manfaat) agar lebih responsif terhadap kebutuhan darurat. Dengan demikian, PSA tidak hanya berfungsi optimal dalam kondisi normal tetapi juga memiliki kapasitas untuk diadaptasikan secara fleksibel saat terjadi keadaan darurat, sehingga mampu mendukung pemulihan dan pembangunan kembali kehidupan masyarakat pasca-guncangan.

### 2.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Untuk mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi seluruh angkatan kerja di Kabupaten Pidie Jaya, strategi jaminan sosial ketenagakerjaan akan berfokus pada perluasan cakupan kepesertaan. Inisiatif ini akan menyasar berbagai segmen pekerja, mulai dari Penerima Upah (PU) di sektor formal seperti karyawan perusahaan dan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN), hingga Bukan Penerima Upah (BPU) yang bekerja secara mandiri atau di sektor informal. Mengingat mayoritas masyarakat Pidie Jaya bergerak di sektor pertanian dan perikanan, fokus khusus akan diberikan untuk mendaftarkan petani, nelayan, serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga akan diwajibkan bagi seluruh tenaga kerja dalam proyek Jasa Konstruksi (JAKON) yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan akan diperkuat untuk memastikan seluruh pekerja yang terdaftar terlindungi oleh program-program esensial, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Upaya ini bertujuan untuk menciptakan bantalan ekonomi bagi pekerja dan keluarga mereka, mengurangi risiko kemiskinan ekstrem akibat kecelakaan kerja atau kematian, serta menjamin keberlanjutan penghidupan yang layak. data Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut.

**Tabel 2.18.**
**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 202-2024**

| Tahun | Tenaga Kerja Terdaftar | | | | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Penerima Upah | Bukan Penerima Upah | Jasa Konstruksi | Jumlah | |
| 2020 | 1.694 | 557 | - | 2.251 | 5,05 |
| 2021 | 1.481 | 625 | - | 2.106 | 4,84 |
| 2022 | 2.367 | 699 | - | 3.066 | 6,96 |
| 2023 | 2.496 | 811 | 67 | 3.307 | 7,06 |
| 2024 | 2.342 | 647 | 84 | 3.056 | 4,84 |

*Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2025*

### 2.2.4.2 Kesejahteraan Sosial

Angka kemiskinan pada tahun 2024 masih sangat tinggi yaitu 18,28 persen. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah, hal ini tercermin dari banyaknya kasus PMKS seperti pengemis, yatim piatu, anak

terlantar, orang tua jompo yang tidak terurus dan kelompok rentan masih perlu perhatian pemerintah Kabupaten Pidie Jaya secara serius. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut.

**Tabel 2.19.**
**Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**
**Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020–2024**

| No | Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial | Tahun (Jiwa) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Fakir Miskin | 31.390 | 31.769 | 30.410 | 34.447 | 25.655 |
| 2 | Anak Terlantar | 409 | 121 | 121 | 98 | 90 |
| 3 | Lanjut Usia Terlantar | 236 | 236 | 236 | 255 | 300 |
| 4 | Orang Dengan Kecacatan (ODK) | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1481 | 1.589 |
| 5 | Anak Nakal | 19 | 19 | 19 | 12 | 41 |
| 6 | Gelandangan dan Pengemis | 0 | 0 | 10 | 16 | 37 |
| 7 | Tuna Sosial (WTS) | - | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | Anak Korban Tindak Kekerasan | 12 | 22 | 17 | 1 | 19 |
| 9 | Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) | 7 | 22 | 1 | 5 | 4 |
| 10 | Eks Penyakit Kronis (EKPK) | 133 | 133 | 105 | 108 | 107 |
| 11 | Mantan Warga Binaan LP (Eks Narapidana) | 155 | 155 | 155 | 150 | 190 |
| 12 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | 3.132 | 3.925 | 3.341 | 3.335 | 3.335 |
| 13 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Korban Bencana dan Musibah Lainnya | - | 68 | 71 | 3.570 | 12.504 |

*Sumber: Dinas Sosial, P3A Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Penanganan penduduk yang mengalami permasalahan sosial telah menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah orang terlantar serta penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dapat bantuan. Hal tersebut sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS).

Tantangan yang muncul adalah adanya konflik horizontal dan vertikal yang dapat menimbulkan korban bagi masyarakat yang tidak berdosa, sehingga dapat menambah persoalan sosial lainnya. Arus globalisasi dan informasi yang menyebabkan pergerakan barang, modal, dan orang menyebabkan tingkat kompetensi hidup yang semakin meningkat. Jika hal ini tidak di antisipasi, maka sebagian masyarakat akan tersisih dan dapat menimbulkan masalah sosial.

Secara internal, permasalahan yang muncul adalah adanya sikap malas dari sebagian masyarakat akibat ketergantungan bantuan dari lembaga donor. Kurangnya tingkat kompetensi dan keterampilan hidup masyarakat untuk bersaing dalam kehidupan yang semakin kompleks. Faktor keberhasilan ke depan yaitu adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterampilan hidup dan pendidikan yang memadai untuk bersaing di kehidupan kota. Meningkatnya keterampilan, pengetahuan dan etos kerja masyarakat sebagai akibat transfer pengetahuan dan keterampilan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Pidie Jaya. Semakin banyaknya program pemerintah untuk mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan.

Kondisi keluarga sejahtera dan sosial di Kabupaten Pidie Jaya untuk masa mendatang diharapkan akan lebih baik dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh antara lain : Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, meningkatkan pembinaan para penyandang cacat dan trauma, penyediaan dan pembinaan panti asuhan/panti jompo, pembinaan eks penyandang penyakit sosial (ex. Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), meningkatkan sumber daya kelembagaan kesejahteraan sosial, dan menerapkan standar pelayanan minimal kesejahteraan sosial kepada semua PMKS.

Sementara untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh stakeholder untuk merumuskan kebijakan yang tepat mengingat masih kerap terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pidie Jaya. Dalam kurun waktu tahun 2024 terdapat sebanyak 7 kasus kekerasan terhadap perempuan dan sebanyak 7 kasus kekerasan terhadap anak, meskipun angka terjadinya kasus ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetap dibutuhkan perhatian dan strategi khusus yang harus ditempuh guna mencegah kembali terjadinya peningkatan untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pidie Jaya.

### 2.2.5. Beragama, Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam, pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya tidak hanya berorientasi pada kemajuan material, tetapi juga berlandaskan pada spiritualitas dan budaya lokal yang kuat. Konsep "Beragama, Maslahat, dan Berkebudayaan Maju" menjadi fondasi filosofis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) periode 2025–

2029, yang bertujuan untuk menghadirkan kebaikan universal (maslahat) bagi seluruh masyarakat melalui implementasi nilai-nilai keislaman yang menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Pendekatan ini memastikan bahwa agama menjadi inspirasi untuk memecahkan persoalan, membangun kesejahteraan, serta memperkuat ketahanan sosial. Di saat yang sama, komitmen untuk memajukan kebudayaan lokal akan dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang religius dalam setiap aspek pembangunan, termasuk ekonomi kreatif dan pelestarian warisan budaya. Dengan demikian, Pidie Jaya tidak hanya akan menjadi daerah yang modern dan sejahtera, tetapi juga mempertahankan identitas budaya yang kaya, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman.

#### 2.2.5.1 Indeks Pembangunan Syariah

Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh, yang pelaksanaannya meliputi aqidah, syariah dan akhlak. Implementasi syariat Islam dan capaiannya salah satunya diukur dengan Survei Indeks Pembangunan Syariah (IPS) yang didasarkan pada 7 dimensi pembangunan yang terdiri dari Akidah, Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan Membayar Zakat di Baitul Mal, Melek Al-Quran, Manajemen Masjid, Hukum Jinayat, dan Akhlak. Penetapan 7 dimensi ini adalah hasil deduksi dari berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

**Tabel 2.20.**
**Dasar Regulasi Dimensi Indeks Pembangunan Syariah**

| No. | Dimensi Indeks Pembangunan Syariah | Dasar Regulasi |
|---|---|---|
| 1 | Aqidah | Qanun No. 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah |
| 2 | Akhlak | Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam |
| 3 | Manajemen Mesjid | |
| 4 | Melek al-Qur'an | |
| 5 | Hukum Jinayat | Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat |
| | | Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah |
| 6 | Kesadaran Membayar Zakat | Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal |
| 7 | Lembaga keuangan Syariah | Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah |

*Sumber : Dinas Syariat Islam Kab. Pidie Jaya, Tahun 2025*

Indikator Penilaian Aqidah:

- Pemahaman Masyarakat terhadap Aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah, merujuk pada *Fatwa MPU Aceh No. 4 Tahun 2012, 34 kriteria.*
- Pemahaman sesat yang tersebar dalam Masyarakat, merujuk kepada *Pasal 11 Qanun No.8/2015, 13 kriteria.*

- Muallaf, berdasarkan data muallaf di kantor Kementerian Agama di Kabupaten Pidie Jaya.

Indikator Penilaian Akhlak:

- Tuntunan Akhlak Islami ( Nilai- Nilai Keislaman) : Persaudaraan, Kasih Sayang, Kesetaraan, Penghormatan Bersama, Pencegahan kerusakan, Konsumsi
- Tata Pergaulan Hidup Islami : Tidak berdua-duaan selain mahram, menjaga mahram, pergaulan yang baik, bertegur sapa, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, menyambung silaturrahmi, toleransi pemahaman agama dalam damai, toleransi antar umat beragama
- Tata Busana Islami : Menutup Aurat, Tidak menyerupai lawan jenis, fungsi perlindungan pakaian, pengetahuan tentang aurat, kewajiban menutup aurat, Batasan menutup aurat, pakaian Islami mengikuti zaman, pengalaman berpakaian sesuai syariat, persepsi aturan berpakaian, peran pemerintah dalam mengatur berpakaian.

Indikator Penilaian Syariah:

- Persepsi Qanun LKS Qanun No.11 Tahun 2018 : Keberadaan Perbankan Syariah, Penutupan Bank Konvensional, produk perbankan Syariah, Kemudahan pembiayaan, Preferensi masyarakat terhadap perbankan syariah
- Persepsi ZISWAF : Kepatuhan Muzakki membayar Zakat, peningkatan pengumpulan zakat oleh Baitul mal, pemetaan distribusi zakat, pengembangan sistem pengelolaan zakat, peran zakat mengentaskan kemiskinan, urgensi hikmah berzakat
- Melek Al Quran : Lembaga Formal Pendidikan AL Quran, Kemampuan membaca Al Quran sejak dini ,Penguasaan Tajwid, Kemampuan membaca sesuai makhraj, pemahaman pentingnya tajwid, rutinitas membaca Al Quran, Kemampuan Menghafal, Kemampuan membaca dengan fasih, Peran lembaga Pendidikan Al Quran, Ayat-ayat pendek pada Shalat.
- Manajemen Mesjid : Keberadaan Shalat Jamaah, Azan setiap waktu Sholat, Jumlah Jamaah, Pemutaran Ayat-ayat suci Al Quran pada pengeras suara, akhlak pengurus masjid, akhlak jamaah, kebersihan, pengaturan pemisahan saf, keindahan, keamanan.
- Kesadaran Sholat Berjamaah : Seberapa rutin berjamaah, penguasaan rukun shalat, Pelaksanaan Shalat Rawatib, Intensitas Masbuk, Persentasi Usia Jamaah, Jamaah Anak, Kultum, Menjaga waktu Shalat( Ketepatan Waktu), Pengajian Rutin, Jamaah Wanita

- Persepsi Masyarakat Terhadap Qanun Jinayat : Pemahaman Qanun, Sosialisasi Pemerintah, Peran Media dalam Sosialisasi, Implementasi Qanun, Efektivitas Penerapan, Prosesi Pelaksanaan Uqubat (Cambuk), Pengawasan, Peran Aparatur Desa, Peran Akademisi, Penguatan Qanun kedepan.

Adapun langkah stategis sebagai wujud untuk mencapai target realisasi Indeks Pembangunan Syariat Islam terdapat 5 kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam, terdiri dari :

a. Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam
b. Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam
c. Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman Al-Quran
d. Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam
e. Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam.

Data realisasi Indeks Pembangunan Syariah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2021 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut.

**Tabel 2.21.**
**Capaian Indeks Pembangunan Syariah beserta dimensinya di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 dan 2024**

| NO. | URAIAN | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|
| | **Indeks Pembangunan Syariat** | **84,36** | **83,01** |
| 1 | Dimensi Aqidah | 94,70 | 83,06 |
| 2 | Dimensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) | 77,20 | 86,40 |
| 3 | Dimensi Kepatuhan membayar Zakat di Baitul Mal | 82,70 | 85,19 |
| 4 | Dimensi Melek Al-Quran | 85,09 | 84,03 |
| 5 | Dimensi Manajemen Mesjid/Meunasah | 81,56 | 79,02 |
| 6 | Dimensi Hukum Jinayat | 83,48 | 80,13 |
| 7 | Dimensi Akhlak | 92,53 | 83,25 |

*Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie Jaya, Tahun 2025*

Berdasarkan data capaian Indeks Pembangunan Syariah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2021 dan 2024, terjadi penurunan nilai indeks secara agregat dari 84,36 pada tahun 2021 menjadi 83,01 pada tahun 2024. Meskipun demikian, beberapa dimensi menunjukkan peningkatan, seperti Lembaga Keuangan Syariah (dari 77,20 menjadi 86,40), Kepatuhan membayar zakat di Baitul Mal (82,70 menjadi 85,19), serta Hukum Jinayat (83,48 menjadi 80,13). Sebaliknya, beberapa dimensi mengalami penurunan signifikan, seperti Aqidah (dari 94,70 menjadi 83,06), Manajemen Masjid/Meunasah (81,56 menjadi 79,02), Melek Al-Qur'an (85,09

menjadi 84,03), dan Akhlak (92,53 menjadi 83,25). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penguatan kelembagaan keuangan syariah dan kepatuhan zakat, namun pengamalan nilai-nilai dasar keislaman seperti aqidah dan akhlak mengalami penurunan yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan syariat di masa mendatang.

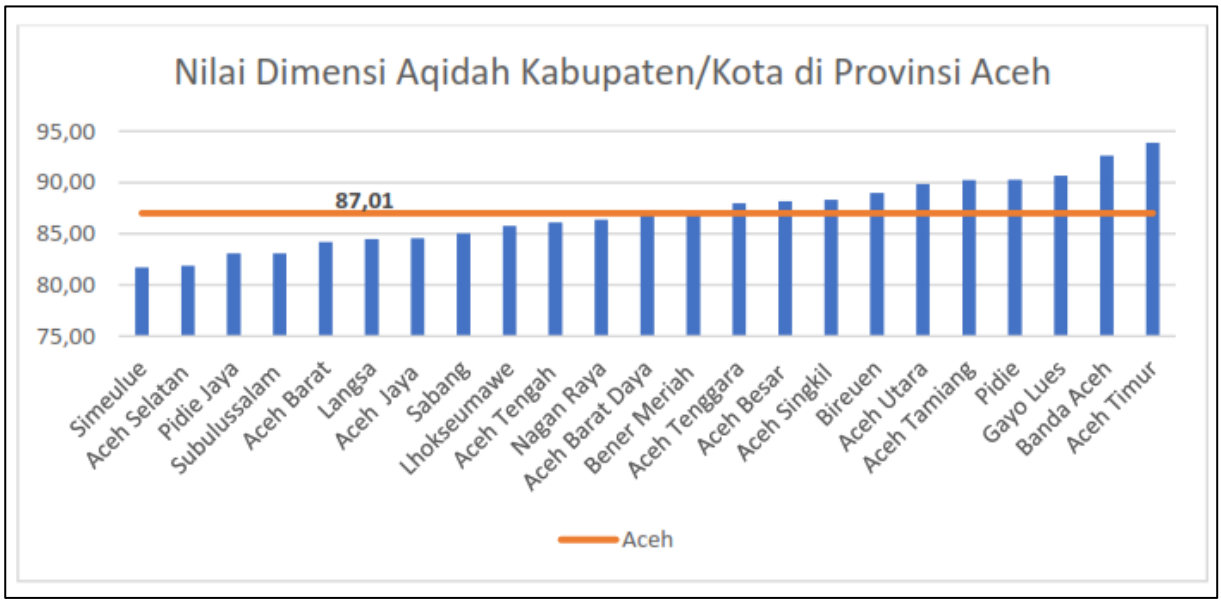


*Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie Jaya, Tahun 2025*

**Gambar 2.40. Nilai Dimensi Aqidah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh**

Berdasarkan laporan hasil survey tahun 2024, indeks Dimensi Aqidah di Pidie Jaya telah mencapai angka 83,06. Jika dibandingkan capaian indeks dimensi Aqidah di kabupaten dan kota lainnya di Aceh maka Pidie Jaya masih berada pada ambang batas indeks terendah diatas Kabupaten Simeulue dan Aceh Selatan, namun hal tersebut adalah kewajaran jika disandingkan dengan geografis daerah Pidie Jaya yang tidak bertepi dengan perbatasan wilayah luar Aceh disebabkan beberapa Dai yang ditempatkan di perbatasan dengan pengajian yang berfokus pada materi Aqidah juga merupakan faktor yang bisa mendongkrak indeks dimensi Aqidah.

Indeks ini disesuaikan dengan regulasi di Aceh berupa Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS ( Lembaga Keuangan Syariah). Kabupaten Pidie Jaya berada pada angka 86,40 untuk Dimensi Lembaga Keuangan Syariah, tidak terlalu jauh dari capaian indeks dimensi Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Aceh secara keseluruhan. Hal ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan yang sudah mengadopsi prinsip-prinsip syariah, hal ini mencerminkan adanya upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan implementasi syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya.

Pengelolaan zakat dalam Islam merupakan salah satu instrumen sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan. Selain berpotensi besar, zakat merupakan instrumen yang paling banyak dibahas dan diteliti. Diantara aspek yang di tinjau untuk menilik dimensi ini adalah perhitungan nisab zakat dengan prinsip syariat, pengelolaan zakat di Baitul Mal, dan pemahaman tentang kewajiban zakat

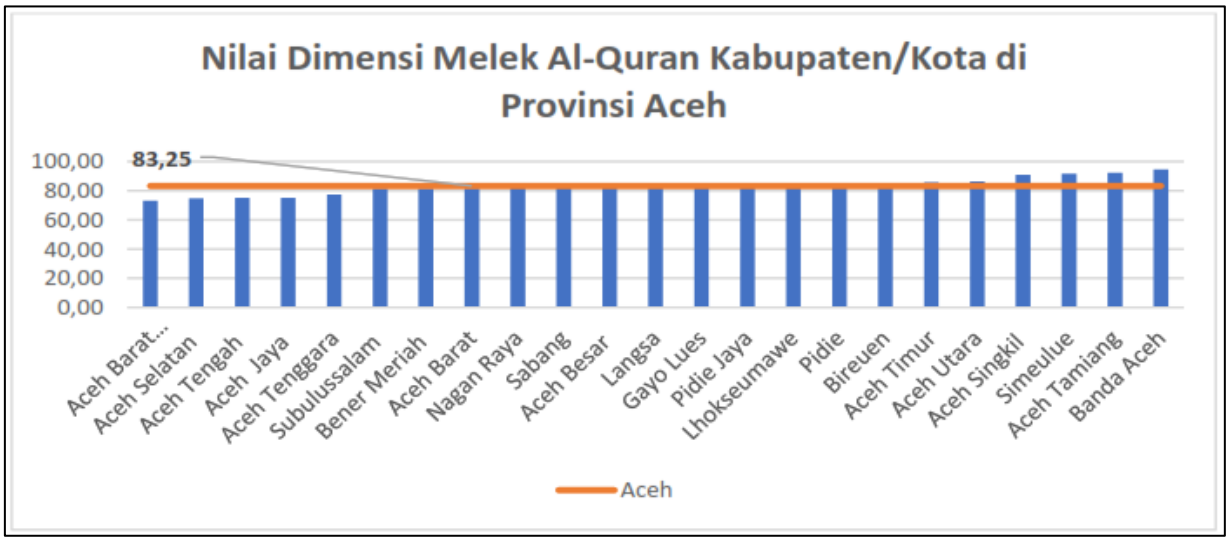


*Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie Jaya, Tahun 2025*

**Gambar 2.41. Nilai Dimensi Melek Al-Quran Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh**

Indeks Pembangunan Syariat dimensi Kepatuhan Membayar Zakat di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan angka 85,19 yang relative stabil tepat diatas capaian propinsi 84, 03. Namun jika dibandingkan dengan kepatuhan membayar zakat di kabupaten dan kota lainnya seperti Kabupaten Aceh Timur yang berada pada skor 91, maka Kabupaten Pidie Jaya masih perlu pembenahan dari semua pihak dari pemerintah Kabupaten sampai level gampong untuk mendukung dan mendorong kepatuhan Masyarakat dalam membayar Zakat.

Kemampuan baca Al-Quran atau Melek Al Quran merupakan Prioritas bagi Pemerintah sehingga berbagai kebijakan dirumuskan untuk mencapai peningkatan kemampuan baca Al-Quran, bahkan pemberantasan buta huruf Al-Quran.

Indeks Dimensi Melek Al-Quran di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2024 mencapai angka 84,03 di urutan 10 yang secara umum masih relatif dengan capaian 23 Kabupaten dan Kota lainnya. Indeks terendah 72,99 berada pada Kabupaten Aceh Barat Daya dan capaian indeks tertinggi berada di Kota Banda Aceh pada angka 94,50. Kategori baik bermakna secara umum masyarakat Pidie Jaya sudah memiliki kemampuan baca Al-Quran yang baik, namun perlu didukung dengan upaya lanjutan dalam meningkatkan kemampuan baca AL-Quran secara maksimal terutama dalam menjadikan bacaan Al-Quran sebagai rutinitas keseharian, baik

sebagai individu, lingkungan keluarga, maupun dalam komunitas masyarakat seperti majelis taklim.

Manajemen masjid dan meunasah merupakan salah satu indikator yang mendapat sorotan penting dalam Indeks Pembangunan Syariah di Aceh. Adapun capaian Indeks tersebut di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

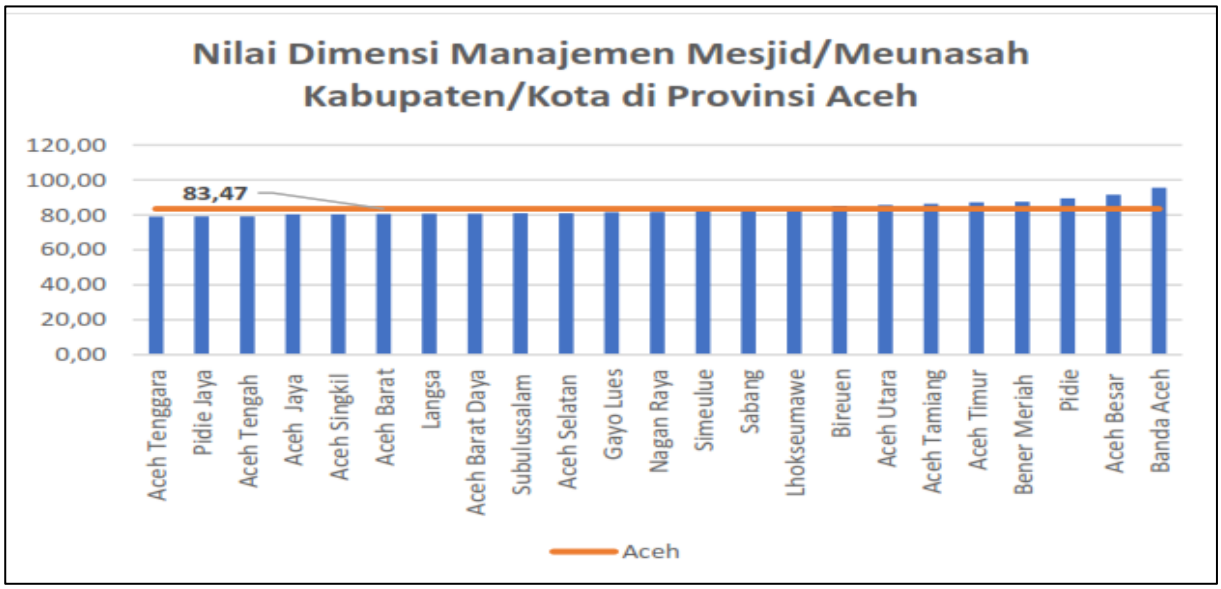


*Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie Jaya, Tahun 2025*

**Gambar 2.42. Nilai Dimensi Manajemen Mesjid/Meunasah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh**

Dari data indeks dimensi Manajemen Mesjid/Meunasah dapat dilihat bahwa Pidie Jaya berada hampir pada level terendah se Aceh setelah Aceh Tenggara. Hal ini patut menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah dan Masyarakat Pidie Jaya untuk mampu mamaksimalkan semua sumber daya yang ada demi tercapainya peningkatan aktifitas ibadah dan keagamaan, karena peningkatan pembangunan fisik semata tidak akan dianggap berhasil jika tidak beriring dengan peningkatan aktifitas ibadah di dalamnya. Pelatihan Manajemen Masjid dan pengelolaannya selayaknya diupayakan untuk terwujud di Kabupaten Pidie Jaya dan lebih menjadi prioritas untuk pengawasan di tahun kemudian.

Berdasarkan survey Indeks Pembangunan Syariat di tahun 2024 pada dimensi hukum jinayat menunjukkan angka capaian yang masih jauh dari harapan, Meskipun capaian tertinggi indeks adalah 88,56, namun Kabupaten Pidie Jaya berada pada skor 80,13 di urutan dua terakhir secara keseluruhan Kabupaten dan kota di propinsi Aceh.

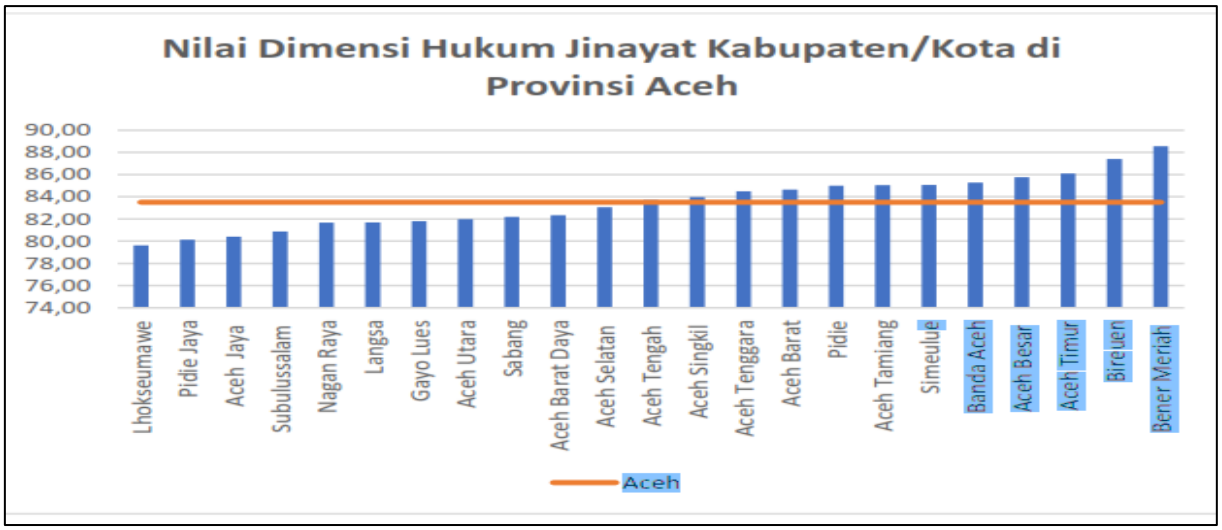


*Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie Jaya, Tahun 2025*

**Gambar 2.43. Nilai Dimensi Hukum Jinayat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh**

Peningkatan indeks dimensi ini membutuhkan pendekatan yang terstruktur, menyeluruh dan kolaboratif antar Masyarakat, berbagai pemangku kepentingan dan penegak hukum. Langkah konkrit bisa dilakukan dengan peningkatan kapasitas aparat wilayatul hisbah untuk melakukan pengawasan yang persuasif dan edukatif, bukan hanya represif. Seperti aspek pergaulan yang patut didukung dengan fasilitas publik yang terpisah antara laki-laki dan Perempuan di tempat-tempat umum, tempat olahraga, rekreasi maupun di Lembaga Pendidikan.

Akhlak merupakan rujukan atau pedoman yang jelas tentang perilaku baik atau pun buruk. Hal ini kemudian menjadi indikator penting manusia dalam mengambil Keputusan yang benar dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh, Pemahaman Akhlak kemudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Indeks Pembangunan Syariat dimensi akhlak mencapai angka 83,25 di Pidie Jaya berdasarkan hasil laporan survey, meskipun belum bisa dikategorikan capaian yang baik, namun jika berkaca pada capaian keseluruhan di propinsi Aceh maka Pidie Jaya berada di urutan ke 9 dari Kabupaten dan Kota lainnya. Aceh secara umum mengalami kemerosotan akhlak bukan hanya di Kabupaten Pidie Jaya.

Peningkatan Sumber Daya Syariat Islam yang tertuang dalam kegiatan kegiatan pembinaan akan terus di kembangkan di Kabupaten Pidie Jaya dengan harapan akan memperbaiki akhlak generasi penerus Masyarakat Pidie Jaya di masa yang akan datang,

Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, termasuk program pembinaan aqidah yang intensif, peningkatan akhlak Islami melalui

pendidikan dan pembinaan, pengelolaan masjid yang semakin baik, serta program-program pendidikan Al-Quran yang berhasil. Selain itu, implementasi hukum jinayat yang semakin efektif, peningkatan kesadaran dan kepatuhan membayar zakat, dan preferensi masyarakat yang semakin tinggi terhadap perbankan syariah juga berkontribusi pada peningkatan IPS.

Secara keseluruhan, data realisasi IPS menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya telah berhasil memperkuat pelaksanaan syariat Islam di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai capaian yang lebih tinggi di masa mendatang.

#### 2.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur capaian kemajuan pembangunan daerah dalam konteks kebudayaan. Penggunaan IPK di Kabupaten Pidie Jaya bertujuan memberikan gambaran yang holistik mengenai kondisi kebudayaan, sekaligus menjadi landasan strategis dalam merumuskan kebijakan yang lebih terarah. Peningkatan nilai IPK akan menjadi salah satu prioritas utama yang diukur melalui beberapa dimensi penting, yaitu: ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan kesetaraan gender. Dengan fokus pada dimensi-dimensi ini, RPJMK Pidie Jaya periode 2025–2029 akan berupaya memastikan kekayaan budaya lokal yang berlandaskan syariat Islam tidak hanya terlindungi dan terlestari, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang dijalankan akan dirancang untuk memperkuat identitas budaya, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta memastikan keberlanjutan tradisi dan nilai-nilai luhur dalam dinamika pembangunan daerah. Peningkatan IPK juga akan mendorong kolaborasi antar-sektor, menciptakan tata kelola yang lebih efektif dalam pemajuan kebudayaan, serta memastikan bahwa pembangunan di Pidie Jaya berakar kuat pada nilai-nilai budaya yang religius dan berkeadilan.

Data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Aceh Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada gambar 2.44 berikut.




*Sumber: Kementerian Kebudayaan RI, Tahun 2025*

**Gambar 2.44. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Aceh**

### 2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Berlandaskan pada fondasi keluarga yang kokoh sebagai unit terkecil dan terpenting dalam masyarakat. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) periode 2025–2029 menempatkan program Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif sebagai prioritas strategis. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat fungsi keluarga sebagai wadah utama pendidikan karakter dan pengasuhan anak, selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal.

Di samping itu, pembangunan juga akan memastikan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari ranah domestik hingga publik. Pendekatan ini juga akan diperluas untuk membangun masyarakat yang inklusif, yang menjamin akses dan partisipasi penuh bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok minoritas lainnya, memastikan tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam proses pembangunan. Melalui sinergi program ini, diharapkan akan tercipta keluarga-keluarga yang harmonis, masyarakat yang adil, serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh penduduk Pidie Jaya

#### 2.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

Indeks Indeks Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah indikator yang menunjukkan tingkat realisasi pemenuhan hak anak baik secara nasional maupun di tingkat provinsi dan juga kabupaten. Capaian IPHA yang rendah mengindikasikan semakin rendahnya realisasi pemenuhan hak anak baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, semakin tinggi capaian IPHA, semakin nyata peran pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak anak di tanah air.

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya adalah perlindungan akan resiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas. Indikator yang termasuk dalam IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat provinsi.

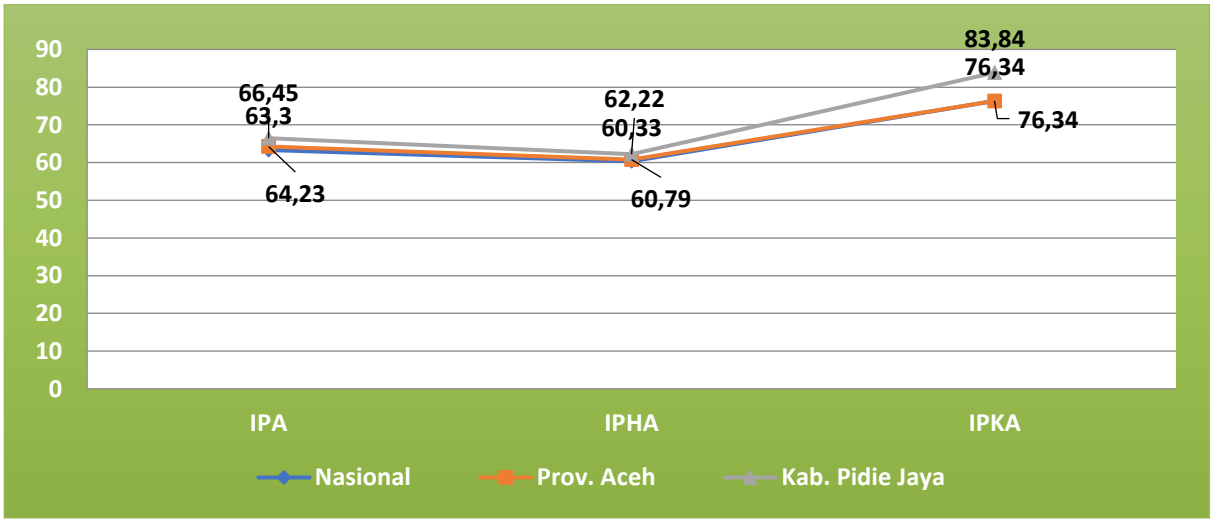


*Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2025*

**Gambar 2.45. Perbandingan IPA, IPHA dan IPKA Kab. Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2023**

Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan angka yang lebih tinggi dari persentase pencapaian IPA dan IPHA di tingkat Provinsi Aceh dan persentase pencapaian nasional. Hal tersebut mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam berbagai aspek perlindungan anak, termasuk kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Pidie Jaya. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap peningkatan ini meliputi implementasi kebijakan yang lebih baik, peningkatan kesadaran masyarakat tentang

hak-hak anak, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak.

Peningkatan ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Pidie Jaya. Pada pencapaian IPKA Kabupaten Pidie Jaya menunjukan capaian yang sangat baik, dimana Kabupaten Pidie Jaya mencapai persentase yang lebih tinggi dibandingkan target persentase capaian IPKA secara nasional yaitu sebesar 71,6%.. Kabupaten Pidie Jaya dalam memenuhi IPKA mencapai persentase 83.84%, hal ini menunjukkan rasio angka anak bersekolah serta pemanfaatan internet, baik yang disabilitas maupun disabilitas cukup tinggi, serta anak yang bekerja dan anak terlantar terbilang rendah di Kabupaten Pidie Jaya.

### 2.2.6.2 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. iBangga Kabupaten Pidie Jaya tahun 2021 berada pada angka 59,35 dan tahun 2024 pada angka 63,67. Data capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar 2.46 berikut.

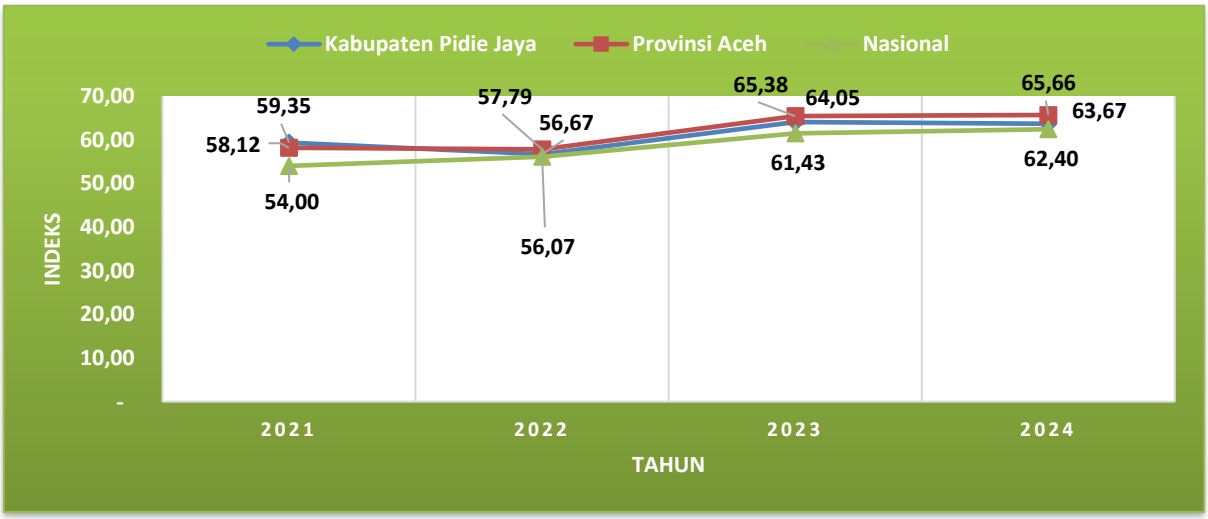


*Sumber: BKKBN, Tahun 2025*

**Gambar 2.46. Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2024**

Dari tahun 2019 hingga 2024, Kabupaten Pidie Jaya mengalami fluktuasi dalam jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif. Pada tahun 2019, jumlah PUS adalah 28.545 dengan cakupan peserta KB aktif sebesar 56,72%. Namun, cakupan ini naik pada tahun 2020 menjadi 58,94% meskipun jumlah PUS meningkat.

Pada tahun 2020, jumlah PUS menurun drastis menjadi 22.728, dan jumlah peserta KB aktif juga berkurang, namun cakupan peserta KB aktif sedikit meningkat menjadi 58,94%. Pada tahun 2021, jumlah PUS terus menurun menjadi 20.880, tetapi cakupan peserta KB aktif meningkat signifikan menjadi 67,11%.

Tahun 2022 melihat peningkatan jumlah PUS menjadi 21.775, tetapi jumlah peserta KB aktif turun lagi, menyebabkan cakupan peserta KB aktif turun menjadi 58,34%. Pada tahun 2023, jumlah PUS meningkat sedikit menjadi 22.124, dan jumlah peserta KB aktif naik menjadi 13.704, sehingga cakupan peserta KB aktif mencapai 62,93%. Pada tahun 2024 jumlah Pus 22.879 dan Peserta KB aktif 15.151 sementara peserta KB aktif meningkat 66.22%

Terjadinya penurunan peserta KB aktif antara lain disebabkan karena keyakinan sebahagian masyarakat akibat efek samping penggunaan alat kontrasepsi dan rendahnya pemakaian alat kontrasepsi MKJP. Disamping itu, belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi menyebabkan kurangnya perencanaan yang komprehensif dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Aceh.

#### 2.2.6.3 Pengarusutamaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pidie Jaya secara konsisten berada di atas IPG Provinsi Aceh selama lima tahun terakhir. Nilai IPG Pidie Jaya mengalami peningkatan dari 94,92 pada tahun 2020 menjadi 95,54 pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pembangunan manusia yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan di kabupaten tersebut.

Sebaliknya, Provinsi Aceh mencatat IPG yang lebih rendah dari Pidie Jaya, walaupun juga menunjukkan tren peningkatan dari 92,07 pada tahun 2020 menjadi 92,84 pada tahun 2024. Selisih antara Pidie Jaya dan Aceh berada di kisaran 2–3 poin selama periode ini, mengindikasikan bahwa Kabupaten Pidie Jaya lebih berhasil dalam menjaga keseimbangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pidie Jaya masih tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan IDG Provinsi Aceh. Pada tahun 2020, IDG Pidie Jaya sebesar 52,58, sedangkan Aceh mencapai 69,04. Selama lima tahun

berikutnya, nilai IDG Pidie Jaya relatif stagnan, berfluktuasi sedikit antara 51,72–55,98, dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 55,98.

Sebaliknya, IDG Aceh juga mengalami sedikit penurunan, dari 69,04 pada tahun 2020 menjadi 61,78 pada tahun 2024, namun nilainya masih jauh lebih tinggi dibandingkan Pidie Jaya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu mengintervensi secara lebih spesifik melalui program-program pemberdayaan perempuan, seperti peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik dan pemerintahan, dukungan terhadap kewirausahaan perempuan, serta pelatihan keterampilan yang mendorong kemandirian ekonomi kaum perempuan di Pidie Jaya. Data secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar 2.47 berikut.

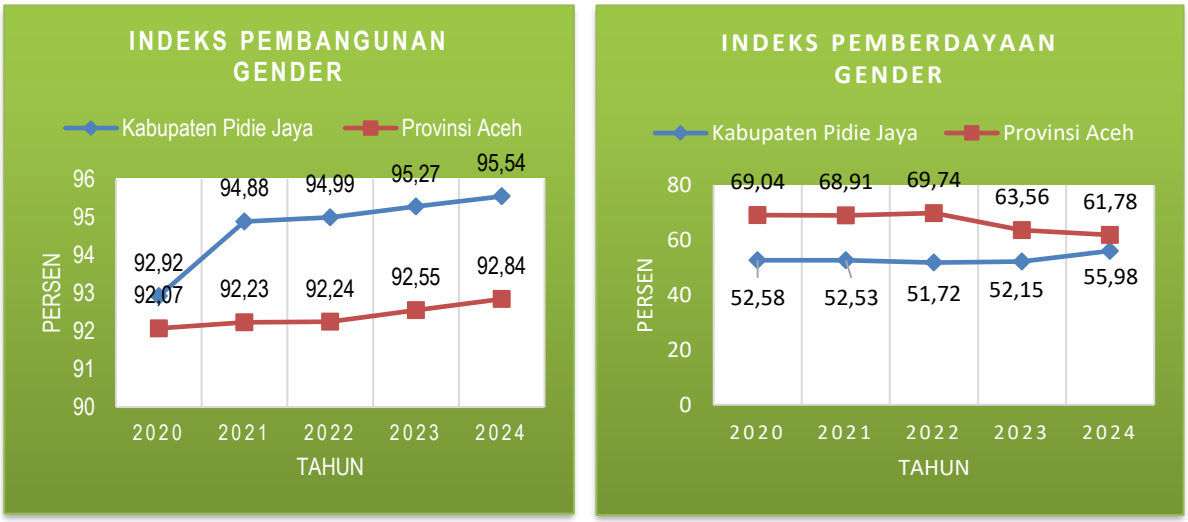


*Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2025*

**Gambar 2.47. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan fluktuasi signifikan selama periode 2020–2024. Pada awalnya, IKG Pidie Jaya berada di angka 0,594 (2020) dan menurun hingga 0,501 (2022), yang mencerminkan perbaikan dalam kesetaraan gender. Namun, terjadi lonjakan drastis pada tahun 2023 mencapai 0,786 yang mengindikasikan peningkatan ketimpangan gender secara tajam, sebelum kembali menurun menjadi 0,400 pada 2024. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan pada beberapa tahun, upaya pengurangan ketimpangan gender belum berjalan stabil dan konsisten di Pidie Jaya.

Dibandingkan dengan Provinsi Aceh, IKG Pidie Jaya sempat berada di atas rata-rata provinsi pada 2020–2021, namun kemudian berada di bawah pada 2022 dan 2024, yang berarti ketimpangan gender lebih kecil di Pidie Jaya pada dua tahun

terakhir tersebut. Penurunan IKG Aceh yang cenderung stabil dari 0,514 (2020) menjadi 0,459 (2024) menunjukkan arah kebijakan provinsi yang lebih konsisten. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya perlu memperkuat kebijakan afirmatif dan pengarusutamaan gender secara berkelanjutan agar kesetaraan gender tidak hanya tercapai sesaat, melainkan terjaga dalam jangka panjang.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Gambar 2.48 berikut.

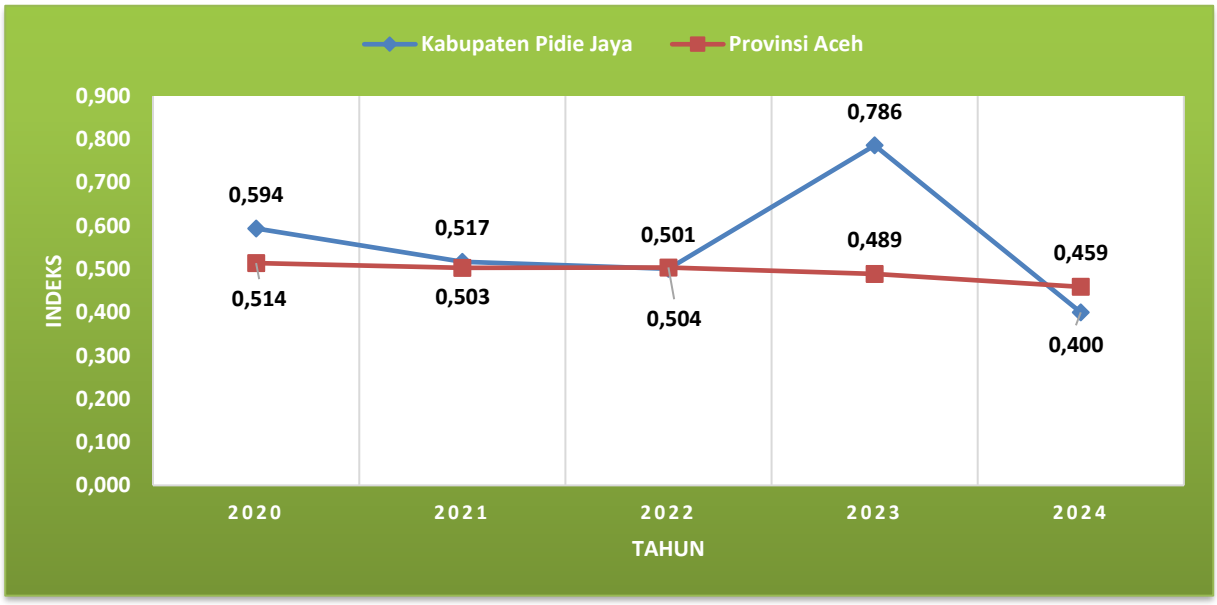


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025*

**Gambar 2.48. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

## 2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Pentingnya peningkatan daya saing daerah sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi. Aspek daya saing tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengoptimalkan sumber daya manusia, serta membangun infrastruktur pendukung yang memadai. RPJMK 2025–2029 akan berfokus pada penguatan sektor-sektor unggulan, seperti pertanian dan perikanan, melalui inovasi dan peningkatan nilai tambah produk. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi, menarik investasi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pidie Jaya secara keseluruhan.

### 2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset utama dalam pembangunan daerah yang menentukan tingkat daya saing dan keberlanjutan pertumbuhan

Kabupaten Pidie Jaya. Ketersediaan SDM yang berkualitas, sehat, terampil, serta adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi fondasi penting dalam mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks pembangunan jangka menengah, penguatan daya saing SDM tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan, tetapi juga pada upaya membangun karakter, etos kerja, dan keterampilan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi unggulan daerah.

Seiring dengan dinamika global, regional, dan nasional, Pidie Jaya dituntut untuk menyiapkan generasi muda yang inovatif, kreatif, serta mampu bersaing dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan struktur ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM diarahkan pada penciptaan ekosistem pembelajaran sepanjang hayat, penguatan kapasitas tenaga kerja, serta peningkatan produktivitas masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai Islami dan kearifan lokal. Dengan demikian, pembangunan SDM yang unggul akan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan visi Pidie Jaya yang Islami, maju, dan berkelanjutan.

#### 2.3.1.1 Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*Defndency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0 – 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk umumr 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun (angkatan kerja),

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

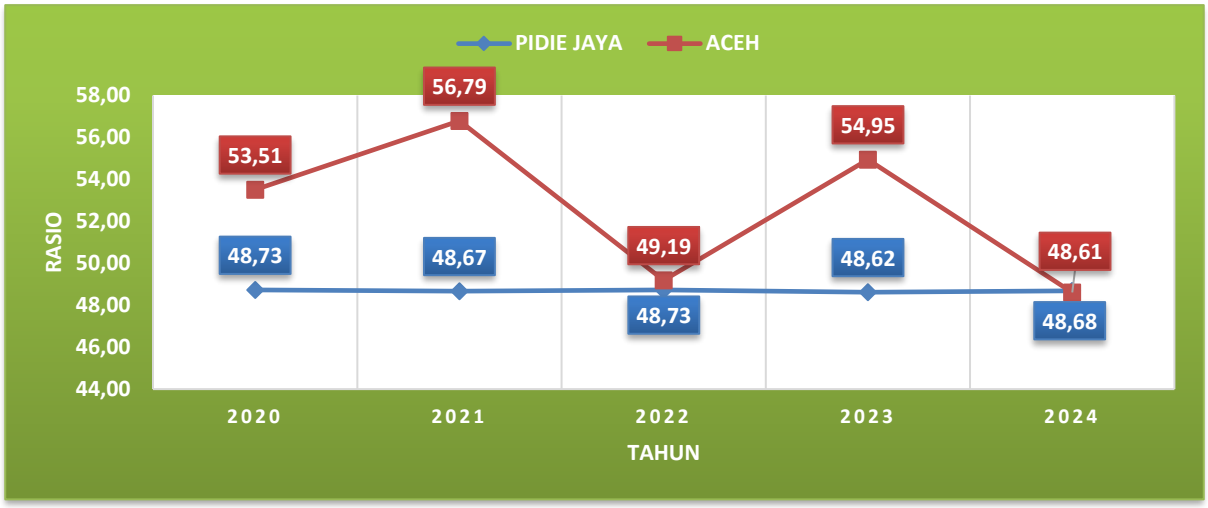


*Sumber: BPS, Tahun 2025*

**Gambar 2.49. Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024**

Gambar 2.49 menunjukkan perkembangan Tingkat Ketergantungan Provinsi Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 hingga 2024, berdasarkan data BPS tahun 2025. Terlihat bahwa rasio ketergantungan di Pidie Jaya (garis biru) cenderung stabil di angka sekitar 48-49%, sedangkan di Aceh (garis merah) menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dengan puncaknya pada tahun 2021 (56,79%) dan 2023 (54,95%), mengindikasikan beban ketergantungan penduduk usia non-produktif terhadap usia produktif yang lebih dinamis di tingkat provinsi dibandingkan di kabupaten Pidie Jaya.

### 2.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi merupakan pilar utama pembangunan daerah yang saling terkait. Iptek menjadi fondasi pengetahuan, mendorong Inovasi dalam produk, proses, dan layanan, yang pada akhirnya secara fundamental meningkatkan Produktivitas Ekonomi. Sinergi ketiganya esensial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, daya saing, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya.

#### 2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Sektor Industri Pengolahan memegang peranan krusial sebagai salah satu motor penggerak transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah dalam perekonomian daerah. Indikator Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan menjadi cerminan vital dari kontribusi dan kapabilitas sektor ini dalam menghasilkan barang jadi atau setengah jadi dari bahan baku, sehingga mampu mendorong diversifikasi ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta

peningkatan daya saing regional. Rasio PDRB Industri Pengolahan yang kuat mengindikasikan struktur ekonomi yang lebih maju dan resilient, mengurangi ketergantungan pada sektor primer, serta membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan.

Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.50 berikut.

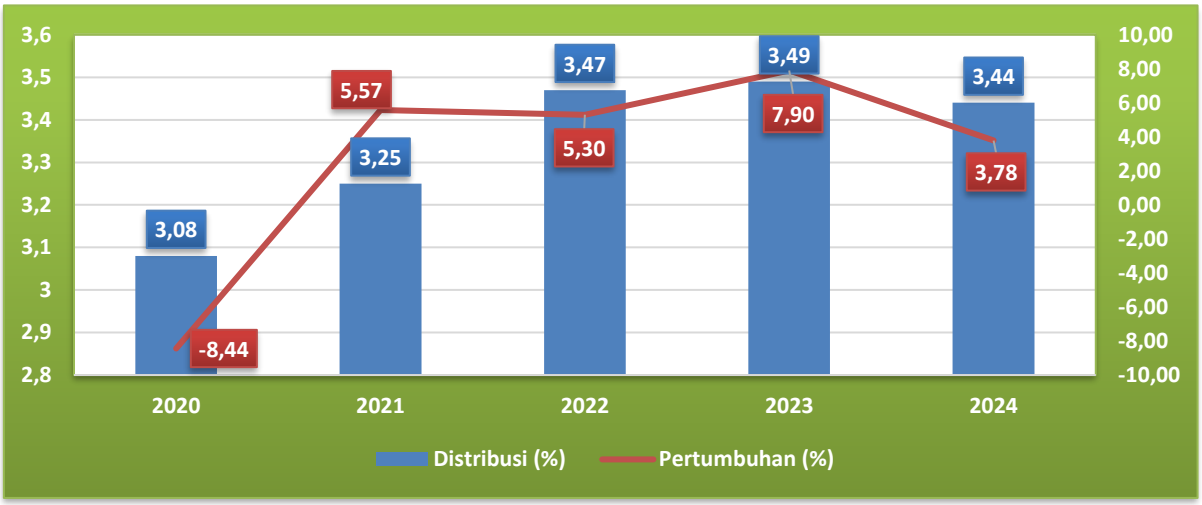


*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pidie Jaya, 2025*

**Gambar 2.50. Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024.**

berdasarkan gambar diatas, Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan dinamika yang menarik antara distribusi dan laju pertumbuhannya dari tahun 2020 hingga 2024. Dari sisi distribusi PDRB, sektor ini mengalami peningkatan kontribusi yang stabil dari 3,08% pada tahun 2020, terus naik hingga mencapai puncaknya di 3,49% pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 3,44% pada tahun 2024, mengindikasikan peran yang semakin penting dalam perekonomian daerah. Sementara itu, laju pertumbuhan sektor ini menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi, diawali dengan kontraksi tajam sebesar -8,44% pada tahun 2020 yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi, kemudian diikuti oleh pemulihan kuat dengan lonjakan menjadi 5,57% di tahun 2021 dan mencapai puncaknya di 7,90% pada tahun 2023, sebelum akhirnya mengalami perlambatan signifikan menjadi 3,78% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, meskipun laju pertumbuhan menunjukkan fluktuasi yang mencolok, terutama di awal periode, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Pidie Jaya secara bertahap meningkat, menegaskan posisinya sebagai salah satu pilar ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut

### 2.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum menjadi indikator vital dalam memahami kontribusi serta dinamika sektor pariwisata dan jasa perhotelan di suatu wilayah. Analisis rasio ini tidak hanya merefleksikan pangsa pasar atau distribusi relatif sektor tersebut terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai seberapa besar peran kegiatan akomodasi dan penyediaan makanan serta minuman dalam menggerakkan perekonomian lokal. Dengan mengamati rasio ini, pemerintah daerah dan pelaku usaha dapat mengidentifikasi tren pertumbuhan, potensi pengembangan, serta tantangan yang dihadapi sektor Akomodasi dan Makan Minum, yang pada gilirannya dapat menjadi dasar untuk perumusan kebijakan dan strategi investasi yang lebih tepat sasaran.

Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 s.d 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.51 berikut.

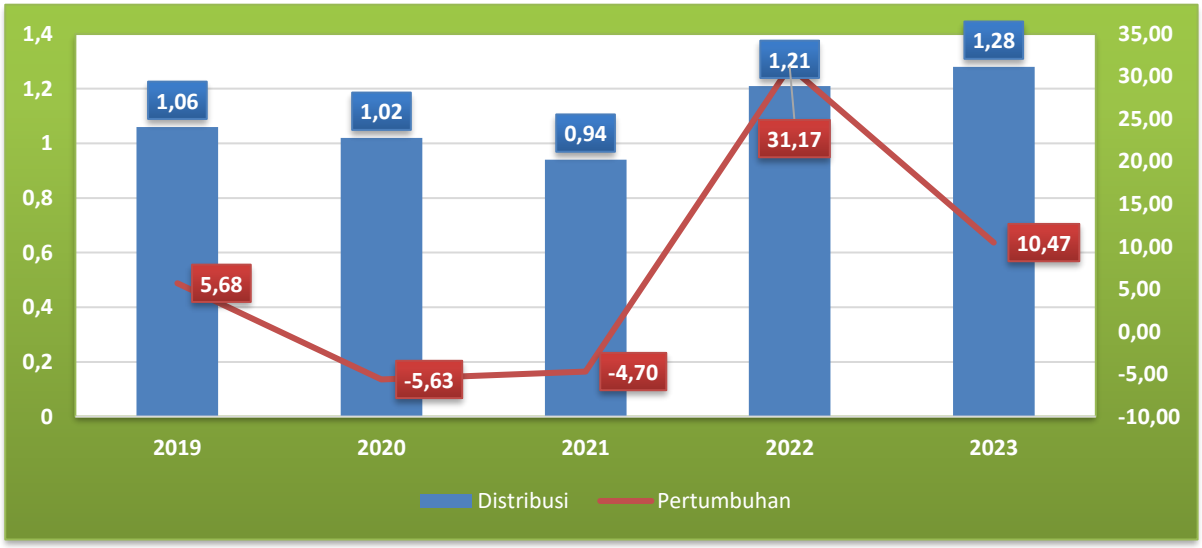


*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pidie Jaya, 2025*

**Gambar 2.51. Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 s.d 2023.**

digambar diatas menunjukkan tren PDRB Kategori Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Pidie Jaya dari 2019-2023. Distribusi (%) sektor ini terhadap total PDRB fluktuatif namun cenderung meningkat, dari 1,06% (2019) menjadi 1,28% (2023), dengan puncaknya 1,21% (2022). Sementara itu, Laju Pertumbuhan (%) mengalami kontraksi signifikan di 2020 (-5,63%) dan 2021 (-4,70%), lalu melonjak drastis di 2022 (31,17%), dan melambat menjadi 10,47% di 2023. Secara

ringkas, sektor ini pulih kuat setelah kontraksi pandemi dan menunjukkan peningkatan kontribusi terhadap ekonomi Pidie Jaya

#### 2.3.2.3 Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, merupakan salah satu komponen vital dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah, yang mencerminkan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam pendistribusian barang dan jasa hingga tingkat konsumen akhir, serta layanan purna jual kendaraan bermotor. Rasio PDRB dari kategori lapangan usaha ini menjadi indikator penting untuk menganalisis sejauh mana kontribusi sektor perdagangan dan jasa reparasi terhadap total perekonomian regional, sekaligus menggambarkan daya beli masyarakat dan dinamika pasar lokal. Analisis terhadap rasio ini dapat mengungkap kekuatan sektor perdagangan sebagai penggerak ekonomi, potensinya dalam menciptakan lapangan kerja, serta kerentanannya terhadap fluktuasi ekonomi makro dan perubahan perilaku konsumen.

Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.52 berikut

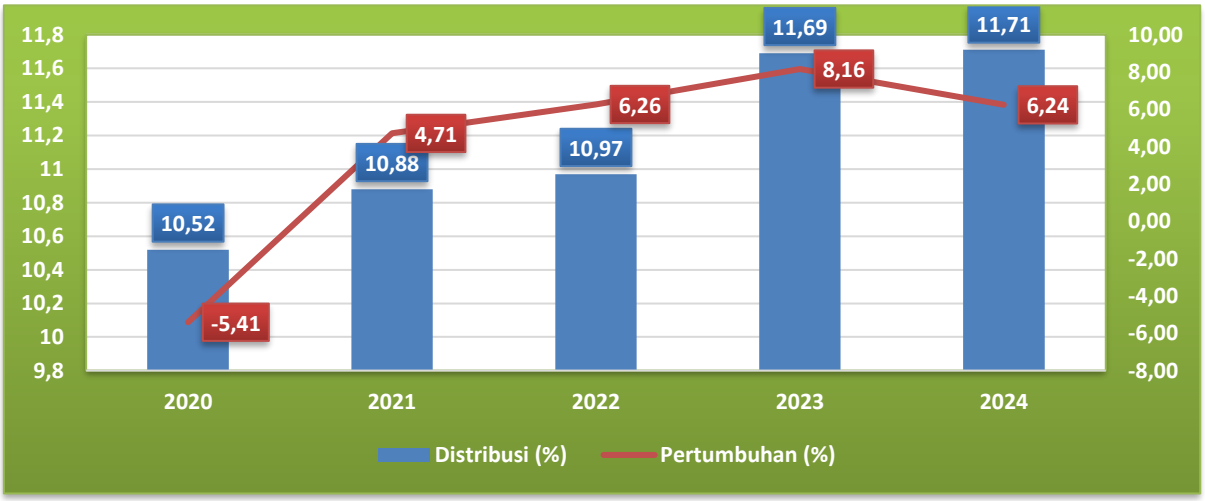


*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pidie Jaya, 2025*

**Gambar 2.52. Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024.**

Gambar diatas menyajikan data distribusi dan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat bahwa distribusi PDRB sektor ini menunjukkan tren kenaikan, dimulai dari 10,52% pada tahun 2020 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 11,69%, kemudian sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 11,71% [Gambar 2.49]. Sementara itu, laju pertumbuhannya berfluktuasi, mengalami kontraksi signifikan sebesar -5,41% pada tahun 2020, lalu melonjak drastis dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 8,16%, dan kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 6,24% [Gambar 2.49]. Ini menunjukkan dinamika yang cukup tinggi pada sektor tersebut dalam rentang waktu tersebut

#### 2.3.2.4 Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan merupakan indikator penting yang mengukur tingkat aktivitas kewirausahaan dalam suatu perekonomian, seringkali dihitung sebagai persentase penduduk usia produktif yang terlibat dalam kegiatan wirausaha, baik sebagai pemilik usaha baru maupun pemilik usaha yang sudah berjalan. Angka rasio ini mencerminkan dinamika penciptaan lapangan kerja, inovasi, serta kontribusi sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi Rasio Kewirausahaan, umumnya menunjukkan semakin kuatnya ekosistem kewirausahaan dan potensi ekonomi suatu daerah.

**Tabel 2.22.**
**Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No. | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berusaha dibantu Buruh Tetap | 2.751 | 2.754 | 2.013 | 4.554 | 7.020 |
| 2 | Jumlah Angkatan Kerja | 70.905 | 69.359 | 70.905 | 73.248 | 74.392 |
| | **Rasio Kewirausahaan** | **3,88** | **3,97** | **2,84** | **6,22** | **9,44** |

Tabel diatas menyajikan data Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 hingga 2024, yang mengindikasikan perkembangan sektor wirausaha di kabupaten Pidie Jaya. Tabel ini menunjukkan peningkatan jumlah individu yang "Berusaha dibantu Buruh Tetap" dari 2.751 di tahun 2020 menjadi 7.020 di tahun 2024, meskipun sempat menurun pada tahun 2022, mencerminkan pertumbuhan usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja. Seiring dengan "Jumlah Angkatan Kerja" yang relatif stabil dalam periode tersebut, "Rasio Kewirausahaan" secara keseluruhan menunjukkan tren positif yang signifikan, meningkat dari 3,88% di tahun 2020 menjadi 9,44% di tahun 2024, yang

menandakan semakin banyaknya angkatan kerja yang terlibat dalam kewirausahaan dan berhasil mengembangkan usahanya.

### 2.3.2.5 Indeks Inovasi Daerah

Dalam hal inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah mengikuti *Innovation Government Award* (IGA) yang dilaksanakan oleh Kemendagri dengan capaian pada tahun 2024 kategori inovatif. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.53 berikut.

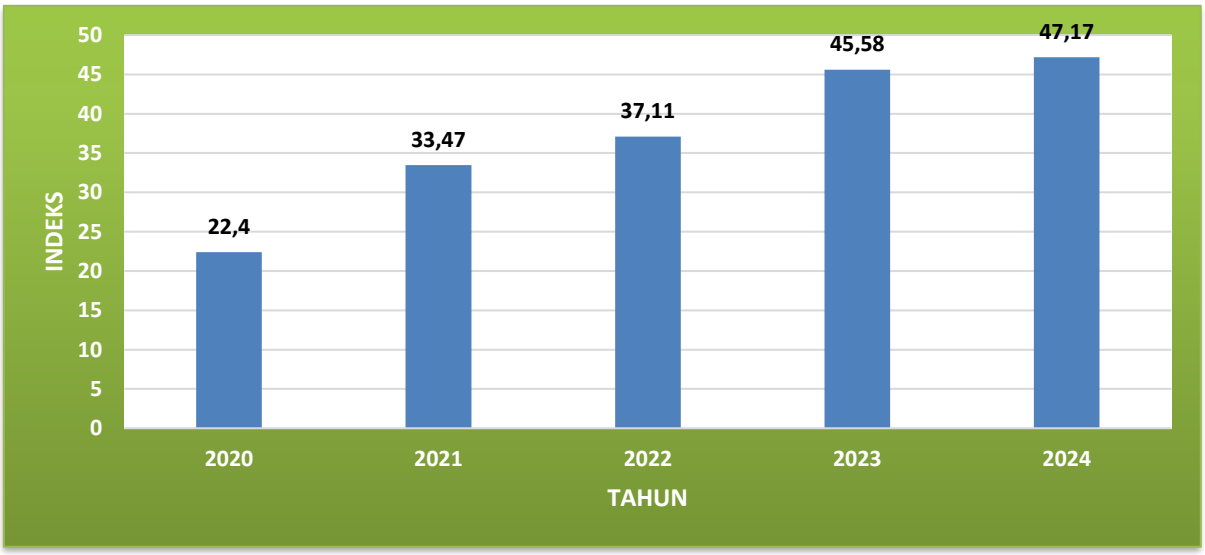


*Sumber : Kemendagri, 2025*

**Gambar 2.53. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020-2024**

Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan penelitian untuk menghasilkan inovasi daearah di Kabupaten Pidie Jaya masih belum optimal. Oleh karenanya perlu dilakukan berbagai upaya baik dengan cara bekerjasama dengan pihak Akademisi Kampus maupun dengan berbagai pihak terkait dalam rangka memaksimalkan kegiatan penelitian di Kabupaten Pidie Jaya agar setiap kebijakan yang di jalankan lebih terukur dan efisien.

### 2.3.3 Penerapan ekonomi Hijau dan Biru

Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan degradasi lingkungan, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi semakin krusial. Dua pendekatan ekonomi inovatif yang muncul sebagai solusi integral adalah Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru. Kedua kerangka kerja ini menawarkan visi baru untuk pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Ekonomi Hijau berfokus pada

efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, dan minimisasi limbah di seluruh sektor ekonomi, sementara Ekonomi Biru memperluas cakupan ini ke ranah sumber daya kelautan dan perairan, mengadvokasi pemanfaatan potensi maritim secara inovatif dan berkelanjutan. Implementasi kedua pendekatan ini menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih tangguh, lestari, dan adil bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

### 2.3.3.1 Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan seringkali menjadi tulang punggung perekonomian di banyak daerah, tak terkecuali di Kabupaten Pidie Jaya. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak hanya mencerminkan dominasinya dalam struktur ekonomi lokal, tetapi juga menjadi indikator vital ketahanan pangan, sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk, serta penopang pertumbuhan wilayah secara keseluruhan. Memahami dinamika kontribusi sektor ini terhadap PDRB adalah kunci untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif

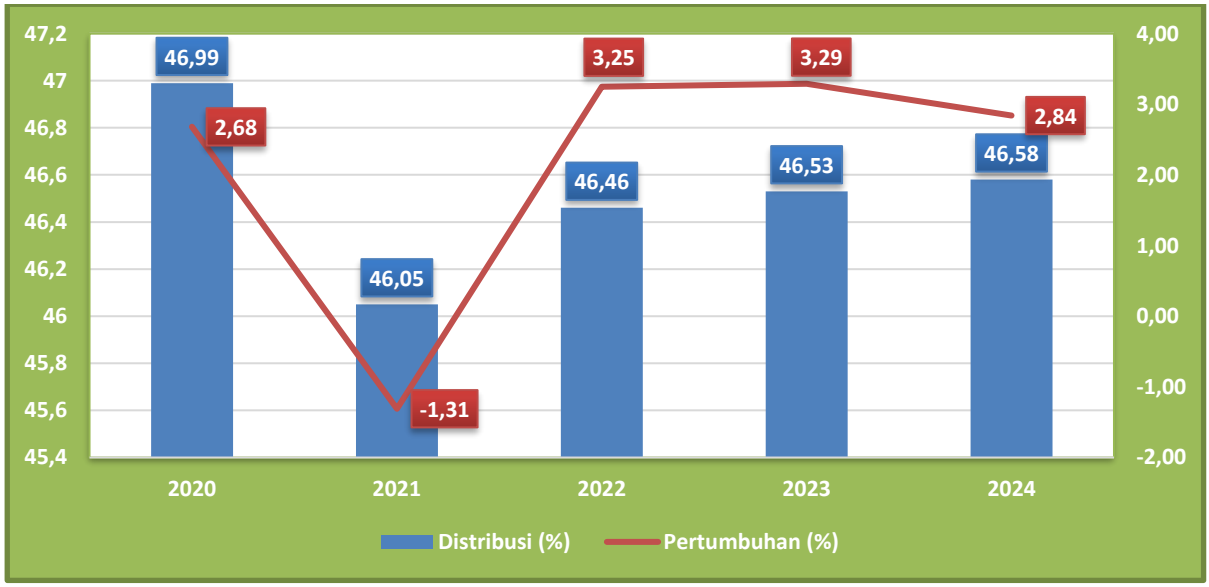


*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pidie Jaya, 2025*

**Gambar 2.54. Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024.**

Berdasarkan Gambar 2.54 yang menyajikan data distribusi dan laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat beberapa tren menarik.

Pada tahun 2020, sektor ini memiliki distribusi PDRB yang tertinggi mencapai 46,99%, dengan laju pertumbuhan positif sebesar 2,68%. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan pada distribusi menjadi 46,05% dan yang paling mencolok adalah laju pertumbuhannya yang anjlok ke angka negatif -1,31%, menandakan kontraksi pada sektor ini.

Pemulihan terlihat pada tahun 2022, di mana distribusi sedikit meningkat menjadi 46,46% dan laju pertumbuhan mengalami lonjakan drastis menjadi 3,25%, yang merupakan laju pertumbuhan tertinggi selama periode yang ditampilkan. Tren positif berlanjut pada tahun 2023, dengan distribusi yang kembali meningkat menjadi 46,53% dan laju pertumbuhan masih relatif tinggi di angka 3,29%. Pada tahun 2024, distribusi kembali menunjukkan peningkatan menjadi 46,58%, meskipun laju pertumbuhannya sedikit melambat menjadi 2,84% dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Pidie Jaya menunjukkan dominasi yang kuat dalam struktur PDRB kabupaten tersebut, dengan kontribusi yang selalu di atas 46% selama periode 2020-2024. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2021, sektor ini mampu bangkit dengan pertumbuhan positif yang kuat pada tahun-tahun berikutnya, menunjukkan ketahanan dan potensi vitalnya bagi perekonomian Kabupaten Pidie Jaya. Penurunan laju pertumbuhan di tahun 2024, meski masih positif, perlu dicermati lebih lanjut untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor ini

### 2.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan salah satu faktor kunci dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing masyarakat di era global. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya mendorong efisiensi birokrasi pemerintahan, tetapi juga membuka peluang baru dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta tata kelola sosial. Melalui transformasi digital, masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih luas, layanan publik yang lebih cepat dan transparan, serta kesempatan untuk berinovasi dalam berbagai sektor.

Bagi Kabupaten Pidie Jaya, transformasi digital menjadi instrumen strategis untuk memperkuat basis pembangunan daerah, mengingat potensi ekonomi lokal yang besar di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa. Dengan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peningkatan keterampilan digital masyarakat, serta pemberdayaan UMKM melalui platform

digital, Pidie Jaya diharapkan mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan global sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat

#### 2.3.7.1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan salah satu ukuran tingkat perkembangan transformasi digital masyarakat, yang dibangun atas empat pilar utama, yaitu infrastruktur dan ekosistem digital, keterampilan digital, pemberdayaan, serta pekerjaan. Indeks ini menggambarkan sejauh mana masyarakat telah memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, dunia kerja, pendidikan, maupun sektor ekonomi. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




*Sumber : Kementerian Komunikasi dan digital, 2025*

**Gambar 2.55. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 s.d 2024**

Berdasarkan data IMDI, capaian Kabupaten Pidie Jaya dalam tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi:

- Tahun 2022, nilai IMDI tercatat sebesar 39,90. Angka ini menggambarkan kondisi awal di mana pemanfaatan teknologi digital di Pidie Jaya masih berada pada kategori rendah.
- Tahun 2023, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan capaian indeks mencapai 43,82. Lonjakan ini menunjukkan adanya dorongan kuat dalam pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan akses digital, serta pemanfaatan layanan digital baik oleh masyarakat maupun sektor publik.

- Tahun 2024, nilai indeks menurun kembali menjadi 38,50. Penurunan ini menandakan bahwa keberlanjutan upaya transformasi digital belum berjalan konsisten, masih terdapat kesenjangan pemanfaatan teknologi, serta perlunya intervensi lebih lanjut dalam peningkatan keterampilan digital masyarakat, ekosistem pendukung, dan inovasi digital di sektor ekonomi.

Secara umum, capaian ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Pidie Jaya masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan masyarakat digital yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan daerah yang mampu:

1. Memperluas akses dan kualitas infrastruktur teknologi informasi.
2. Meningkatkan literasi serta keterampilan digital masyarakat.
3. Mendorong pemanfaatan platform digital dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan.
4. Memastikan keberlanjutan program digitalisasi agar tidak hanya meningkat pada periode tertentu, tetapi konsisten dari tahun ke tahun.

### 2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global merupakan salah satu faktor kunci dalam memperkuat daya saing daerah di tengah dinamika perekonomian dunia yang semakin terbuka. Perekonomian Kabupaten Pidie Jaya tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga oleh arus barang, jasa, investasi, dan informasi yang terhubung dengan pasar nasional maupun internasional. Dengan semakin eratnya keterkaitan antara pasar domestik dan global, Pidie Jaya dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas produk unggulan daerah, memperluas akses perdagangan, serta memperkuat jejaring investasi yang berorientasi ekspor maupun substitusi impor.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah, integrasi ini perlu diarahkan untuk mendorong transformasi struktur ekonomi daerah melalui penguatan sektor-sektor berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, yang didukung oleh konektivitas infrastruktur, digitalisasi ekonomi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui strategi tersebut, Pidie Jaya diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga berperan aktif dalam rantai nilai global sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

### 2.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Broto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu indikator penting dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran yang mencerminkan nilai investasi berupa penambahan aset tetap yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Aset tetap ini meliputi bangunan dan konstruksi, mesin dan peralatan, serta aset tetap lainnya yang bernilai ekonomis dan memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun. PMTB menjadi gambaran nyata mengenai aktivitas penanaman modal di suatu wilayah, yang tidak hanya menunjukkan kemampuan daerah dalam menarik investasi, tetapi juga kapasitas produksi di masa mendatang. Tingginya PMTB mengindikasikan adanya peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta sarana ekonomi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. PMTB berperan penting untuk merumuskan strategi kebijakan yang bertujuan memperkuat iklim investasi, mendorong efisiensi pemanfaatan modal, serta memastikan investasi yang dilakukan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi daerah. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Pidie Jaya dalam periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

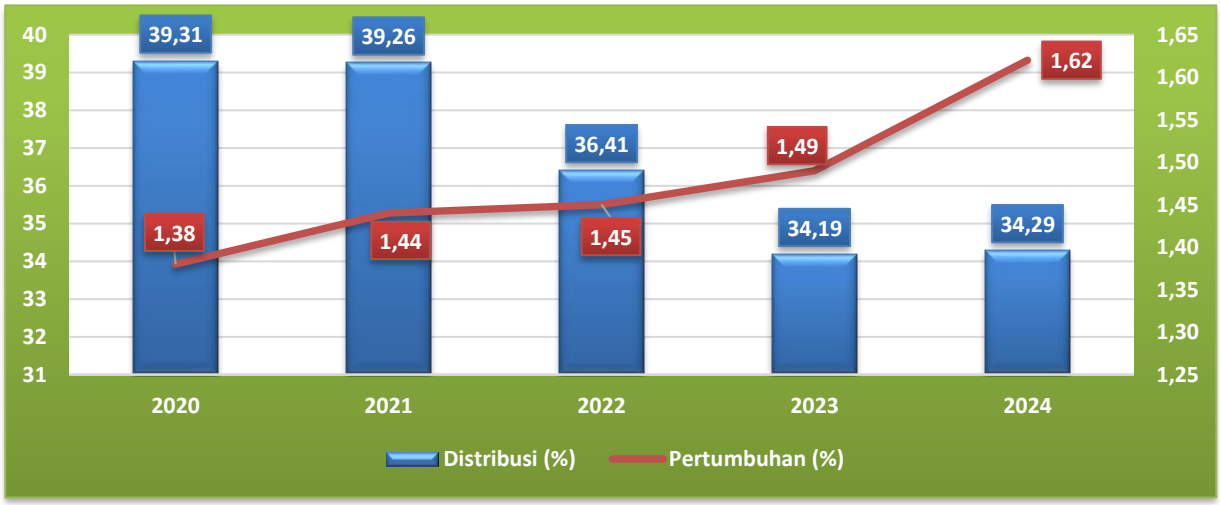


*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Pidie Jaya, 2025*

**Gambar 2.56. Pembentukan Modal Tetap Broto (PMTB) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Pidie Jaya dalam periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif, baik dari sisi distribusi maupun pertumbuhan. Pada tahun 2020, distribusi PMTB tercatat sebesar 39,31 persen dengan pertumbuhan 1,38 persen. Angka ini relatif stabil pada tahun 2021 dengan distribusi 39,26 persen dan pertumbuhan meningkat menjadi 1,44 persen. Namun

demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan distribusi menjadi 36,41 persen, meskipun pertumbuhannya tetap naik tipis ke 1,45 persen.

Kondisi ini berlanjut pada tahun 2023 di mana distribusi PMTB menurun lebih jauh menjadi 34,19 persen, sementara pertumbuhannya meningkat ke 1,49 persen. Tren positif pertumbuhan kemudian berlanjut di tahun 2024 dengan capaian 1,62 persen, meskipun distribusinya masih berada pada level rendah yaitu 34,29 persen.

Data ini memperlihatkan bahwa secara umum kontribusi PMTB terhadap perekonomian Pidie Jaya mengalami penurunan distribusi dalam lima tahun terakhir. Namun di sisi lain, pertumbuhan PMTB menunjukkan kecenderungan meningkat, yang menandakan adanya aktivitas investasi dan penanaman modal baru meskipun belum diikuti dengan peningkatan kontribusi distribusinya. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif untuk memperkuat iklim investasi daerah, mendorong efisiensi pemanfaatan modal, serta memastikan pembentukan modal tetap dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian daerah di masa mendatang.

### 2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan perdesaan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang saling melengkapi dalam mendukung pembangunan daerah. Kawasan perkotaan berfungsi sebagai pusat pelayanan, perdagangan, industri, serta distribusi barang dan jasa, sementara kawasan perdesaan merupakan basis utama produksi sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Keterhubungan yang baik antara kedua kawasan ini akan menciptakan aliran barang, modal, dan tenaga kerja yang lebih efisien, sehingga memperkuat rantai nilai ekonomi daerah secara menyeluruh.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah, Pidie Jaya perlu mengoptimalkan potensi kawasan perkotaan sebagai simpul kegiatan ekonomi modern sekaligus memperkuat perdesaan sebagai basis produksi yang tangguh. Penguatan infrastruktur konektivitas, peningkatan akses pasar, pengembangan pusat layanan publik, serta penguatan kapasitas masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan. Dengan demikian, integrasi keduanya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, mengurangi kesenjangan wilayah, dan memperkuat daya saing Kabupaten Pidie Jaya di masa mendatang.

### 2.3.6.1 Infrastruktur Wilayah

Pengembangan infrastruktur wilayah harus mengacu pada konsep Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun Qanun RTRW tersebut memuat diantaranya Rencana Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Penetapan Wilayah Strategis Kabupaten. Struktur ruang memuat rencana sistem perkotaan dan infrastruktur wilayah. Sedangkan Rencana Pola Ruang memuat kawasan hutan lindung, kawasan budidaya, pertanian, perikanan, pemukiman, industri, dan pariwisata.

Wilayah pedesaan yang menjadi akar kekuatan ekonomi rakyat di mana sektor pertanian menjadi andalan mereka. Saat ini Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berupaya mengembangkan fasilitas wilayah/infrastruktur yang menuju pada akses-akses produksi agar mudah terhubung dengan wilayah pemasaran sehingga mampu menekan biaya produksi dan memberikan manfaat serta keuntungan bagi petani. Fasilitas tersebut seperti jalan usaha tani, irigasi, saluran tersier dan lain lain.

**A. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan**

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Jalan merupakan sarana vital dalam mendukung perkembangan suatu wilayah. Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan secara langsung akan memberi dampak positif bagi kelangsungan transaksi perekonomian daerah. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

**Tabel 2.23.**
**Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Kendaraan | 43540 | 47010 | 49340 | 49550 | 53.365 |
| 2 | Panjang Jalan | 520,843 | 520,843 | 520,843 | 520,843 | 520.843 |
| 3 | Rasio | 1 : 84 | 1 : 90 | 1 : 95 | 1 : 95 | 1 : 102 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Dari Tabel 2.23 diatas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan untuk 5 (lima) tahun terakhir tahun 2020-2024 di Kabupaten Pidie Jaya cenderung meningkat dimana tahun 2020 sebesar 1:84 sedangkan pada tahun 2024 menjadi 1: 102, hal ini disebabkan peningkatan volume kendaraan

**B. Ketersediaan Air Bersih**

Air bersih merupakan salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Ketersedian air bersih masih menjadi permasalahan umum di dunia, tak terkecuali di Kabupaten Pidie Jaya. Oleh sebab itu kedua permasalahan ini masuk dalam target pembangunan dunia yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan sebagai penganti Millennium Development Goals (MDGs) yang masih mengutamakan pentingnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap air bersih (prioritas 6) (United Nations, 2016). Berbeda dengan MDGs terkait peningkatan akses terhadap air bersih, SDGs menekankan pengelolaan sumber daya air yang harus mampu berkelanjutan. Setiap negara yang tergabung dalam United Nations (UN) diharuskan mengagendakan kegiatankegiatan yang mendukung tujuan SDGs, termasuk Indonesia.

Umumnya penduduk setempat memanfaatkan sumber daya air tanah untuk memenuhi keperluan sehari – hari melalui sumur gali / bor (dalam) dan sumur pante (dangkal). Kebutuhan akan air selama ini cukup memadai baik pada air tanah dangkal dan dalam. Potensi air tanah tinggi (Debit Pompa > 10 liter per detik), Sedang (5-10 liter per detik) dan Kecil (< 5 liter per detik ). Potensi air sumur dangkal diperkirakan lebih besar dari air sumur dalam, umumnya air tanah dangkal bersifat tawar, dan di saat musim penghujan kedalaman air tanah mencapai 2 hingga 5

meter dari permukaan tanah. Prasarana air bersih di Kabupaten Pidie Jaya dilayani oleh PDAM Tirta Krueng Meureudu. Tabel berikut akan menggambarkan kondisi ketersediaan dan pemanfaatan sumber air bersih di kalangan rumah tangga penduduk Kabupaten Pidie Jaya selama beberapa tahun terakhir.

**Tabel 2.24.**
**Pelanggan Perumda Tirta Krueng Meureudu**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Rumah Tangga Pelanggan PDAM | 7.444 | 7.840 | 8.042 | 8.383 | 8.902 |
| 2 | Jumlah Rumah Tangga | 48.263 | 45.696 | 49.512 | 41.415 | 41.415 |
| 3 | Persentase Pelanggan PDAM | 15,42 | 17,15 | 16,24 | 20,24 | 21,49 |

*Sumber : Perumda Tirta Krueng Meureudu Tahun 2025*

Dari Tabel 2.24 diatas diketahui bahwa jumlah pelanggan PDAM Tirta Krueng Meureudu menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah pelanggan mencapai 7,444, dan terus meningkat hingga mencapai 8.902 pada tahun 2024. Di sisi lain, jumlah rumah tangga di Kabupaten Pidie Jaya mengalami fluktuasi, dengan peningkatan pada tahun 2020 dan 2022, namun penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2023. Penurunan yang tajam pada tahun 2023 disebabkan oleh migrasi, perubahan data, dan faktor operasional lainnya. Persentase pelanggan PDAM terhadap jumlah rumah tangga juga menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan, Pada tahun 2024 persentase ini mencapai 21,49%. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan PDAM dalam memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan air bersih. Meskipun demikian, penurunan jumlah rumah tangga di beberapa tahun perlu menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas layanan, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan peningkatan jumlah pelanggan dan kualitas layanan yang optimal

**C. Ketersediaan Listrik**

Sumber daya lain yang juga menjadi kebutuhan hidup masyarakat adalah ketersediaan sumber daya energi listrik. Pada saat ini sistem prasarana jaringan listrik telah menjangkau seluruh desa yang ada di Kabupaten Pidie Jaya dengan cakupan 98,15 persen terlayani, dengan jumlah pelanggan sebanyak 50.723

pelanggan. Pengguna listrik di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.25 berikut.

**Tabel 2.25.**
**Pengguna Listrik di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020–2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah RT Pengguna Listrik | 46.329 | 47.191 | 47.472 | 48.434 | 49.784 |
| 2 | Jumlah RT | 48.263 | 47.696 | 48.512 | 50.723 | 50.723 |
| 3 | Persentase RT pengguna listrik | 95,99 | 98,94 | 97,86 | 95,49 | 98,15 |

*Sumber : Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Meureudu Tahun 2025*

Berdasarkan data pada tabel 2.25 dapat dijelaskan bahwa penggunaan listrik di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah Rumah Tangga (RT) pengguna listrik. Pada tahun 2020, jumlah RT pengguna listrik tercatat sebanyak 46.329, Namun, pada tahun 2021, jumlah ini meningkat menjadi 47.191, kemudian naik lagi menjadi 47.472 pada tahun 2022, kemudian tahun 2023 naik lagi menjadi 48.434 dan mencapai 50.458 pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, jumlah total RT di Kabupaten Pidie Jaya juga menunjukkan peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, jumlah total RT adalah 48.263 dan menurun menjadi 47.696 pada tahun 2021. Namun, terjadi peningkatan pada tahun 2022 dengan jumlah total RT sebesar 47.696. Jumlah total RT kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 50.723 dan bertahan bertahan hingga 50.723 pada tahun 2024.

Persentase RT pengguna listrik juga mengalami perubahan yang positif. Pada tahun 2020, persentase RT pengguna listrik adalah 95,99%, meningkat menjadi 98,94% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, persentase ini menurun menjadi 97,86% dan terus menurun menjadi 95,49% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, persentase RT pengguna Listrik meningkat lagi mencapai 98,15%.

Dari data ini, terlihat bahwa meskipun ada fluktuasi dalam jumlah total RT, jumlah RT pengguna listrik terus meningkat setiap tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan akses listrik di Kabupaten Pidie Jaya, yang dapat berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat. Persentase RT pengguna listrik yang hampir mencapai 100% pada tahun 2023 mencerminkan hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Pidie Jaya sudah memiliki akses listrik, menunjukkan keberhasilan program elektrifikasi di daerah tersebut. Hal ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

**D. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Kabupaten Pidie Jaya telah memiliki Qanun Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2034. Lahirnya qanun tersebut merupakan titik unggul bahwa Kabupaten Pidie Jaya yang tergolong baru, telah memiliki aspek legal hukum tentang pembangunan kewilayahan. Struktur pola ruang telah mengatur pembangian wilayah sesuai dengan peruntukan masing-masing. Hal ini merupakan dasar penting untuk investasi di Kabupaten Pidie Jaya.

Pidie Jaya fokus terhadap pengembangan infrastruktur wilayah untuk mendukung percepatan pembangunan, maka arah kebijakan pembangunan harus selalu mengacu pada RTRW Kabupaten. Bila dilihat pada rencana pola pemanfaatan ruang maka sebagian besar wilayah Pidie Jaya dikelilingi oleh Kawasan Lindung yang mencapai 53,51 persen atau berkisar 50.946,86 ha.

Sedangkan untuk sektor pertanian yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten, akan dimanfaatkan pola ruangnya sebesar 29,48% atau 28.065 ha. Sebesar 91,27 ha atau 0,10% diperuntukkan untuk kawasan industri strategis, dan sebesar 6.523,92 ha atau 6,85% dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Tabel 2.26 berikut menjelaskan perbandingan antara Luas Kasawan Lindung dengan Luas Kawasan Budidaya.

**Tabel 2.26.**
**Perbandingan Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Sesuai Qanun RTRW Tahun 2014 s.d 2034 Kabupaten Pidie Jaya**

| No | Uraian | Luas (Ha) | Prosentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Luas Kawasan Lindung | 50.946,86 | 53,51 |
| 2 | Luas Kawasan Budidaya | 44.264,10 | 46,49 |
| 3 | Jumlah Keseluruhan | 95.210,96 | 100,00 |
| 4 | Rasio (1/2) | 1 : 1 | - |

*Sumber : RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034.*

Letak daerah yang strategis diantara Kabupaten Bireuen dan Pidie selalu memberikan aspek kemudahan transportasi lintas daerah. Dengan jalan Negara Banda Aceh-Medan sebagai jalur utama transportasi lintas barang dan jasa, telah memberikan efektifitas dan nilai ekonomis dalam perdagangan. Semua kecamatan dalam wilayah Kabupten Pidie Jaya terletak pada jalan Negara yang merupakan lintas utama. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan sentra-sentra perdagangan akan cepat tumbuh. Seperti Bandar Baru, Bandar Dua, dan Meureudu.

### 2.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Akses terhadap hunian yang layak merupakan hak dasar setiap individu dan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Lebih dari sekadar tempat bernaung, rumah tangga dengan akses hunian layak merepresentasikan kondisi hidup yang sehat, aman, dan produktif, di mana setiap anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ketersediaan infrastruktur dasar, sanitasi yang memadai, serta lingkungan yang kondusif adalah elemen krusial yang membentuk definisi hunian layak, yang pada akhirnya berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan

Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber : Susenas Badan Pusat Statistik (BPS), 2025*

**Gambar 2.57. Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

Berdasarkan Gambar diatas, Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 yang bersumber dari Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, terlihat adanya tren peningkatan persentase rumah layak huni di Kabupaten Pidie Jaya selama periode tersebut. Pada tahun 2020, persentase rumah layak huni tercatat sebesar 63,21%. Angka ini kemudian naik menjadi 64,43% pada tahun 2021, sebelum sedikit mengalami penurunan menjadi 64,18% pada tahun 2022. Namun, tren positif kembali terlihat pada tahun-tahun berikutnya, di mana persentase meningkat menjadi 65,91% pada tahun 2023 dan mencapai puncaknya pada 67,76% di tahun 2024. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan upaya peningkatan kualitas hunian di Pidie Jaya yang cenderung positif meskipun sempat mengalami sedikit fluktuasi.

### 2.3.6.3 Persentase Desa Mandiri

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat mempunyai kewajiban untuk menyalurkan Dana Desa (DD) dimulai sejak tahun 2015. Hal ini telah membuktikan bahwa adanya dana desa telah mendongkrak kemandirian desa di Indonesia yang diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM) khususnya di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun ke tahun.

IDM yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga aspek, yaitu aspek ketahanan sosial, aspek ketahanan ekonomi dan aspek ketahanan ekologi/lingkungan. Aspek ketahanan sosial umumnya diukur dengan tingkat kesehatan, pendidikan, perumahan, sosial dan budaya. Aspek Ketahanan Ekonomi diukur dengan tingkat pendapatan, ketenagakerjaan, akses ekonomi dan ketahanan pangan. Sedangkan aspek ketahanan ekologi/lingkungan diukur dengan infrastruktur dasar, pengelolaan sumber daya alam dan resiliensi lingkungan. Untuk Indek Desa Membangun (IDM) Pidie Jaya dapat di lihat di Tabel 2.27 di bawah ini.

**Tabel 2.27.**
**Status Indeks Desa Membangun (IDM)**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Status IDM Kab. Pidie Jaya | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Maju |
| 2 | Indeks Desa Membangun | 0.6561 | 0.6563 | 0.6565 | 0.6849 | 0,7097 |
| 3 | Jumlah Desa mandiri | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 4 | Jumlah Desa Maju | 3 | 4 | 5 | 14 | 93 |
| 5 | Jumlah Desa berkembang | 103 | 117 | 150 | 184 | 109 |
| 6 | Jumlah Desa tertinggal | 112 | 98 | 64 | 17 | 4 |
| 7 | Jumlah Desa sangat tertinggal | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |

*Sumber : Kemendes, Tahun 2025*

Berdasarkan Tabel diatas, Selama kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan tren yang sangat positif. Status keseluruhan kabupaten yang sebelumnya berada pada kategori “Berkembang” sejak tahun 2020 hingga 2023, berhasil meningkat menjadi “Maju” pada tahun 2024. Kenaikan ini menggambarkan adanya kemajuan signifikan dalam dimensi pembangunan desa, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun ekologi. Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dari status kabupaten, tetapi juga dari perubahan komposisi status desa-desa yang ada di wilayah tersebut.

Nilai indeks IDM secara numerik juga mengalami peningkatan, dari 0,6561 pada tahun 2020 menjadi 0,7097 pada tahun 2024. Peningkatan nilai ini cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, yakni dari 0,6565 pada tahun 2022 ke 0,6849 pada tahun 2023, lalu ke 0,7097 pada tahun 2024. Lonjakan ini mengindikasikan adanya intervensi kebijakan yang lebih efektif dan program pembangunan desa yang lebih terarah, seperti optimalisasi penggunaan Dana Desa, program pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan kapasitas aparatur desa.

Perubahan paling mencolok tampak pada status desa-desa. Jumlah desa mandiri yang sebelumnya tidak ada sama sekali, mulai muncul pada tahun 2023 sebanyak 5 desa, dan meningkat menjadi 14 desa pada tahun 2024. Demikian pula jumlah desa maju melonjak drastis dari 5 desa (2022) menjadi 93 desa (2024). Sementara itu, jumlah desa berkembang yang sempat meningkat hingga 184 desa pada 2023, turun menjadi 109 desa pada 2024, yang menunjukkan bahwa sebagian besar desa berkembang telah naik status menjadi desa maju atau mandiri. Hal ini menandakan keberhasilan dalam mendorong desa-desa ke level pembangunan yang lebih tinggi.

Di sisi lain, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2020, terdapat 112 desa tertinggal dan 4 desa sangat tertinggal. Jumlah ini menyusut menjadi hanya 4 desa tertinggal dan 2 desa sangat tertinggal pada tahun 2024. Penurunan ini merupakan capaian penting, karena memperlihatkan bahwa upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah dan pemerataan pembangunan telah membuahkan hasil nyata. Namun demikian, keberadaan 6 desa yang masih berada dalam kategori rendah menunjukkan bahwa masih terdapat kantong-kantong kemiskinan atau keterbelakangan yang memerlukan perhatian dan pendekatan khusus.

Secara keseluruhan, tren IDM Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan bahwa pembangunan desa telah berada di jalur yang tepat, dengan arah yang menuju kemandirian dan keberlanjutan. Tantangannya adalah menjaga konsistensi dan kualitas pembangunan, terutama agar desa-desa yang telah maju dan mandiri tidak mengalami kemunduran, serta memastikan bahwa desa-desa yang masih tertinggal dapat segera didorong naik status. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat kolaborasi antara dinas terkait, pemerintah gampong, dan masyarakat dalam mewujudkan desa yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Pada tahun 2025, Pemerintah resmi memberlakukan Indeks Desa sebagai indikator tunggal untuk mengukur capaian pembangunan desa di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dan Badan Pusat Statistik (BPS) .

Latar Belakang dan Tujuan Sebelumnya, pengukuran pembangunan desa menggunakan beberapa indeks seperti Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM), yang seringkali menghasilkan data yang tidak selaras dan menyulitkan dalam pengambilan kebijakan. Dengan adanya Indeks Desa, pemerintah bertujuan untuk menyatukan berbagai indikator tersebut menjadi satu alat ukur yang komprehensif dan terintegrasi, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada 11 Desember 2019.

Dimensi Pengukuran Indeks Desa mengukur pembangunan desa melalui enam dimensi utama: 1. Layanan Dasar: Ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. 2. Sosial: Tingkat partisipasi masyarakat, keamanan, dan kohesi sosial. 3. Ekonomi: Kegiatan ekonomi lokal, pendapatan, dan kesempatan kerja. 4. Lingkungan: Pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan. 5. Aksesibilitas: Konektivitas dan transportasi antarwilayah. 6. Tata Kelola Pemerintahan Desa: Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pemerintahan desa.

Implementasi dan Penggunaan Data untuk Indeks Desa dikumpulkan melalui pendataan oleh Kemendes PDTT antara April hingga Juni 2024. Hasil pengukuran ini akan digunakan secara resmi mulai tahun 2025 dan menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk dalam pengalokasian Dana Desa dan perencanaan pembangunan jangka panjang nasional . Signifikansi dan Harapan Penerapan Indeks Desa diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan desa dengan menyediakan data yang akurat dan terintegrasi. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk menyatukan berbagai sumber data pemerintah guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik . Dengan Indeks Desa, pemerintah berharap dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap desa, mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan mendorong kemandirian desa dalam jangka panjang. Ini merupakan langkah strategis menuju

pencapaian visi Indonesia Emas 2045, dengan desa sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

### 2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan fondasi krusial bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengacu pada kondisi di mana perekonomian suatu negara berjalan secara seimbang, ditandai dengan tingkat inflasi yang terkendali, nilai tukar mata uang yang stabil, tingkat pengangguran yang rendah, serta keseimbangan neraca pembayaran. Terciptanya stabilitas ini memungkinkan pelaku ekonomi untuk merencanakan dan berinvestasi dengan keyakinan, mendorong produktivitas, dan pada akhirnya, meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Tanpa stabilitas ekonomi makro, ketidakpastian akan menghambat investasi, memicu fluktuasi harga yang merugikan, dan mengancam daya beli masyarakat, sehingga menghambat potensi pembangunan ekonomi jangka panjang.

#### 2.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang mencerminkan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan suatu daerah. Rasio ini mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah dalam menopang aktivitas ekonomi regional yang diukur melalui PDRB. Semakin tinggi rasio ini, semakin kuat kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai belanja publik dan program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, sehingga menunjukkan efektivitas pengelolaan potensi ekonomi lokal dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Analisis rasio ini sangat krusial untuk mengevaluasi kinerja perpajakan daerah dan merumuskan kebijakan fiskal yang lebih strategis guna optimalisasi penerimaan dan peningkatan pelayanan publik.

Rasio Pajak Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.28.**
**Rasio Pajak Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| NO. | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Rasio Pajak terhadap PDRB (%)** | **0,22** | **0,24** | **0,24** | **0,24** | **0,21** |
| 1. | Nilai Pajak daerah (milyar rupiah) | 7,73 | 8,71 | 9,64 | 10,62 | 10,12 |
| 2. | Nilai PDRB (milyar rupiah) | 3.500,37 | 3.680,15 | 3.980,18 | 4.349,09 | 4.724,84 |

*Sumber : BPKK Pidie Jaya dan BPS, 2025*

Tabel 2.28 menyajikan data mengenai Rasio Pajak Daerah Kabupaten Pidie Jaya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta nilai absolut dari Pajak Daerah dan PDRB selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa meskipun Nilai Pajak Daerah Kabupaten Pidie Jaya terus meningkat dari 7,73 miliar rupiah di tahun 2020 hingga puncaknya 10,62 miliar rupiah di tahun 2023 sebelum sedikit menurun menjadi 10,12 miliar rupiah di tahun 2024, dan Nilai PDRB juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dan konsisten dari 3.500,37 miliar rupiah di tahun 2020 menjadi 4.724,84 miliar rupiah di tahun 2024, namun Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB justru relatif stagnan di sekitar 0,22%-0,24% dan bahkan sedikit menurun di tahun 2024 menjadi 0,21%. Hal ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB lebih cepat dibandingkan dengan laju peningkatan penerimaan pajak daerah, terutama terlihat pada penurunan rasio di tahun 2024.

#### 2.3.7.2 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi Kabupaten Pidie Jaya saat ini mengikuti laju inflasi kota kota terdekat yaitu kota Lhokseumawe. Laju inflasi Kabupaten Pidie Jaya, Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dan tingkat nasional menggambarkan pola yang menarik dalam fluktuasi harga dari tahun 2020 hingga 2024. Dalam analisis data tersebut, terlihat bahwa tingkat inflasi umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama pada pertengahan periode, yang kemudian diikuti oleh penurunan atau stabilisasi. Meskipun demikian, terdapat variasi antara tahun-tahun tertentu dan antara wilayah-wilayah tersebut. Meskipun tingkat inflasi nasional cenderung mencerminkan tren yang sama dengan tingkat inflasi lokal, ada beberapa perbedaan dalam angka spesifik. Faktor-faktor eksternal seperti harga minyak mentah, nilai tukar mata uang, serta kebijakan moneter dan fiskal dapat memengaruhi tingkat inflasi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tren inflasi ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang sesuai untuk menjaga stabilitas harga dan mengurangi dampak inflasi terhadap perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.29 berikut merupakan Perbandingan Nilai Inflasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024 dengan Nasional, Provinsi Aceh, Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.29.**
**Perbandingan Nilai Inflasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024 dengan Nasional, Provinsi Aceh, Kota Lhokseumawe**

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nasional** | 1,68 | 1,87 | 5,51 | 1,44 | 1,57 |
| **Aceh** | 3,54 | 2,24 | 5,89 | 1,53 | 2,17 |
| **Kota Lhokseumawe** | 3,55 | 1,97 | 5,37 | 1,56 | 2,79 |
| **Kabupaten Pidie Jaya*** | 3,55 | 1,97 | 5,37 | 1,56 | 2,79 |

*Sumber: BPS Aceh dan Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2025. (Data peyesuaian)*
** Pidie Jaya, Angka kota terdekat yaitu Lhoksemawe*

Berdasarkan data perbandingan inflasi tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan tren inflasi yang sejalan dengan pola nasional dan regional. Pada tahun 2020 dan 2021, inflasi di Pidie Jaya masing-masing tercatat sebesar 3,55% dan 1,97%, sedikit lebih tinggi dari inflasi nasional namun masih dalam kisaran yang stabil. Puncak inflasi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,37%, mengikuti lonjakan inflasi nasional (5,51%) dan regional akibat kenaikan harga bahan bakar dan bahan pangan pasca pandemi COVID-19. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pidie Jaya cukup rentan terhadap gejolak harga di tingkat nasional dan provinsi, terutama karena ketergantungan terhadap pasokan luar daerah.

Pada tahun 2023, inflasi di Pidie Jaya turun signifikan menjadi 1,56%, mencerminkan upaya pemulihan dan stabilisasi harga yang cukup berhasil. Namun, pada tahun 2024 inflasi meningkat kembali menjadi 2,79%, lebih tinggi dari angka nasional (1,57%). Karena Kabupaten Pidie Jaya belum memiliki data resmi dari BPS sebagai kabupaten non-IHK, angka inflasi yang digunakan berdasarkan angka inflasi kota terdekat. Secara keseluruhan, fluktuasi inflasi ini menunjukkan perlunya strategi pengendalian harga dan penguatan produksi barang kebutuhan pokok di daerah, agar Kabupaten Pidie Jaya lebih tahan terhadap tekanan inflasi yang bersumber dari luar wilayah

## 2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik ataupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab atau kewenangan pemerintah daerah, tujuannya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 2.4.1. Regulasi dan Tatakelola yang Berintegritas dan Adaptif

#### 2.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana reformasi di sektor hukum telah dilaksanakan secara komprehensif oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan detailnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2025 (menggantikan Permenkumham No. 17 Tahun 2022). Tujuan utama IRH adalah untuk memastikan penataan regulasi yang berkualitas, bersih, dan akuntabel, serta mendorong terciptanya lingkungan hukum yang kondusif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penilaian IRH mencakup beberapa variabel kunci, antara lain penguatan koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dalam harmonisasi regulasi, upaya re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, pendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang, serta peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) di pusat dan daerah. Dengan adanya IRH, pemerintah dapat memantau kemajuan, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan berkelanjutan dalam sistem hukum dan regulasi di Indonesia, sekaligus memberikan apresiasi kepada instansi yang menunjukkan komitmen tinggi dalam reformasi hukum.

Data Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

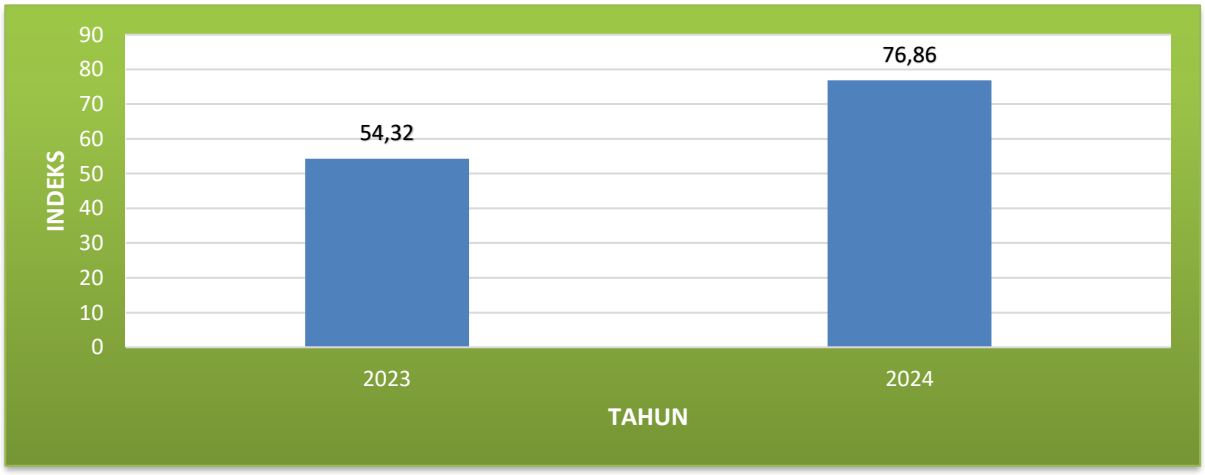


*Sumber : Kemenkum, 2025*

**Gambar 2.58. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023-2024**

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, indeks tersebut tercatat sebesar 54,32, yang kemudian melonjak menjadi 76,86 pada tahun 2024, menandakan adanya kemajuan dan perbaikan yang substansial dalam upaya reformasi hukum di wilayah tersebut. Data ini bersumber dari Kementerian Hukum (Kemenkum) pada tahun 2025

### 2.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Pimpinan dan seluruh penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik diharapkan untuk meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hasil penilaian SPBE tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.30 berikut.

**Tabel 2.30.**
**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh Tahun 2022-2024**

| No | Nama Instansi | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Indeks | Predikat | Indeks | Predikat | Indeks | Predikat |
| 1 | Pemerintah Kab. Aceh Besar | 1,85 | Cukup | 1,88 | Cukup | 2,39 | Cukup |
| 2 | Pemerintah Kab. Aceh Utara | 1,62 | Kurang | 1,70 | Kurang | 1,44 | Kurang |
| 3 | Pemerintah Kab. Aceh Selatan | 1,47 | Kurang | 1,92 | Cukup | 2,75 | Baik |
| 4 | Pemerintah Kab. Aceh Tengah | 1,13 | Kurang | 1,88 | Cukup | 2,48 | Cukup |
| 5 | Pemerintah Kab. Aceh Tenggara | 1,65 | Kurang | 1,74 | Kurang | 2,29 | Cukup |
| 6 | Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya | 1,62 | Kurang | 2,61 | Cukup | 2,86 | Baik |
| 7 | Pemerintah Kab. Aceh Jaya | 2,01 | Cukup | 2,42 | Cukup | 2,67 | Baik |
| 8 | Pemerintah Kab. Gayo Lues | 1,62 | Kurang | 2,47 | Cukup | 2,69 | Baik |
| 9 | Pemerintah Kab. Pidie | 2,03 | Cukup | 2,04 | Cukup | 2,25 | Cukup |
| 10 | Pemerintah Kab. Pidie Jaya | 1,54 | Kurang | 2,63 | Baik | 2,61 | Baik |

*Sumber : Kemenpan RB Tahun 2025*

Untuk mengukur pencapaian program reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian implementasi program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi sebagai hasil penilaian implementasi program reformasi birokrasi merupakan indeks komposit yang disusun atas beberapa indeks hasil penilaian pada area perubahan reformasi birokrasi termasuk penilaian pada penerapan SPBE sebagai bagian dari pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi dan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

Di Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya dalam Evaluasi SPBE pada Tahun 2022 banyak Indikator yang tidak mencukupi standar penilaian SPBE sehingga menyebabkan penilaian indeks 1,54 dan mendapatkan predikat Baik dan pada Tahun 2024 hasil Evaluasi SPBE

### 2.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen pengukuran kinerja yang digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk mengevaluasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. IPP dirancang sebagai tolok ukur komprehensif untuk menilai dan meningkatkan kualitas layanan publik, serta untuk memastikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Penilaian IPP mencakup berbagai aspek penting seperti kebijakan pelayanan yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat; profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) yang dinilai dari waktu layanan, kode etik, dan budaya pelayanan; ketersediaan dan kualitas sarana prasarana; efektivitas sistem informasi pelayanan publik; mekanisme konsultasi dan penanganan pengaduan; serta inovasi pelayanan yang diciptakan oleh unit penyelenggara layanan. Melalui evaluasi ini, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelayanan yang diberikan, merumuskan strategi perbaikan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai IPP yang tinggi menunjukkan kualitas pelayanan publik yang prima dan komitmen kuat instansi dalam memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.

Data Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

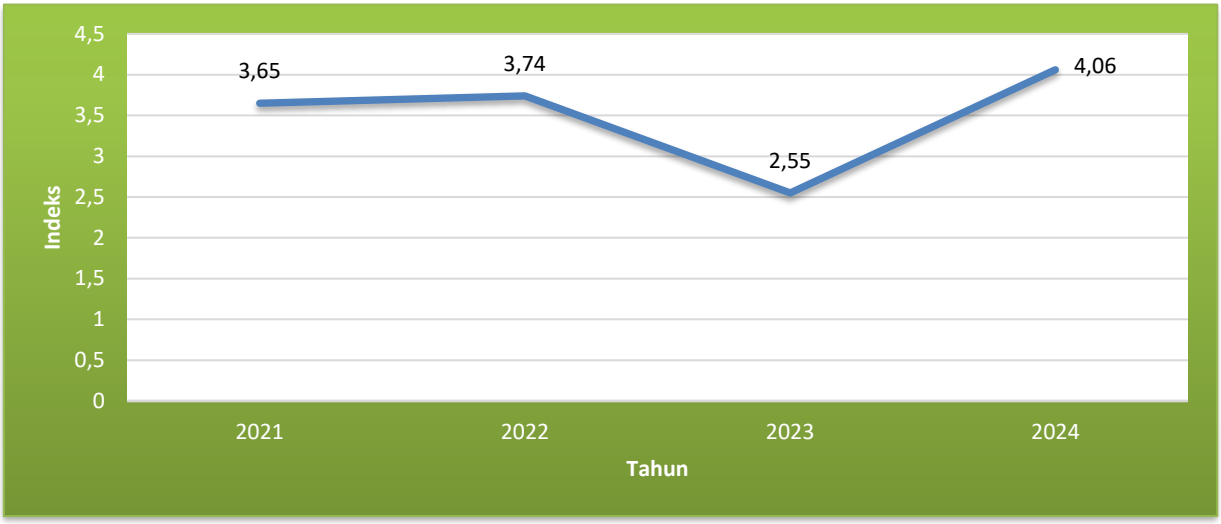


*Sumber : Kemenpan RB, 2025*

**Gambar 2.59. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2024**

Gambar 2.59 menyajikan data Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2021 hingga 2024. Grafik garis menunjukkan fluktuasi indeks selama periode tersebut. Pada tahun 2021, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pidie Jaya tercatat sebesar 3,65. Angka ini sedikit meningkat pada tahun berikutnya, yakni tahun 2022, menjadi 3,74. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2023, di mana indeks merosot hingga mencapai 2,55. Meskipun demikian, Kabupaten Pidie Jaya berhasil menunjukkan perbaikan kinerja yang substansial pada tahun 2024, dengan Indeks Pelayanan Publik meningkat tajam menjadi 4,06, yang merupakan nilai tertinggi dalam kurun waktu empat tahun tersebut. Data ini bersumber dari Kemenpan RB pada tahun 2025

### 2.4.1.4. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah ukuran yang dihasilkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk memetakan risiko korupsi dan melihat kemajuan upaya pencegahan korupsi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Bertujuan sebagai alat deteksi dini, IIN didasarkan pada penilaian internal dari pegawai, penilaian eksternal dari pengguna layanan, serta penilaian dari para ahli. Hasil survei ini digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan sistem tata kelola dan layanan publik, yang pada akhirnya mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan skala penilaian 0 hingga 100, semakin tinggi nilai indeksnya, semakin baik pula tingkat integritas suatu instansi. Partisipasi

masyarakat melalui SPI menjadi sarana penting dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di sektor publik.

Data Indeks Integritas Nasional Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2025*

**Gambar 2.60. Indeks Integritas Nasional Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2024**

Indeks Integritas Nasional Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan dinamika yang bervariasi selama periode 2021-2024, merefleksikan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan integritas di lingkungan pemerintahan daerah berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada awal periode, yaitu tahun 2021, Indeks Integritas mencapai nilai yang cukup tinggi sebesar 76,16, mengindikasikan komitmen awal yang kuat dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan menjadi 74,39, sebuah kondisi yang memerlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya baik dari internal maupun eksternal. Respon terhadap penurunan ini terlihat pada tahun 2023 dengan adanya peningkatan moderat menjadi 74,65, menunjukkan adanya upaya perbaikan. Puncak perbaikan terlihat pada tahun 2024, di mana Indeks Integritas kembali menunjukkan peningkatan substansial mencapai 75,76, angka ini bahkan dilaporkan sebagai skor tertinggi di Aceh dan melampaui rata-rata nasional pada Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Meskipun telah mencapai tingkat integritas yang membanggakan, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus terus memprioritaskan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini dalam rencana pembangunan

jangka menengah, khususnya melalui penguatan sistem integritas, peningkatan pengawasan internal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi.

### 2.4.1.5. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan instrumen pengukuran dan pemantauan kinerja pemerintah yang dirancang untuk mengevaluasi kemajuan implementasi reformasi birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuan utama dari IRB adalah untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi telah berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas tinggi. Penilaian IRB mencakup berbagai aspek penting seperti manajemen perubahan, akuntabilitas kinerja, efektivitas pengawasan, kualitas pelayanan publik, manajemen sumber daya manusia aparatur, penataan tata laksana, dan penataan kelembagaan, dengan total sekitar 132 komponen yang dapat dievaluasi. Nilai IRB sendiri berkisar dari 0 hingga 100, di mana nilai yang lebih tinggi, seperti kategori "AA" (>90-100) atau "A" (>80-90), menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Data Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

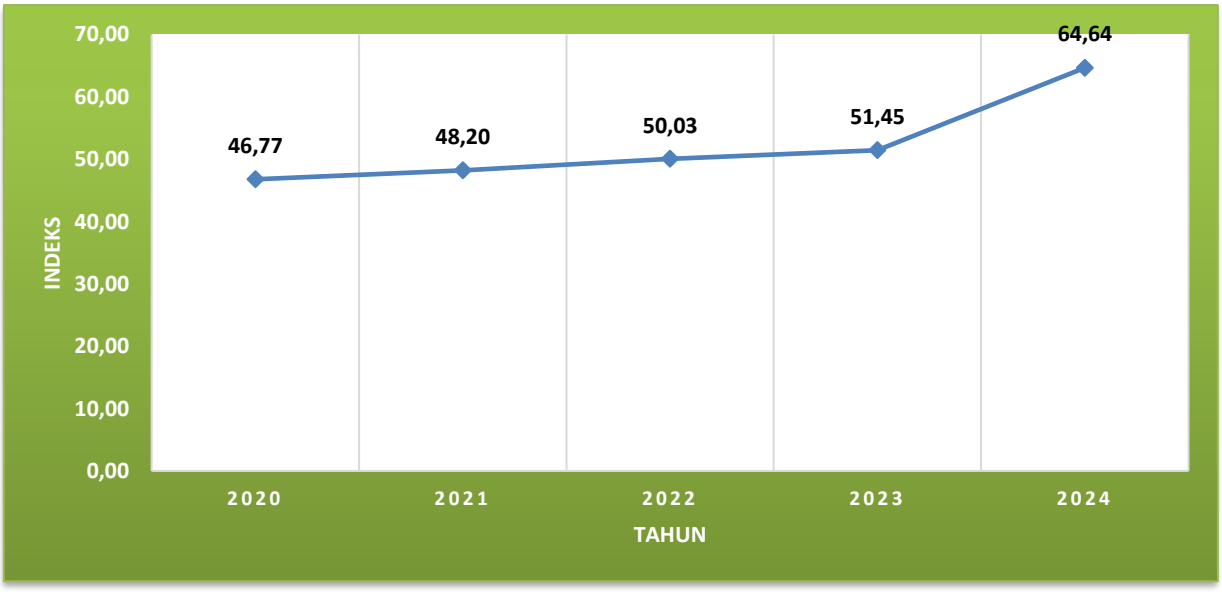


*Sumber : Kemenpan RB, 2025*

**Gambar 2.61. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

Grafik tersebut menunjukkan tren peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Kabupaten Pidie Jaya selama periode 2020 hingga 2024. Dimulai dari angka 46,77 pada tahun 2020, indeks ini menunjukkan peningkatan bertahap menjadi 48,20 di tahun 2021, 50,03 di tahun 2022, dan 51,45 di tahun 2023. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana indeks mencapai 64,64. Kenaikan nilai ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, peningkatan efisiensi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan birokrasi Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana yang diharapkan dari program reformasi birokrasi.

Analisis terhadap tren ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam mewujudkan birokrasi yang lebih baik dan bersih. Peningkatan tajam di tahun 2024 bisa menjadi indikator keberhasilan program atau kebijakan tertentu yang diterapkan pada periode tersebut, atau mungkin merupakan hasil kumulatif dari upaya reformasi di tahun-tahun sebelumnya yang mulai menunjukkan dampak yang signifikan. Dengan mencapai nilai 64,64, Kabupaten Pidie Jaya berada dalam kategori yang cukup baik yaitu “B” dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini mencerminkan progres positif menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik KKN, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

### 2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pembangunan Indonesia Emas 2045 berlandaskan pada tiga pilar utama yang saling terkait: hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial. Hukum berkeadilan menjamin supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan integritas lembaga penegak hukum, sehingga menciptakan landasan yang stabil dan adil. Pilar ini didukung oleh keamanan nasional yang tangguh, yang tidak hanya mencakup kekuatan militer, tetapi juga ketahanan terhadap ancaman siber, stabilitas politik, dan ketangguhan diplomasi. Terakhir, demokrasi substansial memastikan bahwa pemerintahan benar-benar responsif terhadap aspirasi rakyat, tidak hanya dalam proses elektoral, tetapi juga melalui transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Ketiga elemen ini bekerja bersama untuk menciptakan stabilitas nasional yang diperlukan bagi transformasi menuju kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

#### 2.4.2.1. Penegakan Qanun

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Qanun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ketertiban umum dan ditaatinya aturan yang

berlaku, namun ada perbedaan mendasar, terutama terkait konteks otonomi khusus Aceh. Penegakan Perda di provinsi lain dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diadili di Pengadilan Negeri, dengan landasan hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sementara itu, penegakan Qanun di Aceh melibatkan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) yang secara khusus mengawasi syariat Islam, dengan pelanggaran yang berkaitan dengan syariat diadili di Mahkamah Syar'iyah, bukan Pengadilan Negeri. Selain itu, dasar hukum Qanun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengintegrasikan syariat Islam, seperti dalam Qanun Jinayat, yang memungkinkan sanksi berupa hukuman cambuk, berbeda dengan sanksi dalam Perda di daerah lain yang tidak memiliki otonomi khusus serupa

Tingkat penyelenggaraan Trantibum melalui sosialisasi dan Penegakan Qanun Peraturan Kepala Daerah masih rendah dari jumlah kasus yang dilaporkan hanya 70% yang dapat ditangani dari akibat kekurangan SDM dan Anggaran yang di sediakan. Sehingga capaian SPM trantibum belum memenuhi target

**Tabel 2.31.**
**Cakupan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Bidang | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Trantibum | 36 | 20 | 18 | 18 | 11 |
| 2 | Penegakan Perda | 20 | 12 | 12 | 8 | 6 |
| 3 | Penegakan Perda Syariah | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | Penyelesaian Konflik | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Jumlah Pelanggaran Syariat Islam | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 |

*Sumber : Satpol PP dan WH Kabupten Pidie Jaya Tahun 2025*

### 2.4.2.2. Persentase Capaian Aksi HAM

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah dokumen pedoman yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Dokumen ini memuat sasaran strategis, fokus kegiatan, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut, seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 untuk periode 2021-2025. Fokus utama RANHAM generasi kelima adalah pada empat kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Melalui RANHAM, pemerintah mendorong implementasi Aksi HAM

yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan dengan prinsip-prinsip HAM.

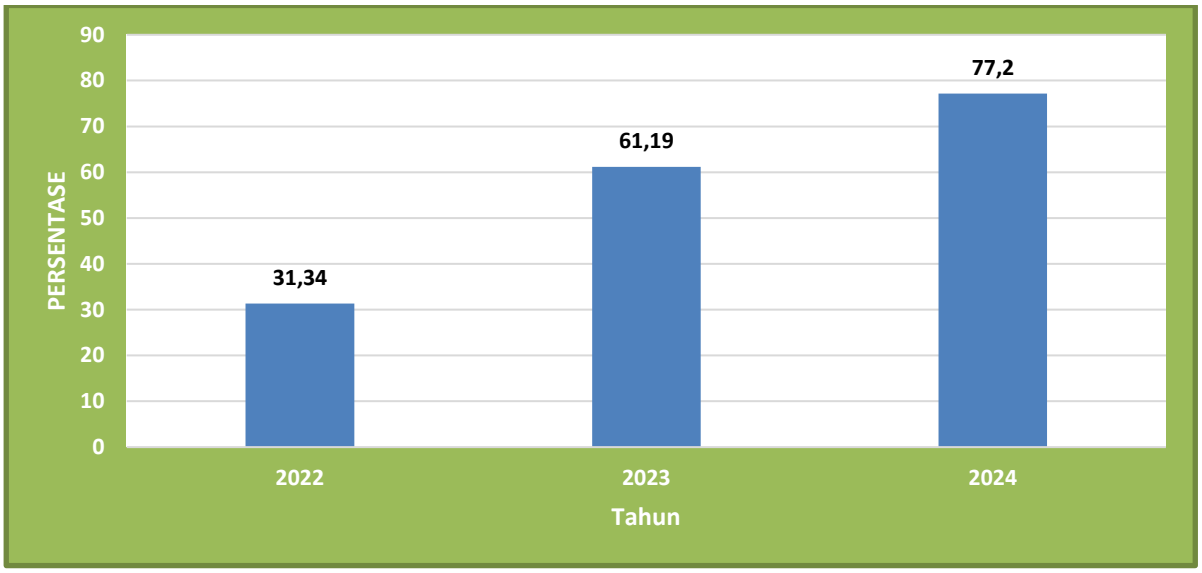


*Sumber : Kemenham RI, 2025*

**Gambar 2.62. Persentase Capaian Aksi HAM Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2024**

### 2.4.2.3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024 masih dalam batas kewajaran. setiap kasus yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik, namun demikian ada juga kasus seperti pencurian dan penipuan yang masih luput dari proses hukum. Hal inilah yang perlu upaya lebih dari pihak keamanan. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.32 berikut.

**Tabel 2.32.**
**Jumlah kasus kriminalitas dan penyelesaian kasus di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024**

| No | Jenis Kriminal | Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Kasus | Kasus yang diselesaikan | Persentase |
| 1. | Jumlah kasus narkoba | 0 | 0 | 100,00 |
| 2. | Jumlah kasus pembunuhan | 0 | 0 | 100,00 |
| 3. | Jumlah kejahatan seksual | 6 | 4 | 66,67 |
| 4. | Jumlah kasus penganiayaan | 8 | 5 | 62,50 |
| 5. | Jumlah kasus pencurian | 14 | 6 | 42,84 |
| 6. | Jumlah kasus penipuan | 15 | 10 | 66,66 |
| 7. | Jumlah Kasus KDRT | 17 | 17 | 100,00 |
| 8. | Jumlah Kasus Perjudian/Maisir | 10 | 10 | 100.00 |
| 9. | Jumlah kasus pemalsuan uang | 0 | 0 | 100,00 |
| 10. | Jumlah kasus Pencemaran nama baik | 4 | 3 | 75,00 |
| 11. | Jumlah Kasus UU ITE | 4 | 3 | 75,00 |
| 12. | Jumlah Kasus Kriminal lainnya | 17 | 2 | 11,76 |
| 13. | Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun | 95 | 60 | 63,15 |
| **Angka kriminalitas** | | | | |
| | Jumlah penduduk : 163.591 | | | |
| | Persentase kriminalitas % | 0,08 | 0,07 | |

*Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

### 2.4.2.4. Jumlah Demonstrasi

demonstrasi atau unjuk rasa di Kabupaten Pidie Jaya sangat jarang terjadi hal ini sesuai dengan data BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024. Pada tahun 2024 pernah terjadi 2 kali demonstrasi terkait bidang Tenaga honorer dan PPPK. Lebih rinci dapat dilihat padaTabel 2.33 berikut.

**Tabel 2.33.**
**Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Bidang politik | 2 | - | - | - | - |
| 2 | Ekonomi | - | - | - | - | 2 |
| 3 | Kasus pemogokan kerja | - | - | - | - | - |

*Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

### 2.4.2.5. Keamanan dan ketertiban

Perkembangan tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya selama periode tahun 2019-2024 berfluktuasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.34 berikut.

**Tabel 2.34.**
**Jumlah Tindak Pidana Menonjol**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019–2024**

| No | Kasus | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pencurian dengan pemberatan (curat) | 10 | - | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Pencurian kenderaan bermotor | 25 | 17 | 36 | 37 | 37 | 3 |
| 3 | Pencurian dengan kekerasan (curas) | - | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Pencurian Biasa | 12 | 11 | 19 | 26 | 22 | 8 |
| 5 | Penganiayaan Berat/ringan | 12 | 7 | 54 | 53 | 56 | 8 |
| 6 | Kebakaran | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| 7 | Penggelapan | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | 3 |
| 8 | Perkosaan | - | 4 | 2 | - | - | 6 |
| 9 | KDRT | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 17 |
| 10 | Perjudian | 8 | 4 | 9 | 1 | 8 | 10 |
| 11 | Narkotika | 27 | 13 | 9 | 20 | - | - |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

### 2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

#### 2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah instrumen pengukuran yang menilai kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi, meningkatkan produktivitas, dan bersaing secara domestik maupun internasional untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD mencakup aspek lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi melalui 12 pilar yang mengukur lembaga, infrastruktur, perekonomian, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar, ketenagakerjaan, akses keuangan, ukuran pasar, adopsi teknologi, dinamika bisnis, dan kapasitas inovasi.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk tahun 2024, Kabupaten Pidie Jaya memperoleh Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 3,30. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.63 berikut.

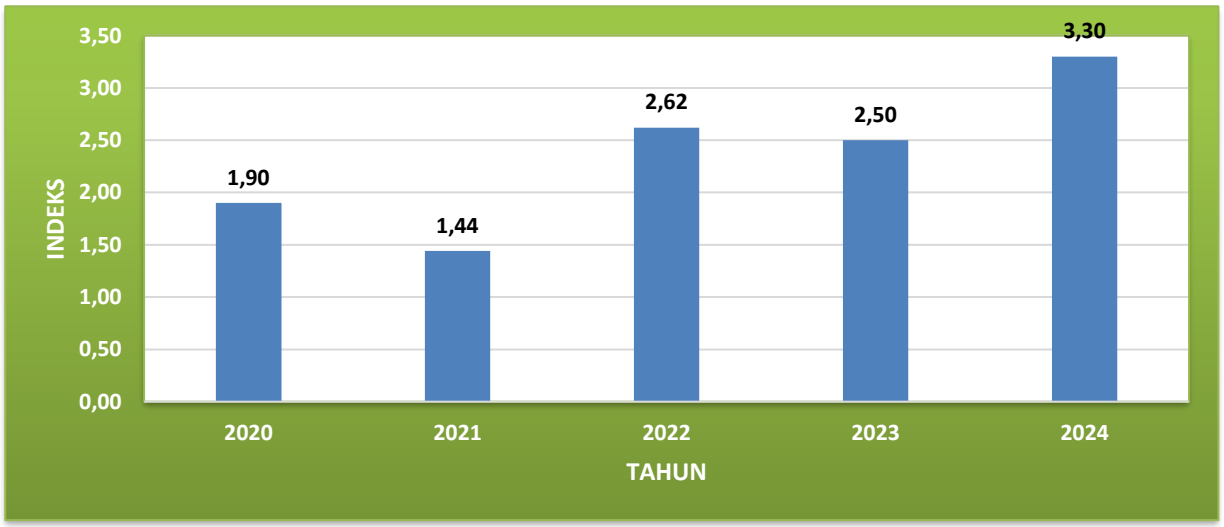


*Sumber : Brin, Tahun 2025*

**Gambar 2.63. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024.**

Berdasarkan gambar 2.63 diatas, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren yang fluktuatif namun secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, IDSD tercatat sebesar 1,90, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 1,44. Namun, mulai tahun 2022, indeks ini menunjukkan peningkatan yang cukup tajam menjadi 2,62, meskipun sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 2,50. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana IDSD mencapai nilai tertinggi sebesar 3,30. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dan penguatan dalam berbagai aspek yang memengaruhi daya

saing daerah, seperti infrastruktur, kualitas SDM, efisiensi birokrasi, serta dukungan terhadap iklim investasi dan inovasi di Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini menjadi indikasi positif terhadap keberhasilan berbagai kebijakan pembangunan daerah yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir

### 2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

#### 2.4.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

#### 2.4.4.2.1. Pendidikan

Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian penting dari layanan urusan wajib pelayanan dasar pembangunan guna mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, berkreasi, sehat dan berprestasi. Beberapa indikator yang dapat diukur sejauh mana pembangunan pada layanan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagia bahagian dari capaian pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

**A. Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Kegunaan Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada tabel 2.35 berikut.

**Tabel 2.35.**
**Angka Partisipasi Murni (APM) Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020–2024**

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun (Persen) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | **SD/MI** | | | | | |
| | Pidie Jaya | 91.72 | 83.81 | 83,80 | 83.96 | 88.22 |
| | Aceh | 95.39 | 88.21 | 87.93 | 88.22 | 97.96 |
| | Nasional | 92.88 | 91.84 | 91.81 | 92.01 | 97.94 |
| 2 | **SMP/MTs** | | | | | |
| | Pidie Jaya | 78.80 | 66.44 | 70.18 | 70.86 | 72.04 |
| | Aceh | 79.02 | 77.34 | 78.30 | 78.46 | 84.22 |
| | Nasional | 77.21 | 76.13 | 79.35 | 79.74 | 81.73 |

*Sumber: Neraca Pendidikan daerah dan Rapor Pendidikan Tahun 2025*

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan tren yang relatif stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, APM tercatat sebesar 91.72%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 83.81%. Pada tahun-tahun berikutnya, APM sedikit meningkat tetapi tetap berada di kisaran 83.80% hingga 88.96% pada tahun 2022 dan 2023, serta mencapai 88.22% pada tahun 2024.

Pada jenjang SMP/MTs, APM di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, APM tercatat sebesar 78.80% dan menurun pada tahun 2021 menjadi 66.44%. Pada tahun 2022 APM SMP/MTs Kabupaten Pidie Jaya menjadi 70,18%, dan meningkat lagi menjadi 70,86% pada tahun 2023 serta pada tahun 2024 mencapai 72.04% pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, APM Kabupaten Pidie Jaya meningkat dari tahun ke tahun walau masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, ada tanda-tanda perbaikan khususnya di jenjang SMP/MTs. Stabilitas di jenjang SD/MI menunjukkan kebutuhan untuk intervensi yang lebih efektif guna meningkatkan angka partisipasi di tingkat dasar.

## B. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap terhadap pendidikan penduduk usia sekolah. Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pidie Jaya mulai dari tingkat SD dan SMP mengalami perubahan selama periode 2020-2024. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 7-15 tahun di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi dan relatif stabil dari

tahun 2020 hingga 2024. Rincian perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.36 berikut.

**Tabel 2.36.**
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun (Persen) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | **Kelompok Usia 7-12 tahun** | | | | | |
| | Pidie Jaya | 99,70 | 99,45 | 99,54 | 99,30 | 99,40 |
| | Aceh | 99,84 | 99,67 | 99,44 | 99,43 | 99.42 |
| | Nasional | 99,26 | 99,19 | 99,10 | 99,16 | 99.19 |
| 2 | **Kelompok Usia 13-15 tahun** | | | | | |
| | Pidie Jaya | 99,29 | 99,16 | 95,07 | 94,83 | 95.20 |
| | Aceh | 98,49 | 98,42 | 97,96 | 97,72 | 97.77 |
| | Nasional | 95,74 | 95,99 | 95,92 | 96,10 | 96.17 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025 dan Rapor Pendidikan tahun 2025*

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, APS jenjang kelompok usi 7-12 tahun tercatat sebesar 99,70% pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan puncak pada tahun 2022 menjadi 99,54%. Setelah itu, meskipun ada sedikit penurunan, angka ini tetap berada di atas 99% hingga tahun 2024 dengan APS sebesar 99,40%. Tingkat partisipasi ini sejalan dengan rata-rata APS provinsi Aceh yang juga berada di kisaran 99% serta sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang stabil di angka sekitar 99%.

Untuk kelompok usia 13-15 tahun, APS di Kabupaten Pidie Jaya juga menunjukkan tren yang tinggi namun dengan fluktuasi yang lebih nyata dibandingkan kelompok usia 7-12 tahun. APS tercatat sebesar 99,29% pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 99,16% pada tahun 2021. Setelah itu, angka ini mengalami penurunan dari 99,16% pada tahun 2022 menjadi 95,07% pada tahun 2022 dan 94,83% pada tahun 2023 kemudian di tahun 2024 naik lagi menjadi 95,20. Penurunan ini lebih tajam dibandingkan dengan rata-rata APS provinsi Aceh yang juga mengalami sedikit penurunan namun tetap lebih tinggi di angka sekitar 97-98%. Sementara itu, rata-rata nasional untuk kelompok usia ini stabil di kisaran 95-96%, yang menunjukkan bahwa APS di Kabupaten Pidie Jaya pada kelompok usia 13-15 tahun masih memerlukan perhatian khusus untuk mengatasi penurunan yang terjadi.

Secara keseluruhan, APS di Kabupaten Pidie Jaya untuk kelompok usia 7-12 tahun menunjukkan hasil yang sangat baik dan stabil, sedangkan untuk kelompok usia 13-15 tahun terdapat penurunan signifikan yang memerlukan intervensi untuk

meningkatkan kembali partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama.

### C. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat SD dan SMP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun atau rasio jumlah siswa (berapapun usianya) yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (jumlah siswa) tanpa memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ideal APK adalah nilai 100, yang artinya jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu sama dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu.

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.37 berikut.

**Tabel 2.37.**
**Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**

| No | Tingkat Pendidikan | Tahun (persen) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **SD/MI** | | | | | |
| | Pidie Jaya | 99.42 | 97.23 | 96.79 | 96.58 | 102.55 |
| | Aceh | 103.51 | 100.46 | 99.66 | 100.32 | 108.57 |
| | Nasional | 103.50 | 100.74 | 100.34 | 101.07 | 104.82 |
| **2** | **SMP/MTs** | | | | | |
| | Pidie Jaya | 100.32 | 107.64 | 109.91 | 109.54 | 104.81 |
| | Aceh | 102.75 | 102.81 | 109.61 | 108.52 | 94.30 |
| | Nasional | 101.32 | 102.13 | 104.51 | 105.08 | 99.21 |

*Sumber: Neraca Pendidikan Daerah dan Rapor Pendidikan Daerah, 2025*

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan fluktuasi namun tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, APK tercatat sebesar 99.42% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 97.23%. serta pada tahun 2022 juga terjadi penurunan menjadi 96.79% Setelah itu, APK kembali meningkat menjadi sekitar 102.55% pada tahun 2024. Rata-rata APK di Pidie Jaya ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata APK di Provinsi Aceh yang berada di kisaran 103-108%, namun lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berkisar antara 103-104%.

Untuk jenjang SMP/MTs, APK di Kabupaten Pidie Jaya juga menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, APK tercatat sebesar 100.32% dan meningkat sedikit pada tahun 2021 menjadi 107.64% kemudian setelah itu, APK mengalami kenaikan bertahap hingga mencapai 109.54% pada tahun 2023 namun pada tahun 2024 turun sedikit menjadi 104.81%. Rata-rata APK di Pidie Jaya ini cukup sejalan dengan tren di Provinsi Aceh yang juga mengalami peningkatan dari sekitar 108.52% pada tahun 2023 namun pada tahun 2024 turun sedikit menjadi 94.30% pada tahun 2024. Sementara itu, rata-rata nasional menunjukkan stabilitas yang relatif lebih baik dengan kisaran 99-103%.

Secara keseluruhan, APK di Kabupaten Pidie Jaya untuk jenjang SD/MI menunjukkan peningkatan dan stabilitas yang cukup baik meskipun sedikit di bawah rata-rata provinsi. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs, terjadi penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan partisipasi pada tingkat pendidikan menengah pertama

## D. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, indikator ini menunjukan bahwa bagaimana rasio jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini dimaksud untuk mengidentifikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Untuk mengetahui Rasio ketersedian sekolah dan Penduduk usia sekolah lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.38

**Tabel 2.38.**
**Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | **SD/MI** | | | | | |
| | Jumlah gedung sekolah (unit) | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 |
| | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (orang) | 17.942 | 17.402 | 16.340 | 16.463 | 18.307 |
| | Rasio (per 10.000 penduduk) | 1:152 | 1:147 | 1:138 | 1:140 | 1;153 |
| 2 | **SMP/MTs** | | | | | |
| | Jumlah gedung sekolah (unit) | 52 | 52 | 54 | 55 | 55 |
| | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun (orang) | 6.374 | 6.868 | 7.265 | 7.142 | 8.778 |
| | Rasio (per 10.000 penduduk) | 1:122 | 1:132 | 1:134 | 1:130 | 1:159 |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Pidie Jaya Tahun 2025.*

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SD/MI di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan stabilitas dalam jumlah gedung sekolah sebanyak 119 unit. Namun, jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun) mengalami peningkatan dari 17.942 orang pada tahun 2020 menjadi 18.307 orang pada tahun 2024. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah meningkat dari 1:152 pada tahun 2020 menjadi 1;153 pada tahun 2024, menunjukkan bahwa semakin banyak gedung sekolah yang tersedia per 10.000 penduduk kelompok usia ini, sehingga potensi akses ke pendidikan dasar semakin baik.

Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah gedung sekolah mengalami peningkatan signifikan dari 52 unit pada tahun 2020 menjadi 55 unit pada tahun 2024 sedangkan untuk jumlah penduduk usia sekolah (13-15 tahun) menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2020 jumlah penduduk usia sekolah (13-15 tahun) sebesar 6.374 orang menjadi 8.778 pada tahun 2024. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 1:122 naik menjadi dari 1:159 pada tahun 2024. Peningkatan jumlah gedung sekolah yang signifikan pada jenjang ini berkontribusi pada perbaikan rasio, memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan menengah pertama bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Pidie Jaya

## E. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid, adalah perbandingan antara jumlah guru pada jenjang pendidikan dasar dibandingkan dengan jumlah murid, rasio ini

mengidentifikasikan ketersediaan tenaga pengajar dengan jumlah murid yang ideal untuk 1 guru agar tercapai mutu pengajaran. Jumlah guru dan murid di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.39.

**Tabel 2.39.**
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020–2024**

| No | Jenjang Pendidikan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | ***SD/MI*** | | | | | |
| 1.1 | Jumlah guru | 2.516 | 2.243 | 2.313 | 2.386 | 2.502 |
| 1.2 | Jumlah murid | 17.833 | 18.037 | 17.802 | 17.916 | 18.172 |
| 1.3 | Rasio | 1 : 7 | 1 : 8 | 1 : 8 | 1 : 8 | 1:7 |
| **2** | ***SMP/MTs*** | | | | | |
| 2.1 | Jumlah guru | 1.354 | 1.177 | 1.212 | 1.382 | 1.390 |
| 2.2 | Jumlah murid | 8.429 | 10.997 | 8.310 | 8.370 | 8.499 |
| 2.3 | Rasio | 1 : 6 | 1 : 9 | 1 : 7 | 1 : 6 | 1:6 |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Pidie Jaya Tahun 2025.*

Berdasarkan Tabel 2.38 dapat digambarkan bahwa Pada jenjang pendidikan SD/MI, jumlah guru di Kabupaten Pidie Jaya mengalami penurunan pada tahun 2020 dari 2.516 menjadi 2.243 pada tahun 2020, Namun kemudian terjadi peningkatan dari ke tahun pada tanun 2021 sebanyak 2.243 menjadi 2.502 pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah murid menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil, berkisar antara 17.833 hingga 18.172 dalam periode yang sama. Rasio guru terhadap murid membaik per tahunnya yang pada tahun 2020 hanya 1:7 menjadi 1:8 mulai tahun 2021 hingga 2023 kemudian pada tahun 2024 menjadi 1:7. Peningkatan jumlah guru yang signifikan ini menunjukkan upaya yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan lebih banyak tenaga pengajar tersedia untuk murid-murid SD/MI.

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, jumlah guru juga mengalami peningkatan substansial dari 1.354 pada tahun 2020 menjadi 1.390 pada tahun 2024. Jumlah murid pada jenjang ini menunjukkan peningkatan yang lebih berfluktuasi yang pada tahun 2020 sebanyak 8.429 murid menjadi sekitar 8.499 pada tahun 2024. Rasio guru terhadap murid masih tetap setiap tahunnya dari 1:6 pada tahun 2020 menjadi 1:6 pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan jumlah guru juga berdampak positif pada kualitas pendidikan di jenjang SMP/MTs.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan jumlah guru di kedua jenjang

pendidikan dasar, yang berdampak positif pada rasio guru terhadap murid. Ini mengindikasikan peningkatan perhatian terhadap kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa rasio guru terhadap murid semakin kecil, memungkinkan pengajaran yang lebih efektif dan perhatian yang lebih baik terhadap kebutuhan individual murid

**F. Kompetensi Tenaga Pendidik**

Pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan potensi generasi muda dan memajukan masyarakat. Tenaga pendidik di daerah ini diharapkan memiliki kompetensi yang tinggi dalam merancang dan memberikan pembelajaran yang bermutu. Dengan fokus pada kualitas pendidikan, Kabupaten Pidie Jaya berupaya memastikan bahwa guru-guru di sekolah-sekolah mereka memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dan terus meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Selain itu, pemahaman tentang kurikulum nasional dan kebutuhan khusus siswa juga menjadi bagian integral dari persyaratan sertifikasi tenaga pendidik di wilayah ini. Semua upaya ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan mendukung perkembangan holistik siswa, sehingga mereka dapat menjadi kontributor yang berdaya saing dalam masyarakat dan negara. Konsep Merdeka Belajar adalah mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang. Tujuan merdeka belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapatkan suasana yang bahagia. Tujuan tersebut tidak akan didapatkan tanpa adanya kompetensi seorang guru. Guru yang selalu mengembangkan kompetensi akan menjadi guru yang cerdas dan profesional. Jika kompetensi tersebut disertai dengan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, maka tantangan sebagai seorang guru akan dapat dilalui , karena guru profesional adalah guru yang akan mengikuti perubahan, bahkan mau meninggalkan prktik dan sistem lama untuk mengahadapi berbagai tantanga masa kini dan masa yang akan datang seperti dalam perubahan kurikulum merdeka saat ini. Penguatan kompetensi SDM Guru melalui Kurikulum Merdeka di Kabupaten Pidie Jaya dilakukan setiap tahunnya dengan memberikan materi terbaru yang sedang berkembang.

Berikut data guru yang sudah mengikuti pelatihan kompetensi secara rinci disampaikan pada Tabel 2.40 berikut.

**Tabel 2.40.**
**Jumlah Guru Bersertifikasi dan Guru Sarjana di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Guru PNS PAUD, SD Dan SMP (Orang) | 1.190 | 1.145 | 1.274 | 1.426 | 1.239 |
| 2 | Jumlah Guru Yang Telah Sertifikasi (Orang) | 835 | 833 | 782 | 760 | 1.096 |
| 3 | Jumlah Guru Lulus Sertifikasi (Orang) | 835 | 833 | 782 | 760 | 1.096 |
| 4 | Persentase Guru Sertifikasi Tiap Tahun (Persen) | 70,1 % | 72,8 % | 61,4 % | 53,3% | 88,45 % |
| 5 | Persentase Guru Lulus Sertifikasi /Lulus PPG (Orang) | 70,1 % | 72,8 % | 61,4 % | 53,3% | 88,45 % |

*Sumber: Data Pokok Pendidikan (Dapodik)*

## G. Program Zonasi

Berdasarkan Permendikmen Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, yang dimaksud dengan Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.

Tentang Jalur Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru, ditegaskan dalam Permendikmen Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Penerimaan Murid baru untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur penerimaan Murid baru. Jalur penerimaan Murid baru meliputi:

a. Jalur domisili;
b. Jalur afirmasi;
c. Jalur prestasi; dan
d. Jalur mutasi.

Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik. Sedangkan Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas

dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

1. Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud adalah sebesar:
   a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD;
   b. paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP; dan
   c. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMA.
2. Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud adalah sebesar:
   a. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD;
   b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP; dan
   c. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMA.
3. Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud adalah sebesar:
   a. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP; dan
   b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMA.

Sedangkan untuk persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud adalah sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA.

#### 2.4.4.2.2. Kesehatan

**A. Angka Kematian Ibu**

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. ibu ini dihitung per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan dan persalinan. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatakn yang memiliki kompetensi kebidanan.

**Tabel 2.41.**
**Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Ibu**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020–2024**

| No | Tahun | Kematian Ibu | |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah Kasus Kematian (Orang) | Angka Kematian (Per 100.000 KH) |
| 1 | 2020 | 6 | 198 |
| 2 | 2021 | 6 | 211 |
| 3 | 2022 | 7 | 254 |
| 4 | 2023 | 1 | 38 |
| 5 | 2024 | 2 | 93 |

*Sumber : Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas. AKI menggambarkan jumlah ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya. Menurut definisi WHO, kematian ibu adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (dalam masa nifas) akibat semua sebab yang terkait atau diperbuat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Angka kematian Ibu di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 dan 2021 sebanyak 6 kasus pada tahun 2022 meningkat menjadi 7 kasus, sedangkan dari tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 1 kasus naik lagi ditahun 2024 menjadi 2 kasus kematian Ibu di Kabupaten Pidie Jaya.

Beberapa determinan penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain status gizi, anemia pada kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kerja rumah tangga. Terdapat dua penyebab ibu meninggal saat meninggal yakni infeksi dan perdarahan. Untuk yang penyebabnya infeksi sudah dapat ditekan karena sebagian besar kelahiran dilakukan di pusat layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik dan sebagainya.

Upaya percepatan penurunan kematian ibu telah banyak dilakukan, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas serta kualitas pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui paket penempatan tenaga bidan dan polindes di berbagai pelosok pedesaan serta tenaga dokter di daerah tertinggal atau sangat tertinggal. Sedangkan dari aspek kualitas pelayanan, dilakukan pelayanan melalui upaya peningkatan kemampuan/kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan (PONED), serta berbagai program intervensi lain,

namun upaya tersebut belum mampu menurunkan kasus kematian dan menekan ibu yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya.

## B. Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rote*)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Usia bayi merupakan usia yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian sehingga banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi guna meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan penduduk. Dari tabel diatas menunjukkan jumlah kematian bayi di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020 terjadi kasus kematian sebanyak 28 kasus tahun 2021 menjadi 24 kasus kematian tahun 2022 naik menjadi 31 kasus sementara tahun 2023 menurun menjadi 22 kasus naik lagi di tahun 2024 sebayak 31 kasus kematian bayi di Kabupaten Pidie Jaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.42 berikut.

**Tabel 2.42.**
**Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Bayi**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020–2024**

| No | Tahun | Kematian Bayi | |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah Kematian (Orang) | Angka Kematian (Per 1.000 KH) |
| 1 | 2020 | 28 | 9 |
| 2 | 2021 | 24 | 8 |
| 3 | 2022 | 31 | 11 |
| 4 | 2023 | 22 | 8 |
| 5 | 2024 | 31 | 14 |

*Sumber : Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Selama ini telah dilakukan beberapa upaya untuk dapat menekan bayi dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan dan hasilnya menunjukan perbaikan yang sangat berarti. Imunisasi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan dasar dari segi preventif yang memegang peranan dalam menurunkan bayi. Upaya pelayanan imunisasi dilakukan melalui kegiatan imunisasi rutin dan tambahan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selain itu perbaikan gizi merupakan syarat utama dalam perbaikan kesehatan ibu hamil, menurunkan bayi dan balita. Di samping itu untuk dapat menurunkan bayi akan lebih mudah tercapai apabila ditunjang dengan sumber daya kesehatan yang

berkualitas dan ketersediaan standar, pedoman, sistem pencatatan pelaporan serta logistik yang memadai dan bermutu.

Indikator untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah UCI (Universal Child Immunization). Desa UCI adalah gambaran suatu desa dimana harus diatas 80 persen dari jumlah bayi berusia 0 – 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap. Berbagai faktor yang menyebabkan makin turunnya angka cakupan imunisasi tersebut dan menjadi tantangan bagi program imunisasi di Kabupaten Pidie Jaya adalah adanya penolakan dari masyarakat terhadap upaya imunisasi terhadap anak. Baik yang disebabkan karena ketakutan akan efek demam yang timbul pasca imunisasi ataupun efek lain yang dikhawatirkan terjadi. Para orang tua yang tidak membawa anaknya imunisasi karena sedang sakit di saat jadwal imunisasinya tiba, kemudian terlupa sehingga akhirnya tanpa imunisasi sama sekali. Demikian pula berbagai info yang tidak bertanggung jawab sudah banyak menyebar ke masyarakat baik itu melalui media sosial ataupun selebaran atau bahkan berupa buku dan tabloid sehingga menyebabkan gerakan anti vaksin semakin menunjukkan eksistensinya di Kabupaten Pidie Jaya.

### C. Ketersediaan Fasilitas, dan Tenaga Kesehatan

Pembangunan infrastruktur dasar khususnya bidang kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) guna meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan merupakan tanggung jawab besar pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Setelah diresmikan pada awal tahun 2016, RSUD Kabupaten Pidie Jaya telah mengembangkan dan memfungsionalkan bangunan yang telah dibangun diantaranya seperti ruang rawat inap, ruang radiologi, ruang operasi, IGD, hemodialisa dan fasilitas pendukung lainnya. Hal tersebut dengan memanfaatkan dana Otsus dan sumber dana lainnya dengan mengutamakan kepada fungsional RSUD guna meningkatkan pelayanan seperti pengadaan fasilitas rawat inap dan alat kesehatan rujukan, serta pembangunan taman dan tempat pembuangan limbah rumah sakit. Namun bencana gempa bumi yang terjadi pada akhir tahun 2016 telah merusak semua fasilitas rumah sakit yang telah dibangun. Sehingga Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus lebih bekerja keras untuk membangun kembali rumah sakit yang telah rusak tersebut dengan berbagai sumber dan donatur.

Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang melayani mayarakat dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024 sudah mengalami peningkatan. Terdapat 12 Puskemas, 18 Pustu, 31 Apotik dan 10 Poliklinik serta sebanyak 236 Posyandu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat

khususnya di pedesaan. Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan di Dinas Kesehatan, RSUD, Puskemas dan Pustu berjumlah 2.908 orang. Lebih jelas jumlah sarana dan tenaga kesehatan dapat di lihat pada Tabel 2.43 berikut:

**Tabel 2.43.**
**Indikator Kesehatan Masyarakat**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Kecamatan | Jumlah Puskesmas | Jumlah Posyandu | Jumlah Tenaga Kesehatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun | | | | |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Bandar Baru | 3 | 50 | 523 | 451 | 188 | 537 | 529 |
| 2 | Pante Raja | 1 | 10 | 61 | 142 | 54 | 144 | 135 |
| 3 | Trienggadeng | 1 | 28 | 195 | 202 | 116 | 220 | 235 |
| 4 | Meureudu | 1 | 30 | 197 | 177 | 126 | 225 | 234 |
| 5 | Meurah Dua | 1 | 19 | 100 | 116 | 77 | 137 | 138 |
| 6 | Ulim | 1 | 30 | 154 | 137 | 76 | 153 | 154 |
| 7 | Jangka Buya | 1 | 18 | 94 | 105 | 58 | 123 | 126 |
| 8 | Bandar Dua | 3 | 51 | 302 | 266 | 152 | 301 | 305 |
| 9 | RSU | - | - | 765 | 782 | 126 | 959 | 900 |
| 10 | Dinkes | - | - | 127 | 132 | 34 | 152 | 152 |
| **Jumlah** | | **12** | **236** | **2.518** | **2.510** | **1.007** | **2.951** | **2.908** |

*Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan SDG's, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menganggarkan melalui berbagai sumber pendanaan. Ada beberapa indikator penting SPM kesehatan yang belum tercapai secara sempurna, Hal tersebut harus menjadi titik perhatian pemerintah daerah. Karena ketercapaian SPM merupakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perararaturan perundang-undangan.

## D. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya

Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan Nomor Registrasi 1118012 dan kemudian sesuai dengan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 500 Tahun 2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya dengan status kelas C dan Keputusan Bupati yang merupakan representative Rumah Sakit Kabupaten.

Dengan semakin berkembanganya tata kelola keuangan Pemkab Pidie Jaya dan paradigama tentang pelayanan publik, maka berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 466 Tahun 2020 Tentang Penentapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya sehingga rumah sakit dapat mengelola keuangan secara mandiri. Dengan status sebagai BLUD penuh berarti rumah sakit dapat mengelola keuangan

berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Setelah dilakukan peningkatan kapasitas tempat tidur pasien seiring dengan peningkatan jumlah dan jenis pelayanan dokter spesialis, maka pada tahun 2021 melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 445/DPMPTSP/2352/2021 Menetapkan izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B. Selanjutnya perubahan Susunan organisasi dari Kelas C ke Kelas B, diatur dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kelas B Kabupaten Pidie Jaya Sebagai Unit Organisasi Yang Bersifat Khusus.

Tahun 2023 RSUD Pidie Jaya berhasil meraih status Terakreditasi PARIPURNA dengan rating bintang Lima, berdasarkan hasil penilaian tim survei akreditasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dibawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan akreditasi ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit. Tim survey akreditasi rumah sakit melakukan penilaian terhadap pelayanan dan manajemen rumah sakit pada tanggal 27, 28 Februari dan 1 Maret 2023. Pencapaian Akreditasi PARIPURNA tingkat bintang lima tersebut berdasarkan penilaian tim survey akreditasi terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Di tahun 2024 RSUD Pidie Jaya sedang melakukan persiapan untuk menuju Penilaian menjadi Rumah Sakit yang ke 4 (empat) di Provinsi Aceh yang menerapkan *Pelayanan Syariah* dan untuk mendapatkan sertifikat Rumah Sakit Syariah yang dikeluarkan oleh MUI Pusat melalui penilaian yang akan dilakukan oleh MUKISI Pusat yang direncanakan awal tahun 2025. Demikian pula kedepannya RSUD Pidie Jaya sedang mengembangkan mutu layanan rujukan penyakit kanker, jantung, stroke dan uronefrologi (KJSU) serta kesehatan ibu dan anak dalam rangka tranformasi sistem kesehatan sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2022 – 2024.

RSUD Pidie Jaya mulai tahun 2024 memiliki beberapa layanan unggulan diantaranya:

1. **Pelayanan Intensive Care Unit (ICU)**

   Adalah ruang rawat dengan staf dan perlengkapan khusus ditujukan untuk mengelola pasien dengan penyakit, trauma atau komplikasi yang mengancam jiwa akibat kegagalan disfungsi satu organ atau lebih akibat penyakit,

Intensive Care Unit (ICU) RSUD Pidie Jaya sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap dengan dokter dan perawat yang terdidik dan terlatih untuk critical care. sehingga kondisi pasien – pasien dapat termonitor dengan baik pelayanan pasien menggunakan perbandingan 1 : 2 rasio satu perawat melayani 2 pasien. ICU RSUD Pidie Jaya dikepalai oleh seorang Konsultan intensive care dan tersedia dokter 24 jam serta memiliki perawat terlatih.

2. **Pelayanan Code Blue**

   Adalah Tim Respon cepat mengenal adanya kondisi gawat darurat untuk pasien yang membutuhkan pertolongan dan penanganan medis sesegera mungkin seperti pada pasien mengalami henti jantung. Tim Code Blue terdiri dari 3 hingga 5 orang yang sudah mendapatkan pelatihan dalam bantuan hidup dasar dan akan tiba ditempat kejadian dalam waktu 5 sampai 10 menit. Masyarakat dapat menghubungi no kontak Nomor Kontak: 0813 6202 0201.

3. **Program Pelayanan Ambulance Gratis**

   Adalah Program Antar jemput pasien Gratis yang berlaku untuk Antar Jemput Pasien Emergency, Rawat Jalan dan Rawat Inap serta pasien pulang setelah perawatan. Program Antar Jemput Pasien Berlaku bagi pasien yang berada dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Masyarakat dapat menghubungi no kontak *0852 1149 2784*.

4. **Program Pemberian Akte Kelahiran Langsung Setelah Melahirkan**

   Adalah Program pemberian Akte Kelahiran Anak bagi siapa saja yang melahirkan secara Normal maupun Operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya yang langsung diberikan waktu pasien mau pulang.Program ini terlaksana dengan adanya MOU Kerjasama RSUD Pidie Jaya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya.

Perkembangan Efesiensi Layanan RSUD Pidie Jaya salah satu bagian dari statistik rumah sakit adalah indikator pelayanan rawat inap dan rawat jalan rumah sakit. Indikator ini merupakan gambaran untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rawat inap dan rawat jalan di RSUD Pidie Jaya. Indikator-indikator pelayanan ini sumber data diambil dari sensus harian rawat inap rawat jalan. Berikut ini indikator pelayanan RSUD Pidie Jaya tahun 2020-2024 di RSUD Pidie Jaya :

**Tabel 2.44.**
**Indikator Kesehatan Masyarakat**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| TAHUN | BOR | TOI | LOS | BTO | GDR | NDR | Ratat2 Kunj. POLI/HARI | TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | % | HARI | HARI | KALI | 0/000 | 0/000 | | |
| Nilai Ideal | 60-85 | 1 - 3 | 6 - 9 | 40 - 50 | < 45 | < 25 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 2020 | 59 | 4 | 3 | 60 | 12,6/1000 | 15,2/1000 | 0,28 | 136 |
| 2021 | 59 | 3 | 3 | 55 | 21,20/1000 | 23,61/1000 | 149,85 | 172 |
| 2022 | 67 | 2 | 3 | 67 | 13,1/1000 | 11,3/1000 | 293,19 | 204 |
| 2023 | 69 | 2 | 3 | 65 | 14,2/1000 | 12,7/1000 | 285,96 | 215 |
| 2024 | 68 | 4 | 3 | 50 | 2,3/1000 | 0,7/1000 | 285,96 | 215 |

*Sumber: RSUD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

## E. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Aceh saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, polindes dan puskesmas pembantu/pustu). Sejak tahun 2011 seluruh kecamatan di Aceh sudah memiliki puskesmas, bahkan di beberapa Kecamatan memiliki 2 Puskesmas dengan total sebanyak 325 unit. Jumlah ini terjadi peningkatan selama 10 tahun terakhir pada tahun 2021 total puskesmas di Aceh menjadi 362 unit yang terdiri dari puskesmas rawat inap 159 unit dan non rawat inap 203 unit sedangkan jumlah Kecamatan sebanyak 289 Kecamatan. Berdasarkan Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 1976, kapasitas layanan satu puskesmas di satu kecamatan dengan jumlah penduduk antara 30.000 jiwa sampai 50.000 jiwa.

Kabupaten Pidie Jaya sampai tahun 2024 jumlah puskesmas sebanyak 12 unit yang tersebar diseluruh Kecamatan, Jumlah Puskesmas yang dibutuhkan didasarkan pada rata-rata penduduk 30.000 jiwa adalah sebanyak 5,4 unit atau 5 unit untuk jumlah penduduk 163.591 jiwa, artinya Puskesmas yang tersedia sudah melebihi kebutuhan sebanyak 12 unit, jadi rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024 adalah 2,20 per 30.000 penduduk, demikian juga untuk fasilitas lainnya seperti Polindes dan Pustu, artinya pembangunan Puskesmas, polindes dan pustu baru tidak diperlukan untuk sementara waktu namun tingkat pelayanan dan fasilitasnya yang ada perlu

ditingkatkan. Rasio Puskesmas, Polindes dan Pustu di Pidie Jaya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.45 berikut.

**Tabel 2.45.**
**Rasio Puskesmas, Polindes dan Pustu di Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No. | Uraian | Tahun (jiwa) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Puskesmas | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Jumlah Polindes | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 3 | Jumlah Pustu | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| **Jumlah Penduduk** | | **162.174** | **159.941** | **160.828** | **163.591** | **169.884** |
| 1 | Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk | 2,21 | 2,55 | 2,23 | 2,20 | 2,11 |
| 2 | Rasio Polindes per 30.000 penduduk | 23,67 | 24,01 | 23,88 | 23,48 | 22,60 |
| 3 | Rasio Pustu per 30.000 penduduk | 3,32 | 3,37 | 3,35 | 3,30 | 3,18 |

*Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Disamping itu, Puskesmas akan dapat menjalankan fungsinya secara optimal diperlukan adanya pengelolaan organisasi puskesmas secara baik yang meliputi kinerja pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien di puskesmas serta menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskemas, diperlukan adanya penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan, yaitu melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi Puskesmas adalah proses penilaian eksternal oleh komisi akreditasi dan/atau perwakilan di provinsi terhadap puskesmas untuk menilai apakah sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko. Tentu saja akreditasi ini bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi.

**Tabel 2.46.**
**Status Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024**

| No | Puskesmas | Status Akreditasi |
|---|---|---|
| 1 | Puskesmas Meureudu | Paripurna |
| 2 | Puskesmas Meurah Dua | Utama |
| 3 | Puskesmas Bandar Dua | Paripurna |
| 4 | Puskesmas Kuta Krueng | Paripurna |
| 5 | Puskesmas Blangkuta | Paripurna |
| 6 | Puskesmas Jangka Buya | Utama |
| 7 | Puskesmas Ulim | Paripurna |
| 8 | Puskesmas Trienggadeng | Puripurna |
| 9 | Puskesmas Panteraja | Puripurna |
| 10 | Puskesmas Bandarbaru | Paripurna |
| 11 | Puskesmas Cubo | Paripurna |
| 12 | Puskesmas Simpang 4 Nyong | Utama |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Dari tabel 2.46 di atas menunjukkan bahwa Puskesmas di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024 sudah ter Akreditasi secara keseluruhan.

## F. Rasio dokter per satuan penduduk

Menurut ketentuan WHO, rasio ideal dokter umum adalah 40/100.000 penduduk atau 1 orang dokter melayani 2.500 orang penduduk (1 : 2.500), dokter spesialis 1 orang dokter melayani 5.000 orang penduduk ( 1 : 5.000 ) dan dokter Gigi 1 orang dokter melayani 9.000 orang penduduk (1 : 9.000). Data tahun 2024 jumlah dokter umum di Kabupaten pidie Jaya sebanyak 104 orang, dokter spesialis sebanyak 24 orang dan dokter gigi sebanyak 20 orang.

Berdasarkan hal tersebut ketersediaan dokter umum saat ini di Kabupaten Pidie Jaya adalah 104 orang, kondisi ideal dokter umum di Kabupaten Pidie Jaya adalah 65 orang, ini berarti pada tahun 2024 terjadi kelebihan dokter umum sebanyak 38 orang, dokter spesialis yang tersedia sebanyak 24 orang sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 47 orang, sedangkan untuk dokter gigi sudah memenuhi kebutuhan yaitu yang tersedia sebanyak 20 orang sedangkan kebutuhan sebanyak 16 orang. Untuk memenuhi kekurangan tersebut pemerintah daerah harus berusaha untuk mendatangkan dari luar daerah atau merekrut tenaga kesehatan baru, baik secara kontrak maupun kerja sama dengan lembaga donor, rasio dokter di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.47.

**Tabel 2.47.**
**Rasio Dokter di kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| Tenaga Medis | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Dokter Umum | Tersedia | 81 | 81 | 80 | 81 | 104 |
| | Kebutuhan | 64 | 64 | 65 | 64 | 66 |
| Dokter Spesialis | Tersedia | 17 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| | Kebutuhan | 32 | 32 | 32 | 32 | 47 |
| Dokter Gigi | Tersedia | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| | Kebutuhan | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| Jumlah Penduduk | | 162.174 | 159.941 | 160.828 | 163.591 | 169.884 |
| Rasio Dokter Umum per 40/100.000 (1 : 2.500 pddk) | | 1 : 3.603 | 1 : 1.974 | 1 : 1.985 | 1 : 2.044 | 1 : 1.634 |
| Rasio Dokter Spesialis per 20/100.000 (1 : 5.000 Pddk) | | 1 : 8.535 | 1 : 9.408 | 1 : 8.041 | 1 : 8.179 | 1 : 7.079 |
| Rasio Dokter Gigi per 11/100.000 (1 : 9.000 Pddk) | | 1 : 8.108 | 1 : 7.270 | 1 : 8.041 | 1 : 7.790 | 1 : 8.494 |

*Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pidie Jaya 2025*

## G. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui oleh pemerintah dan organisasi profesi serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk di register, sertifikasi, dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.

Saat ini profesi Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat selama hamil, masa kehamilan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan ke gawat daruratan. Jumlah Bidan di kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 tercatat sebanyak 370 orang, dengan jumlah penduduk sebanyak 166.517 jiwa, dari kondisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jumlah bidan sudah melebihi standar nasional (100 bidan per 100.000 penduduk).

Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/ 148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah tenaga keperawatan di Pidie Jaya saat ini adalah 275 orang, kondisi tersebut sudah melebihi target nasional dan standar WHO yaitu sebesar 106,9 per 100.000 penduduk. Sementara untuk tenaga kefarmasian di kabupaten Pidie Jaya tahun 2024 adalah 56 orang, jika kita melihat rasio tenaga kefarmasian tersebut sudah melebihi target nasional dan standar WHO sebesar 10 per 100.000 penduduk. Untuk pedoman selanjutnya standar ketenagaan puskesmas dapat dilihat pada Tabel 2.48 sebagai berikut:

**Tabel 2.48.**
**Standar Ketenagaan Puskesmas Nasional**

| No | Jenis Tenaga | Puskesmas kawasan Perkotaan | | Puskesmas kawasan Pedesaan | | Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Non Rawat Inap | Rawat Inap | Non Rawat Inap | Rawat Inap | Non Rawat Inap | Rawat Inap |
| 1 | Dokter atau Dokter Layanan Primer | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Dokter Gigi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Perawat | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 4 | Bidan | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 5 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Tenaga Kesehatan Lingkungan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Tenaga Gizi | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Tenaga Kefarmasian | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Tenaga Administrasi | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Pekarya | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Jumlah** | | **22** | **31** | **19** | **27** | **19** | **27** |

*Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*

## H. Persentase balita gizi buruk

Balita gizi buruk adalah balita yang mengalami kekurangan energi dan protein tingkat berat yang diakibatkan karena kurang mengkomsumsi makanan yang bergizi dan menderita sakit yang begitu lama. Keadaain ini dilihat dari status gizi sangat kurus (BB/TB) dan atau dari hasil pemeriksaan klinis yang menunjukkan gejala marasmus, kwasiorkor atau marasmus kwasiorkor. Balita gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas, hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dibanding anak seusianya. Peran serta masyarakat dalam penimbangan balita menjadi sangat penting dalam

deteksi dini kasus gizi kurang dan gizi buruk. Dengan rajin menimbang balita, maka pertumbuhan balita dapat dipantau secara intensif

Balita gizi buruk merupakan salah satu indikator kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah secara menyeluruh terutama dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tahun 2019 balita gizi buruk di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 10 Orang, mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 yaitu menjadi 7 0rang, 2022 meningkat kembali menjadi 10 Orang sedangkan tahun 2023 menurun kembali menjadi 2 balita gizi buruk. Balita gizi buruk dapat ditekan namun perlu diwaspadai dan ditingkatkan pembinaan serta sosialisasi kepada masyarakat agar memperhatikan pola makan makanan yang bergizi, karena resiko gizi buruk sangat besar berupa tingkat pertumbuhan badan dan mental akan terganggu. Persentase Balita Gizi buruk di Kabupaten Pidie Jaya disajikan pada Gambar 2.64 berikut.

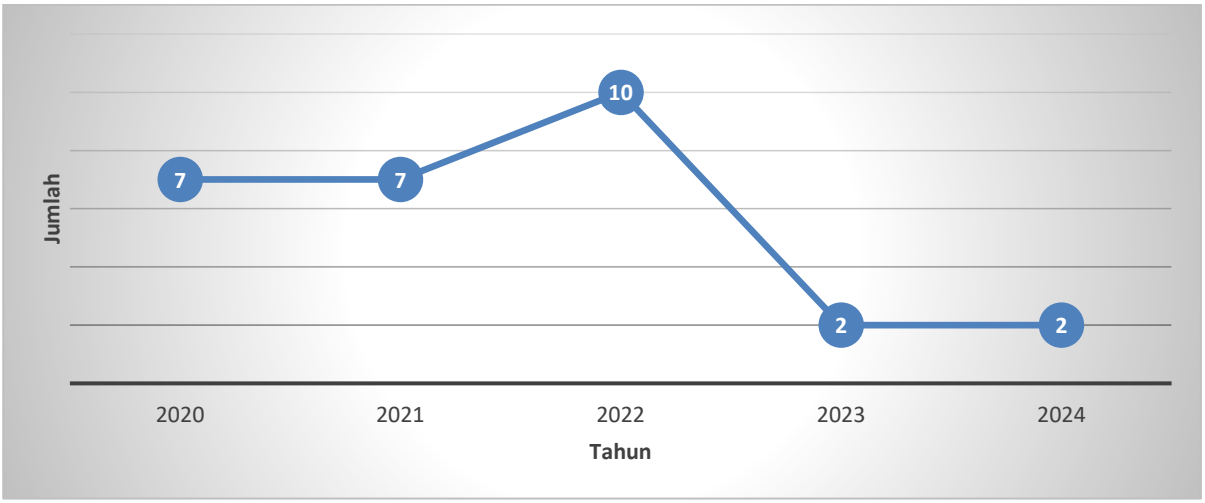


*Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya, 2025*

**Gambar 2.64. Perkembangan Angka Gizi Buruk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

## I. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Profil Pertolongan persalinan merupakan salah satu kualitas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Hal ini dapat menggambarkan indikator output dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dari pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa sekitar persalinan, hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional) dan persalinan yang belum memadai bukan pada fasilitas kesehatan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis secara umum belum begitu baik.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan semakin meningkat setiap tahun, di tahun 2024 mencapai 100% Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, tidak ada lagi persalinan yang ditolong oleh tenaga yang bukan kesehatan. Penyebab rendahnya cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan pada tahun 2020-2024 adalah karena masih adanya praktik-praktik persalinan yang masih tidak memiliki izin yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan, dengan harapan nantinya masyarakat mau melahirkan dengan pertolongan tenaga kesehatan. Kegiatan sosialisasi kesehatan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pada masa masa yang akan datang. Selanjutnya cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 - 2024 secara rinci di sajikan pada Tabel 2.49 sebagai berikut:

**Tabel 2.49.**
**Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 - 2024**

| Uraian/Jumlah | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Persalinan dengan bantuan Tenaga Kesehatan (Nakes)** | 3.044 | 2.851 | 2.752 | 3.610 | 2.150 |
| **Jumlah Ibu Bersalin** | 3.576 | 3.614 | 3.585 | 3.610 | 2.150 |
| **Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes (%)** | 89,2 | 82,7 | 78,8% | 100 | 100 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pidie Jaya Tahun 2025*

### 2.4.4.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Meskipun pembangunan infrastruktur terasa meningkat sejak pemekaran Kabupaten Pidie Jaya tahun 2007, namun masih banyak infrastruktur dasar yang belum terpenuhi di Kabupaten Pidie Jaya. Ditambah dengan kehancuran infrastruktur akibat bencana gempa bumi kabupaten Pidie Jaya yang terjadi 7 Desember 2016. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi yang menghubungkan antar wilayah kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya terus menjadi prioritas pembangunan hingga tahun 2022 guna mendorong peningkatan sumber-sumber ekonomi lokal.

#### A. Sarana Transportasi Jalan

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan. Dengan pemerataan pembangunan jalan diharapkan akan tercapainya keseimbangan pembangunan antar daerah dan mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya sehingga perekonomian nasional dapat berjalan stabil

sepanjang waktu. Gambaran keadaan jalan berdasarkan status, kondisi dan jenis permukaan di Kabupaten Pidie Jaya selama beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.50 berikut.

**Tabel 2.50.**
**Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi di Kabupaten Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | **Status/Kelas Jaringan Jalan** | | | | | | |
| | Jalan Nasional | Km | 37,78 | 37,78 | 37,78 | 37,78 | 37,78 |
| | Jalan Provinsi | Km | 23,44 | 23,44 | 23,44 | 23,44 | 23,44 |
| | Jalan Kabupaten | Km | 520,843 | 520,843 | 520,843 | 520,843 | 520,843 |
| 2 | **Jenis Permukaan Jalan Kabupaten** | | | | | | |
| | Aspal | Km | 271,767 | 269,703 | 276,054 | 278,028 | 285,443 |
| | Kerikil/Pengerasan | Km | 209,212 | 190,189 | 197,445 | 198,406 | 191,280 |
| | Tanah | Km | 39,865 | 44,437 | 32,081 | 29,385 | 29,152 |
| 3 | **Kondisi Jalan Kabupaten** | | | | | | |
| | Mantap | % | 47,52 | 48,29 | 40,40 | 41,170 | 42,15 |
| | Mantap | Km | 247,513 | 251,498 | 210,434 | 214,43 | 219,523 |
| | Baik | Km | 191,822 | 178,65 | 174,429 | 160,929 | 143,955 |
| | Sedang | Km | 55,691 | 72,848 | 36,005 | 53,501 | 75,568 |
| | Rusak Ringan | Km | 196,925 | 161,631 | 148,334 | 152,6 | 17,056 |
| | Rusak Berat | Km | 76,405 | 107,714 | 162,075 | 153,814 | 284,264 |

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab.Pidie Jaya Tahun 2025*

Menurut Status/Kelas Jaringan Jalan di Kabupaten Pidie Jaya terbagi menjadi 3 yaitu: Jalan Nasional (37,78 Km), Jalan Provinsi (23,44 Km) dan Jalan Kabupaten (520,843 Km). Selanjutnya kondisi jalan berdasarkan jenis permukaan Jalan Kabupaten dapat dilihat bahwa kategori Aspal sampai akhir tahun 2024 sepanjang 285,443 Km, Kerikil/Pengerasan sepanjang 191,280 Km dan Kategori tanah sepanjang 29,152 Km.

Sedangkan bila Dilihat dari kondisi Jalan Kabupaten, Kabupaten Pidie Jaya sampai tahun 2024 dalam kondisi mantap sepanjang 219,523 Km (42,148%), kondisi baik sepanjang 143,955 Km Rusak sedang sepanjang 75,568 Km, kondisi rusak ringan sepanjang 17,056 Km, dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 284,264 Km. Kondisi awal Jalan Kabupaten dalam keadaan rusak berat pada tahun 2020 sepanjang 279,744 Km namun dalam kondisi rusak ringan sepanjang 52,583 Km, dalam kondisi sedang 71,122 Km, dalam kondisi baik sepanjang 117,394 Km, dalam kondisi mantap sepanjang 247,513 Km. Keadaan rusak berat pada tahun 2021 sepanjang 107,714 Km namun dalam kondisi rusak ringan sepanjang 161,631 Km, dalam kondisi sedang 72,848 Km, dalam kondisi baik sepanjang 178,65 Km, dalam kondisi mantap sepanjang 251,498 Km. Keadaan rusak berat pada tahun 2022 sepanjang 162,075 Km namun

dalam kondisi rusak ringan sepanjang 148,334 Km, dalam kondisi sedang 36,005 Km, dalam kondisi baik sepanjang 174,429 Km, dalam kondisi mantap sepanjang 210,434 Km. Keadaan rusak berat pada tahun 2023 sepanjang 162,075 Km namun dalam kondisi rusak ringan sepanjang 152,6 Km, dalam kondisi sedang 53,501 Km, dalam kondisi baik sepanjang 160,929 Km, dalam kondisi mantap sepanjang 41,17 Km

Sesuai dengan qanun Kabupaten Pidie Jaya nomor 4 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014 – 2034 sistem jaringan jalan dalam wilayah kabupaten Pidie Jaya adalah: Jaringan Jalan Nasional sepanjang 38,71 Km meliputi : a). Jaringan jalan arteri primer meliputi : 1. Jalan Batas Kabupaten Pidie – Meureudu sepanjang 24,66 Km; 2. Jalan Meureudu – Batas Kabupaten Bireuen sepanjang 14,05 Km; b). Jaringan jalan kolektor primer (K1) berupa jalan Jl. High Grade - Highway Trans Sumatera batas Kabupaten Pidie - batas Kabupaten Bireuen sepanjang 34,41 Km. Sesuai dengan perkembangan yang mana Highway Trans Sumatera berubah menjadi Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Beberapa kriteria tersebut diatas seperti jalan nasional yang ada di Kabupaten Pidie Jaya secara bertahap akan diupayakan untuk memenuhi standar jalan yang sudah ditetapkan secara nasional. Terutama jalan masuk menuju jalan Nasional akan dibatasi secara efektif dan efisien dan juga aktifitas perdagangan atau pedagang musiman dipinggir jalan akan ditiadakan, sehingga kecepatan dan kapasitas jalan tidak terganggu. Jaringan Jalan Provinsi (K2) dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya sepanjang 23,44 Km meliputi :

1. Jalan Trienggadeng – Batas Kabupaten Bireuen sepanjang 19,48 Km;
2. Jalan Meureudu - Babah Jurong sepanjang 2,32 Km;
3. Jalan Sp Pangwa – Dayah Pangwa sepanjang 1,64 Km;.

Pada Tahun 2009 s.d 2014 telah dilakukan pembukaan jalan yang menghubungkan Meureudu (kabupaten Pidie Jaya) sampai ke Geumpang (kabupaten Pidie), namun akibat kendala hutan lindung dan kondisi keuangan daerah maka jalan tersebut belum selesai, diharapkan jalan tersebut dapat segera dituntaskan agar dapat dipergunakan secepatnya oleh masyarakat di dua Kabupaten bertetangga, dengan tembusnya jalan tersebut akan membuka keterisolasian dan mempermudah masyarakat berinteraksi dalam segala aspek kehidupan. Berdasarkan hasil survey total panjang jalan Meureudu–Geumpang ± 53 Km, yang sudah dilakukan terobosan sepanjang 18 Km dengan lebar 9 M dan yang sudah diaspal sepanjang 5,5 Km dengan lebar 5 M sedangkan sisanya belum diterobos sepanjang ± 35 Km, hal ini telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Aceh untuk menyediakan biaya pembangunannya sedangkan biaya ganti rugi lahan yang terkena pelebaran akan

menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten atau melalui sumber dana lainnya yang sah.

Periode pemerintahan 2019 s.d 2024 diharapkan jalan Meureudu–Geumpang tersebut dapat tertangani dan segera dituntaskan atau pengaspalan agar dapat dipergunakan secepatnya oleh masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie. Dengan dibukanya jalan tersebut akan membuka keterisolasian Kecamatan Mane dan Geumpang yang mayoritas penduduk berpenghasilan dari sektor perkebunan dan pertanian. Dengan terbukanya akses jalan tersebut maka diharapkan masyarakat memperoleh kemudahan dalam menjual hasil-hasil produksi perkebunan ke Kabupaten Pidie Jaya

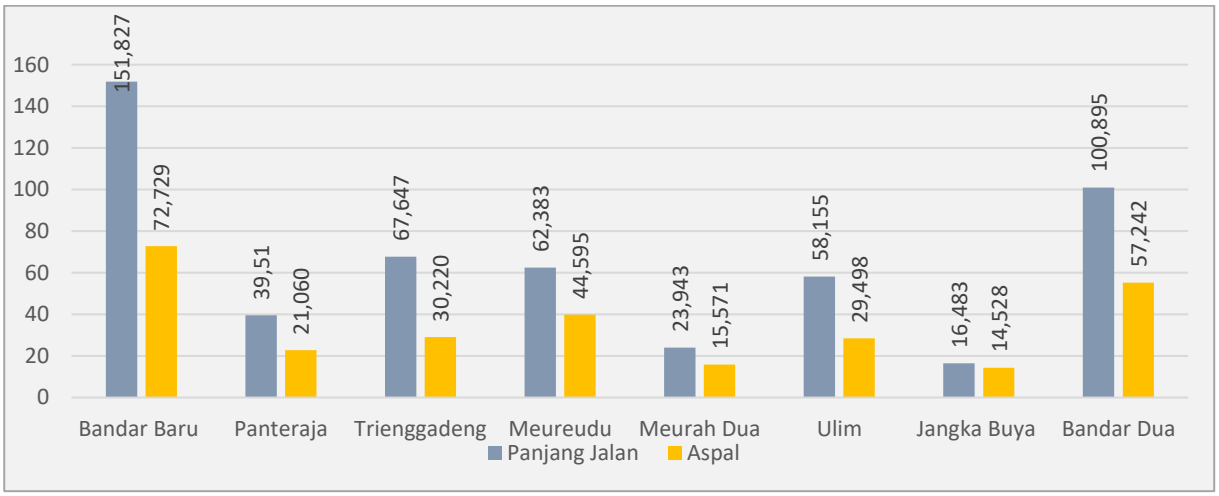


*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

**Gambar 2.65. Perbandingan Jalan Beraspal dalam Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 (Km)**

Gambar 2.65 menunjukan bahwa Kecamatan Bandar Baru dan Bandar Dua yang memiliki ruas jalan kecamatan yang panjang sesuai dengan luas wilayahnya. Panjang ruas jalan ke dua kecamatan tersebut di atas 100 Km. Sedangkan kecamatan lain panjangnya masih di bawah 100 Km. Semua kecamatan persentase penanganan jalan beraspal bervariasi dengan rata-rata mencapai hampir 42%. Ada beberapa kecamatan terlihat pada gambar 2.33 penanganan jalan beraspal sudah diatas 50% seperti kecamatan Bandar Baru dan Bandar Dua.

## B. Irigasi

Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan

air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

**Tabel 2.51.**
**Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Panjang Jaringan Irigasi (Meter) | | | Total Panjang Jaringan Irigasi (Meter) | Luas Baku Sawah (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Primer | Sekunder | Tersier | | |
| 1 | Bandar Baru | 6.450 | 32.900 | 3.500 | 42.850 | 784 |
| 2 | Panteraja | 650 | 3.750 | 1.500 | 5.900 | 40 |
| 3 | Trienggadeng | 2.600 | 10.400 | 5.100 | 18.100 | 283 |
| 4 | Meureudu | 3.590 | 12.260 | 5.900 | 21.750 | 975 |
| 5 | Meurah Dua | 450 | 5.490 | 1.000 | 6.940 | 356 |
| 6 | Ulim | 560 | 8.400 | 8.800 | 17.760 | 424 |
| 7 | Jangka Buya | 580 | 3.000 | 800 | 4.380 | 200 |
| 8 | Bandar Dua | 5.540 | 30.260 | 9.550 | 45.350 | 2.349 |
| **Jumlah** | | **20.420** | **106.460** | **36.150** | **163.030** | **5.411** |

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Pidie Jaya meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Pada akhir tahun 2024 di Kabupaten Pidie jaya terdapat Jaringan Irigasi Primer sepanjang 20.420 meter sedangkan Jaringan irigasi Sekunder sepanjang 106.460 M dengan Luas Baku sawah 5.411 Ha. Sedangkan untuk Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini

**Tabel 2.52.**
**Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024**

| No | Kecamatan/Desa | Luas | Kondisi (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Ha) | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | Bandar Baru | 784 | 45,08 | 18,07 | 21,72 | 15,13 |
| 2 | Panteraja | 40 | 45,5 | 9,8 | 44,7 | 0,04 |
| 3 | Trienggadeng | 283 | 45,04 | 8,91 | 20,32 | 25,73 |
| 4 | Meureudu | 975 | 45,7 | 39,23 | 12,24 | 2,83 |
| 5 | Meurah Dua | 356 | 45 | 11,37 | 17,38 | 26,25 |
| 6 | Ulim | 424 | 45,96 | 13,96 | 12,03 | 28,05 |
| 7 | Jangka Buya | 200 | 44,97 | 27,23 | 16,56 | 11,24 |
| 8 | Bandar Dua | 2.349 | 45 | 20,58 | 15,42 | 19 |
| **Jumlah** | | **5.411** | **45** | **19** | **20** | **16** |

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 meliputi kondisi baik 45 %, sedang 19%, rusak ringan20%, dan rusak berat16%.seperti pada Tabel 2.12 Pada Kecamatan Bandar Baru seluas 784 (Ha) pada kondisi baik sebanyak 45,08%, kondisi sedang 18,07%, kondisi rusak ringan 21,75%, dan Kondisi rusak berat 15,09 %. Kecamatan Panteraja seluas 40 (Ha) pada kondisi baik sebanyak 45,5%, kondisi sedang 9,08%, kondisi rusak ringan 44,7%, dan Kondisi rusak berat 0,04 %. Kecamatan Trienggadeng seluas 283 (Ha) pada kondisi baik

sebanyak 45,04%, kondisi sedang 8,91%, kondisi rusak ringan 20,32%, dan Kondisi rusak berat 25,73%. Kecamatan Meureudu seluas 975 (Ha) pada kondisi baik sebanyak 45,7%, kondisi sedang 39,23%, kondisi rusak ringan 12,24%, dan Kondisi rusak berat 2,83 %. Kecamatan Meurah Dua seluas 356 (Ha) pada kondisi baik sebanyak 45%, kondisi sedang 11,37%, kondisi rusak ringan 17,38%, dan Kondisi rusak berat 26,25 %. Kecamatan Ulim seluas 424 (Ha) pada kondisi baik sebanyak 45,96%, kondisi sedang 13,96%, kondisi rusak ringan 12,03%, dan Kondisi rusak berat 28,05 %. Kecamatan Jangka Buya seluas 200 (Ha) pada kondisi baik sebanyak 44,97%, kondisi sedang 27,23%, kondisi rusak ringan 16,56%, dan Kondisi rusak berat 11,24%. Kecamatan Bandar Dua seluas 200 (Ha) pada kondisi baik sebanyak 45%, kondisi sedang 20,58%, kondisi rusak ringan 15,42%, dan Kondisi rusak berat 19%.

**C. Air Minum dan Sanitasi**

Air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, terutama untuk minum, memasak mencuci, mandi, dan kakus. Menurut Kementerian Kesehatan RI, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum. Oleh sebab itu sumber air minum menggunakan ledeng dapat dikatakan sebagai sumber air minum yang baik.

Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan system fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air, perlu dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Target penyediaan air minum untuk masyarakat dilakukan dengan upaya Pengembangan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 40 Kawasan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota/IKK 400 liter/detik, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Pemekaran/Perluasan Perkotaan 100 liter/detik, Bantuan Program 4 PDAM, Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Nelayan 15 liter/detik, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar 10 liter/detik.

Kondisi pelayanan Air Minum di Kabupaten Pidie Jaya Dari total kapasitas terpasang 4.640 liter/detik air minum perpipaan, baru berproduksi 3.404 liter/detik, masih terdapat idle capacity 1.235 liter/detik. Kebutuhan Sambungan rumah berdasarkan idle capacity sebanyak 151.106 SR. Dalam hal ini masih dibutuhkan penanganan untuk pengembangan jaringan pelayanan dan sambungan rumah serta penambahan kapasitas yang besar untuk pencapaian target pelayanan 100 persen air minum pada tahun 2025.

Pengembangan SPAM yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas. Didalam penyelenggaraannya SPAM dilakukan secara terpadu dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi guna melindungi air baku untuk penyediaan air minum rumah tangga. Keterpaduan tersebut dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi.

Sistem jaringan air minum berupa pengembangan daerah pelayanan terdiri atas: a). Daerah pelayanan sistem perpipaan dari WTP Gampong Beurawang Kecamatan Meureudu dengan kapasitas 40 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Meureudu melayani wilayah Kecamatan Meureudu, wilayah Kecamatan Meurah Dua, sebagian wilayah Kecamatan Ulim, sebagian wilayah Kecamatan Trienggadeng; b). Daerah pelayanan sistem perpipaan dari WTP di Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Panteraja dengan kapasitas 5 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Panteraja, melayani wilayah Kecamatan Panteraja, wilayah Kecamatan Trienggadeng dan sebagian wilayah Kecamatan Bandar Baru; c). Daerah pelayanan sistem perpipaan dari WTP Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim dengan kapasitas 230 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Meureudu yang dialiri dari Gampong Lhok Sandeng Kecamatan Meurah Dua melayani wilayah Kecamatan Ulim, wilayah Kecamatan Meurah Dua, wilayah Kecamatan Meureudu, wilayah Kecamatan Jangka Buya dan wilayah Kecamatan Bandar Dua; d). Pengembangan WTP meliputi: 1). WTP Gampong Jiem-jiem Kecamatan Bandar Baru dengan kapasitas 100 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Panteraja melayani wilayah Kecamatan Bandar Baru, wilayah Kecamatan Panteraja, wilayah Kecamatan Trienggadeng; 2). WTP Gampong Lhok Puuk Kecamatan Pante Raja dengan kapasitas

40 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Panteraja melayani wilayah Kecamatan Panteraja dan wilayah Kecamatan Trienggadeng; e). pengembangan pemanfaatan air tanah dan air sumber lain secara terkendali.

Sampai saat sekarang pusat pelayanan PDAM di Kabupaten Pidie Jaya terdapat di beberapa tempat, yaitu di Meureudu, Panteraja, Penyediaan air bersih untuk wilayah Kabupaten Pidie Jaya dengan memanfaatkan aliran sungai yang tersebar di seluruh wilayah perencanaan. Aliran sungai yang dapat dimanfaatakan sebagai air baku diantaranya Krueng Meureudu dengan debit air dapat melayani air bersih untuk Kecamatan Meureudu dan sekitarnya termasuk Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Ulim, Kecamatan Bandar Dua, dan sebagian Kecamatan Trienggadeng. Sedangkan sumber air baku Krueng Panteraja melayani air bersih untuk Kecamatan Panteraja, Kecamatan Bandar Baru, dan Sebagian wilayah Kecamatan Trienggadeng, proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan kecamatan sampai hingga tahun 2031 disajikan pada Tabel 2.53 berikut.

**Tabel 2.53.**
**Proyeksi Kebutuhan Air Hingga Tahun 2031**

| Kecamatan | Proyeksi Kebutuhan Air Bersih | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | | | 2021 | | | 2026 | | | 2031 | | |
| | Pddk | SR | (L/dt) | Pddk | SR | (L/dt) | Pddk | SR | (L/dt) | Pddk | SR | (L/dt) |
| Bandar Baru | 41.224 | 8.245 | 48 | 47.443 | 9.489 | 55 | 54.600 | 10.920 | 63 | 61.096 | 12.219 | 71 |
| Pante Raja | 9.875 | 1.975 | 11 | 11.365 | 2.273 | 13 | 13.079 | 2.616 | 15 | 15.052 | 3.010 | 17 |
| Trienggadeng | 26.859 | 5.372 | 31 | 30.911 | 6.182 | 36 | 35.574 | 7.115 | 41 | 40.941 | 8.188 | 47 |
| Meureudu | 26.135 | 5.227 | 30 | 30.078 | 6.016 | 35 | 34.615 | 6.923 | 40 | 39.837 | 7.967 | 46 |
| Meurah Dua | 13.650 | 2.730 | 16 | 15.709 | 3.142 | 18 | 18.079 | 3.616 | 21 | 20.806 | 4.161 | 24 |
| U l i m | 18.024 | 3.605 | 21 | 20.744 | 4.149 | 24 | 23.873 | 4.775 | 28 | 27.475 | 5.495 | 32 |
| Jangka Buya | 11.011 | 2.202 | 13 | 12.681 | 2.536 | 15 | 14.594 | 2.919 | 17 | 16.795 | 3.359 | 19 |
| Bandar Dua | 29.603 | 5.921 | 34 | 34.069 | 6.814 | 39 | 39.208 | 7.842 | 45 | 45.123 | 9.025 | 52 |
| **Jumlah** | **176.381** | **35.276** | **204** | **203.000** | **40.600** | **235** | **233.622** | **46.724** | **270** | **267.125** | **53.425** | **309** |

*Sumber: Qanun RTRW Kab. Pidie Jaya 2014-2034*

Upaya peningkatan kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang bersih dan teratur, sementara itu kebersihan dan keteraturan lingkungan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas perumahan yang memadai, salah satunya adalah fasilitas sanitasi yang layak. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. Salah satu indikator dalam melihat kondisi kesehatan lingkungan adalah ketersediaan tempat buang air besar dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah tangga.

Urgensi penyediaan akses sanitasi yang layak khususnya bagi masyarakat perdesaan baik di Indonesia maupun di negara lainnya kian mendesak. Hal inilah

yang memicu PBB menetapkan sanitasi sebagai hak asasi manusia pada tahun 2010 silam. Betapa pentingnya akses sanitasi sehingga tinjauan kesehatan membuktikan bahwa sanitasi yang tidak layak menjadi faktor penyebab penularan berbagai penyakit seperti diare, kolera, disentri, hepatitis A, tifus, polio dan terhambatnya pertumbuhan pada balita.

Sanitasi yang layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan dan memiliki tempat penampungannya. Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumah tangga.

Manyoritas rumah tangga di Kabupaten Pidie Jaya menggunakan jamban/*Water Closet (WC*) dengan kepemilikan *sharing*/komunal, Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) dan Jamban Sehat Permanen (JSP). Secara keseluruhan, persentase masyarakat yang menggunakan fasilitas sanitasi yang layak di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2022 mencapai 62,4 persen.

**D. Perumda Tirta Krueng Meureudu**

Perusahaan Umum Daerah Tirta Krueng Meureudu adalah badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, yang bertanggung jawab menyediakan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya. Air baku untuk proses pengolahan diambil dari Sungai Krueng Meureudu, yang kemudian diproses di Instalasi Pengolahan Air (IPA) sebelum didistribusikan kepada pelanggan. Sejak berdiri melalui Qanun Nomor 5 Tahun 2010, perusahaan ini telah menerima penyertaan modal berupa aset dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan hibah dari Pemerintah Pusat untuk mendukung operasional dan pengembangan layanan. Meski menghadapi tantangan seperti isu keuangan, Perumda Tirta Krueng Meureudu tetap bertujuan untuk memberikan layanan air bersih yang efisien dan berkelanjutan, serta menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Nilai kinerja Perumda Tirta Krueng Meureudu Tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR adalah sebesar 2,29 dengan kategori “Kurang sehat”. Dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat penurunan nilai kinerja dari 2,38 menjadi 2,29 atau menurun 0,09 dengan rincian:

**Tabel 2.54.**
**Hasil Penilaian Kinerja Perumda Tirta Krueng Meureudu**
**Tahun 2022-2023**

| Aspek | Nilai | | Naik/Turun |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | |
| Keuangan | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
| Pelayanan | 0,40 | 0,35 | (0,05) |
| Operasional | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| SDM | 0,71 | 0,67 | (0,04) |
| **Jumlah** | **2,38** | **2,29** | **(0,09)** |

*Sumber : Hasil audit BPKP, 2024*

## E. Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah Kabupaten Pidie Jaya dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Pelayanan umum urusan penataan ruang Kabupaten Pidie Jaya diselenggarakan berdasarkan pada Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034, yang mengambarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat dan kelembagaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten merupakan penjabaran RTRW nasional dan provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah secara keseluruhan, dimana strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan subtansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan sub blok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya sedang proses revisi dan Peninjauaan Kembali (PK) yang menjadi persyaratan dalam melakukan kegiatan revisi. Pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya persentase ketaatan terhadap tata ruang. Ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRW.

#### 2.4.4.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah adalah tempat tinggal manusia yang di dalamnya ada sosialisasi diantara penghuni dengan harapan dapat memberikan rasa aman dan nyaman dan bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, demikian juga fungsi rumah adalah sebagai penunjang untuk mengembangkan diri. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m2. Sedangkan menurut pedoman umum Rumah Sederhana Sehat kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Menurut kementerian kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m2. Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4,4 orang per rumah tangga maka suatu hunian dikatakan layak untuk ditempati di Aceh apabila telah melebihi 44 m2 per rumah. Oleh sebab itu digunakan ukuran rumah lebih dari 50 m2. Secara keseluruhan jumlah Rumah Tinggal di Kabupaten Pidie Jaya terus meningkat selama 4 (empat) tahun terakhir.

Disamping itu pembangunan Infrastruktur pemukiman dan perumahan pada tahun 2022 telah dilakukan pembangunan baru sebayak 46 unit rumah layak huni dan 12 unit rehab dengan berbagai sumber pendanaan. Semua ditujukan untuk masyarakat miskin dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pembangunan dilakukan dengan berbagai sumber pendanaan seperti APBK, Otsus, APBA, dan APBN. Pembangunan dan rehabilitasi rumah masing-masing dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, dan Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya. Kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) hingga tahun 2021 mencapai 3.733 unit.

Pembangunan RLH khusus ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan kriteria tertentu, hal tersebut sangat berbeda dengan pembangunan rumah akibat bencana gempa bumi yang mengakibatkan rumah warga banyak yang rusak. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah membangun sebanyak 2.202 unit

rumah masyarakat yang rusak berat dan 4.542 unit rusak sedang akibat gempa bumi melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pembangunan perumahan pada Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut. Pemerintah pusat telah membangun melalui dana stimulan dengan kisaran harga Rp. 85.000.000,- per rumah rusak berat dan Rp. 20.000.000,- untuk rumah rusak sedang. Program tersebut dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 dengan mekanisme yang telah diatur dan telah tuntas dilaksanakan. Total jumlah pembangunan rumah pasca bencana di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kategori rusak sedang dan rusak berat sebanyak 6.487 unit.

Terkait dengan infrastruktur air limbah pemukiman. Pengembangan sarana dan prasarana air limbah pemukiman dalam meningkatkan derajat kebersihan dan kesehatan warga Pidie Jaya masih relatif rendah. Hal itu ditunjukkan dengan tingkat kepemilikan jamban di Kabupaten Pidie Jaya adalah 69,5 persen dengan rincian 56,1 persen jamban pribadi dan MCK/WC Umum 13,4 persen. Untuk tempat penyaluran akhir tinja rumah tangga manyoritas pembuangan adalah 69,5 persen pemilik kloset, sejumlah 54,5 persen terhubung ke tangki septik, sebanyak 1,0 persen ke pipa sewer, sebesar 2,1 persen cubluk/lobang tanah, sejumlah 0,7 persen langsung ke drainase, 18,6 persen ke sungai/danau/pantai, 1,7 ke kolam/sawah, sejumlah 2,6 persen ke kebun/tanah lapang, dan 18,8 persen masih sembarang.

Kondisi sistem drainase Kabupaten Pidie Jaya secara umum masih belum memadai. Berdasarkan hasil survei lapangan, terlihat bahwa tingkat pelayanan sistem drainase kota masih rendah. Kondisi ini dapat dilihat terutama pada kawasan perdagangan dan permukiman penduduk. Disamping itu masih terdapat beberapa daerah yang masih dalam katagori rawan banjir, baik itu yang disebabkan oleh air sungai yang meluap maupun air hujan. Beberapa faktor penyebab rendahnya tingkat pelayanan sistem drainase Kabupaten Pidie Jaya dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

- Banyaknya drainase yang tersumbat, baik oleh sedimentasi maupun akibat penumpukan limbah rumah tangga dan sampah;
- Masih terdapat banyak rumah tangga yang belum memiliki saluran drainase;

Selain berfungsi sebagai penyalur air hujan, saluran drainase di beberapa kawasan permukiman di Kota Meureudu juga berfungsi sebagai penyalur air bekas mandi, mencuci, dan masak. Air limbah tersebut disalurkan langsung ke saluran-saluran drainase di tepi jalan yang umumnya terbuka. Panjang dan Kondisi Drainase

Perkotaan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 53.299 m dengan persentase 26,88 % dalam kondisi baik dan 73,12 dalam kondisi kurang baik.

**A. Penanganan Kawasan Kumuh**

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah mengambil langkah strategis untuk mengatasi kawasan kumuh melalui berbagai program terpadu. Strategi utamanya berlandaskan pada dokumen perencanaan yang kuat, yaitu Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). Melalui dokumen ini, Pemkab menetapkan dua lokasi prioritas di kawasan Keude Meureudu dan Panteraja untuk penanganan. Selain itu, ditetapkan pula Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya No 96 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 652 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam Kabupaten Pidie Jaya yang menetapkan 66 desa di kabupaten Pidie Jaya masuk dalam kawasan kumuh. berdasarkah hasil monitoring kelapangan, maka diperoleh kondisi kawasan kumuh di Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut.

**Tabel 2.55.**
**Kondisi Kawan Kumuh di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025**

| No | Aspek | Isu Strategis |
|---|---|---|
| 1 | Kondisi Bangunan Gedung | 58,44 % / 7.750 unit rumah tidak teratur |
| | | 19,29% / 2.558 unit rumah tidak sesuai dengan persyaratan teknis atau rumah tidak layak huni |
| | | Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan |
| | | Mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang dialokasikan sebagai kawasan permukiman. |
| | | Membangun kesadaran masyarakat pada kawasan padat agar tidak berkembang menjadi kawasan kumuh. |
| 2 | Kondisi Jalan Lingkungan | 8,01 % /15.197,08 meter kebutuhan akan jalan lingkungan baru |
| | | 42,86 % / 81.335,82 meter jalan lingkungan mengalami kerusakan |
| | | Jalan antar desa masih memerlukan pengembangan / mengingat konstruksi jaringan jalan yang belum memadai di dalam permukiman. |
| 3 | Kondisi Proteksi Kebakaran | 60,82 % / 8.066 Unit masyarakat tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran |
| | | 96,62 % / 12.813 Unit masyarakat tidak memiliki sarana proteksi kebakaran |
| 4 | Kondisi Penyediaan Air Minum | 38,45 % / 6.130 KK tidak memiliki akses aman air minum tidak berbau dan tidak berasa |
| | | 34,71 % / 5.534 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum 60 liter/orang/hari |
| | | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kabupaten Pidie Jaya |
| | | PDAM Tirta Krueng Meureudu belum sepenuhnya dapat melayani kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan, banyak yang beralih ke sumur Bor, sumur digali dengan pompa dan Penampungan Air hujan |
| 5 | Kondisi Drainase Lingkungan | 8.30 Ha genangan di permukiman kumuh |
| | | 16,43 % / 24.051,62 meter kebutuhan drainase lingkungan baru |
| | | 44,30 % / 57.928,41 meter drainase lingkungan mengalami kerusakan |
| | | Beberapa ruas jalan tidak dilengkapi oleh jaringan drainase baik jaringan |

| No | Aspek | Isu Strategis |
|---|---|---|
| | | sekunder maupun tersier di beberapa ruas Kabupaten Pidie Jaya |
| | | Sebagian besar drainase mengalami penyumbatan atau pendangkalan (sedimentasi). |
| | | Kondisi lahan yang berkontur menyebabkan fungsi drainase tidak maksimal |
| 6 | Kondisi Pengelolaan Air Limbah | 17,65 % / 2.814 KK masyarakat tidak memiliki sistem pengelolaan air limbah yang sesuai standar teknis |
| | | 17,65 % / 2.814 KK masyarakat sesuai memiliki sistem pengelolaan air limbah yang sesuai standar teknis |
| | | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik |
| | | Belum optimalnya penggunaan tangki septik aman |
| 7 | Kondisi Pengelolaan Persampahan | 96,29 % / 15.354 KK masyarakat tidak memiliki sistem prasarana dan sarana persampahan sesuai standar teknis |
| | | 89,75 % / 14.309 KK masyarakat tidak memiliki sistem pengelolaan persampahan yang sesuai standar teknis |
| | | Belum optimalnya kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah |
| | | Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah |

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pidie Jaya, 2025*

### 2.4.4.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

**Tabel 2.56.**
**Rasio Jumlah Satpol PP dan WH**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020–2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah Polisi Pamong Praja (Orang) | 61 | 57 | 57 | 49 | 49 |
| 2. | Jumlah Wilayatul Hisbah (Orang) | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 3. | Jumlah THL (Orang) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Jumlah Penduduk (orang) | 162.632 | 161.901 | 162.771 | 164.000 | 165.008 |
| 4. | Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Rasio Wilayatul Hisbah per 10.000 penduduk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

*Sumber : Satpol PP dan WH Kabupten Pidie Jaya Tahun 2025*

Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 sampai 2024 adanya penurunan jumlah tenaga 12 orang dan tidak dilakukan perekrutan kembali sampai akhir tahun 2024

karena ketebatasan anggaran. Jumlah anggota WH pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah sangat kurang sehingga penyelesaian kasus jarimah di kabupaten Pidie Jaya sangat rendah.

Rasio Anggota Banpol PP dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya masih kurang yaitu 1 orang /10.0000 penduduk, dari 165.008 orang Penduduk, maka kebutuhan Banpol PP 2 orang. Untuk memenuhi pelayanan Trantibum Linmas dibutuhkan tenaga sebanyak 120 orang. Kebutuhan Tenaga WH pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 36 orang yang tersedia 8 orang , adanya kekurangan 28 orang dan Tenaga Harian Lepas Sebanyak 3 Orang. Di samping anggota Banpol PP dan WH juga terdapat kekurangan dari tenaga teknis lainnya, seperti tenaga PPNS , Intel dan Jabatan Fungsional Satpol PP lainnya.

Tingkat penyelenggaraan Trantibum melalui sosialisasi dan Penegakan Qanun Peraturan Kepala Daerah masih rendah dari jumlah kasus yang dilaporkan hanya 70% yang dapat ditangani dari akibat kekurangan SDM dan Anggaran yang di sediakan. Sehingga capaian SPM trantibum belum memenuhi target

**Tabel 2.57.**
**Cakupan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Bidang | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Trantibum | 36 | 20 | 18 | 18 | 11 |
| 2 | Penegakan Perda | 20 | 12 | 12 | 8 | 6 |
| 3 | Penegakan Perda Syariah | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | Penyelesaian Konflik | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Jumlah Pelanggaran Syariat Islam | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 |

*Sumber : Satpol PP dan WH Kabupten Pidie Jaya Tahun 2025*

### 2.4.4.2.6. Penanganan Bencana

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian memungkinkan adanya perhitungan capaian upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut.

Beberapa tahun terakhir Kabupaten Pidie Jaya mengalami beberapa bencana alam seperti kebakaran, Gempa Bumi, banjir dan longsor, angin kencang dan orang hilang. Kejadian bencana dan penanganan yang dilakukan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020-2024 seperti pada Tabel 2.58 berikut.

**Tabel 2.58.**
**Kejadian dan Penanganan Bencana di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No. | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kebakaran | 4 | 13 | 15 | 34 | 13 |
| 2 | Banjir dan Longsor | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Angin Kencang | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | Pencarian Orang Hilang | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | Jumlah kejadian bencana | 9 | 28 | 26 | 41 | 33 |

*Sumber : BPBD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Dari Tabel diatas, jumlah kejadian bencana terus meningkat. Menurut data BNPB tahun 2020-2024, Kabupaten Pidie Jaya termasuk daerah dengan tingkat kapasitas penanganan bencana sedang dengan trend Indeks Resiko Bencana (IRB) sebesar 137,6.

### 2.4.4.2.7. Sosial

Angka kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2023 masih sangat tinggi, yaitu 18,40 persen. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah, hal ini tercermin dari banyaknya kasus PMKS seperti pengemis, yatim piatu, anak terlantar, orang tua jumpo yang tidak terurus dan kelompok rentan lainnya masih perlu perhatian pemerintah Kabupaten Pidie Jaya secara serius.

Kondisi keluarga sejahtera dan sosial di Kabupaten Pidie Jaya untuk masa mendatang diharapkan akan lebih baik dengan melakukan berbagai upaya untuk mmeningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh antara lain : Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, meningkatkan pembinaan para penyandang cacat dan trauma, penyediaan dan pembinaan panti asuhan/panti jompo, pembinaan eks penyandang penyakit sosial (ex. Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), meningkatkan sumber daya kelembagaan kesejahteraan sosial, dan menerapkan standar pelayanan minimal kesejahteraan sosial kepada semua PMKS.

Sarana sosial merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengindentifikasi adanya pusat perkembangan kegiatan sosial. Sarana sosial yang dimaksud seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah aman. Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang

beruntung. Fasilitas sosial yang diberikan oleh pemerintah merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk memelihara masyarakat yang kurang beruntung. Berikut merupakan data sarana sosial yang tersedia di Kabupaten Pidie Jaya

**Tabel 2.59.**
**Jumlah Sarana Sosial yang Tersedia**
**di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Panti Asuhan | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 2 | Panti Jompo | - | - | - | - | - |
| 3 | Rumah Aman | - | - | - | - | - |
| 4 | Rumah Tunggu Kelahiran | - | - | - | - | - |

*Sumber : Dinsos P3A Kab. Pidie Jaya Tahun 2025*

### 2.4.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

#### 2.4.4.2.1. Tenaga Kerja

Tingkat Untuk mencegah ketimpangan sosial jumlah penduduk harus diimbangi dengan kemajuan dibidang ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan Kabupaten Pidie Jaya diperoleh dari hasil SAKERNAS tahunan yang dilaksanakan setiap bulan Agustus. Angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpartisipasi aktif dalam pasar kerja, baik yang mempunyai pekerjaan maupun penduduk yang mencari pekerjaan (pengangguran). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.60 berikut:

**Tabel 2.60.**
**Indikator Ketenagakerjaan Pidie Jaya 2020 - 2024**

| Rincian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angkatan Kerja | 73.331 | 69.359 | 70.905 | 73.248 | 74.392 |
| Bekerja | 68.507 | 66.881 | 67.784 | 70.066 | 71.550 |
| Pengangguran | 4.824 | 2.478 | 3.121 | 3.182 | 2.842 |
| Bukan Angkatan Kerja | 44.692 | 50.706 | 51.578 | 49.252 | - |
| TPAK (%) | 62,13 | 57,77 | 57,89 | 59,79 | - |
| TPT (%) | 6,58 | 3,57 | 4,40 | 4,34 | 3,82 |

*Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Pada tahun 2019, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 69.845 orang. Dari jumlah tersebut, 66.814 orang berhasil memperoleh pekerjaan, menciptakan peluang pekerjaan bagi banyak individu. Meskipun demikian, terdapat 3.031 orang yang menghadapi pengangguran. Selain itu, ada sekitar 46.160 orang yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, mungkin disebabkan oleh pendidikan, pensiun, atau alasan lainnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun ini adalah sekitar 60,21%, dan tingkat pengangguran terbuka sekitar 4,34%.

Tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan dalam jumlah angkatan kerja menjadi 73.331 orang. Dari jumlah tersebut, 68.507 orang memperoleh pekerjaan, tetapi masih terdapat 4.824 orang yang menghadapi pengangguran. Untuk data bukan angkatan kerja belum bisa ditampilkan karena belumadanya update terbaru dari Sakernas Bukan angkatan kerja mengalami penurunan menjadi 44.692 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat sedikit menjadi sekitar 62,13%, dan tingkat pengangguran terbuka naik menjadi sekitar 6,58%.

Kemudian, pada tahun 2021, angkatan kerja mengalami penurunan yang lebih signifikan menjadi 69.359 orang. Dari jumlah tersebut, 66.881 orang berhasil mendapatkan pekerjaan, pada tahun tersebut pengangguran menurun menjadi 2.478 orang. Meskipun demikian, bukan angkatan kerja mengalami peningkatan menjadi 50.706 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun ini turun menjadi sekitar 57, 77%, sementara tingkat pengangguran terbuka menurun sanagta baik karena menjadi sekitar 3,57%.

Pada tahun 2022, jumlah angkatan kerja kembali naik menjadi 70. 905 orang. Meskipun jumlah ini lebih tinggi, 67.784 orang berhasil mendapatkan pekerjaan, dan pengangguran naik menjadi 3.121 orang. Orang yang tidak termasuk dalam angkatan kerja mengalami peningkatan menjadi 51.578 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja naik sedikit menjadi sekitar 57,89%, dan tingkat pengangguran terbuka naik menjadi sekitar 4.40%.

Selanjutnya, pada tahun 2023, angkatan kerja mengalami peningkatan yang menjadi 73.248 orang. Dari jumlah tersebut, 70.066 orang berhasil mendapatkan pekerjaan. Pengangguran juga kembali naik sedikit menjadi 3.182 orang. Orang yang tidak termasuk dalam angkatan kerja mengalami penurunan menjadi 49.252 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka pada tahun ini masing-masing adalah sekitar 59.79% dan 4,34%.

Terakhir, untuk tahun 2024, angkatan kerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 74.392 orang. Dari jumlah tersebut, 71.550 orang berhasil mendapatkan pekerjaan. Pengangguran juga kembali menurun sedikit menjadi 2.842 orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,82%. Terkait data bukan angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja belum adanya data terbaru yang tersedia di SAKERNAS BPS yang diolah oleh PUSDATIK KEMNAKER, sehingga data tersebut akan kami informasikan dikemudian hari apabila data telah tersedia.

Dalam kurun lima tahun ini, Kabupaten Pidie Jaya mengalami variasi dalam hal angkatan kerja, tingkat partisipasi, dan tingkat pengangguran. Perubahan ini

bisa mencerminkan faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi kondisi perekonomian dan lapangan kerja di wilayah ini.

#### 2.4.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial terutama persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen.

**Tabel 2.61.**
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pidie Jaya | 52,58 | 52,53 | 51,72 | 52,15 | 55,98 |
| 2 | Aceh | 69,04 | 68,91 | 69,74 | 63,56 | 61,78 |
| 3 | Indonesia | 75,57 | 76,26 | 76,59 | 76,9 | 77,62 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025*

Indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Pidie Jaya terus meningkat dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 IDG Kabupaten Pidie Jaya sebesar 55,98 lebih rendah dibandingkan IDG Aceh yaitu 61,78. Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berupaya meningkatkan mutu hidup perempuan dan anak, dengan melakukan berbagai terobosan dan inovasi serta fokus kepada beberapa kebijakan dan program prioritas terutama untuk menguatkan mutu keluarga dan perannya dalam pencegahan kekerasan (termasuk perkawinan anak dan pekerja anak), menguatkan penerapan strategi pengarusutamaan gender dan peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah juga memprioritaskan penguatan sinergi dan jejaring antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga masyarakat, dunia usaha, serta media.

#### 2.4.4.2.3. Pangan

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebut bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian hak asasi manusia yang di jamin dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena pangan selain dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan psikologis, pangan juga dapat membentuk SDM sebagai aset pembangunan bangsa dan negara. Masalah pangan

akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Kondisi desa rawan pangan dipengaruhi oleh beberapa indikator, antara lain: (a) indikator luas lahan pertanian dan jumlah sarana dan prasarana (Susenas); (b) indikator akses pangan baik individu maupun umum (Susenas); (c) indikator ketersediaan dan pemanfaatan air bersih serta jumlah tenaga kesehatan (Susenas); (d) indikator pendukung, diantaranya luas wilayah, jumlah penduduk desa dan jumlah rumah tangga (BPS).

Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein. Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu dicari konsep penanganannya yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

**Tabel 2.62.**
**Data Desa Rawan Pangan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Jumlah Desa | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sangat Rentan Pangan | Rentan Pangan | Kurang Rentan Pangan | Kurang Tahan Pangan | Tahan Pangan | Sangat Tahan Pangan | Jumlah Desa |
| 1 | Bandar Baru | 0 | 7 | 9 | 7 | 13 | 7 | 43 |
| 2 | Panteraja | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 3 | Trienggadeng | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 8 | 27 |
| 4 | Meureudu | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 30 |
| 5 | Meurah Dua | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 19 |
| 6 | Ulim | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 30 |
| 7 | Jangka Buya | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 18 |
| 8 | Bandar Dua | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | 45 |
| **Total** | | **1** | **17** | **20** | **32** | **56** | **96** | **222** |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Dari Tabel 2.61 diatas diketahui bahwa, terdapat 1 desa dalam kategori sangat rentan pangan yaitu Lhok Sandeng Kecamatan Meurah Dua, 17 desa dalam kategori rentan pangan, 20 desa dalam kategori kurang rentan pangan, 32 desa dalam kategori

kurang tahan pangan, 56 desa dalam kategori tahan pangan, dan 96 desa dalam kategori sangat tahan pangan.

Salah satu penanganan untuk daerah rawan pangan adalah dengan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG adalah suatu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/ informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.

Terobosan untuk penanggulangan kerawanan pangan dan diversifikasi pangan adalah dengan pembinaan Kelompok Wanita Tani. Pemberdayaan dilakukan dengan pengembangan sayur-sayuran, perikanan dan ternak. Jumlah KWT di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.63 berikut

**Tabel 2.63.**
**Jumlah KWT Aktif di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024**

| No | Pidie Jaya | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | KWT Aktif (klp) | 23 | 19 | 18 | 15 | 10 | 8 |
| 2 | KWT (klp) | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 3 | Persentase KWT Aktif (%) | 11,11 | 9,18 | 8,70 | 7,25 | 4,83 | 3,86 |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 (diolah)*

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama periode 2019 hingga 2024, Pidie Jaya mencatat data yang menunjukkan tingkat partisipasi dan keterlibatan yang beragam dari Kelompok Wanita Tani (KWT). Pada tahun 2019, KWT yang aktif 11.11% dari total 207 kelompok KWT, tetapi angka ini sedikit menurun menjadi 9.18% pada tahun 2020, pada tahun-tahun berikutnya, persentase KWT aktif cenderung mengalami penurunan, mencapai 3.86% pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan alokasi bantuan sarana dan pembinaan KWT semakin sedikit terlebih untuk pemberdayaan KWT ini lebih bersumber dari dana pusat melalui kegitan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pangan utama adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan

sehat. Data ketersediaan pangan utama di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.64 berikut.

**Tabel 2.64.**
**Ketersediaan Pangan Utama**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024**

| No | Pidie Jaya | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Produksi Gabah (Ton) | 97.455 | 110.579 | 98.228 | 93.814 | 84.439 | 103.521 |
| 2 | Ketersediaan Beras(Ton) | 62.322 | 70.715 | 62.817 | 59.994 | 48.644 | 59.638 |
| 3 | Jumlah Penduduk (Jiwa) | 161.415 | 161.415 | 160.327 | 160.828 | 163.591 | 166.467 |
| 4 | Total Konsumsi Beras(Ton/Jiwa Tahun) | 19.617 | 20.262 | 18.353 | 18.353 | 20.141 | 20.495 |
| 5 | Surplus/Cadangan Pangan (Ton) | 42.706 | 50.453 | 44.464 | 41.641 | 28.503 | 39.143 |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*
**) Angka Sementara*

Selama periode dari tahun 2019 hingga 2024, data yang terkumpul dari Pidie Jaya menunjukkan gambaran yang menarik mengenai produksi pangan dan ketersediaan beras di wilayah tersebut. Naik dan turunnya jumlah produksi Gabah dan Beras tergantung dari luas tanam dan luas panen pada tahun berjalan. Namun yang perlu diketahui bahwa Kabupaten Pidie Jaya selalu mengalami surplus gabah/beras.

Puncak produksi terjadi pada tahun 2020, dengan 110.579 ton gabah dan 70.715 ton beras. Meskipun jumlah penduduk stabil, total konsumsi beras per jiwa per tahun juga mengalami peningkatan, mencapai 20.262 ton pada tahun 2020. Hal ini menghasilkan surplus beras yang signifikan sekitar 50.453 ton.

Pada tahun-tahun terakhir periode tersebut, yaitu 2021, 2022 dan 2023 produksi gabah dan ketersediaan beras kembali mengalami penurunan. Dan meningkat Kembali di tahun 2024. Meskipun surplus beras mengalami penurunan dari tahun sebelumnyaPidie Jaya masih memiliki cadangan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Data ini memberikan informasi penting tentang ketahanan pangan di wilayah tersebut dan dapat digunakan untuk perencanaan dan kebijakan pangan di masa depan.




*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

**Gambar 2.66. Surplus/Cadangan Beras di Kabupaten Pidie Jaya (Ton) 2019-2024**

Cadangan pangan Kabupaten Pidie Jaya untuk tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dari 28.503 ton menjadi 39.143 ton.

### 2.4.4.2.4. Pertanahan

Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya termasuk SKPK yang baru terbentuk berdasarkan Qanun nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya dan mulai aktif melaksanakan kegiatannya di pertengahan tahun 2021. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya sudah berupaya menginventarisir data-data yang terkait dengan urusan pertanahan di Kabupaten Pidie Jaya.

Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran yang berbeda dalam pengelolaan pertanahan. Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pertanahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di tingkat Kabupaten dan fokus pada administrasi tanah pemerintah daerah, termasuk pendaftaran tanah, pengukuran, pemetaan, dan penyelesaian masalah sengketa tanah pemerintah daerah.

Sebaliknya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki wewenang yang lebih luas dan strategis di tingkat nasional. BPN menyusun dan menetapkan kebijakan pertanahan nasional, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut di seluruh Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk pendaftaran tanah, sertifikasi, dan pemetaan tanah secara menyeluruh, serta menangani sengketa tanah yang melibatkan beberapa daerah. BPN berfungsi sebagai lembaga pengatur utama yang

menetapkan standar dan prosedur nasional, sementara Dinas Pertanahan menerapkan dan menyesuaikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal di Kabupaten Pidie Jaya. Cakupan Pelayana Bidang Pertanahan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel tabel 2.65 berikut:

**Tabel 2.65.**
**Cakupan Pelayana Bidang Pertanahan**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang bersertifikat (bidang) | 87 | 212 | 212 | 229 |
| 2 | Jumlah Tanah Pemda (Bidang) | 241 | 360 | 361 | 361 |
| 3 | Persentase Bidang Tanah Pemkab yang Bersertifikat (%) | 36 | 58,8 | 58,7 | 63,4 |

*Sumber : Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya, 2025*

Dari tabel 2.64 diatas dapat di jelaskan bahwa Dinas Pertanahan Pidie Jaya selama tahun 2022-2024 telah menyelesaikan urusan hak-hak atas tanah pemerintah. Tepatnya pada tahun 2024 Dinas Pertanahan telah menginventarisasikan pengurusan administrasi aset tanah pemerintah sebanyak 229, yang nantinya diserahkan ke bidang aset keuangan.

Dinas Pertanahan selama 2022-2024 telah banyak melakukan pendampingan pengukuran, namun kebanyakan pemdapingan pengukuran tanah waqaf Kemenag. Sedangkan untuk aset pemda, kemudian pendapingan pengukuran di tiga lokasi rencana pengadaan tanah pemda yang berlokasi di Bunot, Alue Ketapang dan Beurawang. Untuk saat sekarang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan sertifikasi terhadap tanah pemkab secara bertahap. Upaya tersebut memiliki berbagai kendala diantaranya sulitnya memperoleh dokumen untuk pengurusan sertifikat dan banyaknya tanah aset pemkab yang telah dikuasai oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengupayakan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Beberapa kewenangan yang telah dilaksanakan adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, redistribusi tanah, penangan konflik, sengketa dan perkara pertanahan.

### 2.4.4.2.5. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup

manusia mempunyai keterbatasan yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana.

## A. Penanganan Sampah

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam melayani persampahan diperlukan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan antara lain alat angkut sampah, TPS (Tempat Pembuangan Sementara), system transfer depo, dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Wilayah yang memiliki aktivitas kegiatan yang relatif tinggi seperti Kecamatan Meureudu, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Bandar Baru, dan Bandar Dua terutama khususnya untuk ibukota kecamatan. Wilayah tersebut potensial dalam memproduksi sampah, sehingga wilayah ini merupakan prioritas pelayanan prasarana pengelolaan lingkungan.

Dengan demikian rencana jaringan sistem persampahan di Kabupaten Pidie Jaya terdiri atas: a). Penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan Kabupaten; b). Pengembangan tekonologi komposing sampah organik dan sistem Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang) atau 3R lainnya sesuai kawasan permukiman; c). Tempat Penampungan Sementara ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat meliputi: pasar; permukiman; perkantoran; dan fasilitas sosial lainnya. d). Optimalisasi TPS di Desa Cot Langien Kecamatan Bandar Baru. e). Pengembangan TPA di Rungkom Kecamatan Meureudu. f). Penyediaan TPA di Blang Awe seluas 10 Ha. g). Pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah; dan h). Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.

Jumlah volume sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kabupaten Pidie Jaya yang ditangani selama lima tahun (2018-2022) mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Kenaikan volume sampah setiap tahunnya dikarenakan penambahan jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat. Dari tabel di bawah dapat dijelaskan bahwa jumlah volume sampah pada tahun 2020 sebanyak 27,957 ton, tahun 2021 sebanyak 28,488 ton, tahun 2022 sebanyak 29,029 ton, tahun 2023 sebanyak 29,831 ton dan di tahun 2024 sebanyak 30,143 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.66 berikut.

**Tabel 2.66.**
**Volume dan Sarana Persampahan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020- 2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Volume Sampah | 27.957 | 28.488 | 29.029 | 29.831 | 30.143 |
| 2 | Jumlah mobil pengangkut sampah | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 3 | Jumlah gerobak sampah | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pidie Jaya Tahun 2025*

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menetapkan Qanun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, Kemudian telah ditetapkan pula Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Restribusi Kabupaten. Kedua qanun tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Pidie Jaya. Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan persampahan saat ini yaitu Mobil pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari Dump Truk, Mobil Amroll dan Mobil L-300. Jumlahnya pada tahun 2020 sebanyak 10 unit, mengalami kerusakan 1 unit di tahun 2023 sehingga menjadi 9 unit. Gerobak sampah berupa Viar roda tiga. pada Tahun 2020 berjumlah 17 unit, hingga akhir tahun 2024 jumlahnya tetap 17 unit dan belum ada penambahan hingga sekarang.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan layanan penampungan dan pengangkutan serta pengelolaan akhir, yaitu dengan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dari Sistem Open Dumping dan Controlled Dumping menjadi Sanitary Landfill. Adapun upaya pengelolaan persampahan dilakukan dalam 2, yaitu program fisik dan non fisik dengan rincian sebagai berikut: a). Pengelolaan di Sumber (Fisik) berupa; 1). Pengadaan sarana layanan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPPS); 2). Pengadaan armada angkutan berupa Truck Pengangkutan Sampah, Armroll, Gerobak Sampah dan tong sampah; b). Pengelolaan Akhir (Fisik), yaitu ; 1). Peningkatan Pelayanan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); a). Program Non Fisik, yaitu; b). Kampanye edukasi dan promosi; c). Advokasi pemda (eksekutif dan legislative); d). Bantuan teknis kelembagaan; e). Peningkatan kapasitas SDM; f). Sinkronisasi lintas sektor (implementasi/pendanaan). Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah mengesahkan Qanun Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pidie Jaya sebagai landasan hukum pengelolaan persampahan di lingkup Kabupaten Pidie Jaya.

## B. Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jumlah Luas RTH minimal 30% dari jumlah wilayah. Hal itu untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota. Luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya 95.210,92 Ha. Luas Wilayah Kota adalah 14.396 Ha. Luas RTH dari Tahun 2020-2024 adalah 147.8 Ha dengan persentase sebesar 17% yang ditangani. Luas RTH Taman Kota yang dikelola adalah 10 Ha dan luas RTH Lingkungan Perkantoran yang dikelola adalah 18 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.67 berikut :

**Tabel 2.67.**
**Capaian Indikator Lingkungan Hidup**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Luas RTH (ha) | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 |
| 2 | Luas Wilayah Kota (ha) | 156,74 | 156,74 | 156,74 | 156,74 | 156,74 |
| 3 | Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten | 24 | 45 | 22 | 8 | 20 |
| 4 | Indeks kualitas Air (IKA) | n/a | n/a | 46,67 | 63,33 | 63,33 |
| 5 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | n/a | n/a | 92,01 | 92,15 | 92,30 |
| 6 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | n/a | n/a | 75,40 | 76,67 | 77,25 |
| 7 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 51,32 | 83,52 | 71,32 | 77,92 | 76,29 |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya kepada Penanggung Jawab Usaha berupa dokumen UKL-UPL dan SPPL. Selama lima tahun (2020-2024) jumlah dokumen yang dikeluarkan sebanyak 119 dokumen, dengan rincian pada tahun 2020 sebanyak 24 dokumen, tahun 2021 sebanyak 45 dokumen, tahun 2022 sebanyak 22 dokumen, tahun 2023 sebanyak 8 dokumen dan tahun 2024 sebanyak 20 dokumen. Terjadi penurunan jumlah izin yang dikeluarkan pada tahun 2023 dikarena pengurusan izin sudah melalui sistem OSS-RBA (Online Singel Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk MHA dan Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tidak tersedia data.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari dari tiga parameter uji yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2020 adalah 51,32. Tahun 2021 adalah 83,52. Tahun 2022 adalah 71,32. Tahun 2023 adalah 77,92. Perhitugan ini berdasarakan hasil pengujian laboratorium atau perhitungan kualitas udara, air sungai dan tutupan lahan hutan. sedangkan untuk tahun 2024 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya adalah 76,29. dan untuk pengujian sudah dilakukan berdasarkan parameter uji masing-masing indeks, yaitu IKA adalah 63,33. IKU adalah 92,30. IKTL adalah 77,25.

### 2.4.4.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Administrasi Kependudukan di lakukan dalam rangka Pencapaian Target cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan secara Nasional. Dalam pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan tahun 2024 telah menghasilkan pelayanan kepada masyarakat berupa penerbitan KK sebanyak 51.122 Lembar ( sampai tahun 2024) dan Cetak KIA 31.532 Keping (Sampai desember 2024) cetak KTP sebanyak 114.172 keping dan penduduk yang belum mencetak KTP tetapi telah dikeluarkan surat keterangan penganti KTP hingga 30 desember 2024 sebanyak 0 lembar, Perekaman KTP-el sebanyak 114.172 Jiwa, Penerbitan SKPWNI Pindah Sebanyak 1.844 Lembar sedangkan Penerbitan SKPWNI Datang sebanyak 1.625 lembar Untuk akta kelahiran tahun 2024 tercetak 3.973 lembar sedangkan Akta Kematian Tahun 2024 hanya dikeluarkan sebanyak 899 lembar.

Untuk Kartu Identitas Anak sudah mulai di cetak tahun 2019 sebanyak 32.226 lembar atau 65,07% dari jumlah penduduk 0-17 tahun. Seluruh pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak di pungut biaya alias Gratis ,ini mulai berlaku bulan februari tahun 2014 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 900/ 326 /SJ, tanggal 17 Januari 2014. Untuk Total Penerbitan Dokumen Kependudukan sampai dengan Akhir Tahun 2023, seperti tersajikan dalam tabel 2.68 berikut ini.

**Tabel 2.68.**
**Jumlah KTP dan Akta yang di Terbitkan**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Kartu Tanda Penduduk | 17.246 | 17.331 | 17.331 | 13.462 | 12.875 |
| 2. | Akta Kelahiran | 4.923 | 5.491 | 4.189 | 4.888 | 3.973 |
| 3. | Akta Kematian | 722 | 1.412 | 1.029 | 988 | 899 |
| 4. | Jumlah Kartu Keluarga | 15.566 | 13.111 | 12.111 | 13.111 | 1.122 |
| 5. | Kartu Identitas Anak (KIA) | 27.438 | 6.969 | 0 | 6.532 | 1.929 |
| 6. | Jumlah Penduduk | 162.174 | 159.829 | 160.828 | 163.591 | 166.517 |
| 7. | Jumlah Perekaman KTP-el | 20.208 | 3.939 | 3.939 | 3.548 | 3.585 |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

### 2.4.4.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

**A. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 18 Tahn 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Menyebutkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertugas Membantu Kepala Desa Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat terkait Perencanaan Pembangunan Desa dan Menggerakkan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dengan Swadaya Gotong Royong. Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa Paling sedikit:

a. Rukun Tetangga,
b. Rukun Warga,
c. Pemberdayaan dan Kesejahtreaan Kelurga
d. Karang taruna,
e. Pos Pelayanan Terpadu
f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Oleh karena itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat perlu di kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.

**Tabel 2.69.**
**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah LPM | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 2 | Jumlah desa | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 3 | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan (LPM) | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |

*Sumber : DPMG Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

**B. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Preseden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Keejahteraan Keluarga

Gerakakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah Gerakan Dalam Pembangunan Masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, Menuju Terwujudnya Keluarga Yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadran hukum dan lingkungan.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasayarakatan lainnya berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Oleh karena itu perlu pembinaan kepada PKK Kecamatan dan PKK Gampong.

**Tabel 2.70.**
**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Kelompok PKK | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 2 | Jumlah desa | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 3 | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK | 30 | 32 | 37 | 40 | 50 |

*Sumber : DPMG Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pidie Jaya adalah organisasi sosial yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program pemberdayaan. PKK bekerja sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, khususnya keluarga, melalui pendekatan holistik dan partisipatif.

Tugas utama PKK Kabupaten Pidie Jaya meliputi peningkatan kesejahteraan keluarga melalui program kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial; pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan; serta penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan anggota keluarga. Selain itu, PKK Kabupaten Pidie Jaya juga fokus pada kesehatan masyarakat dengan mengorganisir posyandu dan kampanye kesehatan, pengembangan ekonomi melalui usaha kecil dan menengah, serta pelestarian lingkungan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, PKK dibagi dalam beberapa Pokja: Pokja Kesehatan, yang menangani program kesehatan keluarga; Pokja Pendidikan dan Keterampilan, yang mengadakan pelatihan dan pendidikan; Pokja Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, yang mengembangkan ekonomi produktif; Pokja Lingkungan Hidup dan Pelestarian Budaya, yang menerapkan program pelestarian lingkungan dan budaya; dan Pokja Hukum dan Perlindungan Anak, yang berfokus pada perlindungan hukum dan hak-hak anak. Setiap Pokja berperan aktif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan sinergi antar berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Di Kabupaten Pidie Jaya, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) memiliki beberapa jenis kelompok binaan yang fokus pada berbagai aspek pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis kelompok binaan PKK di Kabupaten Pidie Jaya:

1. Kelompok Posyandu, Kelompok yang berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan penyuluhan kesehatan.
2. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan keluarga melalui pelatihan usaha, pengembangan usaha kecil, dan pemasaran produk lokal.
3. Kelompok Ketahanan Pangan, Kelompok yang fokus pada pengembangan ketahanan pangan keluarga dengan kegiatan seperti budi daya tanaman pangan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian.
4. Kelompok Kerja Sama Wanita (KOWANI), Kelompok ini berfokus pada pemberdayaan wanita melalui program-program yang mendukung peran serta wanita dalam keluarga dan masyarakat.
5. Kelompok Pendidikan Keluarga, Kelompok yang menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi keluarga mengenai berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan anak, dan pengelolaan keuangan.
6. Kelompok Lingkungan Hidup, Kelompok yang berfokus pada program pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, dan program kebersihan.
7. Kelompok Perlindungan Anak dan Keluarga, Kelompok yang menangani isu-isu terkait perlindungan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah sosial lainnya.

8. Kelompok Seni dan Budaya, Kelompok ini berfokus pada pelestarian dan pengembangan seni serta budaya lokal, termasuk pertunjukan seni dan festival budaya

## C. Persentase Posyandu Aktif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.

Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan meberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi dan ibu.

Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu, memiliki aktu untuk mengelola kegiatan posyandu. Oleh karena itu pembinaan posyandu untuk dapat dilaksanakan kesemau gampong.

**Tabel 2.71.**
**Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Posyandu | 226 | 226 | 226 | 236 | 236 |
| 2 | Jumlah desa | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 3 | Persentase Posyandu Aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

*Sumber : DPMG Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

### 2.4.4.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sasaran utama dari pelayanan keluarga berencana adalah Pasangan Usia Subur (PUS). Pemberi layanan KB antara lain adalah Rumah Sakit, Puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta dan bidan desa.

Salah satu cara ntuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program KB. keluarga berencana dan keluarga sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya

angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk

Cakupan peserta KB Aktif merupakan perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan jumla Pasangan Usia Subur (PUB). Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2019 - 2024 meningkat. Pada tahun 2019, persentase cakupan peserta KB aktif sebesar 60 persen, tahun 2023 naik menjadi 66 persen sebagaimana tabel di bawah, hal ini menggambarkan bahwa pencapaian program keluarga sejahtera telah berjalan secara optimal, artinya pemahaman masyarakat terhadap tanggung jawab berkeluarga sudah tinggi, dan hal ini perlu ditingkatkan lagi melalui peningkatan pemahaman masyarakat oleh pemuka masyarakat untuk mendukung program tersebut di masa masa yang akan datang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.72 berikut.

**Tabel 2.72.**
**Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020-2024**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pasangan Usia Subur (PUS) | 19.728 | 20.880 | 21.802 | 23.613 | 22.879 |
| Peserta KB Aktif | 11.612 | 13.154 | 14.171 | 15.585 | 15.151 |
| Cakupan Peserta KB Aktif (%) | 62 | 63 | 65 | 66 | 66,22 |
| Kampung Berkualitas (Kampung KB) | 11 | 11 | 11 | 151 | 222 |

*Sumber : Dinas Kesehatan dan KB Kab. Pidie Jaya Tahun 2025*

Masalah kependudukan pada hakekatnya menyangkut tiga aspek, yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas dan aspek mobilitas. Saat ini dari aspek kuantitas, Aceh merupakan provinsi keempat terendah di Sumatera dengan kepadatan penduduk sebesar 78 orang/km2. Sementara itu dari aspek kualitas Aceh memiliki kualitas penduduk yang rendah, tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia Aceh belum menempati urutan 10 besar dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2017.

Kondisi di atas berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan dan pembangunan diantaranya aspek sosial ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan penyediaan lapangan kerja. Besarnya dampak kependudukan ini memerlukan strategi yang memperhatikan perkembangan struktur penduduk, terutama penduduk usia muda dalam menyiapkan remaja memasuki kehidupan berkeluarga, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan daerah galcitas,

kumuh, perkotaan dan kepulauan, dan menyediakan pelayanan KB berkualitas bagi keluarga miskin serta pengembangan pelayanan keluarga sejahtera yang komprehensif.

Pengertian Kampung Berkualitas (Kampung KB) adalah Satuan wilayah setingkat dusun/ RW dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat Kampung KB merupakan sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan keluarga. Program ini telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia dengan harapan dapat menciptakan keluarga yang sejahtera, sehat, dan berkualitas.

### 2.4.4.2.9. Perhubungan

Dalam pembangunan dan pengembangan wilayah, transportasi mempunyai peranan yang sangat penting terutama di bidang angkutan umum dan barang. Dengan semakin lancarnya arus transportasi, maka semakin pesat pula pertumbuhan ekonomi, sosial, dan wilayah. Hubungan antar wilayah yang semakin baik dan lancar akan mempercepat arus transportasi, sehingga merangsang serta membangkitkan pergerakan penduduk, kegiatan ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya di harapkan akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan wilayah yang semakin pesat. Secara Geografis Kabupaten Pidie Jaya terletak pada posisi yang sangat strategis, karena merupakan sentral bertemunya berbagai moda transportasi darat, Untuk mendukung program tersebut, tentunya membutuhkan beberapa usaha dan pembenahan antara lain :

- Pembangunan, Pengembangan, Pembinaan, Pemantauan Pengendalian dan evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan dan transportasi.
- Penetapan Pengelolaan dan Pembinaan usaha perparkiran.
- Pelaksanaan Pengujian Kendaraan bermotor angkutan umum dan barang dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor.
- Penyediaan, Penatausahaan, Penggunaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana di bidang Perhubungan dan transportasi.

Sampai saat ini teknik sarana dan keselamatan jalan dengan cakupan angkutan wilayah pelayanan dalam Kabupaten Pidie Jaya dan angkutan antar kota belum memenuhi syarat Standard Pelayanan Minimum. Untuk itu perlu terus dilakukan pembenahan agar arus transportasi baik dari dan ke Kabupaten Pidie Jaya maupun dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya semakin lancar, tertib dan teratur. Adapun Sarana dan Prasarana Perhubungan di Pidie Jaya sebagaimana pada Tabel 2.73.

**Tabel 2.73.**
**Sarana dan Prasarana Perhubungan yang telah tersedia**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024**

| No | Uraian | Jumlah Tersedia | Kebutuhan |
|---|---|---|---|
| 1 | Traffick Light | 2 unit | 7 Unit |
| 2 | Halte | 5 unit | 8 Unit |
| 3 | Cermin Cekung | 30 Unit | 70 Unit |
| 4 | Bus Sekolah | 11 unit | 14 Unit |
| 5 | Terminal Bus | 1 unit | 1 Unit |
| 6 | Terminal Mobar | 2 unit | 4 Unit |
| 7 | Jembatan Penyebrangan | 1 unit | 1 Unit |
| 8 | Gedung KIR | 1 Unit | 1 Unit |
| 9 | Marka Jalan | 8 Km | 500 Km |
| 10 | Rambu Lalu Lintas | 394 Unit | 478 Unit |
| 11 | Penerangan Jalan Umum | 174 Unit | 575 Unit |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk dan daya beli masyarakat akan kendaraan semakin meningkat, maka akan terjadi penumpukan kendaraan pada titik dan jam tertentu yang mengakibatkan kemacetan dan rawan kecelakaan. Untuk mengantisipasi situasi tersebut maka dibutuhkan beberapa sarana dan prasarana perhubungan serta personil Pengamanan Lalu Lintas (PAM LALIN) yang handal.

### 2.4.4.2.10. Komunikasi dan Informatika

Untuk meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, Kabupaten Pidie Jaya telah memiliki website milik pemerintah daerah dengan nama www.pidiejayakab.go.id yang berperan sebagai media komunikasi dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Saat ini semua SKPK sudah memiliki domain website tersendiri hanya saja masih perlu peningkatan pengelolaan yang baik agar website tersebut lebih aktif dengan menyajikan data-data dan perkembangan pembangunan secara update dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal Pelayanan Publik Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat) dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 221 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola SP4N LAPOR dan yang tujuannya

memberikan keterbukaan akses informasi kepada Masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pelayanan sesuai dengan Peraturan dan Undang-undangan Nomor 25 Tahun 2009.

Di Tahun 2024 Jumlah laporan Pengaduan Masyarakat yang masuk pada sistem dalam Aplikasi SP4N LAPOR berjumlah 7 Pengaduan telah terdisposisi ke SKPK yang bersangkutan diproses dan ditindaklanjuti sampai masyarakat merespon jawaban dengan baik sehingga permasalahan pengaduan telah selesai 100%.

Dari Hasil Evaluasi Tahun 2023 Kabupaten Pidie Jaya belum Menyelesaikan Renaksi RoadMap SP4N LAPOR, hal ini dikarenakan terkendala dengan Masa Transisi Jabatan Kepemimpinan Bupati Pidie Jaya.

Untuk Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah Menerbitkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 200 Tahun 2024 Tanggal 5 Maret 2024 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan ROADMAP Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024.

#### 2.4.4.2.11. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan salah satu sektor strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja. Namun sektor ini belum mampu berkembang secara optimal. Hal ini disebabkan karena iklim usaha yang kurang kondusif seperti besarnya biaya transaksi akibat ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini dan persaingan pasar yang semakin kompleks, terbatasnya sumber daya produktif terutama ketersediaan bahan baku, akses permodalan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta terbatasnya penggunaan teknologi dan informasi pasar.

Terkait berbagai permasalahan tersebut di atas, tantangan utama kedepan adalah masih rendahnya produktifitas koperasi dan usaha mikro kecil yang berimbas pada produk yang dihasilkan berdaya saing lemah dalam memenuhi ekspektasi pasar. Masalah daya saing dan produktifitas ini disebabkan karena rendahnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki koperasi dan usaha mikro kecil. Kedepan, Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menumbuhkan untuk menumbuhkan calon wirausaha, wirausaha pemula dan wirausaha yang telah berjalan berbasis agro industri, industri kreatif dan inovasi dalam wadah koperasi. Berikut disajikan jumlah koperasi dan usaha mikro kecil di kabupaten Pidie Jaya, tahun 2020-2024 dengan gambaran seperti tabel dibawah ini.

**Tabel 2.74.**
**Jumlah Koperasi, UKM dan UMKM**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020–2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Koperasi Aktif | 117 | 120 | 125 | 105 | 110 |
| 2 | Jumlah Koperasi Tidak Aktif | 91 | 91 | 90 | 111 | 110 |
| 3 | Jumlah Koperasi | 208 | 211 | 215 | 216 | 220 |
| 4 | Persentase Koperasi Aktif | 56,25 | 56,87 | 58,14 | 48,61 | 50 |
| 5 | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi | 4 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| 6 | Jumlah Usaha Mikro dan Kecil | 6.593 | 6.920 | 7.234 | 7.549 | 7.697 |
| 7 | Jumlah Usaha Menengah | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jumlah Seluruh UMKM | 6.625 | 6.920 | 7.234 | 7.549 | 7.697 |

*Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Dari tabel 2.76 diatas diketahui perkembangan koperasi dan usaha mikro kecil (UMK) di kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 hingga 2024, seperti perkembangan jumlah koperasi aktif yang mengalami fluktuasi (naik-turun). Salah satu faktor penyebabnya adalah tantangan operasional dan ekonomi serta kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi yang belum optimal. Begitu juga dengan perkembangan koperasi tidak aktif yang mengindikasikan adanya permasalahan atau kendala dalam keberlanjutan operasional dan tata kelola koperasi di Kabupaten Pidie Jaya.

Namun, secara keseluruhan pertumbuhan unit koperasi mengalami peningkatan yang konsisten di setiap tahun, dari 208 unit pada tahun 2020 menjadi 220 unit pada tahun 2024, meskipun ada fluktuasi dalam jumlah koperasi aktif dan tidak aktif. Begitu juga jumlah perkembangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS)/unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) koperasi bertumbuh dari sebelumnya berjumlah 4 unit pada tahun 2020 menjadi 15 unit pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya minat akan penelolaan sektor usaha koperasi yang berbasis prinsip-prinsip syariah di Kabupaten Pidie Jaya.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pidie Jaya dalam lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan perkembangan signifikan, usaha mikro kecil di Kabupaten Pidie Jaya menghadirkan dinamika menarik dikarenakan terus bertambah dari 6.593 unit wirausaha pada tahun 2020, menjadi 7.697 unit wirausaha pada tahun 2024. Namun perkembangan UMKM saat ini sebagian besarnya belum menunjukkan kapasitas sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing, ini dikarenakan faktor penyebabnya antara lain :

1. Kualitas produk UMKM belum mampu bersaing dengan produk unggulan dari daerah lain;
2. Terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif terhadap bahan baku;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana, informasi dan akses pasar;
4. Rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumberdaya manusia;
5. Terbatasnya dukungan/akses modal.

#### 2.4.4.2.12. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Tidak hanya pihak swasta yang berupaya dalam melakukan penanaman modal tetapi pemerintah juga ikut berperan. Misalnya saja pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur dan melakukan penambahan aset. Pembiayaan pembangunan daerah untuk infrastruktur ini biasanya disebut dengan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan.

Selama ini salah satu faktor yang menghambat peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah iklim penanaman modal yang tidak kondusif yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah dalam menarik penanaman modal terutama penanaman modal asing. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan peraturan di bidang penanaman modal yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pelayanan penanaman modal kepada investor.

Kondisi ini dirasakan tidak mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan penanaman modal yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selama ini kendala dalam pemberian pelayanan kepada investor, selain tidak ditunjang oleh perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan program peningkatan penanaman modal, juga tidak diimbangi dengan tersedianya sarana prasarana pendukung serta kualitas aparat pelayanan penanaman modal yang belum sepenuhnya menguasai peraturan di bidang penanaman modal. Selain itu juga pelayanan penanaman modal kepada investor juga sangat terkait dengan belum adanya kesamaan persepsi diantara instansi yang terkait dengan pelayanan penanaman modal dalam memandang keberadaan investor yang akan menanam modal di daerah.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan membuka peluang kesempatan kerja untuk masyarakat, Kabupaten Pidie Jaya sangat terbuka terhadap investasi baik dari dalam daerah, luar daerah bahkan manca negara. Sektor-sektor

yang di harapkan menjadi daya tarik berinvestasi diantaranya sektor perdagangan, perkebunan, perikanan, pengolahan, pariwisata dan jasa-jasa. Berikut nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Pidie Jaya sejak tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.75 berikut.

**Tabel 2.75.**
**Perkembangan Nilai Investasi Tahun 2020-2024**
**di Kabupaten Pidie Jaya (PMDN)**

| No | Tahun | Jumlah Perusahaan | Jumlah Proyek/ Bidang Usaha | Nilai Realisasi Investasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | 66 | 66 | 47.698.769.855 |
| 2. | 2021 | 84 | 84 | 33.402.335.802 |
| 3. | 2022 | 132 | 202 | 130.219.478.406 |
| 4. | 2023 | 96 | 641 | 91.346.356.349 |
| 5. | 2024 | 110 | 784 | 99.495.507.245 |

*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pidie Jaya 2024*

Perkembangan investasi di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, jumlah perusahaan yang berinvestasi mencapai 66 dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 47.698.769.855. Tahun 2020 menunjukkan peningkatan signifikan dengan jumlah perusahaan mencapai 66 dan nilai investasi melonjak menjadi Rp 47.698.769.855, kemungkinan karena perbaikan kondisi ekonomi atau kebijakan pemerintah yang lebih mendukung investasi. Namun, pada tahun 2021, meskipun jumlah perusahaan meningkat menjadi 84, nilai investasi menurun menjadi Rp 33.402.335.802, yang mungkin disebabkan oleh dampak berkelanjutan dari pandemi COVID-19 atau masalah lain yang mempengaruhi kepercayaan investor.

Tahun 2022 mencatat peningkatan tajam dengan jumlah perusahaan mencapai 132 dan jumlah proyek melonjak menjadi 202, serta nilai investasi meningkat drastis menjadi Rp 130.219.478.406. Ini menunjukkan peningkatan stabilitas ekonomi, kebijakan investasi yang lebih baik, atau peningkatan infrastruktur yang menarik investor. Namun, pada tahun 2023, meskipun jumlah proyek melonjak drastis menjadi 641, nilai realisasi investasi menurun menjadi Rp 91.346.356.349. Sedangkan Pada Tahun 2024 jumlah proyek/bidang usaha sebanyak 784 proyek dan jumlah realisasi investasi Rp. 99.495.507.245 menunjukkan peningkatan yang signifikan realisasi investasi di Kabupaten Pidie Jaya.

Penurunan ini mungkin disebabkan oleh masalah dalam eksekusi proyek, penurunan kualitas proyek, atau faktor lain seperti kompetisi regional yang mempengaruhi investasi di Pidie Jaya.

Secara keseluruhan, periode 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan investasi yang fluktuatif dengan puncaknya pada tahun 2022. Untuk menjaga dan meningkatkan nilai investasi, perlu ada fokus pada perbaikan kualitas proyek, stabilitas kebijakan, serta peningkatan infrastruktur dan promosi dan iklimS investasi

Investasi itu sendiri sangat tergantung dari Iklim investasi seperti stabilitas dan keamanan daerah tujuan investasi. Indikator yang menjadi sorotan diantaranya angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, pemogokan kerja dll. Hal-hal tersebut masih tergolong sangat rendah di Kabupaten Pidie Jaya. Namun demikian tingkat pengetahuan masyarakat terhadap investasi yang selalu dikaitkan dengan isue keagamaan dan sosial serta nilai-nilai budaya lokal dengan pemahaman yang berlebihan, sehingga sedikit menghambat iklim investasi yang masuk ke Kabupaten Pidie Jaya. Disamping itu ketersediaan lahan, tenaga kerja dan kemudahan dalam proses pengurusan perizinan senantiasa diusahakan untuk memberikan pelayanan terbaik oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya agar investor menjadi tertarik berinvestasi.

#### 2.4.4.2.13. Perizinan

Perubahan paradigma perizinan berusaha dari berbasis izin menjadi berbasis risiko telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memudahkan proses mendirikan usaha, terutama bagi usaha mikro dan kecil. Pemerintah menggunakan pendekatan "trust but verify" dalam perizinan berusaha berbasis risiko, yang berarti memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk memulai kegiatan usaha dengan persyaratan yang lebih sederhana di awal, kemudian melakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian standar usaha. Persyaratan untuk mendirikan usaha mikro dan kecil telah dipermudah, sehingga pelaku usaha hanya perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memulai kegiatan usaha, dan persyaratan lainnya dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem OSS Berbasis Risiko.

Perizinan usaha sekarang dikelompokkan berdasarkan risiko, yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Kegiatan usaha dengan risiko rendah tidak memerlukan persyaratan yang kompleks, sedangkan kegiatan usaha dengan risiko tinggi memerlukan persyaratan yang lebih ketat, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Setelah kegiatan usaha dimulai, pemerintah melakukan pengawasan dan verifikasi untuk memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini dilakukan untuk

menjaga kesesuaian standar usaha dan memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, perubahan paradigma perizinan berusaha dari berbasis izin menjadi berbasis risiko bertujuan untuk memudahkan proses mendirikan usaha, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Manfaat besar bagi usaha mikro dan kecil (UMK) juga diperoleh dari perubahan ini, karena mereka dapat mendapatkan perizinan berusaha dengan lebih mudah dan cepat, serta memiliki akses yang lebih baik ke pembiayaan dan pasar. Adapun jenis izin di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.76 dan 2.77 berikut.

**Tabel 2.76.**
**Jenis-jenis Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2021**

| No | Jenis Perizinan | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 |
| | **PERIZINAN BERUSAHA** | | |
| 1 | Izin Lokasi | 0 | 0 |
| 2 | Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 0 | 0 |
| 3 | Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT | 0 | 0 |
| 4 | Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga | 2 | 7 |
| 5 | Izin Toko Alat Kesehatan | 0 | 0 |
| 6 | Izin Operasional Klinik | 2 | 2 |
| 7 | Izin Apotek | 6 | 6 |
| 8 | Izin Toko Obat | 6 | 6 |
| 9 | Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama | 1 | 0 |
| 10 | Izin Operasional Labaoratorium Klinik Umum Pratama | 0 | 0 |
| 11 | Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit | 0 | 0 |
| 12 | Tanda Daftar Usaha Pariwisata | 6 | 1 |
| 13 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 24 | 21 |
| 14 | Sertifkat Laik Fungsi (SLF) | 0 | 0 |
| 15 | Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) | 263 | 47 |
| 16 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 695 | 274 |
| 17 | Izin Usaha Toko Swalayan | 0 | 0 |
| 18 | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) | 0 | 0 |
| 19 | Tanda Daftar Gudang (TDG) | 1 | 0 |
| 20 | Izin Usaha Industri (IUI) | 1 | 2 |
| 21 | Izin Perluasan Kawasan Industri | 0 | 0 |
| 22 | Izin Usaha Kawasan Industri | 0 | 0 |
| 23 | Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi | 2 | 0 |
| 24 | Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) | 888 | 250 |
| 25 | Izin Usaha Perkebunan | 0 | 0 |
| 26 | Izin Usaha Tanaman Pangan | 0 | 0 |
| 27 | Izin Usaha Holtilkultura | 0 | 0 |
| 28 | Izin Usaha Peternakan | 0 | 0 |
| 29 | Izin Usaha Obat Hewan | 0 | 0 |
| 30 | Pendaftaran Usaha Perkebunan | 0 | 0 |
| 31 | Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan | 0 | 0 |
| 32 | Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura | 0 | 0 |
| 33 | Pendaftaran Usaha Peternakan | 0 | 0 |
| 34 | Izin Usaha Perikanan Budidaya | 0 | 0 |
| 35 | Izin Usaha Perikanan Tangkap | 0 | 0 |
| 36 | Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat | 8 | 38 |
| 37 | Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) | 0 | 0 |
| 38 | Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing | 0 | 0 |
| 39 | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek | 0 | 0 |
| 40 | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek | 0 | 0 |
| 41 | Izin Lingkungan | 0 | 0 |
| 42 | Izin Pengolahan Limbah Cair | 0 | 0 |
| 43 | Izin Tempat Pembuangan Sementara | 0 | 0 |
| 44 | Izin Pengumpulan Limbah B3 | 0 | 0 |

| No | Jenis Perizinan | Jumlah 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 45 | Izin Penimbunan Limbah B3 | 0 | 0 |
| **JUMLAH** | | **1905** | **654** |
| **PERIZINAN** | | | |
| 46 | Izin Praktik Dokter | 47 | 63 |
| 47 | Izin Praktik Dokter Gigi | 14 | 9 |
| 48 | Izin Praktik Dokter Hewan | 0 | 0 |
| 49 | Izin Praktik Bidan | 15 | 25 |
| 50 | Izin Praktik Perawat | 8 | 13 |
| 51 | Izin Praktik Fisioterapi | 0 | 0 |
| 52 | Izin Praktik Tenaga Gizi | 0 | 1 |
| 53 | Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut | 5 | 3 |
| 54 | Izin Praktik Penata Anestesi | 0 | 3 |
| 55 | Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik | 0 | 0 |
| 56 | Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian | 32 | 23 |
| 57 | Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional | 0 | 0 |
| 58 | Izin Kerja Bidan | 57 | 61 |
| 59 | Izin Kerja Perawat | 22 | 30 |
| 60 | Izin Kerja Fisioterapi | 0 | 0 |
| 61 | Izin Kerja Tenaga Gizi | 0 | 2 |
| 62 | Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris | 0 | 0 |
| 63 | Izin Kerja Radiografer | 0 | 0 |
| 64 | Izin Depot Air Minum | 0 | 0 |
| 65 | Izin Operasional Optikal | 1 | 0 |
| 66 | Izin Penyelenggaraan Puskesmas | 0 | 0 |
| 67 | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional | 0 | 0 |
| 68 | Surat Izin Panti Sehat | 0 | 0 |
| 69 | Izin Insidentil | 2 | 3 |
| 70 | Izin Angkutan Orang dan atau Barang | 0 | 0 |
| 71 | Surat Izin Penangkapan Ikan | 2 | 0 |
| 72 | Bukti Pencatatan Kapal | 0 | 0 |
| 73 | Izin Penyelenggaraan Reklame | 9 | 3 |
| **JUMLAH** | | **214** | **239** |
| **NON PERIZINAN** | | | |
| 74 | Rekomendasi Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak | 1 | 0 |
| 75 | Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (Galian C) | 3 | 7 |
| 76 | Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Khusus (Stone Crusher) | 0 | 0 |
| **JUMLAH** | | **4** | **7** |

*Sumber : DPMPTSP Nakertrans Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

**Tabel 2.77.**
**Jenis-jenis Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022-2024**

| No | Jenis Perizinan | Jumlah 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **PERIZINAN BERUSAHA** | | | | |
| 1 | Perizinan Berusaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral | | | |
| | Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis) | 3 | 1 | 0 |
| | Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis) | 62 | 46 | 61 |
| | Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi) | 0 | 0 | 0 |
| | Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi) | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **65** | **47** | **61** |
| 2 | Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan | | | |
| | Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis) | 9 | 14 | 42 |
| | Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis) | 46 | 41 | 49 |
| | Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi) | 0 | 0 | 0 |
| | Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi) | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **55** | **55** | **91** |
| 3 | Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan | | | |
| | Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis) | 0 | 0 | 0 |
| | Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis) | 4 | 11 | 15 |
| | Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi) | 6 | 4 | 5 |
| | Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi) | 18 | 15 | 20 |

| No | Jenis Perizinan | Jumlah 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | **Jumlah** | **28** | **30** | **40** |
| 4 | Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan | | | |
| | Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis) | 5 | 1 | 9 |
| | Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis) | 0 | 0 | 0 |
| | Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi) | 0 | 0 | 0 |
| | Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi) | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **5** | **1** | **9** |
| 5 | Perizinan Berusaha Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | | | |
| | Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis) | 0 | 0 | 0 |
| | Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis) | 0 | 0 | 0 |
| | Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi) | 0 | 0 | 0 |
| | Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi) | 5 | 1 | 0 |
| | **Jumlah** | **5** | **1** | **0** |
| 6 | Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata | | | |
| | Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis) | 48 | 137 | 456 |
| | Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis) | 3 | 1 | 4 |
| | Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi) | 0 | 0 | 0 |
| | Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi) | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **51** | **138** | **460** |
| 7 | Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan | | | |
| | Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis) | 500 | 467 | 834 |
| | Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis) | 6 | 0 | 0 |
| | Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi) | 0 | 0 | 0 |
| | Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi) | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **506** | **467** | **834** |
| 8 | Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian | | | |
| | Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis) | 243 | 447 | 934 |
| | Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis) | 27 | 62 | 164 |
| | Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi) | 0 | 0 | 0 |
| | Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi) | 0 | 1 | 0 |
| | **Jumlah** | **270** | **510** | **1.098** |
| 9 | Perizinan Berusaha Sektor Pertanian | | | |
| | Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis) | 48 | 48 | 105 |
| | Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis) | 27 | 20 | 23 |
| | Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi) | 0 | 0 | 0 |
| | Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi) | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **75** | **68** | **128** |
| | **PERIZINAN** | | | |
| 10 | Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | 6 | 39 | 37 |
| 11 | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Persetujuan Lingkungan | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Izin Praktik Dokter Spesialis/Umum | 98 | 92 | 80 |
| 15 | Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis/Umum | 11 | 23 | 14 |
| 16 | Izin Praktik Bidan | 598 | 291 | 457 |
| 17 | Izin Praktik Perawat | 351 | 173 | 409 |
| 18 | Izin Praktik Fisioterapi | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Izin Praktik Tenaga Gizi | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut | 17 | 20 | 39 |
| 21 | Izin Praktik Penata Anestesi | 4 | 0 | 3 |
| 22 | Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik | 38 | 19 | 23 |
| 23 | Izin Praktik Apoteker | 17 | 11 | 22 |
| 24 | Izin Praktik Elektromedis | 11 | 0 | 0 |
| 25 | Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian | 28 | 31 | 80 |
| 26 | Izin Praktik Akupuntur Terapis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Izin Praktik Okupasi Terapis | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Izin Praktik Ortotis Prostetis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Izin Praktik Tenaga Kesehatan Interkontinental | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Izin Praktik Terapis Wicara | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Izin Kerja Bidan | 25 | 0 | 0 |
| 34 | Izin Kerja Perawat | 19 | 0 | 0 |

| No | Jenis Perizinan | Jumlah 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Izin Kerja Fisioterapi | 2 | 11 | 2 |
| 36 | Izin Kerja Farmasi | 6 | 0 | 0 |
| 37 | Izin Kerja Tenaga Gizi | 11 | 5 | 28 |
| 38 | Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris | 4 | 2 | 0 |
| 39 | Izin Kerja Radiografer | 14 | 3 | 3 |
| 40 | Izin Kerja Perekam Medis | 3 | 1 | 2 |
| 41 | Izin Kerja Tenaga Sanitarian | 1 | 8 | 65 |
| 42 | Izin Kerja Okupasi Terapis | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Izin Kerja Ortotis Prostetis | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Izin Kerja Teknisi Gigi | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Izin Kerja Terapis Wicara | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Izin Tukang Gigi | 6 | 1 | 2 |
| 47 | Izin Operasional Optikal | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat | 0 | 11 | 1 |
| 49 | Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal | 15 | 1 | 4 |
| 50 | Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan | 17 | 0 | 4 |
| 51 | Izin Insidentil | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Izin Angkutan Orang dan atau Barang | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Izin Penyelenggaraan Reklame | 2 | 2 | 2 |
| **Jumlah** | | **1.306** | **745** | **1.280** |
| **NON PERIZINAN** | | | | |
| 53 | Rekomendasi Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (Galian C) | 1 | 7 | 5 |
| 55 | Surat Pencabutan Izin Kerja/ Praktik Kesehatan | 0 | 0 | 12 |
| **Jumlah** | | **1** | **8** | **17** |

*Sumber : DPMPTSP Nakertrans Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan langkah penting dalam regulasi perizinan bangunan di Indonesia. Sebelum perubahan, izin untuk membangun sebuah gedung disebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang fokus pada tahap awal pembangunan. Dengan perubahan ini, izin tersebut menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), mencerminkan fokus pada perizinan yang lebih komprehensif dan terinci terkait bangunan gedung.

Perubahan nama ini mencakup peran yang lebih luas, meliputi perizinan untuk konstruksi, penggunaan, pemeliharaan, dan pembongkaran bangunan gedung. Ini berarti bahwa PBG lebih komprehensif dalam mengatur seluruh siklus hidup bangunan, dari awal pembangunan hingga akhir masa guna bangunan. Dasar hukum perubahan ini diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021, yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perbedaan antara IMB dan PBG terletak pada fokus dan lingkup perizinan. IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan. Sementara itu, PBG juga memberikan perizinan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, tetapi dengan fokus yang lebih luas dan komprehensif, termasuk penggunaan dan pemeliharaan bangunan.

### 2.4.4.2.14. Kepemudaan dan Olahraga

#### A. Bidang Pemuda

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk secara serius menjadikan agenda pembangunan pemuda sebagai salah satu tema penting dari pembangunan nasional atau pembangunan daerah secara keseluruhan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pembangunan kepemudaan dan pelayanan kepemudaan (UU No. 40/2009 BAB I Pasal 1). Selanjutnya Undang-Undang ini mengamanatkan Pembangunan Kepemudaan, yaitu "Proses memfasilitasi segala yang berkaitan dengan kepemudaan." Sedangkan "Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda" dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sasaran ini bisa dicapai dengan cara, yaitu pembinaan karakter pemuda dan peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan.

Dinas Pemuda Olahraga dan Periwisata Kabupaten Pidie Jaya khususnya Bidang Pemuda terus berusaha secara maksimal untuk memberdayakan para pemuda dengan dengan melaksanakan beberapa kegiatan seperti terlihat pada tabel 2.78 berikut.

**Tabel 2.78.**
**Daftar Kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 - 2024**

| No | Uraian Kegiatan | Tahun (Peserta) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pelatihan ketrampilan bagi pemuda (liff skil) | 38 | - | - | - | - |
| 2 | Kegiatan seleksi paskibraka tingkat nasional | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Pembinaan organisasi kepemudaan | 100 | - | - | - | - |
| 4 | Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan pemuda | 111 | - | - | - | - |
| 5 | Wirakarya pemuda prestasi | - | 48 | - | - | - |
| 6 | Pelatihan komputer | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 7 | Pelatihan ketrampilan pemuda (menjahit) | - | 6 | - | - | - |

*Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya, 2025*

Dengan adanya penyelenggaraan berbagai kegiatan kepemudaan maka diharapkan adanya perbaikan tata kelola organisasi kepemudaan yang lebih moderen dan sesuai dengan tantangan zaman, sehingga organisasi kepemudaan sebagai tempat lahirnya kader-kader penerus bangsa dimasa yang akan datang.

Hal lain yang dilakukan Pemerintah Pidie Jaya dalam rangka pembinaan kepemudaan dengan menggalakkan program-program lain seperti penganugrahan/penghargaan kepada pelaku Seni Budaya Daerah, Festival Pidie

Jaya, Pembinaan Gampong Budaya, dan Program Pemeliharaan Cagar Budaya Daerah dengan mengikutsertakan pemuda. Pelaksanaan kegiatan budaya tersebut diatas juga ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada pemuda agar memahami budaya daerah.

Pengembangan keolahragaan juga sangat diperlukan dalam mengikat persaudaraan dan kebersamaan bagi pemuda. Pengembangan ini dilakukan melalui pembinaan terhadap generasi muda dengan menyediakan fasilitas-fasilitas olahraga ditingkat kecamatan dan kabupaten. Lebih dari 24 cabang olahraga telah dilakukan pembinaan sesuai dengan tanggungjawab KONI Kabupaten Pidie Jaya untuk mengikuti berbagai kompetisi antar kabupaten. Namun demikian banyak cabang olahraga yang masih minim fasilitas dan sarana pendukung sehingga atlet Pidie Jaya kalah bersaing dengan atlet-atlet daerah lain dan sulit mengembangkan prestasi diluar daerah. Cabang sepak bola merupakan olahraga paling favorit masyarakat Pidie Jaya. Saat ini pemerintah daerah terus memberikan dukungan baik metal ataupun pendanaan agar persepakbolaan Kabupaten Pidie Jaya lebih berprestasi baik antar Kabupaten ataupun pada tingkat Nasional.

**B. Bidang Olahraga**

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata merupakan Dinas yang berperan aktif dalam peningkatan aktifitas keolahragaan, kepemudaan dan pariwisata di Kabupaten Pidie Jaya. Untuk menunjang program olahraga sangat dibutuhkan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga perlu dibangun secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya agar segala even olahraga dapat terlaksana dengan baik dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan standar kompetisi.

Kegiatan keolahragaan dilakukan melalui pembinaan terhadap masyarakat dan generasi muda dengan menyediakan fasilitas-fasilitas olah raga ditingkat kecamatan dan kabupaten. Lebih dari 30 cabang olahraga telah dilakukan pembinaan untuk mengikuti berbagai kompetisi antar kabupaten. Namun demikian banyak cabang olahraga yang masih minim fasilitas dan sarana pendukung sehingga atlet Pidie Jaya kalah bersaing dengan atlet-atlet daerah lain dan sulit mengembangkan prestasi diluar daerah. Cabang sepak bola merupakan olahraga paling favorit masyarakat Pidie Jaya. Saat ini pemerintah daerah terus memberikan dukungan baik metal ataupun pendanaan, khususnya untuk cabang olahraga persepakbolaan Kabupaten Pidie Jaya lebih berprestasi baik antar Kabupaten ataupun pada tingkat Nasional.

**Tabel 2.79.**
**Jumlah Sarana dan Olahraga di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024**

| No. | Kecamatan | Jenis Sarana dan Prasarana Olahraga (Lapangan) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stadion / GOR | Sepak Bola | Volly | Bulu Tangkis | Futsal | Tennis |
| 1. | Bandar Baru | - | 10 | 10 | - | 1 | - |
| 2. | Panteraja | - | 6 | 8 | - | - | - |
| 3. | Trienggadeng | - | 4 | 2 | - | - | - |
| 4. | Ulim | - | 9 | 6 | - | - | - |
| 5. | Jangka Buya | - | 4 | 2 | - | - | - |
| 6. | Meureudu | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Meurah Dua | - | 2 | 6 | - | - | - |
| 8. | Bandar Dua | - | 5 | 7 | - | 1 | - |
| **Jumlah** | | **1** | **44** | **48** | **1** | **3** | **1** |

*Sumber : Disporapar Pidie Jaya Tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 2.79 diatas menjelaskan bahwa jumlah lapangan olahraga minim dan terbatas. Untuk pembangunan fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola dan lapangan volly masih menggunakan sumber dana pemerintah gampong. Masih sedikit yang secara utuh dapat dibangun dengan menggunakan sumber dana DAU atau DAK.

Bila dilihat dari prestasi yang dihasilkan oleh atlit-atlit olahraga yang mengikuti even olahraga tingkat kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya fokus terhadap 6 (enam) cabang olah raga yaitu Bola Kaki, Atletik, Pencak Silat, Tenis Meja, Karate dan Taekwondo. Dan diharapkan dapat berkembang ke cabang olahraga lainnya. Adapun prestasi olahraga yang disumbangkan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) adalah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.80.**
**Peringkat Keikutsertaan POPDA Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2008 s.d 2024**

| No. | Kegiatan | Perolehan Medali | Peringkat |
|---|---|---|---|
| 1. | POPDA 2008 di Aceh Selatan | 1 Perak 1 Perunggu | 19 |
| 2. | POPDA 2010 di Aceh Tamiang | 1 Emas, 1 Perak, dan 1 Perunggu | 17 |
| 3. | POPDA 2012 di Banda Aceh | 2 Emas, 3 Perak dan 7 Perunggu | 9 |
| 4. | POPDA 2014 di Lhokseumawe | 4 Emas, 6 Perak dan 3 Perunggu | 7 |
| 5. | POPDA 2016 di Kota Langsa | 5 Emas, 5 Perak dan 5 Perunggu | 8 |
| 6. | POPDA 2018 di Aceh Tengah | 3 Emas, 3 Perak dan 3 Perunggu | 12 |
| 7. | POPDA 2020 di Aceh Barat | - | - |
| 8. | POPDA 2022 di Aceh Barat | 7 Emas, 2 Perak dan 6 Perunggu | 6 |
| 9. | POPDA 2024 di Aceh Timur | 1 Emas, 2 Perak dan 7 Perunggu | 19 |

*Sumber : Disporapar Pidie Jaya Tahun 2025*
*Note: Tahun 2020 Tidak dilaksanakan karena Pandemi COVID-19*

Disamping itu pemerintah daerah memberikan sosialisasi terhadap bahaya penggunaan Narkoba dan penguatan pemahaman keagamaan kepada generasi muda. Hal tersebut dilakukan melalui sekolah-sekolah, tempat peribadatan dan melalui organisasi kepemudaan

### 2.4.4.2.15. Statistik

Peranan urusan statistik daerah adalah menjamin ketersediaan data statistik sektoral berupa capaian indikator kinerja utama daerah. Tugas dan fungsi Persandian tidak hanya kirim berita namun lebih strategis yakni dalam ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan data pada era Keterbukaan informasi saat ini, yaitu melalui tata kelola keamanan informasi. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentiksasi, nirsangkal, dan otorisasi terhadap sebuah informasi. Keamanan informasi mencakup keamanan fisik berupa keamanan infrastruktur dan keamanan logis berupa keamanan dalam bentuk digital.

Peranan urusan statistik daerah adalah menjamin ketersediaan data statistik sektoral berupa capaian indikator kinerja utama daerah.

**Tabel 2.81.**
**Capaian Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pidie Jaya**
**Tahun 2009 s.d 2024**

| No | Indikator | Satuan | TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase Ketersediaan data Statistik Sektoral | % | 68 | 71 | 83 | 93 | 84 | 95 |

*Sumber : Diskominfo Statistik dan Sandi Kab. Pidie Jaya Tahun 2025*

### 2.4.4.2.16. Persandian

Saat ini penyelenggaraan persandian adalah untuk keamanan informasi. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur. Elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi adalah persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko dibagi jumlah system elektronik yang ada dikali seratus persen. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan layanan keamanan informasi bagi perangkat daerah sehingga dapat terwujud layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna.

**Tabel 2.82.**
**Indikator Urusan Persandian Kabupaten Pidie Jaya**
**Tahun 2009 s.d 2024**

| No | Indikator | Satuan | TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | % | 84 | 71 | 73 | 81 | 100 | 100 |

*Sumber : Diskominfo Statistik dan Sandi Kab. Pidie Jaya Tahun 2025*

### 2.4.4.2.17. Kebudayaan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat serta cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun temurun. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk bahasa, adat istiadat, seni, musik, teknologi, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kebudayaan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Kraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh;
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Cagar Budaya;

Kabupaten Pidie Jaya telah menetapkan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dengan tujuan untuk dapat dilestarikan secara terus menerus. Objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.83 berikut.

**Tabel 2.83.**
**Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Pidie Jaya.**

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) | Nama Objek Pemajuan Kebudayaan | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tradisi Lisan | Seumapa, Zikir Maulid, Dalail Khairat, Hadih Maja, Sya'e, Nazam, Doda Idi Aneuk, dan Hikayat. | 8 | Aktif |
| 2. | Manuskrip | Hikayat Tanbihul Ihsan, Surat Nikah Masa Kolonial Belanda, Manuskrip Kitab Lapan, dan Manuskrip Masjid Tuha. | 4 | Terawat |
| 3. | Adat Istiadat | Madeung, Me Gateng, Tueng Dara Baro, Boh Gaca, Intat Linto, Meulakee/Meminang, Intat Ranup Gaca, Meugatib, dan Cah Rhot. | 9 | Aktif |
| 4. | Permainan Rakyat | Main Gambar, Main Lompat Sungai, Lenggang Rotan, Mobil-Mobilan, Congkak, Lari Balok, Main Hadang, Engrang, Terompah Panjang, Meuen Gaseng, Meuen Chee, Meuen | 25 | Aktif |
| | | Budee Tomplop, Meuen Keong, Meuen Aneuk Guli, Meuen Budee Trieng, Meuen Jambo, Meuen Tarek Situek, Meuen Balap Ban Moto, Meuen Geunteut Bruek, Meuen Galah, Meuen Geutah, Meuen Kandang, Meuen Geulayang, Geudeu-Geudeu, dan Budee Trieng | | |
| 5. | Olahraga Tradisional | Geudeu-Geudeu | 1 | Aktif |
| 6. | Teknologi Tradisional | Jeungki, Creuh, Langai, dan Peuneurah Pliek | 4 | Aktif |
| 7. | Pengetahuan Tradisional | Pantangan Kerja Hari Jum'at, Panglima Laot, Beulacan, Asam Udeng, Kanji Rumbi, Salak Pliek, Geutok Meureudu, Timphan Boh Panah, Sate Kaya, Kue Arafik, Nasi Briyani, Mie Caluk Lapangan, Apom Manis Meureudu, Adee, Sie Itek Puteh, Mak Meugang, dan Timphan Baloen, | 17 | Aktif |
| 8. | Seni | Hikayat, Seumapa, Musik Seurune Kale, Musik Mob-mob, Geudumbak Daya, Tari Ranup Lampuan, Tari Rapa'I Geleng, Rapa'I Bubee, Tari Tarek Pukat, Tari Rateb Meuseukat, Tari Likok Pulo, Tari Laweut, Tari Seudati, dan Tari Teumampoe. | 14 | Aktif |
| 9. | Ritus | Rapa'I Kaoy, Manoe Tuha, Cok Roh, Khanduri Maulid, Khanduri Ureung Meninggai, Keumaweuh, Seunujoh, Peulheuh Alien, Khanduri Laot, Khanduri Krueng, Khanduri Blang, dan Grimpheng. | 12 | Aktif |
| 10. | Bahasa | Bahasa Aceh | 1 | Aktif |
| | | **Total** | **95** | |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya, 2025*

Jenis Cagar Budaya di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.84 berikut:

**Tabel 2.84.**
**Jenis Cagar Budaya di Kabupaten Pidie Jaya**

| No | Nama Cagar Budaya | Alamat | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Makam Akhmad Khatib Langgien | Langgien Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya | Ditetapkan |
| 2 | Mesjid Baitur Abrar | Dayah Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya | Ditetapkan |
| 3 | Makam Raja-raja Meureudu | Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya | Ditetapkan |
| 4 | Makam Sultan Munawwarsyah bin Sultan Muhammad AlLamuri | Hagu Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya | Ditetapkan |
| 5 | Makam Kuno Gampong Lueng Bimba | Lueng Bimba Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya | Ditetapkan |
| 6 | Makam Kuno Meunasah Raya | Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya | Ditetapkan |
| 7 | Pendopo Bupati Pidie Jaya | Kota Meureudu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya | Ditetapkan |
| 8 | Rumoh Aceh | Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabpaten Pidie Jaya | Ditetapkan |
| 9 | Mesjid Baiturrahman | Peudeuk Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya | Ditetapkan |
| 10 | Benteng Kuta Batee | Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya | Ditetapkan |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya, 2025*

Selain 10 *(sepuluh)* Cagar Budaya yang telah ditetapkan masih terdapat Objek yang diduga Cagar Budaya (ODCB) yang tersebar di 8 *(delapan)* Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang telah didata oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya diantaranyaJenis Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.85 berikut:

**Tabel 2.85.**
**Jenis Objek diduga Cagar Budaya (ODCB) di Kabupaten Pidie Jaya**

| No | Kecamatan | Jumlah ODCB | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Baru | 27 ODCB | Dalam bentuk Situs, Kawasan, Bangunan, dan Struktur |
| 2 | Panteraja | 8 ODCB | Dalam bentuk Situs, Kawasan, Bangunan, dan Struktur |
| 3 | Trienggadeng | 29 ODCB | Dalam bentuk Situs, Kawasan, Bangunan, dan Struktur |
| 4 | Meureudu | 20 ODCB | Dalam bentuk Situs, Kawasan, Bangunan, dan Struktur |
| 5 | Meurah Dua | 31 ODCB | Dalam bentuk Situs, Kawasan, Bangunan, dan Struktur |
| 6 | Ulim | 17 ODCB | Dalam bentuk Situs, Kawasan, Bangunan, dan Struktur |
| 7 | Jangka Buya | 19 ODCB | Dalam bentuk Situs, Kawasan, Bangunan, dan Struktur |
| 8 | Bandar Dua | 13 ODCB | Dalam bentuk Situs, Kawasan, Bangunan, dan Struktur |
| | **Total ODCB** | **164 ODCB** | |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya, 2025*

Museum Pidie Jaya merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang berlokasi di tengah-tengah Taman Kota Pidie Jaya, awalnya bangunan yang berbentuk Rumoh Aceh yang dipindahkan dari Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu didirikan kembali pada awal tahun 2020 dan kini dipergunakan sebagai Bangunan Museum Pidie Jaya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 209 Tahun 2022 tentang Pendirian Museum Pidie Jaya.

Mideun Meurah Seutia yang merupakan Taman Budaya Kabupaten Pidie Jaya yang terletak ditengah-tengah Kota Meureudu merupakan sebuah Bangunan yang dulunya digunakan sebagai Komplek Kantor Bupati Pidie Jaya diawal-awal terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya. Pada Tahun 2019 Mideun Meurah Seutia diresmikan sebagai sarana Ruang Kreatif sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 191 Tahun 2019 tentang Mideun Meurah Seuia sebagai Ruang Kreatif. Mideun Meurah Seutia sering digunakan sebagai tempat Aktifitas seniman-seniman Pidie Jaya untuk mengekspresikan karya-karya seninya sehingga pada Tahun 2024 Mideun Meurah Seutia resmi menjadi Taman Budaya Kabupaten Pidie Jaya sesuai Surat Keputusan Penetapan Ruang Kreatif Mideun Meurah Seutia sebagai Taman Budaya Kabupaten Pidie Jaya Nomor 170 Tahun 2024.

### 2.4.4.2.18. Perpustakaan

Peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang menjadi persoalan saat ini sarana dan prasarana dibidang perpustakaan yang belum representatif untuk memfasilitasi pengunjung perpustakaan menurut katagori umur maupun sumber bacaan. Sementara minat dan jumlah kunjungan terbanyak berada di ruang anak. Buku-buku anak juga masih perlu penambahan mengingatnya besarnya minat anak untuk mendapatkan sesuatu yang baru terutama yang berkaitan dengan budaya.

Pengunjung perpustakaan didominasi oleh pelajar, mahasiswa dan anak-anak yang berada di sekitar ibu kota kabupaten. Minat baca masyarakat terlihat bertambah dari data kunjungan perpustakaan. Untuk pengunjung anak-anak terkadang melebih daya tampung ruangan sehingga untuk memfasilitasi kunjungan bidang perpustakaan terus mengelola kesiapan ruangan dan petugas pendamping. Perpustakaan umum Kabupaten Pidie Jaya memiliki jumlah koleksi yang terdiri dari 7.500 judul dan 12.210 eksemplar.

Jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 sebanyak 4.220 pemustaka, dan yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan sebanyak 2.000 anggota. Terjadi peningkatan jumlah pengunjung pada tahun 2024 mencapai 5.999 namun jumlah anggota meningkat mencapai 2.520 orang. Dapat diartikan bahwa adanya peningkatan kunjungan dan jumlah anggota perpustakaan. Adapun jumlah pengunjung yang meminjam dan membaca buku di perpustakan kabupaten sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.86 berikut.

**Tabel 2.86.**
**Jumlah Pengunjung dan Kartu/Anggota Perpustakaan 2019-2024**

| NO | Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Anggota Perpustakaan | 334 | 110 | 498 | 490 | 2000 | 2520 |
| 2 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan | 1.180 | 429 | 1.677 | 1.365 | 4220 | 5999 |
| 3 | Jumlah Perpustakaan desa mitra Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 4 | Jumlah Perpustakaan khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 5 | Jumlah Perpustakaan perguruan tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Jumlah Perpustakaan sekolah | 100 | 105 | 110 | 144 | 144 | 204 |
| 7 | Jumlah koleksi buku pustaka umum | 5.250 | 5.500 | 6.500 | 8.050 | 8.100 | 12.210 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya, 2025*

Jumlah pengunjung perpustakaan juga mengalami variasi serupa dengan jumlah anggota. Penurunan tajam pada tahun 2020 (1,180 ke 429) kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Namun, jumlah pengunjung meningkat kembali pada tahun 2021 (1,677) dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 (5.999), menunjukkan pemulihan dan mungkin juga peningkatan aktivitas perpustakaan.

Pada tahun 2024, terdapat 13 perpustakaan desa mitra TPBIS yang merupakan salah satu program Perpustakaan Nasional. Hal ini menunjukkan adanya upaya baru untuk mengembangkan perpustakaan di desa-desa dengan fokus pada inklusi sosial, yang sebelumnya tidak ada pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, terdapat 14 perpustakaan khusus. Sama seperti TPBIS, ini merupakan perkembangan baru dan mencerminkan diversifikasi jenis perpustakaan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya.

Pada tahun 2024, terdapat 1 perpustakaan perguruan tinggi. Penambahan ini menunjukkan adanya peningkatan fasilitas pendidikan tinggi di daerah tersebut.

Jumlah perpustakaan sekolah mengalami peningkatan bertahap dari 144 pada tahun 2023 menjadi 204 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perhatian yang terus meningkat terhadap penyediaan fasilitas perpustakaan di sekolah-sekolah.

Jumlah koleksi buku pustaka umum juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 8.100 pada tahun 2023 menjadi 12.210 pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan upaya yang konsisten untuk memperkaya koleksi buku di perpustakaan umum, yang dapat meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat.

Secara keseluruhan, data menunjukkan perkembangan positif dalam berbagai aspek perpustakaan daerah Kabupaten Pidie Jaya. Meskipun ada penurunan yang signifikan pada tahun 2020, kemungkinan besar akibat pandemi, berbagai indikator menunjukkan pemulihan dan peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Upaya yang dilakukan, termasuk pengembangan perpustakaan desa mitra TPBIS, perpustakaan khusus, dan peningkatan koleksi buku, berkontribusi pada peningkatan jumlah anggota dan pengunjung perpustakaan. Penambahan perpustakaan perguruan tinggi juga menunjukkan perkembangan positif dalam fasilitas pendidikan tinggi di daerah tersebut.

#### 2.4.4.2.19. Kearsipan

Bidang kearsipan saat ini masih fokus pada implementasi aplikasi srikandi pada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, untuk Tahun 2024 telah dilaksanakan sosialisasi dan workshop mengenai implementasi aplikasi Srikandi dan seluruh Organisasi Perangkat kabupaten telah menggunakan aplikasi Srikandi dalam kegiatan pengelolaan naskah dinas,

Untuk Tahun 2025, Bidang Kearsipan akan melakukan sosialisasi dan pembinaan implementasi aplikasi srikandi untuk setiap gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya dan melakukan pendampingan dan pelayanan implementasi aplikasi srikandi di SKPK.

Untuk kegiatan pengawasan arsip/ audit kearsipan belum pernah dilakukan karena keterbatan personil sehingga capaiannya belum bisa diukur atau dicatat. Kondisi saat ini petugas yang menguasai cara pengelolaan arsip sesuai standar juga masih sangat kurang dan perlu mendapat keahlian khusus tentang kearsipan.

Berangkat dari persoalan yang ada saat ini, dibutuhkan perhatian dan pembinaan terhadap pengelolaan arsip di dinas-dinas serta peningkatan sarana dan prasaran kearsipan guna meningkatkan pelayanan terhadap kearsipan.

### 2.4.4.3. Layanan Urusan Pilihan

#### 2.4.4.3.1. Kelautan dan Perikanan

Tidak semua kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya dari 8 Kecamatan yang memiliki areal tambak. Kecamatan tersebut yaitu kecamatan Bandar Dua yang tidak memiliki areal tambak dan areal budidaya ikan air payau, sedangkan 7 kecamatan lainnya secara geografis berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Sektor kelautan juga merupakan salah satu sektor unggulan daerah, perikanan juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan sektor ini ditunjukkan oleh dua sub-sektor perikanan yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pidie Jaya memainkan peran vital dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. DKP terbagi dalam dua bidang utama, yaitu bidang Perikanan Budidaya dan bidang Perikanan Tangkap. Kedua bidang ini bekerja secara sinergis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan perikanan.

Bidang Perikanan Budidaya berfokus pada pengembangan budidaya perikanan di Kabupaten Pidie Jaya. Melalui berbagai program dan kegiatan, bidang ini memberikan dukungan teknis dan finansial kepada para petani ikan untuk

mengoptimalkan produksi budidaya mereka. Program-program ini mencakup pelatihan teknis dalam metode budidaya yang efisien dan berkelanjutan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti kolam budidaya dan pakan ikan. Bidang ini juga bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pendidikan untuk mengadopsi teknologi terbaru dalam budidaya perikanan.

Sementara itu, bidang Perikanan Tangkap bertugas mengelola dan mengawasi aktivitas penangkapan ikan di perairan Kabupaten Pidie Jaya. Bidang ini memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk menghindari overfishing dan kerusakan ekosistem laut. Melalui program pemberdayaan, nelayan diberikan pelatihan dalam teknik penangkapan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, bidang ini juga berupaya meningkatkan kualitas hasil tangkapan dengan menyediakan fasilitas penyimpanan dan pengolahan yang memadai, seperti tempat pelelangan ikan dan *cold storage*.

Kedua bidang ini menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan tugasnya. Bidang Perikanan Budidaya harus mengatasi masalah keterbatasan teknologi dan infrastruktur, serta memastikan bahwa budidaya perikanan dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, bidang Perikanan Tangkap harus menangani isu overfishing dan perubahan iklim yang berdampak pada hasil tangkapan. Meskipun demikian, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan mereka melalui berbagai inovasi dan program yang berdampak positif bagi masyarakat pesisir.

**1. Perikanan Budidaya**

Berdasarkan data, luas area perikanan budidaya air payau (tambak) dan air tawar (kolam biasa) masing-masing mencapai 2.292,89 ha dan 58,73 ha pada tahun 2024. Adapun jenis perikanan budidaya adalah bandeng, udang, kakap, lele, nila, bawal, dan lain-lain. Luas lahan tambak yang difungsikan masyarakat baru mencapai 77,02 persen, artinya masih besar sekali potensi yang belum dimanfaatkan, salah satunya ada potensi yang dapat diusahakan seperti budidaya rumput laut jenis gracilaria.sp yang dapat dibudidayakan pada tambak-tambak masyarakat yang terbengkalai. Apabila diolah dengan baik tentu akan meningkatkan kesejahteraan petani tambak. Untuk kondisi laut di Kabupaten Pidie Jaya sendiri tidak memungkinkan untuk budidaya rumput laut disebabkan tidak terdapatnya daerah yang arus lautnya tenang.

Data Luas Area Tambak dan Petani Tambak di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.87 berikut:

**Tabel 2.87.**
**Luas Area Tambak dan Petani Tambak di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024**

| No. | Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) | Luas Tambak (Ha) | Area Produktif (Ha) | Persentase Pemakaian lahan (%) | Jumlah Petambak (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Baru | 22.049,70 | 1.197,06 | 804,67 | 70,84 | 1.137,00 |
| 2 | Panteraja | 1.499,61 | 115,35 | 110,07 | 95,42 | 130,00 |
| 3 | Trienggadeng | 7.936,75 | 276,68 | 259,52 | 93,80 | 444,00 |
| 4 | Meureudu | 12.479,30 | 137,00 | 124,00 | 90,51 | 268,00 |
| 5 | Meurah Dua | 28,706,50 | 83,35 | 83,35 | 100,00 | 96,00 |
| 6 | Ulim | 4.175,16 | 312,3 | 250,65 | 80,26 | 410,00 |
| 7 | Bandar Dua | 17.432,20 | - | - | - | - |
| 8 | Jangka Buya | 934,77 | 171,15 | 133,00 | 77,71 | 240,00 |
| | **Jumlah** | **95.211,99** | **2.292,89** | **1.765,89** | **77,02** | **2.725,00** |

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pidie Jaya Tahun 2025*

Data luas area tambak di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024 menunjukkan potensi besar dalam budidaya perikanan. Dari total luas lahan tambak sebesar 2.292,89 hektar, terdapat 1.765,89 hektar area produktif dengan persentase pemakaian lahan sebesar 77,02%. Kecamatan Bandar Baru memiliki luas tambak terbesar, yaitu 1.197,06 hektar, dengan 804,67 hektar area produktif dan 1.137 kepala keluarga (KK) yang bekerja sebagai petambak. Di sisi lain, Kecamatan Meurah Dua, meskipun memiliki luas tambak terkecil sebesar 83,35 hektar, berhasil memanfaatkan seluruh lahannya secara produktif dengan efisiensi tinggi.

Beberapa kecamatan seperti Panteraja dan Trienggadeng menunjukkan tingkat pemakaian lahan yang tinggi, masing-masing sebesar 95,42% dan 93,80%, mencerminkan efektivitas pemanfaatan lahan tambak yang optimal. Secara keseluruhan, dengan peningkatan teknologi, pelatihan bagi petambak, dan pengembangan infrastruktur, sektor budidaya perikanan di Kabupaten Pidie Jaya dapat lebih dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kontribusi ekonomi daerah

**Tabel 2.88.**
**Rekapitulasi Data Produksi Budidaya Perikanan**
**Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Hasil Produksi (Ton) | | | | | | Jumlah (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Udang Vaname | Udang Windu | Bandeng | Kakap | Nila | Lele | |
| 1 | Bandar Baru | 3.056,42 | 78,25 | 1.056,84 | 280,55 | 465,72 | 157,45 | 5.095,23 |
| 2 | Panteraja | 657,40 | 0,00 | 64,05 | 7,30 | 21,76 | 55,59 | 806,10 |
| 3 | Trienggadeng | 1.357,19 | 12,85 | 247,72 | 80,17 | 48,87 | 35,70 | 1.782,50 |
| 4 | Meureudu | 771,41 | 6,11 | 183,26 | 26,96 | 60,32 | 42,66 | 1.090,72 |
| 5 | Meurah Dua | 558,85 | 5,37 | 162,39 | 57,31 | 81,37 | 73,50 | 938,79 |
| 6 | Ulim | 1.397,55 | 10,36 | 290,73 | 70,26 | 137,53 | 101,27 | 2.007,70 |
| 7 | Jangka Buya | 724,65 | 8,31 | 209,83 | 73,30 | 81,14 | 30,72 | 1.127,94 |
| 8 | Bandar Dua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,67 | 290,67 | 470,34 |
| **Jumlah** | | **8.523,46** | **121,25** | **2.214,81** | **595,85** | **1.076,38** | **787,56** | **13.319,32** |

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pidie Jaya Tahun 2025*

Tabel 2.88 menjelaskan data produksi budidaya perikanan di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024 menunjukkan total produksi sebesar 13.319,32 ton, dengan kontribusi dari berbagai jenis ikan dan udang. Kecamatan Bandar Baru mencatat hasil produksi tertinggi dengan total 8.523,46 ton, yang didominasi oleh produksi udang vaname dan bandeng. Kecamatan Ulim dan Trienggadeng juga menunjukkan produksi hasil perikanan budidaya yang tinggi, masing-masing sebesar 2.007,70 ton dan 1.782,50 ton. Produk utama di kecamatan-kecamatan ini adalah udang vaname, bandeng, dan nila, yang mencerminkan diversifikasi produksi budidaya perikanan di wilayah tersebut.

Beberapa kecamatan seperti Panteraja dan Meurah Dua, meskipun memiliki luas area tambak yang lebih kecil, mampu menghasilkan produksi yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 806,10 ton dan 938,79 ton. Kecamatan Bandar Dua menghasilkan 470,34 ton dengan fokus pada produksi ikan nila dan lele. Data ini menunjukkan potensi besar dalam budidaya perikanan di Kabupaten Pidie Jaya, dengan variasi produk yang luas dan distribusi produksi yang merata di berbagai kecamatan. DKP sedang berupaya untuk peningkatan teknologi, pelatihan, dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat pesisir di daerah ini.

## 2. Perikanan Tangkap

Geografis Kabupaten Pidie Jaya yang umumnya adalah perbukitan dan pesisir maka penduduknya umumnya bermata pencaharian pertanian dan perikanan ataupun nelayan tangkap. Sekitar 5.048 orang penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Paling dominan terdapat di kecamatan Panteraja dan Meureudu. Sedangkan untuk kecamatan Bandar Dua dimana masyarakatnya lebih banyak menggantungkan nasibnya pada sektor pertanian dan perkebunan, serta perdagangan. Tidak ada masyarakat yang menginvestasikan modal pada sektor perikanan tangkap. Hal ini disebabkan karena letak geografis kecamatan Bandar Dua yang tidak memiliki wilayah laut. Sehingga sektor perikanan dan kelautan merupakan faktor penting dalam penyumbang PDRB

**Tabel 2.89.**
**Jumlah Nelayan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| Kategori Nelayan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (Orang) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nelayan Tetap | 2.114 | 2.112 | 2.215 | 3.219 | 3.210 |
| Nelayan Sambilan | 487 | 481 | 549 | 1.844 | 1.838 |
| **TOTAL** | **2.601** | **2.593** | **2.764** | **5.063** | **5.048** |

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pidie Jaya Tahun 2025*

Nelayan di Kabupaten Pidie Jaya umumnya adalah nelayan tradisional. Peralatan yang digunakan umumnya masih menggunakan peralatan sederhana seperti pukat cicin, pancing, jaring insang, dan perangkap. Sedangkan untuk boat dan kapal, nelayan menggunakan kapal motor yang memiliki kapasitas mesin < 5 GT. Sebagiannya lagi masih menggunakan perahu biasa. Kurang dari 10 wirausahawan yang memiliki kapal motor dengan kapasitas mesin 30-50 GT. Dan kurang dari 7 wirausahawan yang memiliki kapal motor dengan kapasitas mesin 50-100 GT.

Jumlah Armada yang ada di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 701 Armada, Meureudu merupakan Kecamatan yang paling banyak memiliki Armada Laut sebanyak 128 armada, kemudian di ikuti oleh Kecamatan Jangka Buya sebanyak 127 armada, kemudian yang paling sedikit adalah kecamatan Bandar Baru sebanyak 58 armada. Sedangkan jumlah alat tangkap perikanan pada Tahun 2024 mencapai 678 alat tangkap.

Hasil perikanan tangkap di Kabupaten Pidie Jaya antara lain ikan tuna, tongkol, teri, dan lain-lain. Ikan tuna merupakan produk unggulan di Kabupaten Pidie Jaya yang berukuran sangat besar, sehingga banyak pengusaha ikan dari Sumatera Utara datang dan membeli langsung ke nelayan tradisional di pesisir Kabupaten Pidie Jaya. Hasil perikanan tangkap di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 23.723,13 ton pada tahun 2024, antara lain jenis ikan tuna sebesar 6.030 ton, jenis ikan tongkol 8.199 ton, jenis ikan teri 744 ton, jenis ikan Cakalang 2.401 ton, jenis ikan Dencis 756 ton, jenis ikan kembung 553 ton serta jenis ikan lainnya sebesar 1.516,30 ton.

Kebutuhan ikan untuk rata-rata penduduk Kabupaten Pidie Jaya mencapai 11.112,78 ton/tahun. Sedangkan jumlah produksi ikan tangkapan dan tambak air payau setahun sebanyak 37.042,61 ton, artinya peluang ekspor sangat memungkinkan. Untuk itu perlu dipersiapkan sarana dan prasarana pendukung lainnya dan peningkatan SDM masyarakat nelayan. Jumlah alat perikanan tangkap Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.90 sebagai berikut:

**Tabel 2.90.**
**Jumlah Alat Tangkap Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Jumlah | Pukat Cincin | Jaring Insang | | Pancing | | Perangkap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jaring Insang Hanyut | Jaring Tiga Lapis | Pancing Rawai Tetap | Pancing Tonda | Jermal | Pukat Pantai |
| 1 | Bandar Baru | 58 | 0 | 0 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Panteraja | 160 | 29 | 0 | 74 | 0 | 30 | 15 | 12 |
| 3 | Trienggadeng | 64 | 0 | 29 | 4 | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Meureudu | 132 | 19 | 2 | 4 | 45 | 61 | 0 | 0 |
| 5 | Meurah Dua | 111 | 8 | 51 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| 6 | Ulim | 71 | 1 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jangka Buya | 97 | 19 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bandar Dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | **693** | **76** | **172** | **107** | **152** | **148** | **15** | **12** |

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pidie Jaya Tahun 2025*

Sub-sektor perikanan tangkap, wilayah perikanannya mencapai daerah zona ekonomi ekslusif. Adapun jenis-jenis perikanan tangkap adalah Tuna, Tongkol, Kembung, Tenggiri, Cakalang, Dencis, Teri, Kuwe, Turisi, Peperek, dan Layur. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 mencapai 23.723,30 ton pertahun, meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 15.093 ton.

Jika dilihat dari berbagai jenis perikanan tangkap tahun 2024, produksi terbesar berada pada ikan Tongkol. Produksi Tongkol, Tuna dan Cakalang rata-rata dapat mencapai ± 4.000 ton per tahun. Ikan tersebut mudah ditemukan di laut atau perairan Pidie Jaya atau Aceh pada umumnya. Sedangkan untuk ikan lainnya rata-rata pertahunnya hanya mencapai sebesar ±1.000 ton per tahun. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.91 berikut.

**Tabel 2.91.**
**Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| NO | KOMODITAS | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Teri | 2.237 | 1.893 | 567,82 | 600,95 | 744,00 |
| 2 | Dencis | 2.857 | 2.359 | 726 | 726 | 756 |
| 3 | Tongkol | 3.313 | 3.024 | 2.134,41 | 4.043,89 | 8.199,00 |
| 4 | Peperek | 115 | 116 | 272,61 | 270,29 | 468,00 |
| 5 | Tuna | 1.655 | 1.628 | 3.159,82 | 5.120,66 | 6.030,00 |
| 6 | Kerapu | - | 11 | - | - | 198,00 |
| 7 | Cakalang | 1.835 | 1.661 | 2.152,87 | 2.278,44 | 2.401,00 |
| 8 | Tenggiri | 532 | 392 | 46,47 | 50,01 | 53,00 |
| 9 | Layur | - | 200 | - | - | 18,00 |
| 10 | Kurisi | 81 | 77 | - | - | 59,00 |
| 11 | Kuwe | 142 | 146 | 199,17 | 220,44 | 243,00 |
| 12 | Kembung | 839 | 610 | 572,66 | 577 | 553 |
| 13 | Lamadang | - | - | 451,37 | 450,13 | 331,00 |
| 14 | Kakap Merah | 83 | 84 | 77,81 | 80.11 | 70.00 |
| 15 | Udang | 145 | 253 | 5,30 | 10,66 | 184,00 |
| 16 | Selar | 768 | 595 | 188,06 | 200,22 | 280,00 |
| 17 | Layang | 645 | 571 | 443,67 | 454,31 | 454,00 |
| 18 | Ekor Kuning | - | - | - | - | 122,00 |
| 19 | Cucut | | | | | 145,00 |
| 20 | Sebelah | | | | | 164,00 |
| 21 | Lemuru | - | 206 | - | - | - |
| 22 | Layaran | - | 125 | 101,37 | 111,18 | 145,00 |
| 23 | Bawal Merah | | | | | 185,00 |
| 24 | Belanak | | | | | 121,00 |
| 25 | Cumi-Cumi | | | | | 284,00 |
| 26 | Lain-lain | 560 | 404 | 3.166,59 | 622,14 | 1.516,30 |
| **TOTAL** | | **15.807** | **14.355** | **14.266** | **15.092** | **23.723,30** |

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pidie Jaya Tahun 2025*

Data produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pidie Jaya sesuai tabel 2.91 dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam berbagai komoditas. Produksi total pada tahun 2024 mencapai 23.723,30 ton, melampaui dari target yang sudah di tetapkan sehingga produksi tahun 2024 mencapai 148 persen

jauh melampaui jumlah produksi tahun 2023 yang hanya berkisar sebesar 15.092 ton. Beberapa komoditas mengalami peningkatan produksi yang mencolok, seperti tongkol yang meningkat dari 4.043,89 ton pada 2023 menjadi 8.199,00 ton pada 2024, dan tuna yang naik dari 5.120,66 ton pada 2023 menjadi 6.020,00 ton pada 2024. Peningkatan produksi tahun 2024 terdapat beberapa jenis ikan baru yang tercatat dengan hasil tangkapan tinggi. Komoditas lainnya seperti udang dan layur menunjukkan variabilitas yang tinggi dengan beberapa tahun tanpa produksi yang tercatat. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi dalam produksi per komoditas, total produksi menunjukkan ketahanan yang relatif stabil selama lima tahun terakhir.

Panglima Laot di Kabupaten Pidie Jaya merupakan lembaga adat yang sangat penting dalam mengatur tata kelola perikanan tradisional dan menjaga kelestarian lingkungan laut. Lembaga ini mengatur jadwal melaut, menetapkan aturan penangkapan ikan, dan mengawasi pelaksanaan hukum adat yang berkaitan dengan kelautan. Misalnya, Panglima Laot dapat menetapkan larangan penangkapan ikan di kawasan tertentu untuk menjaga ekosistem laut dan mencegah overfishing. Keberadaan Panglima Laot membantu memastikan bahwa sumber daya laut dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

**Tabel 2.92.**
**Rekapan Panglima Laot Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024**

| NO | PANGLIMA LAOT KABUPATEN/ KECAMATAN | JUMLAH | | KET |
|---|---|---|---|---|
| | | KETUA | SEKRETARIS | |
| 1 | PANGLIMA LAOT KABUPATEN | 1 Org | 1 Org | |
| 2 | PANGLIMA LAOT LHOK BANDAR BARU | 1 Org | 1 Org | |
| 3 | PANGLIMA LAOT LHOK PANTERAJA | 1 Org | 1 Org | |
| 4 | PANGLIMA LAOT LHOK TRIENGGADENG | 1 Org | 1 Org | |
| 5 | PANGLIMA LAOT LHOK MEUREUDU | 2 Org | 2 Org | 2 Lokasi |
| 6 | PANGLIMA LAOT LHOK MEURAH DUA | 1 Org | 1 Org | |
| 7 | PANGLIMA LAOT LHOK ULIM | 1 Org | 1 Org | |
| 8 | PANGLIMA LAOT LHOK JANGKA BUYA | 1 Org | 1 Org | |
| **JUMLAH** | | **10 Org** | **10 Org** | |

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pidie Jaya Tahun 2025*

Selain mengatur aspek teknis perikanan, Panglima Laot juga berperan dalam menjaga harmoni dan menyelesaikan sengketa antar nelayan. Sebagai mediator yang dihormati, mereka menyelesaikan konflik berdasarkan hukum adat yang diterima oleh semua pihak. Panglima Laot sering berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai organisasi untuk mendukung program-program kelautan dan perikanan, termasuk pelatihan bagi nelayan dan konservasi laut. Dengan demikian, Panglima Laot di Pidie Jaya menjadi

penghubung penting antara tradisi adat dan modernisasi dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

### 3. Sentra Produksi Garam

Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu Kawasan Komoditas Unggulan Garam Rakyat di Provinsi Aceh yang memiliki potensi besar dalam sektor pergaraman dengan luas pesisir 210,85 km$^2$. Dimana Kabupaten Pidie Jaya telah secara aktif mengembangkan industri garam melalui inovasi teknologi (geomembran, tunnel), inisiatif komunitas (Garam Santri), dan pendampingan akademik. Produksi tumbuh, meski masih menghadapi tantangan seperti kegagalan proyek dan terbatasnya fasilitas pengolahan. Ke depan, integrasi teknologi modern, pelatihan, serta hilirisasi (pabrik dan sertifikasi) menjadi kunci agar Kabupaten Pidie Jaya tidak hanya sebagai pusat produksi garam rakyat, tetapi juga pemasok garam bernilai tambah di tingkat nasional. Ada 4 Kecamatan yang memproduksi garam yaitu Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Ulim dan Jangka Buya. Dari 4 Kecamatan, Bandar Baru merupakan sentral produksi garam baik secara tradisional dan sistem tunnel tepatnya berada di Desa Mns. Lancang. Berikut informasi garam di Kabupaten Pidie Jaya.

**Tabel 2.93.**
**Luas Lahan dan Jumlah Petani Garam di Kabupaten Pidie Jaya**

| No | Kecamatan | Desa | Luas Lahan (m$^2$) | Jumlah Petani (orang) | Jenis Produksi(Rebus/Tunnel) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Baru | Mns. Lancang | 61.943 | 132 | Rebus (Tradisional) |
| | | Mns. Lancang | 77.500 | 7 | Tunnel/Rebus |
| | | Mns. Lancang | 900 | 5 | Tunnel |
| 2 | Panteraja | Peurade | 30.000 | 5 | Tunnel/Rebus |
| 3 | Ulim | Grong-grong Capa | 16.800 | 42 | Rebus (Tradisional) |
| | | Pulo Ulim | 8.800 | 22 | Rebus (Tradisional) |
| | | Siblah Coh | 16.000 | 40 | Rebus (Tradisional) |
| 4 | Jangka Buya | Jurong Teungoh | 1.500 | 3 | Rebus (Tradisional) |
| | | Jurong Ara | 2.400 | 16 | Rebus (Tradisional) |
| | | **Total** | **215.843** | **272** | |

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pidie Jaya Tahun 2025*

Sesuai tabel diatas, jumlah petani garam di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 272 orang yang terdiri dari 18 orang petani garam yang menggunakan sistem tunnel/rebus dan 254 orang petani garam secara tradisional. Ada 1 kelompok petani garam yaitu Kelompok GARAM SANTRI yang menerima Bantuan Sarana/Prasarana Usaha Pergaraman Tahun 2024 dari Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan ini hanya dengan sistem tunnel tanpa direbus untuk menghasilkan garam kristal yang diperuntukkan untuk industri.

Produksi garam di Kabupaten Pidie Jaya selama 5 (lima) tahun terakhir naik turun salah satu penyebabnya beberapa proyek PUGAR gagal seperti di Kecamatan Trienggadeng, Meureudu dan Kecamatan Ulim menunjukkan bahwa ini bukan sekadar infrastruktur, tapi juga pendampingan dan manajemen yang perlu diperkuat.

Berikut tabel produksi garam Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

**Tabel 2.94.**
**Jumlah Produksi Garam di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d. 2024**

| No | Kecamatan | Desa | Luas Lahan | Produksi (Ton) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ($m^2$) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Bandar Baru | Mns. Lancang | 140.343 | 1.233,22 | 1.676,03 | 1.612,31 | 1.013,09 | 1.044,69 |
| 2 | Panteraja | Peurade | 30.000 | 13,54 | 182,51 | 80,58 | 49,26 | 53,70 |
| 3 | Trienggadeng | Cot Lheu Rheng | | 6,80 | 27,63 | 15,79 | 0 | 0 |
| 4 | Meureudu | Mns. Balek | | 0 | 0 | 6,93 | 0 | 0 |
| 5 | Ulim | Gronggrong Capa | 16.800 | 120,08 | 589,14 | 590,98 | 204,74 | 154,92 |
| | | Pulo Ulim | 8.800 | 50,98 | 63,41 | 87,67 | 84,74 | 50,41 |
| | | Siblah Coh | 16.000 | 54,1 | 258,97 | 311,74 | 322,75 | 362,07 |
| 6 | Jangka Buya | Jurong Teungoh | 1.500 | 36,21 | 2,24 | 53,78 | 36,72 | 18,31 |
| | | Jurong Ara | 2.400 | 26,81 | 101,50 | 104,97 | 94,24 | 90,76 |
| **Jumlah Total** | | | **215.843** | **1.541,74** | **2.901,44** | **2.864,75** | **1.805,55** | **1.774,86** |

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pidie Jaya Tahun 2025*

Kendala utama yang dihadapi petani garam di Pidie Jaya sebagai berikut:

1. Persaingan harga & pasokan impor
   - Garam lokal sulit bersaing dengan garam impor atau garam curah dari luar daerah yang dijual lebih murah (~Rp4.000/kg),
   - Banyak petani berhenti produksi karena hasilnya tidak terserap pasar, tak ada penampung atau jaringan pemasaran yang memadai.
2. Infrastruktur & penyimpanan tidak memadai
   - Bantuan sarana/prasarana tidak efektif digunakan; malah merusak tambak karena tidak dimanfaatkan atau terbengkalai, dan tidak adanya pelatihan yang memadai.
   - Gudang yang sudah dibangun tidak dimanfaakan dengan baik dan
   - Tidak adanya alat ukur NaCl menyebabkan petani tidak bisa menjamin mutu dan volume secara konsisten.
3. Kualitas produksi & standar mutu yang belum ada
   - Sebagian besar garam masih diproduksi secara tradisional

     (rebus/geomembran), dengan sanitasi dan higienitas rendah; belum memenuhi SNI, izin BPOM, atau kadar NaCl industry dan halal.

- Untuk masuk ke pasar ritel modern atau digunakan industri, SDM produksi dan teknologi harus ditingkatkan.

4. Variabilitas iklim & kondisi alam
   - Curah hujan yang tinggi dan banjir merembesi tambak, memperlambat produksi karena lahan harus dibersihkan sebelum proses penguapan kembali.
   - Musim penghujan juga menyebabkan penurunan kualitas garam dan keterlambatan produksi.
5. Regenerasi & sumber daya manusia
   - Banyak petani sudah tua, sedangkan regenerasi generasi muda minim; kemampuan dan partisipasi petani menurun.
   - Kurangnya pelatihan dan pendampingan dari pemerintah, termasuk dalam penerapan teknologi dan sertifikasi, memperburuk kualitas dan efektivitas produksi.
6. Alih fungsi lahan & modal
   - Beberapa lahan tambak garam sudah dialihfungsikan menjadi pemukiman karena petani tidak lagi melihatnya sebagai usaha yang menguntungkan.

Produksi memerlukan modal cukup besar, tetapi pendapatan rendah membuat sebagian petani menjual lahannya

#### 2.4.4.3.2. Pariwisata

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Objek Wisata Budaya terdapat di Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Bandar Dua, Sedangkan Kawasan Wisata Alam terdapat di Kecamatan Bandar Baru, Bandar Dua, Panteraja,

Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya. Sedangkan untuk Objek Wisata Buatan dikembangkan di Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Bandar Dua.dan Objek Wisata Khusus meliputi semua Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.95 berikut.

**Tabel 2.95.**
**Jenis dan Lokasi Objek Wisata di Kabupaten Pidie Jaya**

| No. | Objek Wisata Budaya | Kawasan Wisata Alam | Objek Wisata Buatan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Makam Tgk Abdullah Syafi'i Blang Sukon Cubo | Pantai Krueng Cubo | Bendung Irigasi Jim Jim | Bandar Baru |
| 2 | Benteng Pertahanan Peninggalan Jepang Gampong tu | Pantai Pasi Panteraja | Embung uteun Pantang | Panteraja |
| 3 | Mesjid Kuno di Gampong Mesjid Trienggadeng | Pantai Wisata Khutang | 1.Embung Peulandok 2.Waterboom | Trienggadeng |
| 4 | Makam Tgk Dipucok Krueng Beuracan | Pantai Kutaran Meunasah Balek | Irigasi Leubok dan Irigasi Beuracan | Meureudu |
| 5 | Makam Tgk Japakeh Gampong Dayah Kruet | Krueng Batee Meuadee Lhok Sandeng | - | Meurah Dua |
| 6 | Makam Tgk Malem Dagang Gampong Mens Kumbang | Pantai Pasi Geulanggang | - | Ulim |
| 7 | Makam Tgk Pante Geulima Gampong Beurandeh Alue | Air Terjun Pucok Krueng Ulim dan Batee Krueng Lhok Ugob | Bendung Irigasi Lhok Ugob | Bandar Dua |
| 8 | - | Pantai Pasi Aron | - | Jangka Buya |

*Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya, 2025*

Kabupaten Pidie Jaya memiliki banyak potensi pariwisata meliputi pariwisata pantai, pegunungan, sejarah, kebudayaan, serta wisata religi. Dari seluruh potensi tersebut, Pemerintah Daerah lebih mengarahkan pembangunan wisata kepada objek wisata pantai yang memiliki panorama yang indah seperti Pantai Wisata Islami (Kuthang) di Kecamatan Trienggadeng dan Pantai Meurah Seutia (Manohara) di Kecamatan Meureudu. Uniknya wisata pantai di Kabupaten Pidie Jaya khususnya di Pantai Kuthang, langsung berpapasan dengan jalan nasional yang tidak ditemukan pada daerah lain khususnya di Aceh wilayah timur, dan ini sangat potensial untuk dikembangkan khususnya untuk kuliner dan souvenir cirikhas Pidie Jaya yang menarik untuk dipasarkan. Tabel berikut merupakan potensi objek wisata Kabupaten Pidie Jaya. Potensi Objek Wisata Kabupaten Pidie Jaya dan Jarak Tempuh dari Kecamatan Kelokasi Wisata dapat dilihat pada Tabel 2.96 berikut.

**Tabel 2.96.**
**Potensi Objek Wisata Kabupaten Pidie Jaya dan Jarak Tempuh dari Kecamatan Kelokasi Wisata**

| No. | Kecamatan | Lokasi dan Objek Wisata | Jarak Tempuh dari Ibu Kota Kec. (Km) |
|---|---|---|---|
| 1. | Meureudu | a. Air Terjun Meureudu<br>b. Bendungan Beuracan<br>c. Mesjid Guci Keuramat<br>d. Sungai Bate Ie Blang Awe<br>e. Benteng Sultan Iskandar Muda<br>f. Pantai Kutaran (*Monohara*) | 46<br>6<br>3<br>2,5<br>3<br>2,5 |
| 2. | Bandar Dua | a. Bukit Berbatu Ule Gle | 58 |
| 3. | Ulim | a. Kuta Batee | 50 |
| 4. | Trienggadeng/Panteraja | a. Pantai Wisata Islami (Kuthang) | 35 |
| 5. | Bandar Baru | a. Bendungan Irigasi Cubo<br>b. Pantai Lancang Paru Lueng Putu | 21<br>7,7 |

*Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034*

### 2.4.4.3.3. Pertanian

Sektor pertanian masih mendominasi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya, maskipun dari tahun ke tahun kontribusi sektor ini terus terjadi penurunan yang diakibatkan oleh peralihan ke sektor industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Kontribusi dari tahun 2019-2023 masing-masing adalah 45,44 (2019); 46,99 (2020); 46,05 (2021); 46,46 (2022) dan 46,53 pada tahun 2023.

#### A. Pertanian Tanaman Pangan

Sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya. Pola ruang yang ditetapkan bahwa kawasan budidaya terdiri dari: a). Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas seluas 4.865,11 Ha; b). Kawasan hutan rakyat seluas 1.225,39 Ha; c). Kawasan hutan pendidikan seluas 150,21 Ha; d). Kawasan peruntukan pertanian yang dibagi dalam pertanian 1). Lahan basah seluas 7.739,21 Ha, 2). Pertanian kering seluas 365,56 Ha, 3). Kawasan hortikultura seluas 2.331,69 Ha, 4). Lahan perkebunan 17.004,26 Ha, 5). Lahan kritis seluas 201,86 Ha, 6). Kawasan peternakan seluas 1.271,55 Ha; e). Kawasan peruntukan perikanan seluas 1.686,72 Ha dan f). Lahan penggunaan lainnya. Luas Baku Lahan Sawah di Pidie Jaya Tahun 2019-2024 secara rinci di sajikan pada Tabel 2.97 berikut.

**Tabel 2.97.**
**Luas Baku Lahan Sawah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024**

| No | Kecamatan | Luas Baku Sawah (Ha) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Bandar Baru | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.797 |
| 2 | Panteraja | 235 | 235 | 235 | 229 | 236 |
| 3 | Trienggadeng | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.357 |
| 4 | Meureudu | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1134 |
| 5 | Meurah Dua | 595 | 595 | 595 | 595 | 552 |
| 6 | Ulim | 785 | 785 | 785 | 785 | 782 |
| 7 | Jangka Buya | 501 | 501 | 501 | 501 | 478 |
| 8 | Bandar Dua | 2.187 | 2.187 | 2.187 | 2.187 | 2169 |
| **Total** | | **8.824** | **8.824** | **8.824** | **8.818** | **8.505** |

*Sumber: Distanpangan Kabupaten Pidie Jaya, 2025*

Secara umum luas lahan sawah di Kabupaten Pidie Jaya mengalami penurunan dikarenakan adanya pembangunan dan alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian yang merupakan konsekuensi dari perkembangan Kabupaten Pidie Jaya terutama di pusat ibu kota Meureudu dan sepanjang jalan Nasional, namun untuk mengantisipasi alih fungsi lahan lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menetapkan Qanun Nomor 1 tahun 2021 tentang perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Dan Data Luas Baku Sawah di Kabupaten Pidie Jaya di update kembali dan berdasarkan hasil digitasi dan citra satelit disepakati Luas Baku Sawah di Pidie Jaya menjadi 8.505 Ha pada tahun 2024.

Perkembangan kontribusi ini sangat dipengaruhi oleh produksi dan produktivitas komoditi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pidie Jaya. Untuk menghitung produksi salah satu komoditi dalam satu wilayah dibutuhkan luasan tanam, luasan panen, produktivitas tiap kali panen dan jumlah kali panen dalam satu tahun, tabel dibawah menggambarkan luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat padaTabel 2.98 berikut.

**Tabel 2.98.**
**Luas Tanam dan Luas Panen Komoditi Pangan di Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | | | | | Luas Panen (Ha) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Padi | Jagung | Kedelai | Cabai Merah | Bawang Merah | Padi | Jagung | Kedelai | Cabai Merah | Bawang Merah |
| 1 | 2020 | 17.641 | 1.411 | 7 | 114 | 47 | 17.641 | 1.795 | 12 | 141 | 33 |
| 2 | 2021 | 16.285 | 2.041 | 38 | 148 | 34 | 16.285 | 1.903 | 34 | 138 | 42 |
| 3 | 2022 | 13.751 | 1.767 | 137 | 160 | 26 | 13.832 | 1.952 | 138 | 175 | 21 |
| 4 | 2023 | 12.317 | 1.639 | 398 | 169 | 30 | 11.802 | 1.605 | 410 | 170 | 38 |
| 5 | 2024 | 15.177 | 2.189 | 128 | 189 | 12 | 15.205 | 2.235 | 106 | 171 | 12 |

*Sumber: Dinas Pertanian & Pangan Kabupaten Pidie Jaya, 2025*

Beberapa upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya guna tercapainya tingkat produktivitas maksimal setiap komoditi unggulan pada

sektor pertanian dan pangan diantaranya adalah sebagai berikut: 1)Peningkatan indeks tanam melalui optimalisasi penggunaan lahan dan penyediaan agro input; 2)Peningkatan luas tanam (termasuk integrasi dengan tanaman perkebunan) dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia; 3)Perbaikan sarana dan prasarana penunjang (termasuk ketersediaan bibit unggul dan pupuk); 4)Peningkatan Fungsi Penyuluhan pertanian; 5) Peningkatan pengkajian teknologi pertanian dan pengembangan bibit unggul serta kajian pengolahan hasilnya.

## B. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Setiap tahun sektor pertanian merupakan sektor unggulan daerah sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya, tahun 2024 mencapai 46,58%. Sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebesar 21.668 jiwa atau 13,47% dari total penduduk Kabupaten Pidie Jaya. Oleh karena itu pembangunan selalu di arahkan kepada sektor ini dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat serta perbaikan ekonomi mereka.

Keunggulan utama sektor pertanian Kabupaten Pidie Jaya adalah komoditi padi sawah. Komoditi padi sawah memiliki lahan seluas 8.505 Ha dengan potensi dua kali tanam dalam setahun, pada musim rendeng dan musim gadu dengan total luas panen mencapai 15.205 Ha. Adapun jumlah produktivitas Padi mencapai 6,77 ton/ha.

**Tabel 2.99.**
**Produksi Padi dan Bahan Pangan Utama Lainnya**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Pidie Jaya | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Padi (ton) | 110.579 | 98.228 | 94.512 | 84.439 | 103.521 |
| 2 | Jagung (ton) | 11.596 | 11.425 | 12.297 | 12.199 | 17.096 |
| 3 | Kedelai (ton) | 15,80 | 43,3 | 304 | 1.004 | 230,40 |
| 4 | Cabai Merah (ton) | 1.050 | 863 | 1.225 | 1.902 | 1.812 |
| 5 | Bawang Merah (ton) | 518 | 309 | 157 | 489 | 94 |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Tabel 2.99 menggambarkan bahwa selama periode 2020 hingga 2024, produksi pertanian di Pidie Jaya mengalami fluktuasi. Produksi padi yang

merupakan salah satu komoditas utama dan mulai meningkat kembali produksinya dengan peningkatan luas tanam dan luas panen serta harga gabah yang baik. Penurunan pada tahun 2021 dikarenakan program pemerintah pusat terkait Gerakan IP 300 (tanam 3 kali dalam setahun) tidak berlanjut di berikutanya (tahun 2021 dan 2022), dan pada tahun 2023 luas tanam menurun menjadi 12,317 Ha, sehingga produksi juga ikut menurun. Penyebab terjadinya penurunan pada tahun 2023 karena dua faktor utama, yaitu: 1) Anomali Iklim (kekeringan) yang mengakibatkan debit air irigasi sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk mengairi seluruh lahan sawah di kabupaten Pidie Jaya, 2) Kearifan lokal petani Kecamatan Trienggadeng dan panteraja yang melakukan istirahat tanah untuk mengembalikan unsur tanah (tidak melakukan penanaman padi sebagaimana biasanya).

Produksi jagung mengalami peningkatan yang signifikan dari 11.596 ton pada tahun 2020 menjadi 17.096 ton pada tahun 2024. Produksi kedelai cenderung mengalami peningkatan karena permintaan pasar dan minat petani. Komoditi Cabai merah dan Bawang merah merupakan komoditi unggulan yang sangat berpengaruh terhadap inflasi daerah, fluktuasi dalam produksi komoditi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cuaca, hama, penyakit tanaman, pengairan, teknik pertanian, dan perubahan permintaan pasar.

### C. Cakupan Bina Kelompok Tani

Selama lima tahun terakhir, Pidie Jaya telah aktif dalam pembinaan kelompok tani untuk mendukung sektor pertanian yang terdiri dari kelompok tani dewasa, pemuda tani, wanita tani, tani kebun, tani ternak, tani tambak dan penangkar. Pada tahun 2019, terdapat 1.520 kelompok tani yang dibina, dan jumlah ini mengalami sedikit peningkatan menjadi 1.605 pada tahun 2020, 1.608 pada tahun 2021, namun jumlah kelompok tani yang dibina mengalami penurunan pada tahun 2022 karena banyaknya kelompok tani yang tidak aktif dan jumlahnya kembali sedikit bertambah pada tahun 2023.

**Tabel 2.100.**
**Cakupan Pembinaan Kelompok Tani**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Pidie Jaya | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah kelompok tani yang dibina (kelompok) | 1.605 | 1.608 | 1.561 | 1.566 | 1.522 |
| 2 | Jumlah kelompok tani (kelompok) | 1.605 | 1.608 | 1.561 | 1.566 | 1.522 |
| 3 | Persentase (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Dalam konteks persentase, yang melihat perbandingan jumlah kelompok tani dengan jumlah kelompok tani yang dibina, persentase yang diperoleh adalah 100%, karena jumlah kelompok tani yang ada semuanya dilakukan pembinaan. Data ini memberikan gambaran tentang perkembangan dan konsistensi program pembinaan kelompok tani di Pidie Jaya selama lima tahun terakhir, dengan beberapa fluktuasi dalam jumlah kelompok tani yang dibina dan jumlah kelompok tani yang ada.

## D. Perkebunan

Perkembangan produksi dan produktivitas beberapa komoditi perkebunan Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020-2024 diuraikan pada Tabel 2.101 berikut.

**Tabel 2.101.**
**Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| Tahun | Kelapa | | Kakao | | Karet | | Pinang | | Kelapa Sawit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) |
| **2020** | 2.498,7 | 884 | 7.028,1 | 801 | 3,4 | 685 | 632 | 481 | 3,6 | 2.380 |
| **2021** | 2.519,6 | 883 | 6.999,2 | 800 | 3,4 | 680 | 638,9 | 479 | 3,6 | 2.380 |
| **2022** | 2.513,3 | 883 | 5.527,2 | 800 | 3,4 | 680 | 642,3 | 479 | 3,6 | 2.380 |
| **2023** | 2.670,2 | 883 | 5.628,2 | 800 | 3,4 | 680 | 639,4 | 479 | 3,6 | 2.380 |
| **2024** | 2.917,4 | 883 | 5.724,0 | 800 | 2,4 | 680 | 752,0 | 479 | 1.633,2 | 2.390 |

*Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Tabel diatas menunjukkan data produksi dan produktivitas untuk komoditi tanaman perkebunan (Kelapa, Kakao, Karet, Pinang dan Kelapa Sawit) di Pidie Jaya selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai 2024. Data produksi dan produktivitas komoditi tanaman perkebunan di Pidie Jaya selama lima tahun terakhir

mencerminkan perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Pidie Jaya, terjadi fluktuasi tahunan dalam produksi, seperti yang terlihat pada produksi kakao yang mengalami penurunan pada tahun 2020 dari 7.028,1 menjadi 5.724 ton di tahun 2024 dikarenakan tanaman kakao yang sudah tua dan perlu dilakukan peremajaan, tanaman kakao juga sering diserang hama dan penyakit tanaman kakao, perlu dilakukan pengendalian Hama dan penyakit pengganggu tanaman secara intesif dan berkelanjutan. Adanya pengurangan Luas Lahan tanaman kakao disebabkan adanya alih fungsi lahan untuk jenis komoditi perkebunan lainnya. Sedangkan untuk komoditi lainnya seperti kelapa, karet, pinang dan kelapa sawit tetap relatif stabil selama periode tersebut. Sedangkan bila adanya penambahan/pengurangan Kelompok Tani Perkebunan disebabkan kurangnya perawatan tanaman sehingga lahan perkebunan menjadi terlantar, yang menyebabkan kurangnya luas lahan perkebunan dan jumlah kelompok tani menjadi tidak aktif lagi.

Luas Lahan Perkebunan untuk komoditi kelapa sawit bertambah karena adanya kegiatan Land Clearing/pembersihan lahan yang digunakan untuk penanaman Sawit seluas 664 Ha semenjak Tahun 2021. Untuk lahan Kelapa Sawit yang dibina oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Pidie Jaya dimulai Tahun 2021, sedangkan Lahan Tanaman Sawit sudah ditanami sejak Tahun 1995 terdapat diwilayah Kecamatan Bandar Baru, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim dan Bandar Dua. Masyarakat tani lebih cenderung beralih ke tanaman Sawit dikarenakan tanaman ini bisa tumbuh tanpa perlakuan dan perawatan yang terlalu intensif.

Tanaman Karet di Pidie Jaya tidak ada penambahan luas lahan dan masih tetap luasnya, kalau ada penurunan luas pada tanaman karet, ini karena faktor alam (kekeringan) dan hama penyakit dan produksi getahnya menurun.

Sasaran prioritas dalam pembangunan perkebunan di Pidie Jaya untuk masa yang akan datang masih di fokuskan pada beberapa program antara lain: 1) pemeliharaan perkebunan rakyat yang sudah ada; 2) rehabilitasi dan pengembangan tanaman perkebunan rakyat; 3) penyediaan benih/bibit parsial; 4) Pembangunan perkebunan rakyat; 5) pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; 6) peningkatan sumber daya perkebunan; dan 7) membangun sarana dan prasarana yang mendukung perkebunan.

**E. Peternakan**

Perkembangan kontribusi Peternakan terhadap PDRB sangat dipengaruhi oleh peningkatan populasi ternak yang termasuk dalam kelompok ternak ruminansia besar seperti sapi, tahun 2020 berjumlah 21.810 ekor menurun secara signifikan sebesar 14.772 ekor pada tahun 2024, kerbau tahun 2020 sebanyak 2.716 ekor turun

menjadi 799 ekor pada tahun 2024. Ternak ruminansia kecil seperti Kambing pada tahun 2024 berjumlah 21.193 ekor dan domba 3.812. Hal ini menggambarkan bahwa perkembangan peternakan di Kabupaten Pidie Jaya mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan secara proporsional dalam bentuk usaha kelompok atau perseorangan sebagai usaha pokok, bukan lagi beternak itu sebagai usaha sampingan mengingat kebutuhan pasar daging sangat terbuka. Perkembangan populasi ternak dikabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.102 berikut.

**Tabel 2.102.**
**Jumlah Populasi Ternak Ruminansia Besar**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| Tahun | TernakBesar (ekor) | | Ternak Kecil (ekor) | | Unggas (ekor) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sapi | Kerbau | Kambing | Domba | Ayam | Itik |
| 2020 | 21.810 | 2.716 | 20.105 | 3.580 | 337.744 | 129.541 |
| 2021 | 21.902 | 2.745 | 20.136 | 3.606 | 344.767 | 129.723 |
| 2022 | 19.670 | 2.119 | 20.810 | 3.983 | 348.745 | 138.617 |
| 2023 | 16.779 | 975 | 21.131 | 4.040 | 365.659 | 140.255 |
| 2024 | 14.772 | 799 | 21,193 | 3,812 | 386.575 | 182.285 |

*Sumber: Disbunnak Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Tabel diatas menunjukkan perkembangan jumlah populasi ternak ruminansia besar dan kecil serta unggas di Kabupaten Pidie Jaya selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, populasi sapi tercatat sebanyak 21.810 ekor dan mengalami fluktuasi selama lima tahun berikutnya, dengan penurunan signifikan hingga mencapai 14.772 ekor pada tahun 2024. Populasi kerbau juga mengalami tren penurunan dari 2.716 ekor pada 2020 menjadi 799 ekor pada 2024 hal ini diakibatkan adanya wabah penyakit seperti penyakit mulut dan kuku, faktor kesehatan, produksi, atau daya saing pasar.

Untuk ternak kecil, jumlah kambing pada tahun 2020 mencapai 20.105 ekor dan cenderung stabil pada tahun setelahnya dengan jumlah 21.193 ekor di tahun 2024. Sementara itu, populasi domba sedikit meningkat dari 3.580 ekor pada 2020 menjadi 3.812 ekor pada 2024. Dalam kategori unggas, ayam merupakan ternak yang mendominasi, dengan populasi awal 337.744 ekor pada tahun 2020, meningkat menjadi 386.575 ekor pada 2024. Populasi itik juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari 129.541 ekor pada tahun 2020 menjadi 182.285 ekor pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya dinamika populasi ternak di Kabupaten Pidie Jaya, dengan kecenderungan penurunan pada ternak besar yang diakibatkan oleh wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dan pertumbuhan pada ternak kecil serta unggas,

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap pembangunan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus melakukan

berbagai upaya untuk meningkatkan populasi ternak besar, khususnya sapi dan kerbau. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah melalui program pengembangan budidaya ternak berbasis kelompok tani, yang didukung dengan penyediaan bantuan bibit unggul, pakan berkualitas, serta peningkatan pelayanan kesehatan hewan secara rutin.

**Tabel 2.103.**
**Produksi Hasil Perternakan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Pidie Jaya | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | DagingRuminansia (kg) | 283.662 | 321.133 | 301.193 | 298.930 | 269.100 |
| 2 | DagingAyamPotong (kg) | 335.638 | 356.819 | 376.612 | 379.975 | 620.700 |
| 3 | Telur (butir) | 2.784.000 | 3.328.000 | 3.776.000 | 3.796.000 | 4.328.000 |

*Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Tabel 2.103 menunjukkan data produksi hasil peternakan di Kabupaten Pidie Jaya Produksi hasil peternakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang beragam pada masing-masing komoditas, yakni daging ruminansia, daging unggas, dan telur.

Produksi daging ruminansia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, produksi tercatat sebesar 283.662 kg dan meningkat signifikan pada 2021 menjadi 321.133 kg. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 301.193 kg, yang berlanjut hingga tahun 2024 dengan capaian sebesar 269.100 kg. Tren penurunan dalam dua tahun terakhir mengindikasikan adanya tantangan dalam sektor peternakan ruminansia, seperti keterbatasan pakan, penyakit ternak, atau penurunan populasi.

Berbeda dengan ruminansia, produksi daging ayam potong menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Pada 2020 tercatat sebesar 335.638 kg, kemudian naik menjadi 356.819 kg pada 2021 dan 376.612 kg pada 2022. Tahun 2023 produksi terus bertambah menjadi 379.975 kg, hingga melonjak drastis pada tahun 2024 dengan total produksi mencapai 620.700 kg. Lonjakan ini menunjukkan peningkatan produktivitas yang luar biasa dan kemungkinan adanya pengembangan skala usaha peternakan unggas secara signifikan.

Sementara itu, produksi telur juga mengalami tren yang positif dan stabil. Pada tahun 2020, produksi mencapai 2.784.000 butir dan meningkat secara konsisten setiap tahunnya: 3.328.000 butir pada 2021, 3.776.000 butir pada 2022, 3.796.000 butir pada 2023, dan akhirnya mencapai 4.328.000 butir pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan dalam manajemen peternakan unggas petelur dan meningkatnya permintaan pasar terhadap telur sebagai sumber protein hewani.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun sektor daging ruminansia mengalami penurunan produksi, sektor unggas daging ayam potong maupun telur mengalami pertumbuhan yang sangat positif. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan strategi pengembangan yang tepat agar seluruh sektor peternakan dapat berkembang secara seimbang dan berkelanjutan selama lima tahun terakhir. Pembangunan di bidang subsektor peternakan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana peternakan di Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana pada tabel 2.104 berikut.

**Tabel 2.104.**
**Sarana Prasarana Pendukung Usaha Peternakan**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| Tahun | Padang Penggembalaan | | Jumlah Pos IB (Unit) | Jumlah PUSKESWAN (Unit) | Jumlah RPH (Unit) | Jumlah TPU (Unit) | JumlahPasar Ternak (Unit) | | JumlahPasar Daging (Unit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Luas (Ha) | Produksi (Ton) | | | | | Ternak Besar& Kecil | Unggas | Ternak Besar& Kecil | Unggas |
| 2020 | 606.3 | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 2021 | 605 | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 2022 | 306 | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 2023 | 209 | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 2024 | 209 | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |

*Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Tabel di atas menunjukkan perkembangan sarana dan prasarana yang mendukung usaha peternakan di Kabupaten Pidie Jaya selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024.

Luas padang penggembalaan mengalami penurunan signifikan dari 606,3 hektar pada tahun 2020 menjadi hanya 209 hektare sejak tahun 2023 hingga 2024. Kondisi ini menunjukkan berkurangnya lahan terbuka untuk penggembalaan, yang dapat berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan ternak, terutama jenis ternak ruminansia.

Untuk jumlah Pos IB (Inseminasi Buatan) dan PUSKESWAN (Pusat Kesehatan Hewan) tidak mengalami perubahan selama periode tersebut, masing-masing tetap sebanyak 2 unit dan 4 unit setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan konsistensi pelayanan reproduksi dan kesehatan hewan di wilayah tersebut.

Sementara itu, jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) juga stabil sebanyak 1 unit dari tahun 2020 hingga 2024, begitu juga dengan Tempat Pemotongan Unggas (TPU) yang tidak tersedia atau belum dibangun selama periode tersebut.

Dalam hal jumlah pasar ternak, Kabupaten Pidie Jaya tercatat memiliki 1 unit pasar untuk ternak kecil setiap tahun, namun belum terdapat pasar khusus untuk

ternak besar dan unggas. Demikian pula untuk jumlah pasar daging, belum tersedia baik untuk ternak besar, kecil, maupun unggas selama periode yang dicatat.

**Tabel 2.105.**
**Jumlah Kelompok Terak di Kabupaten Pidie Jaya**

| NO | KECAMATAN | JUMLAH KELOMPOK TERNAK | JUMLAH ANGOTA / ORANG |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Baru | 8 Kelompok | 125 |
| 2 | Panteraja | 8 Kelompok | 161 |
| 3 | Trienggadeng | 4 Kelompok | 90 |
| 4 | Meureudu | 41 Kelompok | 1,230 |
| 5 | Ulim | 14 Kelompok | 257 |
| 6 | JangkaBuya | 12 Kelompok | 195 |
| 7 | MeurahDua | 20 Kelompok | 481 |
| 8 | Bandar Dua | 6 Kelompok | 102 |
| | **Jumlah** | **113 Kelompok** | **2490** |

*Sumber : Keputusan Bupati Pidie Jaya nomor 170 Tahun 2020 Tentang Penetapan Gabungan KelompokTani (gapoktan) dan Kelompok Tani ( Poktan)*

Tabel 2.105 menunjukkan data Kelompok Peternak Di Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya nomor 170 Tahun 2020 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan), terdapat total 113 kelompok ternak dengan jumlah anggota mencapai 2.490 orang. Kecamatan Meureudu memiliki jumlah kelompok ternak terbanyak, yaitu 41 kelompok dengan 1.230 anggota. Kecamatan lainnya juga memiliki sejumlah kelompok ternak yang aktif, seperti Kecamatan Ulim dengan 14 kelompok dan 257 anggota, serta Kecamatan Meurah Dua dengan 20 kelompok dan 481 anggota. Kecamatan Bandar Baru dan Panteraja masing-masing memiliki 8 kelompok ternak dengan anggota sebanyak 125 dan 161 orang. Di Kecamatan Jangka Buya terdapat 12 kelompok ternak dengan 195 anggota, sementara Kecamatan Bandar Dua memiliki 6 kelompok dengan 102 anggota. Kecamatan Trienggadeng memiliki 4 kelompok ternak dengan jumlah anggota sebanyak 90 orang. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan peternakan tersebar merata di berbagai kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, dengan jumlah anggota yang signifikan, mencerminkan pentingnya sektor peternakan dalam perekonomian dan mata pencaharian masyarakat.

**Tabel 2.106.**
**Penanganan Penyakit Hewan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Pidie Jaya | Tahun (Kasus) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang tertangani | 4.519 | 4.636 | 5.492 | 9.034 | 5.594 |
| 2 | Jumlah Kasus Penyakit Hewan | 4.645 | 4.717 | 5.518 | 9.128 | 5.618 |

*Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Tabel 2.106 menggambarkan jumlah kasus penyakit hewan serta jumlah kasus yang berhasil ditangani di Kabupaten Pidie Jaya dalam periode lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024.

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 4.645 kasus penyakit hewan, dan dari jumlah tersebut, 4.519 kasus berhasil ditangani. Tahun berikutnya, yaitu 2021, mengalami sedikit peningkatan menjadi 4.717 kasus, dengan 4.636 kasus yang berhasil diatasi. Angka ini terus meningkat pada tahun 2022, di mana jumlah kasus mencapai 5.518, dan 5.492 di antaranya berhasil ditangani. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan total kasus sebanyak 9.128 dan sebanyak 9.034 kasus berhasil ditangani, menunjukkan respons yang sangat baik dari pihak berwenang dalam penanganan penyakit hewan. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 5.618 kasus, dengan 5.594 di antaranya berhasil ditangani.

Secara umum, data ini menunjukkan efektivitas program pengendalian penyakit hewan yang diterapkan, di mana hampir seluruh kasus yang tercatat berhasil ditangani setiap tahunnya. Penurunan jumlah kasus pada tahun 2024 juga mencerminkan potensi keberhasilan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan hewan secara menyeluruh di Kabupaten Pidie Jaya.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penertiban ternak melalui penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penyuluhan tentang cara beternak yang baik dan modern dimana ternak diupayakan selalu berada di kandang dan petani ternak harus menyuplai kebutuhan pakan dan nutrisi yang dibutuhkan ternak seperti *sistem cut and carry* bukan dengan cara konvensional seperti ternak dilepas bebas. Selain itu pemerintah juga mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan peternak dalam hal pemanfaatan limbah pertanian yang dapat dijadikan pakan alternatif untuk ternak diantaranya seperti fermentasi jerami dan pemanfaatan kulit buah coklat. Pemanfaatan limbah ternak sendiri sebagai bioenergi seperti pembangunan biogas dan pelatihan pembuatan pupuk kandang.

Sedangkan untuk komoditi ternak unggas (Itik, Ayam Potong dan Petelur) merupakan komoditas penghasil daging dan telur yang sangat laku keras di pasaran lokal. Saat ini belum banyak peternak atau investor yang bergerak dalam bidang budidaya ternak itik, ayam potong dan petelur yang dikelola secara modern/intensif. Meningkatnya permintaan daging itik, ayam potong dan telur ayam ras untuk keperluan rumah tangga dan restoran, menjadikan Kabupaten Pidie Jaya pengimpor daging ayam dan telur yang cukup besar.

### 2.4.4.3.4. Perdagangan

Menurut Pendekatan Produksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu : 1.Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3.Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8.Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya (BPS Kabupaten Pidie Jaya, 2025).

**Tabel 2.107.**
**PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| NO | LAPANGAN USAHA | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1.644,77 | 1.694,80 | 1.849.13 | 2.023,66 | 2.200,63 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 46,96 | 49,61 | 55,79 | 58,75 | 59,95 |
| 3 | Industri Pengolahan | 107,64 | 119,49 | 138,05 | 151,71 | 162,37 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 4,00 | 4,08 | 4,38 | 4,74 | 4,85 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,63 | 0,71 | 0,92 | 0,96 | 1,07 |
| 6 | Konstruksi | 273,85 | 271,59 | 274,96 | 279,03 | 284,47 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 368,21 | 392,44 | 436,76 | 508,47 | 553,19 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 105,93 | 136,02 | 157,70 | 194,96 | 222,82 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 35,59 | 34,54 | 48,20 | 55,52 | 60,16 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 92,52 | 100,94 | 112,99 | 119,53 | 124,16 |

*Sumber : BPS Kab. Pidie Jaya Tahun 2025*

Pada tahun 2025 sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar ke dua terhadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya dengan nilai kontribusi sebesar 11,71%. Kontribusi ini menunjukan peran penting sektor perdagangan dalam perekonomian daerah, meskipun tidak menjadi sektor dominan dibandingkan sektor lainnya. Kontribusi sektor perdagangan yang masih dibawah 12% juga mengindikasikan adanya tantangan. Sektor ini belum sepenuhnya mampu menyaingi dominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang pada tahun ini menyumbang 46,58% terhadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan data pada Tabel 2.1 secara

keseluruhan kontribusi sektor perdagangan menunjukan pertumbuhan yang positif selama rentang Tahun 2020 s.d 2024.

Berikut data sektor perdagangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.108 dibawah ini

**Tabel 2.108.**
**Data Sektor Perdagangan Per Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025**

| No. | Kecamatan | Pasar Tradisonal | Pasar Lokal | Pertokoan/ Warung/ Kios | Jumlah Pedagang | Pertokoan Pemda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bandar Baru | 2 | - | 570 | 675 | - |
| 2. | Panteraja | 1 | 1 | 86 | 229 | 6 |
| 3. | Trienggadeng | 1 | 2 | 350 | 411 | 30 |
| 4. | Meureudu | 1 | 3 | 432 | 680 | 61 |
| 5. | Meurah Dua | 1 | 1 | 161 | 205 | 34 |
| 6. | Ulim | 1 | 1 | 163 | 176 | 44 |
| 7. | Jangka Buya | 1 | 2 | 160 | 164 | 4 |
| 8. | Bandar Dua | 3 | 2 | 550 | 603 | 41 |
| | **Jumlah** | **11** | **12** | **2.472** | **3.143** | **186** |

*Sumber : Disperindagkop Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Menurunya daya beli masyarakat, harga sewa pertokoan pemda yang dianggap lebih tinggi dibandingkan pertokoan milik pribadi dan terdapatnya kerusakan pada sejumlah pertokoan pemda membuat 45 unit dari total 186 unit petokoan pemda tidak beroperasi. Hal ini berpotensi mengakibatkan penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie Jaya. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalah tersebut diantaranya, mengajukan usulan perbaikan terhadap pertokoan pemda yang rusak serta membuat usulan perubahan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025. Upaya diharapakan menjadi solusi untuk mendorong terjadinya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bidang Pengembangan Perdagangan terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan melakukan stabilisasi harga bahan pokok melalui belanja subsidi, sidak pasar dan pemantauan harga bahan pokok dan bahan penting secara rutin. Selain itu pengawasan kegiatan sektor perdagangan juga dilakukan untuk memastikan kualitas barang beredar dalam kondisi baik dan sesuai. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi strategi dan langkah konkrit agar sektor perdagangan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

#### 2.4.4.3.5. Perindustrian

Dari segi perindustrian, di Kabupaten Pidie Jaya terkenal dengan salah satu industri rumah tangga, yaitu pembuatan kue adee, seiring dengan waktu industri ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu di Kabupaten Pidie Jaya juga terdapat industri sepatu dan sandal dari kulit. Usaha ini merupakan usaha mandiri yang bertempat di Kecamatan Bandar Dua.Usaha tersebut terus berkembang di karenakan penggunaan bahan dan kualitas bahan yang tetap terjaga.

Industri lainnya yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya adalah industri pengolahan kakao yang terdapat di Gampong Baroh Musa Kecamatan Bandar Baru. Pengolahan coklat ini diproduksi oleh salah satu koperasi yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya. Pabrik pengolahan kakao tersebut mampu mengolah kakao menjadi coklat batangan, aneka makanan coklat, dan aneka minuman coklat.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas : a). kawasan peruntukan industri besar; b). kawasan peruntukan industri menengah; c). kawasan peruntukan industri kecil dan industri rumah tangga; dan d). kawasan peruntukan industri lainnya. Kawasan industri tersebut berlokasi di Kecamatan Panteraja di Gampong Reudeup, Gampong Peurade, Gampong Mesjid Panteraja, dan Gampong Lhok Puuk. Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga tersebar di semua Kecamatan dan Kawasan peruntukan industri lainnya meliputi kawasan industri perikanan terletak di Kecamatan Panteraja Gampong Mesjid Panteraja.

Kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri dengan kriteria, yaitu ; a). Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri; b). Tersedia sumber bahan baku yang cukup; c). Adanya sistem pembuangan limbah; d). Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial; e). Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi atau yang berpotensi untuk pengembangan irigasi atau tidak terletak kawasan berfungsi lindung atau kawasan hutan produksi tetap dan terbatas.

Sektor riil lainnya yang berkembang di Kabupaten Pidie Jaya adalah industri masyarakat seperti industri rumah tangga yang masuk dalam kelompok usaha mikro kecil menengah (UMKM) meliputi Anyaman Tikar Pandan, Anyaman Rotan, Bordir, Pandai Besi, Garam, Kue Tradisional, Pengasinan Ikan, Batu Bata, Tahu/Tempe dan lain-lain. Semua Jenis industri tersebut dilakukan oleh individu dan kelompok. Berdasarkan data menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan terhadap industri tersebut setiap tahunnya. Industri kerajinan yang paling tinggi pertumbuhannya adalah kelompok Anyaman Tikar Pandan. Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.109 berikut.

**Tabel 2.109.**
**Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Jumlah Unit Usaha | |
|---|---|---|---|
| | | Formal | Non Formal |
| 1 | Bandar Baru | 77 | 129 |
| 2 | Panteraja | 21 | 36 |
| 3 | Trienggadeng | 49 | 82 |
| 4 | Meureudu | 43 | 74 |
| 5 | Meurah Dua | 29 | 49 |
| 6 | Ulim | 143 | 232 |
| 7 | Jangka Buya | 18 | 31 |
| 8 | Bandar Dua | 32 | 50 |
| **Jumlah Total** | | **412** | **683** |

*Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Tabel diatas memperlihatkan jumlah unit usaha industri kecil formal dan non formal di Kabupaten Pidie Jaya. Unit usaha industri kecil formal paling banyak berada di Kecamatan ulim sebanyak 143 unit dan yang terendah berada di Kecamatan Jangka Buya yaitu sebanyak 18 Unit. Sedangkan untuk unit usaha industri non formal paling banyak juga berada di Kecamatan Ulim yaitu 232 unit dan paling rendah berada di Kecamatan Jangka Buya yaitu sebanyak 31 Unit. Dari data di atas juga dapat dilihat bahwa di Kabupaten Pidie Jaya unit usaha industri kecil non formal lebih banyak di bandingkan unit usaha industri kecil formal yaitu 683 unit berbanding dengan 412 Unit dan total unit usaha industri kecil di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2024 sebanyak 1.095 unit yang tersebar di 8 Kecamatan.

Bidang industri yang umumnya merupakan industri masyarakat, paling berkembang seperti industri rumah tangga yang meliputi Anyaman Tikar Pandan, Anyaman Rotan, Bordir, Pandai Besi, Garam, Kue Tradisional, Pengasinan Ikan, Batu Bata, Tahu/Tempe dan lain-lain. Semua Jenis industri tersebut dilakukan oleh individu dan kelompok.

Industri lainnya yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya adalah industri pengolahan kakao, salah satunya berada di di Gampong Baroh Musa Kecamatan Bandar Baru. Pengolahan coklat ini di produksi oleh salah satu perusahaan swasta yang terdapat di Kabupaten Pidie jaya dan mampu mengolah kakao menjadi coklat batangan, aneka makana coklat dan aneka minuman coklat.

Selanjutnya juga ada pabrik pengolah coklat Pemerintah Kabupaten Pide Jaya sebagai Sentra Industri Coklat yang terletak di Gampong Paru Cot Kecamatan Bandar Baru. Sentra tersebut sementara ini difungsikan sebagai tempat edukasi pengolahan kakao, tempat produksi kuliner berbahan baku coklat dan tempat pelatihan pengembangan IKM Kabupaten Pidie Jaya.

Kawasan sentra industry coklat tersebut memiliki luas 2 Hektare tanah dan didalamnya terdapat beberapa bengunan yaitu ; pabrik pengolah coklat, gedung serbaguna, caffe, musalla, toilet dan beberapa bangunan kazebo. Terkait dengan kondisi pabrik pengolah coklat sekarang ini memiliki fasilitas berupa mesin produksi coklat batang dan permen coklat. Pabrik pengolah coklat tersebut belum mampu memproduksi coklat bubuk dikarnakan masih memiliki kekurangan mesin produksi seperti mesin penghancur bungkel coklat, mesin pembubuk dan mesin pres kemasan

### 2.4.4.3.6. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atas inisiatif pemerintah. Transmigrasi dipandang sebagai kerangka eksperimen dalam usaha pemanfaatan daerah di Indonesia. Dalam melakukan transmigrasi harus memiliki ketentuan-ketentuan dalam berlangsungnya transmigrasi tersebut sehingga perpindahan penduduk dapat dikatakan sebagai sebuah transmigrasi.

Transmigrasi memiliki jenis-jenis yang dibedakan dalam tujuan dan fungsinya masing-masing, yaitu transmigrasi umum, transmigrasi swakarya, transmigrasi sektoral, transmigrasi keluarga, transmigrasi swakarsa/ spontan, transmigrasi bedol desa dan transmigrasi lokal

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pidie Jaya, telah ditetapkan luas kawasan peruntukan transmigrasi kurang lebih 561,28 Ha meliputi: Kecamatan Bandar Baru seluas 105,21 Ha; Kecamatan Tringgadeng seluas 128,23 Ha; Kecamatan Meureudu seluas 129,64 Ha; Kecamatan Meurah Dua seluas 39,14 Ha; Kecamatan Ulim seluas 145,78 Ha; dan Kecamatan Bandar Dua seluas 13,28 Ha.

Transmigrasi Lokal di Kabupaten Pidie Jaya terletak di 6 lokasi yaitu Abah Lueng dan Panton Limeng di Kecamatan Bandar Baru, kemudian Gaharu dan Lhok gugop Kumba di Kecamatan Bandar Dua, kemudian Buloh di kecamatan Trienggadeng serta Lampoh lada di kecamatan Meureudu. Capaian Indikator Transmigrasi di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.110 berikut.

**Tabel 2.110.**
**Capaian Indikator Transmigrasi**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah SP binaan dan aktif | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Jumlah SP Mandiri | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Jumlah KK Mandiri | 240 | 180 | 130 | 120 | 120 |

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024*

**SP (Satuan Permukiman)*

### 2.4.4.4. Penunjang Urusan

#### 2.4.4.4.1. Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan salah satu instansi Pemerintah yang berada dibawah kendali pemerintah daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan dengan susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah Kabupaten Pidie Jaya. Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut; pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah; pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBA, APBK dan APBN; penyiapan bahan Rapat Koordinasi Evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan: menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Kabupaten; mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

**A. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah dengan Qanun**

RPJP Kabupaten Pidie Jaya telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045. Qanun ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya 20 (dua puluh) tahun, menjadi acuan di dalam

penyusunan RPJM Kabupaten Pidie Jaya dan pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dalam mewujudkan visi dan misi RPJPK perlu didukung oleh :(1) komitmen dari kepemimpinan Kabupaten Pidie Jaya yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah kabupaten; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

**B. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah dengan Qanun**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Pidie Jaya periode yang lalu ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019 - 2024 yang diundangkan pada tanggal 17 September 2020.

Saat ini (2025), Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sedang Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

**C. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie Jaya disusun setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten dan berpedoman pada Arah Kebijakan Tahunan dalam RPJMD Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan RKPK ini SKPK akan menjabarkan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan selanjutnya menjadi acuan penyusunan Prioritas Palfon Anggara Sementara (PPAS) untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBK setiap tahunnya.

**2.4.4.4.2. Keuangan**

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karenanya, dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna. Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan. Indikator keuangan daerah Kabupaten Pidie Jaya kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu dapat dilihat pada Tabel 2.111 berikut.

**Tabel 2.111.**
**Indikator Keuangan Daerah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Persentase SILPA Terhadap APBD (%) | 9,70 % | 3,33 % | 2,90 % | 4,53 % | 1,08 % | 1.75% |
| 3 | Persentase Belanja Pendidikan (20%) | 21,91 % | 20,51 % | 22,16 % | 19,52 | 17,92 | 17,20% |
| 4 | Persentase Belanja Kesehatan (10%) | 16,14 % | 17,82 5 | 19,74 % | 20,09 % | 13,37 | 12.29% |
| 6 | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat waktu | Tepat Waktu |
| | Tanggal | Qanun Nomor 8 tahun 2018, tanggal 21/12/2018 | Qanun APBK Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 | Qanun Nomor 7 Tahun 2020 Tanggal 28/12/2020 | Qanun Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 28/12/2021 | Qanun Nomor 5 Tahun 2022 | Qanun Nomor 6 Tahun 2023<br>Tanggal 29/12/2023 |

*Sumber : BPKK Pidie Jaya Tahun 2025 (diolah)*

## A. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya BPK melakukan pemeriksaan sistem pengendalian interin dan penyajian Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Dari hasil pemeriksaan tersebut BPK memberikan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Semua Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pendapat atau opini yang merupakan dambaan oleh semua Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara. Kabupaten Pidie Jaya untuk pertama sekali memperoleh WTP setelah pemekaran, yaitu pada tahun 2008 selanjutnya di tahun 2015 berturut-turut sampai tahun 2022. Hal tersebut menandakan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Pidie Jaya sudah dilakukan dengan baik.

**B. SiLPA Daerah dan Alokasi Belanja Daerah**

SiLPA merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Persentase SiLPA terhadap APBD Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2018 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi dengan nilai rata-rata sebesar 5,33%. Persentase SiLPA terhadap APBD tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi tahun 2019 sebesar 9,70%, sedang persentase SiLPA terhadap APBD terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 2,90.

Besar kecilnya SiLPA meproyeksikan efektifitas dari perencanan yang tepat dan penyerapan anggaran yang optimal. Semakin besar SiLPA dapat mengindikasikan bahwa tidak optimalnya penganggaran dan penyerapan belanja Pemerintah Daerah. Secara umum SiLPA dapat terjadi dikarenakan, pendapatan yang melampaui target, penghematan belanja yang dilakukan untuk membiayai kebutuhan prioritas lainnya pada periode yang akan datang, kurang optimalnya target capain belanja daerah dan terakhir SiLPA dapat terjadi diakibatkan oleh melebihinya penerimaan pembiayaan

**C. Persentase alokasi belanja Sektor Pendidikan dan Kesehatan**

Alokasi belanja sektor Pendidikan dan Kesehatan merupakan pemenuhan belanja wajib (mandatory Spanding) dalam APBD. Adapun besaran persentase belanja sektor Pendidikan dan Kesehatan diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Belanja untuk sektor Pendidikan dan Kesehatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAU, DBH,DAK, dan DID), Transfer Pemerintah Profinsi (Bagi Hasil Pajak Provinsi, DOKA), serta sumber lain yang dialokasi untuk belanja pada sektor pendidikan dan sektor kesahatan. Belanja pada sektor Pendidikan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, gaji guru, dana sertifikasi, tambahan penghasilan, BOP Paud, BOS dan lain-lain. Sedangkan Belanja pada Sektor Kesehatan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Kesehatan.

Alokasi belanja daerah untuk sektor pendidikan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 telah mencapai persentase rata-rata 20% jika dibandingkan dengan total belanja APBD. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari 20,51% menjadi 22,16%, dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 19,52% dan pada tahun 2023 menjadi 17,92% . Kondisi pada tahun 2024 sebesar 17,20%

Untuk sektor kesehatan tetap adanya pembenahan pelayanan bidang kesehatan meski sudah mencapai diatas 10% dari rata-rata tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 persentase belanja dibidang kesehatan mencapai 16,14%. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 17,82 % dan terus meningkat pada tahun 2021 sejumlah 19,74%, begitu juga dengan tahun 2022 masih mengalami peningkatan sebesar 20,09% sampai tahun 2023 13,37 %

#### 2.4.4.4.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Kepegawaian merupakan urusan krusial dalam upaya peningkatan tatakelola pemerintahan. Urusan kepegawaian merupakan unsur penunjang yang memiliki fungsi mengelola ASN dan erat kaitannya dengan beberapa aspek seperti manajemen kepegawaian, pengadaan calon ASN, mutasi, promosi, dan pemberhentian ASN, serta pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN. Salah satu kinerja urusan kepegawaian dapat dilihat dari tabel di atas, Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi pegawai. Jumlah ASN di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2024 sebanyak 3.144 orang. Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang profesional, bersih, berwibawa, dan bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan data capaian indikator kinerja pada Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 5,1 % dan terendah pada tahun 2020 yaitu 1,6 %. Hal ini menunjukan bahwa kurang lebih 85 % ASN yang ada di Kabupaten Pidie Jaya belum mengikuti pendidikan formal. Begitu pula dengan Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tertinggi pada tahun 2024 yaitu 13 %. Upaya peningkatan pelayanan publik dilakukan dengan meningkatkan kualitas pemberi layanan. Beberapa hal yang menjadi fokus pengembangan adalah efektifitas dan produktivitas kinerja aparatur, peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui pendidikan maupun pelatihan serta pembinaan pegawai. Upaya peningkatan kapasitas aparatur dilakukan guna mewujudkan penempatan jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki pegawai. Berikut Jumlah pegawai dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 seperti pada tabel 2.112 berikut.

**Tabel 2.112.**
**Kondisi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah ASN Kabupaten Pidie Jaya | 3.220 Orang | 3.191 Orang | 3.340 Orang | 3.540 Orang | 3.144 Orang |
| 2 | Rata-rata Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan | 222 Orang | 654 Orang | 796 Orang | 728 Orang | 800 Orang |
| 3 | Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 1,6 % | 4,5 % | 3,2 % | 3,2 % | 5,1 % |
| 4 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural | 3,7 % | 1 % | 5,2 % | 8 % | 13,3 % |
| 5 | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah | 27 Orang | 32 Orang | 34 Orang | 33 Orang | 34 Orang |
| 6 | Jumlah Pejabat Administrasi pada Instansi Pemerintah | 133 Orang | 145 Orang | 151 Orang | 147 Orang | 148 Orang |
| 7 | Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah | 1.962 Orang | 1.949 Orang | 2.056 Orang | 2.219 Orang | 2.328 Orang |

*Sumber : BKPSDM Kab. Pidie Jaya, 2025*

### 2.4.4.4.4. Penelitian dan pengembangan

Penelitian dan pengembangan adalah unsur penunjang di dalam suatu daerah yang tugasnya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di seluruh bidang yang diperlukan. Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang di ukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

. Penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya melekat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berperan dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengoordinasian setiap penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan. Yang selanjutnya merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah serta mempublikasikan hasil penelitian melalui website pemerintah. Untuk implementasi rencana kelitbangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan mulai tahun 2020 sudah mulai dilaksanakan melalui pelaksanaan kebijakan inovasi yang diharuskan pemerintah pusat.

#### 2.4.4.4.5. Pengawasan

Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya memiliki peran strategis dalam memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*. Sebagai lembaga pengawasan internal, Inspektorat bertanggung jawab melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta berprinsip pada efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Gambaran Kinerja Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut:

1. Fungsi Pengawasan Internal, Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya bertugas bertugas melaksanakan audit internal terhadap berbagai kegiatan pemerintah daerah, termasuk dinas, badan, dan instansi lainnya. Audit bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan serta memastikan bahwa penggunaan anggaran telah efektif dan efisien. Kinerja Inspektorat diukur dari kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan tindak lanjut atas temuan audit.
2. Pencegahan dan Penanganan Korupsi, Dalam upaya upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat integritas aparatur pemerintah. Pemeriksaan khusus dilakukan jika terdapat indikasi penyimpangan atau pelanggaran hukum. Kinerja Inspektorat dalam aspek ini dapat dilihat dari jumlah temuan korupsi yang berhasil diungkap, tindakan pencegahan yang diambil, serta efektivitas rekomendasi yang diberikan.
3. Pembinaan dan Pengawasan, Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya juga bertugas memberikan pembinaan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi, pelaporan keuangan, dan administrasi pemerintahan. Saran diberikan untuk perbaikan sistem dan prosedur kerja yang lebih efisien dan akuntabel. Keberhasilan pembinaan ini tercermin dari meningkatnya kepatuhan SKPK terhadap rekomendasi Inspektorat dan membaiknya tata kelola pemerintahan.
4. Tindak Lanjut dan Evaluasi, Kinerja Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya juga diukur dari efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan selama audit dan pemeriksaan. Hal ini mencakup sejauh mana rekomendasi diterapkan oleh instansi terkait dan dampak perbaikan yang terjadi setelahnya. Kinerja yang baik ditandai dengan tingginya tingkat penyelesaian temuan dan perbaikan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, kinerja Inspektorat Kabupaten mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat yang berkinerja baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah melalui pengawasan yang efektif dan pencegahan terhadap penyimpangan. Tingkat kinerja pengawasan Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya yang telah dilakukan untuk tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.113.**
**Kinerja Pengawasan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Level Maturitas SPIP Terintegrasi | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2. | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pendampingan (OPD, Puskesmas, Sekolah, Desa, Mandatory) | 41 | 576 | 401 | 500 | 500 |
| 3. | Level Kapabilitas APIP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4. | Persentase tidak lanjut temuan BPK | 75,00 | 80,88 | 82,57 | 84,04 | 85,53 |

*Sumber : Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Dari tabel 2.113 diatas, untuk pencapaian level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya hingga tahun 2024 masih berada pada level 3. Hal ini dipengaruhi oleh kepedulian dan komitmen dari Kepala daerah serta seluruh perangkat daerah untuk mencapai level yang lebih tinggi. Tanpa dukungan penuh dari seluruh unsur pemerintah daerah, pencapaian level maturitas yang lebih baik akan sulit direalisasikan. Dalam hal ini, Inspektorat berperan sebagai mediator dan penjamin kualitas *(quality assurance)* atas pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah.

Adapun jumlah entitas yang mendapat pendampingan oleh Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir, yang disebabkan oleh perubahan regulasi, khususnya terkait penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Tahun 2022, cakupan pendampingan diperluas dengan memasukkan BUMD, yakni PDAM Tirta Krueng Meureudu, sebagai entitas pendampingan. Selain pendampingan untuk perangkat daerah yang berjumlah 41 entitas, Inspektorat juga melaksanakan evaluasi, pendampingan, asistensi, dan monitoring terhadap 222 Desa di Kabupaten Pidie Jaya, 125 Sekolah yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), 11 Puskesmas dan juga reviu yang wajib dilaksankan dalam hal sebagai penjaminan terhadap suatu pelaksanaan kegiatan. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan urusan pengawasan di kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut:

1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang belum memadai (17 Auditor untuk tahun 2024)
2. Sarana dan Prasarana yang tidak cukup tersedia baik alat ukur maupun alat kerja lainnya.
3. Jumlah alokasi untuk pelatihan 120 jam sesuai Pedum belum adanya alokasi anggaran.
4. Anggaran Pengawasan yang belum memenuhi regulasi yang ditetapkan yakni 1% dari APBK (Pedum Penyusunan APBD 2024)
5. Banyaknya Jumlah Objek Pemeriksaan yang membutuhkan quality assurance dari Inspektorat dan risiko yang tinggi baik benturan kepentingan maupun benturan dengan instansi vertikal lain maupun Aparat Penegak Hukum (APH)

#### 2.4.4.4.6. Sekretariat Daerah Kabupaten

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrastif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Gambaran umum mengenai capaian di sekretariat daerah dilihat pada Tabel 2.114 berikut.

**Tabel 2.114.**
**Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | SAKIP | 60.86 (B) | 61.15 (B) | 61.59(B) | 62.42 (B) | 63.11 (B) |
| 2 | Indeks Reformasi Birokrasi | 46.77(C) | 48.20(C) | 50.03(CC) | 51.45(CC) | 65.08(B) |
| 3 | Jumlah SKPK menerapkan RB | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 4 | Nilai LPPD | 2,9619 (baik) | 2,39 (rendah) | 1,7350 (sangat rendah) | Tidak Dinilai | belum ada penilaian |
| 5 | Jumlah Produk Hukum | 61 | 71 | 57 | 58 | 32 |
| 6 | TPID Kabupaten | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 7 | Indeks Pelayanan Publik | - | 3.65 | 3.74 | 2.55 | 4.06 |
| 8 | Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik | - | - | 78.10 | 86.15 | 92.44 |

*Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Berdasarkan data pada Tabel 2.113, capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan pada beberapa indikator utama. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengalami peningkatan bertahap dari 60,86 pada tahun 2020 menjadi 63,11

pada tahun 2024, meskipun masih berada pada kategori B. Indeks Reformasi Birokrasi juga mencatat peningkatan signifikan, dari 46,77 (kategori C) pada tahun 2020 menjadi 65,08 (kategori B) pada tahun 2024, mencerminkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi.

Namun demikian, jumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang menerapkan Reformasi Birokrasi tetap di angka 42 selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa semua SKPK di Pidie Jaya masih menerapkan Reformasi Birokrasi pada SPKP. Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menunjukkan tren penurunan, dari nilai 2,9619 (kategori baik) pada tahun 2020 menjadi 1,7350 (kategori sangat rendah) pada tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2023, LPPD tidak dinilai, dan pada tahun 2024 belum terdapat hasil penilaian. Ketidaktersediaan penilaian pada tahun 2023 menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti, karena hal ini berdampak langsung terhadap evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jumlah produk hukum yang dihasilkan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024, yaitu sebanyak 320 produk, naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 58. Peningkatan ini dapat mencerminkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan regulasi yang semakin kompleks serta peningkatan efektivitas perumusan kebijakan hukum daerah. Hal ini juga menunjukkan adanya akselerasi dalam penyusunan perangkat hukum sebagai bagian dari penguatan fungsi koordinasi, administrasi, dan pelayanan.. Meski demikian, capaian di bidang pelayanan publik mengalami perbaikan yang signifikan, ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Pelayanan Publik menjadi 4,06 serta kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang mencapai 92,44 pada tahun 2024. Capaian ini menandakan perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat secara nyata.

#### 2.4.4.4.7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen

rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPK) dan terintegrasi programprogram DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Hasil pelaksanaan fungsi DPRK diantaranya adalah jumlah qanun yang disahkan. Sekretaris DPRK mempunyai tugas pokok antara lain:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
2. Meyelenggarakan administrasi keuangan
3. Mendukung pelaksana tugas dan fungsi DPRK, dan
4. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten Pidie Jaya.

Hasil pelaksanaan fungsi DPRK diantaranya adalah jumlah qanun yang disahkan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.115.**
**Jumlah Qanun yang Disahkan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Qanun yang disahkan | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 2 | Program Legislasi Kabupaten | 11 | 10 | 12 | 12 | 5 |
| 3 | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD | ada | ada | ada | ada | ada |

*Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Beberapa permasalahan dalam menjalankan fungsi DPRK diantaranya adalah:

1. Kurangnya pemahaman bidang teknologi informasi yang berbasis kekinian dalam pelaksanaan kelancaran kinerja Sekretariat DPRK Pidie Jaya
2. Kurangnya ketersediaan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan pelaksanaan tugas DPRK Bidang dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta dapat memenuhi kualitas kompetensi bidang teknologi informasi kekinian dengan memperhatikan keuangan daerah.
3. Penggunaan bahasa-bahasa non formal serta bahasa daerah oleh anggota DPRK Ketika rapat, sehingga risalah dan laporan yang disusun dan dihimpun oleh bagian Persidangan dan Risalah harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan kaidah-kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
4. Dalam Pelaksanaan tugas DPRK di bidang legislasi, khususnya terkait dengan program legislasi kabupaten baik usul inisiatif DPRK maupun usul Pemerintah Kabupaten belum dapat terealisasi sepenuhnya mengingat keterbatasan ploting anggaran dan tingginya intensitas kinerja DPRK di dalam dan di luar kantor.
5. Terkendalanya dalam perumusan ide kreatif untuk penyusunan usul inisiatif DPRK Pidie Jaya, dikarenakan kesiapan sumber daya manusia yang minim

khususnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan atau *legal drafting* dari keilmuan sarjana hukum.

6. Kurangnya fasilitas infrastruktur peralatan kantor sebagai penunjang utama pelaksanaan kegiatan fasilitasi rapat-rapat DPRK sehingga berpengaruh kepada ketepatan waktu penyelesaian tugas yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

#### 2.4.4.4.8. Kecamatan

Jumlah kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 8 kecamatan yaitu Kecamatan Bandar Dua, Bandar Baru, Panteraja, Meurah Dua, Ulim, Meureudu, Jangka Buya dan Trienggadeng.

Pemerintahan kecamatan merupakan komponen penting dalam struktur administrasi pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya. Tugas utama kecamatan mencakup penyelenggaraan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan administrasi di tingkat kecamatan. Dengan perannya yang vital dalam menyediakan pelayanan publik di tingkat kecamatan, pemerintahan kecamatan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Kinerja kecamatan pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.116 berikut.

**Tabel 2.116.**
**Kinerja Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020- 2024**

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan | Urusan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di kecamatan | Persen | 78,24 | 80,29 | 82 | 83,26 | 85,12 |
| 3 | Cakupan penyelenggaraan pemerintah umum | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase desa yang menerapkan perencanaan dan pelaporan yang berbasis elektronik | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kecamatan merupakan bagian integral dari pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang berfungsi untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan. Dipimpin oleh seorang camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati, OPD kecamatan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai seksi dan staf yang fokus pada bidang-

bidang tertentu, seperti pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, pelayanan umum, dan ketertiban. Struktur ini dirancang untuk memastikan semua aspek pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan efektif di tingkat kecamatan.

Tugas utama OPD kecamatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan sebagian kewenangan bupati di wilayah kecamatan. Selain itu, OPD kecamatan juga bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan pemerintahan desa, memantau pelaksanaan pembangunan, serta memastikan bahwa pelayanan publik di tingkat kecamatan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Fungsi-fungsi ini mencakup pelayanan administratif kepada masyarakat, pembinaan terhadap pemerintahan desa, serta pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, OPD kecamatan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK). Sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan masyarakat di tingkat desa, OPD kecamatan memastikan implementasi program-program strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Peran ini sangat krusial dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Namun, OPD kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, serta tantangan geografis dan sosial merupakan beberapa hambatan yang perlu diatasi. Di sisi lain, kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya juga memiliki peluang besar untuk memberdayakan potensi lokal, seperti di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Hubungan yang baik antara OPD kecamatan dengan para stakeholder, termasuk pemerintah desa, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), sangat penting dalam memastikan keberhasilan program-program pemerintah. Melalui kerja sama yang sinergis dengan berbagai pihak, OPD kecamatan dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai motor

penggerak pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya

Enam urusan yang dilimpahkan kepada camat di tingkat kecamatan adalah:

1. Urusan Pemerintahan Umum: Camat melaksanakan tugas pemerintahan umum, seperti mengoordinasikan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan, memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta menjaga ketertiban dan ketentraman umum.
2. Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan: Camat bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program-program desa.
3. Pelayanan Publik: Camat memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat, seperti pengurusan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan berbagai surat keterangan. Camat juga memfasilitasi pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
4. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Camat memiliki peran dalam menjaga ketertiban umum dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum serta keamanan di wilayah kecamatan.
5. Pembangunan Daerah: Camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati dalam bidang pembangunan daerah di tingkat kecamatan. Ini mencakup pengawasan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, ekonomi, serta sosial.
6. Pemberdayaan Masyarakat: Camat berperan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di wilayah kecamatan.

### 2.4.4.5. Layanan Urusan Keistimewaan

#### 2.4.4.5.1. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

**A. Pelaksanaan Syariat Islam**

Aceh memiliki tempat istimewa dalam kontalasi perjalanan sejarah Indonesia. Bukan karena sumbangannya yang yang tidak ternilai dalam perjuangan Nasional, tetapi juga karena karakteristik budaya dan masyarakatnya yang tergolong unik dan menarik perhatian banyak kalangan. Disamping itu Aceh telah diberikan hak Otonomi Khusus oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan pelaksanaan Syariat

Islam. Kewenangan memberlakukan Syariat Islam di Aceh berawal dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang tersebut diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam.

Untuk menindaklanjuti kedua Undang-Undang diatas, dibentuklah peraturan-peraturan daerah atau Qanun di Aceh khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam dilapangan yakni Qanun no.11 tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir ( perjudian ), dan Qanun nomor 14 tahun 2003 tentamg Khalwat ( mesum ). Dalam perkembangan selanjutnya perlakuan Syariat Islam tersebut diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Aceh. melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, diterbitkan payung hukum yang terbaru terhadap pelanggaran syariat islam dalam bentuk qanun, yaitu: qanun No.8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam dan qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Gelegar pemberlakuan Syariat Islam di Pidie Jaya dimulai sejak terbentuknya Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya sebagai unit kerja Pemerintah Daerah dan instansi otonom pada awalnya dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Namun saat ini telah terbit Qanun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, dimana Dinas Syariat Islam mempunyai tugas umum Pemerintah Kabupaten di bidang keistimewaan dan kekhususan Pelaksanaan Syariat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut, berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Syariat Islam merupakan urusan keistimewaan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang berfungsi pelayanan umum dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UU-PA) pasal 125 dan pasal 127.

Pasal 125 UU-PA mengamanatkan:

1. Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak
2. Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum

pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Selanjutnya Pasal 127 UU-PA mengamanatkan :

1. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam.
2. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
3. Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam.
4. Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan qanun yang memperhatikan peraturan perundang-undangan

Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam sebagai prioritas pembangunan daerah, yang diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat dalam bingkai Syariat Islam adalah dengan penerapan aturan Islam untuk membentuk dan membudayakan perilaku islami dengan harapan membentuk kepribadian islami bagi masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menanamkan nilai-nilai aturan Islam dalam kehidupan beragama secara kesinambungan dan mensosialisasikan aturan islam tersebut pada kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Pidie Jaya ke depan.

Upaya untuk mendukung terwujudnya kabupaten yang Islami, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Syariat Islam menjadikan peningkatan dan pemahaman dan pengamalan Syariat Islam sebagai prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat dalam bingkai Syariat Islam. Selama tahun 2014 s/d saat ini, Dinas Syariat Kabupaten Pidie Jaya tetap melaksanakan pengajian rutin mingguan bagi masyarakat. Pengajian rutin mingguan ini dihadiri oleh unsur pemerintah dan masyarakat luas dengan menghadirkan tokoh agama untuk memberikan bimbingan keagaamaan. Hal ini dikarenakan para tokoh agama merupakan pembimbing serta penuntun masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai agama yang mereka yakini. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Syariat Islam juga melakukan pengajian, yaitu

membaca Al-Quran berupa surat yasin pada ba'da shalat magrib yang diiringi dengan tausiah dengan mengunjungi mesjid-mesjid dan meunasah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Hal ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang Syariat Islam yang nantinya diharapkan akan timbul kekebalan dalam masyarakat terhadap hal-hal yang negative (yang dilarang) oleh Syariat Islam. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih tahu dan faham tentang hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Materi- materi yang disampaikan berhubungan dengan tauhid, fiqah, tasawuf dan materi-materi lainnya dalam rangka untuk meningkatkan kepribadian islami masyarakat Kabupaten Pidie Jaya secara menyeluruh.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun syariat belum semuanya dipatuhi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah temuan kasus pelanggaran Syariat Islam. Umumnya jenis pelanggaran syariah yang dilakukan adalah Maisir dan khalwat. Meskipun di tahun 2023 temuan kasus berkurang hanya sampai di angka 6 kasus, dikarenakan tim yang diturunkan ke lapangan juga belum memadai disertai berbagai kendala. Penanganan semua kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dalam bentuk pembinaan, kecuali 3 pelanggar yang ditindak lanjutkan ke lidik/sidik sebagaimana tertera pada Tabel 2.117 berikut.

**Tabel 2.117.**
**Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| Tahun | Jumlah Kasus |
|---|---|
| 2020 | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 6 |

*Sumber: Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Dari data diatas terlihat dari tahun ke tahun jumlah kasus terus menurun, namun bukan itu yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan syariat Islam disatu daerah, yang harus diperhatikan tingkat pemahanan masyarakat dalam kehidupan sehari hari, artinya pemerintah tidak berhenti dengan sedikitnya kasus pelanggaran syariat yang terjadi, pemerintah harus terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka membina masyarakat untuk memahami syariat Islam.

## B. Pengembangan Syiar Islam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengamanatkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam tidak hanya ibadah dan hukum, tetapi juga meliputi aspek ibadah,

ahwal al-syahshiyah (hukum keluarga), mu'amalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam juga. Dinas Syariat Islam telah penguatan syiar Islam di Kabupaten Pidie Jaya seperti pelatihan manasik haji, perlombaan pestival anak shaleh,perlombaan zikir maulid, safari ramadahan, Perlombaan MTQ, perlombaan kegiatan perayaan 1 muharram yang bekerjasama denga bagian kessos setdakab Pidie Jaya.

Berbagai persoalan umat saat ini, mulai persoalan kemiskinan, pornografi, korupsi, pendangkalan akidah, penyebaran aliran sesat dan juga kerusakan moral lainnya, seolah menegaskan akan pentingnya peran seluruh komponen masyarakat dalam mengatasi akutnya problematika sosial masyarakat tersebut. Dalam mengurai permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Pidie jaya akan berupaya untuk mendorong suatu usaha peningkatan peran dan SDM ulama melalui program pengkaderan dan pemberdayaan ulama, hasilnya diharapkan akan lahir para ulama muda dan da'i yang mumpuni dalam artian mempunyai wawasan ke-islaman yang luas yang tersebar di seluruh wilayah sehingga dapat berkontribusi nyata dalam masyarakat. Dengan hadirnya ulama dan da'i yang mempunyai wawasan ke-islaman yang mumpuni, mempunyai kompetensi intelektual dan integritas moral yang terpuji akan mampu merespon berbagai gejala dan fenomena sosial sehingga dapat berperan maksimal di tengah-tengah kehidupan umat serta diharapkan nantinya dapat mengurai dan memberikan solusi yang tepat atas berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat, untuk itu Pemerinta Kabupaten Pidie jaya akan bekerja sama dengan MPU Provinsi yang sudah menetapkan satu program Pendidikan Kader Ulama (PKU) sesuai dengan amanah Qanun nomor 2 Tahun 2009 merupakan tugas pokok Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Disamping itu, Pemerintah kabupaten Pidie Jaya juga turut mendukung usaha peningkatan peran ulama dalam mencari berbagai solusi permasalahan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat sehingga mendapat kejelasan hukum/fatwa syari'at baik yang berupa fatwa, taushiyah maupun himbauan/saran kepada masyarakat serta kepada instansi pemerintah berupa pertimbangan terhadap kebijakan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi, disamping itu, MPU Kabupaten Pidie jaya juga ikut serta melaksanakan sosialisasi fatwa MPU Aceh kepada para ulama, unsur pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur wanita dan jajaran pemerintah kab/kota dan instansi terkait lainnya. Sosialisasi ini telah dilaksanakan selama 3 tahun terakhir disebagian besar Kab/Kota yang ada di Aceh. Sarana Dan Prasarana Peribadatan

Dalam hal pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat keberadaan rumah ibadah terutama mesjid dan meunasah, telah lazim digunakan

sebagai sarana menghidupkan syiar-syiar Islam seperti pembacaan dalail khairat, pengajian, pengkajian ilmu-ilmu agama dan kegiatan syiar-syiar lainnya. Rumah ibadah di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2024 berjumlah 76 Mesjid dan 318 meunasah yang tersebar di delapan Kecamatan sebagaimana terlihat Tabel 2.118 berikut.

**Tabel 2.118.**
**Jumlah Mesjid Dan Meunasah Dalam**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2024**

| No | Kecamatan | Mesjid | | | | | Meunasah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Bandar Baru | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 2 | Panteraja | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3 | Trienggadeng | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 4 | Meureudu | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 5 | Meurah Dua | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 6 | Ulim | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 7 | Jangka Buya | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Bandar Dua | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| **Jumlah** | | **72** | **74** | **74** | **75** | **76** | **318** | **318** | **318** | **318** | **318** |

*Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya Tahun, 2025*

Selain mesjid dan meunasah keberadaan Majelis Taklim dan juga Taman Pendididikan Al-Qur'an (TPA) merupakan bagian dari lembaga pendidikan keagamaan khas Islam yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Melalui majelis taklim, masyarakat yang terlibat didalamnya dapat merasakan betapa keberadaan lembaga ini menjadi sarana pembinaan moral spiritual serta menambah pengetahuan keislaman guna meningkatkan kualitas sumber daya muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Begitu juga halnya Taman pendidikan Al-Quran sangat berperan dalam meningkatkan pendidikan dasar bagi santri yang nantinya diharapkan menjadi anak yang saleh dan salihah serta fungsinya sebagai wahana pendidikan dan kesejahteraan santri

Selama ini, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, melalui Dinas Syariat Islam telah memberikan biaya operasional kepada lembaga Majelis Taklim dan TPA dengan rincian 390 (Tiga Ratus Sembilan Puluh) lembaga Majelis Taklim dan 427 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh) unit Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Jumlah Majelis Taklim dan TPA yang Mendapat Biaya Operasional Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.119. Selanjutnya jumlah Guru Santri TPA Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya disajikan pada Tabel 2.120 berikut.

**Tabel 2.119.**
**Jumlah Majelis Taklim dan TPA yang Mendapat Biaya Operasional Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Kecamatan | Majelis Taklim | | | | | TPA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Bandar Baru | 77 | 77 | 77 | 62 | 62 | 89 | 89 | 89 | 67 | 67 |
| 2 | Panteraja | 49 | 49 | 49 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| 3 | Trienggadeng | 19 | 19 | 19 | 34 | 34 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| 4 | Meureudu | 63 | 63 | 63 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 59 | 59 |
| 5 | Meurah Dua | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 |
| 6 | Ulim | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 |
| 7 | Jangka Buya | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 8 | Bandar Dua | 89 | 89 | 89 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |
| **Jumlah** | | **390** | **390** | **390** | **294** | | **294** | **427** | **427** | **372** | **372** |

*Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya Tahun, 2025*

**Tabel 2.120.**
**Jumlah Guru Santri TPA Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Kecamatan | Majelis Taklim | | | | | TPA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Bandar Baru | 77 | 77 | 77 | 62 | 62 | 89 | 89 | 89 | 67 | 67 |
| 2 | Panteraja | 49 | 49 | 49 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| 3 | Trienggadeng | 19 | 19 | 19 | 34 | 34 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| 4 | Meureudu | 63 | 63 | 63 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 59 | 59 |
| 5 | Meurah Dua | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 |
| 6 | Ulim | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 |
| 7 | Jangka Buya | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 8 | Bandar Dua | 89 | 89 | 89 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |
| **Jumlah** | | **390** | **390** | **390** | **294** | **294** | **294** | **427** | **427** | **372** | **372** |

*Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya Tahun, 2025*

Dinas Syariat Islam untuk melakukan berbagai kebijakan dalam penerapan Syariat Islam secara optimal (kaffah) di Kabupaten Pidie Jaya yang seratus persen penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini pelaksanaan Syariat Islam bukan sebatas pelaksanaan hukum cambuk bagi yang melanggarnya, akan tetapi pelaksanaannya lebih ditekankan bagaimana warga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dengan berlakunya syariat Islam tersebut. Sebagai indikator untuk memenuhi pencapaian target tentang fasilitas keagamaan tempat peribadatan berupa masjid terdapat 76 unit, meunasah berjumlah 318 unit, dan Taman Pengajian Al-Quran (TPA) sebanyak 372 unit yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya.

### 2.4.4.5.2. Majelis Permusyawaratan Ulama

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan suatu lembaga keistimewaan Aceh yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Muslim untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam yang berada di Kabupaten Pidie Jaya. MPU memiliki peranan sangat penting dalam rangka memberi masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Pidie Jaya dan DPRK terutama yang berkaitan dengan Syari'at Islam. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009

tentang MPU, lembaga ini berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Memiliki wewenang memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Serta memiliki tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam, melakukan pengkaderan ulama dan melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

Peran dan fungsi ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pidie Jaya berpengaruh dalam dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Pidie Jaya dan Masyarakat. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pidie Jaya telah mensosialisasikan Fatwa dan Taushiyah MPU Aceh, mengeluarkan Taushiyah kepada pemerintah Pidie Jaya terhadap kebijakan daerah terutama dalam implementasi syari'at islam di Pidie Jaya. Disamping itu, MPU juga melaksanakan Pendidikan Kader Ulama (PKU) untuk melahirkan para ulama yang mempunyai kompetensi dan wawasan ke-islaman yang luas dan tersebar di seluruh wilayah Pidie Jaya.

**Tabel 2.121.**
**Capaian Kinerja Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Jaya**
**Tahun 2019-2024**

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Fatwa & Taushiyah yang disosialisasikan | Dok | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | Jumlah Kader Ulama yang dilatih | orang | 35 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 3 | Jumlah Muzarakah dan Rakor yang dilaksaakan | Dok | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |

*Sumber: Sekretariat MPU Kab. Pidie Jaya Tahun 2025*

Berdasarkan data Tabel 2.121, indikator kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pidie Jaya menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh bertambahnya jumlah fatwa dan taushiyah yang disosialisasikan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Akan tetapi kegiatan pendidikan kader ulama perlu menjadi perhatian karena tidak dilaksanakan 2 tahun berturut turut.

### 2.4.4.5.3. Baitul Mal

Pengelolaan Harta Agama juga menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Dinul Islam dalam masyarakat. Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Baitul Mal telah mengalami perubahan beberapa kali dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 dan yang terakhir diubah kembali dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat. Sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang pengelolaan harta agama yang dilakukan dengan manajemen yang baik mampu menciptakan kemandirian dan produktifitas masyarakat. Penerimaan dan realisasi Zakat dan Infaq pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya kurun waktu 5 tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.122 berikut :

**Tabel 2.122.**
**Jumlah Penerimaan dan Realisasi Zakat, Infaq Dan Shadaqah**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 dan Tahun 2024**

| No. | Tahun | Zakat | | Infaq | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Penerimaan | Realisasi | Penerimaan | Realisasi |
| 1 | 2020 | 3.291.978.201,27 | 2.505.605.931 | 0 | 697.000.000 |
| 2 | 2021 | 5.334.725.988,60 | 2.695.862.910 | 0 | 897.000.000 |
| 3 | 2022 | 1.653.310.937,06 | 1.510.747.032 | 2.275.447.367,27 | 2.089.513.183 |
| 4 | 2023 | 1.561.430.367,00 | 1.580.855,821 | 1.998.961.400,87 | 2.013.161.683 |
| 5 | 2024 | 1.791.323.474,50 | 1.608.146.082,00 | 2.511.992.338,35 | 2.885.266.000,00 |

*Sumber: Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Dari tabel diatas untuk penerimaan Zakat dan Infaq mengalami kenaikan yang tidak signifikan karna hanya memperoleh penerimaan Zakat dan Infaqnya yang bersumber dari penghasilan ASN dan rekanan Pemerintah saja. sedangkan penurunan penerimaan Zakat dan Infak disebabkan karna terjadi mutasi gaji guru SMA yang tadinya dikelola oleh Kabupaten menjadi pengelolaannya di Provinsi. Hampir selama 5 (lima) tahun penerimaan dan realisasi Zakat dan Infaq secara kode rekening tidak dipisahkan sehingga semua penerimaan dan penyaluran melalui satu rekening kegiatan Zakat, barulah pada tahun 2022 penerimaan dan penyaluran baik Zakat dan Infaq terpisah berdasarkan Kode Rekening dan Kegiatan

Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan jenis penyaluran antara lain bantuan rumah layak huni kepada Fakir Miskin hampir setiap tahun di upayakan agar di salurkan kepada 8 (delapan) Kecamatan dan Muallaf, bantuan kepada Balai Pengajian. Disamping itu, Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya juga memberikan bantuan beasiswa kepada Tahfidz MUQ dalam pengembangan Insan Qurani.

Sumber – sumber Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya saat ini merujuk kepada Qanun No.10 tahun 2007, Peraturan Bupati No.17

Tahun 2008 dan Intruksi Bupati No. 1 Tahun 2012, telah memberikan kewenangan untuk mengumpulkan zakat, baik terhadap Lembaga Institusi Negara, baik institusi pusat, daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta (private), dan juga zakat pendapatan dari PNS, Pegawai BUMN, POLRI, TNI, Anggota Dewan, dan lain-lain.

Sistem Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah berdasarkan pembagian Senif yang didata dan diverifikasi oleh Baitul Mal Gampong (BMG) yang terdiri dari Keuchik dan Imuem Gampong. Pembagian kuota penyaluran berdasarkan Jumlah penduduk Gampong dalam Kecamatan yang kemudian di persentasekan.

Kegiatan Pemberdayaan Zakat atau Penyaluran Zakat di Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut :

1. Penyaluran dari Senif Fakir diperuntukan untuk Mustahik dari 8 Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya. Santunan ini bersifat konsumtif dan disalurkan secara transfer kepada mustahik.
2. Penyaluran dari Senif Miskin diperuntukan kepada Mustahik dari 8 Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya. Santunan ini bersifat konsumtif dan disalurkan secara transfer kepada mustahik.
3. Penyaluran Senif Muallaf diperuntukan untuk muallaf dalam menopang kehidupannya sehari-hari dalam Kabupaten Pidie Jaya. Santunan ini bersifat konsumtif dan pembinaan yang disalurkan secara tunai atau langsung kepada mustahik.
4. Santunan Syiar Islam diperuntukan kepada Peringatan Hari Besar Islam, Bantuan Musabaqah Tilawatil Quran, Perayaan Maulid baik dalam Dayah/Pasantren dari dalam Kabupaten Pidie Jaya. Santunan ini bersifat konsumtif dan pembinaan yang disalurkan secara transfer kepada Panitia Penyelenggara.
5. Pengembalian Hak UPZ/Amil diperuntukan kepada Unit Pengumpul Zakat SKPK dan Sekolah SD dan SMP Sederajat dalam Kabupaten Pidie Jaya dalam bentuk honorarium secara transfer.

Kegiatan Pemberdayaan Infaq di Kabupaten Pidie Jaya disalurkan kepada penerima Manfaat yang terdiri dari:

1. Santunan Guru Pengajian Miskin diperuntukkan kepada guru pengajian miskin dalam 8 Kecamatan Pidie Jaya. Santunan ini diberikan secara transfer tidak bersifat rutin.
2. Santunan Pimpinan Dayah/Balai Pengajian diberikam kepada Dayah dalam 8 Kecamatan Se Kabupaten Pidie Jaya. Santunan ini diberikan secara transfer dan bersifat rutin tahunan.
3. Santunan Ulama Karismatik, Santunan ini diserahkan secara rutin tahunan kepada 20 Ulama dalam Kabupaten Pidie Jaya.

4. Santunan Fakir Uzur, Santunan ini diserahkan secara tunai kepada Fakir pada usia tua dalam Kabupaten Pidie Jaya.
5. Santunan Disabilitas, Santunan ini diserahkan secara tunai kepada penderita disabilitas miskin dalam Kabupaten Pidie Jaya.
6. Santunan Santri Miskin Berjumlah Santunan ini diserahkan secara transfer kepada Santri Dayah/Balai Pengajian berstatus miskin dalam Kabupaten Pidie Jaya.
7. Santunan kepada Yatim Piatu Berjumlah, santunan ini diserahkan secara non tunai kepada anak-anak miskin yang tidak mempunyai kedua orang tua dalam Kabupaten Pidie Jaya.
8. Santunan kepada Panti Asuhan, santunan ini diserahkan secara transfer kepada Panti Asuhan dalam Kabupaten Pidie Jaya.
9. Bantuan kepada MUQ, Bantuan ini diserahkan secara transfer dan rutin tahunan kepada Lembaga MUQ Kabupaten Pidie Jaya.
10. Bantuan kepada Majelis Taklim, santunan ini diserahkan secara transfer kepada kelompok-kelompok pengajian dalam Kabupaten Pidie Jaya agar membantu operasional kegitan tersebut.
11. Bantuan Asnaf yang berstatus miskin, bantuan ini diberikan secara insidentil dalam bentuk transfer kepada masyarakat miskin yang dibantu dari sumber Infaq disebabkan karna tidak tertampung dalam senif miskin zakat
12. Bantuan Insidentil, bantuan ini diserahkan secara transfer terhadap yang bersifat sosial tidak tertampung dalam senif zakat, seperti membiayai biaya perjalanan keluarga pasien yang di rujuk ke Ibukota Provinsi atau keluar Provinsi juga bantuan kepada fisabilillah kurang mampu sedang melakukan perjalanan.
13. Bantuan Dana Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin yang dibangun dari awal dan di awasi oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya hingga selesai. Bantuan ini diserahkan secara transfer kepada masyarakat Fakir dan Miskin dalam Kabupaten Pidie Jaya.
14. Bantuan Dana Renovasi Rumah dilakukan terhadap kondisi rumah sudah tidak layak huni dan kondisi penerima bantuan dalam keadaan kesulitan keuangan. Renovasi berat dilakukan pengawasannya oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya hingga selesai. Bantuan ini diserahkan secara transfer kepada masyarakat Fakir dalam Kabupaten Pidie Jaya.
15. Bantuan Kader Tahfidz untuk penghafal Al quran yang berstatus kurang mampu yang merupakan Putera – putri Kabupaten Pidie Jaya. Bantuan ini diberikan dalam bentuk transfer.

Bantuan Modal Usaha untuk masyarakat Miskin pada Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan modal awal memualai usaha agar terberdayakan ekonomi keluarga. Bantuan ini diberikan dalam bentuk non tunai

### 2.4.4.5.4. Majelis Adat Aceh

Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai penjaga, pelestari, dan pengembang nilai-nilai adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berdiri berdasarkan Qanun Aceh, MAA memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas dan jati diri masyarakat Aceh yang berlandaskan nilai-nilai Islam, adat, dan budaya lokal.

Masyarakat Aceh terkenal dengan masyarakat yang memiliki adat dan adat istiadat yang bersendikan syara', yang dalam implementasinya sebagai sumber nilai, dalam penegakan harkat dan martabat masyarakat Aceh dalam semua sektor kehidupan. Karena itu, Adat dan Adat Istiadat menjadi salah satu pilar kekhususan/keistimewaan Aceh sebagai identitas jati diri dan martabat Bangsa Aceh. Nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam pengembangannya secara umum di arahkan pada dua bidang, yaitu hukum adat dan adat istiadat. Penguatan hukum adat meliputi aspek peradilan adat, aturan adat dan lembaga adat. Dalam hal ini, adat memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran serta keberlanjutan perdamaian serta dapat menyelesaikan perselisihan secara damai dan aman serta ekonomis (murah). Sedangkan penguatan adat-istiadat diarahkan untuk membentuk perilaku dan kreasi-kreasi seni untuk memperindah kehidupan. Hal ini sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi spirit dalam pembangunan Aceh. Capaian Kinerja Indikator Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 sebagai mana tabel 2.123 berikut.

**Tabel 2.123.**
**Capaian Kinerja Indikator Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya**
**Tahun 2020-2024**

| NO | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase Seni dan Budaya Lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam | 45 | 80 | 65 | 80 | 75 |
| 2 | Persentase pelestarian dan pembinaan adat dan adat istiadat daerah | 25 | 45 | 26 | 35 | 25 |
| 3 | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat | 20 | 35 | 40 | 45 | 50 |

*Sumber: MAA Pidie Jaya Tahun 2025*

Persentase Seni dan Budaya Lokal yang Sesuai dengan Nilai-Nilai Syariat Islam menunjukkan dinamika yang cukup berfluktuasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, persentase kesesuaian seni dan budaya lokal dengan nilai-nilai

syariat Islam tercatat sebesar 45%, yang menunjukkan masih terbatasnya kegiatan seni dan budaya yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan menjadi 80%, menggambarkan keberhasilan berbagai program pelestarian dan revitalisasi budaya lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat.

Persentase Pelestarian dan Pembinaan Adat serta Adat Istiadat Daerah menunjukkan perkembangan yang cenderung fluktuatif sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, capaian pelestarian adat dan adat istiadat daerah tercatat sebesar 25%, yang menandakan masih terbatasnya upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan capaian 45%, menggambarkan adanya perhatian dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah maupun lembaga adat dalam melakukan pembinaan dan revitalisasi tradisi daerah.

Selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang adat maka perlu dilakukan sosialisasi adat/adat istiadat dan pendampingan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu kebijakan dan strategi penguatan adat dan adat istiadat di Daerah diarahkan kepada:

a. Upaya pelestarian, penguatan dan pengembangan nilai-nilai adat dan adat istiadat perlu memberikan apresiasi kepada yang berjasa dan konsisten melestarikan adat dan adat istiadat serta khazanah adat. Selain itu, penguatan lembaga adat, pembinaan prosesi adat istiadat, pengkajian, sosialisasi nilai-nilai adat perlu menjadi agenda strategis dalam pembangunan daerah.
b. Melindungi hak-hak adat masyarakat semukim, termasuk melindungi dan mempertahankan hak ulayat mukim atas sumber daya alam setempat.
c. Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat memperkuat pemahaman dan pemenuhan hak masyarakat adat atas sumber daya alam, termasuk upaya pembinaan dan perlindungan hak ulayat mukim dan gampong.

Berdasarkan kerangka kebijakan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bersama pihak Legislatif telah mengesahkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Adat dan Reusam dan akan memprioritaskan program/kegiatan pembinaan adat sebagai berikut :

a. Penguatan kapasitas pimpinan adat, khususnya imuem mukim, keuchik, imuem chik, imuem gampong, tuha peut dan tokoh masyarakat lainnya.
b. Peningkatan kapasitas dan kuantitas seniman di Kabupaten Pidie Jaya dalam pelaksanaan acara seumapa, narit maja dan seni budaya lainnya yang ada di daerah.

c. Penguatan pemahaman adat di kalangan birokrasi Kabupaten Pidie Jaya, generasi muda dan tokoh masyarakat
d. Pemberian perlindungan terhadap hak-hak adat masyarakat setempat termasuk adat setempat.

#### 2.4.4.5.5. Majelis Pendidikan Daerah

Majelis pendidikan daerah (MPD) Kabupaten Pidie Jaya merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya, Adapun peran yang dijalankan MPD Kabupaten Pidie Jaya adalah:

1). Pemberi pertimbangan (advisor agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya;

2). Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pidie jaya;

3). Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan keluaran pendidikan;

4). Mediator antara pemerintah dan DPRK Pidie Jaya dengan masyarakat Pidie Jaya.




*Sumber : Sekretariat MPD Kab. Pidie Jaya, 2025*

**Gambar 2.67. Capaian Kinerja Indikator Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

Capaian kinerja indikator Tingkat penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan menunjukkan perkembangan yang sangat baik selama periode

RPJMK. Pada tahun 2020, kondisi awal (baseline) berada pada angka 50 persen, kemudian meningkat menjadi 65 persen. Kinerja terus mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 mencapai 94,68 persen, meskipun sempat menurun pada tahun 2022 menjadi 88,23 persen. Namun demikian, capaian kembali naik pada tahun 2023 sebesar 94,06 persen dan meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 94,85 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMK tahun 2024 sebesar 85 persen, maka realisasi capaian melampaui target sebesar 9,85 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan berjalan efektif dan konsisten, mencerminkan komitmen tinggi pemerintah daerah melalui Majelis Pendidikan Daerah dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan kegiatan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya.

#### 2.4.4.5.6. Pendidikan Dayah

Sebagai sebuah daerah yang diberikan kewenangan dalam pelaksanaan Syariat Islam dapat mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam di bidang pendidikan dengan peningkatan kualitas umat dan kualitas penyelenggaraan Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya, maka lembaga pendidikan dayah terus berkembang menjadi sistem pendidikan alternatif bagi generasi muda. Banyak lembaga pendidikan dayah yang terus berbenah dalam rangka menjamin mutu lulusannya dihampir semua kecamatan. Ada beberapa lembaga pendidikan dayah sudah eksis sebelum adanya pemekaran Kabupaten Pidie Jaya dengan mutu berkualitas seperti Dayah Jeumala Amal di Kecamatan Bandar Baru,Darul Munawarah Kuta Krueng di Bandar Dua dan MUQ Pidie Jaya di Kecamatan Meureudu. Umumnya lembaga pendidikan dayah di Kabupaten Pidie Jaya menganut model pembelajaran Salafiyah sesuai dengan kearifan masyarakat Aceh.

Seiring dengan penyelenggaraan Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya dan di Aceh pada umumnya, maka Lembaga Pendidikan Dayah terus berkembang dalam mengemban tugas untuk mendidik generasi muda yang Islami. Ada beberapa lembaga Pendidikan Dayah yang sudah ada sebelum adanya pemekaran Kabupaten Pidie Jaya dengan mutu Pendidikan Dayah yang berkualitas seperti Dayah jeumala Amal Di Bandar Baru, Darul Munawwarah di Bandar Dua dan MUQ Pidie Jaya di Meureudu. Perkembangan Lembaga Pendidikan Dayah terus meningkat Setiap tahunnya dan didikuti dengan penyediaan dan perbaikan mutu sarana dan prasarananya. Tahun 2020 dayah di Kabupaten Pidie Jaya terdapat 65 unit dayah yang berbagai tipe terus mengalami peningkatan, tapi pasa Tahun 2021 terjadi

penurunan jumlah tipe dayah menjadi 56 Unit. Pada Tahun 2022 jumlah dayah mengalami peningkatan lagi menjadi 68 unit dayah dan mengalami penurunan kembali di tahun 2023 menjadi 64 unit. Pada Tahun 2024 tidak terjadi peningkatan atau pun penuruanan Jumlah Dayah, masih tetap sama dengan tahun yang lalu yaitu 64 unit dayah. Jumlah Guru dan Santri di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 dapat di lihat pada Tabel 2.124 berikut.

**Tabel 2.124.**
**Jumlah Dayah, Guru dan Santri di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Dayah | 65 | 56 | 68 | 64 | 64 |
| 2 | Jumlah Guru dayah | 950 | 962 | 970 | 881 | 852 |
| 3 | Jumlah santri | 9.443 | 10.244 | 11.567 | 12.510 | 12.105 |
| 4 | Dayah Naik Kelas | 4 | 11 | 19 | 3 | - |

*Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Pada tahun 2018 sampai dengan 2019 Dayah belum ada perubahan tipe. Semenjak adanya Tim BADA maka di tahun 2020 sampai dengan 2024 tipe dayah bertambah di Kabupaten Pidie Jaya. Tipe A+ dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 tidak ada mengalami peningkatan jumlah tipe nya masih sama yaitu terdapat 2 dayah yang bertipe A+ tetapi pada tipe A mengalami penimgkatan dari Tahun 2020 yang tidak ada dayah yang bertipe A sampai tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 6 dayah yang ber tipe A dan Mengalami Penurunan pada tahun 2023 menjadi 3 dayah, pada tahun 2024 tidak ada mengalami penambahan tipe dayah masih tetap sama dengan tahun 2023 . Pada Tipe B dari Tahun 2020 terdapat 10 dayah yang Bertipe B mengalami Peningkatan sampai Tahun 2022 tedapat 16 dayah yang ber Tipe B Tahun 2022 dan terus mengalami peningkatan sampai Tahun 2024 menjadi 19 Dayah yang bertipe B. selanjutnya untuk Tipe C dari Tahun 2018 terdapat 21 Dayah yang ber Tipe C mengalami peningkatan yang naik turun sampai Tahun 2024 terdapat 22 dayah yang ber Tipe C dan pada Tipe dayah D/non Tipe mengalami penurunan dari tahun 2020 terdapat 30 Tipe D/Non Tipe sampai Tahun 2024 menjadi 18 dayah yang bertipe D/Non Tipe, dikarenakan banyak dayah-dayah yang mengalami peningkatan kelas tipe A sampai tipe C. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.125.

**Tabel 2.125.**
**Jumlah Dayah Terakreditasi Berdasarkan Tipe**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Tipe Dayah | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | A+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | A | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | B | 10 | 16 | 16 | 19 | 19 |
| 4 | C | 22 | 17 | 25 | 22 | 22 |
| 5 | D/Non Tipe | 30 | 11 | 22 | 18 | 18 |
| **Total Dayah Terakreditasi** | | 61 | 65 | 52 | 64 | 64 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Setiap tahun Dinas Pendidikan Dayah melakukan monitoring terhadap keberadaan Balai Pengajian dan Dayah, tujuannya adalah untuk memverifikasi perkembangan pada pendidikan nonformal. Verifikasi tersebut biasanya dijalankan setiap awal bulan Februari yang melibatkan semua personil pegawai Dinas Pendidikan Dayah pada 8 Kecamatan. Rincian Dayah Terakreditasi Berdasarkan Tipe, Jumlah Guru dan Santri di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.126 berikut.

**Tabel 2.126.**
**Rincian Dayah Terakreditasi Berdasarkan Tipe, Jumlah Guru dan Santri**
**di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| No | Nama Dayah | Tipe Dayah | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Guru | Santri | Guru | Santri | Guru | Santri | Guru | Santri | Guru | Santri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Al-Munawwarah Putra | A+ | 84 | 1.500 | 100 | 2.201 | 386 | 4.940 | 300 | 4.940 | 300 | 4.940 |
| 2 | Al-Munawwarah Putri | A+ | 70 | 308 | 84 | 1.485 | 102 | 1.495 | 84 | 1.495 | 80 | 1.595 |
| 3 | Jeumala Amal | A | 109 | 1.557 | 109 | 1.557 | 193 | 1.700 | 109 | 1.557 | 109 | 1.600 |
| 4 | Anwarul Munawarah | A | – | – | – | – | 25 | 349 | 25 | 349 | 25 | 349 |
| 5 | Bustanul Mualimin Al-Munawarah Putri | A | – | – | – | – | 27 | 101 | 27 | 101 | 27 | 101 |
| 6 | Darul Falah | B | 52 | 461 | 32 | 461 | 20 | 461 | 20 | 461 | 20 | 461 |
| 7 | Manbaul Ulum Putri | B | 36 | 452 | 26 | 452 | 43 | 300 | 26 | 452 | 26 | 452 |
| 8 | Bustanul Mualimin Al-Munawarah | B | 27 | 101 | 27 | 101 | 27 | 87 | 27 | 101 | 27 | 110 |
| 9 | Miftahul Ulum Al waliyah | B | – | – | – | – | 12 | 100 | 19 | 124 | 19 | 124 |
| 10 | Al-Mutaalimin Nahdatul Amal Al-Aziziyah | B | – | – | – | – | – | – | 14 | 112 | 14 | 112 |
| 11 | Darul Faizin | B | 19 | 87 | 9 | 87 | 29 | 272 | 29 | 272 | 29 | 272 |
| 12 | Babul Ilmi | B | 19 | 122 | 19 | 122 | 70 | 38 | 10 | 100 | 10 | 100 |
| 13 | Ibdaul Ulum | B | – | – | – | – | – | – | 7 | 81 | 7 | 81 |
| 14 | Raudhatul Munawarah | B | – | – | – | – | 15 | 92 | 12 | 92 | 12 | 92 |
| 15 | Madinatuddiniah Babul Munajah | B | – | – | – | – | – | – | 11 | 150 | 11 | 150 |
| 16 | Raudhatul Jinan | B | 8 | 94 | 13 | 100 | 55 | 340 | 35 | 340 | 35 | 340 |
| 17 | Ummul Aiman II | B | 18 | 240 | 8 | 240 | 18 | 240 | 18 | 240 | 18 | 230 |

| No | Nama Dayah | Tipe Dayah | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Guru | Santri | Guru | Santri | Guru | Santri | Guru | Santri | Guru | Santri |
| 18 | MUQ Pidie Jaya | B | 11 | 150 | 11 | 150 | 30 | 193 | 30 | 193 | 30 | 200 |
| 19 | Darul Ridha Al Munawarah | B | – | – | – | – | 15 | 98 | 15 | 98 | 15 | 98 |
| 20 | Makanul Hidayah | B | – | – | – | – | 13 | 135 | 13 | 135 | 13 | 135 |
| 21 | Raudhatul Mukarramah Al-Aziziyah | B | – | – | – | – | 20 | 120 | 20 | 130 | 20 | 130 |
| 22 | Raudhatul Ulum (ulim) | B | 14 | 145 | 14 | 135 | 22 | 445 | 12 | 435 | 12 | 435 |
| 23 | Raudhatussakdah | C | 14 | 170 | 12 | 110 | 11 | 105 | 8 | 90 | 8 | 90 |
| 24 | Babul Ulum Diniyah Islamiyah | C | 18 | 120 | 8 | 50 | 12 | 95 | 7 | 81 | 7 | 81 |
| 25 | Darussalam Assamadiah Al-Aziziyah | C | 17 | 150 | 17 | 200 | 17 | 210 | 28 | 112 | 28 | 112 |
| 26 | Miftahul Ulum Al waliyah | C | 19 | 134 | 19 | 124 | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Baburrahmah | C | 9 | 91 | 10 | 111 | 8 | 80 | 12 | 102 | 12 | 102 |
| 28 | Al-Mutaalimin Nahdatul Amal Al-Aziziyah | C | 11 | 105 | 8 | 120 | 8 | 120 | – | – | – | – |
| 29 | Ibdaul Ulum | C | 7 | 81 | 7 | 81 | 7 | 81 | – | – | – | – |
| 30 | Raudhatul Jinan | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | Fathul Ainiyah | C | 12 | 112 | 20 | 112 | 21 | 240 | – | – | 20 | 210 |
| 32 | Babussalam Tgk.Chik di Rhieng | C | 10 | 220 | 10 | 220 | 10 | 220 | 10 | 90 | 8 | 50 |
| 33 | Tgk. Chik Hj. Di Garot | C | 8 | 64 | 8 | 60 | 5 | 49 | – | – | – | – |
| 34 | Madinatuddiniah Miftahussalam | C | 22 | 150 | 22 | 253 | 10 | 104 | 11 | 120 | 11 | 120 |
| 35 | Najatul Mubtadi | C | 8 | 164 | 10 | 164 | 10 | 124 | 13 | 186 | 13 | 186 |
| 36 | Raudhatul Ulum | C | 11 | 120 | 11 | 135 | 13 | 138 | 14 | 150 | 14 | 150 |
| 37 | Darussa'adah Putri | C | 11 | 169 | 11 | 169 | 10 | 120 | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 38 | Babussalam Tgk. Chik di TU | C | 7 | 63 | 7 | 63 | 7 | 52 | 7 | 115 | 7 | 115 |
| 39 | Darussa'adah Cab Panteraja | C | 10 | 162 | 10 | 200 | 10 | 124 | 10 | 124 | 10 | 124 |
| 40 | Darussa'adah Cab. Sagoe | C | 30 | 300 | 12 | 200 | 12 | 201 | 19 | 190 | 19 | 190 |
| 41 | Bustanul Ikhsan | C | 9 | 122 | 10 | 201 | 10 | 201 | 11 | 120 | 11 | 120 |
| 42 | Assadiqin Al-Aziziyah | C | 11 | 106 | 11 | 160 | 11 | 150 | 14 | 150 | 14 | 150 |
| 43 | Misbahudh dhulam Putra | C | 10 | 120 | 12 | 205 | 12 | 250 | 27 | 300 | 27 | 300 |
| 44 | Ummul Aiman III | C | 11 | 150 | 15 | 186 | 20 | 200 | 15 | 214 | 15 | 214 |
| 45 | YPI. Darul Muttaqin | C | 12 | 125 | 10 | 102 | 8 | 53 | 8 | 53 | 8 | 53 |
| 46 | Darul Muhajirin | C | – | – | – | – | 10 | 102 | 10 | 102 | 10 | 102 |
| 47 | Babul Ulum Al-Munawarah | C | – | – | – | – | 8 | 140 | 8 | 140 | 8 | 140 |
| 48 | Istiqamatuddin Raudhatul Muaqla | C | – | – | – | – | 64 | 389 | 55 | 340 | 55 | 340 |
| 49 | Manbaul Fata | C | – | – | – | – | 12 | 129 | 12 | 130 | 12 | 130 |
| 50 | Al-Mutaalimin Nahdatul Amal Al-Aziziyah | D | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 51 | Raudhatul Jinan Al-Malasyi | D | 8 | 60 | 8 | 60 | 8 | 65 | 8 | 65 | 8 | 65 |
| 52 | Darussa'adah Cab. Uteun Bayu | D | 15 | 253 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 53 | Ulumul Qur'an Pulo | D | 14 | 135 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 54 | Baitul Amal Aceh | D | 12 | 65 | 4 | 65 | 4 | 65 | – | – | – | – |

| No | Nama Dayah | Tipe Dayah | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Guru | Santri | Guru | Santri | Guru | Santri | Guru | Santri | Guru | Santri |
| 55 | Babul Istiqamatuddin | D | 8 | 65 | 6 | 70 | 5 | 70 | – | – | – | – |
| 56 | Darul Muta'alimin | D | 6 | 58 | 4 | 58 | 5 | 55 | – | – | – | – |
| 57 | Madinatuddiniyah Nurussalam | D | 8 | 123 | 8 | 99 | 10 | 91 | – | – | – | – |
| 58 | Raudhatul Munawarah | D | 14 | 171 | 24 | 171 | – | – | – | – | – | – |
| 59 | Bustanul Aitam | D | 5 | 40 | 5 | 40 | 5 | 40 | 8 | 30 | 8 | 30 |
| 60 | Dawiyatuddarsi | D | 8 | 152 | 8 | 185 | 11 | 190 | 11 | 180 | 11 | 180 |
| 61 | Hadiqatul Muarif | D | 7 | 60 | – | – | 3 | 43 | – | – | – | – |
| 62 | Ribatul Mutaalimin | D | 10 | 90 | 7 | 90 | 10 | 135 | 8 | 80 | 8 | 80 |
| 63 | Nurul Islam | D | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
| 64 | Mudil Hasani Al-Aziziyah | D | 5 | 84 | 5 | 84 | 8 | 130 | 7 | 100 | 7 | 100 |
| 65 | Sirajul Huda Al-Aziziyah | D | 5 | 120 | 8 | 130 | 8 | 140 | 8 | 140 | 8 | 140 |
| 66 | Al-Hijrah | D | 10 | 160 | 10 | 160 | 10 | 90 | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 67 | MUQ Pidie Jaya | D | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 68 | Miftahul Huda | D | 5 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 69 | Darul Aitam | D | 8 | 123 | 8 | 100 | 8 | 112 | 6 | 60 | 6 | 60 |
| 70 | Nuril Anwar | D | 15 | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 71 | YPI. Darul Muttaqin | D | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 72 | Babul Khairat | D | 6 | 125 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 75 | 5 | 75 |
| 73 | Sirajul Huda (Panteraja) | D | 7 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 74 | Darussa'adah Cab. Paru | D | 6 | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 75 | Misbahudh dhulam Al-Aziziyah Putri | D | 7 | 145 | 7 | 150 | 10 | 200 | 10 | 180 | 10 | 180 |
| 76 | M'ahad Ulum Taqiyuddin Al-Aziziyah | D | 15 | 190 | 15 | 190 | 6 | 100 | 6 | 96 | 6 | 96 |
| 77 | Nurul Huda | D | 8 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 78 | Al-Muhajirin Tgk Chik di Langgien | D | 10 | 195 | 9 | 156 | 9 | 100 | 7 | 80 | 7 | 80 |
| 79 | Raudhatul Ulum | D | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 80 | LPI. Hidayatullah Al-Aziziyah | D | 11 | 150 | 11 | 138 | 10 | 134 | 9 | 130 | 9 | 130 |
| 81 | Babussabri | D | 9 | 120 | – | – | 7 | 98 | 4 | 35 | 4 | 35 |
| 82 | Anwarul Munawarah | D | – | – | 12 | 145 | – | – | – | – | – | – |
| 83 | Al-Fata | D | – | – | – | – | 9 | 150 | 11 | 180 | 11 | 180 |
| 84 | Nurul Jadid | D | – | – | – | – | 8 | 93 | 10 | 100 | 10 | 100 |
| 85 | Darul Mubaraqah Al-Munawarah | D | – | – | – | – | – | – | 5 | 40 | 5 | 40 |
| Jumlah Total | | | 969 | 9.594 | 993 | 11.829 | 883 | 12.588 | 1.614 | 17.464 | 1.614 | 17.464 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*

Sejak tahun 2020 sampai 2024 Dinas Pendidikan Dayah telah mengelola beberapa Dayah yang bertitel ( Tipe A+, A, B, C, dan D ). Pada tahun 2020 jumlah Dayah yang diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Dayah sebanyak 61 unit dayah ( Tipe A+ 2 unit, Tipe A 1 unit, Tipe B 10 unit, Tipe C 22 Unit, dan Dayah Tipe D 30 unit ) daftar terlampir. Pada tahun 2021 Dayah – dayah yang di kelola oleh Dinas Pendidikan Dayah meningkat menjadi 65 Unit yang terdiri daripada Dayah yang

bertipe ( A+ sebanyak 2 Unit, Tipe A sebanyak 1 Unit, Tipe B sebanyak 6 Unit, Tipe C sebanyak 17 Unit dan Tipe D sebanyak 11 Unit ), Daftar terlampir. Seiring dengan perkembangan Pendidikan Dayah di Pidie Jaya, Dinas Pendidikan Dayah setiap tahun melakukan monitoring untuk memverifikasi Dayah – dayah apakah keberadaan Dayah tersebut masih bisa di pertahankan, hasil verifikasi 2021 ada beberapa Dayah yang harus diturunkan Tipenya menjadi Balai Pengajian dari 65 Dayah pada tahun 2020 menjadi 56 Dayah pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut, ( Tipe A+ 2 Unit, Tipe A 1 Unit, Tipe B 9 Unit, Tipe C 22 Unit dan Tipe D 22 Unit ), Daftar terlampir.

Pada tahun 2022 hasil verifikasi yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Dayah jumlah Dayah kembali meningkat dari 56 Unit Dayah menjadi 68 Unit dengan demikian jumlah Dayah bertambah 12 Unit yaitu (Tipe A+ 2 Unit, Tipe A 3 Unit, Tipe B 15 Unit, Tipe C 25 Unit dan Tipe D 22 Unit) daftar terlampir. Dan hasil verifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Dayah pada tahun 2024 tentang keberadaan Dayah – dayah tidak mengalami penurunan atau pun penambahan dari 64 tetap 64 Unit Dayah yaitu (Tipe A+ 2 Unit, Tipe A 3 Unit, Tipe B 19 Unit, Tipe C 22 Unit dan Tipe D 18 Unit ) daftar terlampir.

Sesuai dengan terjadinya pasang surut keberadaan Dayah dari tahun ke tahun juga berimbas kepada guru-guru pengajian dimana mereka harus bergerak kedayah – dayah yang lain sesuai dengan perkembangan Dayah.

### 2.4.5. Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2020-2024

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Kabupaten Pidie Jaya periode 2025-2029 merupakan momen krusial untuk mengevaluasi secara komprehensif capaian pembangunan pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2020-2024. Periode ini diwarnai oleh berbagai dinamika, baik tantangan global maupun isu-isu lokal yang memengaruhi arah dan laju pembangunan, termasuk dampak pandemi COVID-19. Evaluasi ini menjadi landasan strategis untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan terarah, guna memastikan keberlanjutan visi pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pidie Jaya.

Melalui analisis mendalam terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), RPJMK yang baru akan mengidentifikasi keberhasilan serta berbagai hambatan yang dihadapi. Temuan dari evaluasi ini akan menjadi masukan utama dalam menyusun program dan kegiatan yang lebih efektif dan terukur. Dengan demikian, RPJMK 2025-2029

tidak hanya melanjutkan program-program yang telah berjalan baik, tetapi juga merevisi dan merumuskan strategi baru untuk menjawab tantangan yang belum terselesaikan, seperti pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik.

Hasil analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.127 berikut.

**Tabel 2.127.**

**Hasil analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | CAPAIAN KINERJA | | | | | Target Kondisi Kinerja Akhir RPJMK (2024) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | |
| | **Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi** | | | | | | | | |
| **1** | **Otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan umum, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian** | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB | Persen | -0,79 | 2,03 | 3,57 | 4,24 | 4,55 | 5,6 | DATA BPS |
| 2 | PDRB per kapita | Juta Rupiah | 22,17 | 22,89 | 24,38 | 26,46 | 28,38 | 24,00 | DATA BPS |
| 3 | Laju inflasi daerah | Persen | 3,51 | 2,19 | 5,68 | 1,54 | 2,47 | 3 | DATA BPS |
| 4 | Penduduk dibawah garis kemiskinan | Persen | 19,19 | 19,55 | 19,2 | 18,4 | 18,28 | 16,95 | DATA BPS |
| 5 | Angka partisipasi angkatan kerja | Persen | 62,13 | 57,77 | 57,89 | 59,79 | 59,91 | 60 | DATA BPS |
| 6 | Tingkat pengangguran terbuka | Persen | 6,58 | 3,57 | 4,4 | 4,34 | 3,82 | 4,8 | DATA BPS |
| 7 | Jumlah Pengangguran | Orang | 4.824 | 2.478 | 3.121 | 3.182 | 2.842 | 1.951 | DATA BPS |
| 8 | Rasio penduduk yang bekerja | Persen | 92,96 | 96,29 | 95,40 | 95,46 | 96,03 | 97,51 | DATA BPS |
| 9 | Persentase penurunan angka Kriminalitas | Persen | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 10 | DATA BPS |
| 10 | Indeks Gini | Indeks | 0,227 | 0,236 | 0,223 | 0,221 | 0,214 | 0,210 | DATA BPS |
| 11 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 74,44 | 74,84 | 75,59 | 76,04 | 76,39 | 72,13 | DATA BPS |
| 12 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 85,75 | 86,25 | 86,29 | 86,40 | 93,94 | 88,00 | SETDAKAB |
| 13 | Kategori Hasil Evaluasi LPPD | kategori | Tinggi | Data Belum Lulus | Rendah | Rendah | Tinggi | Sangat tinggi | SETDAKAB |
| 14 | Harapan Lama Sekolah | Persen | 13,82 | 14,97 | 14,98 | 14,99 | 15,01 | 14,75 | DATA BPS |
| 15 | Jumlah Penduduk Miskin | Jiwa (Ribu) | 31,39 | 31,79 | 31,75 | 30,74 | 30,95 | 24,00 | DATA BPS |
| | **Kesejahteraan Sosial** | | | | | | | | |
| **1** | **Pendidikan** | | | | | | | | |
| 16 | Angka melek huruf | Persen | 96,89 | 96,82 | 97,46 | 97,48 | 96,68 | 97,61 | DATA BPS |
| 17 | Angka rata-rata lama sekolah | Tahun | 9,33 | 9,37 | 9,53 | 9,58 | 9,64 | 9,15 | DATA BPS |
| 18 | Persentase Asrama Mahasiswa yang memenuhi Sarana dan Prasarana | persen | 60,23 | 62,44 | 68,22 | 69,25 | 72,45 | 75,35 | DISDIKBUD |
| 19 | Jumlah Mahasiswa AKN Pidie Jaya | orang | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 335 | SETDAKAB |
| **2** | **Kesehatan** | | | | | | | | |
| 20 | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | /100.000 Kelahiran Hidup | 198 | 211 | 196 | 185 | 173 | 170 | DINKES KB |
| 21 | Angka kelangsungan hidup bayi | /1.000 Kelahiran Hidup | 991 | 992 | 989 | 992 | 986 | 997 | DINKES KB |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | CAPAIAN KINERJA | | | | | Target Kondisi Kinerja Akhir RPJMK (2024) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | /1.000 Kelahiran Hidup | 9 | 8 | 11 | 8 | 14 | 3 | DINKES KB |
| 23 | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | /1.000 Kelahiran Hidup | 3 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | DINKES KB |
| **3** | **Seni Budaya** | | | | | | | | |
| 24 | Persentase seni dan budaya lokal yang sesuai dengan nilai-nilai syariat islam | Persen | 65 | 64 | 85 | 100 | 100 | 90 | DISDIKBUD/ SEKR. MAA |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| **1** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan** | | | | | | | | |
| | **Pendidikan Dasar** | | | | | | | | |
| 25 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI | persen | 93 | 83,61 | 84,31 | 83,8 | 83,96 | 83,98 | DISDIKBUD |
| 26 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI | persen | 135 | 98,75 | 98,99 | 99,54 | 99,54 | 99,82 | DISDIKBUD |
| 27 | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | persen | 175 | 43,23 | 43,78 | 44,46 | 68,62 | 70 | DISDIKBUD |
| 28 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI | persen | 102 | 97,23 | 96,86 | 96,79 | 96,58 | 96,7 | DISDIKBUD |
| 29 | Rasio Guru/Murid SD/MI | Rasio | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:07 | 1:07 | 1:20 | DISDIKBUD |
| 30 | Rasio ketersediaan sekolah SD/MI | Rasio | 66 | 65,42 | 66,10 | 65,88 | 64,94 | 70,17 | DISDIKBUD |
| 31 | Angka kelulusan Ujian Nasional SD/MI | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,95 | DISDIKBUD |
| 32 | Angka Putus Sekolah SD/MI | persen | 0,0012 | 0,002 | 0,0016 | 0,0037 | 0,0024 | 0,06 | DISDIKBUD |
| 33 | Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD **(SPM)** | persen | 14 | 41,1 | 41,13 | 68,62 | 68,62 | 70 | DISDIKBUD |
| 34 | Persentase anak usia 5-6 tahun yang mendapat buku gambar 6 buah per peserta didik per semester **(SPM)** | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DISDIKBUD |
| 35 | Persentase guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D4 **(SPM)** | persen | 20 | 84,21 | 84,21 | 74,31 | 74,31 | 98,64 | DISDIKBUD |
| 36 | Persentase guru pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D4 **(SPM)** | persen | 99 | 95,13 | 95,13 | 95,9 | 92,61 | 98,64 | DISDIKBUD |
| | **Pendidikan Menengah** | | | | | | | | DISDIKBUD |
| 37 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs | persen | 59 | 78,94 | 82,01 | 70,85 | 70,85 | 76,33 | DISDIKBUD |
| 38 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs | persen | 65 | 99,14 | 99,16 | 95,06 | 94,82 | 98,91 | DISDIKBUD |
| 39 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs | persen | 1,7 | 107,64 | 107,24 | 109,91 | 109,53 | 99,92 | DISDIKBUD |
| 40 | Rasio Guru/Siswa SMP/MTs | Rasio | 85 | 01.13 | 01.13 | 01.06 | 01.06 | 01.12 | DISDIKBUD |
| 41 | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | persen | 35 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | DISDIKBUD |
| 42 | Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 | persen | 58,9 | 99,52 | 99,52 | 99,4 | 97,81 | 98,54 | DISDIKBUD |
| 43 | Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) **(SPM)** | persen | 45 | 98,92 | 98,93 | 98 | 97,18 | 96,7 | DISDIKBUD |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | CAPAIAN KINERJA | | | | | Target Kondisi Kinerja Akhir RPJMK (2024) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 44 | Persentase anak usia 7-15 tahun yang mendapat buku teks 1 paket per peserta didik per tahun **(SPM)** | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DISDIKBUD |
| 45 | Persentase anak usia 7-18 tahun Putus sekolah yang menyelesaikan pendidikan kesetaraan **(SPM)** | persen | 57,13 | 59,19 | 62,13 | 66,13 | 67,31 | 88 | DISDIKBUD |
| 46 | Persentase anak usia 7-15 tahun putus sekolah yang mendapat modul belajar 1 paket per peserta didik per tahun **(SPM)** | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DISDIKBUD |
| 47 | Persentase guru pamong pendidikan kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/D4 **(SPM)** | persen | 92 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | DISDIKBUD |
| 48 | Persentase sekolah yang menerapkan Pendidikan berkarakter Islami (Diniyah) | persen | 92 | 91,27 | 90,55 | 89,15 | 89,15 | 85 | DISDIKBUD |
| 49 | Tingkat pemenuhan kebutuhan pengelolaan pendidikan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | DISDIKBUD |
| 50 | Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal | Persen | 92 | 91,27 | 90,55 | 89,15 | 89,15 | 100 | DISDIKBUD |
| 51 | Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Kompetensi | persen | 32,65 | 26,2 | 23,9 | 22,6 | 50,15 | 65,09 | DISDIKBUD |
| 52 | Persentase lembaga pendidikan dasar dan paud yang memiliki izin | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DISDIKBUD |
| 53 | Persentase Dayah yang terakreditasi (ber tipe) | Persen | 28 | 39 | 45 | 39 | 45 | 76 | Dinas Pendidikan Dayah |
| 54 | Jumlah Hafiz Al-Qur'an | orang | 15 | 30 | 40 | 78 | 82 | 100 | Dinas Pendidikan Dayah |
| 55 | Tingkat penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan | Persen | 100 | 94,68 | 100 | 100 | 100 | 85 | Sekretariat MPD |
| **2** | **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan** | | | | | | | | |
| 56 | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | /1000 Penduduk | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,9 | Dinkes KB |
| 57 | Persentase Sarana dan prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik | persen | 44,29 | 62,76 | 42,32 | 65 | 68 | 45 | RSUD |
| 58 | Rumah Sakit Umum Daerah Type B | Ada/ tidak | tidak | tidak | ada | ada | ada | ada | RSUD |
| 59 | Persentase anak usia pendidikan dasar kelas 1-7 yang mendapat skrining kesehatan di **(SPM)** | persen | 65 | 64 | 42 | 100 | 100 | 100 | Dinkes KB |
| 60 | Cakupan pelayanan anak balita sesuai standar **(SPM)** | persen | 64 | 81 | 81 | 64 | 100 | 100 | Dinkes KB |
| 61 | Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**(SPM)** | persen | 85 | 83 | 44 | 47,21 | 89,86 | 100 | Dinkes KB |
| 62 | Persentase Ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan Ibu hamil **(SPM)** | persen | 82 | 78 | 44 | 68,83 | 93,5 | 100 | Dinkes KB |
| 63 | Persentase Bayi baru lahir yang mendapat pelayanan bayi baru lahir **(SPM)** | persen | 93 | 90 | 45 | 91,93 | 95 | 100 | Dinkes KB |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | CAPAIAN KINERJA | | | | | Target Kondisi Kinerja Akhir RPJMK (2024) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 64 | Persentase penderita hypertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun **(SPM)** | persen | 135 | 79 | 57 | 85,26 | 86 | 100 | Dinkes KB |
| 65 | Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar **(SPM)** | persen | 175 | 78 | 55 | 85,44 | 86,45 | 100 | Dinkes KB |
| 64 | Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar **(SPM)** | persen | 102 | 99 | 75 | 99,05 | 99,1 | 100 | Dinkes KB |
| 65 | Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar **(SPM)** | persen | 49 | 73 | 51 | 66,26 | 80,41 | 60 | Dinkes KB |
| 66 | Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar **(SPM)** | persen | 34 | 46 | 38 | 33,07 | 80,35 | 98 | Dinkes KB |
| 67 | Persentase orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar **(SPM)** | persen | 22 | 100 | 80 | 68,52 | 80,41 | 100 | Dinkes KB |
| 68 | Persentase orang dengan resiko HIV yang mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar **(SPM)** | persen | 64 | 62 | 80 | 43,14 | 77,74 | 100 | Dinkes KB |
| 69 | Cakupan Balita Stunting | persen | 14,00 | 29,00 | 37,80 | 29,40 | 31,60 | 22,3 | Dinkes KB |
| 70 | Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinkes KB |
| 71 | Persentase Posyandu aktif | persen | 20 | 86 | 65 | 75,3 | 89,64 | 100 | Dinkes KB |
| 72 | Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persen | 99 | 86 | 68 | 85,4 | 85,25 | 95 | Dinkes KB |
| 73 | Persentase Sarana dan prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik | persen | | 78 | 56 | 65 | 68 | 45 | RSUD |
| 74 | Cakupan Peningkatan Sumber daya Aparatrur Kesehatan | persen | 65 | 65 | 56 | 75 | 80 | 85 | Dinkes KB |
| 75 | Cakupan pengawasan dan pengendalian kesehatan obat dan makanan | persen | 59 | 95 | 70 | 100 | 100 | 90 | Dinkes KB |
| 76 | cakupan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan | persen | 65 | 75 | 40 | 78,9 | 79 | 55 | Dinkes KB |
| **3** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang** | | | | | | | | |
| 77 | Persentase panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap | persen | 47,52 | 73 | 51,3 | 51,3 | 43,13 | 47,24 | Dinas PU |
| 78 | Proporsi jembatan Kabupaten dalam kondisi baik | unit | 101 | 46 | 105 | 105 | 110 | 133 | Dinas PU |
| 79 | Proporsi jalan Kabupaten yang direhab | persen | 0,33 | 100 | 0,13 | 0,13 | 1,2 | 1,43 | Dinas PU |
| 80 | Persentase penanganan kawasan rawan banjir | persen | 45,5 | 62 | 59,5 | 59,5 | 62,5 | 74,5 | Dinas PU |
| 81 | Persentase tempat ibadah/Masjid dalam kondisi baik | persen | 65 | 75 | 80 | 80 | 92 | 100 | Dinas PU |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | CAPAIAN KINERJA | | | | | Target Kondisi Kinerja Akhir RPJMK (2024) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 82 | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum untuk kebutuhan sehari-hari **(SPM)** | persen | 64,77 | 64,66 | 66,3 | 66,3 | 66,5 | 67 | Dinas PU |
| 83 | Persentase penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik **(SPM)** | persen | 61,25 | 61,32 | 65,13 | 65,5 | 66,1 | 68 | Dinas PU |
| 84 | Persentase pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dalam kondisi Baik | persen | 47,67 | 53,43 | 55,24 | 57 | 60 | 70 | Dinas PU |
| 85 | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum untuk kebutuhan sehari-hari | persen | 64,77 | 64,66 | 66,3 | 65,6 | 66,1 | 67 | Dinas PU |
| 86 | Persentase Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | persen | 33,25 | 37,29 | 38,87 | 40,25 | 42,44 | 44,50 | Dinas PU |
| 87 | Persentase penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik | persen | 61,25 | 61,32 | 65,13 | 66,23 | 67,26 | 68 | Dinas PU |
| 88 | Persentase drainase dalam kondisi baik | persen | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 55 | Dinas PU |
| 89 | Persentase Pengembangan Infrastruktur pemukiman | Persen | 63,5 | 66,43 | 69,2 | 73,6 | 78,2 | 80 | Dinas PU |
| 90 | Persentase Bangunan yang memiliki IMB | persen | 3 | 4 | 4,5 | 4,8 | 5,6 | 8 | Dinas PU |
| 91 | Persentase Penataan Bangunan dan lingkungan | persen | 10 | 15 | 18 | 23 | 26 | 30 | Dinas PU |
| 92 | Persentase pengembangan Informasi dan Jasa Kontruksi | Persen | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 | Dinas PU |
| 93 | Terciptanya kesesuaian Antara Bangunan dan Lingkungan sekitar | Persen | 69 | 70 | 75 | 75 | 78 | 85 | Dinas PU |
| **4** | **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | |
| 94 | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana **(SPM)** | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas PU |
| 95 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah **(SPM)** | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas PU |
| 96 | Pesentase Rumah Layak Huni | persen | 88,58 | 88,72 | 80 | 80 | 83 | 85 | Dinas PU |
| 97 | Persentase Pengurangan kawasan permukiman kumuh | Persen | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 | 43 | Dinas PU |
| 98 | Persentase Ketresediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum | Persen | 66 | 70 | 77 | 78 | 80 | 82 | Dinas PU |
| 99 | Persentase Tingkat Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan kawasan Pemukiman | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Dinas PU |
| **5** | **Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | |
| 96 | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam daerah **(SPM)** | Persen | 86 | 65 | 30 | 87 | 90 | 90 | Satpol PP dan WH |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | CAPAIAN KINERJA | | | | | Target Kondisi Kinerja Akhir RPJMK (2024) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 97 | Persentase penegakan Qanun daerah **(SPM)** | Persen | 87 | 83 | 40 | 85 | 87 | 85 | Satpol PP dan WH |
| 98 | Persentase PPNS yang dilakukan pembinaan **(SPM)** | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | Satpol PP dan WH |
| 99 | Persentase pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dan kebakaran dalam daerah **(SPM)** | Persen | 60 | 60 | 60 | 100 | 97,65 | 85 | BPBD |
| 100 | Persentase pelaksanan Inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam daerah **(SPM)** | Persen | 95 | 95 | 95 | 100 | 96 | 100 | BPBD |
| 101 | Persentase pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran dalam daerah **(SPM)** | Persen | 85 | 85 | 85 | 100 | 98,96 | 96 | BPBD |
| 102 | Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran **(SPM)** | Persen | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | 96 | BPBD |
| 103 | Persentase masyarakat yang mendapat sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan | persen | 80 | 85 | 80 | 93 | 96 | 100 | Satpol PP dan WH |
| 104 | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan Lingkungan | persen | 80 | 85 | 80 | 85 | 96 | 100 | Satpol PP dan WH |
| 105 | Resiko Bencana Daerah | Rendah/ Sedang/ Tinggi | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | BPBD |
| **6** | **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial** | | | | | | | | |
| 106 | Persentase Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni | persen | 4,50 | 4,60 | 4,90 | 5,00 | 5,25 | 13,00 | Dinsos P3A |
| 107 | Persentase Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial di daerah | Persen | 86 | 85 | 73 | 78 | 82 | 85 | Dinsos P3A |
| 108 | Persentase penanganan Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke desa dari titik debarkasi | Persen | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 95 | Dinsos P3A |
| 109 | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang dilakukan Rehabilitasi Sosial Dasar **(SPM)** | persen | 85 | 65 | 35 | 22 | 22 | 30 | Dinsos P3A |
| 110 | Persentase tingkat pemanfaatan data kesejahteraan sosial | persen | 60 | 75,3 | 56,5 | 43 | 48 | 50 | Dinsos P3A |
| 111 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar (**SPM**) | persen | 98 | 98 | 70 | 88 | 90 | 90 | Dinsos P3A |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| **7** | **Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja** | | | | | | | | |
| 112 | Tingkat Pengangguran Terbuka | persen | 6,58 | 3,57 | 3,59 | 4,34 | 4,4 | 4,8 | DPMPTSP NAKERTRANS |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | CAPAIAN KINERJA | | | | | Target Kondisi Kinerja Akhir RPJMK (2024) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 113 | Rasio penduduk yang bekerja | persen | 92,96 | 96,29 | 95,40 | 95,46 | 96,03 | 97,51 | DPMPTSP NAKERTRANS |
| 114 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | persen | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 0 | 1 | 11 | DPMPTSP NAKERTRANS |
| 115 | Tingkat kemudahan layanan pencari kerja | persen | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | DPMPTSP NAKERTRANS |
| 116 | Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan | persen | 0,50 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 11,04 | DPMPTSP NAKERTRANS |
| **8** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | |
| 117 | Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah | persen | 65 | 60 | 50 | 32 | 35 | 48 | Dinsos P3A |
| 118 | Cakupan layanan perlindungan dan rehabilitasi yang diberikan bagi perempuan korban kekerasan | persen | 97 | 95 | 82 | 88 | 90 | 90 | Dinsos P3A |
| 119 | Persentase peningkatan potensi kesejahteraan perempuan sebagai kepala keluarga | persen | 75 | 87 | 80 | 0 | 60 | 60 | Dinsos P3A |
| 120 | Tingkat ketersediaan data gender dan anak | persen | 80 | 85 | 75 | 0 | 0 | 30 | Dinsos P3A |
| 121 | Persentase lembaga pemerintah/swasta dalam pemenuhan hak Anak | Persen | 90 | 90 | 86 | 15 | 20 | 20 | Dinsos P3A |
| 122 | Cakupan layanan perlindungan yang diberikan bagi anak korban kekerasan | persen | 95 | 95 | 85 | 27 | 70 | 70 | Dinsos P3A |
| **9** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan** | | | | | | | | |
| 122 | Ketersediaan Pangan Utama | Persen | 349 | 342,27 | 326,89 | 241,59 | 290,9 | 100 | DISTANPANGAN |
| 123 | Produktivitas Padi atau bahan pangan lainnya | Ton/Ha | 6,27 | 6,03 | 6,78 | 7,12 | 6,77 | 5,93 | DISTANPANGAN |
| 124 | Peningkatan Skor PPH (Pola Pangan Harapan) | Score | 79,33 | 78,2 | 87,8 | 84,3 | 82,2 | 75,5 | DISTANPANGAN |
| 125 | Penurunan jumlah Desa Rawan Pangan | Desa | 21 | 12 | 19 | 19 | 18 | 9 | DISTANPANGAN |
| 126 | Tingkat Pelaksanaan dan Pembinaan Keamanan Pangan | Sampel | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | DISTANPANGAN |
| **10** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan** | | | | | | | | |
| 127 | Persentase luas lokasi usaha yang memiliki izin | Persen | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Dinas Pertanahan |
| 128 | Persentase sengketa dan konflik tanah garapan yang diselesaikan | Persen | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | Dinas Pertanahan |
| 129 | Persentase penyelesaian Ganti rugi tanah masyarakat untuk pembangunan | Persen | n/a | 33 | 59 | 100 | 0 | 50 | Dinas Pertanahan |
| 130 | Persentase penyelesaian status tanah ulayat | Persen | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Dinas Pertanahan |
| 131 | Persentase tanah yang diatur sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya | Persen | n/a | 100 | 100 | 20 | 30 | 30 | Dinas Pertanahan |
| **11** | **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup** | | | | | | | | |
| 132 | Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup | Persen | 25 | 35 | 30 | 0 | 100 | 100 | DLH |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | CAPAIAN KINERJA | | | | | Target Kondisi Kinerja Akhir RPJMK (2024) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 133 | Tingkat penanganan kerusakan lingkungan | persen | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 13 | DLH |
| 134 | Persentase ruang terbuka hijau (RTH) yang ditangani | persen | 10 | 15 | 15 | 17 | 17 | 25 | DLH |
| 135 | Persentase penanganan dan pengelolaan limbah B3 di daerah khusus | persen | 48,8 | 49,5 | 52,27 | 50 | 52 | 80 | DLH |
| 136 | Persentase penerapan Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | persen | 25 | 45 | 30 | 25 | 80 | 80 | DLH |
| 137 | Persentase Penyuluh lingkungan hidup yang memenuhi Standar | persen | - | 10 | 25 | 30 | 30 | 25 | DLH |
| 138 | Persentase tindak lanjut penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | persen | 50 | 55 | 60 | 20 | 100 | 80 | DLH |
| 139 | Cakupan penanganan Limbah Rumah Tangga dan instansi | persen | 51,32 | 83,52 | 70,96 | 18,51 | 19,37 | 45 | DLH |
| **12** | **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | |
| 140 | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | rasio | 0,94 | 0,99 | 0,96 | 0,98 | 1 | 0,98 | DISDUKCAPIL |
| 141 | Tingkat kepuasan pelayanan administrasi pencatatan sipil | Persen | 70 | 75 | 82 | 92 | 94 | 95 | DISDUKCAPIL |
| 142 | Persentase ketersediaan pendukung pengelolaan administrasi kependudukan | Persen | 50 | 65 | 65 | 88 | 93 | 95 | DISDUKCAPIL |
| 143 | Persentase ketersediaan database kependudukan | 90 | 98 | 98 | 98,67 | 100 | 100 | 100 | DISDUKCAPIL |
| 144 | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | persen | 94 | 99 | 96,62 | 98 | 99 | 98 | DISDUKCAPIL |
| 145 | Cakupan penerbitan akta kelahiran | persen | 60 | 62,95 | 67,62 | 76,42 | 81 | 80,01 | DISDUKCAPIL |
| **13** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa** | | | | | | | | |
| 146 | Indek Desa Membangun | Indeks | 0,61 | 0,611 | 0,652 | 0,6849 | 0,7096 | 0,76 | DPMG |
| 147 | Jumlah Kawasan Potensi Gampong yang dikembangkan | kawasan | 6 | 8 | 10 | 0 | 8 | 10 | DPMG |
| 148 | Persentase gampong tertib administrasi | persen | 13 | 27 | 32 | 70 | 75 | 75 | DPMG |
| 149 | Tingkat penerapan peraturan adat di gampong | persen | - | 60 | 50 | 75,23 | 80,18 | 80 | DPMG |
| **14** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | |
| 150 | Laju Pertumbuhan penduduk | persen | 1,7 | 1,7 | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 0,65 | DINKES KB |
| 151 | Persentase pembinaan keluarga dan pemakaian kontrasepsi | Persen | 85,00 | 80,00 | 85,9 | 66,00 | 70,00 | 80,00 | DINKES KB |
| 152 | Persentase pembinaan keluarga mitra kerja KKBPK | Persen | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 85,00 | 90,00 | 60,00 | DINKES KB |
| 153 | Rasio Akseptor KB | Rasio | 58,90 | 72,40 | 70,80 | 66,00 | 70,80 | 80,00 | DINKES KB |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | CAPAIAN KINERJA | | | | | Target Kondisi Kinerja Akhir RPJMK (2024) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 154 | Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB | persen | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 80,00 | 85,00 | 80,00 | DINKES KB |
| **15** | **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan** | | | | | | | | |
| 155 | Persentase peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan sesuai standar | persen | 75,00 | 50,00 | 0,00 | 54,00 | 58,00 | 60 | DISHUB |
| 156 | Persentase pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan Fasilitas LLAJ | persen | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 52,00 | 54,00 | 15 | DISHUB |
| 157 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | penumpang | 17.241 | 10.687 | 41.767 | 31607 | 31923 | 76.568 | DISHUB |
| 158 | Jumlah uji Kir Angkutan Umum | kendaraan | 71 | 73 | 70 | 72 | 82 | 70 | DISHUB |
| 159 | Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas | Kasus | 134 | 93 | 74 | 97 | 70 | 165 | DISHUB |
| **16** | **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika** | | | | | | | | |
| 160 | Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik | persen | 0 | 10 | 56 | 150 | 80 | 85 | DISKOMINFO STATISTIK dan PERSANDIAN |
| 161 | Cakupan pelayanan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah | persen | 0 | 95 | 95 | 100 | 100 | 70 | DISKOMINFO STATISTIK dan PERSANDIAN |
| **17** | **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah** | | | | | | | | |
| 162 | Jumlah KSP/USP yang berizin | unit | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | DISPERINDAGKOP |
| 163 | Persentase koperasi aktif | persen | 56,25 | 56,87 | 58,14 | 58,61 | 50 | 70 | DISPERINDAGKOP |
| 164 | Jumlah KSP/USP cukup Sehat | unit | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 12 | DISPERINDAGKOP |
| 165 | Persentase Peningkatan kompetensi pengurus | persen | 25,64 | 51,11 | 46,4 | 44,44 | 12,01 | 60 | DISPERINDAGKOP |
| 166 | Persentase koperasi mandiri | persen | 18,8 | 20,83 | 20,8 | 24,76 | 24,55 | 15 | DISPERINDAGKOP |
| 167 | Persentase UMKM Mandiri | persen | 7,004 | 8,005 | 8,99 | 8,87 | 9,87 | 16 | DISPERINDAGKOP |
| 168 | Persentase UMKM naik kelas | persen | 7,17 | 8,01 | 8,99 | 8,94 | 10,1 | 16 | DISPERINDAGKOP |
| **18** | **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal** | | | | | | | | |
| 169 | Jumlah Investasi PMDN | Milyar Rupiah | 47 | 33 | 130 | 91 | 99 | 135 | DPMPTSP NAKERTRANS |
| 170 | Jumlah Proyek PMDN | PMDN | 66 | 84 | 121 | 641 | 784 | 33 | DPMPTSP NAKERTRANS |
| 171 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Persen | 85,75 | 86,25 | 86,29 | 86 | 86,9 | 88 | DPMPTSP NAKERTRANS |
| 172 | Jumlah Perusahaan PMDN | PMDN | 66 | 84 | 121 | 96 | 110 | 33 | DPMPTSP NAKERTRANS |
| 173 | Tingkat pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi dalam pelayanan perizinan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | DPMPTSP NAKERTRANS |
| **19** | **Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga** | | | | | | | | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | CAPAIAN KINERJA | | | | | Target Kondisi Kinerja Akhir RPJMK (2024) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 174 | Persentase organisasi pemuda yang aktif | Persen | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | DISPORAPAR |
| 175 | Persentase Atlit yang berprestasi dari masing-masing cabang olahraga | Persen | 13,33 | 13,33 | 36,36 | 36,36 | 40 | 68 | DISPORAPAR |
| 176 | persentase pembina pramuka gugus depan | Persen | 10,32 | 10,53 | 10,72 | 10,73 | 10,73 | 50 | DISPORAPAR |
| **20** | **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik** | | | | | | | | |
| 177 | Persentase ketersediaan data statistik sektoral | Persen | 0 | 0 | 0 | 76 | 104 | 95 | DISKOMINFO STATISTIK dan PERSANDIAN |
| **21** | **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian** | | | | | | | | |
| 178 | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | Persen | 0 | 0 | 75 | 100 | 100 | 100 | DISKOMINFO STATISTIK dan PERSANDIAN |
| **22** | **Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan** | | | | | | | | |
| 179 | Persentase Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya daerah | Persen | 28 | 39 | 45 | 39 | 45 | 70 | DISDIKBUD |
| 180 | Persentase pembinaan dan pengembangan seni tradisional | Persen | 34 | 43 | 50 | 43 | 50 | 75 | DISDIKBUD |
| 181 | Persentase peningkatan akses masyarakat terhadap sejarah daerah | Persen | 9 | 19,5 | 25,5 | 19,5 | 25,5 | 50 | DISDIKBUD |
| 182 | Persentase peningatan tata kelola situs cagar budaya | Persen | 8 | 19 | 25 | 19 | 25 | 50 | DISDIKBUD |
| 183 | Tingkat pemahaman masyarakat terhadap sejarah dan nilai-nilai budaya | Persen | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 20 | DISDIKBUD |
| **23** | **Urusan Pemerintahan Bidang perpustakaan** | | | | | | | | |
| 184 | Persentase pengelola pustaka yang memahami tatakelola dan administrasi kepustakaan | Persen | 0 | 0 | 25 | 62,5 | 60 | 30 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| **24** | **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan** | | | | | | | | |
| 185 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | Persen | 0 | 0 | 2 | 71 | 100 | 40 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | |
| **25** | **Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan** | | | | | | | | |
| 186 | Produksi Perikanan Tangkap | ton/ tahun | 15.807 | 14.355 | 14.266 | 15,092 | 19743 | 16.000 | DKP |
| 187 | Produksi Perikanan Budidaya | ton/ tahun | 14.589 | 15.387 | 14.362 | 14,052 | 14,68 | 15.160 | DKP |
| 188 | Nilai tukar nelayan | nilai | 102 | 101 | 103 | 96,55 | 126 | 108 | DKP |
| 189 | Produksi olahan hasil perikanan | ton/ tahun | 1.558 | 1.733 | 1.790 | 2,117 | 1225,6 | 2.041 | DKP |
| 190 | Tingkat Konsumsi Ikan | persen | 83 | 82,89 | 83,58 | 86,74 | 85,92 | 90 | DKP |
| **26** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata** | | | | | | | | |
| 191 | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata | persen | 86,67 | 86,67 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 25 | DISPORAPAR |
| 192 | Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan | persen | 1,7 | 1 | 1 | 0,98 | 7,97 | 50 | DISPORAPAR |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | CAPAIAN KINERJA | | | | | Target Kondisi Kinerja Akhir RPJMK (2024) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 193 | Persentase peran masyarakat dalam peningkatan ekonomi bidang pariwisata | persen | 35,59034,54 | 48,2 | 55,52 | 60,16 | 65 | 20 | DISPORAPAR |
| **27** | **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian** | | | | | | | | |
| 194 | Nilai Tukar Petani (NTP) | indeks | 98,74 | 101,19 | 107,45 | 114,34 | 124,01 | 97,12 | DISTANPANGAN |
| 195 | Nilai Tukar Petani (NTP) | indeks | 97.27.00 | 97.08.00 | 95.34.00 | 96.26.00 | 97.14.00 | 97,12 | DISBUNNAK |
| 196 | Kontribusi sektor Pertanian dalam PDRB | Persen | 46,99 | 46,05 | 46,46 | 46,53 | 46,58 | 45,36 | DISBUNNAK |
| 197 | Persentase penanganan penyakit hewan dan kesmavet | Persen | 45 | 50 | 55 | 55 | 70 | 65 | DISBUNNAK |
| 198 | Persentase Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman yang tertangani | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | DISTANPANGAN |
| 199 | Luasan Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman yang tertangani | Persen | 55 | 56 | 60 | 60 | 100 | 80 | DISBUNNAK |
| 200 | Persentase Usaha Sektor Pertanian Yang Memiliki Izin (rekomendasi) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | DISTANPANGAN |
| 201 | Persentase Usaha Sektor Pertanian Yang Memiliki Izin (rekomendasi) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | DISBUNNAK |
| 202 | Cakupan Bina Kelompok Tani | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 37,5 | DISTANPANGAN |
| 203 | Produksi sektor pertanian (Padi) | Ton | 110.579 | 98.228 | 93.814 | 84.439 | 103.521 | 99.790 | DISTANPANGAN |
| 204 | Produksi Daging Ruminansia | Ton | 283,66 | 321,13 | 301,19 | 298,93 | 269,10 | 170,42 | DISBUNNAK |
| 205 | Produksi Daging Non Ruminansia | Ton | 335,64 | 356,82 | 376,61 | 379,98 | 620,70 | 417,65 | DISBUNNAK |
| **28** | **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan** | | | | | | | | |
| 206 | Persentase legalitas usaha perdagangan | Persen | 10,02 | 12 | 15 | 13,68 | 69,38 | 24 | DISPERINDAGKOP |
| 207 | Persentase sarana perdagangan (Pasar) dalam kondisi baik dan nyaman | Persen | 46,67 | 58 | 80 | 89 | 91 | 95 | DISPERINDAGKOP |
| 208 | Tingkat inflasi daerah | Persen | 3,51 | 2,19 | 5,68 | 1,54 | 2,47 | 3 | DISPERINDAGKOP |
| 209 | Persentase peningkatan produk unggulan daerah yang di ekspor | Persen | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 4,5 | DISPERINDAGKOP |
| 210 | Persentase Metrologi legal di daerah | Persen | 60 | 68 | 76 | 35,86 | 88,88 | 95 | DISPERINDAGKOP |
| 211 | Persentase peningkatan penggunaan produk daerah | Persen | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 35 | DISPERINDAGKOP |
| **29** | **Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian** | | | | | | | | |
| 212 | Jumlah Sentra industri potensial | unit | 11 | 18 | 19 | 24 | 24 | 40 | DISPERINDAGKOP |
| 213 | Persentase sentra industri yang Memiliki Izin (rekomendasi) | Persen | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 7 | DISPERINDAGKOP |
| 214 | Persentase Pemanfaatan sistem Aplikasi SIINAS | Persen | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 3 | 45 | DISPERINDAGKOP |
| **30** | **Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi** | | | | | | | | |
| 215 | Jumlah kawasan transmigrasi | kawasan | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | DPMPTSP NAKERTRANS |
| 216 | Persentase unit permukiman transmigrasi sesuai standar dan juknis | Persen | 50 | 60 | 70 | 90 | 90 | 90 | DPMPTSP NAKERTRANS |
| 217 | Jumlah unit permukiman kawasan transmigrasi yang mandiri | unit | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | DPMPTSP NAKERTRANS |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | CAPAIAN KINERJA | | | | | Target Kondisi Kinerja Akhir RPJMK (2024) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |
| **31** | **Sekretariat Daerah** | | | | | | | | |
| 218 | Tingkat pemenuhan administrasi pemerintah, kinerja kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan | Persen | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 | SETDAKAB |
| 219 | Tingkat layanan administrasi bidang Perekonomian dan pembangunan | Persen | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | SETDAKAB |
| 220 | Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan dan Administrasi pemerintahan daerah | Persen | 75 | 91,93 | 80 | 85 | 90 | 90 | SETDAKAB |
| **32** | **Sekretariat DPRD** | | | | | | | | |
| 221 | Persentase pemenuhan layanan administrasi anggota DPRK | Persen | 94.18.00 | 92.95 | 94.08.00 | 96.39.00 | 96.25.00 | 100 | SEKR. DPRK |
| 222 | Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Qanun, dan Fungsi anggaran dalam dokumen RPJMK maupun dokumen RKPK | ada/tidak | ada | ada | ada | ada | ada | ada | SEKR. DPRK |
| | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |
| **33** | **Perencanaan** | | | | | | | | |
| 223 | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA |
| 224 | Penjabaran konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK Khusus SKPK dibawah koordinasi bidang P2KSDM Bappeda | persen | 95 | 95 | 95 | 91,81 | 98,05 | 100 | BAPPEDA |
| 225 | Penjabaran konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK khusus SKPK dibawah koordinasi bidang P2EK Bappeda | persen | 93 | 95 | 98 | 91,24 | 98,3 | 100 | BAPPEDA |
| 226 | Penjabaran konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK Khusus SKPK dibawah koordinasi bidang P2SP | persen | 95 | 95 | 99 | 100 | 98,45 | 100 | BAPPEDA |
| **34** | **Keuangan** | | | | | | | | |
| 227 | Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah | WTP/WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | BPKK |
| 228 | Persentase penatausahaan aset daerah secara baik | Persen | 80 | 85 | 84 | 88 | 92 | 95 | BPKK |
| 229 | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persen | 15,61 | 3,52 | 21,02 | 17,93 | -0,12 | 19,5 | BPKK |
| 230 | Persentase SiLPA terhadap APBD | persen | 4,44 | 3,96 | 4,61 | 1,41 | 1,76 | 3 | BPKK |
| 231 | Persentase Belanja Pendidikan (20%) | persen | 20,49 | 19,99 | 19,99 | 17,92 | 20,08 | 20 | BPKK |
| 232 | Persentase Belanja Kesehatan (10%) | persen | 17,81 | 19,72 | 11,93 | 13,37 | 14,32 | 10 | BPKK |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | CAPAIAN KINERJA | | | | | Target Kondisi Kinerja Akhir RPJMK (2024) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **35** | **Kepegawaian** | | | | | | | | |
| 233 | Persentase Penyelesaian administrasi dalam manajemen kepegawaian | Persen | 2305.40.48 | 97,01 | 98,83 | 99,14 | 100 | 100 | BKPSDM |
| **36** | **Pendidikan Dan Pelatihan** | | | | | | | | |
| 234 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Persen | 15,5 | 16,5 | 17 | 23,67 | 31,19 | 19,14 | BKPSDM |
| 235 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural | persen | 16 | 17 | 17,5 | 17,5 | 22,89 | 19,14 | BKPSDM |
| **37** | **Penelitian Dan Pengembangan** | | | | | | | | |
| 236 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. | Persen | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA |
| | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |
| **38** | **Inspektorat Daerah** | | | | | | | | |
| 237 | Tingkat pengawasan internal berbasis resiko | Persen | 80 | 80 | 80 | 87,3 | 87,32 | 90 | INSPEKTORAT |
| 238 | Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP | Persen | 80 | 80,88 | 88,8 | 86,9 | 88,8 | 75 | INSPEKTORAT |
| | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | |
| **39** | **Kecamatan** | | | | | | | | |
| 239 | Tingkat Kepuasan pelayanan Masyarakat | Persen | 85,75 | 86,25 | 86,29 | 88,36 | 89,24 | 88 | Kecamatan |
| 240 | Persentase peran serta masyarakat dalam pembangunan Gampong | Persen | 55 | 60 | 65 | 74 | 78 | 75 | Kecamatan |
| 241 | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum | persen | 60 | 70 | 80 | 87 | 91 | 90 | Kecamatan |
| 242 | Tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami nilai-nilai luhur budaya bangsa | persen | 60 | 70 | 85 | 88 | 92 | 90 | Kecamatan |
| 243 | Persentase gampong dengan pertanggungjawaban keuangan baik dan tepat waktu | persen | 70 | 80 | 90 | 84 | 87 | 85 | Kecamatan |
| | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | |
| 40 | **Kesatuan Bangsa Dan Politik** | | | | | | | | |
| 244 | Persentase masyarakat yang dibina tentang ideologi pancasila dan karakter Kebangsaan | Persen | 40 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 | KESBANGPOL |
| 245 | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada | Persen | 82 | 0 | 0 | 0 | 83 | 85 | KESBANGPOL |
| 246 | Persentase Ormas yang memdapatkan rekomendasi | Persen | 35 | 40 | 30 | 30 | 60 | 90 | KESBANGPOL |
| 247 | inventarisir kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kelangkaan | Persen | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 50 | KESBANGPOL |
| 248 | Persentase konflik sosial yang di inventarisir | Persen | 60 | 65 | 70 | 70 | 85 | 85 | KESBANGPOL |
| | **UNSUR KEKHUSUSAN** | | | | | | | | |
| 249 | Persentase penerapan Syariat Islam | Persen | 71 | 74 | 76 | 75 | 79 | 80 | Dinas Syariat Islam |
| 250 | Persentase peningkatan pemahaman Syariat Islam | persen | 83 | 86 | 89 | 87 | 92 | 95 | Dinas Syariat Islam |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | CAPAIAN KINERJA | | | | | Target Kondisi Kinerja Akhir RPJMK (2024) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 251 | Persentase pelanggaran Syariat Islam yang diselesaikan | persen | 82 | 85 | 85 | 89 | 93 | 92 | Satpol PP dan WH |
| 252 | Persentase fatwa ulama yang disosialisasikan | persen | 84,6 | 75 | 92,3 | 87 | 80,8 | 100 | Sekretariat MPU |
| 253 | Tingkat penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan keagamaan | persen | 66,7 | 50 | 75 | 75 | 50 | 85 | Sekretariat MPU |
| 254 | Persentase pelestarian dan pembinaan adat dan adat istiadat daerah | Persen | 25 | 45 | 26 | 35 | 40 | 50 | Sekretariat MAA |
| 255 | Persentase Peningkatan Penerimaan PAD dari Zakat dan Infaq | Persen | 8,09 | 17,76 | 0 | 18,24 | 18,6 | 14 | Sekretariat Baitul Mal |
| | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | |
| 256 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita | Juta Rupiah | 11,78 | 11,73 | 11,81 | 18,5 | 19,26 | 19,16 | DATA BPS |
| 257 | Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita | Persen | 57,1 | 58,85 | 56,8 | 56,4 | 56,8 | 45,21 | DATA BPS |
| 258 | Rata-rata Konsumsi Pangan Per Kapita | Persen | 42,9 | 41,15 | 43,2 | 43,5 | 43,6 | 41 | DATA BPS |
| 259 | Kriminalitas yang tertangani | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DATA BPS |
| 260 | Luas lahan Produktif pertanian dan perkebunan | Ha | 23.388 | 23,77 | 24.416 | 25,972 | 25,972 | 46.264 | DISBUNNAK |
| 261 | Rasio Ketergantungan | Rasio | 33 | 32 | 31 | 32 | 32 | 36 | DATA BPS |

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan lima tahun sebelumnya merupakan instrumen penting untuk mengukur kinerja pembangunan daerah serta menilai kesesuaian antara rencana dengan capaian yang dihasilkan. Dari hasil evaluasi tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi perencanaan pembangunan.

Faktor Pendukung:

1. Kepemimpinan dan Komitmen Kepala Daerah
   Dukungan politik dan komitmen yang kuat dari kepala daerah dan perangkatnya menjadi kunci utama dalam mendorong pelaksanaan program pembangunan sesuai arah yang direncanakan.
2. Sinergi Antar Perangkat Daerah
   Koordinasi yang baik antar SKPD dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mampu menciptakan keselarasan program lintas sektor dan mendukung pencapaian target pembangunan.
3. Ketersediaan Data dan Informasi
   Tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
4. Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
   Keterlibatan aktif masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan memberikan legitimasi serta memperkuat akuntabilitas publik.

Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan Kapasitas SDM dan Kelembagaan
   Masih terdapat tantangan dalam hal kompetensi perencana, kelembagaan perencanaan, serta rendahnya budaya evaluasi di sebagian SKPK yang berdampak pada lemahnya pengendalian program.
2. Ketidaksesuaian Antara Perencanaan dan Penganggaran
   Belum optimalnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran menyebabkan tidak semua prioritas pembangunan dapat diakomodasi dalam APBK.
3. Minimnya Inovasi dan Pendekatan Adaptif
   Dalam menghadapi dinamika global dan tantangan lokal, masih terbatasnya inovasi dan adaptasi kebijakan menjadi kendala dalam menjawab isu-isu strategis baru.

4. Ketergantungan Tinggi pada Dana Transfer Pusat
   Struktur fiskal daerah yang sangat tergantung pada dana transfer pusat menyebabkan fleksibilitas perencanaan dan eksekusi pembangunan menjadi terbatas.

Hasil evaluasi perencanaan pembangunan lima tahun terakhir memberikan masukan strategis dalam merumuskan arah kebijakan RPJMK ke depan. Dengan mengidentifikasi keberhasilan yang perlu diperkuat serta hambatan yang harus diatasi, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan yang lebih realistis, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan.

Evaluasi ini juga menjadi dasar dalam penentuan prioritas pembangunan, penyempurnaan indikator kinerja, perbaikan tata kelola, serta penguatan sistem pemantauan dan pengendalian pembangunan daerah yang lebih terukur dan akuntabel.

## 2.5. Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan pembangunan daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam melaksanakan berbagai rencana program pembangunan yang telah ditetapkan. Pendanaan program-program pembangunan sering menjadi tantangan dan permasalahan yang serius dari waktu-kewaktu. Hal tersebut sering disebabkan oleh adanya keterbatasan kemampuan pendanaan dari berbagai sumber dalam rangka mendukung penerimaan pendapatan daerah, sedangkan jumlah penggunaan anggaran untuk belanja pembangunan menunjukkan nilai yang semakin tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan pengelolaan keuangannya yang meliputi (1) Pengelolaan terhadap pendapatan, (2) pengelolaan terhadap belanja, dan (3) pengelolaan terhadap pembiayaan guna menciptakan kesimbangan keuangan. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan mengembangkan potensi sumber daya di wilayahnya. Ciri utama suatu daerah akan mampu melaksanakan otonominya secara efektif yaitu: (1) Besarnya kemampuan keuangan daerah; yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan (2) Berkurangnya ketergantungan kepada bantuan pusat; dimana Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber pendanaan utama yang didukung oleh pendanaan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan terhadap kondisi keuangan di masa yang lalu, baik dari sisi kinerja keuangan maupun kebijakan dalam pengelolaannya. Disamping itu perlu juga dilakukan analisis terhadap pengeluaran secara periodik, baik yang bersifat wajib, maupun mengikat serta yang menjadi prioritas utama. Melalui hasil perhitungan tersebut, akan dapat diperkirakan kapasitas riil kemampuan keuangan yang tersedia untuk digunakan dalam rangka membiayai berbagai rencana program pembangunan daerah.

### 2.5.1. Realisasi APBK Pidie Jaya Tahun 2020-2024

Kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat diketahui dari kinerja keuangan dimasa lalu. Hal tersebut dapat dilihat melalui realisasi kinerja hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan Neraca Keuangan Kabupaten Pidie Jaya selama beberapa tahun terakhir.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 3 (tiga) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, dijabarkan sebagai berikut.

#### 2.5.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

2. Pendapatan transfer yang berasal dari (a). pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan; (b). pendapatan transfer antar daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari pendapatan hibah, pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peratiran perundang-undangan, dan lain-lain pendapatan.

Secara nominal, Pendapatan Daerah Kabupaten Pidie Jaya masih sangat tergantung pada sumber-sumber yang berasal dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), khususnya yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer ke daerah setiap tahunnya. Disisi lain, kontribusi yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah terhadap total penerimaan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih tinggi ketergantungan anggaran pembangunan terhadap sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Hal ini akan mempersempit ruang fiskal yang mempengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya Kinerja APBK Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren realisasi komponen pendapatan yang berfluktuatif, baik komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta Pembiayaan Daerah.

Lebih lanjut pertumbuhan realisasi pendapatan daerah disajikan secara serial dalam dua tabel terpisah dikarenakan adanya perubahan struktur pendapatan pada PP Nomor 12 Tahun 2019. Mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.128 berikut.

**Tabel 2.128.**
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| NO. | URAIAN | REALISASI TAHUN | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **I.** | **PENDAPATAN** | **962.513.543.412,80** | **946.127.037.543,45** | **993.454.968.096,02** | **944.544.041.037,62** | **975.472.097.648** | **-0,01** |
| **A.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **79.574.101.889,80** | **82.373.813.742,45** | **99.689.460.480,60** | **117.561.653.330,62** | **117.421.894.747** | **0,40** |
| | Pendapatan Pajak Daerah | 7.728.453.015,05 | 8.711.018.955,00 | 9.638.687.012,00 | 10.618.978.954,45 | 10.060.848.382 | 0,19 |
| | Pendapatan Retribusi Daerah | 53.481.752.322,00 | 56.047.888.179,00 | 3.646.194.200,00 | 3.443.818.100,00 | 2.585.119.198 | -1,23 |
| | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2.797.257.536,00 | 2.532.367.261,00 | 2.786.958.904,00 | 2.696.813.648,00 | 2.402.889.602 | -0,06 |
| | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 15.566.639.016,75 | 15.082.539.347,45 | 83.617.620.364,60 | 100.802.042.628,17 | 102.373.037.565 | 4,76 |
| **B.** | **PENDAPATAN TRANSFER/DANA PERIMBANGAN** | **866.068.821.523,00** | **847.826.835.801,00** | **865.333.538.615,42** | **826.982.387.707,00** | **846.886.995.898** | **-0,05** |
| | **PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN** | **545.006.557.017,00** | **541.972.260.328,00** | **589.969.349.381,00** | **562.746.402.174,00** | **801.618.829.018** | **0,02** |
| | Dana Bagi Hasil Pajak | 7.075.651.403,00 | 11.341.472.527,00 | 15.923.089.937,00 | 15.652.375.448,00 | 20.032.613.740,00 | 0,82 |
| | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 5.408.254.622,00 | 3.482.079.148,00 | 0 | 0 | 0 | -1,18 |
| | Dana Alokasi Umum | 410.145.461.000,00 | 404.301.754.000,00 | 403.321.541.158,00 | 419.269.711.000,00 | 440.484.715.685 | 0,05 |
| | Dana Alokasi Khusus - Fisik | 122.377.189.992,00 | 122.846.954.653,00 | 99.282.291.087,00 | 49.347.130.631,00 | 52.497.099.749,00 | -0,63 |
| | Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | 0 | 0 | 71.442.427.199,00 | 78.477.185.095,00 | 72.802.566.380 | -0,30 |
| | **PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA** | **196.250.693.000,00** | **205.652.917.000,00** | **170.644.585.000,00** | **204.209.932.000,00** | **169.168.059.000** | **0,10** |
| | Dana Penyesuaian | 27.989.074.000,00 | 39.790.452.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,42 |
| | Dana Insentif Daerah | 0 | 0 | 18.897.689.000,00 | 34.904.197.000,00 | 0 | 0,21 |
| | Dana Desa | 168.261.619.000,00 | 165.862.465.000,00 | 151.746.896.000,00 | 169.305.735.000,00 | 169.168.059.000,00 | 0,03 |
| | **PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH** | **124.811.571.506,00** | **100.201.658.473,00** | **104.719.604.234,42** | **60.026.053.533,00** | **45.268.166.880,00** | **-0,68** |
| | Pendapatan Bagi Hasil | 27.981.071.725,00 | 24.922.205.099,00 | 26.524.380.706,17 | 30.980.289.192,00 | 29.737.873.572,00 | 0,16 |
| | Bantuan Keuangan | 96.830.499.781,00 | 75.279.453.374,00 | 78.195.223.528,25 | 29.045.764.341,00 | 15.530.293.308,00 | -1,11 |
| **C.** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **16.870.620.000,00** | **15.926.388.000,00** | **28.431.969.000,00** | **0** | **11.163.207.003,00** | **0,77** |
| | Pendapatan Hibah | 16.870.620.000,00 | 15.926.388.000,00 | 28.431.969.000,00 | 0 | 11.163.207.003,00 | 0,77 |
| | | | | | | | |

| NO. | URAIAN | REALISASI TAHUN | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| **II.** | **BELANJA** | **1.030.249.672.902,18** | **951.836.824.377,74** | **976.525.559.615,62** | **974.737.086.904,80** | **972.020.657.563** | **-0,04** |
| **A.** | **BELANJA OPERASI** | **608.472.840.658,33** | **553.118.640.090,00** | **580.308.096.615,67** | **616.812.878.931,00** | **651.993.588.471** | **0,09** |
| | Belanja Pegawai | 302.509.077.277,00 | 276.602.633.548,00 | 282.596.101.590,00 | 289.868.652.030,00 | 322.137.473.566 | 0,11 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 201.495.412.713,57 | 227.738.907.643,00 | 261.170.526.142,67 | 303.378.179.497,00 | 284.709.991.555 | 0,23 |
| | Belanja Hibah | 34.756.442.516,00 | 34.299.744.969,00 | 25.459.561.000,00 | 14.074.437.700,00 | 38.334.027.268 | 0,26 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 69.711.908.151,76 | 14.477.353.930,00 | 11.081.907.883,00 | 9.491.609.704,00 | 6.812.096.082 | -0,86 |
| **B.** | **BELANJA MODAL** | **190.751.269.227,85** | **179.797.222.836,74** | **184.239.724.133,95** | **136.437.408.637,80** | **112.745.786.463** | **-0,46** |
| | Belanja Modal Tanah | 0 | 550.845.831,00 | 4.996.809.600,00 | 154.492.247,00 | 0 | 3,07 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 30.514.933.440,00 | 32.598.696.862,38 | 30.099.824.944,00 | 16.690.732.954,00 | 16.789.884.765 | -0,60 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 57.170.154.024,76 | 68.212.942.818,25 | 43.151.915.965,51 | 12.775.324.312,65 | 25.643.099.452 | -0,02 |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 99.914.375.873,09 | 78.307.685.310,11 | 105.461.360.324,44 | 104.085.540.084,15 | 67.325.238.134 | -0,07 |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | 3.151.805.890,00 | 127.052.015,00 | 529.813.300,00 | 2.731.319.040,00 | 2.987.564.112 | 6,19 |
| **C.** | **BELANJA TAK TERDUGA** | **8.835.680.384,00** | **4.053.589.338,00** | **706.903.046,00** | **2.270.512.722,00** | **400.000.000** | 0,43 |
| | Belanja Tak Terduga | 8.835.680.384,00 | 4.053.589.338,00 | 706.903.046,00 | 2.270.512.722,00 | 400.000.000 | 0,43 |
| **D.** | **BELANJA TRANSFER** | **222.189.882.632,00** | **214.867.372.113,00** | **211.270.835.820,00** | **219.216.286.614,00** | **206.881.282.629** | **-0,04** |
| | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 222.189.882.632,00 | 214.867.372.113,00 | 211.270.835.820,00 | 219.216.286.614,00 | 206.881.282.629 | -0,04 |
| | **SURPLUS/(DEFISIT)** | **-67.736.129.489,38** | **-5.709.786.834,29** | **16.929.408.480,40** | **-30.193.045.867,18** | **3.451.385.885,15** | **-8,09** |
| | | | | | | | |
| **III.** | **PEMBIAYAAN** | **103.643.022.569,80** | **34.906.893.080,42** | **28.097.106.246,13** | **43.926.514.726,53** | **12.633.468.559** | **-0,49** |
| **A.** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **104.643.022.569,80** | **35.906.893.080,42** | **29.197.106.246,13** | **45.026.514.726,53** | **13.733.468.559** | **-0,50** |
| | Penggunaan SILPA | 104.643.022.569,80 | 35.906.893.080,42 | 29.197.106.246,13 | 45.026.514.726,53 | 13.733.468.559 | -0,50 |
| **B.** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **1.100.000.000,00** | **1.100.000.000,00** | **1.100.000.000,00** | **0,10** |
| | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | -0,81 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **103.643.022.569,80** | **34.906.893.080,42** | **28.097.106.246,13** | **43.926.514.726,53** | **12.633.468.559** | **-0,49** |
| | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)** | **35.906.893.080,42** | **29.197.106.246,13** | **45.026.514.726,53** | **13.733.468.859,35** | **17.084.908.644** | **0,04** |

*Sumber : LRA Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024*

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, pendapatan Kabupaten Pidie Jaya mengalami fluktuasi. Total pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp993,45 miliar, sementara pendapatan terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp938,77 miliar. Meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2022, secara umum tren pendapatan mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan ini menunjukkan tantangan dalam mempertahankan stabilitas pendapatan daerah, baik dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren yang meningkat hingga tahun 2023, dari Rp79,57 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp117,56 miliar, namun stagnan pada tahun 2024. Kenaikan signifikan terjadi pada komponen "Lain-lain PAD yang Sah", yang melonjak dari Rp15,56 miliar pada 2020 menjadi lebih dari Rp100 miliar pada tahun 2023 dan 2024. Sebaliknya, retribusi daerah mengalami penurunan tajam dari Rp53,48 miliar di tahun 2020 menjadi hanya Rp2,58 miliar di tahun 2024. Penurunan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena retribusi daerah seharusnya mencerminkan optimalisasi pelayanan publik yang dikenai tarif.

Sementara itu, pendapatan transfer yang merupakan sumber utama pendapatan daerah menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2020, pendapatan transfer mencapai Rp866,06 miliar dan menurun menjadi Rp810,19 miliar pada tahun 2024. Bagian terbesar dari transfer ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Desa. Meskipun terdapat penambahan dana seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur di tahun 2024, namun hal tersebut belum mampu menutup penurunan dari sisi bantuan keuangan antar daerah yang menyusut drastis dari Rp96,83 miliar (2020) menjadi Rp15,53 miliar (2024).

Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah cenderung tidak stabil. Tahun 2023 bahkan tidak mencatatkan penerimaan pada pos ini, sementara pada tahun-tahun lainnya terjadi fluktuasi, seperti adanya pendapatan hibah dan pendapatan lainnya yang muncul tidak konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa komponen ini bukan sumber pendapatan yang dapat diandalkan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, struktur pendapatan Kabupaten Pidie Jaya masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, yang menyumbang lebih dari 85% dari total pendapatan tiap tahunnya. Ketergantungan ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk memperkuat PAD, khususnya dengan mendorong inovasi sumber-sumber PAD

baru, memperbaiki manajemen retribusi daerah, serta meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

**A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan tren peningkatan secara umum selama periode 2020–2024. Total PAD meningkat dari Rp79,57 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp117,42 miliar pada tahun 2024, atau tumbuh sekitar 47,5% dalam lima tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal, meskipun sebagian besar pertumbuhan tersebut berasal dari satu komponen saja, yaitu "Lain-lain PAD yang Sah", bukan dari basis pajak atau retribusi yang lebih berkelanjutan.

Komponen "Lain-lain PAD yang Sah" mengalami lonjakan sangat signifikan dari Rp15,56 miliar pada tahun 2020 menjadi lebih dari Rp102 miliar pada tahun 2024. Kenaikan tajam ini terjadi sejak tahun 2022, yang mungkin mencerminkan adanya optimalisasi pendapatan dari sumber-sumber nonkonvensional seperti pengelolaan aset, jasa giro, pendapatan dari jasa pelayanan tertentu, atau kerja sama dengan pihak ketiga. Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa komponen ini cenderung tidak stabil dan bisa bersifat temporer, sehingga belum bisa dijadikan sebagai fondasi utama kemandirian PAD.

Sebaliknya, beberapa komponen utama PAD lainnya justru mengalami penurunan atau pertumbuhan yang sangat minim. Pendapatan Pajak Daerah, misalnya, hanya naik dari Rp7,73 miliar (2020) menjadi Rp10,11 miliar (2024), menunjukkan pertumbuhan yang relatif lambat. Padahal, pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling potensial untuk dikelola secara berkelanjutan. Sementara itu, Pendapatan Retribusi Daerah justru mengalami penurunan tajam dari Rp53,48 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp2,58 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini sangat drastis dan menjadi sinyal melemahnya kinerja pelayanan publik yang dikenai tarif, atau adanya perubahan kebijakan dalam pemungutan retribusi.

Selain itu, Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan tren menurun, dari Rp2,79 miliar (2020) menjadi Rp2,40 miliar (2024). Ini mengindikasikan bahwa kontribusi BUMD atau investasi daerah terhadap PAD masih sangat terbatas dan belum memberikan hasil signifikan. Tidak adanya kontribusi dari zakat juga mencerminkan belum optimalnya integrasi sistem ekonomi

syariah dalam struktur keuangan daerah, meskipun Kabupaten Pidie Jaya berada di wilayah yang menerapkan Syariat Islam.

Secara keseluruhan, meskipun PAD mengalami pertumbuhan nominal, namun struktur sumber PAD masih belum sehat dan cenderung bergantung pada komponen tidak tetap. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem pengelolaan pajak dan retribusi, penguatan kelembagaan pendapatan daerah, optimalisasi aset, dan peningkatan peran BUMD dalam mendukung pendapatan daerah secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya perlu fokus pada strategi peningkatan PAD yang berbasis pada potensi lokal, digitalisasi pelayanan pajak/retribusi, dan pengawasan pemungutan yang lebih efektif

**B. Pendapatan Transfer.**

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan merupakan sumber utama penerimaan Kabupaten Pidie Jaya selama tahun 2020–2024. Selama periode tersebut, rata-rata kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah berada di atas 85%, menandakan ketergantungan fiskal daerah yang masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat dan antar daerah. Meskipun demikian, terjadi penurunan nominal dari Rp866,07 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp846,88 miliar pada tahun 2024, yang berarti secara riil ada penurunan kapasitas fiskal dari transfer yang diterima.

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan merupakan komponen terbesar dalam struktur pendapatan transfer, dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp801,61 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) tetap menjadi penyumbang terbesar dari dana perimbangan, berkisar antara Rp403 miliar hingga Rp440 miliar per tahun. DAU bersifat block grant sehingga tidak spesifik penggunaannya, dan menjadi tulang punggung pembiayaan belanja daerah. Namun, fluktuasi pada Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non-fisik, menunjukkan adanya variasi alokasi berdasarkan prioritas nasional yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat selain dana perimbangan (seperti Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian) juga menunjukkan dinamika yang menarik. Dana Desa meningkat signifikan dari Rp151,74 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp169,16 miliar pada tahun 2024, menunjukkan konsistensi dukungan untuk pembangunan desa. Namun, Dana Penyesuaian yang sebelumnya cukup besar pada tahun 2020 dan 2021 (masing-masing Rp196 miliar dan Rp205 miliar) tidak lagi tercatat pada tahun-tahun

berikutnya, yang mengindikasikan berakhirnya program khusus seperti penanganan COVID-19 atau program stimulus jangka pendek lainnya.

Pendapatan transfer antar daerah justru menunjukkan penurunan paling tajam, dari Rp124,81 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp45,26 miliar pada tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh merosotnya nilai bantuan keuangan antar daerah yang turun drastis, dari Rp96,83 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp15,53 miliar pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya keterbatasan dukungan fiskal horizontal atau potensi menurunnya daya alokatif pemerintah provinsi terhadap kabupaten.

Secara umum, struktur pendapatan transfer Kabupaten Pidie Jaya masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, terutama pada dana yang sifatnya tidak bisa dimanfaatkan secara fleksibel. Penurunan nilai transfer, khususnya dari dana perimbangan dan antar daerah, menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, seperti memperkuat kapasitas PAD, memaksimalkan pemanfaatan dana transfer dengan output yang terukur, dan melakukan advokasi yang efektif agar daerah tetap menjadi prioritas dalam alokasi transfer pusat

**C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.**

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam struktur pendapatan Kabupaten Pidie Jaya memiliki nilai yang relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Namun, pos ini tetap penting karena mencerminkan fleksibilitas penerimaan daerah dari sumber-sumber lain yang sah secara regulasi, seperti hibah dan pendapatan lainnya yang tidak termasuk dalam PAD maupun transfer.

Selama periode 2020–2024, kontribusi dari pos ini sangat fluktuatif. Pada tahun 2020, tercatat sebesar Rp16,87 miliar yang seluruhnya berasal dari pendapatan hibah. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp15,93 miliar, yang berasal dari kategori “pendapatan lainnya,” menunjukkan adanya perubahan jenis penerimaan yang tidak lagi bersumber dari hibah. Tahun 2022 mencatat lonjakan cukup besar sebesar Rp28,43 miliar, yang kembali berasal dari hibah. Namun pada tahun 2023, tidak tercatat adanya realisasi penerimaan dari pos ini sama sekali, lalu pada tahun 2024 kembali muncul dengan nilai Rp11,16 miliar, seluruhnya sebagai “pendapatan lainnya.”

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan ini bersifat tidak tetap, sangat tergantung pada ketersediaan hibah, bantuan proyek tertentu, atau kerja sama kelembagaan. Tidak adanya realisasi pada tahun 2023 bisa disebabkan oleh tidak adanya program hibah dari donor atau mitra pembangunan yang masuk ke dalam sistem keuangan daerah pada tahun tersebut, atau belum optimalnya upaya daerah dalam mengakses pendanaan alternatif di luar transfer pusat dan PAD.

Dalam konteks perencanaan keuangan daerah, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah perlu dikelola secara aktif. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat mendorong peningkatan potensi pendapatan ini dengan memperkuat hubungan kelembagaan dengan donor, organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, atau pemerintah pusat melalui skema hibah bersyarat atau kerja sama pembangunan. Di samping itu, penting juga untuk menyusun sistem pelaporan dan pemantauan hibah yang lebih transparan dan akuntabel agar sumber ini tidak hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga mendukung efektivitas program pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, meskipun nilainya relatif kecil dan fluktuatif, pos ini berperan sebagai pendukung bagi pembiayaan kegiatan daerah yang sifatnya spesifik. Oleh karena itu, optimalisasi lain-lain pendapatan yang sah harus menjadi bagian dari strategi diversifikasi sumber pendapatan daerah dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Pidie Jaya

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Target yang ditetapkan belum mengacu pada potensi riil yang ada pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Banyak Wajib Pajak yang belum memiliki izin seperti Izin Pertambangan Galian C dan Pajak Sarang Burung Walet;
3. Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah;
5. Masih terbatasnya payung hukum yang merupakan dasar untuk menggali potensipotensi pendapatan baru secara optimal;
6. Terbatasnya jumlah SDM, dan fasilitas lapangan untuk menggali potensi PAD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi serta untuk menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi, maupun masyarakat;
2. Menjaga keakuratan data potensi pajak dan retribusi daerah dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat; dan
4. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas SDM.

#### 2.5.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data realisasi anggaran belanja Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa total belanja daerah menunjukkan tren yang relatif fluktuatif, dengan nilai tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp1,03 triliun, dan nilai terendah pada tahun 2021 sebesar Rp951,83 miliar. Penurunan belanja yang konsisten sejak tahun 2020 menunjukkan adanya penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika pendapatan, serta dampak pandemi COVID-19 yang signifikan terhadap ruang fiskal.

Belanja operasi mendominasi struktur belanja daerah dengan proporsi rata-rata di atas 60% dari total belanja. Komponen utamanya adalah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai terus meningkat dari Rp302,5 miliar pada 2020 menjadi Rp322 miliar pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan beban rutin APBD dalam membiayai gaji dan tunjangan ASN, termasuk kemungkinan penyesuaian gaji dan kebijakan rekrutmen ASN. Di sisi lain, belanja barang dan jasa sempat mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2023, mencapai Rp303,38 miliar, sebelum kembali menurun pada 2024 menjadi Rp284,7 miliar. Penurunan ini menunjukkan upaya efisiensi, namun tetap perlu dikaji agar tidak mengganggu kualitas pelayanan publik.

Belanja hibah dan bantuan sosial mengalami fluktuasi yang signifikan. Belanja hibah, misalnya, sempat turun tajam pada 2023 (Rp14,07 miliar) namun kembali naik pada 2024 (Rp38,33 miliar). Sementara belanja bantuan sosial terus mengalami penurunan sejak 2020 yang semula sebesar Rp69,71 miliar menjadi

hanya Rp6,81 miliar di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan pergeseran fokus belanja dari penanganan dampak sosial pandemi ke arah pemulihan ekonomi dan belanja produktif lainnya.

Belanja modal mencerminkan investasi jangka panjang pemerintah daerah untuk membangun aset fisik seperti infrastruktur, gedung, jalan, dan jaringan. Data menunjukkan bahwa belanja modal mengalami penurunan tajam dari Rp190,75 miliar di tahun 2020 menjadi hanya Rp112,7 miliar di tahun 2024. Penurunan ini dapat berdampak pada perlambatan pembangunan infrastruktur dasar jika tidak disertai strategi efisiensi atau skema pembiayaan alternatif.

Komponen belanja modal terbesar adalah untuk jalan, irigasi, dan jaringan. Pada tahun 2022, alokasi untuk sektor ini mencapai Rp105,46 miliar, tetapi turun menjadi Rp67,33 miliar pada 2024. Penurunan ini perlu menjadi perhatian karena infrastruktur jalan dan irigasi sangat strategis dalam mendukung konektivitas wilayah dan ketahanan pangan. Sebaliknya, belanja modal tanah dan aset tetap lainnya masih sangat kecil, menunjukkan minimnya ekspansi aset strategis baru oleh pemerintah daerah.

Jika dibandingkan dengan pendapatan daerah, maka belanja daerah Kabupaten Pidie Jaya cenderung lebih besar, terutama pada tahun 2020 dan 2023, sehingga terjadi defisit anggaran yang harus ditutupi melalui pembiayaan. Tahun 2024 mencatat belanja yang lebih kecil daripada pendapatan, yaitu surplus anggaran, yang menunjukkan pengendalian belanja dan efisiensi fiskal yang lebih baik. Namun, efisiensi ini perlu ditinjau lebih lanjut agar tidak mengorbankan kualitas pelayanan dan pembangunan strategis.

Secara umum, struktur belanja Kabupaten Pidie Jaya selama lima tahun terakhir menunjukkan arah yang cukup sehat dengan rasionalisasi belanja operasi dan pengendalian belanja modal, meskipun tren penurunan belanja pembangunan seperti infrastruktur perlu diantisipasi agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik jangka panjang. Diperlukan strategi belanja yang lebih inovatif, partisipatif, dan berbasis hasil (result-based budgeting) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan APBD demi kesejahteraan masyarakat.

**A. Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan salah satu komponen utama dalam struktur pengeluaran daerah yang mencerminkan kebutuhan rutin pemerintahan untuk menjalankan fungsinya secara berkelanjutan. Di Kabupaten Pidie Jaya, tren belanja

operasi selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari Rp608,47 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp651,99 miliar pada tahun 2024. Kecuali pada tahun 2021 yang mengalami penurunan akibat kemungkinan penyesuaian fiskal terkait pandemi COVID-19, komponen belanja operasi cenderung meningkat setiap tahunnya, mencerminkan dorongan kebutuhan rutin yang semakin besar, terutama untuk belanja pegawai dan barang/jasa.

Komponen terbesar dari belanja operasi adalah belanja pegawai, yang meningkat dari Rp302,5 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp322,1 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa beban gaji dan tunjangan ASN di Pidie Jaya terus meningkat. Hal ini bisa disebabkan oleh kenaikan pangkat, penambahan formasi ASN baru, atau penyesuaian kebijakan penggajian nasional. Meski penting untuk menjamin stabilitas layanan publik, tingginya porsi belanja pegawai perlu dikendalikan agar tidak terlalu menyita alokasi anggaran pembangunan lainnya.

Belanja barang dan jasa juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp201,5 miliar pada 2020 menjadi puncaknya sebesar Rp303,3 miliar pada 2023, sebelum menurun menjadi Rp284,7 miliar pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kebutuhan akan pengadaan barang operasional kantor, jasa pelayanan publik, serta kegiatan rutin dinas dan badan. Meskipun demikian, penurunan pada 2024 mungkin mencerminkan upaya efisiensi belanja atau penundaan kegiatan non-prioritas.

Sebaliknya, belanja hibah dan belanja bantuan sosial menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung menurun dalam jangka panjang. Belanja hibah meningkat dari Rp34,7 miliar pada 2020 menjadi Rp38,7 miliar pada 2024, sementara belanja bantuan sosial menurun drastis dari Rp69,7 miliar pada 2020 menjadi hanya Rp6,8 miliar pada 2024. Penurunan ini dapat diartikan sebagai pengurangan dukungan langsung kepada masyarakat, organisasi sosial, atau kelompok rentan, atau sebagai akibat dari pergeseran kebijakan pemerintah daerah untuk lebih menitikberatkan pada pembangunan fisik dan efisiensi belanja.

Secara keseluruhan, struktur belanja operasi Kabupaten Pidie Jaya masih didominasi oleh komponen rutin, terutama belanja pegawai dan barang/jasa. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa anggaran daerah masih sangat dipakai untuk membiayai kegiatan administratif dan rutin, sementara ruang fiskal untuk belanja pembangunan (seperti belanja modal) menjadi lebih sempit. Oleh karena itu, diperlukan reformasi belanja yang berfokus pada efisiensi belanja operasional, peningkatan kualitas belanja barang dan jasa, serta evaluasi belanja pegawai agar APBD lebih produktif dan berorientasi pada hasil pembangunan daerah.

**B. Belanja Modal**

Belanja Modal Kabupaten Pidie Jaya selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan kecenderungan penurunan pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, total belanja modal mencapai Rp190,75 miliar dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp179,79 miliar. Tahun 2022 mencatatkan peningkatan kembali menjadi Rp184,23 miliar, namun setelah itu terjadi penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp136,44 miliar dan terus menurun pada tahun 2024 menjadi Rp112,74 miliar. Penurunan ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal daerah, kemungkinan karena keterbatasan anggaran atau perubahan prioritas pembangunan.

Jika dilihat dari komponen penyusunnya, belanja modal untuk tanah sempat tinggi pada tahun 2022 sebesar Rp4,99 miliar namun kemudian menurun drastis hingga menjadi Rp154,49 juta pada tahun 2023. Belanja modal untuk peralatan dan mesin juga menurun tajam dari Rp30,5 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp16,78 miliar pada tahun 2024, yang menandakan pengadaan alat berat atau perlengkapan kantor bukan lagi prioritas utama. Belanja modal untuk gedung dan bangunan juga menunjukkan pola serupa, menurun dari puncaknya di tahun 2021 sebesar Rp68,2 miliar menjadi Rp25,64 miliar di tahun 2024.

Sementara itu, belanja modal untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan tetap menjadi prioritas utama setiap tahun. Komponen ini memiliki nilai terbesar di antara jenis belanja modal lainnya, mencapai Rp105,46 miliar pada tahun 2022 dan masih mendominasi pada tahun 2024 dengan Rp67,32 miliar, meskipun nilainya menurun. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar tetap menjadi fokus pembangunan daerah. Adapun belanja modal untuk aset tetap lainnya relatif kecil dan stabil, mencerminkan minimnya alokasi untuk belanja non-fisik atau aset tak berwujud.

Secara keseluruhan, belanja modal Kabupaten Pidie Jaya mengalami penurunan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama setelah tahun 2022. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh keterbatasan fiskal daerah serta pergeseran fokus anggaran ke belanja operasional dan sosial yang lebih mendesak. Meskipun demikian, investasi pada infrastruktur jalan dan jaringan tetap dijaga sebagai prioritas utama untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

**C. Belanja Tak Terduga**

Berdasarkan data realisasi anggaran Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020 hingga 2024, komponen Belanja Tak Terduga menunjukkan dinamika yang mencerminkan fungsi utamanya sebagai cadangan anggaran untuk mengantisipasi kejadian luar biasa atau tidak terduga seperti bencana alam, krisis kesehatan, dan kondisi darurat lainnya. Dalam struktur anggaran, belanja ini tidak dialokasikan secara besar seperti belanja operasional maupun belanja modal, namun tetap penting untuk memastikan kesiapan fiskal dalam menghadapi situasi darurat.

Pada tahun 2020, belanja tak terduga direalisasikan sebesar Rp8,83 miliar, jumlah yang sangat besar dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Besarnya realisasi ini sangat mungkin berkaitan dengan penanganan dampak pandemi COVID-19 yang memuncak pada tahun tersebut, di mana banyak pemerintah daerah mengalihkan anggaran untuk kebutuhan darurat kesehatan, bantuan sosial, dan kegiatan tanggap darurat lainnya. Namun, pada tahun 2021 realisasi menurun tajam menjadi Rp4,05 miliar, seiring dengan meredanya kondisi darurat pandemi dan mulai pulihnya aktivitas pemerintahan secara normal.

Pada tahun 2022, belanja tak terduga direalisasikan sebesar Rp706 juta, menunjukkan penurunan signifikan dibanding dua tahun sebelumnya. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 dan 2024 dengan masing-masing realisasi sebesar Rp2,27 miliar dan Rp400 juta. Fluktuasi ini mencerminkan bahwa pengeluaran tidak terduga semakin bisa dikendalikan dan kebutuhan penanganan darurat semakin berkurang. Namun, meskipun nilai belanja tak terduga di tahun 2024 relatif kecil, tetap menunjukkan adanya kesiapan minimum untuk mengantisipasi risiko atau keadaan mendesak.

Secara keseluruhan, belanja tak terduga Kabupaten Pidie Jaya selama lima tahun terakhir menunjukkan pola penyesuaian sesuai situasi dan kondisi eksternal yang mempengaruhi daerah. Puncaknya pada tahun 2020 dapat dikaitkan dengan krisis kesehatan akibat pandemi, sementara penurunan pada tahun-tahun berikutnya mencerminkan pergeseran kondisi menuju stabilitas dan perencanaan yang lebih terukur. Namun demikian, meskipun nilainya menurun, pos ini tetap menjadi bagian penting dalam menjaga fleksibilitas dan responsivitas anggaran daerah.

**D. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan salah satu komponen pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah desa atau daerah lain. Dalam konteks Kabupaten Pidie Jaya, Belanja Transfer sepenuhnya digunakan untuk Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Desa, tanpa adanya pengeluaran untuk "Belanja Bantuan Keuangan Lainnya". Hal ini mencerminkan fokus utama pemerintah daerah dalam mendukung pemerintahan gampong (desa) melalui transfer anggaran.

Selama lima tahun terakhir, jumlah belanja transfer menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, realisasi belanja transfer tercatat sebesar Rp222,18 miliar, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp214,87 miliar. Pada tahun 2022, anggaran kembali meningkat menjadi Rp211,27 miliar, dan mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp219,22 miliar. Namun pada tahun 2024, terdapat sedikit penurunan menjadi Rp206,88 miliar. Meskipun terjadi fluktuasi, anggaran belanja transfer tetap dipertahankan pada angka yang relatif tinggi dan konsisten dari tahun ke tahun, yang menunjukkan komitmen daerah terhadap penguatan kapasitas desa.

Secara eksklusif, seluruh alokasi belanja transfer diarahkan untuk desa, tanpa dialokasikan untuk daerah provinsi lain atau keperluan lintas kabupaten/kota. Fokus ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memprioritaskan pembangunan berbasis komunitas dan wilayah administratif terkecil, yaitu desa. Alokasi tersebut umumnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, operasional pemerintahan desa, dan pelaksanaan program-program strategis di tingkat gampong sesuai dengan regulasi Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong (ADG).

Dengan porsi belanja transfer yang cukup besar dan konsisten dari tahun ke tahun, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pidie Jaya menempatkan pembangunan desa sebagai elemen penting dalam strategi pembangunan daerah. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat otonomi desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat secara merata. Namun demikian, untuk memastikan efektivitas dari transfer anggaran ini, perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas tata kelola

pemerintahan desa dan pengawasan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan.

### 2.5.1.3. Pembiayaan

Komponen Pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pidie Jaya pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan digunakan secara signifikan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Secara umum, pembiayaan daerah terbagi dalam dua komponen utama, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Selama lima tahun berturut-turut, Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal sepenuhnya dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA merupakan sisa anggaran tahun sebelumnya yang belum terpakai dan kemudian digunakan kembali untuk membiayai kebutuhan anggaran tahun berjalan. Penerimaan pembiayaan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp104,64 miliar, kemudian menurun secara bertahap di tahun-tahun berikutnya menjadi Rp35,91 miliar (2021), Rp29,20 miliar (2022), Rp45,03 miliar (2023), dan Rp13,73 miliar (2024). Penurunan ini menunjukkan kecenderungan membaiknya perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga sisa dana dari tahun sebelumnya makin sedikit, atau bisa juga menunjukkan tekanan terhadap kas daerah akibat tantangan fiskal.

Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan Daerah relatif sangat kecil. Dalam lima tahun terakhir, hanya tahun 2020 yang mencatat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1 miliar, yang dikategorikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Pada tahun-tahun berikutnya (2021 hingga 2024), tidak ada realisasi pengeluaran pembiayaan. Ini mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu tersebut, pemerintah daerah tidak menambah penyertaan modal pada BUMD atau lembaga lainnya, atau tidak ada kebutuhan khusus dalam bentuk pengeluaran pembiayaan lainnya.

Dari perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, diperoleh pembiayaan netto (net financing), yang seluruhnya positif selama periode ini. Angka ini secara otomatis menjadi sumber penyeimbang defisit anggaran daerah yang tercatat hampir setiap tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2020 pembiayaan netto sebesar Rp103,64 miliar, yang digunakan untuk menutupi defisit sebesar Rp67,72 miliar, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang cukup besar yakni

Rp35,92 miliar. Begitu pula di tahun-tahun berikutnya, pembiayaan netto berhasil menutup defisit dan menghasilkan SiLPA di akhir tahun anggaran.

Secara umum, pembiayaan daerah Kabupaten Pidie Jaya dalam lima tahun terakhir berperan penting dalam menutup defisit anggaran dan menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Ketergantungan pada SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan juga menunjukkan belum optimalnya potensi pembiayaan lain seperti pinjaman daerah atau penerimaan dari investasi daerah. Untuk ke depan, perlu dilakukan diversifikasi sumber pembiayaan yang lebih produktif dan strategis, agar struktur pembiayaan daerah lebih kuat dan tidak terlalu bergantung pada sisa anggaran tahun sebelumnya.

**A. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan merupakan bagian penting dalam struktur keuangan daerah, karena berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau membiayai pengeluaran daerah yang tidak dapat ditutupi oleh pendapatan asli daerah maupun dana transfer. Dalam konteks Kabupaten Pidie Jaya selama periode 2020 hingga 2024, penerimaan pembiayaan seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, tanpa adanya kontribusi dari komponen pembiayaan lain seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan atau penerimaan pinjaman.

Pada tahun 2020, penerimaan pembiayaan melalui SiLPA tercatat sangat tinggi, yaitu sebesar Rp104,64 miliar, mencerminkan adanya sisa anggaran yang signifikan dari tahun 2019. Ini kemungkinan terjadi karena adanya efisiensi belanja atau kendala realisasi anggaran tahun sebelumnya. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, nilai SiLPA yang menjadi penerimaan pembiayaan cenderung menurun, yaitu menjadi Rp35,91 miliar (2021), Rp29,20 miliar (2022), dan kembali naik pada 2023 sebesar Rp45,03 miliar, lalu menurun kembali pada tahun 2024 menjadi Rp13,73 miliar. Pola ini menunjukkan kecenderungan pengelolaan anggaran yang semakin mendekati efisiensi optimal, dengan sisa anggaran yang lebih kecil di akhir tahun.

Penurunan nilai SiLPA dalam beberapa tahun terakhir dapat dibaca dari dua sisi. Positifnya, ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran semakin efektif, artinya alokasi belanja yang direncanakan lebih banyak terealisasi. Namun di sisi lain, semakin kecilnya SiLPA dapat menjadi tantangan fiskal jika daerah tetap mengalami defisit, karena ruang fiskal untuk pembiayaan defisit dari SiLPA menjadi

semakin sempit. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi penggunaan anggaran dan tersedianya cadangan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Selain itu, selama lima tahun tersebut tidak terlihat adanya pemanfaatan dari sumber pembiayaan lain seperti pinjaman daerah, penerimaan kembali investasi, maupun hasil penjualan aset daerah. Hal ini menunjukkan pendekatan fiskal yang konservatif dan hati-hati, dengan mengandalkan dana yang telah tersedia (SiLPA) daripada membuka sumber pembiayaan baru. Namun, ke depan, Kabupaten Pidie Jaya dapat mempertimbangkan diversifikasi sumber penerimaan pembiayaan untuk mendukung proyek-proyek strategis dan memperkuat kapasitas fiskal daerah, tentunya dengan perencanaan dan analisis risiko yang matang.

Dengan demikian, penerimaan pembiayaan Kabupaten Pidie Jaya selama 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup stabil dan hati-hati, berfokus pada SiLPA sebagai satu-satunya sumber pembiayaan, yang berperan penting dalam menutup defisit anggaran dan menjaga kesinambungan fiskal daerah

**B. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan merupakan bagian dari struktur pembiayaan daerah yang mencerminkan penggunaan dana untuk keperluan non-belanja langsung, seperti penyertaan modal pemerintah daerah ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pengeluaran lain yang sifatnya investasi jangka panjang. Dalam konteks Kabupaten Pidie Jaya selama periode 2020 hingga 2024, pengeluaran pembiayaan tercatat sangat minim, bahkan hampir tidak ada, kecuali pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mencatatkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1 miliar, yang diklasifikasikan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah. Ini menunjukkan adanya investasi pemerintah daerah ke suatu entitas usaha, kemungkinan besar dalam rangka memperkuat permodalan BUMD atau mendukung kinerja lembaga ekonomi daerah. Namun, setelah tahun tersebut, dari 2021 hingga 2024, tidak ada lagi realisasi pengeluaran pembiayaan, artinya pemerintah daerah tidak melakukan penambahan modal atau pengeluaran lain di luar belanja operasional dan modal reguler.

Minimnya pengeluaran pembiayaan dalam empat tahun terakhir menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menerapkan kebijakan fiskal yang konservatif, dengan fokus utama pada pembiayaan kegiatan rutin dan pembangunan melalui APBD murni. Di satu sisi, hal ini mencerminkan kehati-

hatian dalam pengelolaan fiskal, terutama dalam menghindari risiko kerugian investasi atau pembebanan keuangan jangka panjang. Namun di sisi lain, absennya pengeluaran pembiayaan juga dapat menandakan bahwa daerah belum optimal dalam memanfaatkan instrumen pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, misalnya melalui peningkatan penyertaan modal pada BUMD atau pembangunan infrastruktur strategis yang berorientasi pada pendapatan.

Idealnya, pengeluaran pembiayaan, terutama dalam bentuk penyertaan modal, dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, ke depan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat mempertimbangkan kembali pemanfaatan pengeluaran pembiayaan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang lebih dinamis dan produktif, tentu dengan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan terukur. Misalnya, penyertaan modal pada sektor-sektor potensial seperti air bersih, pasar daerah, atau energi terbarukan dapat memberikan manfaat ganda: mendorong pelayanan publik sekaligus menghasilkan pendapatan daerah.

Dengan demikian, pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pidie Jaya selama lima tahun terakhir relatif tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kecuali tahun 2020, pos ini tidak digunakan, sehingga menunjukkan adanya ruang fiskal yang belum dioptimalkan untuk mendukung penguatan ekonomi dan pelayanan publik melalui skema investasi jangka panjang.

#### 2.5.1.4. Neraca Keuangan Daerah

Laporan neraca daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah. Berdasarkan penyajian data neraca, dapat diketahui tentang jumlah aset, baik Aset lancar maupun aset tidak lancar serta kewajiban dan ekuitas dana dalam periode tertentu. Aset daerah dapat memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Sementara kewajiban menggambarkan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah.

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Pidie Jaya serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah

bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca kabupaten merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Kabupaten. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Secara umum, pada periode 2020-2024 aset Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan pertumbuhan yang positif yakni sebesar 18,81 persen. Rata-rata pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dari komponen aset lancar tumbuh sebesar 23,55 persen. Rata-rata pertumbuhan investasi jangka Panjang mengalami pertumbuhan aset lancar sebesar -5,33 persen. Sementara untuk Aset tetap rata-rata pertumbuhan sebesar 49,96 persen. Untuk rata-rata pertumbuhan jumlah aset lainnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tumbuh sebesar 25,56 persen. Kewajiban pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk jangka pendek rata-rata sebesar 88,54 persen. Sementara untuk kewajiban Pemerintah Pidie Jaya untuk jangka panjang rata-rata tidak mengalami perubahan. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana rata-rata pertumbuhannya sebesar 20,41 persen.

Aset daerah Kabupaten Pidie Jaya dalam periode 2020–2024 memperlihatkan struktur keuangan yang cukup stabil dengan dominasi aset tetap sebagai komponen utama. Total aset daerah pada tahun 2024 mencapai Rp1,76 triliun, sedikit menurun dari Rp1,82 triliun pada tahun 2023. Aset lancar tercatat sebesar Rp55,57 miliar dengan komposisi terbesar berasal dari kas di kas daerah sebesar Rp16,13 miliar, piutang pajak daerah sebesar Rp9,40 miliar, dan piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah mencapai Rp21,05 miliar. Tren ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mempertahankan likuiditas jangka pendek, meskipun terjadi fluktuasi kas dan piutang antar tahun.

Investasi jangka panjang menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, dari Rp43,16 miliar pada 2020 menjadi Rp34,84 miliar pada 2024. Penurunan ini utamanya terjadi pada penyertaan modal pemerintah daerah yang menjadi bagian dari strategi pengelolaan kekayaan daerah. Meski demikian, peningkatan nilai aset lain-lain, seperti Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF), yang pada 2024 tercatat sebesar Rp107,55 juta, menunjukkan adanya diversifikasi dalam komposisi aset non-tetap. Perubahan-perubahan ini memerlukan evaluasi berkala untuk memastikan

bahwa investasi daerah memberikan manfaat optimal bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Aset tetap menjadi kontributor terbesar terhadap total kekayaan daerah dengan nilai mencapai Rp1,59 triliun pada 2024. Komponen terbesar berasal dari infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp1,64 triliun, diikuti gedung dan bangunan senilai Rp842,11 miliar, serta peralatan dan mesin sebesar Rp446,65 miliar. Namun, aset tetap ini mengalami akumulasi penyusutan yang besar, mencapai Rp1,53 triliun, yang menandakan perlunya pemeliharaan dan revitalisasi aset untuk menjaga nilai serta fungsinya. Ke depan, pengelolaan aset daerah perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi, perawatan infrastruktur, serta optimalisasi aset produktif guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pidie Jaya.

Untuk mendapat gambaran lebih lengkap mengenai perkembangan Aset Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada periode 2020-2024, dapat dilihat Tabel 2.129.

**Tabel 2.129.**
**Neraca Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| NO. | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ASET** | | | | | | |
| **2** | **ASET LANCAR** | | | | | | |
| 3 | Kas di Kas Daerah | 35.801.994.848,69 | 28.028.583.941,78 | 42.225.678.621,30 | 11.022.056.374,50 | 16.138.716.895,09 | -27,69% |
| 4 | Kas di Bendahara Penerimaan | 104.898.231,73 | 822.112.444,35 | 171.488,34 | 12.186.652,89 | 20.924.479,32 | 19,02% |
| 5 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | -25,00% |
| 6 | Kas di BLUD | 0,00 | 0,00 | 2.800.629.527,89 | 1.524.944.453,60 | 17.030.584,09 | 78,34% |
| 7 | Kas Dana BOS | 0,00 | 340.147.033,00 | 0,00 | 0,00 | 179.200,00 | -9,14% |
| 8 | Kas Dana Kapitasi pada FKTP | 0,00 | 6.262.827,00 | 34.789,00 | 1.174.281.078,00 | 908.057.486,00 | 25,84% |
| 9 | Kas Lainnya | 0,00 | 64.707.342,00 | 0,00 | 237.482.416,00 | 0 | -11,79% |
| 10 | Investasi Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| 11 | Piutang Pajak Daerah | 7.152.350.025,00 | 7.580.073.732,00 | 8.113.793.785,00 | 8.714.841.156,00 | 9.403.946.472,00 | 5,83% |
| 12 | Piutang Retribusi Daerah | 15.022.400,00 | 21.033.600,00 | 0,00 | 244.344.600,00 | 0 | -29,49% |
| 13 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | -25,00% |
| 14 | Piutang Transfer Antar Daerah | 0,00 | 4.423.322.609,00 | 1.965.482.058,00 | 7.002.153.987,00 | 6.146.317.520,00 | 231,45% |
| 15 | Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | 2.958.225.086,86 | 3.189.293.012,78 | 17.484.869.091,42 | 22.186.949.594,59 | 21.056.136.426,98 | 122,49% |
| 16 | Penyisihan Piutang | (7.697.377.030,53) | (8.334.319.558,22) | (9.071.968.295,61) | (9.890.546.332,95) | (10.591.261.864,91) | 8,26% |
| 17 | Beban Dibayar Dimuka | 0,00 | 80.583.902,17 | 68.439.670,68 | 88.063.749,43 | 66.505.479,69 | 7,16% |
| 18 | Persediaan | 17.704.655.029,45 | 17.387.123.423,16 | 14.447.036.528,46 | 15.924.068.617,86 | 12.410.086.263,71 | 6,55% |
| **19** | **JUMLAH ASET LANCAR (3 s/d 18)** | **56.039.768.591,20** | **53.608.924.309,02** | **78.034.167.264,48** | **58.240.826.347,28** | **55.576.638.941,97** | **23,55%** |
| **20** | **INVESTASI JANGKA PANJANG** | | | | | | |
| **21** | **Investasi Non Permanen** | | | | | | |
| 22 | Investasi Non permanen Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| **23** | **Jumlah Investasi Non Permanen (22)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| **24** | **Investasi Permanen** | | | | | | |
| 25 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 43.168.552.094,40 | 42.580.557.642,00 | 40.087.946.086,00 | 37.665.490.829,00 | 34.542.700.144,89 | -5,33% |

| NO. | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **26** | **Jumlah Investasi Permanen (25)** | **43.168.552.094,40** | **42.580.557.642,00** | **40.087.946.086,00** | **37.665.490.829,00** | **34.542.700.144,89** | **-5,33%** |
| **27** | **JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (23+26)** | **43.168.552.094,40** | **42.580.557.642,00** | **40.087.946.086,00** | **37.665.490.829,00** | **34.542.700.144,89** | **-5,33%** |
| **28** | **ASET TETAP** | | | | | | |
| 29 | Tanah | 128.231.784.643,71 | 145.102.281.035,71 | 145.956.887.718,21 | 146.111.379.965,21 | 146.766.102.466,21 | 3,46% |
| 30 | Peralatan dan Mesin | 299.133.674.630,12 | 335.244.326.373,12 | 380.672.491.035,96 | 409.491.651.227,96 | 446.652.575.986,96 | 11,22% |
| 31 | Gedung dan Bangunan | 690.758.617.316,63 | 737.188.239.536,57 | 808.417.395.762,77 | 821.061.637.391,42 | 842.113.704.900,79 | 6,67% |
| 32 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.373.365.304.441,25 | 1.448.307.770.451,36 | 1.504.520.242.285,20 | 1.598.814.727.830,58 | 1.649.157.026.402,58 | 5,89% |
| 33 | Aset Tetap Lainnya | 36.925.359.699,85 | 38.512.377.414,85 | 40.484.829.803,85 | 42.446.459.643,85 | 45.433.023.755,85 | 5,90% |
| 34 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 356.580.000,00 | 4.985.301.973,00 | 2.419.102.600,00 | 3.654.371.782,00 | 646.410.100,00 | 5,89% |
| 35 | Akumulasi Penyusutan | (875.403.660.278,64) | (1.015.806.202.921,04) | (1.183.890.802.579,23) | (1.356.974.136.671,23) | (1.533.524.553.235,92) | 16,66% |
| **36** | **JUMLAH ASET TETAP (29 S/D 35)** | **1.653.367.660.452,92** | **1.693.534.093.863,57** | **1.698.580.146.626,76** | **1.664.606.091.169,42** | **1.597.244.290.376,47** | **7,96%** |
| **37** | **DANA CADANGAN** | | | | | | |
| 38 | Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **39** | **JUMLAH DANA CADANGAN (38)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **40** | **ASET LAINNYA** | | | | | | |
| 41 | Tagihan Penjualan Angsuran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 43 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 44 | Aset Tak Berwujud | 3.922.184.000,00 | 3.974.184.000,00 | 4.091.561.200,00 | 4.226.261.200,00 | 4.273.931.200,00 | 2,57% |
| 45 | Amortisasi Aset Tak Berwujud | (3.495.421.500,00) | (3.676.784.750,00) | (3.825.913.000,00) | (3.901.549.000,00) | (3.987.226.500,00) | 6,05% |
| 46 | Aset Lain-lain | 33.032.992.086,00 | 33.871.064.192,00 | 37.848.563.141,06 | 53.470.807.359,00 | 75.916.674.661,50 | 30,77% |
| 47 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (7.549.813.720,00) | (7.549.813.720,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 48 | Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) | 0,00 | 0,00 | 1.424.912.508,00 | 5.836.395.000,00 | 107.546.000,00 | 3,35% |
| **49** | **JUMLAH ASET LAINNYA (41 S/D 48)** | **25.909.940.866,00** | **26.618.649.722,00** | **39.539.123.849,06** | **59.632.454.559,86** | **76.310.925.361,50** | **5,34%** |
| **50** | **JUMLAH ASET (19+27+36+39+49)** | **1.778.485.922.004,52** | **1.816.342.225.536,59** | **1.856.241.383.826,30** | **1.820.144.862.905,56** | **1.763.674.554.824,83** | **6,30%** |

| NO. | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **51** | **KEWAJIBAN** | | | | | | |
| **52** | **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | | | | | |
| 53 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 838.072.106,00 | 8.431.208.490,00 | 0,00 | 237.482.416,00 | 0,00 | 208,96% |
| 54 | Pendapatan Diterima Dimuka | 11.944.666,67 | 13.708.600,00 | 80.753.678,00 | 60.014.778,00 | 272.566.454,25 | 120,25% |
| 55 | Utang Pajak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 55 | Utang Belanja | 0,00 | 0,00 | 51.005.490.124,69 | 77.089.696.907,00 | 66.578.839.838,00 | 24,96% |
| **56** | **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (53 S/D 55)** | **850.016.772,67** | **8.444.917.090,00** | **51.086.243.802,69** | **77.387.194.101,00** | **66.851.406.292,25** | **88,54%** |
| **57** | **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | | | | | | |
| 58 | Utang Kepada Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **59** | **Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (58)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **60** | **JUMLAH KEWAJIBAN (56+59)** | **850.016.772,67** | **8.444.917.090,00** | **51.086.243.802,69** | **77.387.194.101,00** | **66.851.406.292,25** | **44,27%** |
| **61** | **EKUITAS** | | | | | | |
| 62 | Ekuitas | 1.777.635.905.231,85 | 1.807.897.308.446,59 | 1.805.155.140.023,61 | 1.742.757.668.804,56 | 1.696.823.148.532,58 | 2,56% |
| **63** | **Jumlah Ekuitas (62)** | **1.777.635.905.231,85** | **1.807.897.308.446,59** | **1.805.155.140.023,61** | **1.742.757.668.804,56** | 1.696.823.148.532,58 | **2,56%** |
| **64** | **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (60+63)** | **1.778.485.922.004,52** | **1.816.342.225.536,59** | **1.856.241.383.826,30** | **1.820.144.862.905,56** | **1.763.674.554.824,83** | **20,41%** |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024, (dioalah)*

Dari tabel di atas, selama tahun 2020-2024 jumlah aset kabupaten Pidie Jaya mengalami perkembangan dengan pertumbuhan sebesar 6,30 persen. Pembentukan aset tersebut sangat didominasi oleh aset yang berupa Aset Tetap dan dibandingkan Aset Lancar dan aset lainnya. Ditinjau lebih lanjut, ternyata nilai Aset Tetap tersebut sangat dipengaruhi oleh tingginya nilai dari jenis Aset Tetap yang berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Lainnya, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta Tanah. Adapun pembentukan nilai Aset Lancar didominasi oleh Aset Lancar yang berupa Kas di Daerah, Piutang Pajak, dan Persediaan. Sedangkan pembentukan aset lainnya sangat dipengaruhi oleh nilai dari Aset tak Berwujud.

Ekuitas dana investasi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, dan Ekuitas Dana Investasi. Equitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dengan jumlah nilai Utang Lancar yang terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan ditambah dengan Cadangan untuk Piutang, Candangan untuk Belanja dibayar dimuka dan Cadangan untuk Persediaan dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk Utang Jangka Pendek (Utang Lancar). Sedangkan Equitas Dana Investasi, merupakan jumlah nilai Investasi Jangka Panjang, Investasi Aset Tetap dan Aset Lainnya (tidak termasuk dana cadanagan) yang dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang.

Jumlah ekuitas dana hampir secara keseluruhan dibentuk oleh jenis Ekuitas dana Investasi dibandingkan Ekuitas Dana Lancar, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang memberikan informasi tentang hutang pemerintah kabupaten kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban Kabupaten Pidie Jaya dalam kurun waktu 2020-2024 berfluktuasi, ekuitas Dana mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumuhan sebesar 2,56 persen setiap tahunnya.

Informasi aset dalam neraca juga sangat penting untuk menghitung rasio keuangan tertentu. Karena tujuan menggunakan rasio tersebut dalam rangka menilai kinerja keuangan yang berhubungan dengan laba. Sementara itu, di sektor publik tidak tersedianya informasi laba menyebabkan analisis rasio keuangan yang biasa digunakan sektor bisnis tidak dapat diaplikasikan di sektor publik. Perhitungan rasio liquiditas dan rasio solvabilitas Kabupaten Pidie Jaya disajikan sebagai berikut.

Perhitungan rasio likuiditas pada umumnya yang dipakai yaitu Rasio Lancar (Current Ratio) dan Rasio Cepat (Quick Ratio). Rasio Lancar (Current Ratio) Adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu daerah untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio ini diperoleh dengan membagi total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 rasio lancar Kabupaten Pidie Jaya yang paling tinggi terjadi pada

Tahun 2020, yaitu mencapai nilai 65,93 yang diakibatkan terlalu tingginya Jumlah Aset Lancar dibandingkan dengan jumlah kewajiban lancar (hutang) jangka pendek. Sedangkan Rasio lancar pada Tahun 2023 adalah merupakan yang terkecil yaitu sebesar 0,75 yang berarti nilai kewajiban lancar (hutang) jangka pendek mencapai duapertiga dari jumlah Aset Lancar

Rasio Cepat (Quick Ratio) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Sebagaimana halnya dengan *current ratio, maka* q*uick rasio* yang paling tinggi juga terjadi pada Tahun 2020 yang bernilai 45,10 sedangkan q*uick rasio* terendah dialami pada Tahun 2023 dengan nilai sebesar 0,55 yang berarti kemampuan keuangan menjadi menurun.

Solvabilitas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan daerah untuk memenuhi semua kewajiban baik utang jangka pendek ataupun utang jangka panjangnya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Perhitungan rasio solvabiltas yang umumnya dipakai yaitu Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset (*Total debt to equity ratio*) dan Rasio Hutang Terhadap Modal.

Rasio Total Utang terhadap Total Asset (Debt Ratio) menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2023 sebesar 4,25 sedangkan pada tahun 2020 merupakan yang terkecil yaitu sebesar 0,05.

Sedangkan Rasio Total Hutang terhadap modal pada tahun 2023 sebesar 4,44, sama seperti hal nya dengan *total debt to equity ratio* pada tahun 2020 menunjukkan angka yang kecil yaitu sebesar 0,05. Hal ini juga menandakan bahwa jumlah seluruh Ekuitas (Modal) yang dimiliki jauh melebihi dari Total Kewajiban yang ada, baik berupa Kewajiban Jangka Panjang maupun Kewajiban Jangka Pendek. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan dari Rasio Likuiditas maupun Rasio Solvabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tersebut, dapat dilihat Tabel 2.130 berikut.

**Tabel 2.130.**
**Perkembangan Rasio Likuiditas dan Solvabiltas**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **Rasio Likuiditas** | | | | | |
| 1.1 | Rasio lancar (*Current Ratio*) | 65,93 | 6,35 | 1,53 | 0,75 | 0,82 |
| 1.2 | Rasio Cepat (*Quick Ratio*) | 45,10 | 4,29 | 1,24 | 0,55 | 0,64 |
| | | | | | | |
| **2** | **Rasio Solvabilitas** | | | | | |
| 2.1 | Rasio Total Utang terhadap Total Asset (*Debt Ratio*) | 0,05 | 0,46 | 2,75 | 4,25 | 3,76 |
| 2.2 | Rasio total hutang terhadap Modal (*Total debt to equity ratio*) | 0,05 | 0,47 | 2,83 | 4,44 | 3,91 |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya, 2025 (diolah)*

### 2.5.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Pidie Jaya dimasa lalu dapat dijelaskan berdasarkan 3 (tiga) komponen utama pembentuk struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), yaitu (1) Pendapatan Daerah, (2) Belanja Daerah, dan (3) Pembiayaan Daerah.

#### 2.5.2.1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pidie Jaya merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dari trasnfer baik pusat maupun provinsi. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan arah dan strategi terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Pidie Jaya selama 8 (delapan) tahun terakhir didasarkan pada beberapa faktor yaitu:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.

3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
4. Penyusunan qanun-qanun tentang sumber-sumber pemanfaatan PAD dan menetapkan Peraturan Bupati tentang tarif dan teknis pemungutan PAD yang mudah dilaksanakan.
5. Melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pemungutan PAD agar penerimaannya maksimal dan terhindar dari penyelewengan.
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.

Melakukan hubungan koordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor yang terkait dengan PAD dan memperbaiki database.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPK untuk memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan sumber dana perimbangan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; dan
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah provinsi untuk dana perimbangan dan kecamatan untuk obyek pendapatan sesuai wewenang kabupaten.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), sesuai dengan RPJM Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029 diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah dan aset daerah
   a. Pemutakhiran data dan objek pajak daerah dan retribusi daerah: pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak/retribusi: memastikan semua potensi pajak dan retribusi terdata dengan akurat dan mutakhir serta meningkatkan pengawasan agar tidak ada kebocoran atau tunggakan.
   b. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah: inventarisasi dan penilaian asset : mendata seluruh aset daerah yang belum optimal pemanfaatannya, kerja sama dengan pihak swasta/BUMN: Melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan aset daerah yang memiliki potensi komersial (misalnya, pasar, terminal, gedung, lahan strategis) dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): BLUD dapat memberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangan dan aset daerah untuk meningkatkan efisiensi dan diversifikasi pendapatan dari layanan berbayar.

c. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: Memaksimalkan keuntungan dari investasi atau penyertaan modal daerah pada BUMD.

2. Penggalian Sumber PAD Baru:
   a. Pengembangan sektor potensial daerah sektor pariwisata dengan mengembangkan destinasi wisata, event pariwisata, dan fasilitas pendukungnya untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan sektor pertanian dan kelautan/perikanan dengan mengembangkan produk unggulan daerah, hilirisasi produk pertanian/kelautan, serta menarik investasi dan sektor industri pengolahan dengan mendorong tumbuhnya industri pengolahan yang berbasis pada potensi sumber daya alam lokal untuk menciptakan nilai tambah.
   b. Pengembangan wakaf produktif, mengingat keistimewaan Aceh, pengelolaan wakaf produktif dapat menjadi alternatif sumber pendanaan jangka panjang untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
   c. Inovasi sumber pendapatan lainnya dengan mencari celah regulasi untuk menciptakan jenis retribusi atau pajak baru yang belum ada, namun sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha melalui kemitraan publik-swasta dalam proyek-proyek pembangunan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah.
3. Peningkatan tata kelola dan kapasitas SDM:
   a. Perbaikan manajemen dan SDM pengelola PAD dengan meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pengelola PAD melalui pelatihan dan pendidikan, menerapkan sistem manajemen kinerja yang terukur untuk setiap unit kerja pengelola PAD dan membenahi struktur organisasi yang mendukung optimalisasi penerimaan PAD.
   b. Pemanfaatan teknologi informasi dengan mengembangkan sistem pajak dan retribusi online untuk kemudahan pembayaran dan pelaporan, Memanfaatkan analisis data (big data) untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali dan merumuskan strategi yang lebih efektif.
   c. Meningkatkan komitmen stakeholder dengan cara membangun sinergi dan komitmen yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya peningkatan PAD.
4. Kebijakan pendukung:
   a. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mempermudah perizinan, memberikan insentif bagi investor, serta menjaga stabilitas keamanan dan

hukum. Investasi akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya akan memperluas basis pajak daerah.

b. Efisiensi belanja daerah dengan cara melakukan efisiensi dalam belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar alokasi PAD dapat lebih fokus pada program-program produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

c. Pengembangan ekonomi lokal: Mendorong tumbuh kembangnya UMKM di daerah melalui program pemberdayaan, penyediaan skema pembiayaan dan pendampingan.

### 2.5.2.2. Kebijakan Belanja

Dengan diterbitkannya PP 12 Tahun 2019 yang merupakan pengganti PP Nomor 58 Tahun 2005, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, serta belanja transfer yang mana pada dasarnya sama hanya berbeda pada klasifikasinya saja. Kebijakan belanja daerah, sebagai berikut:

1. Memprioritaskan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan;
2. Memprioritaskan pemenuhan rencana pembangunan RPJM Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024.
3. Sinkronisasi prioritas pembangunan nasional;
4. Pendukungan terhadap pencapian Millenium Development Goals (MDG`s) dan Sustainable Development Goals (SDG's);
5. Pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah;
6. Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji;
7. Pemenuhan anggaran penangan Covid-19;
8. Pengalokasian anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Operasional Sekolah (BOS) Pusat, pajak rokok sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
9. Mengalokasikan anggaran untuk kepentingan nasional serta kebutuhan penting dan mendesak lainnya. Proporsi penggunaan belanja disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah/pendapatan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya penggunaan belanja diprioritaskan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah provinsi maupun pusat, sehingga jika terjadi penurunan pendapatan, maka belanja yang harus disesuaikan adalah belanja untuk pembangunan.

### 2.5.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah direncanakan penyertaaan modal (investasi)

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, dan Pembayaran Pokok Hutang. Penyertaan Modal yang disalurkan kepada pada Bank Aceh dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Krueng Meureudu masing-masing dengan jumlah yang konstan, yaitu Rp 1 Milyar dan 100 Juta per tahunnya. Dana tersebut ditujukan sebagai investasi guna mendapatkan keuntungan berupa bunga dalam rangka meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Pembiayaan yang termuat dalam APBK Pidie Jaya terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah Kabupaten. Pada sisi penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan dengan belanja merupakan surplus/defisit belanja. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya antara jumlah belanja kabupaten dengan jumlah pendapatan kabupaten.

#### 2.5.2.4. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran Kabupaten Pidie Jaya pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan anggaran di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Proporsi realisasi belanja menggambarkan komposisi besaran masing-masing komponen belanja terhadap total anggaran belanja daerah. Secara umum, proporsi belanja dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu belanja aparatur dan belanja non aparatur (belanja publik). Belanja aparatur merupakan belanja yang digunakan untuk membayar kebutuhan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan resmi lainnya seluruh ASN. Adapun sisanya, yaitu belanja non aparatur (belanja publik) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah.

Untuk mengetahui secara lebih lengkap tentang kondisi perkembangan penggunaan Belanja Aparatur Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel 2.131

**Tabel 2.131.**
**Total Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| Tahun | Belanja Pegawai | Total Belanja Daerah | Persentase Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur |
|---|---|---|---|
| 2020 | 302.509.077.277 | 1.030.249.672.902 | 29,36% |
| 2021 | 276.602.633.548 | 951.836.824.378 | 29,06% |
| 2022 | 282.596.101.590 | 976.525.559.616 | 28,94% |
| 2023 | 289.868.652.030 | 974.737.086.905 | 31,50% |
| 2024 | 322.137.473.566 | 972.020.657.563 | 33,07% |
| **RATA-RATA** | | | **30,29%** |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya, 2025 (diolah)*

### 2.5.2.5. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBK diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan salah satu pos yang diharapkan dapat menutupi defisit belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan untuk penyertaan modal, pembentukan dana cadangan dan pembentukan investasi, karena defisit riil APBD berasal dari akumulasi defisit belanja dan pengeluaran pembiayaan. Untuk mengetahui secara lebih lengkap mengenai kondisi perkembangan defisit riil serta penutup defisit riil dan realisasi SiLPA Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya 2020-2024, dapat dilihat Tabel 2.132 berikut.

**Tabel 2.132.**
**Defisit Riil Dan Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024**

| NO | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1** | **PENDAPATAN DAERAH** | **962.513.543.412,80** | **946.127.037.543,45** | **993.454.968.096,02** | **944.544.041.037,00** | **975.472.097.648,89** |
| **2** | **BELANJA** | **1.030.249.672.902,18** | **951.836.824.377,74** | **976.525.559.615,62** | **974.737.086.904,80** | **972.020.657.563,74** |
| **3** | **SURPLUS/(DEFISIT) (1-2)** | **-67.736.129.489,38** | **-5.709.786.834,29** | **16.929.408.480,40** | **-30.193.045.867,80** | **3.451.440.085,15** |
| **4** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **1.100.000.000,00** | **1.100.000.000,00** | **1.100.000.000,00** |
| | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 |
| **A** | **SURPLUS/(DEFISIT) (3-4)** | **-68.736.129.489,38** | **-6.709.786.834,29** | **15.829.408.480,40** | **-31.293.045.867,80** | **3.351.440.085,15** |
| | **Defisit Riil ditutup oleh Realisasi Penerimaan pembiayaan daerah:** | | | | | |
| | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 104.643.022.569,80 | 35.906.893.080,42 | 29.197.106.246,13 | 45.026.514.426,53 | 13.733.468.559,35 |
| **B** | **Jumlah Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah** | **104.643.022.569,80** | **35.906.893.080,42** | **29.197.106.246,13** | **45.026.514.726,53** | **13.733.468.559,35** |
| **C** | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)** | **35.906.893.080,42** | **29.197.106.246,13** | **45.026.514.726,53** | **13.733.468.859,35** | **17.084.908.644,00** |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya, 2024 (diolah)*

### 2.5.3. Proyeksi Keuangan Daerah

Proyeksi Keuangan Daerah adalah suatu proses perencanaan keuangan yang menggambarkan estimasi atau perkiraan atas penerimaan dan pengeluaran daerah untuk periode tertentu di masa depan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, proyeksi ini berfungsi sebagai dasar bagi penentuan arah kebijakan fiskal dan penyusunan strategi pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Proyeksi keuangan memberikan gambaran tentang kapasitas fiskal daerah dalam mendanai berbagai prioritas pembangunan serta menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif.

Penyusunan proyeksi keuangan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tren historis pendapatan dan belanja daerah, kebijakan nasional terkait transfer ke daerah, potensi pertumbuhan ekonomi daerah, serta asumsi-asumsi makroekonomi yang relevan. Proyeksi ini juga memperhatikan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemampuan mengelola belanja daerah secara efisien, serta peran pembiayaan dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan ketersediaan dana.

Dalam dokumen RPJMK, proyeksi keuangan daerah menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan disusun secara realistis dan berkelanjutan. Dengan proyeksi ini, Pemerintah Daerah dapat mengantisipasi tantangan fiskal yang mungkin timbul, menetapkan prioritas belanja yang tepat, serta mengoptimalkan potensi pendapatan guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

#### 2.5.3.1. Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029

Proyeksi kerangka Pendanaan daerah Kabupaten Pidie Jaya periode 2026–2030 menunjukkan arah pertumbuhan fiskal yang positif, selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMK. Proyeksi ini disusun berdasarkan asumsi makroekonomi, proyeksi penerimaan dana transfer, serta kapasitas fiskal daerah, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan daerah diproyeksikan mengalami tren peningkatan yang berkesinambungan, dari sebesar Rp 947,47 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp 990,36 miliar pada tahun 2030. Struktur pendapatan daerah tetap didominasi oleh pendapatan transfer, yang dalam kurun waktu tersebut diperkirakan naik dari Rp

827,46 miliar menjadi Rp 863,77 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan turut meningkat secara bertahap, dari Rp 120,45 miliar pada 2026 menjadi Rp 133,63 miliar pada akhir periode proyeksi. Peningkatan PAD ini merupakan hasil dari optimalisasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta penguatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Di sisi belanja, alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan infrastruktur dasar. Belanja daerah diproyeksikan tumbuh sejalan dengan peningkatan pendapatan, dengan belanja operasi sebagai komponen terbesar, meningkat dari Rp 663,47 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp 715,26 miliar pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam memastikan keberlangsungan pelayanan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal diproyeksikan stabil, berkisar antara Rp 111,44 miliar hingga Rp 141,49 miliar, sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah.

Sementara itu, belanja transfer dan belanja tidak terduga turut disesuaikan secara proporsional guna menjamin fleksibilitas fiskal daerah dalam merespons dinamika kebutuhan pembangunan dan pengelolaan risiko keuangan. Pembiayaan netto diproyeksikan berfluktuasi antara Rp 18,70 miliar hingga Rp 34,03 miliar sepanjang periode, dengan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai sumber utama pembiayaan untuk mendukung prioritas pembangunan strategis daerah.

Dengan demikian, proyeksi keuangan daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2026–2030 dirancang untuk menciptakan keseimbangan fiskal yang sehat, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, serta memastikan kesinambungan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

. Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel 2.133 berikut.

**Tabel 2.133.**
**Proyeksi Kerangka Pendapatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026-2030**

| URAIAN | Baseline Tahun 2024 | PROYEKSI (TAHUN) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **PENDAPATAN** | **993.823.299.309** | **951.467.081.420** | **964.395.709.006** | **977.781.060.939** | **991.645.984.745** | **1.006.014.547.578** | **0,014** |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **135.368.353.000** | **155.066.452.566** | **163.156.573.598** | **171.672.467.991** | **180.636.774.613** | **190.073.350.474** | **0,052** |
| Pendapatan Pajak Daerah | 7.865.000.000 | 23.085.770.260 | 24.470.916.477 | 25.939.171.466 | 27.495.521.754 | 29.145.253.057 | 0,060 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 8.193.353.000 | 5.297.035.000 | 5.667.827.450 | 6.064.575.371 | 6.489.095.647 | 6.943.332.345 | 0,070 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2.700.000.000 | 2.601.000.000 | 2.731.050.000 | 2.867.602.500 | 3.010.982.625 | 3.161.531.756 | 0,050 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 116.610.000.000 | 124.082.647.306 | 130.286.779.671 | 136.801.118.654 | 143.641.174.587 | 150.823.233.316 | 0,050 |
| **PENDAPATAN TRANSFER/DANA PERIMBANGAN** | **846.195.217.354** | **783.895.705.320** | **788.621.667.563** | **793.377.567.892** | **798.163.605.851** | **802.979.982.384** | **0,006** |
| **PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN** | **803.125.892.744** | **766.061.010.234** | **770.630.275.605** | **775.228.095.497** | **779.854.657.190** | **784.510.149.253** | **0,006** |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 20.060.732.000 | 3.504.879.954 | 3.529.414.113 | 3.554.120.012 | 3.578.998.852 | 3.604.051.844 | 0,007 |
| Dana Alokasi Umum | 440.828.589.000 | 474.707.040.000 | 477.080.575.200 | 479.465.978.076 | 481.863.307.966 | 484.272.624.506 | 0,005 |
| Dana Alokasi Khusus – Fisik | 53.100.089.000 | 14.491.020.000 | 14.592.457.140 | 14.694.604.339 | 14.797.466.570 | 14.901.048.836 | 0,007 |
| Dana Alokasi Khusus – Non Fisik | 73.334.649.280 | 89.538.131.000 | 90.254.436.048 | 90.976.471.536 | 91.704.283.308 | 92.437.917.575 | 0,008 |
| Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur | 34.003.767.464 | 33.357.125.000 | 33.657.339.125 | 33.960.255.177 | 34.265.897.473 | 34.574.290.550 | 0,009 |
| Dana Desa | 169.168.059.000 | 137.327.607.000 | 138.288.900.249 | 139.256.922.550 | 140.231.721.008 | 141.213.343.055 | 0,007 |
| Insentif Fiskal | 12.630.007.000 | 13.135.207.280 | 13.227.153.730 | 13.319.743.807 | 13.412.982.013 | 13.506.872.887 | 0,007 |
| **PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH** | **43.069.324.610** | **17.834.695.086** | **17.991.391.958** | **18.149.472.395** | **18.308.948.661** | **18.469.833.131** | **0,009** |
| Pendapatan Bagi Hasil | 27.539.031.302 | 15.927.003.636 | 16.070.346.668 | 16.214.979.788 | 16.360.914.606 | 16.508.162.838 | 0,009 |
| Bantuan Keuangan | 15.530.293.308 | 1.907.691.450 | 1.921.045.290 | 1.934.492.607 | 1.948.034.055 | 1.961.670.293 | 0,007 |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **12.259.728.955** | **12.504.923.534** | **12.617.467.845** | **12.731.025.056** | **12.845.604.281** | **12.961.214.720** | **0,009** |
| Pendapatan Lainnya | 12.259.728.955 | 12.504.923.534 | 12.617.467.845 | 12.731.025.056 | 12.845.604.281 | 12.961.214.720 | 0,009 |
| | | | | | | | |

| URAIAN | Baseline Tahun 2024 | PROYEKSI (TAHUN) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **BELANJA** | **1.006.456.767.868** | **968.362.992.852** | **976.261.129.142** | **989.724.829.034** | **1.008.269.515.381** | **1.026.814.201.728** | **0,018** |
| **BELANJA OPERASI** | **658.437.900.836** | **660.562.549.779** | **665.765.561.685** | **671.010.236.042** | **692.705.288.981** | **708.617.505.323** | **0,023** |
| Belanja Pegawai | 296.024.082.802 | 349.287.318.792 | 351.732.330.023 | 354.194.456.333 | 356.673.817.528 | 359.170.534.250 | 0,007 |
| Belanja Barang dan Jasa | 316.421.349.500 | 294.487.054.927 | 297.137.438.421 | 299.811.675.367 | 302.509.980.445 | 305.232.570.269 | 0,009 |
| Belanja Hibah | 38.905.824.250 | 9.900.051.060 | 9.959.451.366 | 10.019.208.074 | 26.487.700.466 | 37.131.373.729 | 0,006 |
| Belanja Bantuan Sosial | 7.086.644.284 | 6.888.125.000 | 6.936.341.875 | 6.984.896.268 | 7.033.790.542 | 7.083.027.075 | 0,007 |
| **BELANJA MODAL** | **133.051.080.960** | **95.780.311.743** | **96.762.141.699** | **103.253.481.115** | **98.360.894.167** | **99.236.464.794** | **0,009** |
| Belanja Modal Tanah | 0 | 6.885.867.670 | 6.940.954.615 | 6.996.482.248 | 7.052.454.106 | 7.108.873.739 | 0,008 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 17.957.278.053 | 17.204.068.949 | 17.358.905.569 | 17.515.135.719 | 17.672.771.941 | 17.831.826.893 | 0,009 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 43.390.384.897 | 35.409.951.287 | 35.728.640.848 | 36.050.198.616 | 36.374.650.407 | 36.702.022.257 | 0,009 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 68.715.333.710 | 33.717.460.369 | 34.150.173.492 | 40.087.529.619 | 34.636.049.721 | 34.947.774.169 | 0,009 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 2.988.084.300 | 2.562.963.468 | 2.583.467.175 | 2.604.134.913 | 2.624.967.992 | 2.645.967.736 | 0,008 |
| **BELANJA TAK TERDUGA** | **900.000.000** | **535.418.057** | **556.834.779** | **579.108.170** | **602.272.497** | **626.363.397** | **0,040** |
| Belanja Tak Terduga | 900.000.000 | 535.418.057 | 556.834.779 | 579.108.170 | 602.272.497 | 626.363.397 | 0,040 |
| **BELANJA TRANSFER** | **214.067.786.072** | **211.484.713.273** | **213.176.590.979** | **214.882.003.707** | **216.601.059.736** | **218.333.868.214** | **0,008** |
| Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 214.067.786.072 | 211.484.713.273 | 213.176.590.979 | 214.882.003.707 | 216.601.059.736 | 218.333.868.214 | 0,008 |
| | | | | | | | |
| **PEMBIAYAAN** | **12.633.468.559** | **16.895.911.432** | **11.865.420.136** | **11.943.768.095** | **16.623.530.636** | **20.799.654.150** | **0,251** |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **13.733.468.559** | **17.995.911.432** | **12.965.420.136** | **13.043.768.095** | **17.723.530.636** | **21.899.654.150** | **0,236** |
| Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) | 13.733.468.559 | 17.995.911.432 | 12.965.420.136 | 13.043.768.095 | 17.723.530.636 | 21.899.654.150 | 0,170 |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **1.100.000.000** | **1.100.000.000** | **1.100.000.000** | **1.100.000.000** | **1.100.000.000** | **1.100.000.000** | **0,000** |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 0,000 |
| **PEMBIAYAAN NETTO** | **12.633.468.559** | **16.895.911.432** | **11.865.420.136** | **11.943.768.095** | **16.623.530.636** | **20.799.654.150** | |

*Sumber : BPKK Pidie Jaya, 2025 (diolah)*

### 2.5.3.2. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan komponen kunci dalam pengelolaan keuangan daerah yang menentukan kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, perencanaan pendapatan daerah yang realistis, akurat, dan berorientasi pada pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi landasan penting dalam penyusunan RPJMK.

Berdasarkan proyeksi keuangan daerah, pendapatan Kabupaten Pidie Jaya selama periode 2026–2030 diperkirakan terus mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar Rp 951.467.081.420 pada tahun 2026 menjadi Rp 1.006.014.547.578 pada tahun 2030. Secara umum, struktur pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

**A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD Kabupaten Pidie Jaya diproyeksikan menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang periode perencanaan, dari Rp 155.066.452.566 pada tahun 2026 menjadi Rp 190.073.350.474 pada tahun 2030. Pertumbuhan ini mencerminkan upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi PAD, perbaikan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan kontribusi dari pengelolaan kekayaan daerah.

Secara rinci, komponen terbesar PAD berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang secara konsisten mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan perbaikan tata kelola pemungutan. Selain itu, kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah juga diharapkan terus diperkuat melalui inovasi pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) pemerintah Pusat mulai memberlakukan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu pungutan tambahan atas pokok PKB yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Aturan ini mulai berlaku pada 5 Januari 2025, besaran potensi pendapatan dari opsen pajak ini di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2025 sebesar

8 milyar rupiah, ini merupakan sumber pendapatan baru bagi Kabupaten Pidie Jaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

**B. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer tetap menjadi sumber pendapatan terbesar bagi Kabupaten Pidie Jaya, dengan kontribusi lebih dari 80% terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2026, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp 783.895.705.320 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 802.979.982.384 pada tahun 2030. Kenaikan ini didorong oleh proyeksi pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah, serta Dana Desa.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat diharapkan tetap stabil, dengan kecenderungan meningkat untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, pendapatan transfer antar daerah, khususnya bagi hasil pajak dan retribusi, juga diharapkan mengalami pertumbuhan seiring peningkatan kerja sama antar daerah dan penguatan sinergi fiskal.

**C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan tumbuh secara moderat dan memberikan kontribusi pelengkap terhadap pendapatan daerah. Komponen ini mencakup berbagai sumber pendapatan yang bersifat insidental maupun strategis, yang tetap diupayakan untuk dioptimalkan melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 2026–2030 menunjukkan arah yang positif dan berkelanjutan. Meskipun pendapatan daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer, tren peningkatan PAD menunjukkan adanya perbaikan kemandirian fiskal yang patut terus didorong. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya perlu terus mengoptimalkan potensi PAD melalui inovasi dan reformasi tata kelola penerimaan daerah, di samping menjaga hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat dalam rangka memastikan keberlanjutan pendapatan transfer.

Dengan pengelolaan yang efektif, proyeksi pendapatan ini diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang memadai bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan program-program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMK serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya secara berkelanjutan.

.

### 2.5.3.3. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrumen utama bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pencapaian visi dan misi yang ditetapkan dalam RPJMK. Oleh karena itu, perencanaan belanja daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkesinambungan, sejalan dengan proyeksi pendapatan yang tersedia.

Berdasarkan proyeksi keuangan daerah, total belanja Kabupaten Pidie Jaya selama periode 2026–2030 diperkirakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pendapatan daerah. Pada tahun 2026, total belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 968.362.992.852 dan akan meningkat menjadi Rp 1.026.814.201.728 pada tahun 2030. Peningkatan belanja ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**A. Belanja Operasi**

Belanja operasi sebagai komponen terbesar dalam struktur belanja daerah diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang konsisten, dari Rp 660.562.549.779 pada tahun 2026 menjadi Rp 708.617.505.323 pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan kebutuhan untuk mendukung kelangsungan operasional pemerintahan daerah, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Peningkatan belanja operasi diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan publik, memperkuat pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat.

**B. Belanja Modal**

Belanja modal diproyeksikan mengalami pertumbuhan moderat namun tetap signifikan sebagai bagian dari upaya pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2026, belanja modal diperkirakan sebesar Rp 95.780.311.743 dan meningkat menjadi Rp.99.236.464.794 pada tahun 2030. Alokasi belanja modal difokuskan pada pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas, pengadaan peralatan dan mesin, pengembangan fasilitas pelayanan dasar, serta pembangunan sarana dan

prasarana pendukung lainnya. Peningkatan belanja modal ini diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur strategis.

**C. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga direncanakan secara proporsional untuk mengantisipasi kejadian luar biasa atau keadaan darurat yang memerlukan penanganan cepat. Sepanjang periode proyeksi, belanja tidak terduga dialokasikan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian fiskal guna menjaga fleksibilitas pengelolaan keuangan daerah.

**D. Belanja Transfer**

Belanja transfer, khususnya transfer ke pemerintah desa, juga diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp 211.484.713.273 pada tahun 2026 menjadi Rp 218.333.868.214 pada tahun 2030. Peningkatan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong penguatan kapasitas keuangan desa serta pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif.

Secara keseluruhan, proyeksi belanja daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2026–2030 menunjukkan arah yang konsisten dengan strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Proporsi belanja operasi yang tetap dominan mencerminkan kebutuhan menjaga kesinambungan pelayanan pemerintahan, sementara pertumbuhan belanja modal menunjukkan fokus pada pembangunan fisik yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya perlu terus meningkatkan efisiensi belanja, mengoptimalkan perencanaan pengeluaran berbasis kinerja, serta memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan belanja daerah diharapkan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMK.

### 2.5.3.4. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yang berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan anggaran serta mendukung keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan. Dalam konteks perencanaan keuangan jangka menengah, proyeksi pembiayaan daerah memberikan gambaran mengenai peran pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan APBK, baik melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) maupun penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan fiskal yang dinamis.

Berdasarkan proyeksi keuangan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 2026–2030, pembiayaan netto diperkirakan mengalami fluktuasi namun tetap dalam batas yang wajar dan terkendali. Pada tahun 2026, pembiayaan netto diproyeksikan sebesar Rp 16.895.911.432 dan meningkat secara bertahap menjadi Rp 20.799.654.150 pada tahun 2030. Kebutuhan pembiayaan ini umumnya bersumber dari pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau mendukung pendanaan program prioritas daerah.

**A. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan daerah diperkirakan berasal dari SiLPA yang dicadangkan, dengan nominal yang disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan realisasi keuangan dan perhitungan kebutuhan belanja daerah. Sepanjang periode proyeksi, penerimaan pembiayaan diharapkan tetap dikelola secara prudent, dengan mempertimbangkan stabilitas fiskal daerah dan menghindari ketergantungan berlebihan terhadap pembiayaan sebagai sumber utama pendanaan.

**B. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan, yang meliputi penyertaan modal pemerintah daerah ke BUMD atau kewajiban lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diproyeksikan tetap dilakukan secara selektif dan akuntabel. Sepanjang periode proyeksi, pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengalokasikan pembiayaan untuk Bank Aceh dan Perumda Air Minum Tirta Mon Krueng Meureudu yang diharapkan dapat memberikan manfaat strategis bagi peningkatan pendapatan daerah atau memperkuat layanan publik.

Secara keseluruhan, proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Pidie Jaya periode 2026–2030 menunjukkan bahwa peran pembiayaan akan difokuskan sebagai instrumen pelengkap guna menjaga keseimbangan anggaran dan memastikan kesinambungan pelaksanaan program pembangunan daerah. Fluktuasi kebutuhan pembiayaan mencerminkan dinamika fiskal yang wajar dan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berkomitmen untuk

mengelola pembiayaan secara bijaksana, dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan fiskal.

Melalui pengelolaan pembiayaan yang efektif, diharapkan ruang fiskal daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMK, sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah dalam jangka menengah dan panjang

### 2.5.3.5. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2025-2029 untuk mendanai pembangunan Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan hasil analisis, total penerimaan meningkat dengan rata-rata peningkatan 2 persen. Proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja operasi, maka diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Peruntukan kapasitas riil dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar untuk menunjang tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, selanjutnya penggunaan kapasitas riil dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tahun 2025 sebesar Rp.292.956.135.476 dan akan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2029 sebesar Rp. 315.564.226.400.

Dari hasil analisis rata-rata pertumbuhan kapasitas riil keuangan daerah mengalami tren peningkatan dengan angka 1% per tahun. Ini mengindikasikan bahwa secara umum, kapasitas riil kemampuan keuangan mengalami penurunan kecil di tahun 2029 namun ditahun sebelumnya menunjukkan peningkatan. Meskipun penurunan ini tidak terlalu signifikan dalam satu periode. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi atau membalikkan tren penurunan ini. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti perubahan dalam pendapatan daerah, fluktuasi ekonomi global atau nasional, serta kebijakan pengelolaan keuangan yang mungkin perlu dievaluasi kembali. Upaya peningkatan efisiensi alokasi anggaran dan pengelolaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut 2.134

**Tabel 2.134.**
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029**

| NO | URAIAN | PROYEKSI (TAHUN) | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *3* | *4* | *4* | *5* |
| 1 | Pendapatan | 917.537.446.820 | 951.467.081.420 | 964.395.709.006 | 977.781.060.939 | 991.645.984.745 | 0,014 |
| 2 | Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 3 | Sisa lebih Rill perhitungan anggaran tahun sebelumnya | 15.000.000.000 | 17.995.911.432 | 12.965.420.136 | 13.043.768.095 | 17.723.530.636 | 0,359 |
| **A** | **Total Penerimaan (1+3)** | **932.537.446.820** | **969.462.992.852** | **977.361.129.142** | **990.824.829.034** | **1.009.369.515.381** | **0,019** |
| 4 | Belanja Operasi | 638.481.311.344 | 660.562.549.779 | 665.765.561.685 | 671.010.236.042 | 692.705.288.981 | 0,032 |
| 5 | Pengeluaran Pembiayaan | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 0,000 |
| **B** | **Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah = A-(4+5)** | **292.956.135.476** | **307.800.443.073** | **310.495.567.457** | **318.714.592.992** | **315.564.226.400** | **0,010** |

*Sumber : BPKK Pidie Jaya, 2025 (diolah)*

## 2.6. Permasalahan Dan Isu Strategis

### 2.6.1. Permasalahan Pembangunan

Potensi permasalahan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Secara makro, pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan pembangunan khususnya pendukung ekonomi. Walaupun masih tumbuh positif, pertumbuhan ekonomi makin melambat. Di samping itu, penciptaan lapangan kerja masih menjadi salah satu masalah besar meskipun angka inflasi relatif kecil dan terkendali. Di sisi lain pertumbuhan nilai investasi masih relatif sangat kecil.

Oleh karena itu untuk lima tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bersama masyarakat dan semua komponen masyarakat yang ada akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi baik yang bersifat lokal maupun yang bersifat global, permasalahan dan tantangan ini maka selanjutnya dituangkan ke dalam isu-isu strategis untuk memberi arahan dalam perumusan tujuan dan isu strategis serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029.

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan ini dibuat. Adapun yang menjadi Permasalahan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

#### 2.6.1.1. Implementasi pelaksanaan Syariat Islam, Sosial, Budaya dan Adat Istiadat belum optimal.

1) **Pelaksanaan Syariat Islam belum optimal**, meskipun Indeks Pembangunan Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya terhitung baik yaitu sebesar 86 dan provinsi 82,72. Namun hal tersebut belum mencerminkan upaya optimal penerapan Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya yang ditandai dengan Pengelolaan masjid belum sempurna, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Pengumpulan dan distribusi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) masih jauh di bawah potensi yang ada. Dalam hukum jinayat, tingginya kasus pelanggaran dan banyaknya kasus yang belum tertangani mengindikasikan penegakan hukum syariah yang belum efektif.

perkembangan Lembaga Keuangan Syariah masih lambat, Indeks Pembangunan Syariat di Kabupaten Pidie Jaya belum mampu diukur dengan baik dan akurat.

2) **Belum optimalnya pendapatan dan Pendistribusian Zakat**, hal ini ditandai dengan kecilnya pendapatan daerah dari Zakat yaitu hanya Rp.3,6 Milyar, sedangkan potensi zakat diperkirakan hampir mencapai 10 Milyar, Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya kinerja aparatur dalam menggali potensi zakat yang tersedia, dalam proses pendistribusian juga masih belum maksimal, belum terlihat program yang dapat mengungkit perekonomian para penerima zakat.
3) **Pelayanan sosial belum menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan,** hal ini ditandai dengan masih banyak penyandang disabilitas sebanyak 951 orang namun yang sudah terbantu dengan berbagai program dan sumber dana sebanyak 300 orang, anak terlantar 115, Fakir dan miskin baru dapat disantuni sebanyak 22 persen dari total yang ada, warga lanjut usia terlantar sebanyak 226 orang yang penanganan nya masih belum layak, gelandangan dan pengemis yang belum memperoleh kehidupan yang layak sebanyak 12 orang.
4) **Belum optimalnya pelaksanaan pemajuan kebudayaan** terutama adat istiadat meliputi adat, hukum adat, lembaga adat, dan kapasitas tokoh adat, serta penguatan kembali sistem peradilan adat di gampong dan mukim hal ini ditandai dengan masih rendahnya indeks pembangunan kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya Aceh yaitu 48,25 dan provinsi Aceh sebesar 48,89 serta nasional 51,90.

**2.6.1.2. Kualitas tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah belum optimal.**

1) **Pemanfaatan Digital untuk pelayanan publik belum optimal,** Hal ini ditandai dengan keterbatasan akses dan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai layanan pemerintah. Meskipun teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, banyak layanan publik masih dikelola secara manual atau melalui metode tradisional, menyebabkan proses yang lambat dan kurang efisien. Kurangnya infrastruktur digital, keterampilan teknis, dan akses internet di beberapa wilayah juga membatasi penerapan sistem e-government dan aplikasi pelayanan online. Selain itu, masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan layanan digital memperparah situasi.

2) **Kemandirian Pendanaan Masih lemah**. Pendanaan pembangunan masih bertumpu pada anggaran Pemerintah (dana transfer) sebesar 88 persen dari total APBK, berkurangnya Dana Otsus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya terutama sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur. Penurunan tersebut mulai tahun 2023 sebesar 50 persen (1 persen dari DAU Nasional) dan pada tahun 2028 menjadi 0 persen. Pendapatan asli daerah masih sangat rendah yaitu 12 persen dari APBK.
3) **Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset** untuk mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini dikarenakan kabupaten Pidie Jaya belum memiliki Kampus atau universitas. Tanpa adanya institusi pendidikan tinggi, akses terhadap penelitian berkualitas dan pengembangan ilmu pengetahuan menjadi terbatas.
4) **Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi** melalui penguatan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi dan birokrasi belum berjalan secara efektif dan efisien dimana nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 sebesar 51,45 dengan kategori CC.
5) **Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** seperti cakupan akta kelahiran yang belum mencapai 100 persen, cakupan akta kematian yang masih rendah, dan masih belum terbaharuinya data kependudukan by name by address.

**2.6.1.3. Sumber Daya Manusia masih rendah:**

1) **Sumber daya manusia masih rendah**, minimnya SDM di Kabupaten Pidie Jaya yang memperoleh kesempatan kerja baik di pemerintahan maupun swasta. hal ini dibuktikan dengan jumlah kelulusan CPNS tahun 2023 hanya 30 persen yang berasal dari Kabupaten Pidie Jaya. Selebihnya CPNS yang lulus berasal dari luar Kabupaten Pidie Jaya. Sedangkan pada sektor swasta, pemerintah belum mampu secara maksimal dalam memberikan pelatihan dan keterampilan atau pendidikan tambahan yang diperlukan masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja, hingga tidak mampu bersaing di tingkat daerah dan nasional.
2) **Tingkat Pendidikan masih belum ideal.** Hal ini ditandai Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) masih jauh dari angka yang ditetapkan UNDP sebesar

18 Tahun, Angka Harapan Lama Sekolah kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 berada di 15,01 tahun.

3) **Mutu guru belum optimal dan merata**. Guru tersertifikasi pada jenjang pendidikan SD sudah mencapai 80 persen, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP guru yang tersertifikasi belum mencapai 60 persen dan selain itu masih tingginya guru dengan status bukan PNS yaitu mencapai 63 persen serta distribusi guru yang belum sesuai dengan kebutuhan sekolah.
4) **Masih rendahnya minat baca masyarakat Kabupaten Pidie Jaya**, dimana indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024 sebesar 64,08 sedangkan Aceh sebesar 66,23 dan Nasional sebesar 69,42;
5) **Angka ketergantungan penduduk masih tinggi,** hal ini ditandai dengan rasio ketergantungan hidup di Kabupaten Pidie Jaya 48,62 sedangkan Aceh lebih tinggi yaitu 53,51 persen, secara nasional lebih rendah yaitu 44,4%, Ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia non-produktif (seperti anak-anak dan orang lanjut usia) terhadap penduduk usia produktif di Kabupaten Pidie Jaya relatif lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Aceh secara keseluruhan dan rata-rata nasional.
6) **Masih tingginya prevalensi stunting,** Angka Prevelansi Stunting Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024 sebesar 31,6 angka ini lebih tinggi dari angka stunting Provinsi Aceh yaitu 21,5 persen dan secara Nasional 19,8. Tingginya prevalensi stunting menunjukkan adanya masalah gizi dan kesehatan yang perlu ditangani secara serius di Kabupaten Pidie Jaya;
7) **Pendapatan perkapita masih rendah**, Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 sebesar Rp. 26,38 Juta dan pendapatan Per Kapita Aceh Rp. 43,78 Juta sedangkan nasional Rp. 78,62 juta, Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan per kapita di Kabupaten Pidie Jaya termasuk kurangnya kesempatan kerja yang layak, rendahnya produktivitas ekonomi, infrastruktur yang kurang berkembang, serta masalah-masalah sosial dan ekonomi lainnya.
8) **Pemberdayaan Gender yang masih rendah**, hal ini ditandai dengan akses terbatas kepada pendidikan dan pekerjaan, kekerasan gender, dan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik serta hukum, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 sebesar 55,98 sedangkan Aceh 61,78 dan nasional 77,62.

9) **Penanganan Disabilitas belum maksimal,** hal ini ditandai oleh masih rendahnya persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, yaitu hanya 20% dari jumlah 236 PMKS.

10) **Kesejahteraan pekerja belum maksimal**, hal ini ditandai oleh masih redahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagkerjaan di kabupaten Pidie Jaya sebesar 2,33%, dan Aceh sebesar 20,86%. Sedangkan nasional sudah mencapai 26,97 persen.

**2.6.1.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pidie Jaya belum maksimal dan fluktuatif:**

1) **Perkembangan laju perekonomian Kabupaten Pidie Jaya mengalami fluktuasi dan masih kurang menggembirakan**, hal ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi tahun 2024 Kabupaten Pidie Jaya sebesar 4,55 persen dan Aceh sebesar 4,66 persen sedangkan nasional 5,03 persen.

2) **Angka kemiskinan masih tinggi**, Kabupaten Pidie Jaya merupakan kabupaten termiskin ke-4 di Aceh yaitu pada angka 18,28 di tahun 2024, sedangkan angka kemiskinan Aceh sebesar 14,23 dan nasional 9,03%. Kemiskinan dapat mencakup rendahnya tingkat pendapatan, kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak, infrastruktur yang kurang, serta masalah-masalah lain yang terkait dengan kesenjangan ekonomi dan sosial.

3) **Inflasi Kabupaten Pidie Jaya masih belum stabil**, yang tercermin dari Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga akhir Desember 2024 pada angka 0,51 %. Pada prinsipnya angka ini baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai hingga 5 persen per tahun. Biasanya komoditi seperti tanaman pangan harganya berfluktuatif disebabkan cuaca ekstrem dan gagal panen. Dampak dari inflasi yang tidak stabil ini dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pada daya beli yang melemah dan peningkatan biaya hidup, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

4) **Belum optimalnya iklim berusaha untuk usaha kecil dan mikro**. Hal ini ditandai Masih rendahnya persentase jumlah usaha kecil dan menengah, termasuk jumlah koperasi aktif Kabupaten Pidie Jaya yang hanya mencapai 18 persen.

5) **Pembangunan gampong masih rendah**, hal ini ditandai dengan Masih rendahnya status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pidie Jaya yaitu 0,65 dan Aceh 0,6483, sedangkan nasional sebesar 0,6724.

6) **masih minimnya pengetahuan dan pemanfaatan ekonomi digital** bagi pengembangan koperasi, ekonomi kreatif, dan UMKM, Masih rendahnya Proporsi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB, disebabkan minimnya infrastruktur dan teknologi yang mendukung ekonomi digital dan minimnya masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital untuk proses kegiatan perekonomian. Sebagai contoh hanya dibawah 10 dunia usaha yang mendaftarkan usahanya pada e-catalok lokal.
7) **Industri Pengolahan dan pariwisata masih lemah**, hal ditandai dengan Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya masih sangat rendah dan Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang hanya 3,48 persen dimana komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan langsung dijual tanpa melalui proses hilirisasi.
8) **Iklim investasi belum mengembirakan,** hal ini ditandai dengan masih minimnya Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB dan Nilai investasi Kabupaten Pidie Jaya masih sangat rendah dengan realisasi investasi pada tahun 2025 sebesar 99,4 milyar.
9) **Pola konsumsi pangan dan gizi masyarakat belum seimbang** yang terlihat dari rendahnya asupan nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral dalam pola makan sehari-hari. Masyarakat cenderung lebih banyak mengonsumsi makanan pokok seperti beras, namun kurang dalam mengonsumsi sayuran, buah-buahan, dan sumber protein hewani atau nabati. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kesadaran akan pentingnya pola makan sehat, keterbatasan akses terhadap bahan pangan bergizi, serta pengaruh kebiasaan dan budaya makan yang turun-temurun. Akibatnya, masalah gizi seperti stunting pada anak-anak.
10) **Produksi Pertanian semakin menurun**, hal ini ditandai dengan masih rendahnya produksi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan, seperti produktivitas padi atau bahan pangan utama bahan lokal yang masih berkisar 6,78 ton per hektar, produksi padi pada tahun 2024 sebanyak 103,521 ton. Produksi ini akan terus meningkat apabila ketersediaan air untuk persawahan masyarakat mencukupi melalui ketersediaan jaringan irigasi yang mampu membawa air ke sawah masyarakat.

11) **Luas panen juga mengalami penurunan yang sangat signifikan.** Luas panen padi di Kabupaten Pidie Jaya mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam tiga tahun terakhir, dari 16.285 hektar pada tahun 2021 menjadi 13.832 hektar pada tahun 2022, dan semakin berkurang menjadi 11.802 hektar pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perubahan iklim yang mempengaruhi pola tanam, petani kesulitan memperoleh Pupuk, serta berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan untuk keperluan lain. Selain itu, serangan hama dan penyakit tanaman yang tidak terkendali juga berkontribusi terhadap penurunan luas panen.
12) **Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian.** Hal ini disebabkan karena sebagian besar komoditas pertanian dijual dalam bentuk mentah, tanpa melalui proses yang dapat meningkatkan kualitas dan harganya. Selain itu, keterampilan dan pengetahuan petani dalam mengelola produk pertanian untuk menghasilkan produk bernilai tambah juga masih terbatas. Akibatnya, pendapatan petani tetap rendah, dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah belum maksimal.
13) **Kesejahteraan Petani belum maksimal,** hal ini tercermin dari rendahnya pendapatan dan kualitas hidup Petani. Meskipun pertanian merupakan sektor utama, banyak petani di Kabupaten Pidie Jaya masih menghadapi tantangan besar, seperti akses terbatas ke teknologi modern, modal, dan pasar yang menguntungkan. Selain itu, rendahnya nilai tambah dari komoditas pertanian memperparah kondisi, karena hasil panen sering dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Kurangnya dukungan dalam bentuk pelatihan, infrastruktur, dan perlindungan harga juga membuat petani rentan terhadap fluktuasi pasar dan cuaca.
14) **Pengelolaan dan produktivitas kelautan dan perikanan belum maksimal**, hal ini terlihat dari masih rendahnya hasil tangkapan dan produksi perikanan serta kurangnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Meskipun sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar, masalah seperti penangkapan ikan yang tidak teratur, kerusakan habitat, dan keterbatasan teknologi serta fasilitas pendukung menyebabkan produktivitas rendah. Selain itu, kurangnya program pelatihan dan bimbingan bagi nelayan serta sistem pengawasan yang lemah berkontribusi terhadap pengelolaan yang tidak efektif.

15) **Potensi Kelautan dan perikanan Aceh khususnya di Kabupaten Pidie Jaya rawan terhadap ancaman IUU Fishing** (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) dan Destructive Fishing, dan belum optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam menjaga kelestarian sumberdaya dan mendukung pemanfaatan potensi perikanan yang berkelanjutan,
16) **Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya** yang tercermin dari rendahnya produktivitas dan efektivitas sistem budidaya yang ada. Meskipun sektor ini memiliki potensi besar, berbagai tantangan seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, teknologi budidaya yang belum berkembang, dan pengetahuan yang terbatas di kalangan petani ikan menghambat kemajuan. Sistem pengelolaan yang tidak efisien, termasuk manajemen pakan dan kualitas air yang buruk, juga berkontribusi terhadap hasil budidaya yang tidak maksimal.

**2.6.1.5. Masih tingginya ketimpangan Infrastruktur antar wilayah;**

1) **Belum optimalnya sarana transportasi**, hal ini ditandai masih rendahnya kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 65,80 persen dan di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,65 persen;
2) **Penanganan perumahan dan permukiman masih rendah**, hal ini ditandai dengan masih luasnya permukiman kumuh di Kabupaten Pidie Jaya yaitu terdapat di 66 desa dari 222 desa yang ada di Kabupaten Pidie Jaya;
3) **Infrastruktur dan pelestarian sumber daya air masih belum optimal**, hal ini disebabkan masih belum optimalnya pemeliharaan dan pelestarian Sumber Daya Air dan masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian SDA; infrastruktur SDA dalam kondisi baik yang baru mencapai 40,39 persen, adanya pengurangan debit air andalan dan beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal, penanganan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama baru mencakup 38,21 persen dari potensi genangan banjir; dan Masih rendahnya irigasi dalam kondisi baik
4) **Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan**, belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat karena belum berfungsinya terminal angkutan orang di kecamatan Meurah Dua.

5) **Kawasan transmigrasi belum optimal**, hal ini dikarenakan banyaknya kawasan transmigrasi nasional maupun lokal yang ditelantarkan dan memerlukan pembinaan lebih lanjut.

**2.6.1.6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah;**

1) **Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah**, hal ini ditandai dengan masih tingginya indeks Risiko Bencana mencapai 137,6 (tahun 2024)
2) **Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan hidup,** hal ini ditandai Indeks kualitas lingkungan hidup masih 71,32 sedangkan Aceh sebesar 78,29 sedangkan indeks kualitas hidup nasional 72,42 persen.
3) **Pembangunan energi dan Sumber Daya Mineral belum optimal**, hal ini ditandai dengan Belum tercapainya akses listrik untuk seluruh masyarakat yang tercermin dari belum tercapainya rasio elektrifikasi 100 persen hingga saat ini, pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi panas bumi, energi angin (bayu), dan juga energi alternatif lainnya dari bahan nabati; dan Masih banyaknya terdapat pertambangan tanpa izin (PETI).

### 2.6.2. Isu Strategis Daerah

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029, penting untuk memahami dan mengidentifikasi isu-isu strategis yang akan mempengaruhi arah pembangunan di masa mendatang. Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu wilayah di Provinsi Aceh, dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan memahami isu-isu strategis ini, RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 dapat disusun secara lebih tepat sasaran, memastikan keberlanjutan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka menengah. Terdapat 5 isu strategis pembangunan Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut:

**2.6.2.1. Penguatan Implementasi Syariat Islam dan Budaya Aceh serta Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas.**

Penting bagi Kabupaten Pidie Jaya untuk memperkuat pemahaman dan praktik syariat Islam serta melestarikan budaya Aceh sebagai bagian integral dari identitas lokal. Hal ini melibatkan penyelenggaraan pendidikan agama, kegiatan keagamaan, seperti menggiatkan balai-balai pengajian dan Taman Pendidikan Al-

Quran di tingkat gampong. Selanjutnya menciptakan program-program seni dan kebudayaan yang memperkuat nilai-nilai dan tradisi lokal.

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Ini mencakup peningkatan kapasitas dan transparansi lembaga pemerintahan, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, serta pemberdayaan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

Optimalisasi riset dan inovasi serta pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi. Hal ini melibatkan kemitraan antara lembaga riset, industri, dan pemerintah untuk meningkatkan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi, serta fasilitasi pelatihan dan sumber daya bagi masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital dalam usaha mereka.

Peningkatan kemandirian pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Langkah-langkah ini meliputi peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, diversifikasi sumber pendapatan daerah, serta pengelolaan utang yang bijaksana untuk menjaga stabilitas fiskal.

#### 2.6.2.2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Isu pemerataan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya harus diatasi dengan pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung pendidikan yang merata serta peningkatan kualitas pendidikan vokasional dan distribusi tenaga pendidik yang sesuai dengan kompetensi. Langkah-langkah tersebut meliputi penyediaan fasilitas dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan melakukan program-program literasi dan membuka akses ke perpustakaan umum di berbagai tingkatan.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kampanye penyuluhan tentang gizi seimbang dan pola makan sehat serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, terutama di wilayah pedesaan. Penanggulangan stunting, khususnya pada anak-anak, harus menjadi fokus utama dengan mengoptimalkan program-program pencegahan dan intervensi yang melibatkan ibu hamil dan anak-anak.

Peningkatan pendapatan per kapita masyarakatnya serta mengoptimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya dengan mendorong investasi di sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, seperti pariwisata, pertanian,

dan perikanan, serta memperkuat infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Penanganan masalah pekerja migran kembali ke daerah asal (PMKS), orang dengan disabilitas, serta memperkuat peran gender dan keluarga dalam pembangunan termasuk pengembangan program inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan PMKS dan orang dengan disabilitas, serta pemberdayaan perempuan melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

#### 2.6.2.3. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas penting dalam agenda pembangunan Kabupaten Pidie Jaya. Diperlukan implementasi program bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran, seperti bantuan langsung tunai dan program keberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya ini harus disertai dengan pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peningkatan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, bagi masyarakat miskin.

Peningkatan peluang kerja yang lebih mudah diakses oleh masyarakat serta meningkatkan produktivitas merupakan hal yang dapat dilakukan melalui pembangunan kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, perlu diperluas peluang pelatihan keterampilan dan pendidikan formal untuk meningkatkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan.

Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan nilai tambah bagi produk lokal, Kabupaten Pidie Jaya harus memperkuat sektor industri pengolahan seperti hasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan serta meningkatkan promosi dan kemampuan ekspor. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong diversifikasi produk lokal, memperkuat jejaring kerjasama antar perusahaan, serta meningkatkan pemasaran produk lokal ke pasar nasional dan internasional.

Pengembangan sektor pertanian dan ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Langkah-langkah ini meliputi dukungan terhadap praktik pertanian berkelanjutan, penerapan teknologi hijau untuk meningkatkan produktivitas, serta investasi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi.

Pembangunan perkotaan dan pendesaan harus menjadi fokus untuk menjadikan keduanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini membutuhkan investasi dalam infrastruktur yang memadai di kedua wilayah

tersebut, serta pembangunan sektor-sektor ekonomi potensial yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

**2.6.2.4. Pemerataan pembangunan Infrastruktur yang berkualitas.**

Kabupaten Pidie Jaya harus terus meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan sanitasi, serta pemeliharaan rutin dan perawatan infrastruktur yang sudah ada

Pembangunan kewilayahan harus didorong untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan serta antar kecamatan. Pembangunan insfrastruktur untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar di wilayah pedesaan. Ini membutuhkan investasi dalam infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengembangan potensi ekonomi lokal di pedesaan

**2.6.2.5. Pengurangan Risiko Bencana.**

Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus diperkuat untuk mengurangi kerugian akibat bencana alam di Kabupaten Pidie Jaya. Ini mencakup perbaikan sistem peringatan dini, penyusunan rencana tanggap darurat yang efektif, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Prioritas pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan penggunaan energi terbarukan meliputi pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, investasi dalam energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi energi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya, terdapat beberapa isu strategis yang diperoleh terkait Tujuan Pembagunan Berkelanjutan (TPB) dan perlu dituangkan serta diselaraskan kedalam RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2029 sebagai mana tabel 2.135 berikut.

**Tabel 2.135.**
**Rumusan Kesimpulan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029**

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| Khasanah nilai-nilai Islam, adat, dan budaya lokal yang kuat; dukungan masyarakat terhadap penerapan syariat Islam | Implementasi pelaksanaan Syariat Islam, Sosial, Budaya dan Adat Istiadat belum optimal. | Belum Optimalnya Tata Kelola Lingkungan dan Pemerintahan Berkelanjutan | Dinamika geopolitik dan geoekonomi global | Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal | Memperkuat Syariat Islam dan budaya Aceh | Penguatan Implementasi Syariat Islam dan Budaya Aceh serta Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas |
| | Kualitas Tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah belum optimal. | | | | Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas | |
| Jumlah penduduk usia produktif relatif besar; potensi peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan | Sumber Daya Manusia masih rendah | Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat yang Berkelanjutan | Perkembangan demografi global | Kualitas SDM masih rendah | Pemerataan pendidikan, perkuatan pendidikan vokasi, dan meningkatkan minat baca masyarakat | Peningkatan kualitas sumber daya manusia |
| | | | | IPTEKIN dan Riset lemah | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan penanggulangan stunting | |
| Potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan; posisi strategis di jalur perdagangan | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pidie Jaya belum maksimal dan fluktuatif | Tingginya Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, Kesenjangan dan Rendahnya Pendapatan, dan Aktivitas Ekonomi | Peningkatan persaingan pengelolaan sumber daya alam | Kontribusi koperasi dan UMKM rendah | Penanggulangan Kemiskinan | Penanggulangan Kemiskinan |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| | | Masyarakat | | | | |
| | | Peningkatan Ketahanan dan Akses Pangan Masyarakat | Pergeseran tata kelola keuangan global | Ekonomi laut belum optimal | Mengembangkan produktivitas pangan dan ekonomi hijau | |
| Posisi geografis strategis; akses darat dan laut yang terus berkembang | Masih tingginya ketimpangan Infrastruktur antar wilayah | Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar | Infrastruktur berkelanjutan | Infrastruktur dan literasi rendah | Memperkuat pembangunan kewilayahan | Pemerataan pembangunan Infrastruktur yang berkualitas |
| | | | | | Memperkuat sarana dan prasarana infrastruktur berkualitas | |
| Potensi hutan, sungai, pesisir, laut, dan energi baru terbarukan; kearifan lokal dalam mitigasi bencana | Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah | Deforestasi, Degradasi dan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Manusia | Perubahan Iklim | Pembangunan belum berkelanjutan | Pengurangan Risiko Bencana. | Pengurangan Risiko Bencana. |
| | | Resiko, Bahaya Bencana Alam dan Perubahan Iklim | | | | |

# BAB III
# VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

## 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

### 3.1.1 Visi dan Misi

Visi Bupati merupakan cita-cita yang diinginkan dan dijanjikan selama 5 (lima) tahun kepemimpinan dan telah dipaparkan di hadapan sidang paripurna DPRK Pidie Jaya pada tanggal 25 September 2024. Adapun Visi tersebut yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya yang Bersyariat, Berkeadilan, Maju dan Berkelanjutan".**

Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan subtansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya. Visi ini mengandung empat frasa kunci sebagai berikut:

**1) Kabupaten Pidie Jaya yang bersyariat**

Bermakna merujuk pada landasan Al-Quran dan Hadist, landasan idieal Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945, dengan sasaran jangka panjang dan jangka menengah yang didasarkan pada prinsip-prinsip pokok syariat Islam.

Visi ini mengedepankan penerapan pokok-pokok syariat islam yang pelaksanaannya meliputi aqidah, syariah, dan akhlak. Pelaksanaan syariat islam secara menyeluruh bermaksud untuk melindungi aqidah, jiwa, harta, nasab, harkat dan martabat serta pelaksanaan ibadah dalam rangka kehidupan bermasyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang Islami.

**2) Pidie Jaya yang berkeadilan**

Bermakna pendekatan pembangunan yang memastikan bahwa manfaat dan hasil dari proses pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Menciptakan sistem yang memastikan seluruh penduduk, terutama komponen masyarakat yang masih terbatas dalam mengakses peluang dan sumber daya yang tersedia. Mengedepankan partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kesenjangan ekonomi.

**3) Pidie Jaya yang Maju**

Menggambarkan kondisi atau cita-cita untuk menjadikan Pidie Jaya sebagai daerah yang berkembang dan unggul dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Visi ini mencerminkan keinginan untuk mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi, sehingga Pidie Jaya dapat menjadi daerah yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakatnya.

**4) Pidie Jaya yang Berkelanjutan**

yang bermakna mengacu pada tujuan untuk membangun dan mengembangkan Pidie Jaya dengan cara yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa merusak sumber daya alam, lingkungan, atau kesejahteraan sosial. Ini berarti Pidie Jaya berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dan kemajuan yang dicapai tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga mempertimbangkan dampaknya pada generasi mendatang.

Untuk mewujudkan Visi di atas dapat dijabarkan melalui 5 (lima) Misi, sebagai berikut:

**Misi 1: Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien.**

Melalui misi 1, dalam upaya mewujudkan pelaksanaan syariat islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan aparatur meliputi aqidah, syariah dan akhlak.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang berbasis syariat, amanah, bersih, jujur, efektif dan efisien sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pelayanan publik yang mencerminkan pemerintahan yang berintegritas, transparan dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan kinerja, melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan publik dengan tetap memperhatikan budaya dan kearifan lokal.

**Misi 2: Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan Berkualitas dan Berdaya Saing.**

Melalui Misi 2, dalam upaya mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas di bidang pendidikan, dilakukan dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan, dan menerapkan muatan kurikulum yang bersifat nasional dan muatan lokal yang terintegrasi dengan perkembangan teknologi.

Di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan yang berkualitas perlu ditingkatkan melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang merata, penyediaan tenaga medis yang profesional dan berkompeten, serta kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, termasuk peningkatan pola hidup sehat dalam upaya untuk pencegahan penyakit.

**Misi 3: Mewujudkan Perekonomian yang Bertumpu pada Potensi Lokal dan regional melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.**

Melalui Misi 23 Perekonomian lokal akan diperkuat dengan memberdayakan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan industri ekonomi kreatif. Teknologi juga akan diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan akses pasar yang lebih luas melalui *platform* digital. Selain itu, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil menjadi prioritas untuk memastikan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah.

**Misi 4: Mewujudkan Pembangunan infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan Keterpaduan Penataan Ruang serta Pemenuhan Kapasitas secara Menyeluruh.**

Melalui Misi 4, Pemerintah akan membangun sarana jalan, jembatan, sistem transportasi, serta infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, listrik, dan telekomunikasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Tata ruang akan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masa depan serta menghindari konflik penggunaan lahan, sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjaga.

**Misi 5: Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan.**

Melalui Misi 5, Pemerintah akan berupaya mengelola lingkungan yang bersih, nyaman dan asri secara efektif melalui program daur ulang sampah dan pengelolaan limbah yang baik. Kawasan konservasi akan dijaga kelestariannya dengan merehabilitasi lahan kritis, dan pemanfaatan energi terbarukan untuk terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat dan menciptakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan yang akan ditingkatkan melalui program pendidikan dan partisipasi publik.

### 3.1.1.1 Keterkaitan Visi dan Misi

Untuk menjelaskan hubungan masing-masing Misi terhadap pencapaian pokokpokok Visi dapat dilihat uraian keterkaitan pada Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1.**
**Kaitan Visi dan Misi RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025-2030**

| POKOK VISI | MISI |
|---|---|
| **Bersyariat** | Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien |
| **Maju** | Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan Berkualitas dan Berdaya Saing |
| **Berkeadilan** | Mewujudkan Perekonomian yang Bertumpu pada Potensi Lokal dan regional melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| **Maju** | Mewujudkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan Keterpaduan Penataan Ruang serta Pemenuhan Kapasitas secara Menyeluruh |
| **Berkelanjutan** | Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan |

### 3.1.1.2 Penyelarasan dengan Visi dan Misi RPJPK Pidie Jaya, RPJMA dan RPJMN

Perencanaan pembanguan perencanaan nasional akan terlaksana dengan baik, sinergi dan terarah apabila didukung oleh perencanaan pembangunan daerah. Salah satunya adalah terjadinya keselarasan antara Visi dan Misi Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Wujud dari keselarasan Visi, Misi RPJMK Pidie Jaya, RPJMA dan RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.2 Berikut.

**Tabel 3.2.**
**Penyelarasan Visi dan Misi RPJMK, RPJMA dan RPJMN Tahun 2025-2029**

| VISI RPJMK PIDIE JAYA 2025-2029: | | VISI RPJMA 2025-2029: | | VISI RPJMN 2025-2029: | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERWUJUDNYA KABUPATEN PIDIE JAYA YANG BERSYARIAT, BERKEADILAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN | | ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT, DAN BERKELANJUTAN | | BERSAMA INDONSIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045 | |
| MISI RPJMK PIDIE JAYA | | MISI ACEH | | MISI RPJMN (ASTA CITA) | |
| 1 | Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien | 1 | Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah | 1 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) |
| | | 2 | Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA | | |
| | | 6 | Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum | 7 | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. |
| 2 | Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan Berkualitas dan Berdaya Saing | 5 | Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) ), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas | 4 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas |
| 3 | Mewujudkan Perekonomian yang Bertumpu pada Potensi Lokal dan regional melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 3 | Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas | 2 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| | | | | 5 | Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri |
| | | | | 6 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. |
| | | | | 3 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi |
| 4 | Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan Keterpaduan Penataan Ruang serta Pemenuhan Kapasitas secara Menyeluruh | 4 | Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan | 3 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi |
| 5 | Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan | 7 | Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya | 8 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama |

### 3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat strategis dalam proses perencanaan pembangunan jangka menengah. Tujuan dan sasaran RPJMK disusun untuk memberikan arah yang jelas dan terukur bagi seluruh program, kegiatan, dan kebijakan pembangunan daerah, sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam kerangka pembangunan Kabupaten Pidie Jaya, tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai tantangan, potensi, dan peluang daerah, serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran ini juga mengedepankan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan daerah yang berdaya saing

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan, diperlukan tujuan dan sasaran. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.3.**
**Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2030**

| NO. | VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN KINERJA | 2024 (*baseline*) | TARGET CAPAIAN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| ***Visi :*** **Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya yang Bersyariat, Berkeadilan, Maju dan Berkelanjutan** | | | | | | | | | | | |
| | **Misi 1 : Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan masyarakat islami** | **Indeks Pembangunan Syariat** | **Indeks** | **83,01** | **83,44** | **83,87** | **84,30** | **84,73** | **85,16** | **85,58** | **DSI Aceh** |
| 1.1. | Sasaran 1 : Meningkatnya implementasi nilai-nilai syariat islam dalam tatanan masyarakat | Jumlah Produk Tersertifikasi Halal | Produk | 35 | 50 | 70 | 100 | 140 | 185 | 255 | BPJPH |
| | | Dimensi Aqidah | nilai | 83,06 | 83,46 | 83,87 | 84,27 | 84,67 | 85,08 | 85,48 | DSI Aceh |
| | | Dimensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) | nilai | 86,40 | 86,63 | 86,86 | 87,09 | 87,32 | 87,54 | 87,77 | DSI Aceh |
| | | Dimensi Kepatuhan membayar Zakat di Baitul Mal | nilai | 85,19 | 85,25 | 85,30 | 85,36 | 85,41 | 85,47 | 85,52 | DSI Aceh |
| | | Dimensi dimensi Melek Al-Quran | nilai | 84,03 | 84,11 | 84,19 | 84,28 | 84,36 | 84,44 | 84,52 | DSI Aceh |
| | | Dimensi Manajemen Mesjid/Meunasah | nilai | 79,02 | 79,99 | 80,96 | 81,94 | 82,91 | 83,88 | 84,85 | DSI Aceh |
| | | Dimensi Hukum Jinayat | nilai | 80,13 | 81,03 | 81,93 | 82,83 | 83,72 | 84,62 | 85,52 | DSI Aceh |
| | | Dimensi Akhlak | nilai | 83,25 | 83,61 | 83,98 | 84,34 | 84,70 | 85,07 | 85,43 | DSI Aceh |
| | | Indeks Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Indeks | 45,00 | 47,00 | 50,20 | 53,40 | 56,60 | 59,80 | 63,00 | Kemendagri |
| | | Indeks Zakat Nasional | Poin Indeks | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | BAZNAS |
| 1.2. | Sasaran 2 : Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah yang Islami | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | Indeks | 53,62 | 53,98 | 54,35 | 54,72 | 55,09 | 55,46 | 56,18 | Kemendik budristek |

| NO. | VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN KINERJA | 2024 (*baseline*) | TARGET CAPAIAN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2030 | |
| **2.** | **Tujuan 2 : Membangun reformasi birokrasi yang moderen dan akuntabel berorientasi dampak** | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **Indeks** | **65,04** | **66,00** | **66,80** | **67,60** | **68,40** | **69,20** | **70,00** | **Kemenpan RB** |
| 2.1. | Sasaran 1 : Transformasi pemerintahan berbasis layanan digital. | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 2,61 | 2,62 | 2,69 | 2,73 | 2,77 | 2,81 | 2,85 | Kemenpan RB |
| | | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 47,17 | 49,91 | 52,73 | 55,55 | 58,36 | 61,18 | 64,00 | Kemendagri |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 78,61 | 79,68 | 80,75 | 81,82 | 82,89 | 83,96 | 85,03 | BKN |
| 2.2. | Sasaran 2 : Peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif, inovatif dan responsif | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 4,06 | 4,18 | 4,31 | 4,43 | 4,55 | 4,68 | 4,80 | Kemenpan RB |
| | | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Nilai | 74,55 | 76,250 | 77,898 | 79,546 | 81,193 | 82,841 | 84,489 | Kemendagri |
| | | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Nilai | 63,11 | 63,92 | 64,74 | 65,55 | 66,36 | 67,18 | 67,99 | Kemenpan RB |
| | | Nilai capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) | NIlai | 72,76 | 75,30 | 77,84 | 80,38 | 82,92 | 85,46 | 88,00 | KPK |
| | **Misi 2 : Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan Berkualitas dan Berdaya Saing** | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Tujuan 3: Membangun sumber daya manusia yang unggul** | **Indeks Pembangunan Manusia** | **Indeks** | **76,39** | **76,69** | **76,99** | **77,30** | **77,60** | **77,90** | **78,20** | **BPS** |
| 3.1 | Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdaya saing | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 15,01 | 15,02 | 15,16 | 15,46 | 15,76 | 16,16 | 16,46 | BPS |
| | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 58,50 | 61,25 | 64,00 | 66,75 | 69,50 | 72,25 | 75,00 | Perpusnas |
| 3.2 | Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 73,31 | 73,46 | 73,61 | 73,76 | 73,90 | 74,05 | 74,20 | BPS |
| | | Prevalensi Stunting | Persen | 31,60 | 31,00 | 29,20 | 27,40 | 25,60 | 23,80 | 22,00 | SSGI |
| 3.3 | Sasaran 3 : Meningkatkan ketahanan keluarga | PDRB per kapita | Juta Rupiah | 28,38 | 29,30 | 30,21 | 31,13 | 32,04 | 32,96 | 33,87 | BPS |
| | | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) | Indeks | 63,67 | 64,25 | 65,40 | 66,55 | 67,70 | 68,85 | 70,00 | BKKBN |
| | | Score Kabupaten Layak anak | Score | 320 | 450 | 501 | 550 | 575 | 601 | 620 | Kemen PPPA |
| | | Indeks Kesejahteraan Sosial | Indeks | 51,96 | 52,76 | 53,56 | 54,36 | 55,16 | 55,96 | 56,76 | KEMENSOS |

| NO. | VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN KINERJA | 2024 (*baseline*) | TARGET CAPAIAN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2030 | |
| | **Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian yang Bertumpu pada Potensi Lokal dan regional melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Tujuan 4: Mewujudkan struktur dan produktifitas perekonomian melalui hilirisasi sumber daya alam yang kompetitif** | **Tingkat Kemiskinan** | **Persen** | **18,28** | **16,12** | **15,30** | **14,50** | **13,80** | **13,20** | **12,60** | **BPS** |
| | | **Tingkat Inflasi daerah** | **Persen** | **2,79** | **2,78** | **2,77** | **2,76** | **2,75** | **2,74** | **2,73** | **BPS** |
| 4.1. | Sasaran 1 : Meningkatnya nilai tambah perekonomian yang berdaya saing | Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan | Persen | 2,86 | 2,90 | 2,95 | 3,02 | 3,08 | 3,13 | 3,20 | BPS |
| | | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 78,94 | 80,28 | 81,61 | 82,95 | 84,28 | 85,62 | 86,95 | BPN |
| | | Rerata Indeks Perkembangan Harga (IPH) | Indeks | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | BPS |
| | | Indeks Daya Saing Daerah | Indeks | 3,30 | 3,32 | 3,34 | 3,36 | 3,38 | 3,40 | 3,42 | BRIN |
| 4.2 | Sasaran 2 : Pemerataan ekonomi yang inklusif | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 4,55 | 4,66 | 4,77 | 4,88 | 4,98 | 5,09 | 5,20 | BPS |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 3,82 | 3,80 | 3,78 | 3,77 | 3,75 | 3,73 | 3,71 | BPS |
| | | Indeks gini | Indeks | 0,214 | 0,213 | 0,213 | 0,212 | 0,211 | 0,211 | 0,210 | BPS |
| | | Indeks Desa | Indeks | 0,7097 | 0,7195 | 0,7296 | 0,7422 | 0,7550 | 0,7625 | 0,7721 | Kemendes PDTT |
| | **Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan, keterpaduan penataan ruang serta pemenuhan kapasitas secara menyeluruh** | | | | | | | | | | |
| **5.** | **Tujuan 5 : Membangun infrastruktur wilayah yang berkualitas dan terintegrasi** | **Indeks Infrastruktur daerah** | **Indeks** | **64,20** | **66,80** | **68,64** | **70,48** | **72,32** | **74,16** | **76,00** | **Dinas PU** |
| 5.1. | Sasaran 1 : Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang terpadu yang berkelanjutan guna mendukung konektivitas wilayah | Persentase kesesuaian RTRW dengan pemanfaatan ruang | Persen | 80,00 | 80,20 | 84,16 | 88,12 | 92,08 | 96,04 | 100,00 | Dinas PU |
| | | Persentase rumah tangga dengan air minum layak | Persen | 90,36 | 90,40 | 90,72 | 91,04 | 91,36 | 91,68 | 92,00 | BPS |
| | | Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi layak | Persen | 80,82 | 82,24 | 83,67 | 85,09 | 86,51 | 87,94 | 89,36 | BPS |
| | | Persentase Rumah Layak Huni | Persen | 72,08 | 73,28 | 74,48 | 75,68 | 76,88 | 78,08 | 79,28 | Susenas |
| | | Rasio Konektivitas Kabupaten | Rasio | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | DISHUB |

| NO. | VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN KINERJA | 2024 (*baseline*) | TARGET CAPAIAN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2030 | |
| | **Misi 5 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan** | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Tujuan 6 : Terwujudnya keberlajutan pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana** | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **Indeks** | **76,29** | **76,94** | **77,60** | **78,25** | **78,90** | **79,55** | **80,2** | **KLHK** |
| 6.1. | Sasaran 1 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis kesadaran masyarakat | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 88,99 | 90,90 | 90,96 | 91,01 | 91,07 | 91,13 | 91,19 | KLHK |
| | | Indeks Kualitas Air | Indeks | 63,33 | 64,60 | 65,87 | 67,14 | 68,41 | 69,68 | 70,95 | KLHK |
| | | Timbulan sampah terkelola di fasilitas pengolahan sampah | Persen | 18,22 | 21,77 | 24,17 | 26,57 | 28,97 | 31,37 | 33,77 | KLHK |
| 6.2. | Sasaran 2 : Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | BNPB |
| | | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Indeks | 137,60 | 137,59 | 137,58 | 137,57 | 137,56 | 137,55 | 137,54 | BNPB |

## 3.2 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah merupakan instrumen utama dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya selama periode RPJMK 2025–2029. Strategi pembangunan dirumuskan sebagai langkah-langkah pokok yang bersifat jangka menengah, sementara arah kebijakan menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang lebih operasional. Selanjutnya, program prioritas ditetapkan untuk memastikan keterpaduan, konsistensi, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta sejalan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.

### 3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMK Tahun 2025-2029

Arah kebijakan RPJMK sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri 86 Tahun 2018 harus mengacu kepada RPJPD. Oleh karena itu, RPJM Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029 harus mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan tahap ke-1 RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045.

Pada Tahap ini merupakan penguatan Fondasi Transformasi dengan fokus sebagai berikut :

a. Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
b. Transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan berkisar antara 4,28 – 4,51 persen pertahun, upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset dan inovasi serta produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya, pembangunan perkotaan di pusat-pusat kecamatan, Transisi energi difokuskan pada pemanfaatan Energy Storoge System (ESS), pengembangan PLTA dan PLTB, implementasi carbon credit, peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga serta infrastruktur pendukungnya, dan pengembangan sistem jaringan kelistrikan energi terbarukan.
c. Transformasi tata kelola birokrasi difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi untuk penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis

sistem merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

d. Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi, stabilitas ekonomi, implementasi Syariat Islam, penguatan stabilitas politik lokal dan nasional, pembaharuan substansi hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan dan kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian Aceh yang berkelanjutan, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan individu dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol lokal dan nasional yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. pemantapan pelaksanaan regulasi dan nilai Syariat Islam, memperkuat implementasi otonomi khusus Aceh.
e. Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan konektifitas antar wilayah seperti pembangunan jalan dua jalur di ibu kota kabupaten jalan Kabupaten dalam keadaan mantap yang terhubung langsung dengan jalan Provinsi Aceh dan Jalan Nasional, pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, pembangunan infrastruktur Kabupaten Pidie Jaya mengarah kepada pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan serta ramah lingkungan.
f. Penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar) terutama pada kecamatan dengan dengan tingkat kemiskinan masih sangat tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, melanjutkan penyediaan perumahan yang layak, sanitasi dan air minum serta penyediaan infrastruktur SDA, terutama pelestarian dan mendukung produktivitas pertanian dan penyediaan air bersih serta untuk pengendalian banjir.
g. Ketahanan ekologi difokuskan; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam beradaptasi menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan

standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK. Transisi energi difokuskan pada pemanfaatan Energy Storoge System (ESS), implementasi carbon credit, peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya, tetap mempertahankan moratorium hutan, dan perkuatan kelestarian hutan, serta menjaga keletarian satwa liar agar tetap nyaman di habitatnya serta pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Kesinambungan pembiayaan pembangunan, melalui keberlanjutan dana otsus, reformasi tata kelola mobilisasi dan optimalisasi pembangunan non pemerintah seperti keterlibatan perusahaan dengan CSRnya, LSM funding, dioptimalkan fiskal terutama Pendapatan Asli Daerah, serta pembiayaan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 – 2029 dengan tujuan dan sasaran pembangunan, maka selanjutnya disusun Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.4 dan Tabel. 3.5 sebagai berikut :

**Tabel 3.4.**
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029**

**VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PIDIE JAYA YANG BERSYARIAT, BERKEADILAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN**

| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Misi 1 : Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien** | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya kehidupan masyarakat islami | 1.1 | Meningkatnya implementasi nilai-nilai syariat islam dalam tatanan masyarakat | 1.1.1 | Meningkatkan peran serta masyarakat, aparatur dan tokoh agama dalam pembinaan akidah, syariat dan akhlak | Memperkuat kelembagaan dan koordinasi pelaksanaan syariat Islam di tingkat kabupaten hingga gampong. |
| | | | | | | Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam melalui pendidikan formal dan non-formal . |
| | | | | | | Pembangunan sarana dan prasarana peribadatan Masjid dan Meunasah |
| | | | | | | Pengembangan kompetensi aparatur melalui uji kemampuan baca Al-quran |
| | | | | | | Mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari penerapan syariat dalam sektor ekonomi. |
| | | | | 1.1.2 | Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun budaya damai dan penyelesaian konflik secara partisipatif. | Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban |
| | | | | | | Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar |
| | | | | | | penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas |
| | | | | 1.1.3 | Pemanfaatan ZISWAF secara produktif | Penguatan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara produktif dan transparan. |
| | | 1.2 | Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah yang Islami | 1.2.1 | Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah | Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan |

| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | seni untuk mendukung kebudayaan daerah |
| | | | | | | Pemasyarakatan tata nilai budaya Daerah |
| | | | | | | Pembinaan organisasi budaya dan regenerasi SDM Kebudayaan |
| 2 | Membangun reformasi birokrasi yang moderen dan akuntabel berorientasi dampak | 2.1 | Transformasi pemerintahan berbasis layanan digital. | 2.1.1 | Peningkatan kualitas kinerja penyelenggara pemerintah daerah | Penerapan transformasi digital dalam tatakelola pemerintahan |
| | | | | | | Perbaikan kinerja aparatur daerah berdasarkan sistem merit |
| | | | | | | Penataan kebijakan dan peraturan perundang-undangan |
| | | | | | | Pembentukan prilaku birokrasi yang beretika dan inovatif |
| | | | | | | Peningkatan kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah |
| | | | | | | Penguatan kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif |
| | | | | 2.1.2 | Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan | Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik |
| | | | | | | Peningkatan pemenuhan sarana prasarana informasi dan komunikasi |
| | | | | | | Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah |
| | | | | | | Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah |
| | | | | | | Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) |
| | | | | 2.1.3 | Meningkatkan peran riset dan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah | Peningkatan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan |
| | | | | | | Peningkatan pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan daerah |
| | | | | 2.1.4 | Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur | Peningkatan dan pemenuhan kualitas/kompetensi sumber daya aparatur |

| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Peningkatan manajemen talenta dan meridtrokrasi |
| | | 2.2 | Peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif, inovatif dan responsif | 2.2.1 | Optimalisasi Pemutahiran data melalui sistem informasi kependudukan yang terintergrasi dan pembaruan data rutin | Peningkatan akurasi dan validasi data kependudukan |
| | | | | | | Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital |
| | | | | | | Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan |
| | | | | 2.2.2 | Penguatan fungsi koordinasi wilayah kecamatan | Peningkatan kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan |
| | | | | | | Pengembangan kecamatan sebagai pusat pelayanan administrasi terintegrasi |
| | | | | 2.2.3 | Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Gampong | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa |
| | | | | | | Peningkatan efektivitas kerja sama desa |
| | | | | | | Peningkatan kapasitas lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan |
| | | | | 2.2.4 | Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah | Peningkatan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangunan daerah |
| | | | | | | Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah |
| | | | | | | Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah |
| | | | | 2.2.5 | Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah | Peningkatan tata kelola keuangan daerah |
| | | | | | | Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah |
| | | | | | | Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan daerah |

| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.2.6 | Optimalisasi Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan | Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| | | | | | | Digitalisasi Sistem Pemungutan dan Pelaporan PAD |
| | | | | | | Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak |
| | | | | | | Penguatan Kelembagaan dan SDM Pengelola Pendapatan Daerah |
| | | | | | | Peningkatan pendataan aset |
| | | | | 2.2.7 | Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan |
| | | | | | | Optimalisasi asistensi dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan |
| | | | | 2.2.8 | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan | Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa |
| | | | | 2.2.9 | Penguatan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran | Meningkatkan kapasitas DPRK dalam menjalankan tiga fungsi utama secara efektif dan akuntabel. |
| | | | | | | Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Anggota DPRK |
| | | | | | | peningkatan Modernisasi sistem administrasi dan layanan pendukung DPRK berbasis teknologi informasi. |
| | | | | | | Pengembangan sistem dokumentasi dan manajemen informasi kelembagaan |
| | | | | | | Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan DPRK. |
| | | | | 2.2.10 | Meningkatkan ketahanan ideologi, politik, sosial, dan keamanan daerah guna mendukung stabilitas pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. | Fasilitasi pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, dan kelompok rentan |
| | | | | | | Penguatan ketahanan idiologi dan wawasan kebangsaan |
| | | | | | | Pencegahan dan penanggulangan konflik sosial |

| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila |
| | | | | | | meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi; |
| | | | | 2.2.11 | Penyelesaian komplik agaria dan sengketa tanah, perlindungan hak tanah adat, tanah wakaf, dan tanah ulayatPenyelesaian komplik agaria dan sengketa tanah, perlindungan hak tanah adat, tanah wakaf, dan tanah ulayat | Fasilitasi mediasi konflik antara masyarakat, pemerintah, dan investor |
| | | | | | | Penataan kembali penguasaan tanah terlantar, dan tanah negara |
| | | | | | | Sosialisasi dan pelindungan hukum tanah wakaf dan hak milik ulayat |
| | | | | | | Pemetaan dan pengakuan tanah adat/gampong berbasis masyarakat |
| | | | | | | Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah |
| **Misi 2 : Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan Berkualitas dan Berdaya Saing** | | | | | | |
| 3 | Membangun sumber daya manusia yang unggul | 3.1 | Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdaya saing | 3.1.1 | Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat | Peningkatan akses PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan dayah |
| | | | | | | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan |
| | | | | | | Peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan dayah |
| | | | | | | Pemerataan akses pendidikan dan bantuan bagi kelompok rentan. |
| | | | | | | Pembentukan kurikulum berbasis Syariat pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah |

| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Penguatan pendidikan non-formal berbasis masyarakat |
| | | | | | | Peningkatan sarana dan prasarana PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan dayah |
| | | | | | | Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan |
| | | | | | | Penyediaan beasiswa berprestasi |
| | | | | 3.1.2 | Peningkatan minat baca dan pengelolaan perpustakaan | Peningkatan transformasi perpustakaan gampong |
| | | | | | | Peningkatan perpustakaan keliling |
| | | | | | | Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat |
| | | 3.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 3.2.1 | Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat | Penguatan layanan kesehatan primer berbasis keluarga |
| | | | | | | Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar |
| | | | | | | Peningkatan kualitas dan Pelayanan kesehatan rujukan |
| | | | | | | Peningkatan kualitas penanganan gizi buruk dan prevelensi stunting dengan meningkatkan pelayanan kesehatan anak, balita dan perbaikan gizi |
| | | | | | | Penguatan sistem kewaspadaan dan respon dini penyakit |
| | | | | | | Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak |
| | | | | | | Peningkatan kepatuhan pada standar layanan kesehatan |
| | | | | | | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Kesehatan |
| | | | | | | Ketersediaan dan keterjangkauan obat serta alat kesehatan |
| | | | | | | Penanggulangan penyakit menular yaitu DBD, TB, Diare, Pnemonia, Hepatitis dan leptospirosis serta penyakit tidak menular yaitu seperti hipertensi, DM. |

| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3.2.2 | Peningkatan peran pemuda dalam olahraga | Peningkatan Prestasi Olah raga dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk pemuda dan olah raga |
| | | | | | | Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga |
| | | | | | | Pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlit |
| | | | | 3.2.3 | Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan | Penguatan Kapasitas Pemuda melalui Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | | | | Pengembangan Potensi Pemuda dalam Teknologi Tepat Guna (TTG) |
| | | | | | | Pemberdayaan Pemuda dalam Pengelolaan Dana Desa |
| | | | | | | Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah |
| | | 3.3 | Meningkatkan ketahanan keluarga | 3.3.1 | Peningkatan keluarga sejahtera | Pengendalian penduduk |
| | | | | | | Peningkatan kualitas pelayanan penguatan dan peningkatan kualitas keluarga |
| | | | | | | Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); |
| | | | | | | Peningkatan kualitas pemenuhan hak anak |
| | | | | | | Peningkatan kualitas pemantauan dan pelayanan tumbuh kembang anak |
| | | | | | | penguatan kelembagaan penyelenggara pemenuhan hak anak seperti forum anak dan lembaga peduli anak |
| | | | | | | Peningkatan jumlah perempuan pada lembaga legislatif, dan juga lembaga profesional |
| | | | | 3.3.2 | Peningkatan kesejahteraan sosial yang adaptif | Peningkatan kualitas hidup dan kemandirian PPKS |

| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi |
| | | | | | | Peningkatan peran dan kompetensi PSKS dan TKSK dalam membangun kesejahteraan PPKS |
| **Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian yang Bertumpu pada Potensi Lokal dan regional melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** | | | | | | |
| 4 | Mewujudkan struktur dan produktifitas perekonomian melalui hilirisasi sumber daya alam yang kompetitif | 4.1 | Meningkatnya nilai tambah perekonomian yang berdaya saing | 4.1.1 | Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian | Peningkatan sarana dan prasarana pertanian |
| | | | | | | Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian |
| | | | | | | Penguatan pemberdayaan kelembagaan pertanian |
| | | | | | | Peningkatan inovasi produk dalam meningkatkan produksi pertanian |
| | | | | | | Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata |
| | | | | | | Peningkatan kualitas dan kesehatan ternak |
| | | | | 4.1.2 | Meningkatkan pola konsumsi pangan | Peningkatan ketersediaan pangan dengan penyediaan pangan cukup, distribusi pangan dan keanekaragaman pangan lokal |
| | | | | | | Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan |
| | | | | | | Peningkatan ketahanan pangan |
| | | | | 4.1.3 | Meningkatkan produksi nilai tambah perikanan | Peningkatan kualitas penyediaan sarana produksi perikanan |
| | | | | | | Pemenuhan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan |
| | | | | | | Penanganan pasca panen perikanan yang berkualitas |
| | | | | | | Peningkatan pengawasan dan pengendalian |
| | | | | 4.1.4 | Meningkatkan kualitas distinasi wisata | Penguatan kopetensi kelompok masayarakat sadar wisata |
| | | | | | | Peningkatan Promosi dan eksibisi wisata di berbagai even dan media |

| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Peningkatan sarana dan prasarana serta daya tarik wisata pada destinasi wisata |
| | | | | | | Pengembangan produk lokal yang mendukung pariwisata |
| | | | | | | Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi daerah dan Nasional |
| | | 4.2 | Pemerataan ekonomi yang inklusif | 4.2.1 | Meningkatkan Perdangangan, koperasi dan UMKM | Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM |
| | | | | | | Penguatan ekosistem usaha mikro, kecil dan menengah |
| | | | | | | Peningkatan, pemberdayaan dan reformasi koperasi |
| | | | | | | Pengembangan akses pasar dan digitalisasi |
| | | | | | | Revitalisasi infrastruktur perdagangan dan UMKM |
| | | | | | | Pengembangan wirausaha baru dan star-up lokal |
| | | | | | | Meningkatkan Jumlah dan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif |
| | | | | | | Mendorong Integrasi Ekonomi Kreatif dengan Sektor Unggulan Daerah |
| | | | | 4.2.2 | Menurunnya pengganguran Terbuka | Peningkatan Kopetensi tenaga Kerja |
| | | | | | | Peningkatan kinerja pembangunan Ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja |
| | | | | | | Peningkatan investasi dalam rangka pembukaan lapangan kerja baru |

| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penganggur dan atau pencari kerja |
| | | | | 4.2.3 | Meningkatkan nilai investasi | Peningkatan daya dukung investasi |
| | | | | | | Penyederhanaan perizinan dan regulasi |
| | | | | | | Pemenuhan Target realisasi Penanaman Modal |
| | | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Investasi yang Transparan |
| | | | | | | Peningkatan sarana dan prasarana dalam peningkatan investas |
| | | | | | | Penguatan Promosi dan Kemitraan Investasi |
| | | | | 4.2.4 | Mewujudkan Pengembangan ekonomi wilayah | pembangunan kawasan terpadu dan berkelanjutan |
| | | | | | | Peningkatan inrastruktur pendukung transmigrasi |
| | | | | | | Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi |
| | | | | | | Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat trasmigrasi |
| **Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan Keterpaduan Penataan Ruang serta Pemenuhan Kapasitas secara Menyeluruh** | | | | | | |
| 5 | Membangun infrastruktur wilayah yang berkualitas dan terintegrasi | 5.1 | Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang terpadu yang berkelanjutan guna mendukung konektivitas wilayah | 5.1.1 | Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur | Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata |
| | | | | | | Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air |

| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan |
| | | | | | | Penyediaan infrastruktur yang ramah lingkungan mendukung pertumbuhan ekonomi |
| | | | | | | Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman |
| | | | | | | Pemeliharaan infrasruktur secara berskala dan berkelanjutan |
| | | | | | | Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang |
| | | | | | | Penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang |
| | | | | | | Penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang |
| | | | | 5.1.2 | Meningkatkan layanan transportasi yang aman dan nyaman | Peningkatan kualitas layanan transportasi darat |
| | | | | | | Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten |
| **Misi 5 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan** | | | | | | |
| 6 | Terwujudnya keberlajutan pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana | 6.1 | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis kesadaran masyarakat | 6.1.1 | Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup | Pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berskala dan berkelanjutan |
| | | | | | | Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas |
| | | | | | | Penanganan pencemaran lingkungan hidup |
| | | | | | | Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan Ekosistem |
| | | | | | | Peningkatan ketersediaan informasi tentang lingkungan hidup |
| | | | | | | Peningkatan layanan penanganan limbah domestik dan limbah industri |

| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6.1.2 | Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan | Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah |
| | | | | | | Peningkatan layanan penanganan sampah |
| | | 6.2 | Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana | 6.2.1 | Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana | Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu |
| | | | | | | Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan |
| | | | | | | Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi kebencanaan |
| | | | | | | Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana |
| | | | | | | Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana |
| | | | | | | Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana |

**Tabel 3.5.**
**Pentahapan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026-2030**

| PENTAHAPAN PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TAHAP I (2026)** | **TAHAP II (2027)** | **TAHAP III (2028)** | **TAHAP IV (2029)** | **TAHAP V (2030)** |
| Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi dan Sosial Menuju Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan | Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah berbasis lingkungan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi lokal | Penguatan Hilirisasi Sumber Daya Lokal dan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang islami, akuntabel, inovatif berbasis digitalisasi serta pembangunan SDM unggul | Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan aman melalui Pemberdayaan Berbasis Kearifan Lokal |

| ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arah kebijakan pada tahap I (2026) difokuskan pada:<br>• Mendukung seluruh program prioritas Nasional (ASTA CITA)<br>• Pemenuhan sarana prasarana dasar pertanian<br>• Penguatan pemberdayaan kelembagaan pertanian<br>• Standarisasi harga pangan<br>• Perbaikan irigasi primer, sekunder, dan tersier.<br>• Penyediaan benih/bibit unggul pertanian dan percetakan sawah baru.<br>• Pengembangan produksi ayam bertelur di 8 kecamatan.<br>• Penguatan pendidikan berbasis syariah (PBS) tingkat SD dan SMP.<br>• program Magrib Mengaji, dan khatam Juz 'Amma.<br>• Pengadaan guru PBS profesional serta pembinaan imam masjid dan imam meunasah.<br>• Penguatan Baitul Mal Gampong, penertiban dan pendataan tanah wakaf<br>• Program hafalan Al-Qur'an (Juz 30 untuk SD dan Juz 1 untuk SMP).<br>• Pembinaan kader imam masjid, imam meunasah, dan kader tasyhit mayat (pria dan wanita).<br>• Pemberlakuan jam malam bagi anak usia sekolah sebagai disiplin sosial. | Arah kebijakan pada tahap II (2027) difokuskan pada:<br>• Peningkatan jalur distribusi pangan<br>• Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan<br>• Peningkatan inovasi produk dalam meningkatkan produksi pertanian<br>• Pembangunan jalan dua jalur di kawasan ibukota dan jalan kabupaten.<br>• Rehabilitasi jembatan kewenangan kabupaten.<br>• Pembangunan dan penataan pasar di 8 kecamatan.<br>• Peningkatan jalan usaha tani dan jalan perkebunan.<br>• Pengadaan pompanisasi di wilayah sawah tadah hujan.<br>• Normalisasi tambak, sungai, dan kuala untuk menunjang aktivitas nelayan.<br>• Penyediaan kapal nelayan, alat tangkap, dan gudang pengawetan ikan.<br>• Pengembangan klusterik/gudang penyimpan hasil pertanian.<br>• Pemanfaatan lahan terlantar untuk kegiatan ekonomi produktif.<br>• Pemberdayaan koperasi desa berbasis unit usaha.<br>• Penguatan ruang terbuka hijau (RTH) dan mitigasi perubahan iklim daerah.<br>• Penguatan qanun kawasan tanpa rokok dan program lingkungan bersih. | Arah kebijakan pada tahap III (2028) difokuskan pada:<br>• Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata<br>• Pemberdayaan petani kakao berbasis pemukiman.<br>• Penggemukan sapi Aceh untuk peningkatan ketahanan pangan hewani.<br>• Pemberdayaan petani garam.<br>• Peningkatan pengelolaan sampah organik dan penertiban sanitasi masyarakat.<br>• Digitalisasi pendidikan dan peningkatan literasi teknologi.<br>• Pemberdayaan UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal.<br>• Peningkatan jumlah produk bersertifikasi halal.<br>• Hilirisasi komoditas unggulan (kakao, hasil perikanan, garam, dan sapi Aceh).<br>• Pengembangan inovasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis teknologi tepat guna. | Arah kebijakan pada tahap IV (2029) difokuskan pada:<br>• Sistem penilaian ASN berbasis syariat Islam<br>• Membangun Tata kelola pemerintahan Islami.<br>• Sistem pelayanan publik berbasis elektronik (e-government).<br>• Inovasi dalam pemberantasan penyakit menular dan penguatan sistem kesehatan masyarakat.<br>• inisiasi pendirian sekolah kejuruan<br>• peningkatan kompetensi guru inklusi.<br>• Pemantapan digitalisasi layanan publik dan sistem informasi daerah.<br>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan<br>• Pembinaan karakter islami bagi ASN dan Non ASN, Tenaga Pendidik, Tenaga Penyuluh, Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan (*public servant*) | Arah kebijakan pada tahap V (2030) difokuskan pada:<br>• Pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal melalui koperasi, UMKM, dan sektor informal.<br>• Membangun ketahanan sosial masyarakat berbasis adat dan budaya gampong.<br>• Meningkatkan penanganan konflik sosial masyarakat<br>• Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat<br>• Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan<br>• Merawat perdamaian dan penjaminan stabilitas daerah<br>• Menciptakan gampong mandiri bersyariat |

| ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| • Program pengurangan angka stunting dan peningkatan pelayanan posyandu.<br>• Penguatan sarana dan prasarana kesehatan (termasuk ruang rawat ODGJ). | • Pembangunan infrastruktur berbasis ekonomi berwawasan lingkungan.<br>• Penataan TPA dan pengadaan kontainer sampah.<br>• Pembangunan Landmark pusat perkantoran dan kota meureudu (menara tauhid dan monumen maskot Pidie Jaya)<br>• Penerapan inovasi pengelolaan lingkungan berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat. | | | |

### 3.2.2 Program Prioritas Daerah untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMK Tahun 2025-2029

Program prioritas daerah merupakan wujud konkret dari strategi dan arah kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk menjawab permasalahan mendasar, sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Pidie Jaya. Penyusunan program prioritas ini berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMK 2025–2029, dengan fokus pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, program prioritas ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi instrumen untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembangunan, tetapi juga menjamin adanya konsistensi, keterpaduan, dan kesinambungan antar sektor serta antar wilayah. Melalui pelaksanaan program prioritas, diharapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dapat diwujudkan secara lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun kaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan sasaran dengan program perangkat daerah disajikan pada Tabel 3.6

**Tabel 3.6.**
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran dengan Program Perangkat Daerah**
**Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029**

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VISI : Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya yang Bersyariat, Berkeadilan, Maju dan Berkelanjutan** | | | | | | |
| **Misi 1 : Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien** | **Terwujudnya kehidupan masyarakat Islami** | | | **Indeks Pembangunan Syariat** | | |
| | | **Meningkatnya implementasi nilai-nilai syariat islam dalam tatanan masyarakat** | | **Capaian dimensi Aqidah** | | |
| | | | | **Capaian dimensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS)** | | |
| | | | | **Capaian dimensi Kepatuhan membayar Zakat di Baitul Mal** | | |
| | | | | **Capaian dimensi Melek Al-Quran** | | |
| | | | | **Capaian dimensi Manajemen Mesjid/Meunasah** | | |
| | | | | **Capaian dimensi Hukum Jinayat** | | |
| | | | | **Capaian dimensi Akhlak** | | |
| | | | | **Jumlah Produk Tersertifikasi Halal** | | |
| | | | | **Indeks Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat** | | |
| | | | | **Indeks Zakat Nasional** | | |
| | | | Meningkatnya pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh | Persentase Mesjid dan Tempat Ibadah Yang Menjalankan Fungsi Idarah, Imarah dan Riayah Sesuai Klasifikasinya | PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH | Dinas Syariat Islam |
| | | | Meningkatnya peran ulama dalam pelaksanaan Syariat Islam | Persentase Fatwa Ulama yang Disosialisasikan, Persentase Kajian Keagamaan dan Persentase Peningkatan Kader Ulama | PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH | Sekretariat MPU |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Qanun dan Perbup | Persentase Qanun dan Perbup yang Ditegakkan | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Satpol PP dan WH |
| | | | Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas | | |
| | | | Meningkatnya pendapatan dari Zakat, Infaq, Wakaf dan Harta Agama Lainnya. | Rasio Penyaluran Terhadap Pengumpulan Zakat, Infaq, Wakaf dan Harta Agama Lainnya. | PROGRAM BAITUL MAL | Sekretariat Baitul Mal |
| | | **Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah yang Islami** | **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)** | | | |
| | | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | DISDIKBUD |
| | | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | DISDIKBUD |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | DISDIKBUD |
| | | | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | DISDIKBUD |
| | | | | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan | | |
| | | | Meningkatnya tata kelola museum | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | DISDIKBUD |
| | | | Meningkatnya Pelestarian Adat Istiadat Daerah | Persentase Pelestarian Adat Istiadat Daerah | PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA) | Sekretariat MAA |
| | **Membangun reformasi birokrasi yang moderen dan akuntabel berorientasi dampak** | | | **Indeks Reformasi Birokrasi** | | |
| | | **Transformasi pemerintahan berbasis layanan digital.** | | **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** | | |
| | | | | **Indeks Inovasi Daerah** | | |
| | | | | **Indeks Profesionalitas ASN** | | |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | BKPSDM |
| | | | Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | | BKPSDM |
| | | | Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya | | BKPSDM |
| | | | Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik | | BKPSDM |
| | | | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BKPSDM |
| | | | Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan | | BKPSDM |
| | | | Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi | | BKPSDM |
| | | | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis | Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis | | BKPSDM |
| | | | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | BAPPEDA |
| | | | Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah | | BAPPEDA |
| | | | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | DISKOMINFO STATISTIK dan PERSANDIAN |
| | | | | Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | Indeks SPBE | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | DISKOMINFO STATISTIK dan PERSANDIAN |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | DISKOMINFO STATISTIK dan PERSANDIAN |
| | | | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | DISKOMINFO STATISTIK dan PERSANDIAN |
| | | **Peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif, inovatif dan responsif** | | **Indeks Pelayanan Publik** | | |
| | | | | **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)** | | |
| | | | | **Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | | |
| | | | | **Nilai capaian Monitoring Center for Prevention (MCP)** | | |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SETDAKAB |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | SETDAKAB |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | DISDUKCAPIL |
| | | | | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | | DISDUKCAPIL |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | DISDUKCAPIL |
| | | | | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | | DISDUKCAPIL |
| | | | | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | | DISDUKCAPIL |
| | | | | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | | DISDUKCAPIL |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan | Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DISDUKCAPIL |
| | | | Meningkatnya kualitas profil kependudukan | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudkan | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | DISDUKCAPIL |
| | | | Meningkatnya kualitas penataan desa | Persentase Fasilitasi Penataan Desa | PROGRAM PENATAAN DESA | DPMG |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya efektivitas kerja sama desa | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | DPMG |
| | | | Meningkatnya kapasitas lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | DPMG |
| | | | | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | | DPMG |
| | | | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | DPMG |
| | | | | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | | DPMG |
| | | | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat | | DPMG |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | BAPPEDA |
| | | | | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | | BAPPEDA |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BAPPEDA |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | BAPPEDA |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA | | BAPPEDA |
| | | | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BAPPEDA |
| | | | Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah | | BAPPEDA |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya tata kelola anggaran | Persentase Dokumen Anggaran yang disusun dan disampaikan tepat Waktu | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BPKK |
| | | | Meningkatnya tata kelola aset dearah | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | BPKK |
| | | | Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | BPKK |
| | | | Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan | | BPKK |
| | | | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | INSPEKTORAT |
| | | | Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | Maturitas Penyelenggaraa n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | INSPEKTORAT |
| | | | | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | | INSPEKTORAT |
| | | | Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis | Tingkat Ketersediaan Arsip | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | | Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | | Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundangundan an | Ketepatan Penetapan Qanun APBD Tahun N | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | SEKR. DPRK |
| | | | | Persentase Penetapan Raqan Tahun N | | SEKR. DPRK |
| | | | Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | SEKR. DPRK |
| | | | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | KESBANGPOL |
| | | | Meningkatnya etika dan budaya politik | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN | KESBANGPOL |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | |
| | | | Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | KESBANGPOL |
| | | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | KESBANGPOL |
| | | | Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan | Persentase Penurunan Angka Kriminal | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | KESBANGPOL |
| | | | Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum | Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | Dinas Pertanahan |
| | | | Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan | Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Dinas Pertanahan |
| | | | Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Dinas Pertanahan |
| | | | Meningkatnya pengelolaan tanah kosong | Persentase Tanah Kosong yang Dikelola | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | Dinas Pertanahan |
| | | | Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah | Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Dinas Pertanahan |
| | | | Meningkatnya kejelasan hak-hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat miskin | Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah | PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH | Dinas Pertanahan |
| | | | Meningkatnya kejelasan hak milik atas tanah | Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah | PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN | Dinas Pertanahan |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM bidang pertanahan | Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN | Dinas Pertanahan |
| | | | Meningkatnya tata kelola sistem informasi manajemen pertanahan | Persentase Informasi Petanahanan yang Dimanfaatkan | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN | Dinas Pertanahan |
| | | | Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan | Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan | PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN | Dinas Pertanahan |
| | | | Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong | Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan |
| | | | Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan | Persentase Masyarakat Yang Terlayani | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan |
| | | | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Gampong Yang Melaksanakan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kecamatan |
| | | | Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Gampong | Persentase Gampong Dengan Pertanggungjawaban Yang Sesuai dan Tepat Waktu | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kecamatan |
| | | | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat | Persentase Keaktifan Linmas Dalam Gampong | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan |
| **Misi 2 : Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan Berkualitas dan Berdaya Saing** | **Membangun sumber daya manusia yang unggul** | | | **Indeks Pembangunan Manusia** | | |
| | | **Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdaya saing** | | **Harapan Lama Sekolah** | | |
| | | | | **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat** | | |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah | Persentase Anak Usia 5 -6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | DISDIKBUD |
| | | | | Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS) | | DISDIKBUD |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) | | DISDIKBUD |
| | | | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | DISDIKBUD |
| | | | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | Indeks Pemerataan Guru SD | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | DISDIKBUD |
| | | | | Indeks Pemerataan Guru SMP | | |
| | | | Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan | Persentase Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | DISDIKBUD |
| | | | Meningkatnya Dayah yang Terakreditasi (bertipe) | Persentase Dayah yang Terakreditasi (bertipe) | PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH | Dinas Pendidikan Dayah |
| | | | Meningkatnya kualitas pendidikan daerah | Persentase Rekomendasi Bidang Pendidikn Yang Dikeluarkan Dan Yang Ditindaklanjuti | PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH | Sekretariat MPD |
| | | | Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | | | | | |
| | | **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** | | **Usia Harapan Hidup (UHH)** | | |
| | | | | **Prevalensi Stunting** | | |
| | | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Indek Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan RSUD Pidie Jaya | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | RSUD |
| | | | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan | Persentase ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar di pelayanan kesehatan milik daerah | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Dinkes KB |
| | | | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi syarat | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Dinkes KB |
| | | | | Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat | | Dinkes KB |
| | | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase desa siaga aktif | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Dinkes KB |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Dinkes KB |
| | | | | Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | | Dinkes KB |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalarn pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Dinkes KB |
| | | | | Persentase PUS yang ingin ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) | | Dinkes KB |
| | | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinkes KB |
| | | | Meningkatnya daya saing kepemudaan | Rasio Wirausaha Pemuda | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | DISPORAPAR |
| | | | Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga | Persentase Atlet yang Masuk PELATDA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | DISPORAPAR |
| | | | Meningkatnya kualitas kepramukaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | DISPORAPAR |
| | | **Meningkatkan ketahanan keluarga** | | **PDRB per kapita** | | |
| | | | | **Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)** | | |
| | | | | **Score Kabupaten Layak anak** | | |
| | | | | **Indeks Kesejahteraan Sosial** | | |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KKK) (BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Dinkes KB |
| | | | | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | | Dinkes KB |
| | | | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Dinsos P3A |
| | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | | Dinsos P3A |
| | | | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Dinsos P3A |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Dinsos P3A |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Dinsos P3A |
| | | | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Dinsos P3A |
| | | | Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Dinsos P3A |
| | | | | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | | Dinsos P3A |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan sosial | Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Dinsos P3A |
| | | | | Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar | | Dinsos P3A |
| | | | | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial | | Dinsos P3A |
| | | | Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Dinsos P3A |
| | | | Meningkatnya rehabilitasi sosial | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Dinsos P3A |
| | | | | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti | | Dinsos P3A |
| | | | | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti | | Dinsos P3A |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti | | Dinsos P3A |
| | | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti | | Dinsos P3A |
| | | | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Dinsos P3A |
| | | | | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi | | Dinsos P3A |
| | | | | Persentase Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin | | Dinsos P3A |
| | | | | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan | | Dinsos P3A |
| **Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian yang Bertumpu pada Potensi Lokal dan regional melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** | **Mewujudkan struktur dan produktifitas perekonomian melalui hilirisasi sumber daya alam yang kompetitif** | | | **Tingkat Kemiskinan** | | |
| | | **Meningkatnya nilai tambah perekonomian yang berdaya saing** | | **Tingkat Inflasi daerah** | | |
| | | | | **Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan** | | |
| | | | | **Indeks Ketahanan Pangan** | | |
| | | | | **Rerata Indeks Perkembangan Harga (IPH)** | | |
| | | | | **Indeks Daya Saing Daerah** | | |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Gabah) | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | DISTANPANGAN |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | Peningkatan Populasi Ternak | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | DISBUNNAK |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | DISTANPANGAN |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | Persentase Peningkatan Prasarana peternakan dalam kondisi Baik | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | DISBUNNAK |
| | | | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Tingkat Pelayanan Kesehatan Hewan | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | DISBUNNAK |
| | | | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase Penanggulangan Penyakit Tanaman | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | DISBUNNAK |
| | | | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase Penanggulangan Penyakit Tanaman | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | DISTANPANGAN |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | DISTANPANGAN |
| | | | | Persentase Peningkatan Score Kelompok Tani | | DISTANPANGAN |
| | | | Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | Persentase Jumlah Cadangan Pangan | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | DISTANPANGAN |
| | | | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | DISTANPANGAN |
| | | | Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | DISTANPANGAN |
| | | | Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | DISTANPANGAN |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | DKP |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | DKP |
| | | | Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati | Luasan Kawasan Konservasi | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | DKP |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | Angka Konsumsi Ikan | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | DKP |
| | | | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | DISPORAPAR |
| | | | Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | DISPORAPAR |
| | | | Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | DISPORAPAR |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase peran masyarakat dalam peningkatan ekonomi bidang pariwisata | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | DISPORAPAR |
| | | **Pemerataan ekonomi yang inklusif** | | **Pertumbuhan Ekonomi** | | |
| | | | | **Tingkat Pengangguran Terbuka** | | |
| | | | | **Indeks gini** | | |
| | | | | **Indeks Desa** | | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | DISPERINDAGKOP |
| | | | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | DISPERINDAGKOP |
| | | | Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi | Persentase Koperasi Aktif | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | DISPERINDAGKOP |
| | | | Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | DISPERINDAGKOP |
| | | | Meningkatnya produktivitas koperasi | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | DISPERINDAGKOP |
| | | | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | DISPERINDAGKOP |
| | | | Meningkatnya daya saing UMKM | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | DISPERINDAGKOP |
| | | | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | DISPERINDAGKOP |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | distribusi barang yang efisien | | | |
| | | | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | DISPERINDAGKOP |
| | | | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Nilai Ekspor Barang | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | DISPERINDAGKOP |
| | | | Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | DISPERINDAGKOP |
| | | | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | DISPERINDAGKOP |
| | | | Meningkatnya realisasi rembangunan industri | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | DISPERINDAGKOP |
| | | | Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | DISPERINDAGKOP |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan informasi industri | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | DISPERINDAGKOP |
| | | | Terkelolanya informasi tenaga kerja | Persentase Rencana Tenaga Kerja yang disusun | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | DPMPTSP NAKERTRANS |
| | | | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | DPMPTSP NAKERTRANS |
| | | | Meningkatnya penempatan tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | DPMPTSP NAKERTRANS |
| | | | Meningkatanya pekerja daerah yang terlindungi | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma dan Hak-Hak Pekerja dalam hubungan Industrial dan jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | DPMPTSP NAKERTRANS |
| | | | Meningkatnya kemudahan berinvestasi | Realisasi Total terhadap Target Investasi | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | DPMPTSP NAKERTRANS |
| | | | Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | DPMPTSP NAKERTRANS |
| | | | Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | DPMPTSP NAKERTRANS |
| | | | Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | DPMPTSP NAKERTRANS |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | | |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | DPMPTSP NAKERTRANS |
| | | | Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi | Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | DPMPTSP NAKERTRANS |
| | | | Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi | Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | DPMPTSP NAKERTRANS |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi | Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | DPMPTSP NAKERTRANS |
| **Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan Keterpaduan Penataan Ruang serta Pemenuhan Kapasitas secara Menyeluruh** | **Membangun infrastruktur wilayah yang berkualitas dan terintegrasi** | | | **Indeks Infrastruktur daerah** | | |
| | | **Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang terpadu yang berkelanjutan guna mendukung konektivitas wilayah** | | **Persentase kesesuaian RTRW dengan pemanfaatan ruang** | | |
| | | | | **Persentase rumah tangga dengan air minum layak** | | |
| | | | | **Akses Terhadap Sanitasi Layak** | | |
| | | | | **Persentase Rumah Layak Huni** | | |
| | | | | **Rasio Konektivitas Kabupaten** | | |
| | | | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Dinas PU |
| | | | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Dinas PU |
| | | | Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Persentase Peningkatan Penataan Bangunan dan Lingkungan | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Dinas PU |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Dinas PU |
| | | | Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Dinas PU |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase Perwujudan terhadap rencana tata ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Dinas PU |
| | | | Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Dinas PU |
| | | | | Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni | | Dinas PU |
| | | | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Dinas PU |
| | | | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh | Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Dinas PU |
| | | | Meningkatnya penyediaan PSU permukiman | Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Dinas PU |
| | | | Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah | Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Dinas PU |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Persentase pengelolaan daerah irigasi dalam kondisi baik | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Dinas PU |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Dinas PU |
| | | | Meningkatnya kualitas sistem drainase Perkotaan | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Dinas PU |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU | DISHUB |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | |
| **Misi 5 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan** | **Terwujudnya keberlajutan pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana** | | | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | | |
| | | **Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis kesadaran masyarakat** | | **Indeks Kualitas Udara** | | |
| | | | | **Indeks Kualitas Air** | | |
| | | | | **Persentase sampah terkelola** | | |
| | | | Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | DLH |
| | | | Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup | Indeks Kualitas Air | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | DLH |
| | | | | Indeks Kualitas Udara | | DLH |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | DLH |
| | | | Menlngkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase Limbah B3 yang Terkelola | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | DLH |
| | | | Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | DLH |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | DLH |
| | | | Meningkatnya tata kelola persampahan | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | DLH |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS (Inmendagri) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya layanan persampahan regional | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan di daerah kab/kota | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Dinas PU |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Layak dan Aman | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Dinas PU |
| | | **Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana** | | **Indeks Ketahanan Daerah** | | |
| | | | | **Indeks Risiko Bencana (IRB)** | | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | BPBD |
| | | | Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | | BPBD |
| | | | Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana | Persentase Penanganan Pasca Bencana | | BPBD |
| | | | Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | BPBD |
| | | | Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | | BPBD |
| | | | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Dinsos P3A |

### 3.2.3 Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Strategis Nasional

Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029 menjelaskan bahwa program strategis nasional diantaranya terdiri dari ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan, pembangunan wilayah pesisir, Pemenuhan layanan dasar di wilayah perbatasan, pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim dan pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah dituntut harus dapat mendukung Program strategis nasional sebagaimana dijelaskan agar tercipta sinkronisasi pembangunan kewilayahan guna mencapai tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Astacita Presiden Repeblik Indonesia.

#### 3.2.3.1. Pembangunan Kewilayahan yang mendukung Kawasan Swasembada Pangan di Pesisir Utara Aceh

Kabupaten Pidie Jaya memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung kawasan swasembada pangan di Pesisir Utara Aceh. Wilayah ini didukung oleh:

1) Lahan pertanian produktif yang cukup luas, khususnya sawah dan ladang pada wilayah dataran rendah dan pesisir.
2) Infrastruktur irigasi dan pertanian yang terus dikembangkan melalui program pemerintah daerah dan pusat.
3) Sumber daya manusia petani yang aktif dan adaptif terhadap inovasi pertanian.
4) Kelembagaan tani dan UMKM pertanian yang mulai berkembang secara terintegrasi dengan rantai nilai pangan.

Sebagai bagian dari kawasan prioritas nasional, Pidie Jaya diarahkan untuk menjadi salah satu lokomotif produksi pangan di wilayah pesisir timur Aceh, khususnya untuk komoditas strategis seperti padi, jagung, kedelai, hortikultura, dan perikanan darat.

**A. Program Prioritas Pangan di Kabupaten Pidie Jaya 2025–2029**

Mengacu pada arah RPJMN dan selaras dengan potensi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menetapkan sejumlah program prioritas dalam rangka mendukung kawasan swasembada pangan nasional, antara lain:

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lahan Pangan

1) Optimalisasi lahan sawah dan lahan kering untuk produksi padi dan palawija.
2) Peningkatan indeks pertanaman melalui rehabilitasi irigasi dan pengaturan air.
3) Pengembangan kawasan jagung terpadu sebagai bagian dari target swasembada jagung nasional.

b. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Produksi

1) Pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berbasis kelompok.
2) Pembangunan gudang penyimpanan, drying center, dan embung pertanian.
3) Perluasan jaringan jalan usaha tani dan akses ke sentra produksi.

c. Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Lokal

1) Budidaya komoditas hortikultura dan pangan lokal berbasis kawasan.
2) Pengembangan kebun pekarangan dan pangan keluarga.
3) Fasilitasi pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah.

d. Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Petani

1) Pembentukan klaster produksi pangan berbasis BUMDes atau koperasi tani.
2) Pemberdayaan petani melalui pelatihan, pembiayaan KUR, dan kemitraan komersial.
3) Pembangunan model pertanian modern berbasis kawasan (agropolitan).

**B. Kontribusi terhadap Tujuan Nasional**

Melalui pelaksanaan program-program tersebut, Kabupaten Pidie Jaya berkontribusi langsung terhadap pencapaian target RPJMN 2025–2029 dalam bidang ketahanan pangan, antara lain:

- Meningkatkan produksi pangan nasional, khususnya padi dan jagung.
- Menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah pertanian.
- Memperkuat kapasitas petani kecil melalui modernisasi dan kelembagaan.
- Mengurangi ketergantungan impor pangan dengan peningkatan produksi lokal.

Partisipasi Kabupaten Pidie Jaya dalam Kawasan Swasembada Pangan di Pesisir Utara Aceh merupakan bukti konkret komitmen daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Melalui program prioritas pangan yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil, Pidie Jaya siap menjadi salah satu tulang punggung ketahanan pangan di wilayah timur Aceh sekaligus penopang stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat petani.

Penyelarasan Pembangunan Kewilayahan Nasional dan Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

**Tabel 3.7.**
**Penyelarasan Pembangunan Kewilayahan Nasional dan Kabupaten Pidie Jaya**

| No. | Prioritas Program RPJMN (Arah Pembangunan Kewilayahan) | | Program Pembangunan dalam RPJMK |
|---|---|---|---|
| | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi | |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| C1 | Kawasan Swasembada Pangan di Pesisir Utara Aceh | Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah | 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
| | | | 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) | 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| | | | 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan Peternakan) | 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| | | | 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | | 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| | | Pengembangan dan peningkatan produktivitas holtikultura | 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| | | | 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | | 3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| | | | 4. Program Penyuluhan Pertanian |
| | | Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura | 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
| | | | 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |

| No. | Prioritas Program RPJMN (Arah Pembangunan Kewilayahan) | | Program Pembangunan dalam RPJMK |
|---|---|---|---|
| | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi | |
| | | Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik | 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| | | | 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | | 3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| | | | 4. Program Penyuluhan Pertanian |
| | | Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modem/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana Pascapanen | 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| | | | 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | | 3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| | | | 4. Program Penyuluhan Pertanian |
| | | Peningkatan manajemen usala tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/Bapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kaedit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudaig; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama | 1. Program Penyuluhan Pertanian |
| | | | 2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan |

| No. | Prioritas Program RPJMN (Arah Pembangunan Kewilayahan) | | Program Pembangunan dalam RPJMK |
|---|---|---|---|
| | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi | |
| | | | 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Panga |
| | | Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian | 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| | | | 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | | 3. Program Penyuluhan Pertanian |
| | | Pengembangan kawasan sentra produksi garam | 1. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan |
| | | Pengembalgan broodstock center udang | 2. Program pengelolaan perikanan budidaya |
| | | Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Priontas, yaitu Panteraja, Meurah Dua, Ulim | 1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik |
| | | | 2. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum |
| | | | 3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan |

**Tabel 3.8.**
**Dukungan Program Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Utama Nasional**
**Tahun 2025-2029**

| No. | RPJMN TAHUN 2025 - 2029<br>Kegiatan Prioritas Utama (Nasional) | RPJMK PIDIE JAYA TAHUN 2025 - 2029<br>Dukungan Program Daerah |
|---|---|---|
| 1. | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya | 3.27.07 - Program penyuluhan pertanian<br>3.27.05 - Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian<br>1.03.02 - Program pengelolaan sumber daya air (SDA)<br>3.27.02 - Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian<br>3.27.03 - Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian |
| 2. | Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*) | 3.25.06 - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan<br>3.25.03 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap<br>3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya<br>3.25.05 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |
| 3. | Pengembangan Pangan Hewani | 3.27.03 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>3.27.04 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan |

| No. | RPJMN TAHUN 2025 - 2029<br>Kegiatan Prioritas Utama (Nasional) | RPJMK PIDIE JAYA TAHUN 2025 - 2029<br>Dukungan Program Daerah |
|---|---|---|
| | | dan Kesehatan Masyarakat Veteriner<br>3.27.02 - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| 4. | Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati | 2.09.05 - Program Pengawasan Keamanan Pangan<br>2.09.04 - Program Penanganan Kerawanan Pangan<br>2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| 5. | Konservasi Sumber Daya Air | 1.03.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)<br>3.27.03 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| 6. | Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir | 1.03.03 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| 7. | Penuntasan TBC | 1.02.02 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 8. | Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses | 1.02.02 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 9. | Pengembangan Hilirisasi Kelapa | 2.18.02 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal<br>2.18.03 - Program Promosi Penanaman Modal<br>3.27.02 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>3.27.03 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| 10. | Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU | 1.04.05 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)<br>1.04.03 - Program Kawasan Permukiman<br>1.04.04 - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh |

.

**Tabel 3.9.**
**Dukungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terhadap Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029**

| NO. | PROGRAM STRATEGIS NASIONAL | DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA | BIDANG URUSAN PELAKSANA |
|---|---|---|---|
| 1 | **Penanggulangan Kemiskinan** | | |
| a. | Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem | Penyusunan program terpadu pengentasan kemiskinan berbasis data P3KE, DTKS dan DTSEN, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui bantuan UMKM dan program padat karya, pembangunan prasarana pendukung yang bertujuan untuk meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan, bantuan sosial kepada masyarakat guna mengurangi beban pengeluaran. | Kekhususan Aceh, Kelautan dan Perikanan, Pertanian,Pendidikan, Perindustrian, PUPR, Perkim, Sosial, Kesehatan |
| | | Pengadaan kolam bioflok, benih, pakan, dan alat budidaya bagi rumah tangga miskin, disertai pelatihan teknis budidaya (lele, nila, patin, bandeng, kerapu) serta pendampingan pembentukan kelompok pembudidaya skala rumah tangga. | Kelautan dan Perikanan |
| | | Pembinaan dan pengembangan UMKM Naik kelas | Perindustrian |
| | | Melaksanakan kegiatan pasar murah dalam rangka stabilitas harga pangan kususnya untuk masyarakat miskin | Perdagangan |
| b. | Sekolah Rakyat | - Menyiapkan dokumen pendukung pembangunan sekolah rakyat<br>- Penyediaan sarana dan prasarana sekolah rakyat perintis serta dana operasional pendukung.<br>- Menyediakan lahan 7,8 Ha untuk pembangunan sekolah rakyat dan mempersiapkan proses perizinannya | Sosial, Pendidikan |
| c. | Pembangunan 3 Juta Rumah | Mempersiapkan data penerima manfaat rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) - melakukan verifikasi kelayakan penerima *manfaat by name by address* | Perkim |
| 2 | **Ketahanan Pangan** | | |
| a. | Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri | Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Penyiapan dan penguatan tim koordinasi melalui Surat Keputusan Tim Satgas Pangan dan melakukan penerbitan sertifikat setelah dilakukan verifikasi pada kilang penggilingan padi | Pangan |

| NO. | PROGRAM STRATEGIS NASIONAL | DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA | BIDANG URUSAN PELAKSANA |
|---|---|---|---|
| b. | Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah | - Melakukan Pengecekan Mutu/Kualitas Beras di Gudang Bulog sebelum penyaluran.<br>- Melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran beras ke titik salur di setiap Kecamatan.<br>- Memastikan penyaluran tepat waktu dan tepat sasaran PBP (Penerima Bantuan Pangan) sesuai DTSEN yang ada | Pangan |
| c. | Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi | - Membangun sarana dan prasarana pada kawasan peternakan, baik untuk peternakan terintegrasi skala besar maupun untuk peternakan rakyat<br>- Memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan teknis kepada peternak terkait manajemen pakan yang baik, teknik inseminasi buatan untuk perbaikan genetik, serta penanganan kesehatan hewan untuk mencegah wabah penyakit seperti PMK | Pertanian<br>PUPR |
| 3 | **Kesehatan untuk semua** | | |
| a. | Jaminan Kesehatan Nasional | Pemkab Pidie Jaya mengalokasikan anggaran untuk program JKN bersumber dana dari PAD dan pendapatan lainnya | Kesehatan |
| b. | Makan Bergizi Gratis | Pemerintah daerah memastikan kesiapan sarana prasarana pendukung, seperti lahan pembangunan SPPG, sistem distribusi makanan yang higienis dan tepat sasaran serta pengawasan terhadap kualitas makanan. | Kesehatan,<br>Pendidikan |
| c. | Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas | - Menyediakan lahan yang sesuai dan strategis untuk pembangunan rumah sakit.<br>- Penyediaan dana operasional pendukung Rumah sakit.<br>- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan | Kesehatan |
| d. | Program Penuntasan TBC | - memastikan semua fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (seperti Puskesmas) siap dan mampu melakukan deteksi dini, diagnosis, dan pengobatan TBC sesuai standar nasional. Ini termasuk memastikan ketersediaan obat-obatan secara gratis, peralatan diagnostik, serta tenaga kesehatan yang terlatih.<br>- Menggerakkan dan melatih kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta organisasi non-pemerintah untuk membantu penemuan kasus aktif di tengah masyarakat | Kesehatan |
| 4 | **Perluasan Akses Pendidikan** | | |
| a. | Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah | Mempersiapkan readiness criteria, rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama | Pendidikan |
| b. | Penyelenggaraan sekolah unggul | Menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru. | Pendidikan |

| NO. | PROGRAM STRATEGIS NASIONAL | DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA | BIDANG URUSAN PELAKSANA |
|---|---|---|---|
| 5 | **Pertumbuhan Ekonomi** | | |
| a. | Pengendalian Inflasi | Menyiapkan program stabilisasi harga bahan pokok penting dengan kegiatan pemantauan harga bahan pokok penting dan kegiatan operasi pasar dalam hal ini pasar murah yang berkala dan menyeluruh. | Disperindagkop |
| | | - Bantuan alat dan pelatihan pengolahan hasil perikanan<br>- fasilitasi pemasaran produk bernilai tambah. | DKP |
| | | Melakukan kerjasama antar daerah terhadap ketersediaan bahan pokok di daerah | Setdakab (Bag. Ekonomi) |
| | | Melakukan kebijakan tanam serentak dan melaksanakan pemanfaatan lahan terlantar agar produktif serta pemanfaatan lahan perkarangan | Distanpangan |
| b. | Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih | - Memfasilitasi pembuatan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa/gampong,<br>- Memberikan pelatihan untuk peningkatan kompetensi bagi pengurus Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa/gampong,<br>- Memastikan ketersediaan papan nama Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa/gampong | Disperindagkop |
| c. | Kemudahan perizinan di daerah | - Menfasilitasi rekomendasi untuk nelayan dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU.<br>- Memfasilitasi pengurusan Pendirian SPBN | DKP |
| | | - Menfasilitasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)<br>- Melaksanakan kebijakan penyederhanaan proses, mempersingkat waktu, mengurangi beban biaya dalam pengurusan oleh masyarakat ataupun pelaku usaha diantaranya sebagai berikut:<br>1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);<br>2. Digitalisasi Layanan Perizinan;<br>3. Penyederhanaan Prosedur dan Persyaratan;<br>4. Penerapan Standar Pelayanan. | DPMPTSP Nakertrans |

### 3.2.3.2. Sinkronisasi Pembangunan Kewilayahan Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya memiliki karakter geografis yang unik dengan keberadaan kawasan pesisir yang membentang di bagian utara wilayah, menjadi bagian dari wilayah strategis Pesisir Utara Aceh. Wilayah ini tidak hanya berperan penting dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat local terutama melalui sektor perikanan, kelautan, dan perdagangan antarwilayah tetapi juga memiliki posisi strategis dalam konteks pertahanan wilayah, ketahanan pangan, serta mitigasi bencana alam.

Pembangunan wilayah pesisir bukan hanya soal pemanfaatan potensi ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek pemerataan pembangunan, ketahanan ekologis, dan penguatan daya tahan masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim dan ancaman bencana. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 memprioritaskan pembangunan wilayah pesisir sebagai bagian integral dari agenda transformasi daerah, yang diselaraskan secara sistematis dengan RPJMN 2025–2029 serta RPJM Aceh 2025–2029.

Dalam dokumen RPJMN 2025–2029, wilayah pesisir ditempatkan sebagai salah satu fokus pembangunan strategis, dengan perhatian khusus pada penguatan kawasan maritim, peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan pelabuhan rakyat, serta penguatan sistem mitigasi bencana berbasis wilayah pesisir.

Lebih lanjut, Pesisir Utara Aceh, termasuk Kabupaten Pidie Jaya, masuk dalam kategori kawasan rawan bencana tsunami dan abrasi yang memerlukan pendekatan pembangunan yang berbasis pada ketahanan iklim dan pengurangan risiko bencana. Program prioritas nasional yang relevan dengan pembangunan kawasan ini antara lain:

1. Peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan dan dermaga rakyat,
2. Pemberdayaan nelayan skala kecil dan tradisional,
3. Pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT),
4. Rehabilitasi pesisir dan kawasan konservasi mangrove, serta
5. Program peringatan dini dan edukasi kebencanaan di wilayah rawan tsunami.

Sementara itu, dalam RPJM Aceh 2025–2029, wilayah pesisir menjadi prioritas dalam kerangka pembangunan yang berbasis kawasan strategis, dengan fokus pada penguatan ekonomi maritim rakyat, rehabilitasi infrastruktur pesisir, dan pemanfaatan potensi kelautan untuk peningkatan PAD berbasis sumber daya lokal. Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu wilayah pesisir yang paling aktif

dalam sektor perikanan, memiliki peluang besar untuk menjadi simpul penting dalam pembangunan Aceh ke depan.

**A. Arah dan Strategi Pembangunan Wilayah Pesisir Pidie Jaya**

Merespons arah pembangunan nasional dan provinsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menetapkan Pembangunan Wilayah Pesisir sebagai Salah Satu Program Prioritas Pembangunan Daerah, dengan strategi utama yang mencakup:

1. Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir Fokus pada peningkatan kapasitas produksi perikanan tangkap dan budidaya, bantuan alat tangkap ramah lingkungan, pelatihan nelayan, pengembangan koperasi nelayan, serta hilirisasi produk hasil laut melalui UMKM pengolahan hasil perikanan.
2. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Wilayah Pesisir Pembangunan dan rehabilitasi dermaga rakyat, jalan akses ke pelabuhan ikan, pasar ikan higienis, cold storage, dan fasilitas pelelangan ikan yang sesuai standar nasional.
3. Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Pemasangan sistem peringatan dini tsunami (early warning system), rehabilitasi hutan mangrove dan sabuk hijau pantai, penataan permukiman nelayan yang aman dan berketahanan, serta edukasi kebencanaan untuk komunitas pesisir.
4. Revitalisasi Sektor Pariwisata Bahari Pengembangan kawasan wisata pantai secara berkelanjutan, promosi ekonomi kreatif lokal, dan pembangunan sarana penunjang pariwisata seperti infrastruktur jalan, papan informasi wisata, serta pelatihan masyarakat sebagai pelaku wisata berbasis komunitas.
5. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pesisir
6. Pembentukan forum multipihak pengelola kawasan pesisir, pelibatan masyarakat adat dan tokoh lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir, serta peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kecamatan dalam tata kelola pesisir berbasis data dan teknologi.

**B. Harmonisasi dengan Program Prioritas Nasional dan Provinsi**

Agar tidak berjalan secara terpisah dari kebijakan yang lebih luas, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah mengintegrasikan program pembangunan pesisir ini ke dalam peta jalan sinkronisasi pembangunan strategis, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.10.**
**Sinkronisasi Strategi Pembangunan Kewilayahan Nasional, Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya**

| Aspek Strategis | RPJMN 2025–2029 | RPJM Aceh 2025–2029 | RPJMD Pidie Jaya 2025–2029 |
|---|---|---|---|
| Ekonomi maritim rakyat | Pemberdayaan nelayan kecil, SKPT, pelabuhan rakyat | Penguatan ekonomi pesisir | Penguatan koperasi nelayan, sarana distribusi hasil laut |
| Mitigasi bencana | Sistem peringatan dini, pemetaan rawan tsunami | Rehabilitasi pesisir rawan bencana | Pemasangan Early Warning System (EWS), edukasi bencana berbasis komunitas |
| Infrastruktur pesisir | Pembangunan dermaga, cold storage, TPI | Infrastruktur penunjang maritim | Jalan akses pelabuhan, fasilitas pasar ikan |
| Konservasi pesisir | Rehabilitasi mangrove, sabuk hijau pantai | Kawasan lindung pesisir | Penanaman mangrove, kampung iklim pesisir |
| Pariwisata bahari | Ekowisata maritim dan konservasi | Wisata pantai unggulan Aceh | Pengembangan wisata Pantai Meureudu dan sekitarnya |

Dengan pendekatan ini, pembangunan pesisir Pidie Jaya tidak hanya mengisi kekosongan perencanaan sektoral, tetapi secara aktif mendorong keterpaduan dalam pencapaian agenda makro pembangunan nasional dan Aceh.

Wilayah Pesisir Utara Kabupaten Pidie Jaya bukan hanya bentang geografis dengan potensi ekonomi yang besar, tetapi juga merupakan kawasan strategis dalam mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan iklim serta risiko bencana.

Oleh karena itu, pembangunan wilayah pesisir dalam dokumen RPJMD 2025–2029 bukan sekadar program sektoral, melainkan bagian dari visi besar Kabupaten Pidie Jaya untuk menjadi daerah yang berdaya saing, mandiri, dan berkeadilan. Sinkronisasi program prioritas pembangunan pesisir dengan RPJMN dan RPJM Aceh menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dalam satu arah kebijakan nasional dan regional, namun tetap berakar pada konteks lokal yang khas dan dinamis.

**C. Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan RPJMA dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan**

Pengembangan Infrastruktur Pengairan untuk Mendukung Swasembada Pangan di Pesisir Utara Kabupaten Pidie Jaya. Pesisir utara Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu wilayah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan daerah. Wilayah ini mencakup beberapa kecamatan strategis seperti Meureudu, Meurah Dua, dan Ulim, yang secara historis telah menjadi sentra produksi padi dan komoditas pertanian lainnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, produktivitas pertanian di kawasan ini menghadapi tantangan serius, khususnya terkait keterbatasan infrastruktur pengairan yang memadai.

Dalam konteks inilah, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menempatkan pengembangan infrastruktur pengairan sebagai salah satu Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Pengembangan ini bukan sekadar respons teknis terhadap kebutuhan air irigasi, melainkan bagian dari strategi besar untuk mewujudkan swasembada pangan daerah, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan luar daerah, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat petani di wilayah pesisir utara.

Sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Aceh, sebagaimana tercantum dalam RPJM Aceh Tahun 2025–2029, pembangunan infrastruktur pengairan di kawasan pesisir diarahkan untuk mendukung misi peningkatan kapasitas produksi pertanian berbasis kawasan unggulan, sekaligus mempercepat transformasi ekonomi lokal melalui pendekatan hulu-hilir di sektor pertanian dan pangan. RPJM Aceh juga secara eksplisit menekankan pentingnya penguatan sistem irigasi, konservasi air, dan rehabilitasi jaringan pengairan sebagai bagian dari program strategis pembangunan wilayah perdesaan dan kawasan pesisir.

Kondisi eksisting di pesisir utara Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan bahwa sebagian besar lahan pertanian sawah masih mengandalkan sistem irigasi sederhana, baik dari saluran irigasi teknis yang belum optimal maupun dari tadah hujan. Banyak jaringan irigasi primer dan sekunder yang rusak akibat usia bangunan, sedimentasi, serta bencana alam seperti banjir atau gempa yang pernah melanda kawasan ini. Hal ini berdampak langsung pada ketidakstabilan pasokan air, keterlambatan musim tanam, dan rendahnya produktivitas padi.

Tantangan ini diperparah oleh perubahan iklim yang menyebabkan ketidakteraturan pola hujan dan meningkatnya risiko kekeringan musiman. Oleh karena itu, intervensi infrastruktur pengairan bukan lagi sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian dari upaya menciptakan sistem pertanian yang adaptif terhadap

iklim, efisien dalam penggunaan air, dan berkelanjutan secara lingkungan.

Dalam kerangka sinkronisasi antara prioritas daerah dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah merumuskan beberapa strategi utama pengembangan infrastruktur pengairan di wilayah pesisir utara, antara lain:

- Rehabilitasi dan Modernisasi Jaringan Irigasi
  Perbaikan saluran irigasi primer dan sekunder yang rusak, serta peningkatan kapasitas tampung dan efisiensi distribusi air. Program ini akan difokuskan pada daerah irigasi eksisting seperti DI Meureudu dan DI Ulim, yang memiliki cakupan luas dan potensi peningkatan indeks pertanaman.
- Pembangunan Irigasi Tersier dan Sarana Pendukung di Tingkat Usaha Tani
  Pembangunan saluran distribusi dan pembagi air di tingkat kelompok tani untuk menjamin pemerataan pasokan air hingga ke lahan-lahan terpencil.
- Pembangunan Embung dan Kolam Konservasi Air
  Sebagai upaya konservasi sumber daya air untuk menghadapi musim kemarau dan meningkatkan cadangan air untuk kebutuhan pertanian, khususnya di wilayah yang tidak terlayani jaringan irigasi utama.
- Peningkatan Peran Kelembagaan Petani dalam Pengelolaan Irigasi (P3A)
  Penguatan kapasitas kelembagaan petani pengguna air untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang dibangun.

**D. Sinkronisasi dengan Program Strategis Prioritas RPJMA**

Program pengembangan pengairan di Kabupaten Pidie Jaya selaras dengan beberapa fokus prioritas yang diatur dalam RPJM Aceh 2025–2029, antara lain:

- Prioritas "Pertanian Tangguh dan Modern Berbasis Kawasan"
  Mendorong pemanfaatan teknologi irigasi dan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas lahan.
- Prioritas "Penguatan Ekonomi Pesisir dan Perdesaan"
  Melalui integrasi pertanian dengan konservasi lingkungan dan pengelolaan air berkelanjutan.
- Program Strategis Provinsi seperti:
  a) Revitalisasi Lahan Pertanian Pesisir
  b) Peningkatan Irigasi untuk Ketahanan Pangan Daerah
  c) Penguatan Kelembagaan Petani dan Sistem Rantai Pasok Pertanian

Sinkronisasi ini memungkinkan Kabupaten Pidie Jaya untuk mengakses sumber pendanaan bersama, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta

memanfaatkan dukungan teknis dari Pemerintah Provinsi Aceh dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pengairan.

Dengan program pengembangan pengairan yang terstruktur, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menargetkan peningkatan luas lahan panen padi, peningkatan indeks pertanaman dari 1,5 menjadi minimal 2,0 dalam lima tahun ke depan, serta peningkatan produktivitas rata-rata padi hingga 6 ton/ha. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu:

a) Menurunkan ketergantungan petani terhadap musim hujan;
b) Mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan atau kekurangan air;
c) Meningkatkan pendapatan petani melalui intensifikasi pertanian;
d) Mendorong lahirnya sistem pertanian pesisir yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Pengembangan infrastruktur pengairan di wilayah pesisir utara Kabupaten Pidie Jaya bukan sekadar program fisik, melainkan langkah strategis menuju transformasi pertanian pesisir yang berdaya saing, tangguh terhadap perubahan iklim, dan berkontribusi nyata terhadap swasembada pangan daerah. Melalui sinkronisasi yang kuat antara RPJMD Kabupaten Pidie Jaya dan RPJM Aceh 2025–2029, diharapkan tercipta sistem pembangunan lintas level pemerintahan yang harmonis, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tani di pesisir.

Dengan pendekatan yang integratif ini, Kabupaten Pidie Jaya menegaskan komitmennya sebagai bagian dari Aceh yang tidak hanya menjaga ketahanan pangan lokal, tetapi juga turut berperan aktif dalam menciptakan ketahanan pangan provinsi secara menyeluruh.

## E. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), Kawasan Padi Aceh, dan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Dalam kerangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan berkelanjutan, Pemerintah Aceh menetapkan pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP) serta penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP)sebagai bagian dari Kegiatan Prioritas Utama dalam dokumen RPJM Aceh Tahun 2025–2029. Strategi ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan yang merata, stabil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Aceh, sebagai fondasi pembangunan ekonomi rakyat dan daya tahan terhadap krisis pangan di masa mendatang.

Sebagai bagian dari program strategis tersebut, Pengembangan Kawasan Padi seluas 20.000 hektar di seluruh Acehmenjadi fokus utama, yang turut

melibatkan Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu wilayah prioritas karena potensi lahan, produktivitas, dan kontribusinya terhadap produksi padi provinsi. Selain itu, Kabupaten Pidie Jaya juga diposisikan sebagai wilayah penting dalam penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk menopang sistem logistik dan ketahanan pangan provinsi secara keseluruhan.

Kabupaten Pidie Jaya memiliki karakteristik wilayah yang sangat mendukung untuk dijadikan sebagai bagian dari Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). Dengan luas lahan sawah lebih dari 22.000 hektar, sistem irigasi yang terus dikembangkan, serta tingginya partisipasi masyarakat dalam sektor pertanian, daerah ini merupakan salah satu basis utama produksi padi di kawasan pesisir utara Aceh.

Sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Padi 20.000 ha yang dirancang Pemerintah Aceh, Pidie Jaya menjadi salah satu kabupaten kontributor utama. Keterlibatan daerah ini akan difokuskan pada:

- Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian padi untuk mendukung target luas tanam dan panen provinsi;
- Modernisasi praktik pertanian melalui adopsi teknologi pertanian tepat guna;
- Pengembangan kawasan pertanian berbasis klaster, yang terintegrasi dari hulu ke hilir;
- Penguatan infrastruktur pendukung pertanian, termasuk jalan usaha tani, sarana pascapanen, serta akses ke pasar.

Melalui sinergi dengan Pemerintah Aceh, pengembangan kawasan padi ini juga akan mendorong peningkatan nilai tambah bagi petani, memperkuat sistem agribisnis lokal, serta memperluas lapangan kerja di sektor pertanian.

Selain pengembangan produksi, aspek cadangan pangan pemerintah (CPP) menjadi perhatian penting dalam membangun sistem pangan yang tangguh dan responsif terhadap krisis. Pemerintah Aceh, dalam RPJM 2025–2029, mendorong agar setiap kabupaten/kota berperan aktif dalam penyediaan, pengelolaan, dan pendistribusian cadangan pangan daerah.

Kabupaten Pidie Jaya telah diarahkan untuk mendukung agenda tersebut melalui beberapa strategi kunci:

a) Pembangunan gudang cadangan pangan daerah di lokasi-lokasi strategis, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten;
b) Penguatan kelembagaan pengelola pangan seperti Dinas Ketahanan Pangan, BUMDes, dan koperasi tani, agar mampu mengelola stok pangan dengan efektif;

c) Sistem informasi dan pemantauan cadangan pangan, sebagai bagian dari sistem peringatan dini terhadap potensi krisis pangan lokal;
d) Kerja sama dengan Bulog dan mitra distribusi, untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasar lokal, khususnya saat terjadi lonjakan harga atau gangguan distribusi.

Penguatan CPP ini menjadi elemen penting dari sistem pangan terintegrasi, yang mendukung produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan dalam satu kesatuan kebijakan.

Secara substansial, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang terkait dengan KSPP, kawasan padi, dan CPP telah diselaraskan dengan RPJM Aceh 2025–2029 melalui pendekatan sinkronisasi lintas level pemerintahan. Hal ini tercermin dalam integrasi sasaran, indikator, dan target pembangunan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.11.**
**Integrasi Sasaran, Indikator, Dan Target Pembangunan Kewilayahan Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya**

| Program Strategis RPJM Aceh | Implementasi di Pidie Jaya (RPJMD 2025–2029) |
|---|---|
| Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) | Optimalisasi lahan pertanian dan pengembangan klaster padi |
| Kawasan Padi 20.000 Ha Seluruh Aceh | Kontribusi ±3.000–4.000 ha lahan padi dari Pidie Jaya |
| Modernisasi Pertanian dan Alsintan | Distribusi alat mesin pertanian, irigasi modern, dan pelatihan petani |
| Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) | Pembangunan gudang pangan, sistem logistik daerah, dan distribusi CPP |
| Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Berkelanjutan | Program swasembada beras dan cadangan pangan daerah yang memadai |

Dengan sinkronisasi tersebut, maka pembangunan pertanian di Kabupaten Pidie Jaya tidak hanya menjadi prioritas daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dari struktur ketahanan pangan Aceh secara menyeluruh.

Melalui pelaksanaan program KSPP, kawasan padi, dan CPP, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menargetkan sejumlah capaian konkret dalam lima tahun ke depan, antara lain:

a. Peningkatan luas panen padi secara konsisten hingga mencapai 20.000 ha (kontribusi Aceh);
b. Peningkatan produktivitas padi dari rata-rata 5,4 ton/ha menjadi ≥6 ton/ha;
c. Terbentuknya minimal 2 unit lumbung pangan kabupaten dan 10 unit lumbung desa;
d. Terbangunnya sistem informasi pangan dan cadangan pangan berbasis digital;

e. Terjaminnya pasokan pangan lokal dalam kondisi normal maupun darurat.

Capaian ini akan menjadi pilar penting dalam membentuk ekosistem pangan daerah yang kuat, sekaligus meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat tani.

Keterlibatan Kabupaten Pidie Jaya dalam program prioritas Pemerintah Aceh terutama pengembangan kawasan padi, sentra produksi pangan, dan cadangan pangan pemerintah—merupakan bukti nyata dari pendekatan pembangunan daerah yang terintegrasi secara vertikal dan berbasis potensi lokal. Program-program ini menjadi titik strategis dalam mendorong transformasi sektor pertanian dari sekadar sektor subsisten menuju sistem agribisnis yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing.

Dengan dukungan kebijakan yang terarah, partisipasi aktif masyarakat tani, serta kemitraan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, Kabupaten Pidie Jaya diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai penopang utama lumbung pangan Aceh, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan stabilitas pangan masyarakat secara luas.

## F. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Lainnya.

Sejalan dengan mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya sebagai daerah yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berbasis potensi lokal, maka sektor pertanian menjadi salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan struktur ekonomi Kabupaten Pidie Jaya yang masih didominasi oleh sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB dan pendapatan masyarakat pedesaan.

Penguatan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, serta keberlanjutan usaha tani, sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan di tingkat daerah. Dalam kerangka itu, pengembangan komoditas strategis seperti jagung menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan jangka menengah daerah.

Sinkronisasi dengan RPJM Aceh 2025–2029 Program prioritas Kabupaten Pidie Jaya diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam RPJM Aceh Tahun 2025–2029. Salah satu kegiatan utama Provinsi Aceh dalam periode tersebut adalah Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau Lumbung Pangan Lainnya, dengan fokus pada pengembangan kawasan jagung seluas 10.000 hektare di berbagai kabupaten/kota di Aceh.

Kabupaten Pidie Jaya termasuk salah satu wilayah prioritas dalam program

strategis tersebut, berdasarkan pertimbangan:

1) Ketersediaan lahan potensial dan subur,
2) Dukungan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani,
3) Adanya kelompok tani aktif dan kelembagaan petani yang solid,
4) Komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan komoditas jagung sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Sinkronisasi ini menunjukkan keterpaduan perencanaan antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan regional, khususnya dalam aspek ketahanan pangan, pemberdayaan petani, dan pertumbuhan ekonomi berbasis agribisnis.

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Aceh terkait pengembangan kawasan jagung 10.000 ha, Kabupaten Pidie Jaya menetapkan pengembangan kawasan jagung terpadu sebagai salah satu program prioritas RPJMD 2025–2029. Program ini mencakup berbagai kegiatan utama sebagai berikut:

a. Perluasan dan Intensifikasi Lahan Jagung
- Identifikasi dan pemetaan lahan potensial di kecamatan-kecamatan sentra pertanian.
- Pemanfaatan lahan tadah hujan dan lahan nonproduktif menjadi kawasan jagung produktif.
- Penguatan irigasi dan konservasi lahan.

b. Pengadaan Sarana Produksi Pertanian
- Penyediaan benih unggul, pupuk, pestisida ramah lingkungan, dan alat mesin pertanian (alsintan).
- Bantuan sarana produksi melalui program bantuan pemerintah dan fasilitasi KUR untuk petani.

c. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Penunjang
- Pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha tani, embung, dan saluran irigasi kecil.
- Pembangunan gudang penyimpanan, fasilitas pengeringan (dryer), dan unit pengolahan hasil jagung.

d. Penguatan Kelembagaan dan SDM Petani
- Pelatihan teknis budidaya jagung modern dan pascapanen.
- Penguatan kelembagaan kelompok tani dan kemitraan dengan offtaker atau pelaku industri pakan ternak.

e. Pengembangan Akses Pasar dan Hilirisasi
- Penguatan rantai nilai jagung dari hulu ke hilir.

- Fasilitasi pemasaran hasil jagung ke industri pakan dan pengolahan pangan.
- Pengembangan produk olahan berbasis jagung untuk mendukung UMKM lokal.

Untuk mengukur keberhasilan program prioritas ini, ditetapkan beberapa indikator utama, antara lain:

**Tabel 3.12.**
**Indikator Keberhasilan Pengembangan Kawasan Jagung di Kabupaten Pidie Jaya**

| Indikator | Target 2025–2029 |
|---|---|
| Luas tanam jagung (ha) | Bertambah secara bertahap untuk mendukung 10.000 ha target provinsi |
| Produksi jagung (ton) | Meningkat setiap tahun dengan produktivitas >5 ton/ha |
| Petani penerima manfaat (KK) | Seluruh petani di kawasan prioritas |
| Infrastruktur pendukung yang dibangun | Jalan usaha tani, gudang, dryer, irigasi |
| Jumlah kelompok tani terlibat | Minimal 100 kelompok tani aktif |
| Unit pengolahan hasil jagung | Tersedia di setiap kecamatan sentra produksi |

Program pengembangan kawasan jagung ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya, antara lain:

a) Meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi angka kemiskinan pedesaan.
b) Menciptakan lapangan kerja baru di sektor agribisnis.
c) Memperkuat ketahanan pangan daerah dan provinsi.
d) Menjadikan Pidie Jaya sebagai sentra produksi jagung di Pantai Timur Aceh.

Sebagai bentuk implementasi dari visi pembangunan daerah serta untuk menjawab tantangan struktural yang dihadapi sektor garam, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya merumuskan arah kebijakan pembangunan industri garam dalam RPJMD 2025–2029 secara lebih fokus dan terstruktur, yang mencakup aspek hulu hingga hilir serta penguatan ekosistem pendukungnya. Arah kebijakan ini secara prinsip bertujuan untuk:

1. Mewujudkan Pidie Jaya sebagai salah satu sentra produksi garam nasional yang terintegrasi, dengan kemampuan menghasilkan garam berkualitas industri serta bernilai tambah tinggi.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia petani garam, agar mampu beradaptasi dengan transformasi sistem produksi dan mekanisme pasar modern.

3. Mendorong investasi sektor hilir dan pengolahan garam, guna memperkuat kemandirian ekonomi lokal dan menekan defisit neraca perdagangan nasional atas impor garam industri.
4. Menata ulang kebijakan lintas sektor serta perencanaan spasial dan tata ruang, agar pengembangan sektor garam berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan integrasi sektoral.

Dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menargetkan capaian pembangunan industri garam sebagai berikut:

1. Luas tambak garam modern: meningkat dari 50 ha (2025) menjadi 300 ha (2029).
2. Produksi garam industri meningkat dari ±500 ton menjadi ≥1.500 ton per tahun.
3. Jumlah unit pengolahan garam aktif minimal 1 unit washing plant beroperasi penuh.
4. Jumlah koperasi/klaster garam aktif meningkat dari 1 menjadi minimal 5 unit.
5. Investasi sektor garam meningkat secara progresif dengan partisipasi investor lokal dan nasional.

Berdasarkan pendekatan perencanaan yang holistik, integratif, dan adaptif terhadap kebijakan pusat maupun provinsi, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya meyakini bahwa pengembangan industri garam bukan hanya akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi dalam mencapai swasembada garam nasional dan pengurangan ketergantungan impor. Keberhasilan agenda ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat petani, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam semangat pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Pengembangan industri garam di Kabupaten Pidie Jaya dalam RPJMD 2025–2029 bukan sekadar upaya sektoral, melainkan merupakan bagian dari strategi besar transformasi ekonomi daerah. Melalui perencanaan yang berbasis data, kebijakan yang terintegrasi, serta pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, sektor ini diharapkan dapat tumbuh menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional dan provinsi

Dengan pendekatan terintegrasi antara kebijakan daerah dan nasional, serta kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, Program Ketahanan Pangan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian pangan daerah yang berkelanjutan, tangguh terhadap krisis, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat

# BAB IV
# PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

## 4.1 Program Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan program-program prioritas perangkat daerah sebagai wujud operasionalisasi dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025–2029. Program-program tersebut disusun sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan tingkat provinsi (RPJMA) dan nasional (RPJMN) periode 2025–2029.

Penyusunan program perangkat daerah dalam RPJMK ini didasarkan pada berbagai pendekatan, antara lain evaluasi kinerja pembangunan lima tahun terakhir, identifikasi kebutuhan masyarakat, isu-isu strategis daerah, serta hasil kajian teknokratik dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan melalui proses partisipatif. Selain itu, program yang dirumuskan juga telah memperhatikan rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMK sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Program perangkat daerah dirancang tidak hanya sebagai daftar kegiatan sektoral, melainkan sebagai kerangka kerja yang mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah, indikator kinerja utama (IKU) kepala daerah, serta indikator kinerja daerah (IKD). Setiap program disusun dengan indikator, target kinerja tahunan, serta rencana kebutuhan anggaran yang dapat diukur dan dievaluasi secara periodik.

Melalui penjabaran program perangkat daerah yang sistematis dan berbasis hasil (result-based), diharapkan dokumen RPJMK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan Islami. Informasi rinci mengenai daftar program perangkat daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut.

# Tabel 4. 1
## Program Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026-2030

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| **1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | **195.717.235.460** | | **197.870.125.048** | | **200.046.696.423** | | **202.247.210.083** | | **204.471.929.392** | |
| **1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **157.274.357.460** | | **159.004.375.390** | | **160.753.423.520** | | **162.521.711.179** | | **164.309.450.001** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 78,96 | 80,91 | 82,86 | 153.869.617.938 | 84,81 | 155.562.183.735 | 86,78 | 157.273.367.756 | 88,71 | 159.003.374.801 | 90,66 | 160.752.411.924 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 67,71 | 69,66 | 71,61 | 2.449.656.260 | 73,56 | 2.476.602.478 | 75,51 | 2.503.845.106 | 77,46 | 2.531.387.402 | 79,41 | 2.559.232.663 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 69,51 | 71,46 | 73,41 | 955.083.262 | 75,36 | 965.589.177 | 77,31 | 976.210.658 | 79,26 | 986.948.976 | 81,21 | 997.805.414 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| **1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | | **26.170.014.000** | | **26.457.884.154** | | **26.748.920.879** | | **27.043.159.009** | | **27.340.633.758** | |
| Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah | Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) (%) | 94,30 | 95,20 | 96,10 | 26.170.014.000 | 97,30 | 26.457.884.154 | 98,20 | 26.748.920.879 | 99,10 | 27.043.159.009 | 100,00 | 27.340.633.758 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Persentase Anak Usia 5 -6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) (%) | 77,96 | 79,83 | 81,70 | | 83,50 | | 85,30 | | 87,10 | | 89,10 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS) (%) | 99,30 | 99,40 | 99,50 | | 99,60 | | 99,70 | | 99,80 | | 100,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| **1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | | | **16.000.000** | | **16.176.000** | | **16.353.936** | | **16.533.829** | | **16.715.701** | |
| Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%) | 86,1 | 87,2 | 88,3 | 16.000.000 | 89,4 | 16.176.000 | 90,5 | 16.353.936 | 91,6 | 16.533.829 | 93 | 16.715.701 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| **1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | | **20.000.000** | | **20.220.000** | | **20.442.420** | | **20.667.286** | | **20.894.626** | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | Indeks Pemerataan Guru SD (Indeks) | 0,71 | 0,75 | 0,79 | 20.000.000 | 0,83 | 20.220.000 | 0,87 | 20.442.420 | 0,91 | 20.667.286 | 0,95 | 20.894.626 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Indeks Pemerataan Guru SMP (Indeks) | 0,81 | 0,83 | 0,85 | | 0,87 | | 0,89 | | 0,91 | | 0,95 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| **1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | | | | | **4.000.000** | | **4.044.000** | | **4.088.484** | | **4.133.457** | | **4.178.925** | |
| Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan | Persentase Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%) | 54,46 | 56,23 | 58,00 | 4.000.000 | 62,00 | 4.044.000 | 66,00 | 4.088.484 | 68,00 | 4.133.457 | 72,00 | 4.178.925 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| **1.01.07 - PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH** | | | | | **12.137.864.000** | | **12.271.380.504** | | **12.406.365.689** | | **12.542.835.712** | | **12.680.806.904** | |
| Meningkatnya Dayah yang Terakreditasi (bertipe) | Persentase Dayah yang Terakreditasi (bertipe) (%) | 71,00 | 73,00 | 75,00 | 12.137.864.000 | 76,00 | 12.271.380.504 | 77,00 | 12.406.365.689 | 78,00 | 12.542.835.712 | 79,00 | 12.680.806.904 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan (Dayah) |
| **1.01.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH** | | | | | **95.000.000** | | **96.045.000** | | **97.101.495** | | **98.169.611** | | **99.249.477** | |
| Meningkatnya kualitas pendidikan daerah | Persentase Rekomendasi Bidang Pendidikan Yang Dikeluarkan Dan Yang Ditindaklanjuti (%) | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 95.000.000 | 75,00 | 96.045.000 | 80,00 | 97.101.495 | 90,00 | 98.169.611 | 100,00 | 99.249.477 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan (MPD) |
| **1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | **244.803.929.326** | | **247.496.772.545** | | **250.219.237.042** | | **252.971.648.651** | | **255.754.336.786** | |
| **1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **200.833.520.683** | | **203.042.689.410** | | **205.276.158.993** | | **207.534.196.742** | | **209.817.072.906** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 75,85 | 77,80 | 79,75 | 68.853.653.664 | 81,70 | 69.611.043.854 | 83,65 | 70.376.765.336 | 85,60 | 71.150.909.755 | 87,55 | 71.933.569.762 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 68,01 | 69,96 | 71,91 | 131.979.867.019 | 73,86 | 133.431.645.556 | 75,81 | 134.899.393.657 | 77,76 | 136.383.286.987 | 79,71 | 137.883.503.144 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD) |
| **1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **43.479.100.974** | | **43.957.371.083** | | **44.440.902.165** | | **44.929.752.090** | | **45.423.979.363** | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | 173 | 172 | 163 | 32.607.084.886 | 140 | 32.965.762.819 | 110 | 33.328.386.210 | 93 | 33.694.998.459 | 70 | 34.065.643.442 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%)) | 31,60 | 31,00 | 29,20 | | 27,40 | | 25,60 | | 23,80 | | 22,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan RSUD Pidie Jaya (%) | 83,00 | 85,00 | 87,00 | 10.872.016.088 | 90,00 | 10.991.608.264 | 92,00 | 11.112.515.955 | 95,00 | 11.234.753.631 | 96,00 | 11.358.335.921 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD) |
| **1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | | **180.060.069** | | **182.040.729** | | **184.043.177** | | **186.067.652** | | **188.114.396** | |
| Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan | Persentase ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar di pelayanan kesehatan milik daerah (%) | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 180.060.069 | 94,00 | 182.040.729 | 96,00 | 184.043.177 | 98,00 | 186.067.652 | 100,00 | 188.114.396 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| **1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | | | **209.619.000** | | **211.924.809** | | **214.255.981** | | **216.612.797** | | **218.995.538** | |
| Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi syarat (%) | 83,00 | 85,00 | 87,00 | 209.619.000 | 90,00 | 211.924.809 | 92,00 | 214.255.981 | 95,00 | 216.612.797 | 97,00 | 218.995.538 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat (%) | 83,00 | 85,00 | 87,00 | | 90,00 | | 92,00 | | 95,00 | | 97,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| **1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **101.628.600** | | **102.746.514** | | **103.876.726** | | **105.019.370** | | **106.174.583** | |
| Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase desa siaga aktif (%) | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 101.628.600 | 84,00 | 102.746.514 | 86,00 | 103.876.726 | 88,00 | 105.019.370 | 90,00 | 106.174.583 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | **69.344.413.036** | | **66.063.740.114** | | **70.777.713.156** | | **67.492.962.659** | | **68.346.309.228** | |
| **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **11.034.562.285** | | **11.155.942.470** | | **11.278.657.837** | | **11.402.723.073** | | **11.528.153.027** | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 72,70 | 74,65 | 76,60 | 11.034.562.285 | 78,55 | 11.155.942.470 | 80,50 | 11.278.657.837 | 82,45 | 11.402.723.073 | 84,40 | 11.528.153.027 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | **1.112.000.000** | | **1.124.232.000** | | **1.136.598.552** | | **1.149.101.136** | | **1.161.741.248** | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Persentase pengelolaan daerah irigasi dalam kondisi baik (%) | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 1.112.000.000 | 46,00 | 1.124.232.000 | 47,00 | 1.136.598.552 | 48,00 | 1.149.101.136 | 49,00 | 1.161.741.248 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | | **9.330.376.000** | | **9.433.010.136** | | **9.536.773.247** | | **9.641.677.753** | | **9.747.736.208** | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum (%) | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 9.330.376.000 | 25,00 | 9.433.010.136 | 26,00 | 9.536.773.247 | 27,00 | 9.641.677.753 | 28,00 | 9.747.736.208 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | | | | | **10.000.000** | | **10.110.000** | | **10.221.210** | | **10.333.643** | | **10.447.313** | |
| Meningkatnya layanan persampahan regional | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan di daerah kab/kota (%) | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 10.000.000 | 15,50 | 10.110.000 | 16,00 | 10.221.210 | 16,50 | 10.333.643 | 17,00 | 10.447.313 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | | **20.000.000** | | **20.220.000** | | **20.442.420** | | **20.667.286** | | **20.894.626** | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Layak dan Aman (%) | 22,00 | 22,50 | 23,00 | 20.000.000 | 23,50 | 20.220.000 | 24,00 | 20.442.420 | 24,50 | 20.667.286 | 25,00 | 20.894.626 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | | | **21.502.000** | | **21.738.522** | | **21.977.645** | | **22.219.399** | | **22.463.813** | |
| Meningkatnya kualitas sistem drainase Perkotaan | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%) | 23,50 | 24,00 | 24,50 | 21.502.000 | 25,00 | 21.738.522 | 25,50 | 21.977.645 | 26,00 | 22.219.399 | 26,50 | 22.463.813 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | | | | | **10.000.000** | | **10.110.000** | | **10.221.210** | | **10.333.643** | | **10.447.313** | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%) | 48,00 | 49,00 | 50,00 | 10.000.000 | 51,00 | 10.110.000 | 52,00 | 10.221.210 | 53,00 | 10.333.643 | 54,00 | 10.447.313 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | | | **10.000.000** | | **10.110.000** | | **10.221.210** | | **10.333.643** | | **10.447.313** | |
| Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%) | 58,00 | 60,00 | 62,00 | 10.000.000 | 64,00 | 10.110.000 | 66,00 | 10.221.210 | 68,00 | 10.333.643 | 70,00 | 10.447.313 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | | | **10.000.000** | | **10.110.000** | | **10.221.210** | | **10.333.643** | | **10.447.313** | |
| Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Persentase Peningkatan Penataan Bangunan dan Lingkungan (%) | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 10.000.000 | 8,00 | 10.110.000 | 9,00 | 10.221.210 | 10,00 | 10.333.643 | 11,00 | 10.447.313 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | | **47.719.971.751** | | **44.201.825.975** | | **48.675.713.963** | | **45.148.237.478** | | **45.756.188.070** | |
| Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%) | 39,00 | 39,50 | 40,00 | 47.719.971.751 | 40,50 | 44.201.825.975 | 41,00 | 48.675.713.963 | 41,50 | 45.148.237.478 | 42,00 | 45.756.188.070 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | | **40.000.000** | | **40.044.000** | | **40.088.484** | | **40.133.457** | | **40.178.925** | |
| Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%) | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 40.000.000 | 16,00 | 40.044.000 | 18,00 | 40.088.484 | 20,00 | 40.133.457 | 22,00 | 40.178.925 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | | **26.001.000** | | **26.287.011** | | **26.576.168** | | **26.868.505** | | **27.164.059** | |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase Perwujudan terhadap rencana tata ruang (%) | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 26.001.000 | 15,00 | 26.287.011 | 16,00 | 26.576.168 | 17,00 | 26.868.505 | 18,00 | 27.164.059 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| **1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | **4.472.091.000** | | **4.520.848.401** | | **4.570.142.132** | | **4.619.978.094** | | **4.680.262.254** | |
| **1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | | | **190.004.000** | | **192.094.044** | | **194.207.078** | | **196.343.356** | | **198.503.133** | |
| Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 190.004.000 | 100,00 | 192.094.044 | 100,00 | 194.207.078 | 100,00 | 196.343.356 | 100,00 | 198.503.133 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| program pemerintah | Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| **1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | **40.080.000** | | **40.085.280** | | **40.090.618** | | **40.096.014** | | **50.001.471** | |
| Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (%) | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 40.080.000 | 45,00 | 40.085.280 | 46,00 | 40.090.618 | 47,00 | 40.096.014 | 48,00 | 50.001.471 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| **1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | | | **2.155.000.000** | | **2.178.705.000** | | **2.202.670.755** | | **2.226.900.133** | | **2.251.396.034** | |
| Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh | Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%) | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 2.155.000.000 | 45,00 | 2.178.705.000 | 46,00 | 2.202.670.755 | 47,00 | 2.226.900.133 | 48,00 | 2.251.396.034 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| **1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | | | **2.000.007.000** | | **2.022.007.077** | | **2.044.249.154** | | **2.066.735.895** | | **2.089.469.990** | |
| Meningkatnya penyediaan PSU permukiman | Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase) | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 2.000.007.000 | 46,00 | 2.022.007.077 | 47,00 | 2.044.249.154 | 48,00 | 2.066.735.895 | 49,00 | 2.089.469.990 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| **1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | **87.000.000** | | **87.957.000** | | **88.924.527** | | **89.902.696** | | **90.891.626** | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah | Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (%) | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 87.000.000 | 15,00 | 87.957.000 | 16,00 | 88.924.527 | 17,00 | 89.902.696 | 18,00 | 90.891.626 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| **1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | **8.448.075.271** | | **8.532.675.167** | | **8.618.155.373** | | **8.704.525.069** | | **8.791.793.532** | |
| **1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **6.322.988.811** | | **6.386.158.926** | | **6.449.993.085** | | **6.514.498.285** | | **6.579.681.594** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 69,35 | 71,30 | 73,25 | 3.082.761.348 | 75,20 | 3.113.588.961 | 77,15 | 3.144.724.851 | 79,10 | 3.176.172.100 | 81,05 | 3.207.933.821 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD) |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 65,50 | 67,45 | 69,40 | 3.240.227.463 | 71,35 | 3.272.569.965 | 73,30 | 3.305.268.234 | 75,25 | 3.338.326.185 | 77,20 | 3.371.747.773 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP WH) |
| **1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **178.916.550** | | **180.884.632** | | **182.874.363** | | **184.885.980** | | **186.919.726** | |
| Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Qanun dan Perbup | Persentase Qanun dan Perbup yang Ditegakkan (%) | 89,90 | 90,00 | 90,10 | 59.638.850 | 90,10 | 60.294.878 | 90,10 | 60.958.121 | 90,10 | 61.628.660 | 90,10 | 62.306.576 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP WH) |
| Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%) | 82,60 | 83,30 | 84,00 | 59.638.850 | 85,00 | 60.294.877 | 86,00 | 60.958.121 | 87,00 | 61.628.660 | 88,00 | 62.306.575 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP WH) |
| Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%) | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 59.638.850 | 52,00 | 60.294.877 | 53,00 | 60.958.121 | 54,00 | 61.628.660 | 55,00 | 62.306.575 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP WH) |
| **1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | **950.004.000** | | **954.004.044** | | **958.044.088** | | **962.124.533** | | **966.245.783** | |
| Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%) | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 550.004.000 | 70,00 | 550.004.044 | 75,00 | 550.004.088 | 80,00 | 550.004.133 | 85,00 | 550.004.179 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD) |
| Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%) | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 300.000.000 | 70,00 | 303.000.000 | 75,00 | 306.030.000 | 80,00 | 309.090.300 | 85,00 | 312.181.203 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD) |
| Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana | Persentase Penanganan Pasca Bencana (%) | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 100.000.000 | 70,00 | 101.000.000 | 75,00 | 102.010.000 | 80,00 | 103.030.100 | 85,00 | 104.060.401 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD) |
| **1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | | | **996.165.910** | | **1.011.627.565** | | **1.027.243.837** | | **1.043.016.271** | | **1.058.946.429** | |
| Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%) | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 150.001.000 | 70,00 | 164.457.655 | 75,00 | 179.073.927 | 80,00 | 193.846.361 | 85,00 | 208.776.519 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD) |
| Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%) | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 846.164.910 | 70,00 | 847.169.910 | 75,00 | 848.169.910 | 80,00 | 849.169.910 | 85,00 | 850.169.910 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD) |
| **1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | **10.053.356.437** | | **10.162.037.749** | | **10.261.514.617** | | **10.348.634.952** | | **10.445.995.744** | |
| **1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **3.378.476.435** | | **3.415.639.675** | | **3.453.211.712** | | **3.491.197.041** | | **3.529.600.208** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 75,21 | 77,16 | 79,11 | 3.378.476.435 | 81,06 | 3.415.639.675 | 83,01 | 3.453.211.712 | 84,96 | 3.491.197.041 | 86,91 | 3.529.600.208 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| **1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | | | **1.761.000.000** | | **1.780.371.000** | | **1.799.955.081** | | **1.819.754.586** | | **1.839.771.887** | |
| Meningkatnya | Persentase Pekerja | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 1.761.000.000 | 85,00 | 1.780.371.000 | 90,00 | 1.799.955.081 | 95,00 | 1.819.754.586 | 100,00 | 1.839.771.887 | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| pemberdayaan sosial | Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Sosial |
| | Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti (%) | 70,00 | 75,00 | 80,00 | | 85,00 | | 90,00 | | 95,00 | | 100,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%) | 10,00 | 15,00 | 30,00 | | 45,00 | | 60,00 | | 75,00 | | 90,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| **1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | | | | | **30.000.000** | | **30.330.000** | | **30.663.630** | | **31.000.929** | | **31.341.940** | |
| Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (%) | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 30.000.000 | 38,00 | 30.330.000 | 39,00 | 30.663.630 | 40,00 | 31.000.929 | 41,00 | 31.341.940 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| **1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | | **1.163.500.000** | | **1.170.152.695** | | **1.195.942.100** | | **1.208.466.367** | | **1.227.656.253** | |
| Meningkatnya rehabilitasi sosial | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti (%) | 18,00 | 20,00 | 22,00 | | 25,00 | | 28,00 | | 30,00 | | 35,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti (%) | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 1.163.500.000 | 25,00 | 1.170.152.695 | 28,00 | 1.195.942.100 | 30,00 | 1.208.466.367 | 35,00 | 1.227.656.253 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti (%) | 18,00 | 20,00 | 22,00 | | 25,00 | | 28,00 | | 30,00 | | 35,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 3,00 | 5,00 | 7,00 | | 8,00 | | 9,00 | | 10,00 | | 12,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti (%) | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti (%) | 18,00 | 20,00 | 22,00 | | 25,00 | | 28,00 | | 30,00 | | 35,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| **1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | | | **3.255.380.002** | | **3.293.229.379** | | **3.302.031.629** | | **3.311.028.749** | | **3.322.879.116** | |
| Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | 0,10 | | 0,10 | | 0,10 | | 0,10 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%) | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 3.255.380.002 | 55,00 | 3.293.229.379 | 60,00 | 3.302.031.629 | 65,00 | 3.311.028.749 | 70,00 | 3.322.879.116 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%) | 40,00 | 45,00 | 50,00 | | 55,00 | | 60,00 | | 65,00 | | 70,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%) | 65,00 | 70,00 | 75,00 | | 80,00 | | 85,00 | | 90,00 | | 95,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| **1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | | **465.000.000** | | **472.315.000** | | **479.710.465** | | **487.187.280** | | **494.746.340** | |
| Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase) | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 465.000.000 | 89,00 | 472.315.000 | 91,00 | 479.710.465 | 93,00 | 487.187.280 | 95,00 | 494.746.340 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| **2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | **361.900.000** | | **362.366.173** | | **363.133.118** | | **364.055.074** | | **364.991.434** | |
| **2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | | | | | **5.200.000** | | **5.218.564** | | **5.290.527** | | **5.389.656** | | **5.490.642** | |
| Terkelolanya informasi | Persentase Rencana | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 5.200.000 | 30,00 | 5.218.564 | 35,00 | 5.290.527 | 40,00 | 5.389.656 | 50,00 | 5.490.642 | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| tenaga kerja | Tenaga Kerja yang disusun (%) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Tenaga Kerja |
| **2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | | **323.000.000** | | **323.253.000** | | **323.508.783** | | **323.767.379** | | **324.028.820** | |
| Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%) | 10,00 | 20,00 | 40,00 | 323.000.000 | 50,00 | 323.253.000 | 60,00 | 323.508.783 | 70,00 | 323.767.379 | 80,00 | 324.028.820 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |
| **2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | | **10.000.000** | | **10.110.000** | | **10.221.210** | | **10.333.643** | | **10.447.313** | |
| Meningkatnya penempatan tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%) | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10.000.000 | 10,00 | 10.110.000 | 15,00 | 10.221.210 | 20,00 | 10.333.643 | 25,00 | 10.447.313 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |
| **2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | | **23.700.000** | | **23.784.609** | | **24.112.598** | | **24.564.396** | | **25.024.659** | |
| Meningkatanya pekerja daerah yang terlindungi | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma dan Hak-Hak Pekerja dalam hubungan Industrial dan jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan (Perusahaan) | 30 | 35 | 40 | 23.700.000 | 45 | 23.784.609 | 55 | 24.112.598 | 60 | 24.564.396 | 75 | 25.024.659 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |
| **2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | **493.119.998** | | **497.058.136** | | **513.004.716** | | **543.353.458** | | **564.776.475** | |
| **2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | | | **87.000.000** | | **87.703.290** | | **89.109.870** | | **104.185.068** | | **108.010.883** | |
| Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%) | 28,00 | 30,00 | 32,00 | 87.000.000 | 34,00 | 87.703.290 | 36,00 | 89.109.870 | 38,00 | 104.185.068 | 40,00 | 108.010.883 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) | 58,00 | 60,00 | 62,00 | | 65,00 | | 67,00 | | 68,00 | | 70,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| **2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | | **116.119.998** | | **118.319.546** | | **128.846.172** | | **138.591.389** | | **150.556.679** | |
| Menurunnya kekerasan terhadap perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 116.119.998 | 87,00 | 118.319.546 | 90,00 | 128.846.172 | 92,00 | 138.591.389 | 95,00 | 150.556.679 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Komprehensif (%) | | | | | | | | | | | | | |
| **2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | | | | **103.000.000** | | **103.367.710** | | **104.793.150** | | **106.756.659** | | **108.756.959** | |
| Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%) | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 103.000.000 | 15,00 | 103.367.710 | 17,00 | 104.793.150 | 18,00 | 106.756.659 | 20,00 | 108.756.959 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| **2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | | | | | **20.000.000** | | **20.071.400** | | **20.348.184** | | **20.729.448** | | **21.117.856** | |
| Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%) | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 20.000.000 | 72,00 | 20.071.400 | 75,00 | 20.348.184 | 78,00 | 20.729.448 | 80,00 | 21.117.856 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| **2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | | | **50.000.000** | | **50.178.500** | | **50.870.461** | | **51.823.621** | | **52.794.640** | |
| Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) | 61,78 | 60,23 | 58,68 | 50.000.000 | 56,34 | 50.178.500 | 53,86 | 50.870.461 | 50,72 | 51.823.621 | 48,98 | 52.794.640 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| **2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | | **117.000.000** | | **117.417.690** | | **119.036.879** | | **121.267.273** | | **123.539.458** | |
| Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) | 71,98 | 80,22 | 88,46 | 117.000.000 | 86,51 | 117.417.690 | 85,47 | 119.036.879 | 83,28 | 121.267.273 | 82,44 | 123.539.458 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 67,00 | 70,00 | 73,00 | | 75,00 | | 78,00 | | 80,00 | | 82,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| **2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | **200.000.000** | | **202.200.000** | | **204.424.200** | | **206.672.863** | | **208.946.267** | |
| **2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | | | | | **60.000.000** | | **60.660.000** | | **61.327.260** | | **62.001.859** | | **62.683.880** | |
| Meningkatnya | Persentase Jumlah | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 60.000.000 | 1,00 | 60.660.000 | 1,00 | 61.327.260 | 1,00 | 62.001.859 | 1,00 | 62.683.880 | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | Cadangan Pangan (%) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Pangan |
| **2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | | | **80.000.000** | | **80.880.000** | | **81.769.680** | | **82.669.146** | | **83.578.507** | |
| Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (Skor) | 82,23 | 82,45 | 82,67 | 80.000.000 | 82,89 | 80.880.000 | 83,10 | 81.769.680 | 83,32 | 82.669.146 | 83,54 | 83.578.507 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |
| **2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | | | **30.000.000** | | **30.330.000** | | **30.663.630** | | **31.000.929** | | **31.341.940** | |
| Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 30.000.000 | 8,11 | 30.330.000 | 8,11 | 30.663.630 | 8,11 | 31.000.929 | 8,11 | 31.341.940 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |
| **2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | | | **30.000.000** | | **30.330.000** | | **30.663.630** | | **31.000.929** | | **31.341.940** | |
| Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%) | 73,33 | 73,33 | 73,33 | 30.000.000 | 73,33 | 30.330.000 | 73,33 | 30.663.630 | 73,33 | 31.000.929 | 73,33 | 31.341.940 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |
| **2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | **12.601.791.817** | | **12.751.888.126** | | **12.907.522.879** | | **13.066.796.872** | | **13.097.458.340** | |
| **2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **1.800.789.817** | | **1.820.598.504** | | **1.840.625.088** | | **1.860.871.964** | | **1.881.341.556** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 67,11 | 69,06 | 71,01 | 1.800.789.817 | 72,96 | 1.820.598.504 | 74,91 | 1.840.625.088 | 76,86 | 1.860.871.964 | 78,81 | 1.881.341.556 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| **2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM** | | | | | **9.700.000.000** | | **9.700.000.000** | | **9.700.000.000** | | **9.700.000.000** | | **9.700.000.000** | |
| Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum | Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 9.700.000.000 | 84,00 | 9.700.000.000 | 86,00 | 9.700.000.000 | 88,00 | 9.700.000.000 | 90,00 | 9.700.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Waktu (%) | | | | | | | | | | | | | |
| **2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | | | | | **3.000.000** | | **3.500.000** | | **4.000.000** | | **4.500.000** | | **4.500.000** | |
| Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan | Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (%) | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 3.000.000 | 58,00 | 3.500.000 | 63,00 | 4.000.000 | 68,00 | 4.500.000 | 75,00 | 4.500.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| **2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | | | | | **848.002.000** | | **902.289.622** | | **975.897.791** | | **1.052.924.908** | | **1.063.116.784** | |
| Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%) | 80,00 | 83,00 | 85,00 | 848.002.000 | 87,00 | 902.289.622 | 89,00 | 975.897.791 | 93,00 | 1.052.924.908 | 95,00 | 1.063.116.784 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| **2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG** | | | | | **3.000.000** | | **3.500.000** | | **4.000.000** | | **4.500.000** | | **4.500.000** | |
| Meningkatnya pengelolaan tanah kosong | Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (%) | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 3.000.000 | 79,00 | 3.500.000 | 83,00 | 4.000.000 | 85,00 | 4.500.000 | 89,00 | 4.500.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| **2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | | | | | **3.000.000** | | **3.500.000** | | **4.000.000** | | **4.500.000** | | **4.500.000** | |
| Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah | Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase) | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 3.000.000 | 74,00 | 3.500.000 | 78,00 | 4.000.000 | 82,00 | 4.500.000 | 85,00 | 4.500.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| **2.10.12 - PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH** | | | | | **1.000.000** | | **1.000.000** | | **1.000.000** | | **1.000.000** | | **1.000.000** | |
| Meningkatnya kejelasan hak-hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat miskin | Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Persil) | 20 | 22 | 24 | 1.000.000 | 27 | 1.000.000 | 29 | 1.000.000 | 30 | 1.000.000 | 33 | 1.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| **2.10.13 - PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN** | | | | | **200.000.000** | | **250.000.000** | | **300.000.000** | | **350.000.000** | | **350.000.000** | |
| Meningkatnya kejelasan hak milik atas tanah | Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah (Dokumen) | 25 | 40 | 63 | 200.000.000 | 70 | 250.000.000 | 79 | 300.000.000 | 82 | 350.000.000 | 85 | 350.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| **2.10.14 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN** | | | | | **20.000.000** | | **30.000.000** | | **34.000.000** | | **40.000.000** | | **40.000.000** | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM bidang pertanahan | Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya (%) | 43,00 | 50,00 | 57,00 | 20.000.000 | 68,00 | 30.000.000 | 76,00 | 34.000.000 | 85,00 | 40.000.000 | 89,00 | 40.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| **2.10.16 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN** | | | | | **20.000.000** | | **34.000.000** | | **40.000.000** | | **44.000.000** | | **44.000.000** | |
| Meningkatnya tata kelola sistem informasi manajemen pertanahan | Persentase Informasi Petanahanan yang Dimanfaatkan (%) | 44,00 | 50,00 | 56,00 | 20.000.000 | 71,00 | 34.000.000 | 80,00 | 40.000.000 | 87,00 | 44.000.000 | 87,00 | 44.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| **2.10.17 - PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN** | | | | | **3.000.000** | | **3.500.000** | | **4.000.000** | | **4.500.000** | | **4.500.000** | |
| Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan | Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (%) | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 3.000.000 | 35,00 | 3.500.000 | 39,00 | 4.000.000 | 42,00 | 4.500.000 | 45,00 | 4.500.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | **5.902.407.975** | | **5.966.894.462** | | **6.032.090.300** | | **6.098.003.291** | | **6.164.641.328** | |
| **2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **3.051.564.975** | | **3.085.132.189** | | **3.119.068.643** | | **3.153.378.398** | | **3.188.065.561** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 72,91 | 74,86 | 76,81 | 3.051.564.975 | 78,76 | 3.085.132.189 | 80,71 | 3.119.068.643 | 82,66 | 3.153.378.398 | 84,61 | 3.188.065.561 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| **2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | **5.000.000** | | **5.055.000** | | **5.110.605** | | **5.166.821** | | **5.223.656** | |
| Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%) | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 5.000.000 | 50,00 | 5.055.000 | 50,00 | 5.110.605 | 50,00 | 5.166.821 | 80,00 | 5.223.656 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| **2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | **60.004.000** | | **60.664.044** | | **61.331.348** | | **62.005.993** | | **62.688.059** | |
| Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup | Indeks Kualitas Air (Indeks) | 63,33 | 64,60 | 65,87 | 60.004.000 | 67,14 | 60.664.044 | 68,41 | 61.331.348 | 69,68 | 62.005.993 | 70,95 | 62.688.059 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| | Indeks Kualitas Udara (Indeks) | 88,99 | 90,90 | 90,96 | | 91,01 | | 91,07 | | 91,13 | | 91,19 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | | | **50.002.000** | | **50.552.022** | | **51.108.094** | | **51.670.283** | | **52.238.656** | |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%) | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 50.002.000 | 15,00 | 50.552.022 | 20,00 | 51.108.094 | 25,00 | 51.670.283 | 25,00 | 52.238.656 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| **2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | | | | **55.002.000** | | **55.167.022** | | **55.333.859** | | **55.502.531** | | **55.673.059** | |
| Menlngkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%) | 53,00 | 55,00 | 57,00 | 55.002.000 | 60,00 | 55.167.022 | 63,00 | 55.333.859 | 66,00 | 55.502.531 | 70,00 | 55.673.059 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| **2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | | | **65.000.000** | | **65.715.000** | | **66.437.865** | | **67.168.681** | | **67.907.537** | |
| Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%) | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 65.000.000 | 60,00 | 65.715.000 | 65,00 | 66.437.865 | 70,00 | 67.168.681 | 80,00 | 67.907.537 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| **2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | | **5.000.000** | | **5.055.000** | | **5.110.605** | | **5.166.821** | | **5.223.656** | |
| Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%) | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 5.000.000 | 60,00 | 5.055.000 | 70,00 | 5.110.605 | 80,00 | 5.166.821 | 85,00 | 5.223.656 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| **2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | | | **2.610.835.000** | | **2.639.554.185** | | **2.668.589.281** | | **2.697.943.763** | | **2.727.621.144** | |
| Meningkatnya tata kelola persampahan | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (%) | 25,10 | 35,40 | 43,60 | 2.610.835.000 | 53,70 | 2.639.554.185 | 60,80 | 2.668.589.281 | 68,30 | 2.697.943.763 | 75,40 | 2.727.621.144 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| **2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | **4.546.735.797** | | **4.596.089.889** | | **4.645.986.878** | | **4.696.432.732** | | **4.747.433.493** | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **4.265.448.161** | | **4.312.368.090** | | **4.359.804.139** | | **4.407.761.985** | | **4.456.247.367** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 64,45 | 66,40 | 68,35 | 4.265.448.161 | 70,30 | 4.312.368.090 | 72,25 | 4.359.804.139 | 74,20 | 4.407.761.985 | 76,15 | 4.456.247.367 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| **2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | | | | **206.287.636** | | **208.556.799** | | **210.850.924** | | **213.170.284** | | **215.515.158** | |
| Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) | 3,50 | 5,00 | 20,00 | 206.287.636 | 25,00 | 208.556.799 | 26,00 | 210.850.924 | 26,50 | 213.170.284 | 26,70 | 215.515.158 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%) | 65,00 | 65,50 | 66,00 | | 66,30 | | 66,80 | | 67,00 | | 67,35 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| **2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | | | | **55.000.000** | | **55.055.000** | | **55.110.605** | | **55.166.821** | | **55.223.656** | |
| Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%) | 97,97 | 98,15 | 98,20 | 55.000.000 | 98,27 | 55.055.000 | 98,30 | 55.110.605 | 98,34 | 55.166.821 | 98,36 | 55.223.656 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| **2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | | **15.000.000** | | **15.055.000** | | **15.110.605** | | **15.166.821** | | **15.223.656** | |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 15.000.000 | 100,00 | 15.055.000 | 100,00 | 15.110.605 | 100,00 | 15.166.821 | 100,00 | 15.223.656 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| **2.12.05 - PROGRAM** | | | | | **5.000.000** | | **5.055.000** | | **5.110.605** | | **5.166.821** | | **5.223.656** | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas profil kependudukan | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudkan (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 5.000.000 | 100,00 | 5.055.000 | 100,00 | 5.110.605 | 100,00 | 5.166.821 | 100,00 | 5.223.656 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| **2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | **3.805.064.323** | | **3.846.511.380** | | **3.888.977.003** | | **3.932.188.692** | | **3.975.883.823** | |
| **2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **2.902.624.323** | | **2.934.553.190** | | **2.966.833.275** | | **2.999.468.441** | | **3.032.462.594** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 71,35 | 73,30 | 75,25 | 2.902.624.323 | 77,20 | 2.934.553.190 | 79,15 | 2.966.833.275 | 81,10 | 2.999.468.441 | 83,05 | 3.032.462.594 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| **2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA** | | | | | **25.000.000** | | **25.089.250** | | **25.435.231** | | **25.911.811** | | **26.397.320** | |
| Meningkatnya kualitas penataan desa | Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%) | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 25.000.000 | 18,00 | 25.089.250 | 18,00 | 25.435.231 | 18,00 | 25.911.811 | 18,00 | 26.397.320 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| **2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | | | | | **30.000.000** | | **30.107.100** | | **30.522.277** | | **31.094.173** | | **31.676.784** | |
| Meningkatnya efektivitas kerja sama desa | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%) | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 30.000.000 | 22,00 | 30.107.100 | 23,00 | 30.522.277 | 24,00 | 31.094.173 | 25,00 | 31.676.784 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| **2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **527.440.000** | | **533.241.840** | | **539.107.500** | | **545.037.682** | | **551.033.097** | |
| Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 527.440.000 | 100,00 | 533.241.840 | 100,00 | 539.107.500 | 100,00 | 545.037.682 | 100,00 | 551.033.097 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| **2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT** | | | | | **320.000.000** | | **323.520.000** | | **327.078.720** | | **330.676.585** | | **334.314.028** | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **HUKUM ADAT** | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kapasitas lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%) | 38,00 | 40,00 | 43,00 | 320.000.000 | 48,00 | 323.520.000 | 50,00 | 327.078.720 | 55,00 | 330.676.585 | 58,00 | 334.314.028 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%) | 45,00 | 50,00 | 55,00 | | 60,00 | | 75,00 | | 85,00 | | 100,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | **6.598.975.000** | | **6.671.563.725** | | **6.744.950.925** | | **6.819.145.384** | | **6.894.155.985** | |
| **2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | | | **1.794.400.000** | | **1.814.138.400** | | **1.834.093.922** | | **1.854.268.955** | | **1.874.665.914** | |
| Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk | Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka) | 8,20 | 8,10 | 8,00 | 1.794.400.000 | 7,90 | 1.814.138.400 | 7,80 | 1.834.093.922 | 7,70 | 1.854.268.955 | 7,60 | 1.874.665.914 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (Angka) | 2,36 | 2,35 | 2,34 | | 2,34 | | 2,33 | | 2,20 | | 2,10 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| **2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | | | **2.364.575.000** | | **2.390.585.325** | | **2.416.881.763** | | **2.443.467.462** | | **2.470.345.605** | |
| Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalarn pembinaan Keluarga Berencana (KB | Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (Angka) | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 2.364.575.000 | 65,00 | 2.390.585.325 | 68,00 | 2.416.881.763 | 70,00 | 2.443.467.462 | 72,00 | 2.470.345.605 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase PUS yang ingin ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) (%) | 15,70 | 14,70 | 13,70 | | 12,60 | | 11,50 | | 11,00 | | 10,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| **2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | | | **2.440.000.000** | | **2.466.840.000** | | **2.493.975.240** | | **2.521.408.967** | | **2.549.144.466** | |
| Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks) | 63,67 | 64,25 | 65,40 | 2.440.000.000 | 66,55 | 2.466.840.000 | 67,70 | 2.493.975.240 | 68,85 | 2.521.408.967 | 70,00 | 2.549.144.466 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase keluarga yang mengikuti | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | 73,00 | | 76,00 | | 78,00 | | 80,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KKK) (BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (%) | | | | | | | | | | | | | Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| **2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | **3.308.286.545** | | **3.344.677.696** | | **3.381.469.150** | | **3.418.665.311** | | **3.456.270.630** | |
| **2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **3.169.328.545** | | **3.204.191.158** | | **3.239.437.261** | | **3.275.071.071** | | **3.311.096.853** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 69,10 | 71,05 | 73,00 | 3.169.328.545 | 74,95 | 3.204.191.158 | 76,90 | 3.239.437.261 | 78,85 | 3.275.071.071 | 80,80 | 3.311.096.853 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| **2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | **138.958.000** | | **140.486.538** | | **142.031.889** | | **143.594.240** | | **145.173.777** | |
| Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas (%) | 29,53 | 27,84 | 26,15 | 138.958.000 | 25,24 | 140.486.538 | 24,35 | 142.031.889 | 23,37 | 143.594.240 | 22,00 | 145.173.777 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | **1.777.335.513** | | **1.796.446.203** | | **1.815.767.111** | | **1.835.300.549** | | **1.855.048.854** | |
| **2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **1.659.335.513** | | **1.677.588.203** | | **1.696.041.673** | | **1.714.698.132** | | **1.733.559.811** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 69,25 | 71,20 | 73,15 | 1.659.335.513 | 75,10 | 1.677.588.203 | 77,05 | 1.696.041.673 | 79,00 | 1.714.698.132 | 80,95 | 1.733.559.811 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika |
| **2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | | | **58.000.000** | | **58.418.000** | | **58.840.598** | | **59.267.844** | | **59.699.790** | |
| Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (Nilai) | 30,74 | 32,00 | 33,26 | 58.000.000 | 33,62 | 58.418.000 | 33,82 | 58.840.598 | 44,00 | 59.267.844 | 44,56 | 59.699.790 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika |
| | Persentase tingkat kepuasan | 30,00 | 35,00 | 40,00 | | 40,00 | | 50,00 | | 60,00 | | 70,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%) | | | | | | | | | | | | | Komunikasi Dan Informatika |
| **2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | | | | **60.000.000** | | **60.440.000** | | **60.884.840** | | **61.334.573** | | **61.789.253** | |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | Indeks SPBE (Indeks) | 2,61 | 2,65 | 2,69 | 60.000.000 | 2,73 | 60.440.000 | 2,77 | 60.884.840 | 2,81 | 61.334.573 | 2,85 | 61.789.253 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika |
| **2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | **4.311.489.527** | | **4.357.581.661** | | **4.405.881.556** | | **4.455.555.933** | | **4.505.801.249** | |
| **2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **4.000.387.610** | | **4.044.391.873** | | **4.088.880.184** | | **4.133.857.866** | | **4.179.330.302** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 68,75 | 70,70 | 72,65 | 4.000.387.610 | 74,60 | 4.044.391.873 | 76,55 | 4.088.880.184 | 78,50 | 4.133.857.866 | 80,45 | 4.179.330.302 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| **2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | | | | **13.350.513** | | **13.497.368** | | **13.645.839** | | **13.795.943** | | **13.947.699** | |
| Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%) | -1,24 | 1,00 | 3,00 | 13.350.513 | 4,00 | 13.497.368 | 5,00 | 13.645.839 | 6,00 | 13.795.943 | 7,00 | 13.947.699 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| **2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | | **10.370.300** | | **10.375.191** | | **10.394.155** | | **10.420.278** | | **10.446.889** | |
| Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%) | 13,18 | 14,55 | 11,54 | 10.370.300 | 13,57 | 10.375.191 | 14,71 | 10.394.155 | 15,84 | 10.420.278 | 16,97 | 10.446.889 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| **2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | | | **5.000.000** | | **5.055.000** | | **5.110.605** | | **5.166.821** | | **5.223.656** | |
| Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi | Persentase Koperasi Aktif (%) | 50,00 | 51,82 | 30,10 | 5.000.000 | 32,13 | 5.055.000 | 34,16 | 5.110.605 | 35,75 | 5.166.821 | 38,46 | 5.223.656 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| **2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | | **5.000.000** | | **5.055.000** | | **5.110.605** | | **5.166.821** | | **5.223.656** | |
| Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian | Persentase Koperasi yang Diberikan | 12,01 | 13,03 | 14,50 | 5.000.000 | 15,60 | 5.055.000 | 16,75 | 5.110.605 | 17,80 | 5.166.821 | 18,80 | 5.223.656 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%) | | | | | | | | | | | | | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| **2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | | **14.939.365** | | **14.992.698** | | **15.199.447** | | **15.484.239** | | **15.774.368** | |
| Meningkatnya produktivitas koperasi | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%) | 6,80 | 7,10 | 7,75 | 14.939.365 | 8,85 | 14.992.698 | 10,50 | 15.199.447 | 11,75 | 15.484.239 | 14,80 | 15.774.368 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| **2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | | **112.500.000** | | **113.737.500** | | **114.988.612** | | **116.253.487** | | **117.532.275** | |
| Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha (%) | 41,10 | 43,30 | 45,40 | 112.500.000 | 47,50 | 113.737.500 | 49,60 | 114.988.612 | 51,70 | 116.253.487 | 53,80 | 117.532.275 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| **2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | **149.941.739** | | **150.477.031** | | **152.552.109** | | **155.410.478** | | **158.322.404** | |
| Meningkatnya daya saing UMKM | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%) | 0,91 | 1,20 | 1,50 | 149.941.739 | 1,80 | 150.477.031 | 2,10 | 152.552.109 | 2,40 | 155.410.478 | 2,60 | 158.322.404 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | **3.824.691.004** | | **3.866.500.697** | | **3.909.130.901** | | **3.952.408.819** | | **3.996.167.991** | |
| **2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **3.542.641.004** | | **3.581.610.055** | | **3.621.007.765** | | **3.660.838.851** | | **3.701.108.078** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 73,16 | 75,11 | 77,06 | 3.542.641.004 | 79,01 | 3.581.610.055 | 80,96 | 3.621.007.765 | 82,91 | 3.660.838.851 | 84,86 | 3.701.108.078 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| **2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | | | | **26.900.000** | | **26.996.033** | | **27.368.308** | | **27.881.108** | | **28.403.516** | |
| Meningkatnya kemudahan berinvestasi | Realisasi Total terhadap Target Investasi (%) | 15,00 | 20,00 | 35,00 | 26.900.000 | 50,00 | 26.996.033 | 60,00 | 27.368.308 | 65,00 | 27.881.108 | 70,00 | 28.403.516 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| **2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | | | | **4.800.000** | | **4.817.136** | | **4.883.564** | | **4.975.067** | | **5.068.285** | |
| Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) | 15,00 | 20,00 | 35,00 | 4.800.000 | 40,00 | 4.817.136 | 50,00 | 4.883.564 | 60,00 | 4.975.067 | 70,00 | 5.068.285 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| **2.18.04 - PROGRAM** | | | | | **196.800.000** | | **198.964.800** | | **201.153.412** | | **203.366.100** | | **205.603.127** | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%) | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 196.800.000 | 78,00 | 198.964.800 | 80,00 | 201.153.412 | 90,00 | 203.366.100 | 92,00 | 205.603.127 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| **2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | | | | **50.000.000** | | **50.550.000** | | **51.106.050** | | **51.668.216** | | **52.236.566** | |
| Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%) | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 50.000.000 | 78,00 | 50.550.000 | 80,00 | 51.106.050 | 82,00 | 51.668.216 | 85,00 | 52.236.566 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| **2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | | | | **3.550.000** | | **3.562.673** | | **3.611.802** | | **3.679.477** | | **3.748.419** | |
| Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%) | 77,00 | 80,00 | 83,00 | 3.550.000 | 85,00 | 3.562.673 | 87,00 | 3.611.802 | 88,00 | 3.679.477 | 89,00 | 3.748.419 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| **2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | **5.372.992.520** | | **5.432.095.437** | | **5.491.848.487** | | **5.552.258.819** | | **5.613.333.666** | |
| **2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **2.822.992.520** | | **2.854.045.437** | | **2.885.439.937** | | **2.917.179.776** | | **2.949.268.754** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 70,25 | 72,20 | 74,15 | 2.822.992.520 | 76,10 | 2.854.045.437 | 78,05 | 2.885.439.937 | 80,00 | 2.917.179.776 | 81,95 | 2.949.268.754 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |
| **2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | | | **200.000.000** | | **202.200.000** | | **204.424.200** | | **206.672.866** | | **208.946.267** | |
| Meningkatnya daya saing kepemudaan | Rasio Wirausaha Pemuda (Rasio) | 28,29 | 34,29 | 40,29 | 200.000.000 | 46,29 | 202.200.000 | 50,29 | 204.424.200 | 56,29 | 206.672.866 | 64,29 | 208.946.267 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |
| **2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | | **2.200.000.000** | | **2.224.200.000** | | **2.248.666.200** | | **2.273.401.528** | | **2.298.408.945** | |
| Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga | Persentase Atlet yang Masuk PELATDA (%) | 66,00 | 68,00 | 70,00 | 2.200.000.000 | 72,00 | 2.224.200.000 | 74,00 | 2.248.666.200 | 76,00 | 2.273.401.528 | 78,00 | 2.298.408.945 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |
| **2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS** | | | | | **150.000.000** | | **151.650.000** | | **153.318.150** | | **155.004.649** | | **156.709.700** | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **KEPRAMUKAAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas kepramukaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%) | 43,00 | 46,00 | 49,00 | 150.000.000 | 52,00 | 151.650.000 | 56,00 | 153.318.150 | 61,00 | 155.004.649 | 70,00 | 156.709.700 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |
| **2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | **57.000.000** | | **57.297.000** | | **57.597.267** | | **57.900.836** | | **58.207.746** | |
| **2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | | | **57.000.000** | | **57.297.000** | | **57.597.267** | | **57.900.836** | | **58.207.746** | |
| Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks) | 1,87 | 1,97 | 2,07 | 57.000.000 | 2,17 | 57.297.000 | 2,27 | 57.597.267 | 2,37 | 57.900.836 | 2,47 | 58.207.746 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik |
| **2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | **38.850.000** | | **39.277.350** | | **39.709.400** | | **40.146.204** | | **40.587.812** | |
| **2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | | | **38.850.000** | | **39.277.350** | | **39.709.400** | | **40.146.204** | | **40.587.812** | |
| Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%) | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 38.850.000 | 96,00 | 39.277.350 | 97,00 | 39.709.400 | 98,00 | 40.146.204 | 99,00 | 40.587.812 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian |
| **2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | **1.547.060.622** | | **1.563.198.288** | | **1.579.513.467** | | **1.596.008.114** | | **1.612.684.203** | |
| **2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **1.032.607.379** | | **1.042.544.139** | | **1.042.744.139** | | **1.042.907.052** | | **1.052.050.792** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 70,91 | 72,86 | 74,81 | 1.032.607.379 | 76,76 | 1.042.544.139 | 78,71 | 1.042.744.139 | 80,66 | 1.042.907.052 | 82,61 | 1.052.050.792 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| **2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | | | **90.840.000** | | **91.839.240** | | **92.849.471** | | **93.870.815** | | **94.903.394** | |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%) | 64,00 | 68,00 | 72,00 | 90.840.000 | 78,00 | 91.839.240 | 82,00 | 92.849.471 | 93,00 | 93.870.815 | 100,00 | 94.903.394 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| **2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN** | | | | | **115.000.000** | | **116.265.000** | | **117.543.915** | | **118.836.898** | | **120.144.103** | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **TRADISIONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%) | 77,00 | 81,00 | 85,00 | 115.000.000 | 88,00 | 116.265.000 | 92,00 | 117.543.915 | 96,00 | 118.836.898 | 100,00 | 120.144.103 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| **2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | | | | | **53.000.000** | | **53.583.000** | | **54.172.413** | | **54.768.309** | | **55.370.760** | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%) | 10,00 | 16,00 | 33,00 | 53.000.000 | 50,00 | 53.583.000 | 66,00 | 54.172.413 | 83,00 | 54.768.309 | 100,00 | 55.370.760 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| **2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | | | **82.160.000** | | **83.063.760** | | **83.977.461** | | **84.901.213** | | **85.835.126** | |
| Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (%) | 42,30 | 42,80 | 43,30 | 82.160.000 | 43,60 | 83.063.760 | 43,90 | 83.977.461 | 44,00 | 84.901.213 | 44,20 | 85.835.126 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%) | 5,00 | 6,00 | 7,00 | | 8,00 | | 10,00 | | 11,00 | | 12,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| **2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | | | | | **166.103.243** | | **167.930.378** | | **169.777.612** | | **171.645.166** | | **173.533.263** | |
| Meningkatnya tata kelola museum | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (%) | 1,40 | 2,30 | 3,20 | 166.103.243 | 4,00 | 167.930.378 | 4,80 | 169.777.612 | 5,60 | 171.645.166 | 6,40 | 173.533.263 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| **2.22.07 - PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)** | | | | | **7.350.000** | | **7.972.771** | | **18.448.456** | | **29.078.661** | | **30.846.765** | |
| Meningkatnya Pelestarian Adat Istiadat Daerah | Persentase Pelestarian Adat Istiadat Daerah (%) | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 7.350.000 | 75,00 | 7.972.771 | 78,00 | 18.448.456 | 80,00 | 29.078.661 | 85,00 | 30.846.765 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| **2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | **2.426.407.616** | | **2.453.098.099** | | **2.480.082.178** | | **2.507.363.082** | | **2.534.944.075** | |
| **2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **1.843.807.616** | | **1.864.089.499** | | **1.884.594.484** | | **1.905.325.023** | | **1.926.283.598** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 65,50 | 67,45 | 69,40 | 1.843.807.616 | 71,35 | 1.864.089.499 | 73,30 | 1.884.594.484 | 75,25 | 1.905.325.023 | 77,20 | 1.926.283.598 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan |
| **2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | | **548.919.000** | | **554.957.109** | | **561.061.637** | | **567.233.315** | | **573.472.881** | |
| Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai) | 75,00 | 76,00 | 76,50 | 548.919.000 | 77,00 | 554.957.109 | 77,50 | 561.061.637 | 78,00 | 567.233.315 | 78,50 | 573.472.881 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan |
| **2.23.03 - PROGRAM** | | | | | **33.681.000** | | **34.051.491** | | **34.426.057** | | **34.804.744** | | **35.187.596** | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%) | 20 | 30 | 40 | 33.681.000 | 50 | 34.051.491 | 60 | 34.426.057 | 70 | 34.804.744 | 80 | 35.187.596 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan |
| **2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | **70.000.000** | | **70.664.400** | | **71.336.107** | | **72.105.203** | | **73.101.771** | |
| **2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | **36.560.000** | | **36.962.160** | | **37.368.743** | | **37.779.799** | | **38.195.377** | |
| Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis | Tingkat Ketersediaan Arsip (%) | 24,10 | 25,20 | 26,30 | 36.560.000 | 27,00 | 36.962.160 | 28,10 | 37.368.743 | 29,50 | 37.779.799 | 31,60 | 38.195.377 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan |
| **2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | | | | **10.000.000** | | **10.004.400** | | **10.008.848** | | **10.103.345** | | **10.417.892** | |
| Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%) | 19,30 | 20,30 | 21,30 | 10.000.000 | 22,30 | 10.004.400 | 23,50 | 10.008.848 | 24,50 | 10.103.345 | 26,50 | 10.417.892 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan |
| **2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | | | | | **23.440.000** | | **23.697.840** | | **23.958.516** | | **24.222.059** | | **24.488.502** | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%) | 10,00 | 60,00 | 62,00 | 23.440.000 | 63,00 | 23.697.840 | 65,00 | 23.958.516 | 67,00 | 24.222.059 | 68,00 | 24.488.502 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan |
| **3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | **11.427.074.605** | | **11.552.475.225** | | **11.679.664.450** | | **11.808.455.626** | | **11.938.669.405** | |
| **3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **2.774.374.605** | | **2.804.892.725** | | **2.835.746.545** | | **2.866.939.757** | | **2.898.476.094** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 75,01 | 76,96 | 78,91 | 2.774.374.605 | 80,86 | 2.804.892.725 | 82,81 | 2.835.746.545 | 84,76 | 2.866.939.757 | 86,71 | 2.898.476.094 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| **3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | | | **343.200.000** | | **346.975.200** | | **350.791.927** | | **354.650.638** | | **358.551.795** | |
| Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun) | 15.700 | 15.900 | 16.100 | 343.200.000 | 16.583 | 346.975.200 | 17.060 | 350.791.927 | 17.592 | 354.650.638 | 18.471 | 358.551.795 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| **3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | | **8.094.300.000** | | **8.183.337.300** | | **8.273.354.010** | | **8.364.360.904** | | **8.456.368.874** | |
| Meningkatnya | Jumlah Produksi | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 8.094.300.000 | 15.810 | 8.183.337.300 | 16.126 | 8.273.354.010 | 16.448 | 8.364.360.904 | 16.776 | 8.456.368.874 | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| produksi perikanan budidaya | Perikanan Budidaya (Ton/Tahun) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| **3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | **40.000.000** | | **40.142.800** | | **40.696.369** | | **41.458.897** | | **42.235.712** | |
| Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati | Luasan Kawasan Konservasi (%) | 10,00 | 55,00 | 60,00 | 40.000.000 | 65,00 | 40.142.800 | 70,00 | 40.696.369 | 75,00 | 41.458.897 | 80,00 | 42.235.712 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| **3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | | **175.200.000** | | **177.127.200** | | **179.075.599** | | **181.045.430** | | **183.036.930** | |
| Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | Angka Konsumsi Ikan (Angka) | 46,00 | 48,00 | 50,00 | 175.200.000 | 52,00 | 177.127.200 | 54,00 | 179.075.599 | 56,00 | 181.045.430 | 58,00 | 183.036.930 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| **3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | **605.216.190** | | **609.599.763** | | **617.162.232** | | **626.359.993** | | **635.704.063** | |
| **3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | | | **299.186.190** | | **302.477.238** | | **305.804.487** | | **309.168.337** | | **312.569.188** | |
| Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%) | 42,00 | 45,00 | 48,00 | 299.186.190 | 50,00 | 302.477.238 | 53,00 | 305.804.487 | 55,00 | 309.168.337 | 60,00 | 312.569.188 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |
| **3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | | | **102.010.000** | | **102.374.175** | | **103.785.915** | | **105.730.552** | | **107.711.625** | |
| Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata (%) | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 102.010.000 | 40,00 | 102.374.175 | 44,00 | 103.785.915 | 48,00 | 105.730.552 | 52,00 | 107.711.625 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |
| **3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | | | | | **102.010.000** | | **102.374.175** | | **103.785.915** | | **105.730.552** | | **107.711.625** | |
| Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%) | 10,00 | 23,00 | 27,00 | 102.010.000 | 32,00 | 102.374.175 | 37,00 | 103.785.915 | 43,00 | 105.730.552 | 56,00 | 107.711.625 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |
| **3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | | | **102.010.000** | | **102.374.175** | | **103.785.915** | | **105.730.552** | | **107.711.625** | |
| Meningkatnya kapasitas SDM | Persentase peran masyarakat dalam | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 102.010.000 | 30,00 | 102.374.175 | 37,00 | 103.785.915 | 45,00 | 105.730.552 | 53,00 | 107.711.625 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| pariwisata dan ekonomi kreatif | peningkatan ekonomi bidang pariwisata (%) | | | | | | | | | | | | | Pariwisata |
| **3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | **28.169.009.550** | | **28.478.868.653** | | **28.792.136.207** | | **29.108.849.706** | | **29.429.047.049** | |
| **3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **14.310.566.678** | | **14.467.982.911** | | **14.627.130.723** | | **14.788.029.161** | | **14.950.697.481** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 70,76 | 72,71 | 74,66 | 3.197.250.000 | 76,61 | 3.232.419.750 | 78,56 | 3.267.976.367 | 80,51 | 3.303.924.107 | 82,46 | 3.340.267.272 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian (Disbunnak) |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 78,36 | 80,31 | 82,26 | 11.113.316.678 | 84,21 | 11.235.563.161 | 86,16 | 11.359.154.356 | 88,11 | 11.484.105.054 | 90,06 | 11.610.430.209 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| **3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | **8.670.795.272** | | **8.766.174.019** | | **8.862.601.933** | | **8.960.090.555** | | **9.058.651.550** | |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Gabah) (Ton) | 94.000 | 95.000 | 95.500 | 2.168.600.000 | 96.000 | 2.192.454.600 | 96.500 | 2.216.571.600 | 97.000 | 2.240.953.888 | 97.500 | 2.265.604.380 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana subsektor perkebunan dan peternakan | Peningkatan Populasi Ternak (%) | 3,20 | 3,21 | 3,21 | 6.502.195.272 | 3,22 | 6.573.719.419 | 3,23 | 6.646.030.333 | 3,24 | 6.719.136.667 | 3,25 | 6.793.047.170 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian (Disbunnak) |
| | Peningkatan Produksi Daging (%) | 5,00 | 5,05 | 5,05 | | 5,10 | | 5,15 | | 5,20 | | 5,25 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian (Disbunnak) |
| | Peningkatan Produksi Perkebunan (%) | 4,50 | 4,50 | 5,00 | | 5,50 | | 6,00 | | 6,50 | | 7,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian (Disbunnak) |
| | Peningkatan Produksi Telur (%) | 1,00 | 1,05 | 1,05 | | 1,10 | | 1,15 | | 1,20 | | 1,25 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian (Disbunnak) |
| **3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | **4.602.047.600** | | **4.652.670.123** | | **4.703.849.494** | | **4.755.591.839** | | **4.807.903.348** | |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha) | 8.505,3 | 8.505,3 | 8.505,3 | 1.538.000.000 | 8.505,3 | 1.554.918.000 | 8.505,3 | 1.572.022.098 | 8.505,3 | 1.589.314.341 | 8.505,3 | 1.606.796.798 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana subsektor perkebunan dan peternakan | Jumlah Lahan Produktif (Hektar) | 25.628 | 25.628 | 25.678 | 3.064.047.600 | 25.718 | 3.097.752.123 | 25.748 | 3.131.827.396 | 25.768 | 3.166.277.498 | 25.778 | 3.201.106.550 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian (Disbunnak) |
| | Persentase Peningkatan Prasarana peternakan dalam kondisi Baik (%) | 0,10 | 0,10 | 0,15 | | 0,20 | | 0,30 | | 0,40 | | 0,50 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian (Disbunnak) |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | **50.600.000** | | **51.156.600** | | **51.719.322** | | **52.288.235** | | **52.863.405** | |
| Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Tingkat Pelayanan Kesehatan Hewan (%) | 99,57 | 99,57 | 99,65 | 50.600.000 | 99,75 | 51.156.600 | 99,85 | 51.719.322 | 99,95 | 52.288.235 | 100,00 | 52.863.405 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian (Disbunnak) |
| **3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | | **335.000.000** | | **338.685.000** | | **342.410.535** | | **346.177.050** | | **349.984.998** | |
| Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana subsektor perkebunan dan peternakan | Persentase Penanggulangan Penyakit Tanaman (%) | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 125.000.000 | 12,00 | 126.375.000 | 13,00 | 127.765.125 | 14,00 | 129.170.541 | 15,00 | 130.591.417 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian (Disbunnak) |
| Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase Penanggulangan Penyakit Tanaman (%) | 75,00 | 75,00 | 76,00 | 210.000.000 | 77,00 | 212.310.000 | 78,00 | 214.645.410 | 79,00 | 217.006.509 | 80,00 | 219.393.581 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| **3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | **200.000.000** | | **202.200.000** | | **204.424.200** | | **206.672.866** | | **208.946.267** | |
| Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | Persentase Peningkatan Score Kelompok Tani (%) | 63,80 | 63,80 | 68,07 | 200.000.000 | 68,60 | 202.200.000 | 69,13 | 204.424.200 | 69,67 | 206.672.866 | 70,20 | 208.946.267 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%) | 85,00 | 85,00 | 87,00 | | 90,00 | | 93,00 | | 95,00 | | 97,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| **3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | **2.214.000.812** | | **2.237.546.437** | | **2.262.464.083** | | **2.288.207.626** | | **2.314.250.395** | |
| **3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | | **1.650.000.000** | | **1.668.150.000** | | **1.686.499.650** | | **1.705.051.146** | | **1.723.806.708** | |
| Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%) | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 1.650.000.000 | 29,00 | 1.668.150.000 | 30,00 | 1.686.499.650 | 32,00 | 1.705.051.146 | 35,00 | 1.723.806.708 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| **3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | **433.350.513** | | **438.117.368** | | **442.936.659** | | **447.808.962** | | **452.734.861** | |
| Meningkatnya kelancaran distribusi | Persentase Stabilisasi Harga | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 433.350.513 | 100,00 | 438.117.368 | 100,00 | 442.936.659 | 100,00 | 447.808.962 | 100,00 | 452.734.861 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%) | | | | | | | | | | | | | Perdagangan |
| **3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | | | **5.000.000** | | **5.055.000** | | **5.110.605** | | **5.166.821** | | **5.223.656** | |
| Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Nilai Ekspor Barang (Juta Rupiah) | 400 | 500 | 600 | 5.000.000 | 700 | 5.055.000 | 800 | 5.110.605 | 900 | 5.166.821 | 1.000 | 5.223.656 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| **3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | | **16.850.513** | | **17.035.868** | | **17.223.263** | | **17.412.719** | | **17.604.259** | |
| Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Persentase penanganan pengaduan konsumen (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 16.850.513 | 100,00 | 17.035.868 | 100,00 | 17.223.263 | 100,00 | 17.412.719 | 100,00 | 17.604.259 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| **3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | | | **108.799.786** | | **109.188.201** | | **110.693.906** | | **112.767.978** | | **114.880.911** | |
| Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%) | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 108.799.786 | 75,00 | 109.188.201 | 75,00 | 110.693.906 | 75,00 | 112.767.978 | 75,00 | 114.880.911 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| **3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | **942.350.511** | | **952.716.366** | | **963.196.246** | | **973.791.404** | | **984.503.109** | |
| **3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | **332.350.511** | | **336.006.366** | | **339.702.436** | | **343.439.163** | | **347.216.994** | |
| Meningkatnya realisasi rembangunan industri | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%) | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 332.350.511 | 10,00 | 336.006.366 | 11,00 | 339.702.436 | 12,00 | 343.439.163 | 13,00 | 347.216.994 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian |
| **3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | | | | | **5.000.000** | | **5.055.000** | | **5.110.605** | | **5.166.821** | | **5.223.656** | |
| Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%) | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 5.000.000 | 13,00 | 5.055.000 | 14,00 | 5.110.605 | 15,00 | 5.166.821 | 16,00 | 5.223.656 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian |
| **3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | | | **605.000.000** | | **611.655.000** | | **618.383.205** | | **625.185.420** | | **632.062.459** | |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi industri | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 605.000.000 | 100,00 | 611.655.000 | 100,00 | 618.383.205 | 100,00 | 625.185.420 | 100,00 | 632.062.459 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian |
| **3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | **25.900.000** | | **26.066.763** | | **26.398.016** | | **26.813.553** | | **27.236.008** | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | **10.700.000** | | **10.738.199** | | **10.886.278** | | **11.090.254** | | **11.298.053** | |
| Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi | Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (%) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10.700.000 | 10,00 | 10.738.199 | 15,00 | 10.886.278 | 20,00 | 11.090.254 | 30,00 | 11.298.053 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi |
| **3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | **10.000.000** | | **10.110.000** | | **10.221.210** | | **10.333.643** | | **10.447.313** | |
| Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi | Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (%) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10.000.000 | 20,00 | 10.110.000 | 20,00 | 10.221.210 | 20,00 | 10.333.643 | 30,00 | 10.447.313 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi |
| **3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | **5.200.000** | | **5.218.564** | | **5.290.528** | | **5.389.656** | | **5.490.642** | |
| Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi | Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (%) | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 5.200.000 | 30,00 | 5.218.564 | 35,00 | 5.290.528 | 40,00 | 5.389.656 | 50,00 | 5.490.642 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi |
| **4.01 - SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | **23.862.425.781** | | **24.124.912.464** | | **24.390.286.501** | | **24.658.579.652** | | **24.929.824.028** | |
| **4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **20.479.425.781** | | **20.704.699.464** | | **20.932.451.158** | | **21.162.708.121** | | **21.395.497.910** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 70,51 | 72,46 | 74,41 | 20.479.425.781 | 76,36 | 20.704.699.464 | 78,31 | 20.932.451.158 | 80,26 | 21.162.708.121 | 82,21 | 21.395.497.910 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| **4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | **2.183.000.000** | | **2.207.013.000** | | **2.231.290.143** | | **2.255.834.334** | | **2.280.648.512** | |
| Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%) | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 2.183.000.000 | 94,00 | 2.207.013.000 | 95,00 | 2.231.290.143 | 95,00 | 2.255.834.334 | 96,00 | 2.280.648.512 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| **4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | **1.200.000.000** | | **1.213.200.000** | | **1.226.545.200** | | **1.240.037.197** | | **1.253.677.606** | |
| Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%) | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 1.200.000.000 | 96,00 | 1.213.200.000 | 97,00 | 1.226.545.200 | 97,00 | 1.240.037.197 | 98,00 | 1.253.677.606 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| **4.02 - SEKRETARIAT DPRD** | | | | | **23.586.962.817** | | **23.846.419.407** | | **24.108.730.020** | | **24.373.926.051** | | **26.042.039.300** | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **18.146.029.317** | | **18.345.635.639** | | **18.547.437.631** | | **18.751.459.445** | | **19.657.725.500** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 70,16 | 72,11 | 74,06 | 18.146.029.317 | 76,01 | 18.345.635.639 | 77,96 | 18.547.437.631 | 79,91 | 18.751.459.445 | 81,86 | 19.657.725.500 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |
| **4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | | | **5.440.933.500** | | **5.500.783.768** | | **5.561.292.389** | | **5.622.466.606** | | **6.384.313.800** | |
| Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundangundangan | Ketepatan Penetapan Qanun APBD Tahun N (*) | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 501.000.000 | Tepat Waktu | 506.511.000 | Tepat Waktu | 512.082.623 | Tepat Waktu | 517.715.528 | Tepat Waktu | 523.410.399 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |
| | Persentase Penetapan Raqan Tahun N (%) | 88,00 | 89,00 | 90,00 | | 91,00 | | 92,00 | | 93,00 | | 95,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |
| Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%) | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 4.939.933.500 | 91,00 | 4.994.272.768 | 92,00 | 5.049.209.766 | 93,00 | 5.104.751.078 | 95,00 | 5.860.903.401 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |
| **5.01 - PERENCANAAN** | | | | | **5.765.344.948** | | **5.828.763.742** | | **5.892.880.143** | | **5.957.701.823** | | **6.023.236.543** | |
| **5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **5.005.344.948** | | **5.060.403.742** | | **5.116.068.183** | | **5.172.344.933** | | **5.229.240.727** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 80,10 | 82,05 | 84,00 | 5.005.344.948 | 85,95 | 5.060.403.742 | 87,90 | 5.116.068.183 | 89,85 | 5.172.344.933 | 91,80 | 5.229.240.727 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| **5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | **310.000.000** | | **313.410.000** | | **316.857.510** | | **320.342.942** | | **323.866.714** | |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 310.000.000 | 100,00 | 313.410.000 | 100,00 | 316.857.510 | 100,00 | 320.342.942 | 100,00 | 323.866.714 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%) | 89,00 | 90,00 | 91,00 | | 92,00 | | 93,00 | | 94,00 | | 95,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| **5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | **450.000.000** | | **454.950.000** | | **459.954.450** | | **465.013.948** | | **470.129.102** | |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 150.000.000 | 100,00 | 151.650.000 | 100,00 | 153.318.150 | 100,00 | 155.004.650 | 100,00 | 156.709.701 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| pemerintahan dan pembangunan manusia | pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%) | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%) | 92,00 | 93,00 | 93,00 | 150.000.000 | 94,00 | 151.650.000 | 94,00 | 153.318.150 | 95,00 | 155.004.649 | 95,00 | 156.709.700 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%) | 92,00 | 93,00 | 93,00 | 150.000.000 | 94,00 | 151.650.000 | 94,00 | 153.318.150 | 95,00 | 155.004.649 | 95,00 | 156.709.701 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| **5.02 - KEUANGAN** | | | | | **228.082.653.170** | | **231.920.176.889** | | **233.234.647.757** | | **235.654.424.359** | | **243.645.505.143** | |
| **5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **12.454.051.036** | | **12.578.591.546** | | **12.704.377.462** | | **12.831.421.236** | | **12.959.735.449** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 77,71 | 79,66 | 81,61 | 12.454.051.036 | 83,56 | 12.578.591.546 | 85,51 | 12.704.377.462 | 87,46 | 12.831.421.236 | 89,41 | 12.959.735.449 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| **5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | **214.873.578.134** | | **218.579.011.103** | | **219.760.070.313** | | **222.045.101.141** | | **229.900.088.692** | |
| Meningkatnya tata kelola anggaran | Persentase Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 881.728.920 | 100,00 | 890.546.209 | 100,00 | 899.451.671 | 100,00 | 908.446.188 | 100,00 | 917.530.650 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| | Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| Meningkatnya tata kelola perbendaharaan | Persentase penurunan SILPA (%) | 3,00 | 2,83 | 2,67 | 162.000.000 | 2,50 | 163.620.000 | 2,33 | 165.256.200 | 2,17 | 166.908.762 | 2,00 | 168.577.850 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| | Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan | Persentase laporan keuangan tepat waktu (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 505.000.000 | 100,00 | 510.050.000 | 100,00 | 515.150.500 | 100,00 | 520.302.005 | 100,00 | 525.505.025 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| Meningkatnya kualitas dukungan administrasi, pengelolaan data dan analisis informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah | Persentase penyediaan dukungan administrasi, pengelolaan data dan analisis informasi yang akurat dan tepat waktu (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 212.948.849.214 | 100,00 | 216.635.034.893 | 100,00 | 217.796.654.341 | 100,00 | 220.062.051.010 | 100,00 | 227.897.208.060 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah untuk mendukung tata kelola keuangan yang efektif dan akuntabel | Persentase pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah yang terlaksana sesuai standar dan tepat waktu (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 376.000.000 | 100,00 | 379.760.000 | 100,00 | 383.557.600 | 100,00 | 387.393.176 | 100,00 | 391.267.108 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| **5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | **318.000.000** | | **321.180.000** | | **324.391.800** | | **327.635.718** | | **330.912.075** | |
| Meningkatnya tata kelola aset dearah | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%) | 10,00 | 15,00 | 16,00 | 318.000.000 | 17,00 | 321.180.000 | 18,00 | 324.391.800 | 19,00 | 327.635.718 | 20,00 | 330.912.075 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| **5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | **437.024.000** | | **441.394.240** | | **445.808.182** | | **450.266.264** | | **454.768.927** | |
| Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 214.024.000 | 14,00 | 216.164.240 | 15,00 | 218.325.882 | 16,00 | 220.509.141 | 17,00 | 222.714.233 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 42.000.000 | 100,00 | 42.420.000 | 100,00 | 42.844.200 | 100,00 | 43.272.642 | 100,00 | 43.705.368 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital | Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 181.000.000 | 100,00 | 182.810.000 | 100,00 | 184.638.100 | 100,00 | 186.484.481 | 100,00 | 188.349.326 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| **5.03 - KEPEGAWAIAN** | | | | | **5.277.965.748** | | **5.334.923.371** | | **5.392.507.528** | | **5.450.725.110** | | **5.509.583.086** | |
| **5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **4.662.963.748** | | **4.714.256.349** | | **4.766.113.169** | | **4.818.540.413** | | **4.871.544.358** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Persentase Tingkat Pelayanan AdministrasI Pemerintah (%) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 4.662.963.748 | 100.000 | 4.714.256.349 | 100.000 | 4.766.113.169 | 100.000 | 4.818.540.413 | 100.000 | 4.871.544.358 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian |
| | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 76,50 | 78,45 | 80,40 | | 82,35 | | 84,30 | | 86,25 | | 88,20 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian |
| **5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | | **615.002.000** | | **620.667.022** | | **626.394.359** | | **632.184.697** | | **638.038.728** | |
| Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (%) | 95,25 | 95,72 | 96,16 | 153.750.500 | 97,13 | 155.166.756 | 98,07 | 156.598.590 | 99,01 | 158.046.175 | 99,95 | 159.509.682 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%) | 34,70 | 39,26 | 44,26 | 153.750.500 | 53,81 | 155.166.756 | 63,37 | 156.598.589 | 72,92 | 158.046.174 | 82,48 | 159.509.682 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian |
| Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%) | 95,12 | 95,60 | 96,09 | 153.750.500 | 97,06 | 155.166.756 | 98,03 | 156.598.590 | 99,00 | 158.046.174 | 99,97 | 159.509.682 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian |
| Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%) | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 153.750.500 | 97,00 | 155.166.754 | 98,00 | 156.598.590 | 99,00 | 158.046.174 | 99,99 | 159.509.682 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian |
| **5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | **139.002.000** | | **139.431.022** | | **139.864.763** | | **140.303.275** | | **140.746.611** | |
| **5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | **139.002.000** | | **139.431.022** | | **139.864.763** | | **140.303.275** | | **140.746.611** | |
| Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%) | 13,31 | 15,21 | 17,11 | 34.750.500 | 20,91 | 34.857.754 | 24,71 | 34.966.190 | 28,51 | 35.075.818 | 32,31 | 35.186.652 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan |
| Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%) | 26,67 | 33,57 | 40,47 | 34.750.500 | 54,27 | 34.857.756 | 68,07 | 34.966.191 | 81,87 | 35.075.819 | 95,67 | 35.186.653 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan |
| Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%) | 5,55 | 9,90 | 14,25 | 34.750.500 | 22,95 | 34.857.756 | 31,65 | 34.966.191 | 40,35 | 35.075.819 | 49,05 | 35.186.653 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan |
| Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis | Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (%) | 34,70 | 39,50 | 44,30 | 34.750.500 | 53,90 | 34.857.756 | 63,50 | 34.966.191 | 73,10 | 35.075.819 | 82,70 | 35.186.653 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan |
| **5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | **293.200.000** | | **294.225.200** | | **295.261.677** | | **296.309.555** | | **297.368.960** | |
| **5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | **193.200.000** | | **194.225.200** | | **195.261.677** | | **196.309.555** | | **197.368.960** | |
| Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 154.560.000 | 100,00 | 155.380.000 | 100,00 | 156.209.340 | 100,00 | 157.047.644 | 100,00 | 157.895.168 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 38.640.000 | 100,00 | 38.845.200 | 100,00 | 39.052.337 | 100,00 | 39.261.911 | 100,00 | 39.473.792 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan |
| **5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH** | | | | | **100.000.000** | | **100.000.000** | | **100.000.000** | | **100.000.000** | | **100.000.000** | |
| Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 25.000.000 | 100,00 | 25.000.000 | 100,00 | 25.000.000 | 100,00 | 25.000.000 | 100,00 | 25.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan |
| Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 75.000.000 | 100,00 | 75.000.000 | 100,00 | 75.000.000 | 100,00 | 75.000.000 | 100,00 | 75.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan |
| **6.01 - INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | **8.734.780.076** | | **8.808.862.656** | | **8.883.760.145** | | **8.959.481.507** | | **9.036.035.803** | |
| **6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **5.364.460.076** | | **5.423.469.136** | | **5.483.127.297** | | **5.543.441.697** | | **5.604.419.556** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 79,56 | 81,51 | 83,46 | 5.364.460.076 | 85,41 | 5.423.469.136 | 87,36 | 5.483.127.297 | 89,31 | 5.543.441.697 | 91,26 | 5.604.419.556 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |
| **6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | | | **1.837.000.000** | | **1.846.207.000** | | **1.855.515.277** | | **1.864.925.945** | | **1.874.440.130** | |
| Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%) | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 1.837.000.000 | 83,00 | 1.846.207.000 | 84,00 | 1.855.515.277 | 84,00 | 1.864.925.945 | 85,00 | 1.874.440.130 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |
| **6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | | **1.533.320.000** | | **1.539.186.520** | | **1.545.117.571** | | **1.551.113.865** | | **1.557.176.117** | |
| Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1.533.320.000 | 3,00 | 1.539.186.520 | 3,00 | 1.545.117.571 | 3,00 | 1.551.113.865 | 3,00 | 1.557.176.117 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) | 3,00 | 3,10 | 3,10 | | 3,20 | | 3,20 | | 3,20 | | 3,40 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |
| **7.01 - KECAMATAN** | | | | | **15.408.080.079** | | **15.577.511.668** | | **15.748.885.871** | | **15.922.184.302** | | **16.097.390.157** | |
| **7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **14.788.987.278** | | **14.951.666.134** | | **15.116.134.460** | | **15.282.411.940** | | **15.450.518.473** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 66,51 | 68,46 | 70,41 | 1.711.638.392 | 72,36 | 1.730.466.414 | 74,31 | 1.749.501.544 | 76,26 | 1.768.746.061 | 78,21 | 1.788.202.268 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Ulim) |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 68,90 | 70,85 | 72,80 | 1.860.839.997 | 74,75 | 1.881.309.236 | 76,70 | 1.902.003.638 | 78,65 | 1.922.925.678 | 80,60 | 1.944.077.861 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Trienggadeng) |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 65,75 | 67,70 | 69,65 | 2.247.769.263 | 71,60 | 2.272.494.724 | 73,55 | 2.297.492.166 | 75,50 | 2.322.764.580 | 77,45 | 2.348.314.991 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Panteraja) |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 64,90 | 66,85 | 68,80 | 1.660.815.555 | 70,75 | 1.679.084.526 | 72,70 | 1.697.554.455 | 74,65 | 1.716.227.554 | 76,60 | 1.735.106.058 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Meureudu) |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 69,51 | 71,46 | 73,41 | 1.261.918.010 | 75,36 | 1.275.799.108 | 77,31 | 1.289.832.898 | 79,26 | 1.304.021.060 | 81,21 | 1.318.365.291 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Meurah Dua) |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 68,70 | 70,65 | 72,60 | 1.775.356.757 | 74,55 | 1.794.885.681 | 76,50 | 1.814.629.423 | 78,45 | 1.834.590.347 | 80,40 | 1.854.770.841 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Jangka Buya) |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 68,85 | 70,80 | 72,75 | 1.999.569.619 | 74,70 | 2.021.564.884 | 76,65 | 2.043.802.098 | 78,60 | 2.066.283.921 | 80,55 | 2.089.013.044 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Bandar Dua) |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 65,20 | 67,15 | 69,10 | 2.271.079.685 | 71,05 | 2.296.061.561 | 73,00 | 2.321.318.238 | 74,95 | 2.346.852.739 | 76,90 | 2.372.668.119 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Bandar Baru) |
| **7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | **263.424.495** | | **266.322.164** | | **269.251.705** | | **272.213.473** | | **275.207.821** | |
| Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan | Persentase Masyarakat Yang Terlayani (%) | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 38.000.000 | 95,00 | 38.418.000 | 97,00 | 38.840.598 | 98,00 | 39.267.844 | 99,00 | 39.699.790 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Ulim) |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan | Persentase Masyarakat Yang Terlayani (%) | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 28.600.000 | 93,00 | 28.914.600 | 94,00 | 29.232.660 | 95,00 | 29.554.219 | 96,00 | 29.879.316 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Trienggadeng) |
| Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan | Persentase Masyarakat Yang Terlayani (%) | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 29.500.000 | 88,00 | 29.824.500 | 89,00 | 30.152.569 | 89,20 | 30.484.247 | 89,25 | 30.819.574 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Panteraja) |
| Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan | Persentase Masyarakat Yang Terlayani (%) | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 22.880.000 | 97,00 | 23.131.680 | 98,00 | 23.386.128 | 99,00 | 23.643.375 | 100,00 | 23.903.453 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Meureudu) |
| Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan | Persentase Masyarakat Yang Terlayani (%) | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 29.000.495 | 97,00 | 29.319.500 | 98,00 | 29.642.014 | 99,00 | 29.968.077 | 100,00 | 30.297.725 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Meurah Dua) |
| Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan | Persentase Masyarakat Yang Terlayani (%) | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 25.944.000 | 97,00 | 26.229.384 | 98,00 | 26.517.907 | 99,00 | 26.809.604 | 100,00 | 27.104.509 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Jangka Buya) |
| Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan | Persentase Masyarakat Yang Terlayani (%) | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 50.200.000 | 97,00 | 50.752.200 | 98,00 | 51.310.474 | 99,00 | 51.874.889 | 100,00 | 52.445.513 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Bandar Dua) |
| Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan | Persentase Masyarakat Yang Terlayani (%) | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 39.300.000 | 86,00 | 39.732.300 | 87,00 | 40.169.355 | 88,00 | 40.611.218 | 89,00 | 41.057.941 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Bandar Baru) |
| **7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | **167.846.078** | | **169.692.384** | | **171.558.998** | | **173.446.146** | | **175.354.053** | |
| Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong | Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong (%) | 79,00 | 80,00 | 85,00 | 27.888.000 | 87,00 | 28.194.768 | 90,00 | 28.504.910 | 95,00 | 28.818.464 | 98,00 | 29.135.467 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Ulim) |
| Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong | Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong (%) | 79,00 | 80,00 | 85,00 | 16.000.000 | 86,00 | 16.176.000 | 87,00 | 16.353.936 | 88,00 | 16.533.829 | 90,00 | 16.715.701 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Trienggadeng) |
| Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong | Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong (%) | 64,00 | 65,00 | 67,00 | 15.600.000 | 68,00 | 15.771.600 | 69,00 | 15.945.087 | 69,20 | 16.120.483 | 69,25 | 16.297.808 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Panteraja) |
| Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong | Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong (%) | 91,00 | 92,00 | 95,00 | 11.470.320 | 96,00 | 11.596.493 | 97,00 | 11.724.054 | 98,00 | 11.853.019 | 100,00 | 11.983.402 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Meureudu) |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong | Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong (%) | 92,00 | 93,00 | 95,00 | 24.614.000 | 97,00 | 24.884.754 | 98,00 | 25.158.486 | 99,00 | 25.435.229 | 100,00 | 25.715.017 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Meurah Dua) |
| Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong | Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong (%) | 94,00 | 95,00 | 95,00 | 15.770.000 | 97,00 | 15.943.470 | 98,00 | 16.118.848 | 99,00 | 16.296.155 | 100,00 | 16.475.413 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Jangka Buya) |
| Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong | Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong (%) | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 25.903.758 | 97,00 | 26.188.699 | 98,00 | 26.476.775 | 99,00 | 26.768.019 | 100,00 | 27.062.467 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Bandar Dua) |
| Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong | Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong (%) | 64,00 | 65,00 | 66,00 | 30.600.000 | 67,00 | 30.936.600 | 68,00 | 31.276.902 | 69,00 | 31.620.948 | 69,00 | 31.968.778 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Bandar Baru) |
| **7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | **20.933.538** | | **21.106.521** | | **21.360.278** | | **21.655.932** | | **21.955.973** | |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat | Persentase Keaktifan Linmas Dalam Gampong (%) | 91,00 | 92,00 | 94,00 | 2.000.000 | 95,00 | 2.022.000 | 97,00 | 2.044.242 | 98,00 | 2.066.728 | 100,00 | 2.089.462 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Ulim) |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat | Persentase Keaktifan Linmas Dalam Gampong (%) | 91,00 | 92,00 | 94,00 | 1.523.639 | 95,00 | 1.540.399 | 96,00 | 1.557.343 | 97,00 | 1.574.474 | 98,00 | 1.591.793 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Trienggadeng) |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat | Persentase Keaktifan Linmas Dalam Gampong (%) | 91,00 | 92,00 | 95,00 | 7.500.000 | 95,50 | 7.582.500 | 95,60 | 7.665.907 | 95,65 | 7.750.232 | 95,67 | 7.835.485 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Panteraja) |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat | Persentase Keaktifan Linmas Dalam Gampong (%) | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 1.000.000 | 93,00 | 1.003.570 | 94,00 | 1.017.409 | 95,00 | 1.036.472 | 96,00 | 1.055.892 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Meureudu) |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat | Persentase Keaktifan Linmas Dalam Gampong (%) | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 700.000 | 97,00 | 707.700 | 98,00 | 715.484 | 99,00 | 723.355 | 100,00 | 731.311 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Meurah Dua) |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat | Persentase Keaktifan Linmas Dalam Gampong (%) | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 1.500.000 | 97,00 | 1.516.500 | 98,00 | 1.533.181 | 99,00 | 1.550.046 | 100,00 | 1.567.097 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Jangka Buya) |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat | Persentase Keaktifan Linmas Dalam Gampong (%) | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 3.458.950 | 97,00 | 3.471.298 | 98,00 | 3.519.167 | 99,00 | 3.585.106 | 100,00 | 3.652.280 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Bandar Dua) |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat | Persentase Keaktifan Linmas Dalam Gampong (%) | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 3.250.949 | 94,00 | 3.262.554 | 95,00 | 3.307.545 | 96,00 | 3.369.519 | 96,00 | 3.432.653 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Bandar Baru) |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | **70.301.676** | | **71.074.994** | | **71.856.818** | | **72.647.240** | | **73.446.360** | |
| Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Gampong Yang Melaksanakan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (%) | 79,00 | 80,00 | 83,00 | 12.960.000 | 85,00 | 13.102.560 | 87,00 | 13.246.688 | 89,00 | 13.392.401 | 95,00 | 13.539.718 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Ulim) |
| Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Gampong Yang Melaksanakan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (%) | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 18.500.000 | 93,00 | 18.703.500 | 94,00 | 18.909.238 | 95,00 | 19.117.240 | 96,00 | 19.327.529 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Trienggadeng) |
| Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Gampong Yang Melaksanakan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (%) | 74,00 | 75,00 | 78,00 | 6.300.000 | 78,20 | 6.369.300 | 78,30 | 6.439.362 | 78,40 | 6.510.195 | 78,50 | 6.581.807 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Panteraja) |
| Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Gampong Yang Melaksanakan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (%) | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 7.541.676 | 97,00 | 7.624.634 | 98,00 | 7.708.505 | 99,00 | 7.793.298 | 100,00 | 7.879.025 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Meureudu) |
| Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Gampong Yang Melaksanakan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (%) | 91,00 | 92,00 | 95,00 | 2.000.000 | 97,00 | 2.022.000 | 98,00 | 2.044.242 | 99,00 | 2.066.728 | 100,00 | 2.089.462 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Meurah Dua) |
| Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Gampong Yang Melaksanakan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (%) | 93,00 | 94,00 | 96,00 | 5.000.000 | 97,00 | 5.055.000 | 98,00 | 5.110.605 | 99,00 | 5.166.821 | 100,00 | 5.223.656 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Jangka Buya) |
| Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Gampong Yang Melaksanakan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (%) | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 10.000.000 | 97,00 | 10.110.000 | 98,00 | 10.221.210 | 99,00 | 10.333.643 | 100,00 | 10.447.313 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Bandar Dua) |
| Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Gampong Yang Melaksanakan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (%) | 74,00 | 75,00 | 76,00 | 8.000.000 | 76,00 | 8.088.000 | 77,00 | 8.176.968 | 77,00 | 8.266.914 | 78,00 | 8.357.850 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Bandar Baru) |
| **7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | **96.587.014** | | **97.649.471** | | **98.723.612** | | **99.809.571** | | **100.907.477** | |
| Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Gampong | Persentase Gampong Dengan Pertanggungjawaban Yang Sesuai dan Tepat Waktu (%) | 89,00 | 90,00 | 93,00 | 11.997.014 | 95,00 | 12.128.981 | 97,00 | 12.262.399 | 98,00 | 12.397.286 | 100,00 | 12.533.656 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Ulim) |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Gampong | Persentase Gampong Dengan Pertanggungjawaban Yang Sesuai dan Tepat Waktu (%) | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 3.500.000 | 93,00 | 3.538.500 | 94,00 | 3.577.423 | 95,00 | 3.616.775 | 96,00 | 3.656.559 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Trienggadeng) |
| Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Gampong | Persentase Gampong Dengan Pertanggungjawaban Yang Sesuai dan Tepat Waktu (%) | 74,00 | 75,00 | 78,00 | 6.500.000 | 78,20 | 6.571.500 | 78,40 | 6.643.786 | 78,50 | 6.716.868 | 78,60 | 6.790.753 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Panteraja) |
| Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Gampong | Persentase Gampong Dengan Pertanggungjawaban Yang Sesuai dan Tepat Waktu (%) | 84,00 | 85,00 | 87,00 | 16.000.000 | 89,00 | 16.176.000 | 91,00 | 16.353.936 | 93,00 | 16.533.829 | 95,00 | 16.715.701 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Meureudu) |
| Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Gampong | Persentase Gampong Dengan Pertanggungjawaban Yang Sesuai dan Tepat Waktu (%) | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 20.500.000 | 97,00 | 20.725.500 | 98,00 | 20.953.480 | 99,00 | 21.183.968 | 100,00 | 21.416.992 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Meurah Dua) |
| Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Gampong | Persentase Gampong Dengan Pertanggungjawaban Yang Sesuai dan Tepat Waktu (%) | 94,00 | 95,00 | 95,00 | 9.590.000 | 85,00 | 9.695.490 | 98,00 | 9.802.140 | 95,00 | 9.909.963 | 100,00 | 10.018.973 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Jangka Buya) |
| Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Gampong | Persentase Gampong Dengan Pertanggungjawaban Yang Sesuai dan Tepat Waktu (%) | 79,00 | 80,00 | 81,00 | 19.500.000 | 82,00 | 19.714.500 | 83,00 | 19.931.359 | 84,00 | 20.150.604 | 85,00 | 20.372.261 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Bandar Dua) |
| Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Gampong | Persentase Gampong Dengan Pertanggungjawaban Yang Sesuai dan Tepat Waktu (%) | 74,00 | 75,00 | 76,00 | 9.000.000 | 77,00 | 9.099.000 | 78,00 | 9.199.089 | 79,00 | 9.300.278 | 79,00 | 9.402.582 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Bandar Baru) |
| **8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | **4.773.348.504** | | **4.825.855.337** | | **4.878.939.744** | | **16.818.608.080** | | **17.686.866.770** | |
| **8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **1.685.287.854** | | **1.706.177.388** | | **1.724.945.339** | | **1.743.919.738** | | **1.763.102.855** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 69,70 | 71,65 | 73,60 | 1.685.287.854 | 75,55 | 1.706.177.388 | 77,50 | 1.724.945.339 | 79,45 | 1.743.919.738 | 81,40 | 1.763.102.855 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| **8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | | | **1.597.590.000** | | **1.732.844.108** | | **1.751.905.393** | | **1.771.176.352** | | **1.790.659.292** | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%) | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 1.597.590.000 | 82,50 | 1.732.844.108 | 83,00 | 1.751.905.393 | 84,20 | 1.771.176.352 | 85,00 | 1.790.659.292 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| **8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | | | | **736.770.650** | | **744.875.127** | | **753.068.753** | | **12.647.352.509** | | **13.469.727.387** | |
| Meningkatnya etika dan budaya politik | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%) | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 736.770.650 | 73,50 | 744.875.127 | 75,00 | 753.068.753 | 77,30 | 12.647.352.509 | 80,00 | 13.469.727.387 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| **8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | | | **24.700.000** | | **24.971.700** | | **25.246.388** | | **25.524.098** | | **25.804.864** | |
| Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%) | 70,00 | 72,00 | 73,00 | 24.700.000 | 73,50 | 24.971.700 | 74,00 | 25.246.388 | 74,50 | 25.524.098 | 75,00 | 25.804.864 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| **8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | | | **50.000.000** | | **50.550.000** | | **51.106.050** | | **51.668.216** | | **52.236.566** | |
| Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 50.000.000 | 100,00 | 50.550.000 | 100,00 | 51.106.050 | 100,00 | 51.668.216 | 100,00 | 52.236.566 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| **8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI** | | | | | **679.000.000** | | **566.437.014** | | **572.667.821** | | **578.967.167** | | **585.335.806** | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan | Persentase Penurunan Angka Kriminal (%) | 70,00 | 73,00 | 75,00 | 67.000.000 | 80,00 | 67.000.000 | 80,00 | 67.000.000 | 83,00 | 67.000.000 | 83,00 | 67.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat | Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam forum kewaspadaan dini (%) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 67.200.000 | 80,00 | 67.200.000 | 80,00 | 67.200.000 | 85,00 | 67.200.000 | 90,00 | 67.200.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| Meningkatnya sinergitas dan koordinasi antar unsur Forkopimda | Tingkat kehadiran anggota Forkopimda dalam rapat koordinasi (%) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 544.800.000 | 80,00 | 432.237.014 | 80,00 | 438.467.821 | 80,00 | 444.767.167 | 90,00 | 451.135.806 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| **9.01 - KEKHUSUSAN ACEH(** | | | | | **18.972.469.274** | | **19.181.166.435** | | **19.392.159.265** | | **19.605.473.016** | | **19.821.133.220** | |
| **9.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **5.293.745.627** | | **5.351.976.828** | | **5.410.848.573** | | **5.470.367.907** | | **5.530.541.954** | |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 73,45 | 75,40 | 77,35 | 2.742.046.005 | 79,30 | 2.772.208.511 | 73,00 | 2.802.702.804 | 74,00 | 2.833.532.535 | 75,00 | 2.864.701.393 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kekhususan Aceh (DSI) |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 65,35 | 67,30 | 69,25 | 1.742.364.554 | 71,20 | 1.761.530.564 | 73,15 | 1.780.907.400 | 75,10 | 1.800.497.381 | 77,05 | 1.820.302.852 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kekhususan Aceh (MPU) |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran | Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 71,16 | 73,11 | 75,06 | 809.335.068 | 77,01 | 818.237.753 | 78,96 | 827.238.369 | 80,91 | 836.337.991 | 82,86 | 845.537.709 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kekhususan Aceh (Baitul Mal) |
| **9.01.02 - PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH** | | | | | **9.510.523.647** | | **9.615.139.407** | | **9.720.905.940** | | **9.827.835.905** | | **9.935.942.100** | |
| Meningkatnya pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah | Persentase Mesjid dan Tempat Ibadah Yang Menjalankan Fungsi Idarah, Imarah dan Riayah Sesuai Klasifikasinya (Indeks) | 80 | 81 | 82 | 9.510.523.647 | 83 | 9.615.139.407 | 84 | 9.720.905.940 | 85 | 9.827.835.905 | 86 | 9.935.942.100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kekhususan Aceh (DSI) |
| **9.01.03 - PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH** | | | | | **246.000.000** | | **248.706.000** | | **251.441.766** | | **254.207.625** | | **257.003.910** | |
| Meningkatnya peran ulama dalam pelaksanaan Syariat Islam | Persentase Fatwa Ulama yang Disosialisasikan, Persentase Kajian Keagamaan dan Persentase Peningkatan Kader Ulama (%) | 79,00 | 80,00 | 81,00 | 246.000.000 | 82,00 | 248.706.000 | 83,00 | 251.441.766 | 84,00 | 254.207.625 | 85,00 | 257.003.910 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kekhususan Aceh (MPU) |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE (2024) | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| **9.01.04 - PROGRAM BAITUL MAL** | | | | | **3.922.200.000** | | **3.965.344.200** | | **4.008.962.986** | | **4.053.061.579** | | **4.097.645.256** | |
| Meningkatnya pendapatan dari Zakat, Infaq, Wakaf dan Harta Agama Lainnya | Rasio Penyaluran Terhadap Pengumpulan Zakat, Infaq, Wakaf dan Harta Agama Lainnya (Rasio) | 83 | 85 | 90 | 3.922.200.000 | 92 | 3.965.344.200 | 95 | 4.008.962.986 | 98 | 4.053.061.579 | 99 | 4.097.645.256 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kekhususan Aceh (Baitul Mal) |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | | | | **968.362.992.852** | | **976.261.129.144** | | **989.724.829.034** | | **1.008.269.515.382** | | **1.026.814.201.728** | |

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana capaian kinerja pembangunan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Pengukuran kinerja menjadi aspek fundamental dalam memastikan bahwa proses pembangunan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan indikator kinerja yang mampu menggambarkan kemajuan dan perubahan yang terjadi sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya.

Indikator kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan berhak mengetahui sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai sasaran yang dijanjikan. Oleh karena itu, penyediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.

Dalam konteks RPJMK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025–2029, pengukuran keberhasilan pembangunan didasarkan pada sejumlah indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. IKU digunakan untuk menilai capaian terhadap tujuan dan sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode pemerintahan. Penetapan IKU dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dalam mendukung manajemen kinerja organisasi perangkat daerah serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengendalian pembangunan. Rincian indikator kinerja utama disajikan dalam Tabel 4.2.

Selain IKU, ditetapkan pula indikator kinerja daerah (IKD) sebagai bagian dari sistem pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian dari pelaksanaan program-program pembangunan daerah. IKD memberikan gambaran yang lebih teknis dan operasional mengenai keberhasilan pelaksanaan program prioritas daerah yang bersifat sektoral maupun lintas sektor. Penetapan IKD mengacu pada prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan benar-benar dapat mencerminkan kondisi kinerja secara objektif. Informasi mengenai IKD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.2.**
**Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024-2030**

| No. | INDIKATOR KINERJA | SATUAN KINERJA | 2024 (*baseline*) | TARGET CAPAIAN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1. | Indeks Pembangunan Syariat | Indeks | 83,01 | 83,44 | 83,87 | 84,30 | 84,73 | 85,16 | 85,58 | DSI Aceh |
| 2. | Dimensi Aqidah | nilai | 83,06 | 83,46 | 83,87 | 84,27 | 84,67 | 85,08 | 85,48 | DSI Aceh |
| 3. | Dimensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) | nilai | 86,40 | 86,63 | 86,86 | 87,09 | 87,32 | 87,54 | 87,77 | DSI Aceh |
| 4. | Dimensi Kepatuhan membayar Zakat di Baitul Mal | nilai | 85,19 | 85,25 | 85,30 | 85,36 | 85,41 | 85,47 | 85,52 | DSI Aceh |
| 5. | Dimensi Melek Al-Quran | nilai | 84,03 | 84,11 | 84,19 | 84,28 | 84,36 | 84,44 | 84,52 | DSI Aceh |
| 6. | Dimensi Manajemen Mesjid/Meunasah | nilai | 79,02 | 79,99 | 80,96 | 81,94 | 82,91 | 83,88 | 84,85 | DSI Aceh |
| 7. | Dimensi Hukum Jinayat | nilai | 80,13 | 81,03 | 81,93 | 82,83 | 83,72 | 84,62 | 85,52 | DSI Aceh |
| 8. | Dimensi Akhlak | nilai | 83,25 | 83,61 | 83,98 | 84,34 | 84,70 | 85,07 | 85,43 | DSI Aceh |
| 9. | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | Indeks | 53,62 | 53,98 | 54,35 | 54,72 | 55,09 | 55,46 | 56,18 | Kemendik budristek |
| 10. | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 65,04 | 66,00 | 66,80 | 67,60 | 68,40 | 69,20 | 70,00 | Kemenpan RB |
| 11. | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 2,61 | 2,62 | 2,69 | 2,73 | 2,77 | 2,81 | 2,85 | Kemenpan RB |
| 12. | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 47,17 | 49,91 | 52,73 | 55,55 | 58,36 | 61,18 | 64,00 | Kemendagri |
| 13. | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 78,61 | 79,68 | 80,75 | 81,82 | 82,89 | 83,96 | 85,03 | BKN |
| 14. | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 4,06 | 4,18 | 4,31 | 4,43 | 4,55 | 4,68 | 4,80 | Kemenpan RB |
| 15. | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Nilai | 74,550 | 76,250 | 77,898 | 79,546 | 81,193 | 82,841 | 84,489 | Kemendagri |
| 16. | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Nilai | 63,11 | 63,92 | 64,74 | 65,55 | 66,36 | 67,18 | 67,99 | Kemenpan RB |
| 17. | Nilai capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) | NIlai | 72,76 | 75,30 | 77,84 | 80,38 | 82,92 | 85,46 | 88,00 | KPK |
| 18. | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 76,39 | 76,69 | 76,99 | 77,30 | 77,60 | 77,90 | 78,20 | BPS |
| 19. | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 15,01 | 15,02 | 15,16 | 15,46 | 15,76 | 16,16 | 16,46 | BPS |
| 20. | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 58,50 | 61,25 | 64,00 | 66,75 | 69,50 | 72,25 | 75,00 | Perpusnas |
| 21. | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 73,31 | 73,46 | 73,61 | 73,76 | 73,9 | 74,05 | 74,20 | BPS |
| 22. | Prevalensi Stunting | Persen | 31,60 | 31,00 | 29,20 | 27,40 | 25,60 | 23,80 | 22,00 | SSGI |
| 23. | PDRB per kapita | Juta Rupiah | 28,38 | 29,30 | 30,21 | 31,13 | 32,04 | 32,96 | 33,87 | BPS |
| 24. | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) | Indeks | 63,67 | 64,25 | 65,40 | 66,55 | 67,70 | 68,85 | 70,00 | BKKBN |
| 25. | Indeks Kesejahteraan Sosial | Indeks | 51,96 | 52,76 | 53,56 | 54,36 | 55,16 | 55,96 | 56,76 | KEMENSOS |
| 26. | Tingkat Kemiskinan | Persen | 18,28 | 16,12 | 15,30 | 14,50 | 13,80 | 13,20 | 12,60 | BPS |
| 27. | Tingkat Inflasi daerah | Persen | 2,79 | 2,78 | 2,77 | 2,76 | 2,75 | 2,74 | 2,73 | BPS |
| 28. | Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan | Persen | 2,86 | 2,90 | 2,95 | 3,02 | 3,08 | 3,13 | 3,20 | BPS |

| No. | INDIKATOR KINERJA | SATUAN KINERJA | 2024 (*baseline*) | TARGET CAPAIAN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 29. | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 78,94 | 80,28 | 81,61 | 82,95 | 84,28 | 85,62 | 86,95 | BPN |
| 30. | Rerata Indeks Perkembangan Harga (IPH) | Indeks | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | BPS |
| 31. | Indeks Daya Saing Daerah | Indeks | 3,30 | 3,32 | 3,34 | 3,36 | 3,38 | 3,40 | 3,42 | BRIN |
| 32. | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 4,55 | 4,66 | 4,77 | 4,88 | 4,98 | 5,09 | 5,20 | BPS |
| 33. | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 3,82 | 3,80 | 3,78 | 3,77 | 3,75 | 3,73 | 3,71 | BPS |
| 34. | Indeks gini | Indeks | 0,214 | 0,213 | 0,213 | 0,212 | 0,211 | 0,211 | 0,210 | BPS |
| 35. | Indeks Desa | Indeks | 0,7097 | 0,7195 | 0,7296 | 0,7422 | 0,7550 | 0,7625 | 0,7721 | Kemendes PDTT |
| 36. | Indeks Infrastruktur daerah | Indeks | 64,20 | 66,80 | 68,64 | 70,48 | 72,32 | 74,16 | 76,00 | Dinas PU |
| 37. | Rasio Konektivitas Kabupaten | Rasio | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | DISHUB |
| 38. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 76,29 | 76,94 | 77,60 | 78,25 | 78,90 | 79,55 | 80,20 | KLHK |
| 39. | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | BNPB |
| 40. | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Indeks | 137,60 | 137,59 | 137,58 | 137,57 | 137,56 | 137,55 | 137,54 | BNPB |

**Tabel 4.3.**
**Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2030**

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **I.** | **ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI** | | | | | | | | | |
| 1. | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan | Persen | 9,67 | 9,43 | 9,18 | 8,94 | 8,69 | 8,45 | 8,20 | BPS |
| 2. | Konsumsi Listrik Per Kapita | kwh/ kapita | 450 | 580 | 620 | 710 | 800 | 1.000 | 1.200 | PLN |
| 3. | Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman | Persen | 80,82 | 82,24 | 83,67 | 85,09 | 86,51 | 87,94 | 89,36 | BPS |
| 4. | Persentase rumah tangga dengan air minum layak | Persen | 90,36 | 90,40 | 90,72 | 91,04 | 91,36 | 91,68 | 92,00 | BPS |
| 5. | Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan pokok air minum sehari-hari **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINAS PU |
| 6. | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINAS PU |
| 7. | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINAS PU |
| 8. | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas rumah yang layak huni **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINAS PU |
| 9. | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 92,30 | 92,43 | 92,57 | 92,71 | 92,85 | 92,99 | 93,13 | KLHK |
| 10. | Indeks Kualitas Air | Indeks | 63,33 | 63,34 | 63,35 | 63,37 | 63,39 | 63,40 | 63,41 | KLHK |
| 11. | Indek Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 76,67 | 77,30 | 77,94 | 78,57 | 79,21 | 79,84 | 80,47 | KLHK |
| 12. | Timbulan sampah terkelola di fasilitas pengolahan sampah | Persen | 18,22 | 21,77 | 24,17 | 26,57 | 28,97 | 31,37 | 33,77 | DLHK |
| 13. | Laju pertumbuhan penduduk | Persen | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | BPS |
| 14. | Rasio Jenis Kelamin | Angka | 100,89 | 100,93 | 100,96 | 101,00 | 101,03 | 101,07 | 101,10 | Proyeksi Penduduk (BPS) |
| 15. | Kepadatan penduduk | orang/km2 | 173,38 | 175,41 | 177,44 | 179,47 | 181,49 | 183,52 | 185,55 | BPS |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **II.** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| 1. | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 9,59 | 9,61 | 9,63 | 9,65 | 9,66 | 9,68 | 10,00 | BPS |
| 2. | Indeks Keluarga Sehat | Indeks | 0,330 | 0,340 | 0,350 | 0,360 | 0,370 | 0,380 | 0,390 | Kemenkes |
| 3. | Peningkatan jumlah kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan | Persen | 4,84 | 6,06 | 7,07 | 7,08 | 7,09 | 7,10 | 7,11 | BPJS Ketenagakerjaan |
| 4. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 92,84 | 93,38 | 93,91 | 94,45 | 94,99 | 95,52 | 96,06 | BPS |
| 5. | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,400 | 0,351 | 0,302 | 0,253 | 0,204 | 0,155 | 0,106 | BPS |
| 6. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 55,98 | 57,32 | 58,65 | 59,99 | 61,33 | 62,66 | 64,00 | BPS |
| 7. | Score Kabupaten Layak anak | Score | 320 | 450 | 501 | 550 | 575 | 601 | 620 | Kemen PPPA |
| 8. | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 64,71 | 65,26 | 65,81 | 66,36 | 66,91 | 67,46 | 68,01 | KP3A |
| 9. | Indeks Zakat Nasional | Poin Indeks | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | BAZNAS |
| 10. | Persentase Rumah Layak Huni | Persen | 72,08 | 73,28 | 74,48 | 75,68 | 76,88 | 78,08 | 79,28 | Susenas |
| 11. | Konstribusi PDRB Kab. Pidie Jaya | Persen | 1,98 | 1,99 | 2,01 | 2,03 | 2,06 | 2,08 | 2,10 | BPS |
| 12. | Jumlah Produk Tersertifikasi Halal | Produk | 35 | 50 | 70 | 100 | 140 | 185 | 255 | BPJPH |
| 13. | Pengeluaran Per kapita | Juta Rupiah | 11,274 | 11,27 | 11,55 | 11,82 | 12,09 | 12,36 | 12,63 | BPS |
| 14. | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) | Indeks | 3,11 | 3,14 | 3,17 | 3,21 | 3,25 | 3,28 | 3,30 | Bappenas |
| 15. | Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 16. | Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 17. | Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 18. | Persentase Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 19. | Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 20. | Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 21. | Persentase Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 22. | Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 23. | Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 24. | Persentase Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 25. | Persentase Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 26. | Persentase Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 27. | Angka kematian balita | Per 100.000 kelahiran hidup | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 28. | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis | Persen | 5,00 | 20,00 | 40,00 | 55,00 | 70,00 | 85,00 | 100,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 29. | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (TB) | Persen | 80,00 | 83,33 | 86,67 | 90,00 | 93,33 | 96,67 | 100,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 30. | Cakupan imunisasi bayi lengkap | Persen | 18,50 | 31,25 | 44,00 | 56,75 | 69,50 | 82,25 | 95,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 31. | Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional | Persen | 97,28 | 97,73 | 98,19 | 98,64 | 99,09 | 99,55 | 100,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 32. | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup | Persen | 60,00 | 63,33 | 66,67 | 70,00 | 73,33 | 76,67 | 80,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 33. | Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinsos P3A |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 34. | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinsos P3A |
| 35. | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinsos P3A |
| 36. | Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tua sosial di luar panti **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinsos P3A |
| 37. | Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinsos P3A |
| **III.** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | | |
| 1. | Rasio Ketergantungan | Angka | 47,86 | 47,72 | 47,57 | 47,43 | 47,29 | 47,14 | 47,00 | Proyeksi Penduduk BPS |
| 2. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Persen | 59,91 | 60,1 | 60,8 | 61,5 | 62,25 | 62,89 | 63,45 | BPS |
| 3. | Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ | Persen | 6,24 | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 6,40 | 6,50 | 6,60 | BPS |
| 4. | Persentase peningkatan Investasi | Persen | 7,25 | 8,30 | 9,54 | 10,78 | 12,02 | 13,26 | 14,50 | DPMPTSP Naker Trans |
| 5. | Persentase BUMD yang sehat | Persen | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Setdakab |
| 6. | Persentase atlit yang berprestasi dari masing-masing cabang olahraga | Persen | 66,00 | 68,00 | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 | Disporapar |
| 7. | Persentase organisasi kepemudaan yang aktif | Persen | 30,25 | 34,29 | 38,28 | 42,28 | 46,27 | 50,27 | 54,26 | Disporapar |
| 8. | Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur | Angka | 66,15 | 68,00 | 70,00 | 73,00 | 78,00 | 80,00 | 84,00 | Dinas PU |
| 9. | Persentase kesesuaian RTRW dengan pemanfaatan ruang | Persen | 80,00 | 80,20 | 84,16 | 88,12 | 92,08 | 96,04 | 100,00 | Dinas PU |
| 10. | Persentase Desa Mandiri | Persen | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | Kemendes PDTT |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **IV.** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Capaian Aksi HAM | Persen | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | Kemenham |
| 2. | Indeks Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Indeks | 45,00 | 47,00 | 50,20 | 53,40 | 56,60 | 59,80 | 63,00 | Kemendagri |
| 3. | Indeks Reformasi Hukum | Indeks | 76,86 | 76,96 | 77,16 | 77,36 | 77,56 | 77,76 | 77,96 | Kemenkum |
| 4. | Tingkat Maturitas SPIP | Nilai | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | BPKP |
| 5. | Indeks Integritas Nasional / SPI | Indeks | 75,76 | 76,47 | 77,17 | 77,88 | 78,59 | 79,29 | 80,00 | KPK |
| 6. | Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN | Indeks | 96,20 | 96,35 | 96,50 | 96,65 | 96,80 | 96,95 | 97,10 | BKN |
| 7. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 93,94 | 94,60 | 95,08 | 95,56 | 96,04 | 96,52 | 97,00 | Kemenpan RB |
| 8. | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | SATPOL PP WH |
| 9. | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BPBD |
| 10. | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BPBD |
| 11. | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BPBD |
| 12. | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BPBD |
| 13. | Persentase Qanun yang ditetapkan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sekr. DPRK |
| 14. | Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas | Nilai | - | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | Inspektorat |
| 15. | Tingkat Digitalisasi Arsip | Persen | 27,45 | 27,65 | 27,75 | 27,85 | 27,95 | 28,05 | 28,15 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 16. | Indeks Kualitas Kebijakan | Indeks | 17,81 | 68,00 | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 | Setdakab |
| 17. | Indeks Pembangunan Statistik | Indeks | 1,87 | 1,97 | 2,07 | 2,17 | 2,27 | 2,37 | 2,47 | Diskominfo |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 18. | Indeks Tata Kelola Pengadaan | Indeks | 45,29 | 45,39 | 45,49 | 45,59 | 45,69 | 45,79 | 45,89 | Setdakab |
| 19. | Indeks Sistem Merit | Indeks | 251,50 | 251,70 | 251,90 | 252,10 | 252,30 | 252,50 | 252,70 | BKPSDM |
| 20. | Opini BPK | Nilai | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | BPKK |
| 21. | Indeks BerAkhlak | Indeks | 69,22 | 69,42 | 69,62 | 69,82 | 70,02 | 70,22 | 70,42 | BKPSDM |
| 22. | Survei Penilaian Integritas | Nilai | 75,76 | 75,86 | 75,96 | 76,06 | 76,16 | 76,26 | 76,36 | Inspektorat |
| 23. | Survei Kepuasan Masyarakat | NIlai | 82,81 | 82,91 | 83,01 | 83,11 | 83,21 | 83,31 | 83,41 | Setdakab |
| 24. | Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE | Nilai | - | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | Diskominfo |
| 25. | Opini Penyelenggaraan kepatuhan pelayanan publik | Indeks | 92,44 | 92,54 | 92,64 | 92,74 | 92,84 | 92,94 | 93,04 | Ombudsman |
| | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | | | | | | | |
| **A.** | **PENDIDIKAN** | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Anak Usia 5 -6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) | Persen | 77,96 | 79,83 | 81,70 | 83,50 | 85,30 | 87,10 | 89,10 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 2. | Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS) | Persen | 99,30 | 99,40 | 99,50 | 99,60 | 99,70 | 99,80 | 100,00 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 3. | Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) | Persen | 94,30 | 95,20 | 96,10 | 97,30 | 98,20 | 99,10 | 100,00 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 4. | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal | Persen | 86,10 | 87,20 | 88,30 | 89,40 | 90,50 | 91,60 | 93,00 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 5. | Indeks Pemerataan Guru SD | Indeks | 0,71 | 0,75 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD |
| 6. | Indeks Pemerataan Guru SMP | Indeks | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,95 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD |
| 7. | Persentase Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui | Persen | 54,46 | 56,23 | 58,00 | 62,00 | 66,00 | 68,00 | 72,00 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 8. | Persentase Dayah yang Terakreditasi (bertipe) | Persen | 71,00 | 73,00 | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | PENDIDIKAN (Dayah) |
| 9. | Persentase Rekomendasi Bidang Pendidikn Yang Dikeluarkan Dan Yang Ditindaklanjuti | Persen | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | PENDIDIKAN (MPD) |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 10. | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS) **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 11. | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 12. | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) **(SPM)** | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 13. | Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional **(SPM)** | Skor | 55,02 | 57,52 | 60,02 | 62,52 | 65,02 | 67,52 | 70,02 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 14. | Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional **(SPM)** | Skor | 51,13 | 54,03 | 56,93 | 59,83 | 62,73 | 65,63 | 68,52 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 15. | Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional **(SPM)** | Skor | 60,75 | 61,85 | 62,95 | 64,05 | 65,15 | 66,25 | 67,35 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 16. | Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional **(SPM)** | Skor | 57,08 | 58,58 | 60,08 | 61,58 | 63,08 | 64,58 | 66,08 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 17. | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B | Persen | 55,28 | 55,79 | 56,30 | 59,55 | 62,55 | 64,55 | 66,55 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 18. | Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV | Persen | 74,3 | 76,32 | 78,34 | 79,36 | 80,40 | 81,50 | 84,73 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 19. | Iklim keamanan SD | Nilai | 77,34 | 78,24 | 79,14 | 80,04 | 80,94 | 81,84 | 82,74 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 20. | Iklim keamanan SMP | Nilai | 67,06 | 68,56 | 70,06 | 71,56 | 73,06 | 74,56 | 76,06 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 21. | Iklim kebhinekaan SD | Nilai | 70,82 | 71,82 | 72,82 | 73,83 | 74,82 | 75,82 | 76,82 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 22. | Iklim kebinekaan SMP | Nilai | 66,47 | 67,47 | 68,47 | 69,47 | 70,47 | 71,47 | 72,47 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 23. | Iklim inklusivitas SD | Nilai | 62,39 | 64,89 | 67,39 | 69,89 | 72,39 | 74,89 | 77,39 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |
| 24. | Iklim inklusivitas SMP | Nilai | 56,14 | 58,54 | 60,94 | 63,34 | 65,74 | 68,14 | 70,54 | PENDIDIKAN (DISDIKBUD) |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **B** | **KESEHATAN** | | | | | | | | | |
| 1. | Angka Kematian Ibu (AKI) | /100.000 kelahiran hidup | 173 | 172 | 163 | 140 | 110 | 93 | 70 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 2. | Angka Kematian Bayi (AKB) | /1.000 kelahiran hidup | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 3. | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita | Persen | 31,60 | 31,00 | 29,20 | 27,40 | 25,60 | 23,80 | 22,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 4. | Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 5. | Indek Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan RSUD Pidie Jaya | Persen | 83,00 | 85,00 | 87,00 | 90,00 | 92,00 | 95,00 | 96,00 | KESEHATAN (RSUD) |
| 6. | Persentase ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar di pelayanan kesehatan milik daerah | Persen | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 94,00 | 96,00 | 98,00 | 100,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 7. | Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi syarat | Persen | 83,00 | 85,00 | 87,00 | 90,00 | 92,00 | 95,00 | 97,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 8. | Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat | Persen | 83,00 | 85,00 | 87,00 | 90,00 | 92,00 | 95,00 | 97,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| 9. | Persentase desa siaga aktif | Persen | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 88,00 | 90,00 | KESEHATAN (Dinkes KB) |
| **C.** | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase pengelolaan daerah irigasi dalam kondisi baik | Persen | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 47,00 | 48,00 | 49,00 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2. | Persentase Akses Rumah tangga perkotaan terhadap akses air minum perpipaan | Persen | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 3. | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan di daerah kab/kota | Persen | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | 17,00 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 4. | Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Layak dan Aman | Persen | 22,00 | 22,50 | 23,00 | 23,50 | 24,00 | 24,50 | 25,00 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 5. | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | Persen | 23,50 | 24,00 | 24,50 | 25,00 | 25,50 | 26,00 | 26,50 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 6. | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik | Persen | 48,00 | 49,00 | 50,00 | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 54,00 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 7. | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik | Persen | 58,00 | 60,00 | 62,00 | 64,00 | 66,00 | 68,00 | 70,00 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 8. | Persentase Peningkatan Penataan Bangunan dan Lingkungan | Persen | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 9. | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten | Persen | 39,00 | 39,50 | 40,00 | 40,50 | 41,00 | 41,50 | 42,00 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 10. | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Persen | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 11. | Persentase Perwujudan terhadap rencana tata ruang | Persen | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| **D.** | **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. | Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. | Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani | Persen | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 47,00 | 48,00 | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 4. | Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | Persen | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 47,00 | 48,00 | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 5. | Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) | Persen | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 47,00 | 48,00 | 49,00 | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 6. | Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU | Persen | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| **E.** | **KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan | Persen | 89,90 | 90,00 | 90,10 | 90,20 | 90,30 | 90,40 | 90,50 | TRANTIBUM LINMAS (Satpol PP dan WH) |
| 2. | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas | Persen | 82,60 | 83,30 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | TRANTIBUM LINMAS (Satpol PP dan WH) |
| 3. | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat | Persen | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 52,00 | 53,00 | 54,00 | 55,00 | TRANTIBUM LINMAS (Satpol PP dan WH) |
| 4. | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | Persen | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | TRANTIBUM LINMAS (BPBD) |
| 5. | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | Persen | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | TRANTIBUM LINMAS (BPBD) |
| 6. | Persentase Penanganan Pasca Bencana | Persen | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | TRANTIBUM LINMAS (BPBD) |
| 7. | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran | Persen | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | TRANTIBUM LINMAS (BPBD) |
| 8. | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Persen | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | TRANTIBUM LINMAS (BPBD) |
| **F.** | **SOSIAL** | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti | Persen | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | SOSIAL |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 2. | Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar | Persen | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | SOSIAL |
| 3. | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial | Persen | 10,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | SOSIAL |
| 4. | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani | Persen | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | SOSIAL |
| 5. | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti | Persen | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 30,00 | 35,00 | SOSIAL |
| 6. | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti | Persen | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 30,00 | 35,00 | SOSIAL |
| 7. | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti | Persen | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 30,00 | 35,00 | SOSIAL |
| 8. | Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti | Persen | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 30,00 | 35,00 | SOSIAL |
| 9. | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti | Persen | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 12,00 | SOSIAL |
| 10. | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar | Persen | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | SOSIAL |
| 11. | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi | Persen | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | SOSIAL |
| 12. | Persentase Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin | Persen | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | SOSIAL |
| 13. | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan | Persen | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | SOSIAL |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| | Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan | | | | | | | | | |
| 14. | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | Persen | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 91,00 | 93,00 | 95,00 | SOSIAL |
| **G.** | **TENAGA KERJA** | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Rencana Tenaga Kerja yang disusun | Persen | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00 | TENAGA KERJA |
| 2. | Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya | Persen | 10,00 | 20,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | TENAGA KERJA |
| 3. | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri | Persen | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | TENAGA KERJA |
| 4. | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma dan Hak-Hak Pekerja dalam hubungan Industrial dan jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan | Perusahaan | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 75 | TENAGA KERJA |
| **H.** | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | Persen | 28,00 | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | Persen | 58,00 | 60,00 | 62,00 | 65,00 | 67,00 | 68,00 | 70,00 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 3. | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persen | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 87,00 | 90,00 | 92,00 | 95,00 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 4. | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar | Persen | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 17,00 | 18,00 | 20,00 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 5. | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan | Persen | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 72,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 6. | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | Indeks | 61,78 | 60,23 | 58,68 | 56,34 | 53,86 | 50,72 | 48,98 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 7. | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persen | 67,00 | 70,00 | 73,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 82,00 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 8. | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | Indeks | 71,98 | 80,22 | 88,46 | 86,51 | 85,47 | 83,28 | 82,44 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| **I.** | **PANGAN** | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Jumlah Cadangan Pangan | Persen | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | PANGAN |
| 2. | Skor Pola Pangan Harapan | Skor | 82,23 | 82,45 | 82,67 | 82,89 | 83,10 | 83,32 | 83,54 | PANGAN |
| 3. | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | Persen | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | PANGAN |
| 4. | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan | Persen | 73,33 | 73,33 | 73,33 | 73,33 | 73,33 | 73,33 | 73,33 | PANGAN |
| **J.** | **PERTANAHAN** | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu | Persen | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 88,00 | 90,00 | PERTANAHAN |
| 2. | Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi | Persen | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 58,00 | 63,00 | 68,00 | 75,00 | PERTANAHAN |
| 3. | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | Persen | 80,00 | 83,00 | 85,00 | 87,00 | 89,00 | 93,00 | 95,00 | PERTANAHAN |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 4. | Persentase Tanah Kosong yang Dikelola | Persen | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 79,00 | 83,00 | 85,00 | 89,00 | PERTANAHAN |
| 5. | Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah | Persen | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 74,00 | 78,00 | 82,00 | 85,00 | PERTANAHAN |
| 6. | Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah | Persil | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 33,00 | PERTANAHAN |
| 7. | Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah | Dokumen | 25,00 | 40,00 | 63,00 | 70,00 | 79,00 | 82,00 | 85,00 | PERTANAHAN |
| 8. | Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya | Persen | 43,00 | 50,00 | 57,00 | 68,00 | 76,00 | 85,00 | 89,00 | PERTANAHAN |
| 9. | Persentase Informasi Petanahanan yang Dimanfaatkan | Persen | 44,00 | 50,00 | 56,00 | 71,00 | 80,00 | 87,00 | 87,00 | PERTANAHAN |
| 10. | Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan | Persen | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 39,00 | 42,00 | 45,00 | PERTANAHAN |
| **K.** | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti | Persen | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 | LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | Indeks Kualitas Air | Indeks | 63,33 | 63,34 | 63,35 | 63,37 | 63,39 | 63,40 | 63,41 | LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 92,27 | 92,30 | 92,33 | 92,35 | 92,36 | 92,38 | 92,39 | LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Persen | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | LINGKUNGAN HIDUP |
| 5. | Persentase Limbah B3 yang Terkelola | Persen | 53,00 | 55,00 | 57,00 | 60,00 | 63,00 | 66,00 | 70,00 | LINGKUNGAN HIDUP |
| 6. | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH | Persen | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 80,00 | LINGKUNGAN HIDUP |
| 7. | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya | Persen | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | LINGKUNGAN HIDUP |
| 8. | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | Indeks | 25,10 | 35,40 | 53,70 | 60,80 | 35,00 | 68,30 | 75,40 | LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **L.** | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital | Persen | 3,50 | 5,00 | 20,00 | 25,00 | 26,00 | 26,50 | 26,70 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | Persentase Perekaman KTP Elektronik | Persen | 98,25 | 99,00 | 99,10 | 99,15 | 99,20 | 99,23 | 99,28 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3. | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | Persen | 65,00 | 65,50 | 66,00 | 66,30 | 66,80 | 67,00 | 67,35 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4. | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 5. | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persen | 97,97 | 98,15 | 98,20 | 98,27 | 98,30 | 98,34 | 98,36 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 6. | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 7. | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 8. | Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 9. | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| **M.** | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1. | Persentase Fasilitasi Penataan Desa | Persen | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2. | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa | Persen | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 3. | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 4. | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 5. | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | Persen | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 6. | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | Persen | 38,00 | 40,00 | 43,00 | 48,00 | 50,00 | 55,00 | 58,00 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| **N.** | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | |
| 1. | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) | Angka | 2,36 | 2,35 | 2,34 | 2,34 | 2,33 | 2,20 | 2,10 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |
| 2. | Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | Angka | 8,20 | 8,10 | 8,00 | 7,90 | 7,80 | 7,70 | 7,60 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |
| 3. | Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Angka | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 65,00 | 68,00 | 70,00 | 72,00 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |
| 4. | Persentase PUS yang ingin ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) | Persen | 15,70 | 14,70 | 13,70 | 12,60 | 11,50 | 11,00 | 10,00 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |
| 5. | Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KKK) (BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Persen | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 73,00 | 76,00 | 78,00 | 80,00 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |
| 6. | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | 63,67 | 64,25 | 65,40 | 66,55 | 67,70 | 68,85 | 70,00 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 7. | Demand Satisfied | Persen | 79,30 | 80,60 | 81,90 | 83,10 | 84,10 | 84,90 | 85,70 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |
| 8. | KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) | Persen | 6,70 | 6,00 | 5,30 | 4,80 | 4,50 | 4,30 | 4,20 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |
| 9. | IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) | Angka | 65,80 | 66,90 | 68,00 | 68,90 | 69,90 | 70,70 | 71,60 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |
| 10. | Indeks Lansia Berdaya | Angka | 67,30 | 68,20 | 69,10 | 69,90 | 70,80 | 71,60 | 72,40 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |
| 11. | Indeks Pengasuhan Remaja | Angka | 85,00 | 86,10 | 87,20 | 88,30 | 89,30 | 90,20 | 91,00 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |
| 12. | Proporsi Kampung KB Mandiri | Persen | 96,10 | 97,90 | 99,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |
| **O.** | **PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas | Persen | 29,53 | 27,84 | 26,15 | 25,24 | 24,35 | 23,37 | 22,00 | PERHUBUNGAN |
| **P.** | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas | Persen | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) | Nilai | 30,74 | 32,00 | 33,26 | 33,62 | 33,82 | 44,00 | 44,56 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 3 | Indeks SPBE | Indeks | 2,61 | 2,65 | 2,69 | 2,73 | 2,77 | 2,81 | 2,85 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| **Q.** | **KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | |
| 1. | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | Persen | -1,24 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |
| 2. | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persen | 13,18 | 14,55 | 11,54 | 13,57 | 14,71 | 15,84 | 16,97 | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |
| 3. | Persentase Koperasi Aktif | Persen | 50,00 | 51,82 | 30,1 | 32,13 | 34,16 | 35,75 | 38,46 | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |
| 4. | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan | Persen | 12,01 | 13,03 | 14,50 | 15,60 | 16,75 | 17,80 | 18,80 | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 5. | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | Persen | 6,80 | 7,10 | 7,75 | 8,85 | 10,50 | 11,75 | 14,80 | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |
| 6. | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha | Persen | 41,10 | 43,30 | 45,40 | 47,50 | 49,60 | 51,70 | 53,80 | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |
| 7. | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | Persen | 0,91 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,60 | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |
| 8. | Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam | Persen | 31,82 | 36,36 | 36,36 | 40,91 | 40,91 | 45,40 | 45,50 | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |
| **R.** | **PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | |
| 1 | Realisasi Total terhadap Target Investasi | Persen | 15,00 | 20,00 | 35,00 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | PENANAMAN MODAL |
| 2 | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | Persen | 15,00 | 20,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | PENANAMAN MODAL |
| 3 | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | Persen | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 90,00 | 92,00 | PENANAMAN MODAL |
| 4 | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | Persen | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 85,00 | PENANAMAN MODAL |
| 5 | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | Persen | 77,00 | 80,00 | 83,00 | 85,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | PENANAMAN MODAL |
| **S.** | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Wirausaha Pemuda | Rasio | 28,29 | 34,29 | 40,29 | 46,29 | 50,29 | 56,29 | 64,29 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2 | Persentase Atlet yang Masuk PELATDA | Persen | 66,00 | 68,00 | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3 | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan | Persen | 43,00 | 46,00 | 49,00 | 52,00 | 56,00 | 61,00 | 67,00 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| **T.** | **STATISTIK** | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Indeks | 1,87 | 2,60 | 2,90 | 3,00 | 3,30 | 3,50 | 3,50 | STATISTIK |
| **U.** | **PERSANDIAN** | | | | | | | | | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Persen | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | PERSANDIAN |
| **V.** | **KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | Persen | 64,00 | 68,00 | 72,00 | 78,00 | 82,00 | 93,00 | 100,00 | KEBUDAYAAN |
| 2 | Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan | Persen | 77,00 | 81,00 | 85,00 | 88,00 | 92,00 | 96,00 | 100,00 | KEBUDAYAAN |
| 3 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal | Persen | 10,00 | 16,00 | 33,00 | 50,00 | 66,00 | 83,00 | 100,00 | KEBUDAYAAN |
| 4 | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan | Persen | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | KEBUDAYAAN |
| 5 | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan | Persen | 42,30 | 42,80 | 43,30 | 43,60 | 43,90 | 44,00 | 44,20 | KEBUDAYAAN |
| 6 | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum | Persen | 1,40 | 2,30 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 5,60 | 6,40 | KEBUDAYAAN |
| 7 | Persentase Pelestarian Adat Istiadat Daerah | Persen | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 85,00 | KEBUDAYAAN (MAA) |
| **W.** | **PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Nilai | 75,50 | 76,00 | 76,50 | 77,00 | 77,50 | 78,00 | 78,50 | PERPUSTAKAAN |
| 2 | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki | Persen | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | PERPUSTAKAAN |
| **X.** | **KEARSIPAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat Ketersediaan Arsip | Persen | 24,10 | 25,20 | 26,30 | 27,00 | 28,10 | 29,50 | 31,60 | KEARSIPAN |
| 2 | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Persen | 19,30 | 20,30 | 21,30 | 22,30 | 23,50 | 24,50 | 26,50 | KEARSIPAN |
| 3 | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Persen | 10,00 | 60,00 | 62,00 | 63,00 | 65,00 | 67,00 | 68,00 | KEARSIPAN |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **Y.** | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | ton/ tahun | 15.700 | 15.900 | 16.100 | 16.583 | 17.060 | 17592 | 18471 | KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 2 | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | ton/ tahun | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.810 | 16.126 | 16.448 | 16.776 | KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3 | Luasan Kawasan Konservasi | Persen | 10,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 4 | Angka Konsumsi Ikan | Angka | 46,00 | 48,00 | 50,00 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| **Z.** | **PARIWISATA** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan | Persen | 42,00 | 45,00 | 48,00 | 50,00 | 53,00 | 55,00 | 60,00 | PARIWISATA |
| 2 | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata | Persen | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 | PARIWISATA |
| 3 | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual | Persen | 10,00 | 23,00 | 27,00 | 32,00 | 37,00 | 43,00 | 56,00 | PARIWISATA |
| 4 | Persentase peran masyarakat dalam peningkatan ekonomi bidang pariwisata | Persen | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 | 37,00 | 45,00 | 53,00 | PARIWISATA |
| **AA.** | **PERTANIAN** | | | | | | | | | |
| 1. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Gabah) | Ton | 94.800 | 95.000 | 95.500 | 96.000 | 96.500 | 97.000 | 97.500 | PERTANIAN (DISTANPANGAN) |
| 2. | Peningkatan Populasi Ternak | Persen | 3,20 | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,23 | 3,24 | 3,25 | PERTANIAN (DISBUNNAK) |
| 3. | Peningkatan Produksi Daging | Persen | 5,0 | 5,05 | 5,05 | 5,10 | 5,15 | 5,20 | 5,25 | PERTANIAN (DISBUNNAK) |
| 4. | Peningkatan Produksi Telur | Persen | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | PERTANIAN (DISBUNNAK) |
| 5. | Peningkatan Produksi Perkebunan | Persen | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | PERTANIAN (DISBUNNAK) |
| 6. | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B | Hektar | 8.505,3 | 8.505,3 | 8.505,3 | 8.505,3 | 8.505,3 | 8.505,3 | 8.505,3 | PERTANIAN (DISTANPANGAN) |
| 7. | Persentase Peningkatan Prasarana peternakan dalam kondisi Baik | Persen | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | PERTANIAN (DISBUNNAK) |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 8. | Jumlah Lahan Produktif | Hektar | 25.628 | 25.628 | 25.678 | 25.718 | 25.748 | 25.718 | 25.778 | PERTANIAN (DISBUNNAK) |
| 9. | Tingkat Pelayanan Kesehatan Hewan | Persen | 99,57 | 99,57 | 99,65 | 99,75 | 99,85 | 99,95 | 100,00 | PERTANIAN (DISBUNNAK) |
| 10. | Persentase Penanggulangan Penyakit Tanaman | Persen | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | PERTANIAN (DISBUNNAK) |
| 11. | Persentase Penanggulangan Penyakit Tanaman | Persen | 75,00 | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00 | PERTANIAN (DISTANPANGAN) |
| 12. | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan | Persen | 85,00 | 85,00 | 87,00 | 90,00 | 93,00 | 95,00 | 97,00 | PERTANIAN (DISTANPANGAN) |
| 13. | Persentase Peningkatan Score Kelompok Tani | Persen | 63,80 | 63,80 | 68,07 | 68,60 | 69,13 | 69,67 | 70,20 | PERTANIAN (DISTANPANGAN) |
| **AB.** | **PERDAGANGAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya | Persen | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 32,00 | 35,00 | PERDAGANGAN |
| 2 | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PERDAGANGAN |
| 3 | Nilai Ekspor Barang | Juta Rupiah | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | PERDAGANGAN |
| 4 | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PERDAGANGAN |
| 5 | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan | Persen | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | PERDAGANGAN |
| **AC.** | **PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri | Persen | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | PERINDUSTRIAN |
| 2 | Persentase Usaha Industri yang terdaftar dalam aplikasi SIINas | Persen | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | PERINDUSTRIAN |
| 3 | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PERINDUSTRIAN |
| **AD.** | **TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan | Persen | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | TRANSMIGRASI |
| 2 | Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang | Persen | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | TRANSMIGRASI |
| 3 | Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan | Persen | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00 | TRANSMIGRASI |
| **AE.** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | |
| 1 | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persen | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 95,00 | 95,00 | 96,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2 | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | Persen | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| **AF.** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | |
| 1 | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N | Tepat Waktu /Tidak | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | SEKR. DPRK |
| 2 | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N | Persen | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 95,00 | SEKR. DPRK |
| 3 | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persen | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 95,00 | SEKR. DPRK |
| **AG.** | **PERENCANAAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | Persen | 89,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | PERENCANAAN |
| 2 | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PERENCANAAN |
| 3 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PERENCANAAN |
| 4 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persen | 92,00 | 93,00 | 93,00 | 94,00 | 94,00 | 95,00 | 95,00 | PERENCANAAN |
| 5 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA | Persen | 92,00 | 93,00 | 93,00 | 94,00 | 94,00 | 95,00 | 95,00 | PERENCANAAN |
| **AH.** | **KEUANGAN** | | | | | | | | | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1. | Persentase Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik (%) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KEUANGAN |
| 2. | Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (%) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KEUANGAN |
| 3. | Persentase penurunan SILPA (%) | Persen | 3,00 | 2,83 | 2,67 | 2,50 | 2,33 | 2,17 | 2,00 | KEUANGAN |
| 4. | Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar (%) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KEUANGAN |
| 5. | Persentase laporan keuangan tepat waktu (%) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KEUANGAN |
| 6. | Persentase penyediaan dukungan administrasi, pengelolaan data dan analisis informasi yang akurat dan tepat waktu (%) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KEUANGAN |
| 7. | Persentase pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah yang terlaksana sesuai standar dan tepat waktu (%) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KEUANGAN |
| 8. | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%) | Persen | 10,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | KEUANGAN |
| 9. | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) | Persen | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | KEUANGAN |
| 10. | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (%) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KEUANGAN |
| 11. | Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital (%) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KEUANGAN |
| **AI.** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi | Persen | 95,25 | 95,72 | 96,19 | 97,13 | 98,07 | 99,01 | 99,95 | KEPEGAWAIAN |
| 2 | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | Persen | 34,70 | 39,26 | 44,26 | 53,81 | 63,37 | 72,92 | 82,48 | KEPEGAWAIAN |
| 3 | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya | Persen | 95,12 | 95,60 | 96,09 | 97,06 | 98,03 | 99,00 | 99,97 | KEPEGAWAIAN |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 4 | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik | Persen | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 99,99 | KEPEGAWAIAN |
| **AJ.** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional | Persen | 13,31 | 15,21 | 17,11 | 20,91 | 24,71 | 28,51 | 32,31 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 2 | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan | Persen | 26,67 | 33,57 | 40,47 | 54,27 | 68,07 | 81,87 | 95,67 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 3 | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi | Persen | 5,55 | 9,90 | 14,25 | 22,95 | 31,65 | 40,35 | 49,05 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 4 | Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis | Persen | 34,70 | 39,50 | 44,30 | 53,90 | 63,50 | 73,10 | 82,70 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| **AK.** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 2 | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 3 | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 4 | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 6 | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 7 | Potensi Unggulan Daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 8 | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 9 | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| **AL.** | **PENGAWASAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | Persen | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 83,00 | 84,00 | 84,00 | 85,00 | PENGAWASAN |
| 2 | Maturitas Penyelenggaraa n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,40 | PENGAWASAN |
| 3 | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Nilai | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | PENGAWASAN |
| **AM.** | **KECAMATAN** | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Masyarakat Yang Terlayani | Persen | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 95,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | Kecamatan Ulim |
| 2. | Persentase Masyarakat Yang Terlayani | Persen | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | Kecamatan Trienggadeng |
| 3. | Persentase Masyarakat Yang Terlayani | Persen | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 89,20 | 89,25 | Kecamatan Panteraja |
| 4. | Persentase Masyarakat Yang Terlayani | Persen | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | Kecamatan Meureudu |
| 5. | Persentase masyarakat yang terlayani | Persen | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | Kecamatan Meurah Dua |
| 6. | Persentase Masyarakat Yang Terlayani | Persen | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | Kecamatan Jangka Buya |
| 7. | Persentase masyarakat yang terlayani | Persen | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | Kecamatan Bandar Dua |
| 8. | Persentase masyarakat yang terlayani | Persen | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | Kecamatan Bandar Baru |
| 9. | Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong | Persen | 79,00 | 80,00 | 85,00 | 87,00 | 90,00 | 95,00 | 98,00 | Kecamatan Ulim |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 10. | Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong | Persen | 79,00 | 80,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 90,00 | Kecamatan Trienggadeng |
| 11. | Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong | Persen | 64,00 | 65,00 | 67,00 | 68,00 | 69,00 | 69,20 | 69,25 | Kecamatan Panteraja |
| 12. | Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong | Persen | 91,00 | 92,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 100,00 | Kecamatan Meureudu |
| 13. | Persentase peran serta masyarakat dalam pembangunan Gampong | Persen | 92,00 | 93,00 | 95,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | Kecamatan Meurah Dua |
| 14. | Persentase peran serta masyarakat dalam pembangunan Gampong | Persen | 94,00 | 95,00 | 95,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | Kecamatan Jangka Buya |
| 15. | Persentase peran serta masyarakat dalam pembangunan Gampong | Persen | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | Kecamatan Bandar Dua |
| 16. | Persentase peran serta masyarakat dalam pembangunan Gampong | Persen | 64,00 | 65,00 | 66,00 | 67,00 | 68,00 | 69,00 | 69,00 | Kecamatan Bandar Baru |
| 17. | Persentase Keaktifan Linmas Dalam Gampong | Persen | 91,00 | 92,00 | 94,00 | 95,00 | 97,00 | 98,00 | 100,00 | Kecamatan Ulim |
| 18. | Persentase Keaktifan Linmas Dalam Gampong | Persen | 91,00 | 92,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | Kecamatan Trienggadeng |
| 19. | Persentase Keaktifan Linmas Dalam Gampong | Persen | 91,00 | 92,00 | 95,00 | 95,50 | 95,60 | 95,65 | 95,67 | Kecamatan Panteraja |
| 20. | Persentase Keaktifan Linmas Dalam Gampong | Persen | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | Kecamatan Meureudu |
| 21. | Persentase keaktifan Linmas dalam Gampong | Persen | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | Kecamatan Meurah Dua |
| 22. | Persentase keaktifan Linmas dalam Gampong | Persen | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | Kecamatan Jangka Buya |
| 23. | Persentase keaktifan Linmas dalam Gampong | Persen | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | Kecamatan Bandar Dua |
| 24. | Persentase keaktifan Linmas dalam Gampong | Persen | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 96,00 | Kecamatan Bandar Baru |
| 25. | Persentase Gampong Yang Melaksanakan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | Persen | 79,00 | 80,00 | 83,00 | 85,00 | 87,00 | 89,00 | 95,00 | Kecamatan Ulim |
| 26. | Persentase Gampong Yang Melaksanakan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | Persen | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | Kecamatan Trienggadeng |
| 27. | Persentase Gampong Yang Melaksanakan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | Persen | 74,00 | 75,00 | 78,00 | 78,20 | 78,30 | 78,40 | 78,50 | Kecamatan Panteraja |
| 28. | Persentase Gampong Yang Melaksanakan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | Persen | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | Kecamatan Meureudu |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 29. | Persentase Gampong yang melaksanakan nilai-nilai luhur Budaya bangsa | Persen | 91,00 | 92,00 | 95,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | Kecamatan Meurah Dua |
| 30. | Persentase Gampong yang melaksanakan nilai-nilai luhur Budaya bangsa | Persen | 93,00 | 94,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | Kecamatan Jangka Buya |
| 31. | Persentase Gampong yang melaksanakan nilai-nilai luhur Budaya bangsa | Persen | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | Kecamatan Bandar Dua |
| 32. | Persentase Gampong yang melaksanakan nilai-nilai luhur Budaya bangsa | Persen | 74,00 | 75,00 | 76,00 | 76,00 | 77,00 | 77,00 | 78,00 | Kecamatan Bandar Baru |
| 33. | Persentase Gampong Dengan Pertanggungjawaban Yang Sesuai dan Tepat Waktu | Persen | 89,00 | 90,00 | 93,00 | 95,00 | 97,00 | 98,00 | 100,00 | Kecamatan Ulim |
| 34. | Persentase Gampong Dengan Pertanggungjawaban Yang Sesuai dan Tepat Waktu | Persen | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | Kecamatan Trienggadeng |
| 35. | Persentase Gampong Dengan Pertanggungjawaban Yang Sesuai dan Tepat Waktu | Persen | 74,00 | 75,00 | 78,00 | 78,20 | 78,40 | 78,50 | 78,60 | Kecamatan Panteraja |
| 36. | Persentase Gampong Dengan Pertanggungjawaban Yang Sesuai dan Tepat Waktu | Persen | 84,00 | 85,00 | 87,00 | 89,00 | 91,00 | 93,00 | 95,00 | Kecamatan Meureudu |
| 37. | Persentase Gampong Dengan Pertanggungjawaban Yang Sesuai dan Tepat Waktu | Persen | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | Kecamatan Meurah Dua |
| 38. | Persentase Gampong Dengan Pertanggungjawaban Yang Sesuai dan Tepat Waktu | Persen | 94,00 | 95,00 | 95,00 | 85,00 | 98,00 | 95,00 | 100,00 | Kecamatan Jangka Buya |
| 39. | Persentase Gampong Dengan Pertanggungjawaban Yang Sesuai dan Tepat Waktu | Persen | 79,00 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | 85,00 | Kecamatan Bandar Dua |
| 40. | Persentase Gampong Dengan Pertanggungjawaban Yang Sesuai dan Tepat Waktu | Persen | 74,00 | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 79,00 | Kecamatan Bandar Baru |
| **AN.** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | |
| 1 | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persen | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 82,50 | 83,00 | 84,20 | 85,00 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2 | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik | Persen | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 73,50 | 75,00 | 77,30 | 80,00 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Satuan Kinerja | Beseline (2024) | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 3 | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 70,00 | 72,00 | 73,00 | 73,50 | 75,00 | 74,00 | 75,00 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4 | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5 | Persentase Penurunan Angka Kriminal | Persen | 70,00 | 73,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 83,00 | 83,00 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6 | Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat | Persen | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 7 | Meningkatnya sinergitas dan koordinasi antar unsur Forkopimda | Persen | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **AO.** | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Mesjid dan Tempat Ibadah Yang Menjalankan Fungsi Idarah, Imarah dan Riayah Sesuai Klasifikasinya | Indeks | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | KEKHUSUSAN ACEH (DSI) |
| 2 | Persentase Fatwa Ulama yang Disosialisasikan, Persentase Kajian Keagamaan dan Persentase Peningkatan Kader Ulama | Persen | 79,00 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | 85,00 | KEKHUSUSAN ACEH (MPU) |
| 3 | Rasio Penyaluran Terhadap Pengumpulan Zakat, Infaq, Wakaf dan Harta Agama Lainnya. | RASIO | 83 | 85 | 90 | 92 | 95 | 98 | 99 | KEKHUSUSAN ACEH (BAITUL MAL) |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang berisi arah kebijakan pembangunan, strategi pencapaian, kerangka pendanaan, dan indikator kinerja sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya terpilih, serta sebagai tindak lanjut dari amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025–2029 memuat secara komprehensif maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, gambaran umum kondisi daerah, isu-isu strategis, visi dan misi pembangunan daerah, arah kebijakan, strategi dan program prioritas, serta indikator kinerja pembangunan yang menjadi dasar pengukuran pencapaian sasaran pembangunan lima tahunan. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra-SKPK) serta Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) setiap tahunnya.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMK ini sangat ditentukan oleh dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga swadaya masyarakat. Komitmen dan partisipasi aktif semua pihak merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Pidie Jaya: “Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya yang Bersyariat, Berkeadilan, Maju, dan Berkelanjutan”, sebagai arah utama pembangunan jangka menengah yang berdimensi islami, sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan.

## 5.1 Pedoman Transisi

Dalam hal periode pelaksanaan RPJMK Tahun 2025–2029 telah berakhir dan dokumen RPJMK untuk periode berikutnya belum ditetapkan, maka RPJMK ini dapat digunakan sebagai pedoman pada masa transisi. Program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen ini tetap dapat dijalankan sampai tersusunnya dokumen RPJMK baru. Evaluasi atas capaian target-target pembangunan selama periode ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan

perencanaan pada periode selanjutnya. Hal ini penting guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mencegah kekosongan arah kebijakan dan program pembangunan.

### 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan RPJMK Tahun 2025–2029 secara konsisten, akuntabel, dan terintegrasi, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap Dinas, Badan, dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya wajib melaksanakan program-program yang tercantum dalam RPJMK Tahun 2025–2029 secara optimal, efektif, dan bertanggung jawab.
2. Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPK) yang berpedoman pada RPJMK Tahun 2025–2029, dengan memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Dokumen RPJMK Tahun 2025–2029 dijabarkan secara tahunan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap SKPK.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya bertanggung jawab melakukan fasilitasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMK ke dalam Renstra-SKPK dan RKPK. Selain itu, Bappeda juga bertugas memastikan sinergi dan harmonisasi antara perencanaan tingkat kabupaten dan perencanaan pembangunan gampong, serta melakukan pembinaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan di tingkat gampong agar sejalan dengan arah pembangunan daerah.

Dengan komitmen dan pelaksanaan yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan, RPJMK Pidie Jaya Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pedoman yang kokoh dalam pembangunan daerah, sekaligus menjawab tantangan masa depan dalam mewujudkan masyarakat Pidie Jaya yang sejahtera, Islami, dan berdaya saing tinggi.

### 5.3 Analisis Manajemen Resiko

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2025–2029, terdapat potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena

itu, diperlukan analisis manajemen risiko sebagai bagian integral dari strategi pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Secara umum, risiko yang diidentifikasi dalam pelaksanaan RPJMK meliputi risiko kebijakan, risiko fiskal, risiko sosial, risiko lingkungan, serta risiko kelembagaan. Risiko kebijakan dapat terjadi akibat perubahan arah kebijakan nasional atau regional yang tidak sejalan dengan rencana pembangunan daerah. Risiko fiskal muncul akibat keterbatasan kapasitas pendanaan, ketergantungan terhadap transfer pusat, serta kemungkinan ketidaksesuaian antara proyeksi pendapatan dan realisasi anggaran. Risiko sosial termasuk potensi konflik sosial, rendahnya partisipasi masyarakat, dan resistensi terhadap perubahan. Sementara itu, risiko lingkungan mencakup bencana alam, degradasi ekosistem, dan dampak perubahan iklim. Risiko kelembagaan terkait dengan rendahnya kapasitas aparatur, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan sistem informasi dan pengawasan.

Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya akan menerapkan prinsip manajemen risiko berbasis tata kelola yang baik (*good governance*), dengan pendekatan antisipatif, adaptif, dan kolaboratif. Upaya mitigasi dilakukan melalui penguatan kapasitas fiskal daerah, diversifikasi sumber pendanaan, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta penguatan kelembagaan dan SDM aparatur. Selain itu, peningkatan peran serta masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah akan menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan risiko.

Dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses pelaksanaan dan pengendalian RPJMK, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga akan memperkuat ketahanan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menghadapi ketidakpastian dan dinamika pembangunan ke depan.

BUPATI PIDIE JAYA

SIBRAL MALASYI MA

# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
# BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
# TAHUN 2025

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA - COT TRIENG
Telp/Fax. (0653) 51416 Kode Pos 24186 Meureudu
e-mail : bappedapijay@gmail.com
website : bappeda.pidiejayakab.go.id